



BUPATI BULUKUMBA

2020

**PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2021**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Srikaya No. 2 Bulukumba Tlp.(0413) 81070

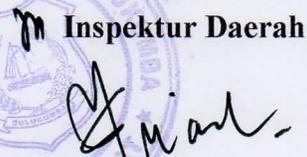
PERNYATAAN TELAH DIREVIU RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021

Kami telah mereviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021, Substansi Informasi yang dimuat menjadi tanggung jawab tim penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021, apakah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat beberapa hal yang menjadi catatan untuk segera dilakukan perbaikan oleh Tim Penyusun Rancangan Akhir RKPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati, sehingga RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan.

Bulukumba, 15 Mei 2020


Inspektur Daerah

A. Sri Arianti, SP., MP

Pangkat: Pembina TK.I

NIP. 19710723 199803 2 015



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR **26** TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta menindaklanjuti Pasal 149 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 68);

PARAF

A	M	R	/6
---	---	---	----

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bulukumba.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bulukumba.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program strategis provinsi dan nasional untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba dengan pembangunan provinsi dan nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
- (2) RKPD Tahun 2021 dijadikan sebagai :
 - a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
 - b. acuan dan atau pedoman dalam penyelenggaraan bagi Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bulukumba dalam mendukung capaian target



- dan sasaran Pembangunan Daerah; dan
- c. secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

- (2) Rincian sistimatika RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2021, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Hasil Pemetaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (4) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Bab III tidak memproyeksikan alokasi Transfer Alokasi Dana Khusus sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran antara RKPD dengan APBD Tahun 2021, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.



- (5) Sasaran dan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat pada Bab IV.
- (6) Rencana kerja dan pendanaan daerah yang terdapat pada Bab V memuat program dan kegiatan SKPD disertai dengan pagu anggaran yang sifatnya indikatif.
- (7) Dalam hal terdapat penambahan sub kegiatan yang tidak termuat dalam hasil pemetaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan acuan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan dimaksud.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 8

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, dapat diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PARAS	A	N,	P	/6
-------	---	----	---	----

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba.
pada tanggal 23 Juli 2020



BUPATI BULUKUMBA ✓

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020 NOMOR 26



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2020	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I - 4
1.4 Maksud dan Tujuan	I - 5
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I - 6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	II - 1
2.1.1Aspek Geografi dan Demografi.....	II - 1
2.2.1Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 17
2.3.1Aspek Daya Saing Daerah	II - 25
2.4.1Aspek Pelayanan Umum.....	II - 25
2.2 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Triwulan IV T.A 2019	II - 85
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II - 148
2.4 Isu Strategis Daerah	II - 159
2.4 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	II - 162
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III - 15
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021.....	IV - 7
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021	
5.1 Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Program dan Kegiatan Kabupaten Bulukumba	V - 1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	
6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI - 1
6.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	VI - 3
6.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2021	VI - 15
BAB VII PENUTUP	VII - 1



LAMPIRAN- LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 26 Tanggal 23 Juli 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba T.A. 2021
- Lampiran 2. Hasil Pemetaan Matriks Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri 13/2006 dan Permendagri 90/2019)



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Luas Wilayah Setiap Kecamatan di Kabupaten Bulukumba.	II- 1
Tabel 2.2	Jumlah Dusun/ Lingkungan	II- 1
Tabel 2.3	Persentase Ketinggian Wilayah Di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan	II- 2
Tabel 2.4	Jumlah curah hujan	II- 3
Tabel 2.5	Nama sungai untuk pengairan di Kabupaten Bulukumba	II- 4
Tabel 2.6	Luas Lahan Sawah (Ha) di Kabupaten	II- 5
Tabel 2.7	Luas Lahan Sawah (Ha) Menurut Irigasi	II- 6
Tabel 2.8	Luas Lahan Bukan sawah (Ha)	II- 7
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan penduduk menurut kecamatan Di kabupaten bulukumba	II- 15
Tabel 2.10	Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut kecamatan Di Kabupaten Bulukumba	II- 15
Tabel 2.11	Jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba menurut Jenis kelamin	II- 16
Tabel 2.12	Distribusi dan kepadatan penduduk	II- 16
Tabel 2.13	Pertumbuhan PDRB	II- 17
Tabel 2.14	Perbandingan laju inflasi Kabupaten Bulukumba Prov. Sulawesi-Selatan	II- 17
Tabel 2.15	PDRB perkapita Tahun 2015-2019	II- 17
Tabel 2.16	Indeks gini ratio	II- 18
Tabel 2.17	Perkembangan jumlah penduduk miskin	II- 18
Tabel 2.18	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	II- 18
Tabel 2.19	Indeks Pembangunan Manusia	II- 18
Tabel 2.20	Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH)	II- 18
Tabel 2.21	Rata-Rata Lama Sekolah Bulukumba	II- 19
Tabel 2.22	Angka Usia Harapan Hidup Bulukumba	II- 19
Tabel 2.23	Persentase Balita Gizi Buruk Bulukumba	II- 19
Tabel 2.24	Prevalensi Balita Gizi Kurang Bulukumba	II- 19
Tabel 2.25	Cakupan Desa Siaga Aktif	II- 19
Tabel 2.26	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Bulukumba	II- 20
Tabel 2.27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Bulukumba	II- 20
Tabel 2.28	Tingkat Pengangguran Terbuka Bulukumba	II- 20
Tabel 2.29	Rasio penduduk yg bekerja Bulukumba	II- 20
Tabel 2.30	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja Bulukumba	II- 20
Tabel 2.31	Rasio Kesempatan Kerja terhadap penduduk Usia 15 tahun	II- 21
Tabel 2.32	Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga Sejahtera I	II- 21
Tabel 2.33	Indeks Kepuasan Masyarakat	II- 21
Tabel 2.34	Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan jenis pelayanan Berdasarkan jenis pelayanan	II- 21
Tabel 2.35	Persentase PAD terhadap pendapatan	II- 21
Tabel 2.36	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Kabupaten Bulukumba	II- 21
Tabel 2.37	Penguatan Cadangan Pangan	II- 22



Tabel 2.38	Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Bulukumba	II-	22
Tabel 2.39	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRBBulukumba	II-	22
Tabel 2.40	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	II-	22
Tabel 2.41	Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Bulukumba	II-	22
Tabel 2.42	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Kabupaten Bulukumb	II-	23
Tabel 2.43	Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten bulukumba	II-	23
Tabel 2.44	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	II-	23
Tabel 2.45	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba	II-	23
Tabel 2.46	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kabupaten bukumba	II-	24
Tabel 2.47	Kontribusi Sektor Kelautan & Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Bulukumba	II-	24
Tabel 2.48	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRBdi Kabupaten Bulukumba	II-	24
Tabel 2.49	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba	II-	24
Tabel 2.50	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri Kabupaten bulukumba	II-	24
Tabel 2.51	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bulukumba	II-	25
Tabel 2.52	Nilai Tukar Petani	II-	25
Tabel 2.53	Produktivitas Total Daerah	II-	25
Tabel 2.54	Pembagian Penduduk Berdasarkan Usia Produktif	II-	25
Tabel 2.55	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kab.Bulukumba	II-	26
Tabel 2.56	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar	II-	26
Tabel 2.57	Persentase angka pendidikan yang ditamatkan	II-	26
Tabel 2.58	Perkembangan Angka Partisipasi Murni.	II-	26
Tabel 2.59	APS Pendidikan Dasar	II-	26
Tabel 2.60	Angka putus Sekolah	II-	26
Tabel 2.61	Angka Kelulusan	II-	26
Tabel 2.62	Angka melanjutkan.	II-	26
Tabel 2.63	Fasilitas Pendidikan Dalam Kondisi Bangunan Baik	II-	27
Tabel 2.64	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah.	II-	27
Tabel 2.65	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk	II-	29
Tabel 2.66	Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan	II-	29
Tabel 2.67	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar	II-	29
Tabel 2.68	Rasio guru/murid perkelas rata-rata sekolah dasar	II-	29
Tabel 2.69	Rasio guru terhadap murid perkelas	II-	30
Tabel 2.70	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 th	II-	30
Tabel 2.71	Penduduk yg berusia > 15 tahun melek huruf	II-	30
Tabel 2.72	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV.	II-	30
Tabel 2.73	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran	II-	30
Tabel 2.74	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	II-	30
Tabel 2.75	Angka kematian balita per 1000 kelahiran	II-	31
Tabel 2.76	Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran	II-	31
Tabel 2.77	Angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup	II-	31



Tabel 2.78	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	II- 31
Tabel 2.79	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu	II- 32
Tabel 2.80	Rasio Rumah Sakit	II- 32
Tabel 2.81	Rasio Dokter	II- 32
Tabel 2.82	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	II- 33
Tabel 2.83	Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani	II- 33
Tabel 2.84	Cakupan pertolongan persalinan	II- 33
Tabel 2.85	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization	II- 33
Tabel 2.86	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	II- 34
Tabel 2.87	Proporsi penduduk dengan asupan kalori	II- 34
Tabel 2.88	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak..	II- 34
Tabel 2.89	Non polio AFP rate per 1000 penduduk	II- 34
Tabel 2.90	Cakupan balita pnemonia yang ditangani	II- 35
Tabel 2.91	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC dan BTA	II- 35
Tabel 2.92	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	II- 35
Tabel 2.93	Tingkat kematian karena tuberkulosis	II- 35
Tabel 2.94	Proporsi kasus tuberkulosis yg terdeteksi	II- 36
Tabel 2.95	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh	II- 36
Tabel 2.96	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakitDBD	II- 36
Tabel 2.97	Jumlah Penderita diare yang ditangani	II- 36
Tabel 2.98	Angka Kejadian Malaria	II- 37
Tabel 2.99	Tingkat Kematian Akibat Malaria	II- 37
Tabel 2.100	Pravalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	II- 37
Tabel 2.101	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	II- 37
Tabel 2.102	Cakupan Kunjungan Bayi	II- 37
Tabel 2.103	Cakupan Puskesmas	II- 38
Tabel 2.104	Cakupan Pembantu Puskesmas	II- 38
Tabel 2.105	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	II- 38
Tabel 2.106	Cakupan Pelayanan Nifas	II- 38
Tabel 2.107	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangan	II- 38
Tabel 2.108	Cakupan Pelayanan Anak Balita	II- 39
Tabel 2.109	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin	II- 39
Tabel 2.110	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	II- 39
Tabel 2.111	Cakupan Pelayanan Pasien Miskin di Sarkes Strata 1	II- 39
Tabel 2.112	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yg Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	II- 40
Tabel 2.113	Cakupan Desa/Kel. Mengalami KLB yg dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	II- 40
Tabel 2.114	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	II- 40
Tabel 2.115	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	II- 40
Tabel 2.116	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik	II- 40
Tabel 2.117	Persentase rumah tinggal bersanitasi	II- 41
Tabel 2.118	Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar	II- 41
Tabel 2.119	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air	II- 41



	tidak tersumbat	
Tabel 2.120	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	II- 41
Tabel 2.121	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	II- 42
Tabel 2.122	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	II- 42
Tabel 2.123	Rasio Jaringan Irigasi Persentase penduduk berakses air minum	II- 42
Tabel 2.124	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	II- 42
Tabel 2.125	Persentase rumah areal kawasan kumuh	II- 42
Tabel 2.126	Rasio Jaringan Irigasi	II- 42
Tabel 2.127	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	II- 43
Tabel 2.128	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	II- 43
Tabel 2.129	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	II- 43
Tabel 2.130	Luasan RTH Public Sebesar 20 % dari Luas Wilayah Kota /Kawasan Perkotaan	II- 43
Tabel 2.131	Rasio Bangunan Ber IMB	II- 43
Tabel 2.132	Ruang Public yg Berubah Peruntuknya	II- 44
Tabel 2.133	Ketaatan terhadap RTRW	II- 44
Tabel 2.134	Rasio Rumah Layak Huni	II- 44
Tabel 2.135	Permukiman Layak Huni	II- 44
Tabel 2.136	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	II- 44
Tabel 2.137	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkuan	II- 44
Tabel 2.138	Persentase Pemukiman yang Tertata	II- 45
Tabel 2.139	Persentase Lingkungan Permukiman Kumah	II- 45
Tabel 2.140	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	II- 45
Tabel 2.141	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	II- 45
Tabel 2.142	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	II- 45
Tabel 2.143	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	II- 46
Tabel 2.144	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	II- 46
Tabel 2.145	Tingkat Waktu Tanggap (response Time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	II- 46
Tabel 2.146	Persentase Penegakan PERDA	II- 46
Tabel 2.147	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	II- 46
Tabel 2.148	Persentase PMKS yang Tertangani	II- 47
Tabel 2.149	Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Social untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	II- 47
Tabel 2.150	Persentase Panti Sosial yg Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Social Ekonomi Sejenis lainnya	II- 47
Tabel 2.151	Persentase Panti Social yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	II- 47
Tabel 2.152	Persentase Wahana Kesejahteraan Social Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	II- 48
Tabel 2.153	Persentase Korban Bencana yg Menerima Bantuan Social Selama Masa Tanggap Darurat	II- 48
Tabel 2.154	Persentase Korban Bencana yang di Evakuasi dengan Menggunakan Sarana Prarasana Tanggap Darurat Lengkap	II- 48



Tabel 2.155	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia tidak Potensial yg telah menerima Jaminan Sosial.	II-	49
Tabel 2.156	Angka sengketa pengusaha pekerjaan per tahun	II-	49
Tabel 2.157	Besaran Kasus yang di Selesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	II-	49
Tabel 2.158	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang Ditempatkan	II-	49
Tabel 2.159	Keselamatan dan Perlindungan	II-	50
Tabel 2.160	Besaran Pekerjaan/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	II-	50
Tabel 2.161	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	II-	50
Tabel 2.162	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	II-	50
Tabel 2.163	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	II-	51
Tabel 2.164	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelathan Berbasis Kompotensi	II-	51
Tabel 2.165	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	II-	51
Tabel 2.166	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	II-	51
Tabel 2.167	Rasio Lulusan S1 / S2 / S3	II-	51
Tabel 2.168	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.	II-	52
Tabel 2.169	Proporsi kursi yg diduduki perempuan di DPR	II-	52
Tabel 2.170	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	II-	52
Tabel 2.171	Rasio KDRT	II-	52
Tabel 2.172	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	II-	52
Tabel 2.173	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II-	53
Tabel 2.174	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit Pelayanan terpadu	II-	53
Tabel 2.175	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	II-	53
Tabel 2.176	Cakupan Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban	II-	53
Tabel 2.177	Rasio APM perempuan / laki-laki di SD	II-	54
Tabel 2.178	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP	II-	54
Tabel 2.179	Rasio APM perempuan / laki-laki di SMA	II-	54
Tabel 2.180	Rasio Angka Melek Huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahunan	II-	54
Tabel 2.181	Ketersediaan Pangan Utama	II-	55
Tabel 2.182	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	II-	55
Tabel 2.183	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	II-	55
Tabel 2.184	Penyelesaian Izin Lokasi	II-	55
Tabel 2.185	Tersusunnya RPPLH kabupaten	II-	55
Tabel 2.186	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana Pembangunan Kabupaten	II-	56
Tabel 2.187	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas air	II-	56
Tabel 2.188	Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara	II-	56
Tabel 2.189	Hasil Pengukuran Indeks kualitas tutupan lahan	II-	56
Tabel 2.190	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha /atau kegiatan yg diawasi ketaatannya terhadap PPLH, PUU LH yg diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	II-	56



Tabel 2.191	Peningkatan kapasitas & sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD)	II-	57
Tabel 2.192	Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	II-	57
Tabel 2.193	Terverifikasinya MHA & kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	II-	57
Tabel 2.194	Terverifikasinya hak kearifan lokal atau baik pengetahuan tradisional	II-	57
Tabel 2.195	Penetapan hak MHA	II-	57
Tabel 2.196	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan & keterampilan	II-	57
Tabel 2.197	Terfasilitasi penyediaan sarana / prasarana	II-	57
Tabel 2.198	Terlaksananya pendiidkan dan pelatihan masyarakat	II-	58
Tabel 2.199	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	II-	58
Tabel 2.200	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah	II-	58
Tabel 2.201	Timbunan sampah yg ditangani	II-	58
Tabel 2.202	Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangi Melalui 3R.	II-	59
Tabel 2.203	Persentase Cakupan Area Pelayanan	II-	59
Tabel 2.204	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	II-	59
Tabel 2.205	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten	II-	59
Tabel 2.206	Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk.	II-	59
Tabel 2.207	Rasio bayi berakte kelahiran	II-	59
Tabel 2.208	Rasio pasangan berakte nikah	II-	60
Tabel 2.209	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	II-	60
Tabel 2.210	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	II-	60
Tabel 2.211	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP	II-	60
Tabel 2.212	Cakupan penerbitan akte kelahiran	II-	60
Tabel 2.213	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	II-	60
Tabel 2.214	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	II-	61
Tabel 2.215	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Bulukumba	II-	61
Tabel 2.216	PKK Aktif	II-	61
Tabel 2.217	Persentase Posyandu Aktif	II-	61
Tabel 2.218	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	II-	61
Tabel 2.219	Total Fertility Rate (TFR)	II-	62
Tabel 2.220	Persentase Perangkat Daerah yg berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	II-	62
Tabel 2.221	Persentase perangkat daerah yg menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengembalian penduduk	II-	62
Tabel 2.222	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	II-	62
Tabel 2.223	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	II-	63
Tabel 2.224	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	II-	63
Tabel 2.225	Rasio Akseptor KB	II-	63
Tabel 2.226	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah Usia 15 – 49 tahun	II-	63



Tabel 2.227	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 Tahun	II-	63
Tabel 2.228	Cakupan pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	II-	64
Tabel 2.229	Persentase menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	II-	64
Tabel 2.230	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	II-	64
Tabel 2.231	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	II-	64
Tabel 2.232	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	II-	64
Tabel 2.233	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber – KB	II-	65
Tabel 2.234	Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	II-	65
Tabel 2.235	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Kaseh Remaja / mahasiswa	II-	65
Tabel 2.236	Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	II-	65
Tabel 2.237	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) yg ber –KB mandiri	II-	65
Tabel 2.238	Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa / Kelurahan	II-	66
Tabel 2.239	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.	II-	66
Tabel 2.240	Persentase Faskes dan Jejaringannya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarnisasi pelayanan.	II-	66
Tabel 2.241	Cakupan kelompok kegiatan yg melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	II-	66
Tabel 2.242	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	II-	67
Tabel 2.243	Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDesa	II-	67
Tabel 2.244	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	II-	67
Tabel 2.245	Rasio Ijin Trayek	II-	67
Tabel 2.246	Persentase Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	II-	67
Tabel 2.247	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal	II-	67
Tabel 2.248	Persentase Layanan Angkutan Darat	II-	68
Tabel 2.249	Pemasangan Rambu-rambu	II-	68
Tabel 2.250	Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan	II-	68
Tabel 2.251	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	II-	68
Tabel 2.252	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum.	II-	68
Tabel 2.253	Cakupan Pengembangan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat	II-	69
Tabel 2.254	Cakupan Layanan Telekomunikasi	II-	69
Tabel 2.255	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon.	II-	69
Tabel 2.256	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	II-	69
Tabel 2.257	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki computer pribadi	II-	69
Tabel 2.258	Persentase Koperasi Aktif	II-	70
Tabel 2.259	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	II-	70
Tabel 2.260	Persentase BPR/LKM aktif	II-	70
Tabel 2.261	Persentase Usaha Mikro dan kecil	II-	70



Tabel 2.262	Jumlah Investor berkala Nasional (PMDN / PMA)	II- 70
Tabel 2.263	Jumlah Nilai Investasi berkala nasional (PMDN / PMA) .	II- 70
Tabel 2.264	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	II- 71
Tabel 2.265	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	II- 71
Tabel 2.266	Persentase organisasi pemuda yg aktif	II- 71
Tabel 2.267	Persentase wirausaha muda	II- 71
Tabel 2.268	Cakupan pembinaan olahraga	II- 71
Tabel 2.269	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	II- 72
Tabel 2.270	Cakupan pembinaan atlet muda	II- 72
Tabel 2.271	Jumlah atlet berprestasi	II- 72
Tabel 2.272	Jumlah prestasi olahraga	II- 72
Tabel 2.273	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	II- 72
Tabel 2.274	Buku “ Kabupaten Dalam Angka”	II- 72
Tabel 2.275	Buku “ PDRB”	II- 73
Tabel 2.276	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	II- 73
Tabel 2.277	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	II- 73
Tabel 2.278	Benda situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan	II- 73
Tabel 2.279	Jumlah karya budaya yg direvitalisasi dan inventarisasi.	II- 73
Tabel 2.280	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	II- 73
Tabel 2.281	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	II- 74
Tabel 2.282	Koleksi buku yang tersedia di dalam perpustakaan daerah	II- 74
Tabel 2.283	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	II- 74
Tabel 2.284	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /Tahun	II- 74
Tabel 2.285	Jumlah koleksi judul buku peprpustakaan	II- 74
Tabel 2.286	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	II- 74
Tabel 2.287	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	II- 75
Tabel 2.288	Peningkatan SDM pegelola kearsipan	II- 75
Tabel 2.289	Kunjungan wisata	II- 75
Tabel 2.290	Lama Kunjungan Wisata	II- 75
Tabel 2.291	PAD Sektor Pariwisata	II- 75
Tabel 2.292	Kontribusi sector pertanian / perkebunan terhadap PDRB	II- 76
Tabel 2.293	Kontribusi Sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB.	II- 76
Tabel 2.294	Kontribusi Sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	II- 76
Tabel 2.295	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	II- 76
Tabel 2.296	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	II- 76
Tabel 2.297	Cakupan bina kelompok patani	II- 77
Tabel 2.298	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	II- 77
Tabel 2.299	Kerusakan Kawasan Hutan	II- 77
Tabel 2.300	Rasio luas kawasan	II- 77
Tabel 2.301	Persentase rumah tangga pengguna	II- 77
Tabel 2.302	listrik Rasio ketersediaan daya listrik	II- 78
Tabel 2.303	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	II- 78
Tabel 2.304	Ekspor Bersih Perdagangan	II- 78



Tabel 2.305	Cakupan Bina Usaha Informal/Pedagang	II- 78
Tabel 2.306	Cakupan Bina kelompok pengrajin	II- 78
Tabel 2.307	Persentase Transmigrasi Swakarsa	II- 79
Tabel 2.308	Produksi Perikanan	II- 79
Tabel 2.309	Konsumsi Ikan	II- 79
Tabel 2.310	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	II- 79
Tabel 2.311	Produksi perikanan kelompok nelayan	II- 79
Tabel 2.312	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	II- 80
Tabel 2.313	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	II- 80
Tabel 2.314	Nilai Tukar Nelayan	II- 80
Tabel 2.315	Tersediaanya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	II- 80
Tabel 2.316	Tersediaanya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	II- 80
Tabel 2.317	Tersediaanya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	II- 81
Tabel 2.318	Tersediaanya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	II- 81
Tabel 2.319	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	II- 81
Tabel 2.320	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	II- 81
Tabel 2.321	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	II- 81
Tabel 2.322	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	II- 82
Tabel 2.323	Persentase SILPA	II- 82
Tabel 2.324	Persentase SILPA terhadap APBD	II- 82
Tabel 2.325	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	II- 82
Tabel 2.326	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	II- 82
Tabel 2.327	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	II- 83
Tabel 2.328	Bagi Hasil Kabupaten / Kota dan Desa	II- 83
Tabel 2.329	Penetapan APBD	II- 83
Tabel 2.330	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	II- 83
Tabel 2.331	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	II- 84
Tabel 2.332	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	II- 84
Tabel 2.333	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	II- 84
Tabel 2.334	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	II- 84
Tabel 2.335	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	II- 84
Tabel 2.336	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	II- 84
Tabel 2.337	Persentase Tindak Lanjut Temuan	II- 85
Tabel 2.338	Persentase Pelanggaran Pegawai	II- 85
Tabel 2.339	Jumlah Temuan BPK	II- 85
Tabel 2.340	Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Triwulan IV Tahun Anggaran 2019	II- 86
Tabel 2.341	Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Keuangan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bulukumba Triwulan IV Tahun 2019 Berdasarkan Urusan	II- 88



Tabel 2.342	Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten bulukumba Triwulan IV (Oktober - Desember) Tahun Anggaran 2019	II- 94
Tabel 2.343	Identifikasi Isu Strategis	II- 160
Tabel 3.1	Produk Domestik regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bulukumba berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun 2015 - 2019	III- 2
Tabel 3.2	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bulukumba Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 - 2019	III- 3
Tabel 3.3	Perkembangan PDRB Perkapita (ADHK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019	III- 4
Tabel 3.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Tetangga, Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2019	III- 5
Tabel 3.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019	III- 6
Tabel 3.6	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019	III- 6
Tabel 3.7	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019	III- 8
Tabel 3.8	Realisasi dan proyeksi/ target pendapatan Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022	III- 17
Tabel 3.9	Realisasi dan proyeksi/ target belanja daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2018-2022	III- 23
Tabel 3.10	Realisasi dan proyeksi/ target pembiayaan daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2022	III- 25
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021	IV- 1
Tabel 4.2	Prioritas Nasional dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021	IV- 8
Tabel 4.3	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021	IV- 9
Tabel 4.4	Kesesuaian Program dengan Prioritas terhadap Misi RPJMD	IV- 10
Tabel 4.5	Sasaran Pembangunan Tahun 2021	IV- 12
Tabel 4.6	Matriks Integrasi TPB/SDGs Terhadap Program Prioritas RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021	IV- 16
Tabel 5.1	Rekap Pagu Matriks Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020 Kabupaten Bulukumba	V- 1
Tabel 5.2	Matriks Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020 Kabupaten Bulukumba	V- 3
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama	VI- 1
Tabel 6.2	Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2019	VI- 3
Tabel 6.3	Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2020	VI- 15



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Rasio Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba, 2019	II-16
Gamabr 2.2	Perbandingan rata - rata tingkat capaian kinerja dan keuangan Evaluasi Hasil RKPD Kab.Bulukumba Triwulan IV Tahun 2019 dan rata - rata tingkat capaian kinerja dan keuangan evaluasi hasil RKPD berdasarkan urusan	II-86
Gambar 2.3	Tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar dibandingkan dengan target tahunan.....	II-86
Gamabr 2.4	Tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan berdasarkan urusan wajib bukan pelayanan dasar dibandingkan dengan target tahunan.....	II-87
Gambar 2.5	Tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan berdasarkan urusan pilihan dibandingkan dengan target tahunan.	II-87
Gambar 2.6	Tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan berdasarkan urusan pemerintahan unsur penunjang dibandingkan dengan target tahunan.....	II-87
Gambar 3.1	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Bulukumbadan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2019.....	III-2
Gambar 3.2	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2012-2019.....	III-5
Gambar 3.3	Persentase Kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun Tahun 2015-2019	III-6
Gambar 3.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Bulukumba Tahun 2015-2019 (Persen)	III-7
Gambar 3.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019 (Persen)	III-7



LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 26

TANGGAL : 23 Juli 2020

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan selanjutnya pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.

Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan. Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain.

Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan menteri dalam negeri tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025.

Pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ke lima atau tahun terakhir dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba. Adapun visi yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 yaitu **“Masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan terdepan melalui optimalisasi potensi daerah dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang dilandasi pada pemerintahan yang demokratis dan religius”**.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; dan memperhatikan Rancangan RKPD Propinsi Sulawesi Selatan maupun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta sinergitas antarsektor dan antarwilayah serta penjarangan aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 juga dilaksanakan dengan beberapa pendekatan perencanaan antara lain:

1. Perencanaan dari bawah (*bottom up*).
Perencanaan dari bawah dilaksanakan dengan beberapa tahapan, dimulai dari pelaksanaan musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, selanjutnya disinkronkan dengan rencana kerja tiap SKPD pada tahapan forum gabungan SKPD dan dimusyawarahkan kembali pada pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten, dan semua tahapan tersebut dilaksanakan pada bulan februari sampai maret tahun 2020.
2. Perencanaan dari atas (*top down*).
Perencanaan dari atas dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas program dan kebijakan antara

pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

3. Perencanaan Partisipatif.

Perencanaan partisipatif dilakukan mulai pada tahapan awal penjarangan aspirasi masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 dengan mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang transparansi dan akuntabel.

4. Perencanaan Teknokratik.

Pendekatan perencanaan teknokratik dilakukan dengan metode kerangka berpikir secara ilmiah. Dalam proses perencanan ini dilakukan beberapa tahapan yang mencakup, pengumpulan serta pengolahan data dan informasi, analisis terhadap gambaran umum dan kondisi daerah Kabupaten Bulukumba, analisis terhadap kondisi ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba, evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah tahun sebelumnya, melakukan telaah, kajian, dan perumusan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yang pro rakyat, serta melakukan analisis terhadap penyelarasan rencana program, pagu indikatif hingga penetapan target kinerja tahunan.

5. Perencanaan Politik.

Proses penyusunan perencanaan melalui pendekatan politik dilakukan dengan mengukur tingkat konsistensi terhadap kebijakan yang dilahirkan dengan target yang tertuang pada visi misi kepala daerah terpilih serta pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Bulukumba yang lahir melalui proses penjarangan aspirasi masyarakat.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Hukum dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42



- Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 19. Perda Sulsel Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2018- 2023
 20. Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 38 tahun 2020 tentang RKPD Provinsi Sulsel Tahun 2021.
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);

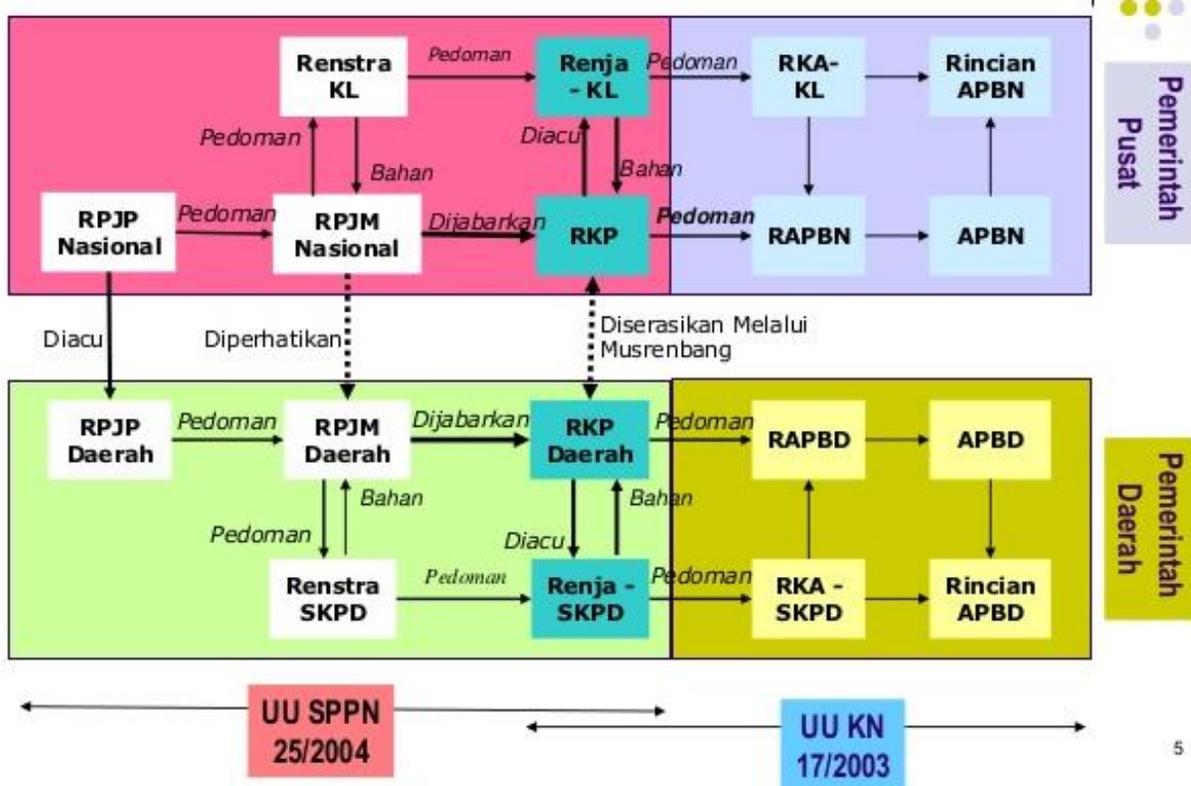
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 untuk menjalankan agenda pembangunan tahunan dan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba. Keberadaan RKPD Tahun 2021 juga sebagai pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021. RPJMD dan Renstra SKPD

adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra PD dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra PD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L.

Hubungan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai satu kesatuan dari seluruh rangkaian proses perencanaan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan keterkaitan tersebut dapat dilihat dengan mengukur target kinerja yang ditetapkan pada setiap dokumen perencanaan, serta dengan melihat tingkat konsistensi, kesesuaian tujuan, serta tahapan penyusunan dan pelaksanaan tiap dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada alur berikut:

Alur Hubungan Antara RKPD
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 dimaksudkan untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan rencana pembangunan daerah, sekaligus sebagai bentuk konsistensi pemerintah daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan partisipatif dengan mengakomodir rumusan hasil musyawarah rencana pembangunan yang dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bulukumba.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 yaitu:

1. Sebagai acuan resmi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai tahapan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021.
2. Sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat latar belakang penyusunan dokumen RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, dan sistematika penulisan dokumen RKPD.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada Bab ini dijelaskan mengenai Gambaran Umum Kondisi Daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, Realisasi RKPD, serta permasalahan pembangunan dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUNGAN DAERAH

Pada Bab ini dijelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada Bab ini dijelaskan secara eksplisit terkait tema, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 disinergikan dengan perencanaan tingkat provinsi dan nasional.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Bab ini dijelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD tahun rencana, instansi pelaksana/OPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya dalam bentuk matriks program dan rencana kegiatan pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada Bab ini ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Bulukumba berada di 153 Km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di bagian selatan dari jazirah Sulawesi Selatan dengan luas wilayah kabupaten 1.154,67 km² atau 1,85% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara Geografis, Kabupaten Bulukumba berada di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya terletak diantara 05°20'-05°40' Lintang Selatan (LS) dan 119°58'-120°28' Bujur Timur (BT). Secara keseluruhan panjang garis pantai Kabupaten Bulukumba mencapai 128 km, sangat menunjang Kabupaten Bulukumba sebagai daerah bahari/maritim dengan potensi unggulan perikanan dan kelautan yang berada pada 7 kecamatan pesisir dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Bone dan Kepulauan Selayar

Adapun rincian jumlah kecamatan, kelurahan/desa, dan luas wilayah masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Luas Wilayah
Setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)
1	Gantarang	18	3	15,03	21	173,51
2	Ujungbulu	0	9	1,25	9	14,44
3	Ujung Loe	12	1	12,50	13	144,31
4	Bontobahari	4	4	9,40	8	108,60
5	Bontotiro	12	1	6,78	13	78,34
6	Herlang	6	2	5,96	8	68,79
7	Kajang	17	2	11,18	19	129,06
8	Bulukumpa	14	3	14,84	17	171,33
9	Rilau Ale	14	1	10,18	15	117,53
10	Kindang	12	1	12,88	13	148,76
Bulukumba		109	27	100,00	136	1.154,67

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bulukumba, 2019

Tabel 2.2
Jumlah Dusun/Lingkungan Kabupaten Bulukumba

No.	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Lingkungan	Jumlah Dusun
1	Gantarang	Ponre	8	82
2	Ujung Bulu	Bulukumba	31	-
3	Ujung Loe	Ujung Loe	4	42

4	Bontobahari	Tanah Beru	13	13
5	Bontotiro	Hila hila	5	45
6	Herlang	Tanuntung	10	27
7	Kajang	Kassi	11	100
8	Bulukumpa	Tanete	7	76
9	Rilau Ale	Palampang	5	58
10	Kindang	Borong Rappoa	4	46
JUMLAH			98	489

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bulukumba, 2019

2.1.1.2 Ketinggian dan Morfologi

Wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki topografi yang bervariasi dari 0 meter hingga di atas 1000 meter dari permukaan laut (dpl) yang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) satuan ruang morfologi yaitu:

1) Morfologi Daratan

Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s.d. 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.

2) Morfologi Bergelombang

Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s.d. 100 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

3) Morfologi Perbukitan

Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke Utara dengan ketinggian 100 s.d. di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28 persen maka dataran tinggi mencapai 49,72 persen.

Tabel 2.3

Persentase Ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2019

No	Kecamatan	Ketinggian					TOTAL (mdpl)
		0 - 25 (mdpl)	26 - 100 (mdpl)	101 - 500 (mdpl)	501 - 1000 (mdpl)	>1000 (mdpl)	
1	Gantarang	0	70	30	0	0	100
2	Ujung Bulu	100	0	0	0	0	100
3	Ujung Loe	30	70	0	0	0	100
4	Bontobahari	0	100	0	0	0	100
5	Bontotiro	0	30	70	0	0	100
6	Herlang	0	70	30	0	0	100
7	Kajang	10	80	10	0	0	100
8	Bulukumpa	0	0	100	0	0	100



9	Rilau Ale	0	0	100	0	0	100
10	Kindang	0	0	50	45	5	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bulukumba, 2019

2.1.1.3 Klimatologi dan Morfologi

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82°C–27,68°C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis *Smith-Ferguson* (tipe iklim diukur menu rut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah.

Kabupaten Bulukumba berada di bagian Timur, musim gadu antara Oktober-Maret dan musim rendengan antara April-September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan yakni: Stasiun Bettu, Stasiun Bontonyeleng, Stasiun Kajang, Stasiun Batukaropa, Stasiun Tanah Kongkong, Stasiun Bontobahari, Stasiun Bulo-Bulo, dan Stasiun Herlang.

Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah Barat Laut dan Timur sedangkan pada daerah Tengah memiliki curah hujan sedang dan pada bagian Selatan curah hujannya rendah. Adapun data curah hujan sebagai berikut:

1. Curah hujan antara 800 - 1.000 mm/tahun meliputi Kecamatan Ujungbulu, sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian besar Kecamatan Bontobahari.
2. Curah hujan antara 1.000 - 1.500 mm/tahun meliputi sebagian Kecamatan Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian Kecamatan Bontotiro.
3. Curah hujan antara 1.500 - 2.000 mm/tahun meliputi Kecamatan Gantarang, sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang, sebagian Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang, dan Kecamatan Kajang.
4. Curah hujan diatas 2.000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, dan Kecamatan Herlang.

Tabel 2.4

Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bulukumba, 2019

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
Januari	189	15
Februari	279	17
Maret	191	10
April	133	13
Mei	627	24
Juni	471	18
Juli	398	13
Agustus	9	3
September	59	5
Oktober	79	7
November	152	12
Desember	120	13

Sumber : Bulukumba Dalam Angka, 2020

2.1.1.4 Jenis Tanah

Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah Latosol yang lebih dikenal dengan tanah dalam tekstur lempung, dan Mediteran yang merupakan hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. Secara spesifik terdiri atas tanah *Alluvial Hidromorf* atau jenis tanah yang bersifat hidromorf dan berwarna kelabu, coklat dan hitam dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat.

2.1.1.5 Hidrologi

Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 43 aliran dengan panjang keseluruhan 399,20 km dan debit 58,963 m³/dtk yang mampu mengairi lahan sawah 16.467 ha meskipun ada beberapa sungai yang belum disurvei debitnya.

Tabel 2.5
Nama Sungai untuk Pengairan di Kabupaten Bulukumba

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Luas Sawah yang diairi (Ha)	Debit (m ³ /det)	Hulu	Muara
1	Bialo	54.50	6.251	14.153	G.Lompobattang	Laut Flores
2	Maesa	10.30	150	0.230	Banyorang	Jampue/S.Bialo
3	Biangkeke	19.20	411	1.296	Borong Rappoa	Dampang/S.Bialo
4	Balibo	5.00	110		Balibo	Dampang/S.Biangkeke
5	BorongloE	11.50	195	0.096	Bungi	BurongloE/S.Biangkeke
6	Laumang	7.00	60		Borong Rappoa	BurongloE/S.Biangkeke
7	Kalamassang	20.50	495		OmpoE	Laut Flores
8	Bontosunggu	21.00	575		Dampang	Laut Flores
9	Bijawang	49.20	1.282	7.527	G.Lompobattang	Laut Flores
10	Anruling	13,30			Sapaya	Oro/S.Bijawang
11	Matilu	10.60			Latai	Tamaona/S.Bijawang
12	Bilang Rea	15.50	80	0,349	Bukit Harapan	Garuntungan/S.Bijawang
13	Bilang Parusu	12.00	35	0.157	Bukit Harapan	S.Bilangrea
14	Palioi	11.00	495	0.885	Garuntungan	Bnt.Nyeleng/S.Bijawang
15	Kirasa	30.40	618	1.667	Anrihua	PalambaraE/S.Bijawang
16	Balikonrong	8.40	100		Borongparring	Kantisang/S.Kirasa
17	Bintanaja	8.00	297	0.606	Uluparang	Borongtelli/S.Kirasa
18	Tuli	6.50	166		Palioi	Ponci/S.Kirasa
19	Balangtieng	56.00	4.628	13.336	G.Bawakaraeng	Laut Flores
20	Kahaya	9.50			G.Bawakaraeng	Kahaya/S.Balangtieng
21	Oddungen	6.90	80	0.080	Bulu Sapaya	Oro/S.Balangtieng
22	Hisang	12.90	439	0.790	Sapaya	Tamaona/S.Balangtieng
23	Latai	6.20			Anruling	Latai/S.Hisang
24	Pasimbungan	7.50			Bulu Leppa	Anrang/S.Balangtieng
25	Illi	6.50	150	0.264	Dusun Batu	Munte/S.Balangtieng
26	Balangtieng Keke	10.00	275	0.869	Panaikang	Batukaropa/S.Balangtieng
27	Sampeang	8.00	35		Batupangka	Kalicopeng/S.Balangtieng
28	Topanda	17.80	375		Talle-talle	Babana/S.Balangtieng
29	Anyorang	56.00	2.339	6.478	Dusun Batu	Laut Flores
30	Kambuno	8.50	315	0.304	Kambuno	Palampang/S.Anyorang
31	Oro/Ereminya	7.00	145	0.56	JennaE	Boddi/S.Kambu no
32	Serre	6.50	95		Mattunggaleng	Pulonggo/S.Kambuno
33	Balangkessi	65.30	1.061	2.931	Mattoanging	Laut Flores
34	Salo Dua	19.00	295	0.434	Mannyaha	Salo Dua/S.Balombisi
35	Pakombong	20.30	525	1.014	Barugae	Lmb.nyorang/S.Balombisi
36	Bikatala	19.70	75	0.120	Sarajoko	Jojjolo/S.Galoggo
37	Galoggo	17.20	105		Salajuang	Mallombong/S.Balombisi

38	Ta'getung	7.50	195		Enrulambung	Palangka/S.Aparang
39	Lolisang	34.30	369	0.376	Waepetje	Teluk Bone
40	Bobo	12.50	40	0,152	Balangriri	Sapaya/S.Lolisang
41	Raowa	18.50		0.144	Malleleng	Kassi/Teluk Bone
42	Jelepeng	20.00	80	0,144	Tanah Toa	Ma'leleng/S.Raowa
43	Kanaria	13,50	130		Bontotiro	Bampang/S.Bampang
Jumlah		399,20	16.467	58,963		

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Bulukumba, 2019

2.1.1.6 Potensi Lahan Sawah

Penggunaan lahan di Kabupaten Bulukumba ini secara garis besar dapat dibagi kedalam tiga macam penggunaan yaitu Lahan Sawah, Lahan Pertanian Bukan Sawah, dan Lahan Bukan Pertanian.

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/ menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan yang dimaksud termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi Bangunan, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija atau tanaman semusim lainnya. Lahan sawah di Kabupaten Bulukumba secara umum ditanami tanaman padi sehingga penggunaan lahan sawah ini juga dapat menggambarkan bagaimana produksi padi di Kabupaten Bulukumba secara kasar.

Kondisi ini tercermin pada luas potensi pertanian tahun 2018 yang terdiri dari lahan sawah dan bukan sawah seluas 118.961,33 Ha, mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 yakni seluas 91.047,29 Ha atau naik sebesar 30,65 %.

Tabel 2.6
Luas Lahan Sawah (Ha) di Kabupaten Bulukumba

No	Kecamatan	Diusahakan Untuk Pertanian	Sementara Tidak Diusahakan	Jumlah	
1	Gantarang	8.055,69	-	8.055,69	
2	Ujung Bulu	337,00	-	337,00	
3	Ujung Loe	3.087,98	-	3.087,98	
4	Bontobahari	63,00	-	63,00	
5	Bontotiro	168,00	-	168,00	
6	Herlang	507,90	-	507,90	
7	Kajang	2.450,43	-	2.450,43	
8	Bulukumpa	3.119,00	-	3.119,00	
9	Rilau Ale	3.211,00	-	3.211,00	
10	Kindang	1.958,00	-	1.958,00	
Bulukumba		2018	22.958,00	-	22.958,00
		2017	22.912,78	-	22.912,78
		2016	22.458	-	22.458
		2015	22.458	-	22.458
		2014	22.458	-	22.458

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bulukumba, 2019

2.1.1.6.1 Luas Lahan Sawah (Ha) Menurut Irigasi

Secara geografis lahan-lahan sawah ini terletak di Kecamatan dengan topografi yang datar dan sebagian di daerah perbukitan sampai ketinggian 100 Mdpl dan umumnya pada daerah-daerah aliran sungai dan sekitarnya. Kisarannya dimulai dari daerah kota mengarah ke Barat Ibukota Kabupaten Bulukumba. Sedangkan wilayah timur

kabupaten merupakan daerah yang kurang potensi sebagai lahan persawahan karena kondisi wilayah merupakan pesisir dengan struktur tanah liat, keras, dan berbatu.

Lahan sawah yang ada di atas secara umum ditanami padi dengan frekuensi penanaman yang sangat tergantung pada fasilitas irigasi. Lahan sawah yang ada di Bulukumba sebagian besar ditanami sebanyak dua kali setiap tahun bahkan ada beberapa yang ditanami hingga mencapai tiga kali dalam satu tahun. Adapun secara rinci lahan sawah menurut irigasi di Kabupaten Bulukumba dapat di lihat pada tabel berikut.

Luas lahan sawah menurut irigasi hingga tahun 2018 seluas **20.877,78 Ha** yang terdiri dari sawah irigasi dan tadah hujan. Dari luas tersebut sebesar **91 %** atau **22.912,78 Ha** merupakan sawah irigasi sehingga lahan sawah di kabupaten Bulukumba mayoritas mampu memproduksi 2 kali dalam setahun.

Tabel 2.7
Luas Lahan Sawah (Ha) Menurut Irigasi Tahun 2013 – 2017

No.	Kecamatan	Irigasi	Tadah Hujan	Rawa Pasang Surut	Rawa Lebak	Jumlah
1	Gantarang	8.044.99	6	-	-	8.050.99
2	Ujung Bulu	310	27	-	-	337
3	Ujung Loe	2.894.90	182	-	-	3.076.90
4	Bontobahari	53	143	-	-	63
5	Bontotiro	25	10	-	-	168
6	Herlang	155.33	338	-	-	493.33
7	Kajang	1.652.56	783	-	-	2.435.56
8	Bulukumpa	3.073	46	-	-	3.119
9	Rilau Ale	2.814	397	-	-	3.211
10	Kindang	1.855	103	-	-	1.958
Bulukumba	2018	20.877,78	2.035	-	-	22.912,78
	2017	20.423	2.035	-	-	22.458
	2016	20.423	2.035	-	-	22.458
	2015	20.423	2.035	-	-	22.458
	2014	20.423	2.035	-	-	22.458

Sumber : Dinas TPHP Kab. Bulukumba, 2019

2.1.1.6.2 Potensi Lahan Bukan Sawah

Lahan pertanian bukan sawah di Kabupaten Bulukumba didominasi oleh Tegal/Kebun dengan proporsi mencapai 73.045,33 Ha. Lahan ini sebagian besar ditanami tanaman buah-buahan, kacang-kacangan, dan umbi-umbian yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Lahan ini sebagian besar ditanami dengan tanaman perkebunan besar seperti Kakao, Kopi, Karet, Kelapa, Cengkeh, dan Lada. Lahan lainnya terdiri dari lahan yang ditanami tanaman kehutanan, Ladang/Huma, Padang Penggembalaan, dan lahan-lahan yang sementara tidak diusahakan.

Tabel 2.8
Luas Lahan Bukan sawah (Ha) Tahun 2013–2017

No.	Kecamatan	Lahan Bukan Sawah					Total
		Tegal/Kebun/ Ladang/ Huma/ Padang Rumput/ Tambak/	Perkebunan	Hutan Rakyat	Padang Penggembalaan/ Padang Rumput	Sementara Tidak di usahakan	
1	Gantarang	3.841,01	4.327	62	12	20	8.282
2	Ujung Bulu	307	-	-	-	-	316
3	Ujung Loe	7.092,10	2.348	535	-	-	9.246
4	Bontobahari	4.569	1.180	1.200	-	20	9.645
5	Bontotiro	4.514	2.080	479	10	144	7.227
6	Herlang	3.708,67	2.214	-	-	-	5.697
7	Kajang	7.054,44	2.008	579	-	-	9.761
8	Bulukumpa	1.398	12,107	165	-	-	13.421
9	Rilau Ale	7.866	420	16	-	-	8.297
10	Kindang	11.132	-	-	-	-	9.213
Bulukumba	2018	51.482,22	13.410,29	3.036	22	184	68.134,5
	2017	42.498	26.684	3.036	22	4.681	81.105
	2016	42.498	26.684	3.036	22	184	81.863
	2015	42.498	26.684	3.036	22	184	81.863
	2014	42.498	26.684	3.036	22	184	81.863

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bulukumba, 2019

2.1.1.6.3 Potensi Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang sangat potensial yakni tanaman padi dan merupakan bahan pangan utama masyarakat, terdapat pula tanaman bahan pangan lainnya seperti Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kacang Ijo dan Kedelai, yang merupakan tanaman sela atau tanaman antara yang ditanam oleh petani setelah sekali/dua kali panen tanaman padi, khususnya di lokasi lahan persawahan sedangkan pada lokasi lahan non persawahan tanaman tersebut diantaranya merupakan tanaman utama.

2.1.1.7 Kawasan Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24 Tahun 2007). Bencana alam dari proses bahaya geologi terhadap lingkungan di Kabupaten Bulukumba adalah; gerakan tanah/longsor, erosi, sedimentasi dan kegempaan; bahaya bencana tersebut, sedangkan bencana alam di luar proses geologi adalah banjir, uraiannya sebagai berikut.

2.1.1.7.1 Gerakan Tanah

Gerakan tanah terdiri dari; longsor translasi dan longsor rotasi. Umumnya terjadi pada musim hujan dengan tingkat curah hujan di atas normal pada daerah lereng yang merupakan gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, batuannya terkekarkan dengan tanah pelapukan cukup tebal dan di beberapa tempat dipacu dengan adanya usaha pertanian oleh penduduk setempat. Longsor translasi, dijumpai di daerah Kahayya Kecamatan Kindang, kemiringan lereng 30% - 70%, batuan penyusunnya terdiri dari bahan rombakan endapan lahar beserta tanah pelapukannya. Longsor rotasi dijumpai di daerah Erelebu Kecamatan

Bontotiro, kemiringan lereng 30-45%, batuan penyusunnya terdiri dari napal dan bahan rombakan batuan gamping.

2.1.1.7.2 Erosi

Erosi adalah proses alam yang wajar, disebabkan oleh air atau angin, percepatan erosi bisa pula disebabkan oleh alam atau ulah manusia. Erosi di daerah Kabupaten Bulukumba adalah berupa: Erosi sangat kecil sebarannya setempat-setempat di daerah Kecamatan Ujungbulu, Bontotiro, Bontobahari dan bagian selatan Kecamatan Kindang dengan tipe erosi lembar. Erosi kecil sebaran di bagian tengah daerah Kecamatan Kindang, Ujungbulu, dan bagian selatan Kecamatan Bulukumpa dengan tipe erosi lembar dan erosi alur. Erosi sedang sebarannya sebagian daerah Kecamatan Bulukumba, Herlang, dan Kajang, dengan tipe erosi alur dan erosi ke hulu. Erosi tinggi titik lokasi sebarannya di bagian utara daerah Kecamatan Kindang dan di bagian Timur Bulukumba, setempat - setempat di daerah pantai Kecamatan Kajang dan Herlang, tipe erosi alur dan ke hulu, serta abrasi pantai. Erosi sangat tinggi titik lokasi sebarannya setempat-setempat di sepanjang aliran Salo Bijawang, Balantieng, Anyorang, Bialo serta di sepanjang pantai Bontotiro dan Bontobahari dengan tipe erosi sungai dan abrasi pantai.

2.1.1.7.3 Sedimentasi

Sedimentasi dijumpai di daerah aliran sungai dan dataran banjir serta setempat-setempat di sepanjang pantai dan di daerah lembah tekuk lereng. Sedimentasi dapat berupa sedimen "*point bar*", "*alluvial pan*", "*channel bar*", dan endapan pantai. Sedimentasi yang agak tebal terutama dijumpai di daerah "*meander*" sungai bagian dalam dan sedimen pantai.

2.1.1.7.4 Kegempaan

Berdasarkan kondisi alam Indonesia yang berada pada Sabuk/Jalur Orogenesa dari Pegunungan Alpen - Himalaya - Sumatera - Jawa - Bali - Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur - Sulawesi Selatan - Sulawesi Tengah - Gorontalo - Sulawesi Utara - Maluku - Maluku Utara, ditambah lagi dengan pergerakan transformasi Kerak Samudera Pasifik Papua kearah Maluku-Maluku Utara, Sulawesi-Kalimantan, semuanya merupakan zona gempa, gunung api, dan sesar serta tsunami. Kabupaten Bulukumba berdasarkan peta kegempaan yang disusun oleh Sutadi (1982) termasuk dalam intensitas gempa III - V Skala Ferrel dengan percepatan maksimum 0,01 - 0,03 g dan koefisien gempa 0,56. Peta Seismotektonik Indonesia yang disusun oleh Enkong Kertapati, dkk (1991) menunjukkan bahwa di daerah Kabupaten Bulukumba pernah memiliki sejarah pusat gempa tektonik masa lalu (1828) pusat-pusat gempa terdapat di Selat Makassar, Selat Selayar atau Laut Flores.

2.1.1.7.5 Banjir

Banjir di daerah Kabupaten Bulukumba sering terjadi di daerah aliran Sungai Bialo, Sungai Balantieng, Sungai Anyorang, dan Sungai Bijawang, terutama di daerah muara dan alirannya pada daerah Palatte, Bampang,

dan Lembang. Banjir disebabkan tingginya curah hujan di sekitar bagian hulu, daerah pengalirannya cukup sempit. Batuan penyusunan adalah batuan gunung api yang permeabilitas dan porositasnya rendah, adanya penggunaan tanah untuk budidaya pertanian di daerah lereng yang tidak sesuai dengan topografi dan kondisi geologi.

Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia, maka Kabupaten Bulukumba mempunyai skor indeks rawan bencana sebesar 58 atau masuk dalam kategori kelas tinggi dengan rangking nasional berada di urutan 225.

Pengembangan wilayah kabupaten bulukumba diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Bulukumba sebagai pusat kegiatan wilayah dibidang agroindustri, pertanian, perikanan dan pariwisata.

Arahan sistem jaringan struktur ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan, Bulukumba untuk sistem jaringan transportasi nasional terdapat jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalur kereta api dan lintas penyeberangan antar pulau. Sedangkan arahan pola ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan Bulukumba untuk kawasan lindung nasional terdapat taman hutan raya Bontobahari dan kawasan budidaya strategis adalah kawasan andalan Bulukumba adalah pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan dan kawasan laut teluk bone untuk perikanan dan pariwisata.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bulukumba yang diklasifikasi sesuai dengan penetapan kawasan dalam RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 yang memiliki potensi pengembangan wilayah dibagi terhadap beberapa kawasan yang secara eksplisit dapat dilihat sebagai berikut:

a. Kawasan Lindung, yang terdiri atas:

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yang ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan. Secara spesifik kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dibagi atas dua kawasan yakni kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air dimana untuk kawasan hutan lindung dengan luas 7.850 Ha yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sedangkan kawasan resapan air ditetapkan di wilayah Kecamatan Kindang, dan sebagian wilayah Kabupaten Bulukumba.

- Kawasan perlindungan setempat; Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau, kawasan sekitar mata air, kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal serta ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya terbagi atas tiga kawasan yakni kawasan pantai berhutan bakau, kawasan taman hutan raya, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Untuk kawasan pantai berhutan bakau, ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Gantarang dengan luasan 30 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu dengan luasan 50 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe dengan luasan 170 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari dengan luasan 5 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Bonto Tiro dengan luasan 25 Ha sebagian wilayah Kecamatan Herlang dengan luas 100 Ha, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang dengan luasan 100 Ha. Untuk Kawasan Taman Hutan Raya Bontobahari ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, dengan luasan 3.475 Ha, sedangkan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di kawasan puncak Pua Janggo Kecamatan Bontobahari, Kawasan Makam Datu Tiro di Kecamatan Bontobahari, Kawasan makam Karaeng Ambibia di Kecamatan Bontotiro, dan kawasan makam Karaeng Sapohatu juga di Kecamatan Bontotiro.

b. Kawasan Rawan Bencana Alam

Untuk kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Bulukumba dibagi menjadi dua yaitu kawasan rawan banjir dan kawasan rawan tanah longsor, yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe; dan Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang.

c. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung Geologi di Kabupaten Bulukumba terbagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan cagar alam geologi dan kawasan rawan bencana alam geologi. Kawasan cagar alam geologi merupakan kawasan dengan keunikan batuan dan fosil meliputi hampir diseluruh kawasan Kecamatan di Kabupaten Bulukumba,

d. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan Lindung Lainnya ditetapkan untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya dimana untuk kawasan lindung lainnya di Kabupaten Bulukumba merupakan kawasan konservasi laut

dengan luasan 733 Ha yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari.

e. Kawasan Budidaya

Berdasarkan jenis peruntukannya, kawasan budidaya di Kabupaten Bulukumba terdiri atas sembilan jenis kawasan peruntukan yaitu sebagai berikut:

- Kawasan peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Bulukumba dengan luas kawasan 1.972 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, Bontobahari, Bontotiro, dan sebagian Kecamatan Ujungbulu.

- Kawasan peruntukan Hutan Rakyat

Untuk kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba dengan luas mencapai 22.273 Ha ditetapkan di sebagian wilayah pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba.

- Kawasan peruntukan Pertanian

Berdasarkan klasifikasi jenisnya, maka kawasan pertanian di Kabupaten Bulukumba terbagi atas empat jenis kawasan peruntukan pertanian yakni, kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, dan kawasan peruntukan peternakan. Untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luasan 62.975 Ha yang terdiri dari beberapa komoditas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan dan sayur-sayuran ditetapkan pada sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba dengan luas area sebesar 2.700 Ha, kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 23.916 Ha juga tersebar di sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, sedangkan untuk kawasan peruntukan peternakan juga tersebar di sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba dengan berbagai jenis spesies ternak.

- Kawasan peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Bulukumba berdasarkan jenis klasifikasi peruntukannya terbagi atas tiga yaitu kawasan peruntukan perikanan tangkap yang ditetapkan pada tujuh Kecamatan yang memiliki wilayah pesisir dan laut, Kecamatan Gantarang, Ujungbulu, Ujung Loe, Bonto, kawasan peruntukan budidaya perikanan di tetapkan di sebagian wilayah pada delapan Kecamatan di Kabupaten Bulukumba yakni Kecamatan Ujungbulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Herlang, Kajang dan Kecamatan Gantarang, sedangkan untuk kawasan pengolahan ikan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, Gantarang, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro dan Kecamatan Herlang. Untuk kawasan peruntukan perikanan yang akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Kajang sebagai pusat pengembangan dan sebagian wilayah

Kecamatan Ujungbulu, Gantarang, Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Bontotiro, dan Kecamatan Herlang ditetapkan sebagai zona penyanggah.

- Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan terdiri atas usaha pertambangan mineral dan batubara yang ditetapkan di sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, sedangkan pertambangan minyak dan gas bumi ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Bulukumba yang meliputi sebagian wilayah Kajang, Bontobahari, Bontotiro, Herlang dan Kecamatan Gantarang.

- Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bulukumba terdiri atas tiga jenis kawasan peruntukan yaitu kawasan peruntukan industri besar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang dengan jenis industri pengolahan kapas dan pengolahan kayu, Kecamatan Ujung Loe, dan Bulukumpa dengan jenis industri pengolahan karet, kawasan peruntukan industri sedang yang merupakan pembuatan industri kapal ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sedangkan kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, Ujung Loe, Ujungbulu, Bontotiro, Herlang, Kindang, Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa.

- Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Bulukumba dibagi atas tiga jenis kawasan peruntukan yaitu:

1. Kawasan Peruntukan Wisata Budaya, terdiri atas:

- Kawasan adat Amma Toa Kajang, di Kecamatan Kajang.
- Kawasan makam Samparaja Karaeng Sapo Batu, di Desa Tri Tiro Kecamatan Bontotiro.
- Kawasan situs Pua Janggo, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan situs Karang puang, di Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa.
- Kawasan makam Al-Maulana Khatib Bungsu (Dato Tiro), di Hila-hila Kecamatan Bontotiro.
- Kawasan makam Launru Daeng Biasa (Karaeng Ambibia) di Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro.

2. Kawasan Peruntukan Wisata Alam, terdiri dari:

- Kawasan Gua Passohara, di Desa Ara Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan Gua Malukua, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan Gua Liukang Panikia, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
- Kawasan Perkebunan Karet, di Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Bulukumpa.

- Kawasan Pantai Pasir Putih Tanjung Bira, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Pantai Pasir Putih Lemo-lemo di Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Pantai Mandala Ria, di Desa Ara Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Pantai Samboang, di Samboang Kecamatan Bontotiro.
 - Kawasan Pulau Liukang Loe, di Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Permandian alam Limbua, di Kecamatan Bontotiro.
 - Kawasan Permandian Sumur Panjang, di Hila-hila Kecamatan Bontotiro.
 - Kawasan Permandian Alam Bravo di Kelurahan Borong Rappoa di Kecamatan Kindang.
 - Kawasan Danau Buhung Tujuh Kahayya, di Desa Kindang Kecamatan Kindang.
 - Kawasan Pantai Panrang Luhu, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari
 - Kawasan Pantai Marumasa, di Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Pantai Kasuso, di Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Permandian Alam Seppenge' di Desa Bontomate'ne Kecamatan Rilau Ale.
 - Kawasan Permandian Alam Bombang Tellue di Kecamatan Rilau Ale. dan
 - Kawasan Permandian Alam Kantang, Jodoh di Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale.
3. Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan, terdiri dari:
- Kawasan Agrowisata di Kecamatan Bulukumpa dan Rilau Ale
 - Kawasan Pembuatan Perahu Phinisi, di Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Agrowisata Tambak di Kecamatan Ujung Loe.
 - Kawasan Dermaga Leppe'E di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujungbulu.
- Kawasan peruntukan permukiman
Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas dua jenis peruntukan permukiman yaitu kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya, dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan Adapun kawasan perkotaan di tetapkan sebagai berikut:
 - Kawasan peruntukan lainnya
- f. Kawasan Strategis Kabupaten
- Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan di:

- a. Kawasan pengembangan perkotaan *water front city* di Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang;
- b. Kawasan pengembangan minapolitan merupakan kawasan *marine politan center*, terdiri dari:
 1. Kawasan minapolitan untuk pengembangan komoditas budidaya perikanan laut ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Gantarang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujungbulu, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujung Loe, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontobahari, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontotiro, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Herlang, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajang; dan
 2. Kawasan minapolitan untuk pengembangan komoditas perikanan tangkap ditetapkan di seluruh wilayah Kecamatan pesisir dan dipusatkan di Kecamatan Kajang.
 3. Kawasan pusat pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Gantarang;
 4. Kawasan agrowisata di Desa Bululohe Kecamatan Rilau Ale;
 5. Kawasan pusat pengembangan pariwisata di Kecamatan Bontobahari; kawasan perdagangan di Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang;
 6. Kawasan Bandar Udara Pengumpan di Kecamatan Bontobahari; dan
 7. Kawasan ekowisata Tabbuakkang di Kecamatan Kindang.
- c. KSK dengan sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan di Kawasan pembuatan Perahu Pinisi di Kecamatan Bontobahari;
- d. KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup ditetapkan di Kawasan Danau Kahaya di Kecamatan Kindang
- e. Kawasan pusat pengembangan agropolitan ditetapkan akan dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

2.1.2 Aspek Demografi

2.1.2.1 Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2019 berjumlah 420.603 jiwa yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan. Dari 10 (sepuluh) kecamatan, Kecamatan Gantarang yang mempunyai jumlah penduduk terbesar yaitu 75.980 jiwa atau 18,06% sedangkan Kecamatan Bontotiro menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 21.390 jiwa atau 5,09%.

Pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Bulukumba, antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari angka laju pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Ujungbulu, yaitu mencapai 17,44 % pertahun. Sementara itu laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Herlang, yaitu 2,22%.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk tahunan (2018-2019) di Kabupaten Bulukumba rata-rata sebesar 0,54%, dimana Kecamatan Ujungbulu mempunyai laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 1,63% dan laju pertumbuhan penduduk tahunan terendah di Kecamatan Herlang yaitu 0,10%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kecamatan di Kabupaten Bulukumba

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
		2010	2017	2018	2019	2010-2019	2018-2019
1	2	3	4	5		6	7
1.	Gantarang	71.158	75.055	75.549	75.980	6,78	0,57
2.	Ujungbulu	48.126	54.675	55.615	56.521	17,44	1,63
3.	Ujung Loe	39.533	41.654	41.921	42.154	6,63	0,56
4.	Bontobahari	23.976	25.409	25.594	25.757	7,43	0,64
5.	Bontotiro	22.808	21.742	21.575	21.390	-6,22	-0,86
6.	Herlang	24.128	24.598	24.639	24.663	2,22	0,10
7.	Kajang	47.080	48.827	49.032	49.194	4,49	0,33
8.	Bulukumpa	50.835	52.422	52.559	52.731	3,73	0,33
9.	Rilau Ale	37.809	40.051	40.339	40.594	7,37	0,63
10.	Kindang	29.815	31.280	31.436	31.619	6,05	0,58
Bulukumba		395.268	415.713	418.326	420.603	6,41	0,54

Sumber: Dokumen Bulukumba dalam Angka 2020

2.1.2.2 Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Dilihat dari jenis kelamin, penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki yaitu 198.701 jiwa perempuan dan 221.902 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin (perbandingan laki-laki dengan perempuan) adalah 89,54, yang berarti dalam setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 90 orang penduduk laki-laki.

Tabel 2.10
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kab Bulukumba Tahun 2019

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
1	2	3
1.	Gantarang	91,30
2.	Ujungbulu	92,44
3.	Ujung Loe	89,29
4.	Bontobahari	84,47
5.	Bontotiro	75,44
6.	Herlang	83,19
7.	Kajang	90,90
8.	Bulukumpa	91,57
9.	Rilau Ale	89,02
10	Kindang	95,71
BULUKUMBA		89,54

Sumber: Dokumen Bulukumba dalam Angka 2020

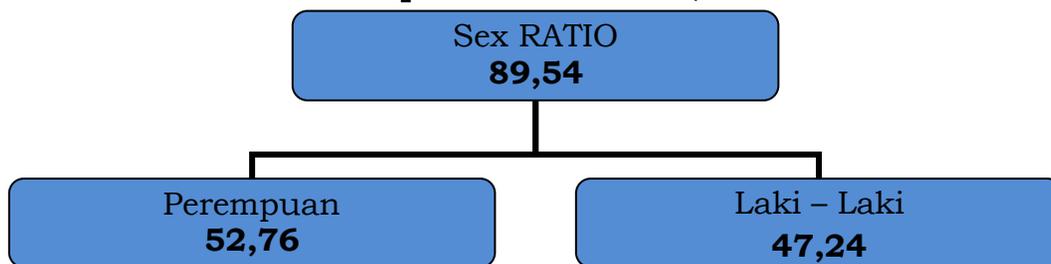
Sedangkan perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba bila dilihat dari golongan umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kab. Bulukumba Tahun 2018

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	2	3	4	5	6
1.	Gantarang	36.073	39.476	75.549	91,38
2.	Ujungbulu	26.729	28.886	55.615	92,53
3.	Ujung Loe	19.780	22.141	41.921	89,34
4.	Bontobahari	11.679	13.897	25.594	84,04
5.	Bontotiro	9.298	12.277	21.575	75,74
6.	Herlang	11.183	13.456	24.639	83,11
7.	Kajang	23.345	25.687	49.032	90,88
8.	Bulukumpa	25.148	27.451	52.559	91,61
9.	Rilau Ale	18.998	21.341	40.339	89,02
10	Kindang	15.378	16.085	31.463	95,60
BULUKUMBA		197.629	220.697	418.326	89,55

Sumber: Bulukumba dalam Angka 2019

Gambar 2.1
Rasio Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba, 2019



*)Dalam seratus penduduk Perempuan terdapat 90 Penduduk Laki - laki

Sumber: Bulukumba dalam angka 2020

2.1.2.3 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2019 yaitu 364 orang per km² yang berarti lebih padat dibandingkan tahun 2018 yang hanya 362 orang per km². Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Ujungbulu yaitu 3.914 orang per km². Hal ini terjadi karena kecamatan tersebut merupakan Ibukota Kabupaten Bulukumba, sedangkan kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Kindang yaitu 213 orang per km².

Tabel 2.12
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut di Kabupaten Bulukumba

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ³
1	2	3	4
1.	Gantarang	18,06	438
2.	Ujungbulu	13,44	3.914
3.	Ujung Loe	10,02	292

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ³
1	2	3	4
4.	Bontobahari	6,12	237
5.	Bontotiro	5,09	273
6.	Herlang	5,86	359
7.	Kajang	11,70	381
8.	Bulukumpa	12,54	308
9.	Rilau Ale	9,65	345
10	Kindang	7,52	213
Bulukumba		100	364

Sumber: Bulukumba dalam Angka 2020

2.2.1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Tabel 2.13

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2014 – 2019

TAHUN	HARGA BERLAKU		HARGA KONSTAN (2010)	
	Jumlah (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	8.374.05	16,51	6.413.69	8,53
2015	9.568.06	14,25	6.773.59	5,61
2016	10.820,01	13,08	7.234,36	6,80
2017	12.068,74	11,54	7.730,91	6,86
2018	13.193,58	9,32	8.122,33	5,05
2019	14.210,00	7,70	8.567,46	5,49
Rata-rata		12,07		6,39

Sumber :BPS Kabupaten Bulukumba 2020

2.2.2. Laju Inflasi

Tabel 2.14

Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2015-2019

URAIAN	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan
	2015	2016	2017	2018	2019	
Bulukumba	2,17	1,48	4,66	3,85	2,25	2,88
Provinsi	3,85	2,94	4,44	3,50	2,35	3,42
Nasional	4,48	3,02	3,61	3,07	2,72	3,38

Sumber : Dokumen Indikator Makro Provinsi Sulsel Tahun 2019

2.2.3. PDRB per Kapita

Tabel 2.15

PDRB Per Kapita Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

TAHUN	NILAI PDRB ADHK (Milliar Rupiah)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	PDRB Per Kapita (Rp/Jiwa)
2015	6.773.59	410.485	23.349.000,00
2016	7.234,36	413.229	26.270.438,54
2017	7.730,91	415.713	29.030.000,00
2018	8.122,33	418.326	31.550.000,00
2019	8.567,46	420.603	33.800.000,00

Sumber: Dokumen Indikator Makro Provinsi Sulsel Tahun 2019

2.2.4. Indeks Gini

Tabel 2.16
Indeks Gini Ratio
dan Nasional Tahun 2015-2019

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Bulukumba	0,39	0,37	0,32	0,35	0,37
Provinsi	0,42	0,42	0,43	0,39	0,38
Nasional	0,102	0,291	0,39	0,38	0,38

Sumber : Dokumen Indikator Makro Provinsi Sulsel Tahun 2019

2.2.5 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Tabel 2.17
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan (%)	Penduduk Diatas Garis Kemiskinan (%)
1.	2015	33.360	8,15	91,85
2.	2016	33.250	8,06	91,94
3.	2017	33.100	7,97	92,03
4.	2018	31.250	7,48	92,52
5.	2019	30.490	7,26	92,74

Sumber : Dokumen Indikator Makro Provinsi Sulsel Tahun 2019

2.2.6 Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari

Tabel 2.18
Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per
kapita per hari Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan (%)
1.	2015	33.360	8,15
2.	2016	33.250	8,06
3.	2017	33.100	7,97
4.	2018	31.250	7,48
5.	2019	30.490	7,26

Sumber: Dokumen Indikator Makro Provinsi Sulsel Tahun 2019

2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tabel 2.19
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba
Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Bulukumba	65,58	66,46	67,08	67,70	68,28
2	Provinsi	69,15	69,76	70,34	70,90	71,66
3	Nasional	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba 2019

2.2.8 Angka Melek Huruf

Tabel 2.20
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	U R A I A N	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Melek Huruf (AMH)	90,52	91,8	91,8	92,50	92,90

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.2.9 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Tabel 2.21
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Bulukumba
Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-Rata Lama Sekolah Bulukumba	6,68	6,86	7,16	7,34	7,43
2	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi	8,01	7,49	7,64	8,02	8,26
3	Rata-Rata Lama Sekolah Nasional	7,61	7,73	7,84	8,17	8,34

Sumber : Dokumen Indikator Makro Provinsi Sulsel Tahun 2019

2.2.10 Angka Usia Harapan Hidup

Tabel 2.22
Angka Usia Harapan Hidup
Kabupaten Bulukumba

No	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Bulukumba	66,73	66,84	66,96	67,27	67,69
2	Prov. Sul-Sel	69,80	69,82	69,84	70,68	70,43
3	Nasional	70,78	70,90	71,06	71,20	71,34

Sumber: Dokumen Indikator Makro Provinsi Sulsel Tahun 2019

2.2.11 Persentase Balita Gizi Buruk

Tabel 2.23
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bulukumba
Tahun 2015 – 2019

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ Balita Gizi Buruk	1	4	8	746	9
2	Jumlah Balita	37.833	38.199	37.638	42.409	29.886
3	Persentase	0,003	0,010	0,021	1,76	0,03

Sumber: Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba 2018"

2.2.12 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Tabel 2.24
Prevalensi Balita Gizi Kurang
Kabupaten Bulukumba

No	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ balita gizi kurang	335	238	808	746	414
2	Jumlah Balita	37.833	38.199	37.638	42.409	29.886
3	Persentase	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02

Sumber: Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba 2018"

2.2.13 Cakupan Desa Siaga Aktif

Tabel 2.25
Cakupan Desa Siaga Aktif
Kabupaten Bulukumba

No	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ desa siaga aktif	136	136	136	136	136
2	∑ desa siaga yg dibentuk	136	136	136	136	136
3	Cakupan	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kab.Bulukumba

2.2.14 Tingkat Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tabel 2.26

Tingkat Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Bulukumba

No	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angkatan kerja 15 thn ke atas	193.449	193.449	187.017	191.992	
2	∑ penduduk usia 15 thn ke atas	295.482	298.692	301.643	304.602	
3	Cakupan	65,47	64,77	62,00	63,03	67,02

Sumber: BPS Kab.Bulukumba

2.2.15 Tingkat partisipasi Angkatan Kerja

Tabel 2.27

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Bulukumba

No	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ Penduduk Angkatan Kerja	193.449	193.449	187.017	191.992	
2	∑ Penduduk usia kerja (15-64) thn	272.287	270.009	267.456	274.515	
3	Persentase	71,04	71,64	69,92	69,94	67,02

Sumber: BPS Kab.Bulukumba

2.2.16. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 2.28

Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Bulukumba

No	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ pengangguran terbuka usia angkatan kerja	5.796	5.796	6.833	6.946	6.830
2	∑ Penduduk angkatan kerja	193.449	193.449	187.017	191.992	206.261
3	Persentase	3	3	3,37	3,62	3,31

Sumber: BPS Kab.Bulukumba

2.2.17. Rasio Penduduk yang Bekerja

Tabel 2.29

Rasio penduduk yg bekerja
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Penduduk yang bekerja	187.653	187.653	176.184	185.046	199.431
2	Angkatan Kerja	193.449	193.449	183.017	191.992	206.261
3	Rasio	97,00	97,00	96,27	96,38	96,69

Sumber: BPS Kab.Bulukumba

2.2.18 Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja

Tabel 2.30

Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Produk Domestik Bruto	6.774,32	7.234,36	7.734,71	8.120,98	
2	∑Tenaga kerja (Jiwa)	187.653	187.653	176.184	185.046	
3	Persentase	3,61	3,85	4,39	4,39	

Sumber: BPS Kab.Bulukumba

2.2.19 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Tabel 2.31

Rasio Kesempatan Kerja terhadap penduduk Usia 15 tahun ke atas
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kesempatan Kerja	97,00	97,00	96,27	96,38	
2	∑ Penduduk usia 15 Thn keatas	295.482	298.692	301.643	304.602	
3	Rasio	0,033	0,032	0,032	0,032	

Sumber: BPS Kab.Bulukumba

2.2.20 Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga Sejahtera I

Tabel 2.32

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	21.382	21.382	22.498		
2.	Jumlah Keluarga					

Sumber: BPS Kab.Bulukumba

2.2.21 Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.33

Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Mutu Pelayanan	B	B	B	B	B

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Setda

Tabel 2.34

Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan jenis pelayanan
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kesehatan	0	0	3,07		
2	Pendidikan	0	0	3,35		
3	PTSP	0	0	2,99		
4	Dinas Catatan Sipil	0	0	3,21		

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Setda

2.2.22 Persentase PAD terhadap Pendapatan

Tabel 2.35

Persentase PAD terhadap pendapatan
Kabupaten Bulukumba

NO.	TAHUN	PAD	Jumlah Pendapatan daerah	Persentase
1	2015	112.996.638.470,00	1.332.345.752.332,80	7,95
2	2016	128.236.254.047,06	1.372.714.249.806,06	9,35
3	2017	201.042.734.094,32	1.431.205.932.261,32	14,05
4	2018	191.290.832.856,00	1.501.658.770.375,00	12,74
5	2019	192.999.078.805,00	1.546.625.357.324,00	12,74

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba

2.2.23 Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Tabel 2.36

Opini Badan Pemeriksa Keuangan Kabupaten Bulukumba
Tahun 2015-2019

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Bulukumba

2.2.24 Penguatan Cadangan Pangan

Tabel 2.37

Penguatan Cadangan Pangan
Tahun 2015-2019 Kab. Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ cadangan pangan Kabupaten	10,00	10,00	95,00	118,28	136,28
2.	Persentase	0,10	0,10	0,95	1,18	1,36

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba

2.2.25 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Tabel 2.38

Penanganan Daerah Rawan Pangan
Tahun 2015-2019 Kab. Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Ketersediaan Pangan	326,58	306,75	381,58	393,10	389,13
2.	Ketersediaan Beras	44.948.108	45.248.576	45.520.574		
3.	Persentase	0,000007	0,000007	0,000008		

Sumber: BPS Kab. Bulukumba

2.2.26 Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB

Tabel 2.39

Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB
Tahun 2015-2019 Kab. Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan	32,47	30,23	29,25		
2.	Jumlah PDRB (Miliar Rupiah)	6.774,32	7.234,36	7.734,71	8.120,98	
3.	Persentase (%)	42,93	41,01	40,39		

Sumber: BPS Kab. Bulukumba

2.2.27 Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB

Tabel 2.40

Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB
Tahun 2015-2019 Kab. Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ kontribusi PDRB dari sektor pertanian (Palawija)	15,32	14,53	14,38		
2.	∑ PDRB sector pertanian /perkebunan	32,47	30,23	29,25		
3.	Persentase (%)	32,47	30,23	29,25		

Sumber: BPS Kab. Bulukumba

2.2.28 Produksi Sektor Pertanian

Tabel 2.41

Produksi Sektor Pertanian
Tahun 2015-2019 Kab. Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ Produksi Komoditas pertanian/ton	402.025,20	423.402,02	504.098,27	479.427,55	459.295

Sumber: BPS Kab. Bulukumba

2.2.29 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB

Tabel 2.42

Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB
Tahun 2015-2017 Kab. Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ kontribusi Perkebunan (Tanaman Keras)	11,37	10,14	9,15		
2.	∑ PDRB sector pertanian /perkebunan	32,47	30,23	29,25		
3.	Persentase (%)	26,72	24,98	22,88		

Sumber: BPS Kab. Bulukumba

2.2.30 Produksi Sektor Perkebunan

Tabel 2.43

Produksi Sektor Perkebunan
Tahun 2015-2017 Kab. Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ Produksi Komoditas pertanian/ton	10.531,26	14.458,59	11.321,72	11.741,32	10.476

Sumber: BPS Kab. Bulukumba

2.2.31 Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB

Tabel 2.44

Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB
Tahun 2015-2017 Kab. Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ Produksi padi/bahan pangan utama hasil kelompok petani (ton)					
2.	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama			298.964,67	299.709,23	
3.	Persentase (%)	0,29	0,28	0,29		

Sumber: BPS Kab. Bulukumba

2.2.32 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Tabel 2.45

Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB
Tahun 2015-2017 Kab. Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ kontribusi PDRB dari sektor kehutanan	0,12	0,12	0,12		
2.	∑ PDRB	6.774.321,27	7.234.355,13	7.734.710,29		
3.	Persentase	0,29	0,28	0,29		

	(%)					
--	-----	--	--	--	--	--

Sumber: BPS Kab. Bulukumba

2.2.33 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

Tabel 2.46

Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB
Tahun 2015-2017 Kab. Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN			2018	2019
		2015	2016	2017		
1.	∑ kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan (Juta Rupiah)	121.457,13	139.545,58	157.737,00		
2.	∑ PDRB (Juta Rupiah)	6.774.321,27	7.234.355,13	7.734.710,29		
3.	Persentase (%)	2,39	2,6	2,65		

Sumber: BPS Kab. Bulukumba

2.2.34 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB

Tabel 2.47

Kontribusi Sektor Kelautan & Perikanan terhadap PDRB
Tahun 2015-2017 Kab. Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN			2018	2019
		2015	2016	2017		
1.	∑ kontribusi PDRB dari sektor Kelautan dan Perikanan	10,34	10,67	11,02		
2.	∑ PDRB	100	100	100	100	
3.	Persentase (%)	24,08	26,01	27,29		

Sumber: BPS Kab. Bulukumba

2.2.35 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Tabel 2.48

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Tahun 2015-2017 Kab. Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN			2018	2019
		2015	2016	2017		
1.	∑ kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	14,59	15,76	15,89		
2.	∑ PDRB	100	100	100		
3.	Persentase (%)	75,16	76,15	76,88		

Sumber: BPS Kab. Bulukumba

2.2.36 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Tabel 2.49

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
Tahun 2015-2017 Kab. Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN			2018	2019
		2015	2016	2017		
1.	∑ kontribusi PDRB dari sektor Industri	470.352,98	495.886,94	511.173,98		
2.	∑ PDRB	6.774.321,27	7.234.355,13	7.734.710,29		
3.	Persentase (%)	6,91	6,82	6,61		

Sumber: BPS Kab. Bulukumba

2.2.37 Kontribusi Sektor Transmigrasi terhadap PDRB

Tabel 2.50

Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri
Tahun 2015-2017 Kab. Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN			2018	2019
		2015	2016	2017		

1.	∑ kontribusi PDRB dari transmigrasi					
2.	∑ PDRB	6.774.321,27	7.234.355,13	7.734.710,29		
3.	Persentase (%)					

Sumber: BPS Kab. Bulukumba

2.3.1 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Tabel 2.51

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Tahun 2015-2017 Kab, Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Total Pengeluaran RT					
2	Jumlah RT					
3	Persentase (%)	22,31	26,18	29,29		

Sumber ; Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba

2.3.2. Nilai Tukar Petani

Tabel 2.52

Nilai Tukar Petani Tahun 2015-2017 Kab, Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	NTP	100,72	105,23	105,28	103,31	103,27

Sumber: BPS Kab. Bulukumba

2.3.3. Produktivitas Total Daerah

Tabel 2.53

Produktivitas Total Daerah
Tahun 2015-2019 Kab, Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Nilai tambah sektor					
2	∑ Angkatan kerja	193.449	193.449	183.017	191.992	
3	Persentase (%)					

Sumber: BPS Kab. Bulukumba

2.3.4 Rasio Ketergantungan

Tabel 2.54

Pembagian Penduduk Berdasarkan Usia Produktif Tahun 2018
Kabupaten Bulukumba

KELOMPOK UMUR	JUMLAH
∑ Penduduk usia <15 thn + usia >64	143.811
∑ Penduduk usia 15-64	274.515
Rasio	52,39

Sumber: BPS Kab. Bulukumba

2.4.1 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah kabupaten. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dalam menyusun rancangan awal dokumen.

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah

Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan :

2.4.1.1. Pendidikan

2.4.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel 2.55

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kab. Bulukumba
Tahun 2015 - 2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah siswa pada jenjang TK / RA / Penitipan Anak		14,075	13,402	45.043	44.675
2	Jumlah anak usia 4-6 tahun		10.690	11.760		
3	Persentase (%)	92,61	94,11	95,55	96,75	97,34

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.1.1.2. Angka Partisipasi Kasar

Tabel 2.56

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Tahun 2015-2017
Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bulukumba

NO	Uraian	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI/Sederajat :	107,65	105,61	105,09	107,89	113,10
2	SMP/MTS/Sederajat:	102,08	103,85	104,29	87,97	87,75
3	SMA/MA/Sederajat:	78,55	85,95	88,58	60,04	91,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba

2.4.1.1.3. Angka Pendidikan yang ditamatkan

Tabel 2.57

Persentase angka pendidikan yang ditamatkan Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
3.3	Persentase(%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.1.1.4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, sebab pengukuran APM menggunakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan

Tabel 2.58

Perkembangan Angka Partisipasi Murni Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.4.1	SD/MI/paket A	97,57	97,46	96,92	99,63	
1.4.1.1	Jumlah Murid Usia 7-12 Thn	50.574	49.664	43.509	45.633	
1.4.1.3	APM SD/MI/Paket A	96,10	95,90	92,50	82,25	98,48
1.4.2	SMP/MTS/paket B	93,68	91,89	91,39	80,55	
1.4.2.1	Jumlah murid usia 13-15 thn	17,885	16,757	16,603	20.194	
1.4.2.3	APM SMP/MTS/Paket B	79,77	76,02	77,18	61,31	82,36
1.4.3	SMA / SMK/MA/PAket C	92,90	98,74	90,59	50,52	
1.4.3.1	Jumlah Murid Usia 16-18 THN	12,905	13,457	13,596	14.471	
1.4.3.3	APM SMA / SMK / MA / PAKet C	59,48	62,07	63,15	50,83	65,88

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.1.1.5. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah untuk jenjang pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1000 penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.59
APS Pendidikan Dasar Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.5.1	SD/MI					
1.5.1.1	∑ Siswa Usia 7-12 thn	50.574	49.664	43.509	45.633	
1.5.1.3	APS SD/MI	97,62	97,17	96,02	99,16	110,25
1.5.2.1	∑ Siswa Usia 13-15 thn	17.885	16.757	16.603	20.194	
1.5.2.3	APS SMP/MTs	93,58	91,87	91,33	91,98	102,1
1.5.3.1	∑ Siswa Usia 16-18 thn	12.905	13.457	13.596	14.471	
1.5.3.3	APS SMA/SMK/MA	92,89	90,72	90,57	74,18	98,40

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.1.1.6. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun atau anak-anak di usia sekolah SD/MI/ sederajat, SMP/MTS/ sederajat, dan SMA/MA/ sederajat, seperti yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel. 2.60
Angka putus Sekolah Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.6.1.3	APS SD/MI	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05
1.6.2.3	APS SMP/MTs	0,22	0,20	0,18	0,16	0,12
1.6.3.3	APS SMA/SMK/MA	0,22	0,20	0,17	0,15	0,10

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.1.1.7. Angka Kelulusan

Tingkat kelulusan adalah jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan dibandingkan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada setiap jenjang pendidikan tahun sebelumnya. Untuk Kabupaten Bulukumba, angka kelulusan di tiap jenjang pendidikan mengalami perkembangan yang fluktuatif dan berbeda-beda.:

Tabel. 2.61
Angka Kelulusan Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.7.1	SD/MI/Paket A					
1.7.1.1	∑ lulusan pada jenjang SD/MI	7.581	7.578	7.598		
1.7.1.3	AK SD/MI/Paket A	98,66	99,23	99,40	99,70	99,85
1.7.2	SMP/MTs/Paket B					
1.7.2.1	∑ lulusan pada jenjang SMP/MTs/paket B	6.990	6.996	7.113		
1.7.2.3	AK SMP/MTs/Paket B	98,84	99,33	99,50	99,85	99,90
	∑ lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA/ Paket C					
1.7.3.3.	AK SMA/SMK/MA/ Paket C	89,18	97,00	98,00	99,15	99,95

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.1.1.8. Angka Melanjutkan (AM)

Tabel.2.62
Angka melanjutkan Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		7.578			
	PRESENTASE	103,58	102,52	100,75	100,61	100,25
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		6.996			
	PRESENTASE	93,39	96,08	97,35	97,50	98,65

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.1.1.9. Fasilitas Pendidikan

Kualitas pendidikan suatu daerah dapat dinilai dari fasilitas pendidikan yang ada. Proses belajar mengajar akan berlangsung maksimal dan member dampak yang lebih baik dengan jumlah sekolah yang cukup dan kondisi ruang belajar yang memadai. Untuk fasilitas pendidikan di Kabupaten Bulukumba, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.63
Fasilitas Pendidikan Dalam Kondisi Bangunan Baik Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik					
1.9.1.1	∑ Kondisi Bangunan Baik					
1.9.1.2	∑ Seluruh Sekolah SD/MI	385	387	388	387	
1.9.1.3	Peresentase	18,03	20,10	21,30	21,50	22,75
1.9.2.	Sekolah Pendidikan SMP/MTs					
1.9.2.1	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik					
1.9.2.2	∑ Seluruh Sekolah SMP/MTs	111	112	113	154	
1.9.2.3	Presentase	20,07	25,12	27,91	30,24	32,50
	SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik					
	∑ Kondisi Bangunan Baik SMA/SMK/MA					
	∑ Seluruh Sekolah SMA/SMK/MA					
	Presentase	65,45	67,65	69,95	70,45	72,65

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.1.1.10. Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah yang ada di suatu daerah untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah, maka semakin tinggi pula kemampuan suatu daerah untuk menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakatnya.

Tabel 2.64
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1	∑ Sekolah SD/MI	385	387	388	387	
2.1	∑ Sekolah SMP/MTs	111	112	113	154	
2.3	RASIO	1:30	1:32	1:33	1:34	1:34

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.1.1.11. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Sekolah untuk jenjang pendidikan menengah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah.

Tabel 2.65

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menengah Tahun 2015 –2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SMA/MA/SMK					
1.1	∑ Sekolah	39	39	40	40	
1.2	∑Penduduk Usia 16-18 Tahun	24.375	24.375	25.000		
1.3	Rasio	1:60	1:60	1:65	1:70	1:70

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.1.1.12. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru/murid adalah indikator yang digunakan dalam mengukur capaian jumlah ideal murid untuk setiap guru guna mewujudkan berlangsungnya proses belajar mengajar yang berkualitas

Tabel. 2.66

Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015 – 2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI	385	387	388	387	
1.1	Jumlah Guru	4.048	3.793	3.649	3.631	
1.2	Jumlah Murid	50.466	50.558	48.936	41.266	
1.3	Rasio	1 : 12	1 : 13	1 : 13	1 : 11	1:30
2	SMP/MTs	111	112	113	154	
2.1	Jumlah Guru	1.930	2.040	1.903	2.201	
2.2	Jumlah Murid	21.990	21.741	21.508	20.194	
2.3	Rasio	1 : 11	1 : 10	1 : 11	1 : 9	1:30

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba (diolah)

2.4.1.1.13 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

Rasio guru/murid adalah indikator yang digunakan dalam mengukur capaian jumlah ideal murid untuk setiap guru guna mewujudkan berlangsungnya proses belajar mengajar yang berkualitas pada jenjang pendidikan menengah

Tabel. 2.67

Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Tahun 2015 – 2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SMA/MA/SMK	39	39	40		
1.1	Jumlah Guru	1.358	1.358	995		
1.2	Jumlah Murid	13.583	13.583	14.561		
1.3	Rasio	1 : 10	1 : 10	1 : 14	1:30	1:30

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba (diolah)

2.4.1.1.14 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Dasar

Tabel. 2.68

Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio	1:23	1:25	1:27	1:28	1:29

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.1.1.15 Rasio Guru terhadap Murid Per Kelas Rata-rata

Tabel. 2.69

Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata
Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio	1:21	1:26	1:27	1:28	1:29

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.1.1.16 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki

Tabel 2.70

Angka melek huruf penduduk usia 15-24 th perempuan & laki-laki
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Banyaknya penduduk usia 15-24 th		66.873	66.887		
2	∑ Penduduk Usia 16-19 Tahun yg melek huruf		65.756	66.098		
3	Rasio		98,33	98,82	90,6	90,89

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.1.1.17 Penduduk yang Berusia 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Tabel 2.71

Penduduk yg berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase	92,48	92,50	92,51	97,80	96,89

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.1.1.18. Guru yang Memenuhi Kualifikasi SI / D-IV

Tabel 2.72

Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Di Kabupaten Bulukumba
Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase	86,20	86,30	89,7	90,90	94,94

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.1.2 KESEHATAN

2.4.1.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Tabel. 2.73

Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

No.	Tahun	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB
1	2015	29	6.566	4,42
2	2016	56	6.224	9,00
3	2017	40	6.458	7,74
4	2018	69	6.327	10,91
5	2019	64	6.370	10,05

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.2 Angka Kelangsungan hidup bayi

Tabel.2.74

Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Kabupaten Bulukumba

No.	Tahun	Angka Kematian Bayi	Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 Tahun)	AKHB
1	2015	4,41	6.566	29	-3,41
2	2016	8,99	6.224	56	-7,99
3	2017	6,19	6.458	40	-5,19
4	2018	6,19	6.327	69	-9,91
5	2019	6,19	6.370	64	-9,05

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.3 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Tabel. 2.75

Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

No.	Tahun	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun)	Jumlah Kelahiran Hidup	AKBa
1	2015	29	6.566	4,49
2	2016	59	6.224	9,48
3	2017	45	6.458	6,97
4	2018	88	6.327	13,91
5	2019	70	6.370	10,99

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.4 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Tabel. 2.76

Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup
Kabupaten Bulukumba

No.	Tahun	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan)	Jumlah Kelahiran Hidup	AKN
1	2015	29	6.566	4,42
2	2016	40	6.224	6,43
3	2017	40	6.458	6,19
4	2018	72	6.327	11,38
5	2019	51	6.370	8,01

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.5. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Tabel. 2.77

Angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

No.	Tahun	Jumlah ibu hamil yg meninggal karna hamil, bersalin dan nifas	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI
1	2015	7	6.566	1,07
2	2016	4	6.224	0,64
3	2017	6	6.458	0,93
4	2018	7	6.327	1,11
5	2019	3	6.370	0,47

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.6 Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Tabel. 2.78

Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Posyandu	560	569	574	582	581
2	Jumlah Balita	37.833	38.199	37.683	38.616	29.886
3	Rasio	1,48	1,49	1,52	1,51	1,94

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.7. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk adalah jumlah seluruh puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu per 1000 penduduk. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan. Di Kabupaten Bulukumba, rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu dapat dilihat melalui tabel berikut

Tabel 2.79

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Puskesmas	22	22	22	20	20
	Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	Jumlah Poliklinik	14	15	15	15	15
	Rasio Poliklinik per Satuan Penduduk	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
3	Jumlah Pustu	58	58	60	61	61
	Rasio Pustu per Satuan Penduduk	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
4	Jumlah Penduduk	410.485	413.229	415.713	418.326	420.603

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.8 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Tabel. 2.80

Rasio Rumah Sakit Tahun 2019
Kabupaten Bulukumba

No	Uraian	Tahun 2019
1	Jumlah Rumah sakit Umum (Pemerintah)	1
2	Jumlah Rumah sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0
3	Jumlah Rumah sakit AD/AU/AL/POLRI	0
4	Jumlah Rumah Sakit Daerah	0
5	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	1
6	Jumlah Penduduk	420.603
7	Rasio	0,0024

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.9. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter digunakan untuk mengukur ketersediaan tenaga medis berdasarkan jumlah penduduk. Perkembangan jumlah dokter (termasuk dokter spesialis) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.81

Rasio Dokter Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Dokter	82	78	78	83	96
2	∑ Penduduk	410.485	413.229	415.713	418.326	420.603
3	Rasio	0,20	0,19	0,19	0,20	0,23

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.10. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis digunakan untuk mengukur ketersediaan tenaga medis berdasarkan jumlah penduduk. Tenaga medis adalah petugas paramedis yang melayani pemeriksaan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, atau di rumah. Tenaga medis tidak termasuk dokter.

Jumlah tenaga medis per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.82

Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ Tenaga Kesehatan	724	749	772	810	703
2	∑ Penduduk	410.485	413.229	415.713	418.326	420.603
3	Rasio	1,76	1,81	1,86	1,94	1,67

Sumber: Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.11. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di tangani

Selain indikator diatas, indikator kinerja urusan kesehatan juga meliputi beberapa cakupan layanan kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.83

Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani
Kabupaten Bulukumba

NO.	INDIKATOR	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difenitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	1.533	1.436	1.382	1.525	1.257
2	∑ ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama	1.514	1.533	1.525	1.269	1.525
3	Rasio	101,25	93,67	90,62	120,17	82,43

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.11. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Selain indikator diatas, indikator kinerja urusan kesehatan juga meliputi beberapa cakupan layanan kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.84

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

NO.	INDIKATOR	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	6.454	6.032	6.309	6.221	5.788
2	∑ seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	7.228	7.279	7.279	7.280	7.280
3	Rasio	89,29	82,87	86,67	85,45	79,51

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.12. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Tabel. 2.85

Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	INDIKATOR	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	136	136	136	136	136
2.	∑ Desa/Kelurahan	136	136	136	136	136
3.	Rasio	100	100	100	100	100

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.13. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan

Tabel 2.86

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO.	INDIKATOR	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	1	4	8	746	9
2.	∑ seluruh balita gizi buruk yg ditemukan	1	4	8	746	9
3.	Cakupan	100	100	100	100	100

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.14. Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori dibawah tingkat konsumsi Minimum (Standar yang digunakan Indonesia 2.100 KKal/Kapita/hari)

Tabel. 2.87

Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yg digunakan Indonesia 2.100 kkal/kapita/hari)
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Banyaknya penduduk yg tngkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 kkal/kapita/hari					
2	Jumlah Balita	41.709	6.224	6.458	42.409	29.886
3	Rasio					

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.15. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Tabel. 2.88

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ anak usia 1 tahun yg mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun	6.379	6.774	6.670	6.365	6.440
2	∑ anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	6.883	6.932	6.870	6.932	7.621
3	Persentase	92,68	97,72	97,09	91,82	84,50

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.16. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

Tabel. 2.89

Non polio AFP rate per 1000 penduduk Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	1	3	4	8	4

2	∑ penduduk < 15 tahun	115.003	122.845	122.845	113.724	113.724
3	Jumlah	0,087	2,44	3,26	7,03	3,52

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.17. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Tabel. 2.90

Cakupan balita pnemonia yang ditangani Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ penderita pnemonia balita yang ditangani	540	381	596	638	515
2	∑ perkiraan penderita pneumonia balita	4.171	4.809	4.317	20.115	20.115
3	Cakupan	12,95	7,92	13,81	3,17	2,56

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018"

2.4.1.2.18. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBCBT

Tabel. 2.91

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC dan BTA Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	317	255	291	37	347
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	3.284	3.120	4.094	208	620
3	Cakupan	9,65	8,17	7,11	17,76	55,97

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.19. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Pemduduk)

Tabel. 2.92

Tingkat prevalensi Tuberkulosis Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Banyaknya kasus penderita TBC (Baru atau Lama)	503	485	637	637	651
2	∑ penduduk	410.485	413.229	415.713	418.326	420.603
3	Tingkat	122,54	117,37	153,23	152,27	154,78

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.20. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tabel.2.93

Tingkat kematian karena tuberculosis (per 100.000 penduduk)
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ pasien TB yg meninggal	19	15	17	25	24
2	∑ penduduk	410.485	413.229	415.713	418.326	420.603
3	Tingkat	4,63	3,63	4,14	5,98	5,71

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.21. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS

Tabel. 2.94

Proporsi kasus tuberculosis yg terdeteksi di program DOTS
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ pasien tuberculosis BTA yg mendapat pengobatan melalui DOTS	325	320	246	637	347
2	∑ pasien baru TB paru BTA	317	255	291	267	620
3	Proporsi	102,52	125,49	84,54	238,58	55,97

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.22. Proporsi kasus tuberculosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Tabel. 2.95

Proporsi kasus tuberculosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Tahun
2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ pasien tuberculosis paru BTA yg sembuh	235	266	190	558	
2	∑ pasien TB dan BTA yg sembuh yg diobati	525	320	246	637	
3	Proporsi	72,31	83,13	77,24	87,60	

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.23. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Tabel. 2.96

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun	252	431	110	152	275
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama	252	431	110	152	275
3	Cakupan	100	100	100	100	100

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.24 Penderita diare yang ditangani

Tabel. 2.97

Jumlah Penderita diare yang ditangani 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader	10.154	6.009	5.843	6.431	6.590
2	∑ perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	10.376	11.122	11.083	11.295	11.157
3	Jumlah	97,86	54,03	52,72	56,94	59,07

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.25. Angka Kejadian Malaria

Tabel. 2.98
Angka Kejadian Malaria Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ penduduk yang menderita malaria	20	22	39	43	23
2	∑ penduduk pada pertengahan tahun	410,485	413,229	415,713	418.326	420.603
3	Rasio	4,87	5,32	9,38	10,28	5,47

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.26. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Tabel. 2.99
Tingkat Kematian Akibat Malaria Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑kematian tersangka malaria	0	0	0	0	0
2	∑ penduduk berisiko pd kurun waktu 1 tahun	3.304	843	1.024	842	664
3	Tingkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.27. Pravalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

Tabel. 2.100
Pravlensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ pasien HIV & AIS+DS	14	28	21	42	66
2	∑ penduduk	410.485	413.229	415.713	418.326	420.603
3	Rasio	0,003	0,007	0,005	0,010	0,016

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018"

2.4.1.2.28 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Tabel. 2.101
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Tahun 2015-2017Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1	1	1	2	2	2
2	∑ seluruh miskin di kabupaten	1	1	2	2	2
3	Cakupan	100	100	100	100	100

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.29. Cakupan Kunjungan Bayi

Tabel. 2.102
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan	7.389	7.710	4.820	6.804	6.735

2	∑ seluruh bayi lahir hidup	6.883	6.932	5.983	6.932	7.621
3	Cakupan	107,35	111,22	80,56	98,15	88,37

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.30. Cakupan Puskesmas

Tabel. 2.103

Cakupan Puskesmas Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ puskesmas	20	20	20	20	20
2	∑ seluruh kecamatan	10	10	10	10	10
3	Cakupan	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.31. Cakupan Pembantu Puskesmas

Tabel. 2.104

Cakupan Pembantu Puskesmas Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ pembantu puskesmas	58	58	58	61	61
2	∑ seluruh desa	109	109	109	109	109
3	Cakupan	53,21	53,21	3,21	5,96	55,96

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.32. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Tabel 2.105

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	6,212	5,799	6,309	5.943	5.262
2	∑ sasaran ibu hamil	7,571	7,625	7,625	7.625	7.265
3	Cakupan	82.05	76.05	82.74	77,94	72,43

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.33. Cakupan Pelayanan Nifas

Tabel. 2.106

Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ peserta ibu nifas yg telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas	6,657	6,101	6,471	6.256	6.353
2	Seluruh ibu nifas di satu wilayah	7,228	7,279	7,279	7.280	7.280
3	Cakupan	92.10	83.82	88.90	85,93	87,27

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.34. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangan

Tabel. 2.107

Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yg Ditangani
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ neonates dgn komplikasi	6.566	6.226	6.431	306	481

	yg tertangani					
2	∑ seluruh neonates dgn komplikasi yg ada	6.566	6.328	6.458	6.257	956
3	Cakupan	100,00	98,39	99,58	4,89	50,31

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.35. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Tabel. 2.108

Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	22.410	21.855	19.222	21.665	20.661
2	∑ seluruh anak balita	34.697	41.155	41.154	42.409	29.886
3	Cakupan	64,59	53,10	46,71	51,09	69,13

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.36. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin

Tabel. 2.109

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pd Anak Usia 6 – 24
Bulan Keluarga Miskin Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan					

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.37. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Tabel. 2.110

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ Murid setingkat yg mendapatkan pelayanan kesehatan	6,828	8,810	7,528	6,762	5,691
2	∑ murid SD dan setingkat	7,822	11,378	8,196	7,651	5,848
3	Cakupan	87,29	77,43	91,85	88,38	97,32

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018"

2.4.1.2.38. Cakupan Pelayanan Pasien Miskin di Sarkes Strata 1

Tabel. 2.111

Cakupan Pelayanan Pasien Miskin di Sarkes Strata 1 Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ kunjungan pasien miskin	41.108	43.352		213.599	174.854
2	∑ seluruh masyarakat miskin	33.360	33.250		221.911	231.931
3	Cakupan (%)	123,23	130,38		96,25	75,39

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2018"

2.4.1.2.39. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yg Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Tabel. 2.112

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yg Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pelayanan gawat darurat level 1				1.385	1.789
2	Jumlah RS				1	1
3	Cakupan				138.500	178.900

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.2.40. Cakupan Desa/Kel. Mengalami KLB yg dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Tabel. 2.113

Cakupan Desa/Kel. Mengalami KLB yg dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	6	7	6	7	5
2	Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten	6	7	6	7	5
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dokumen "Profil Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019"

2.4.1.3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.4.1.3.1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Tabel 2.114

Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Panjang Jalan Kondisi Baik	745,84	909,28	979,3	1.034	1.127
2	Panjang Jalan Seluruhnya	1210,38	2205,19	2205,19	2.205	2.205
3	Persentase	0,62	0,41	0,44	0,47	0,51

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.2 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Tabel 2.115

Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Panjang Jalan Seluruhnya	1210,38	2205,19	2205,19	2.205	2.205
2	∑ Penduduk	410.485	413.229	415.713	418.326	420.603
3	Rasio	0,003	0,005	0,005	0,005	0,005

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.3. Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik

Tabel 2. 116

Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba



NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	575	736	806	861	954
2	Panjang seluruh Jalan Kabupaten	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
3	Persentase	55,30	70,87	77,60	82,84	91,77

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.4 Persentase rumah tinggal bersanitasi

Tabel. 2.117

Persentase rumah tinggal bersanitasi Tahun 2018-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi		86.715	87.700
2.	Jumlah rumah tinggal		113.870	115.449
3.	Persen		76,15	75,96

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.5 Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar

Tabel 2.118

Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Panjang Sempadan Sungai yang dipakai bangunan Liar (Km)	-	-	-	-	-
2.	Panjang Seluruh Sempadan Sungai	-	-	14.140	781.500	-
3.	Persentase	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas PSDA Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.6 Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Tabel. 2.119

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tdk tersumbat Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Persentase	8	4	2

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.7 Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun

Tabel. 2.120

Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Persentase	10	8	6

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.8 Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

Tabel. 2.121

Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	∑ lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	-	-	-
2.	∑ seluruh wilayah rawan longsor	-	-	-
3.	Persentase	-	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.9 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Tabel. 2.122

Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	*(Luas Irigasi Kewenangan pemerintah Kabupaten berdasarkan Permen PUPR NO.14/PRT/M/2015)					
1.	Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Ha)	11.728	12.422	12.884	15.065	15.658
2.	Luas Irigasi Kabupaten (Ha)	20.777	20.777	20.777	20.777	20.777
3.	Persentase (%)	56,45	59,79	62,01	72,51	75,36

Sumber: Dinas PSDA Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.10 Rasio Jaringan Irigasi Persentase penduduk berakses air minum

Tabel 2.123

Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 - 2019

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Panjang Jaringan		22.549	3.315	17.872	12.407
2	Luas Lahan Budi Daya Pertanian	104.321	104.017	91.047	118.961	
3	Rasio		0,22	0,04	0,15	

Sumber: Dinas PSDA Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.11 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan

Tabel.2.124

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1.	Penduduk berakses air minum	-	94.681	96.433
2.	Jumlah penduduk	-	415.713	418.329
3.	Proporsi	-	22,78	23,05

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.12. Persentase rumah areal kawasan kumuh

Tabel.2.125

Persentase rumah areal kawasan kumuh Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas Kawasan Kumuh	218	218	218	218	119,17
2.	Luas Wilayah	115.458	115.458	115.458	115.458	115.458
3.	Persen	0,19	0,19	0,19	0,19	0,10

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.16. Rasio Jaringan Irigasi

Tabel.2.126

Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Persentase	10,811	10,811	10,811

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.17. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tabel 2.127

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum	-	-	-	-	-
2.	Jumlah penduduk	410.485	413.229	415.713	418.326	420.603
3.	Rasio					

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.18. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Tabel 2.128

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ Tempat Ibadah	1.033	1.097	1.097	1.132	1.092
2.	∑ Penduduk	410.485	413.229	415.713	418.326	420.603
3.	Rasio	2,52	2,65	2,64	2,71	2,60

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.19. Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB

Tabel. 2.129

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Rasio	33,28	33,28	33,28

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.20 Luasan RTH Public Sebesar 20 % dari Luas Wilayah Kota /Kawasan Perkotaan

Tabel. 2.130

Luasan RTH public sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Rasio	380,85	380,85	380,85

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.21 Rasio Bangunan Ber IMB

Tabel.2.131

Rasio bangunan ber IMB Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2016	2017	2018
1.	Jumlah Bangunan Ber-IMB	-	43.767	44.239
2.	Jumlah Bangunan	-	104.834	105.096
3.	Rasio	-	0,42	0,42

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.22 Ruang Publik yg Berubah Peruntuknya

Tabel.2.132

Ruang public yg berubah peruntuknya Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	∑ public yg berubah fungsi	-	-	-
2.	∑ ruang publik yg tersedia	-	-	-
3.	Rasio	-	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba

2.4.1.3.23. Ketaatan terhadap RTRW

Tabel.2.133

Ketaatan terhadap RTRW Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Rasio	90	90	90

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba

2.4.1.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.4.1.4.1. Rasio Rumah Layak Huni

Tabel. 2. 134

Rasio rumah layak huni Tahun 2017-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Jumlah rumah layak huni	102.270	102.768	103.029
	Jumlah penduduk	415.713	418.326	420.603
	Rasio	0,25	0,25	0,24

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba

2.4.1.4.2. Persentase kawasan kumuh

Tabel. 2.135

Persentase kawasan kumuh Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase		0,05	0,15	0,13	0,55

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba

2.4.1.4.3.Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Tabel. 2.136

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Rasio (3:4)	Tidak Ada	88	91,63

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba

2.4.1.4.4.Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkuan

Tabel. 2.137

Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkuan
Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	cakupan	Tidak Ada	2	8

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba

2.4.1.4.5 Persentase Pemukiman yang Tertata

Tabel. 2.138

Persentase Pemukiman yang Tertata Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Luas area permukiman tertata	-	-	-
2	Luas area permukiman keseluruhan	-	-	-
3	Persentase	Tidak Ada	Tidak Ada	1,95

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba

2.4.1.4.6. Persentase Lingkungan Permukiman Kumah

Tabel. 2.139

Persentase Lingkungan Permukiman Kumah Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
3	Persentase	Tidak Ada	Tidak Ada	10,49

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba

2.4.1.4.7 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Tabel. 2.140

Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
Tahun 2017-2018 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Luasan permukiman kumuh yang tertangani	-	11,0	6,3
	Luas permukiman kumuh	-	23	23
	Persentase	-	47,65	27,52

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba

2.4.1.4.8 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Tabel. 2.141

Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN			
		2017	2018	2018	2019
1	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	1.366	1.366	1.366	1.366
	Jumlah seluruh rumah	115.487	115.487	115.487	115.487
	Persentase	1,18	1,18	1,18	1,18

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba

2.4.1.5 KETENTRAMAN , KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2.4.1.5.1 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Tabel. 1.142

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	100 orang petugas Linmas di Kabupaten daerah pemekaran baru	1.606	1.606	1.606	1.606	1.360
2	1 Wilayah kerja kabupaten	410.405	413.229	416.910	437.209	438.095
3	Persentase	0,39	0,39	0,39	0,37	0,31

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kab. Bulukumba

2.4.1.5.2 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tabel. 2.143
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pelanggaran K3 yang disediakan	25	95	73	380	315
2.	∑ pelanggaran K3 yang di laporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	1	10	15	315	224
3.	Persentase	5,00	10,00	20,00	82,89	71,11

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kab. Bulukumba

2.4.1.5.3 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Tabel. 2.144
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jangkauan luas wilayah kebakaran	176,26	176,26	176,26	176,26	176,26
2.	Luas wilayah Kabupaten	1.154,67	1.154,70	1.154,70	1.154,70	1.154,70
3.	Persentase	15,26	15,26	15,26	15,26	15,26

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kab. Bulukumba

2.4.1.5.4 Tingkat Waktu Tanggap (response Time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tabel. 2.145
Tingkat waktu tanggap (response Time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yg tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit	84,00	34,00	43,00	90,00	180,00
2.	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK	141,00	45,00	68,00	108,00	182,00
3.	Persentase	59,57	75,56	63,24	83,33	98,90

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kab. Bulukumba

2.4.1.5.5 Persentase Penegakan PERDA

Tabel. 2.146
Persentase Penegakan PERDA Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	87	188	276	205	170
2	Jumlah pelanggaran PERDA	13	56	118	94	58
3	Persentase	14,94	29,79	42,75	45,85	34,12

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kab. Bulukumba

2.4.1.6 SOSIAL

2.4.1.6.1 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Tabel 2.147
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ PMKS yang diberikan bantuan	28.086	28.086	28.086	35.691	32.831
2	∑ PMKS yang seharusnya menerima bantuan	740	27.273	27.336	35.691	35.691
3	Persentase	2,63	97,11	97,33	100,00	108,71

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Bulukumba

2.4.1.6.2 Persentase PMKS yang Tertangani

Tabel. 2.148

Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ PMKS yang tertangani	740	27.273	27.336	35.691	32.831
2	∑ PMKS yang ada	28.086	28.086	28.108	35.691	35.691
3	Persentase	2,63	97,11	97,25	100,00	91,99

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Bulukumba

2.4.1.6.3 Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Tabel. 2.149

Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	740	27.273	27.336	35.691	32.831
2	Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	28.086	28.086	28.108	35.691	35.691
3	Persentase	2,63	97,11	97,25	100,00	91,99

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Bulukumba

2.4.1.6.4 Persentase Panti Sosial yg Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis lainnya

Tabel. 2.150

Persentase panti Sosial yg menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok Sosial ekonomi sejenis lainnya Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ PMKS yg menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE	770	140	160	420	340
2	∑ PMKS yg seharusnya menjadi peserta KUBE	770	140	160	420	340
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Bulukumba

2.4.1.6.5 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Tabel. 2.151

Persentase Panti Sosial yg Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ panti Sosial yg menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	18	6	6	4	6
2	∑ panti Sosial yg seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	18	6	6	4	6
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Bulukumba

2.4.1.6.6 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Tabel. 2. 152

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ WKBSM yg menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	2	2	2	2	2
2	∑ WKBSM yg seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala	2	2	2	2	2
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Bulukumba

2.4.1.6.7 Persentase Korban Bencana yg Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Tabel. 2.153

Persentase Korban Bencana yg Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ korban bencana yg seharusnya menerima bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	200	200	200	200	345
2	∑ korban bencana yg seharusnya menerima bantua Sosial selama masa tanggap darurat	200	200	200	200	345
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Bulukumba

2.4.1.6.8 Persentase Korban Bencana yang di Evakuasi dengan Menggunakan Sarana Prarasana Tanggap Darurat Lengkap

Tabel. 2.154

Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prarasana Tanggap Darurat Lengkap Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	-	-	-	-

2	∑ korban bencana yang seharusnya di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala	-	-	-	-	-
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Bulukumba

2.4.1.6.9 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia tidak Potensial yg telah menerima Jaminan Sosial

Tabel. 2.155

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yg telah menerima jaminan Sosial Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
2	∑ penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	57	37	100	214	203
3	Persentase	1,59	1,03	2,79	5,98	5,67

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Bulukumba

2.4.2 ASPEK PELAYANAN UMUM FOKUS PELAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.4.2.1 TENAGA KERJA

2.4.2.1.1 Angka sengketa pengusaha pekerjaan per tahun

Tabel. 2.156

Angka sengketa pengusaha pekerjaan per tahun
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	1	2	2	2	8
2	Jumlah perusahaan	402	402	402	402	402
3	jumlah	0,002	0,005	0,005	0,005	0,020

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Bulukumba

2.4.2.1.2 Besaran Kasus yang di Selesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Tabel. 2.157

Besaran kasus yang di selesaikan dengan perjanjian bersama (PB)
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	2	2	2	2	5
2	∑ kasus yang dicatatkan	3	2	3	3	8
3	Jumlah	0,667	1,00	0,667	0,667	0,625

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Bulukumba

2.4.2.1.3 Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang Ditempatkan

Tabel. 2.158

Besaran pencari kerja yang terdaftar ditempatkan Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ pencari kerja yang ditempatkan	1.412	2.004	3.214	915	1.464
2	∑ pencari kerja yang terdaftar	2.829	3.340	4.018	1.970	1.054
3	Persentase	0,5	0,6	0,8	0,46	1,39

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Bulukumba

2.4.2.1.4 Keselamatan dan Perlindungan

Tabel. 2.159

Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2016-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	∑ perubahan yang menerapkan K3	-	-	-
2.	∑ perusahaan di wilayah kabupaten	-	-	-
3.	Persentase	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Bulukumba

2.4.2.1.5 Besaran Pekerjaan/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Tabel. 2.160

Besaran pekerjaan / buruh yg menjadi peserta program Jamsostek
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ pekerja/buruh JAMSOSTEK	117	478	1.318	6.710	1.318
2	∑ pekerja/buruh	252	252	252	8.005	252
3	Persentase	0,46	1,90	5,23	0,84	5,23

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Bulukumba

2.4.2.1.6 Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Tabel. 2.161

Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan
Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1.	∑ penyelesaian perselisihan buruh		2	1
2.	pengusaha dengan kebijakan pemda pada Tahun "n"		2	2
3.	Jumlah		1,00	0,50

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Bulukumba

2.4.2.1.7. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Tabel. 2.162

Besaran Pemeriksaan Perusahaan Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ perusahaan yang telah diperiksa	70	75	80	45	45
2	∑ perusahaan yang terdaftar	252	252	252	70	75
3	Persentase	27,78	29,76	31,75	64,29	60,00

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Bulukumba

2.4.2.1.8. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Tabel. 2.163

Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ peralatan yang telah diuji	15	20	25	2	2
2	∑ peralatan yang telah terdaftar	15	20	25	70	75
3	Persentase	1	1	1	0,029	0,027

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Bulukumba

2.4.2.1.9 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tabel. 2.164

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun
2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ tenaga kerja yang dilatih	160	365	272	368	640
2	∑ Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	308	402	500	580	1.000
3	Jumlah	51,95	90,80	54,40	63,45	64,00

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Bulukumba

2.4.2.1.10 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Tabel. 2.165

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ tenaga kerja yang dilatih	64	128	96	128	176
2	∑ pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	250	350	300	410	520
3	Persentase	25,60	36,57	32,00	31,22	33,85

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Bulukumba

2.4.2.1.11 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Tabel. 2.166

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ tenaga kerja yang dilatih	52	60	64	80	24
2	∑ pendaftar pelatihan kewirausahaan	69	60	76	99	34
3	Jumlah	75,36	100,00	84,21	80,81	70,59

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Bulukumba

2.4.2.1.12 Rasio Lulusan S1 / S2 / S3

Tabel. 2.167

Rasio Lulusan S1 / S2 / S3 Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	546	546	546	56	48

2	∑ Penduduk	410.485	413.229	415.713	418.326	420.603
3	Rasio	0,0013	0,0013	0,0013	0,0001	0,0001

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Bulukumba

2.4.2.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.4.2.2.1 Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Tabel. 2.168

Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pekerja perempuan dilembaga pemerintah	3.851	3.680	3.677	3.601	3.592
2	∑ pekerja perempuan	3.851	3.680	3.745	3.683	3.697
3	Persentase	100,00	100,00	98,18	97,77	97,16

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Bulukumba

2.4.2.2.2. Proporsi kursi yg diduduki perempuan di DPR

Tabel. 2.169

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ kursi DPRD yg diduduki perempuan	6	6	6	6	8
2	∑ total kursi di keanggotaan DPRD	40	40	40	40	40
3	Persentase	15,00	15,00	15,00	15,00	20,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Bulukumba

2.4.2.2.3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Tabel. 2.170

Partisipasi perempuan di lembaga swasta Tahun 2017-2019
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Pekerja perempuan di lembaga swasta	68	82	105
2	Jumlah pekerja perempuan	3.745	3.683	3.697
3	Persentase	1,82	2,23	2,84

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Bulukumba

2.4.2.2.4 Rasio KDRT

Tabel. 2.171

Rasio KDRT Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
1	Jumlah KDRT	1	46	37	38
2	Jumlah rumah tangga	137.743	138.847	139.442	140.201
3	Rasio	0,001	0,033	0,027	0,027

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Bulukumba

2.4.2.2.5 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Tabel. 2.172

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Pekerja anak usia 5-14 tahun	-	-	-
2	Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas	-	-	-
3	Persentase	-	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Bulukumba

2.4.2.2.6 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tabel. 2.173

Partisipasi angkatan kerja perempuan Tahun 2018-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	∑ partisipasi angkatan kerja perempuan	1.982	1.486	1.610
2	∑ angkatan kerja perempuan	3.745	3.683	3.697
3	Persentase	52,92	40,35	43,55

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Bulukumba

2.4.2.2.7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit Pelayanan terpadu

Tabel. 2.174

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan
penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit
Pelayanan terpadu Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ pengaduan /laporan yg ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	1	1	4	11	2
2	∑ laporan /pengaduan yg masuk ke unit pelayanan terpadu	1	3	126	148	128
3	Persentase	100,00	33,33	3,17	7,43	1,56

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Bulukumba

2.4.2.2.8 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Tabel. 2.175

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban
Kekerasan Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	2	1	2	4	3
	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	34	42	51	56	67
	Cakupan	5,88	2,38	3,92	7,14	4,48

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Bulukumba

2.4.2.2.9 Cakupan Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban

Tabel. 2.176

Cakupan Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak
korban kekerasan tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan	2	1	3	5	6



masyarakat lainnya					
Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	31	42	51	56	67
Cakupan	6,45	2,38	5,88	8,93	8,96

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Bulukumba

2.4.2.2.10 Rasio APM perempuan / laki-laki di SD

Tabel. 2.177

Rasio APM perempuan / laki-laki di SD Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	APM-SD perempuan	26.451	8.590	89.552
2	APM-SD laki-laki	27.021	8.500	22.503
3	Rasio	97,89	101,06	397,96

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Bulukumba

2.4.2.2.11 Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP

Tabel. 2.178

Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP Tahun 2017-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	APM-SMP perempuan	29.641	6.250	7.590
2	APM-SMP laki-laki	29.274	6.751	7.552
3	Rasio	101,25	92,58	100,50

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Bulukumba

2.4.2.2.12 Rasio APM perempuan / laki-laki di SMA

Tabel. 2.179

Rasio APM perempuan / laki-laki di SMA Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18 tahun	35.302	5.625	5.681
2	Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18 tahun	490.487	6.250	5.641
3	Rasio	7,20	90,00	100,71

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Bulukumba

2.4.2.2.13 Rasio Angka Melek Huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahunan

Tabel. 2.180

Rasio Angka Melek Huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahunan Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Rasio	92,74	98,33	98,82

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kab. Bulukumba

2.4.2.3 PANGAN

2.4.2.3.1 Ketersediaan Pangan Utama

Tabel. 2.181

Ketersediaan pangan utama Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata	141.678.620	133.686.210	156.679.840	163.416.950	162.784.700



	jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)					
2	Jumlah Penduduk	410.485	435.810	413.229	415.713	418.326
3	Persentase	34.515	30.675	37.916	39.310	38.913

Sumber : Dinas Ketahanan & Pangan Kab. Bulukumba

2.4.2.4 PERTANAHAN

2.4.2.4.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Tabel. 2.182

Persentase luas lahan bersertifikat Tahun 2017-2019 Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Jumlah luas lahan bersertifikat		1.785.687	2.003.312
2	Jumlah luas wilayah		1.071.372	6.682.228
3	Persentase		166,67	29,98

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba

2.4.2.4.2 Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Tabel. 2.183

Penyelesaian kasus tanah Negara Tahun 2017-2019
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Jumlah kasus yang diselesaikan		2	6
2	Jumlah Kasus yang terdaftar		5	12
3	Persentase		40,00	50,00

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba

2.4.2.4.3 Penyelesaian Izin Lokasi

Tabel. 2.184

Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	∑ izin lokasi			
2	Permohonan izin lokasi			
3	Persentase			

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba

2.4.2.5. LINGKUNGAN HIDUP

2.4.2.5.1. Tersusunnya RPPLH kabupaten

Tabel. 2.185

Tersusunnya RPPLH kabupaten Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Ada	-	-	-
2.	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.2 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana Pembangunan Kabupaten

Tabel. 2.186

Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten
Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN
-----	--------	-------

		2015	2016	2017
1.	Ada	-	-	-
2.	Tidak Ada	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.3 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas air

Tabel. 2.187

Hasil pengukuran Indeks kualitas air Tahun 2015-2019
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Baik (memenuhi baku mutu)	-	-	Baik	Baik	Baik
2.	Cemar ringan	-	Ringan	-	-	-
3.	Cemar sedang	Cemar sedang	-	-	-	-
4.	Cemar berat	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.4 Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara

Tabel. 2.188

Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.5 Hasil Pengukuran Indeks kualitas tutupan lahan

Tabel. 2.189

Hasil Pengukuran Indeks kualitas tutupan lahan Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	552352.03	552352.03	552352.03
2.	Tutupan hutan (TH)	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.6 Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha / atau kegiatan yg diawasi ketaatannya terhadap PPLH, PUU LH yg diterbitkan oleh pemerintah kabupaten

Tabel.2.190

Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha / atau kegiatan yg diawasi ketaatannya terhadap PPLH, PUU LH yg diterbitkan oleh pemerintah kabupaten Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	∑ ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dan izin yang diterbitkannya oleh pemerintah daerah	-	-	-
2.	Total penanggungjawab usaha atau kegiatan yang dibina	-	-	-
3.	Persentase	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.7 Peningkatan kapasitas & sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD)

Tabel. 2.191

Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	∑ PPLHD yang dilatih atau dibina	-	-	-
2.	∑ sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.8. Terasilitasi pendampingan pengakuan MHA

Tabel. 2.192

Terasilitasi pendampingan pengakuan MHA Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	∑ MHA yang di akui	0	0	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.9 Terverifikasinya MHA & kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

Tabel. 2.193

Terverifikasinya MHA & kearifan lokal atau pengetahuan tradisional Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	∑ MHA & kearifan lokal atau pengakuan tradisional yg dierverifikasi	1	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.10 Terverifikasinya MHA & kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

Tabel. 2.194

Terverifikasi hak kearifan lokal atau baik pengetahuan tradisional Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	∑ hak kearifan lokal atau baik pengetahuan tradisional yang terverifikasi	1	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.11 Penetapan hak MHA

Tabel. 2.195

Penetapan hak MHA Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	∑ penetapan hak MHA	1	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.12 Terasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan & keterampilan

Tabel. 2.196

Terasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan & keterampilan Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	∑ MHA yg difasilitasi	1	1	1
2.	∑ total MHA	1	1	1
3.	Persentase	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.13 Terasilitasi penyediaan sarana / prasarana

Tabel. 2.197
Terfasilitasi penyediaan sarana / prasarana Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	∑ MHA yang diberikan sarana/ prasarana	1	1	1
2.	∑ total MHA	1	1	1
3.	Persentase	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.14 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat

Tabel. 2.198
Terlaksananya dan pelatihan masyarakat
Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	∑ pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kab.	Tidak ada	Tidak ada	100%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.15 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Tabel. 2.199
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tidak Ada	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.16 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kab, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten

Tabel. 2.200
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Kab., lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Pengaduan masyarakat yang ditangani	Tidak ada	Tidak ada	100%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.17 Timbunan sampah yg ditangani

Tabel. 2.201
Timbunan sampah yang ditangani Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Volume timbunan sampah yang ditangani	0,56	0,56	0,56

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.18 Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Tabel. 2.202
Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R
Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Sampah yang berkurang melalui 3 R	50%	50%	50%
2.	Jumlah sampah yang di kelola melalui aktifitas 3 seperti bank	-	-	-

	sampah, pusat daurulang dll			
--	-----------------------------	--	--	--

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.19 Persentase Cakupan Area Pelayanan

Tabel. 2.203

Persentase cakupan area pelayanan Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (Km ² /ha)	1,25	1,25	4,75

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.20 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Tabel. 2.204

Persentase jumlah sampah yang tertangani
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	∑ sampah yg tertangani (ton)	56%	56%	56%

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.5.21 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten

Tabel. 2.205

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Nilai TPA (Program adipura	75%	75%	75%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.2.6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.4.2.6.1. Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk.

Tabel. 2.206

Rasio penduduk ber KTP per Satuan Penduduk Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	∑ penduduk usia > 17 yang ber KTP	210,007	274,609	283,043
2	∑ penduduk usia 17 atau yang telah menikah	329,111	325870	325870
3	Persentase (%)	0,64	0,84	0,87

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba

2.4.2.6.2 Rasio bayi berakte kelahiran

Tabel. 2.207

Rasio bayi berakte kelahiran Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	∑ bayi berakte kelahiran	2,896	4,723	4,089
2	Jumlah bayi	6,566	6,224	6,458
3	Rasio	6,458	6,458	6,458

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba

2.4.2.6.3 Rasio pasangan berakte nikah

Tabel. 2.208

Rasio pasangan berakte nikah Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	∑ pasangan nikah berakte nikah	1,246	274,609	283,043
2	∑ keseluruhan pasangan nikah	116,533	325,870	325,870
3	Rasio	0.64	0.84	0.87

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba

2.4.2.6.4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Tabel. 2.209

Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi
Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba

2.4.2.6.5 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Tabel 2.210

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Penerapan KTP Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba

2.4.2.6.6 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Tabel. 2.211

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	∑ KTP ber-NIK yang diterbitkan	23,832	25,382	24,824
2	∑ Penduduk Wajib KTP	329,111	325,870	325,870
3	Persentase	0,2	0,21	0,28

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba

2.4.2.6.7 Cakupan penerbitan akte kelahiran

Tabel. 2.212

Cakupan penerbitan akte kelahiran Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	∑ penduduk lahir & memperoleh akte kelahiran di tahun bersangkutan	210,007	274,609	283,043
2	∑ kelahiran di tahun bersangkutan	329,111	325,870	325,870
3	Persentase (%)	63.81	84.27	86.86

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba

2.4.2.7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.4.2.7.1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Tabel. 2.213

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa
yang Baik Tahun 2015-2017 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ kantor pemerintahan desa yang baik	70	73	74	100	109
2	∑ seluruh pemerintahan desa	109	109	109	109	109
3	Persentase	64,22	66,97	67,89	91,74	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bulukumba

2.4.2.7.2 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Tabel. 2.214

Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ Kelompok Binaan LPM	93	93	93	93	93
2	∑ LPM	93	93	93	93	93
3	Rata-Rata	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bulukumba

2.4.2.7.3 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Bulukumba

Tabel 2.215

Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kelompok binaan PKK	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
2	Jumlah PKK	146	146	146	146	146
3	Rata-rata jumlah	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bulukumba

2.4.2.7.4 PKK Aktif

Tabel 2.216

PKK Aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ PKK Aktif	146	146	146	146	146
2	Total PKK	146	146	146	146	146
3	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bulukumba

2.4.2.7.5 Persentase Posyandu Aktif

Tabel 2.217

Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Total Posyandu	125	125	125	125	125
2	∑ Posyandu Aktif	127	127	127	127	127
3	Persentase Posyandu Aktif	98,43	98,43	98,43	98,43	98,43

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bulukumba

2.4.2.8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.4.2.8.1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Tabel 2.218

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kab. Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase	0,76	0,74	0,72		0,63

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2.4.2.8.2. Total Fertility Rate (TFR)

Tabel 2.219

Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019

1	Angka TFR	2,32	1,93	2,32	2,31	2,32
---	-----------	------	------	------	------	------

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2.4.2.8.3. Persentase Perangkat Daerah yg berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB

Tabel 2.220

Persentase Perangkat Daerah yg berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ perangkat daerah yg berperan aktif di kampung KB	-	15	15	22	22
2	∑ semua perangkat daerah	-	36	36	36	36
3	Persentase	-	41,67	41,67	61,11	61,11

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2.4.2.8.4 Persentase perangkat daerah yg menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengembalian penduduk

Tabel. 2.221

Persentase perangkat daerah yg menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan raancangan induk pengembalian penduduk	15	15	15	3	3
2	∑ semua perangkat daerah	36	36	37	37	37
3	Persentase	41.67	41.67	41.67	8,33	8,33

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2.4.2.8.5 Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk

Tabel. 2.222

Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ perda atau perkara tentang pengendalian penduduk	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2.4.2.8.6 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

Tabel. 2.223

Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	TAHUN
----	--------	-------

		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Sektor	6	6	6	6	6

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2.4.2.8.7 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan

Tabel. 2.224

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ kerja sama pendidikan kependudukan	1.Dinas pendidikan 2.IBI 3.Panti Asuhan Aisyah	1.Dinas pendidikan 2.IBI 3.Panti Asuhan Aisyah	1.Dinas pendidikan 2.IBI 3.Panti Asuhan Aisyah	1.Dinas pendidikan 2.IBI 3.PKBM	1.Dinas pendidikan 2.IBI 3.PKBM

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2.4.2.8.8. Rasio Akseptor KB

Tabel. 2.225

Rasio Akseptor KB

Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ Akseptor KB	55.520	58.719	53.165	4.077	6.484
2	∑Pasangan usia Subur	74.506	72.514	74.902	68.984	10.810
3	Rasio	74.52	80.98	70.98	5,91	59,98

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2.4.2.8.9 Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah Usia 15 – 49 tahun

Tabel. 2.226

Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah Usia 15 – 49 tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ Peserta KB Aktif	55,520	53,165	59,181	50.426	53.071
2	∑ Pasangan Usia Subur	74,506	72,514	74,902	68.984	70.501
3	Persentase	74.52	73.32	79.01	73,10	75,28

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2.4.2.8.10 Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 Tahun

Tabel. 2.227

Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 Tahun Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	2.844	-	-	-	-
2	Jumlah pasangan usia subur	68.984	-	-	-	-
3	Persentase	4,12	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2.4.2.8.11 Cakupan pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

Tabel. 2.228

Cakupan pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak
Terpenuhi Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ PUS yang ingin ber- KB tetapi tidak terlayani	12.769	10.457	12.487	11.438	11.057
2	∑ pasangan usia subur	74.506	72.514	74.902	68.984	70.501
3	Persentase	17,14	14,42	16,67	16,58	15,68

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bulukumba

2.4.2.8.12 Persentase menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

Tabel. 2.229

Persentase menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ akseptor KB yang menggunakan MKJP	4.352	5.426	6.140	1.984	2.164
2	∑ akseptor KB	55.520	58.719	53.163	4.077	6.484
3	Persentase	7,84	9,24	11,55	48,66	33,37

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bulukumba

2.4.2.8.13 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi

Tabel. 2.230

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	6.227	5.726	6.859	18.558	6.205
2	∑ akseptor KB	55.520	58.719	53.165	50.426	51.871
3	Persentase	11,22	9,75	12,90	36,80	11,96

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bulukumba

2.4.2.8.14. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB

Tabel. 2.231

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ anggota kelompok BKB yang ber KB	1.251	1.010	1.013	1.925	2.182
2	∑ anggota kelompok BKB	2.448	2.448	2.448	3.792	3.792
3	Persentase	51,10	41,26	41,38	50,76	57,54

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bulukumba

2.4.2.8.15. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)

Tabel. 2.232

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ anggota kelompok BKR yang ber-KB	470	307	373	1.235	1.475
2	∑ anggota kelompok BKR	952	952	952	2.645	2.646
3	Persentase	49,37	32,25	39,18	46,69	55,74

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bulukumba

2.4.2.8.16. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber - KB

Tabel. 2.233

Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber - KB
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN		
----	--------	-------	--	--

		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ Anggota kelompok BKL yang ber-KB	548	182	220	951	1.031
2	∑ Anggota kelompok BKL	952	952	952	2.186	2.186
3	Persentase	57,56	19,12	23,11	43,50	47,16

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bulukumba

2.4.2.8.17 Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan

Tabel. 2.234

Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PPKS	1	1	1	1	1
2	Jumlah kecamatan	10	10	10	10	10
3	Persentase	10	10	10	10	10

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bulukumba

2.4.2.8.18 Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Kamseling remaja / mahasiswa

Tabel. 2.235

Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Kamseling remaja
/ mahasiswa Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PIK R/M	756	756	756	36	36
2	Jumlah Kecamatan	10	10	10	10	10
3	Persentase	7.560	7.560	7.560	360	360

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bulukumba

2.4.2.8.19 Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk

Tabel. 2.236

Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan perangkat Daerah KB untuk
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian
penduduk Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PKB & PLKB yang didaya gunakan	74	83	76	74	74
2	Jumlah PKB / PLKB	74	83	76	74	74
3	Cakupan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bulukumba

2.4.2.8.20 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) yg ber -KB mandiri

Tabel. 2.237

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha peningkatan Pendapatan
keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber -KB mandiri
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ anggota kelompok UPPKS yang berKB mandiri	1.080	1.080	1.080	358	358
2	∑ anggota kelompok UPPKS	54	54	54	1.280	1.280
3	Cakupan	2.000	2.000	2.000	27,97	27,97

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bulukumba

2.4.2.8.21 Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa / Kelurahan

Tabel. 2.238

Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap
Desa/Kelurahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	136	136	136	136	136
2	Jumlah desa/kelurahan	136	136	136	136	136
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB kab. Bulukumba

2.4.2.8.22 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Tabel. 2.239

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang Alkon Kab/kota	45.153	45.153	45.153	40.137	13.405
2	Perkiraan Permintaan masyarakat	45.153	45.153	45.153	40.137	13.405
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bulukumba

2.4.2.8.23 Persentase Faskes dan Jejaringannya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarnisasi pelayanan

Tabel. 2.240

Persentase Faskes dan Jejaringannya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarnisasi pelayanan Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ Faskes dan jejaringan yg bekerjasama dengan BPJS	132	132	132	45	45
2	∑ Faskes dan Jejaringan	132	132	132	191	191
3	Persentase	100	100	100	23,56	23,56

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

2.4.2.8.24 Cakupan kelompok kegiatan yg melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Tabel. 2.241

Cakupan kelompok kegiatan yg melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	444	444	308	444	444
2	∑ kelompok kegiatan	498	498	498	498	498
3	Persentase	89,16	89,16	61,85	89,16	89,16

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bulukumba

2.4.2.8.25 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Tabel . 2.242

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN		
----	--------	-------	--	--

		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	-	-	3.514	497	544
2	∑ keluarga mempunyai balita dan anak	-	-	25.017	973	1.018
3	Persentase	-	-	14,05	51,08	53,44

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bulukumba

2.4.2.8.26. Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDesa

Tabel. 2.243

Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDesa Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO.	TAHUN	∑ ANGGARAN UNTUK URUSAN PPKB	∑ APBD DAN APB DESA	PERSENTASE
1	2015	9.636.215.763	1.331.962.405.570	0,723
2	2016	11.211.547.350	1.528.918.342.046	0,733
3	2017	8.732.211.049	154.365.755.318.543	0,006
4	2018	8.253.258.059		
5	2019	9.791.984.931	1.519.679.311.837	0,644

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Bulukumba

2.4.2.9 PERHUBUNGAN

2.4.2.9.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Tabel 2.244

Jumlah arus penumpang Angkutan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	670	670	670	670	670

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba

2.4.2.9.2. Rasio Ijin Trayek

Tabel 2.245

Rasio Ijin Trayek Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ ijin trayek yang dikeluarkan	435	320	700	566	310
2	Jumlah penduduk	410.485	413.229	415.713	418.326	420.603
3	Rasio Ijin Trayek	0,0011	0,0008	0,0017	0,0014	0,0007

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba

2.4.2.9.3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Tabel 2.246

Persentase Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah KIR	6.246	5.467	4.741	5.038	4.516

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba

2.4.2.9.4. Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal

Tabel 2.247

Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	TAHUN		
----	--------	-------	--	--

		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba

2.4.2.9.5 Persentase Layanan Angkutan Darat

Tabel 2.248

Persentase Layanan Angkutan Darat
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ Angkutan Darat	670	670	520	670	670
2	∑ Penumpang Angkutan Darat	18.432.000	14.573.421	19.673.200	2.183.400	21.926.000
3	Persentase	0,004	0,005	0,003	0,031	0,003

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba

2.4.2.9.6 Pemasangan Rambu-rambu

Tabel 2.249

Pemasangan Rambu-rambu
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ Pemasangan rambu-rambu	2	4	3	3	3
2	∑ rambu-rambu seharusnya tersedia	4	4	5	3	3
3	Persentase	50,00	100,00	60,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba

2.4.2.9.7 Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan

Tabel. 2.250

Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Panjang Jalan	240	240	240	240	240
2	Jumlah kendaraan	670	670	520	670	670
3	Rasio	0,36	0,36	0,46	0,36	0,36

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba

2.4.2.9.8. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Tabel 2.251

Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ orang/ barang yang terangkut angkutan umum	4.950	4.850	10.352	12.743	14.675

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba

Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Tabel 2.252

Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
(Bandara, dermaga, terminal) Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal	4.950	4.850	52.820	53.673,2	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba

2.4.2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.4.2.10.1. Cakupan Pengembangann pemberdayaan kelompok informasi di tingkat

Tabel 2.253

Cakupan Pengembangann pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan

NO	URAIAN	2018	2019
1	Jumlah KIM	1	1
2	Σ kecamatan yang ada dalam kab	10	10
3	Cakupan	10	10

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika, persandiaan dan Statistik Kab. Bulukumba

2.4.2.10.2.Cakupan Layanan Telekomunikasi

Tabel. 2.254

Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2019

NO.	URAIAN	2018	2019
1.	Luas Wilayah yang tercoverage	1.130 km ²	1.138,5 km ²
2.	Luas wilayah keseluruhan	1.154,7 km ²	1.154,7 km ²
3	Cakupan	0,98	0,98

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika, persandiaan dan Statistik Kab. Bulukumba

2.4.2.10.3.Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon

Tabel. 2.255

Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2019

NO.	URAIAN	2018	2019
1.	Σ Penduduk yang menggunakan HP/Telepon	302.683	345.731
2.	Σ Penduduk	418.326	420.603
3	Persentase	72,36	82,20

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika, persandiaan dan Statistik Kab. Bulukumba

2.4.2.10.4 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Tabel. 2.256

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2019

NO.	URAIAN	2018	2019
1.	Σ Rumah Tangga yg memiliki akses internet	65.000	72.000
2.	Σ Rumah Tangga	101.196	101.748
3	Proporsi	0,64	0,71

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika, persandiaan dan Statistik Kab. Bulukumba

2.4.2.10.5.Proporsi Rumah Tangga yang memiliki computer pribadi

Tabel. 2.257

Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2019

NO	URAIAN	2018	2019
1.	Σ Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	5.165	5.430
2.	Σ Rumah Tangga	101.196	101.748
3	Proporsi	0,051	0,053

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika, persandiaan dan Statistik Kab. Bulukumba

2.4.2.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.4.2.11.1. Persentase Koperasi Aktif

Tabel 2.258

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
-----	--------	------	------	------	------	------

1.	∑ Koperasi Aktif	210	226	226	201	
2.	∑seluruh Koperasi	288	308	279	286	
3.	Persentase	72,92	73,38	81,00	70,28	

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumba

2.4.2.11.2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif

Tabel. 2.259

Persentase UKM non BPR/LKM aktif Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	2019
1.	∑ UKM non BPR/LKM aktif	39.120
2.	∑ seluruh UKM non BPR/LKM	39.156
3.	Persentase	99,91

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumba

2.4.2.11.3. Persentase BPR/LKM aktif

Tabel 2.260

Persentase BPR/LKM aktif
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	2015	2016	2017
1.	Jumlah seluruh BPR/UKM	-	-	-
2.	Jumlah BPR/LKM aktif	-	-	-
3.	Persentase	-	-	-

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumba

2.4.2.11.4. Persentase Usaha Mikro dan kecil

Tabel 2.261

Persentase Usaha Mikro dan kecil
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ usaha mikro dan kecil	32.999	33.440	34.282	8.120	-
2.	Jumlah seluruh UKM	34.035	34.982	35.824	39.156	-
3.	Persentase	96,95	95,6	95,7	97,35	-

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Bulukumba

2.4.2.12 PENANAMAN MODAL

2.4.2.12.1 Jumlah Investor berkala Nasional (PMDN / PMA)

Tabel 2.262

Jumlah Investor berkala nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Bulukumba

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	TOTAL
2015	Jumlah Investor	0	-	
2016	Jumlah Investor	311	-	311
2017	Jumlah Investor	214	-	214
2018	Jumlah Investor	620	-	620
2019	Jumlah Investor	539	-	539

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Bulukumba

2.4.2.12.2 Jumlah Nilai Investasi berkala nasional (PMDN / PMA)

Tabel 2.263

Jumlah Nilai Investasi berkala nasional (PMDN / PMA)
Kabupaten Bulukumba

Tahun	Persetujuan	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2015	-	216.054.000.000
2016	-	1.471.875.000.000
2017	-	143.983.073.400
2018	-	643.456.342.045
2019	-	94.614.000.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Bulukumba

2.4.2.12.3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tabel 2.264

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Σ Tenaga Kerja yang bekerja pada perusahaan	-	-	2.799	2.799	
2.	Jumlah Seluruh PMA/ PMDN	-	-	214	620	
3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	-	-	13,08	4,51	

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Bulukumba

2.4.2.12.4 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Tabel 2.265

Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)
Kabupaten Bulukumba

Tahun	Realisasi PMDN Tahun Evaluasi - Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi	Realisasi PMDN Sebelum Evaluasi	Jumlah
2015			
2016	1.255.821.000.000	216.054.000.000	5,813
2017	(1.327.891.926.600)	1.471.875.000.000	-0,902
2018	499.473.268.645	143.983.073.400	3,469
2019	(548.842.342.045)	643.456.342.045	-0,853

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Bulukumba

2.4.2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2.4.2.13.1 Persentase organisasi pemuda yg aktif

Tabel. 2.266

Persentase organisasi pemuda yg aktif
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	2017	2018	2019
1	Σ organisasi pemuda yg aktif	45	46	47
2	Σ seluruh organisasi pemuda	47	48	48
3.	persentase	95,74	95,83	97,92

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba

2.4.2.13.2 Persentase wirausaha muda

Tabel 2.267

Persentase wirausaha muda
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Σ wirausaha muda	-	-	47	73	98
2	Σ seluruh wirausaha	-	-	100	100	100
3.	persentase	-	-	47,00	73,00	98,00

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba

2.4.2.13.3 Cakupan pembinaan olahraga

Tabel 2.268

Cakupan pembinaan olahraga
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Σ cabang olahraga yg dibina	-	-	1	2	4
2	Σ seluruh cabang olahraga yg ada /terdaftar	-	-	22	22	22
3.	Persentase			4,55	9,09	18,18

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba

2.4.2.13.4 Cakupan pelatih yang bersertifikasi

Tabel. 2.269

Cakupan pelatih yang bersertifikasi
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ pelatih bersertifikat	-	-	7	12	15
2	∑ seluruh pelatih	-	-	58	58	58
3.	Cakupan	-	-	12,07	20,69	25,86

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba

2.4.2.13.5 Cakupan pembinaan atlet muda

Tabel 2.270

Cakupan pembinaan atlet muda
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ atlet pelajar yang dibina	-	-	20	40	60
2	∑ seluruh atlet pelajar	-	-	167	167	167
3.	persentase	-	-	11,98	23,95	35,93

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba

2.4.2.13.6 Jumlah atlet berprestasi

Tabel 2.271

Jumlah atlet berprestasi
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ atlet yang meemnangi kejuruan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba

2.4.2.13.7 Jumlah prestasi olahraga

Tabel. 2.272

Jumlah prestasi olahraga
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yg di menangkan dalam 1 Thn	-	-	13	26	26

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba

2.4.2.14 STATISTIK

2.4.2.14.1 Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Tabel 2.273

Tersedianya Sistem Data Statistik yang Terintegrasi
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Ada				√	√
2	Tidak Ada	√	√	√		

2.4.2.14.2 Buku “ Kabupaten Dalam Angka”

Tabel 2.274

Buku “ Kabupaten Dalam Angka:
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Ada	√	√	√	√	√
2	Tidak Ada					

Sumber : Dinas Kominfo, Persandian & Statistik Kab. Bulukumba

2.4.2.14.3 Buku “ PDRB”

Tabel 2.275

Buku PDRB Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN		
----	--------	-------	--	--

		2015	2016	2017	2018	2019
1	Ada	√	√	√	√	√
2	Tidak Ada					

Sumber : Dinas Kominfo, Persandian & Statistik Kab. Bulukumba

2.4.2.15 PERSANDIAN

2.4.2.15.1 Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah

Tabel. 2.276

Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	33	33	37	37	37
2	∑ Total Perangkat Daerah	33	33	37	37	37
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kominfo, Persandian & Statistik Kab. Bulukumba

2.4.2.16 KEBUDAYAAN

2.4.2.16.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Tabel 2.277

Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Bulukumba

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	2	2	3	5	5

Sumber : Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.2.16.2 Benda situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan

Tabel 2.278

Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Kabupaten Bulukumba

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	20	21	22	23	24
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	20	21	22	23	24
3	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.2.16.3. Jumlah karya budaya yg direvitalisasi dan inventarisasi

Tabel 2.279

Jumlah karya budaya yg direvitalisasi dan inventarisasi Kabupaten Bulukumba

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ karya budaya yg direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.2.16.4 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Tabel 2.280

Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Kabupaten Bulukumba

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ cagar budaya yang dikelola secara terpadu	0	0	0	28	51

Sumber : Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba

2.4.2.17 PERPUSTAKAAN

2.4.2.17.1 Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun

Tabel 2.281

Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ kunjungan ke perpustakaan Selama 1 tahun	270.000	281.020	284.060	290.784	294.447
2.	∑ orang dalam populasi yang harus dilayani	410.485	413.229	415.713	418.326	420.603
3.	Persentase	0,66	0,68	0,68	0,70	0,70

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bulukumba

2.4.2.17.2 Koleksi buku yang tersedia di dalam perpustakaan daerah

Tabel 2. 282

Koleksi buku yang tersedia di dalam perpustakaan daerah
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ koleksi judul buku	7.219	8.052	8.052	8.503	8.628
2.	∑ koleksi jumlah buku	16.073	17.518	17.518	19.810	20.150
3.	Persentase	0,45	0,46	0,46	0,43	0,43

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bulukumba

2.4.2.17.3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk

Tabel 2.283

Rasio perpustakaan persatuan penduduk
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ perpustakaan	300	300	300	300	300
2.	∑ penduduk	410.485	413.229	415.713	418.326	420.603
3.	Rasio	0,73	0,73	0,72	0,72	0,71

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bulukumba

2.4.2.17.4 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /Tahun

Tabel 2.284

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /Tahun
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rata-rata pengunjung perpustakaan	270.000	281.020	284.060	290.784	294.447

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bulukumba

2.4.2.17.5 Jumlah koleksi judul buku peprpustakaan

Tabel 2.285

Jumlah koleksi judul buku peprpustakaan Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ koleksi judul buku perpustakaan	7.219	8.052	6.052	8.508	8.628

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bulukumba

2.4.2.17.6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat

Tabel 2.286

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ pustakawan, tenaga teknis dan penilai yg bersertifikat	302	302	302	302	302
2.	∑ seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	629	629	629	704	704

3.	Persentase	48,01	48,01	48,01	42,90	42,90
----	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bulukumba

2.4.2.18 KEARSIPAN

2.4.2.18.1 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

Tabel 2. 287

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ perangkat daerah yg telah menerapkan arsip secara baku	5	5	5	2	1
2.	∑ perangkat daerah	41	41	46	46	46
3.	Persentase	12,20	12,20	10,87	4,35	2,17

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bulukumba

2.4.2.18.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Tabel 2.288

Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	2	2	3

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bulukumba

2.4.3. LAYANAN URUSAN PILIHAN

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu urusan :

2.4.3.1. PARIWISATA

2.4.3.1.1 Kunjungan wisata

Tabel 2.289

Kunjungan wisata Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ capaian kinerja kunjungan wisata se kab.	180.741	178.580	203.770	266.348	280.590
2	∑ kunjungan wisata yang direncanakan se kab.	110.000	120.000	220.000	300.000	350.000
3	Persentase	164,31	148,82	92,62	88,78	80,17

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Bulukumba

2.4.3.1.2 Lama Kunjungan Wisata

Tabel 2.290

Lama kunjungan wisata Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata kunjungan wisata	2	2	3	2	2

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Bulukumba

2.4.3.2.3 PAD Sektor Pariwisata

Tabel 2.291

PAD sector pariwisata Tahun 2015-2017
Kabupaten Bulukumba

TAHUN	PAD SEKTOR PARIWISATA	TOTAL APBD	PERSENTASE
2015	1.720.352.000	102.000.914.225	1,69
2016	2.529.111.000	1.401.656.660.905	0,18

2017	3.058.970.000	1.425.941.646.400	0,21
2018	3.075.895.000	200.080.565.507	1,54
2019	3.275.065.000	169.256.213.901	1,93

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Bulukumba

2.4.3.3 PERTANIAN

2.4.3.3.1 Kontribusi sector pertanian / perkebunan terhadap PDRB

Tabel 2.292

Kontribusi sector pertanian / perkebunan terhadap PDRB
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	33,27	31,75	31,03	28,72	28,72

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, H.P Kab. Bulukumba

2.4.3.3.2 Kontribusi Sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

Tabel 2.293

Kontribusi Sektor pertanian (palawija) terhadap
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ kontribusi PDRB dari sektor pertanian (Palawija)	49,46	49,68	50,27	45,66	45,66

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, H dan P Kab. Bulukumba

2.4.3.3.3 Kontribusi Sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Tabel 2. 294

Kontribusi Sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ kontribusi PDRB dari sektor perkebunan (tanaman keras)	32,47	32,03	30,66	32,89	32,89

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bulukumba

2.4.3.3.4 Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB

Tabel 2.295

Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	∑ produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok tani (ton)	92,00	94,80	94,40	92,00	93,86

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bulukumba

2.4.3.3.5 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Tabel 2.296

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ton)	64,43	64,67	64,75

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bulukumba

2.4.3.3.6 Cakupan bina kelompok petani

Tabel 2.297

Cakupan bina kelompok patani Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Persentase	-	-	3,69

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bulukumba

2.4.3.4 KEHUTANAN

2.4.3.4.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Tabel 2.298

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	13.213,00	-	25,00	-	-
2	Luas total hutan dan lahan kritis	44.021,36	-	44.021,36	-	-
3	Persentase	30,01	-	0,06	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.3.4.2 Kerusakan Kawasan Hutan

Tabel 2.299

Kerusakan Kawasan Hutan

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Luas Kerusakan kawasan Hutan	42,00	116,00	25,00	-	-
2	Luas total kawasan hutan	10.041,60	10.041,60	10.041,60	-	-
3	Persentase	0,42	1,16	0,25	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.3.4.3 Rasio luas kawasan lindung

Tabel 2.300

Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Luas kawasan lindung	15.392,21	15.392,21	15.392,21	5.454,61	-
2	Total luas Kawasan Hutan	-	-	-	10.041,60	-
3	Persen	-	-	-	54,32	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Bulukumba

2.4.3.5 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.4.3.5.1 Persentase rumah tangga pengguna listrik

Tabel 2.301

Persentase rumah tangga pengguna listrik Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	91.763	96.717	102.619	108.402	113.994
2	Jumlah seluruh rumah tangga	96.950	97.635	103.593	109.640	115.297
3	Persen	94,65	99,06	99,06	98,87	98,87

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kab. Bulukumba

2.4.3.5.2 Rasio ketersediaan daya listrik

Tabel 2.302

Rasio ketersediaan daya listrik Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017		
1	Daya listrik terpasang	93.470.950	103.450.259	112.588.859	123.408.409	130.465.509
2	Jumlah kebutuhan	134.802.739	144.151.061	154.250.803	161.888.630	173.811.644
3	Rasion	0,69	0,72	0,73	0,76	0,75

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kab. Bulukumba

2.4.3.5.3 Persentase Pertambangan Tanpa Ijin

Tabel 2.303

Persentase pertambangan tanpa ijin
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
3	Persentase	60	500	100

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan PSDM Kab. Bulukumba

2.4.3.6 PERDAGANGAN

2.4.3.6.1. Ekspor Bersih Perdagangan

Tabel 2.304

Nilai Ekspor Bersih Perdagangan
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Nilai ekspor	28.729.999	22.859.600	90.455.972	54.025.125	28.729.999
2	Nilai impor	-	-	-		
3	Total	-	-	-		

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kab. Bulukumba

2.4.3.6.2 Cakupan Bina Usaha Informal/Pedagang

Tabel 2.305

Cakupan Bina Usaha Informal/Pedagang
Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ kelompok pedagang informal	7	60	660		
2	∑ kelompok pedagang informal yang dibina	5.879	6.001	6.001	6.150	6.378
3	Persentase	0,12	1,00	11,00		

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kab. Bulukumba

2.4.3.7 PERINDUSTRIAN

2.4.3.7.1 Cakupan Bina kelompok pengrajin

Tabel 2.306

Cakupan Bina kelompok pengrajin
Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017		
1.	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	30	3	5	41	28
2.	Jumlah kelompok pengrajin	80	88	88	129	157
3.	Persen	37,50	3,41	5,68	31,78	17,83

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kab. Bulukumba

2.4.3.8. TRANSMIGRASI

2.4.3.8.1 Persentase Transmigrasi Swakarsa

Tabel 2.307

Persentase Transmigrasi Swakarsa Kabupaten Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	∑ Transmigrasi Swakarsa	-	-	-
2	∑ Transmigrasi	-	-	-
3	Persentase	-	-	-

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Bulukumba

2.4.3.9. KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.4.3.9.1 Produksi Perikanan

Tabel 2.308

Produksi perikanan Tahun 2015-2019 Kab. Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ Produksi ikan (Ton)	217.282	215.336	217.249	239.380	235.999
2	Target Daerah (Ton)	164.402	164.402	172.622	180.842	189.062
3	Persentase	132,17	130,98	125,85	132,37	124,83

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Bulukumba

2.4.3.9.2 Konsumsi Ikan

Tabel 2.309

Konsumsi Ikan

Tahun 2015-2019 Kab. Bulukumba

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ konsumsi ikan (Kg)	49,08	46	44	45	49
2	Target Daerah (Kg)	-	-	-	-	-
3	Persentase	49,08	46	44	45	49

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Bulukumba

2.4.3.9.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Tabel 2.310

Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Tahun 2015-2019 Kab. Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda	310	378	425	442	452
2	Jumlah kelompok nelayan	477	580	650	673	694
3	Persen	64,99	65,17	65,38	65,68	65,13

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Bulukumba

2.4.3.9.4. Produksi perikanan kelompok nelayan

Tabel 2.311

Produksi perikanan kelompok nelayan

Kab. Bulukumba Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	97.777	103.361	110.797	131.659	141.000
2	Jumlah produksi ikan di daerah	217.282	215.336	217.249	239.380	235.999
3	Persen	45,00	48,00	51,00	55,00	59,75

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Bulukumba

2.4.3.9.5. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Tabel 2.312

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Kab. Bulukumba Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Σ tangkapan ikan	-	-	-
2	80 % dari tangkapan maksimum lestari	-	-	-
3	Proporsi	-	-	-

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Bulukumba

2.4.3.9.6. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

Tabel 2.313

Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial Kab. Bulukumba Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Kawasan lindung perairan	-	-	-
2	Total luas perairan teritorial	-	-	-
3	Rasio	-	-	-

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Bulukumba

2.4.3.9.7. Nilai Tukar Nelayan

Tabel 2.314

Nilai Tukar Nelayan

Kab. Bulukumba Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Indeks yg diterima nelayan	-	-	-
2	Indeks yg dibayar nelayan	-	-	-
3	JUMLAH	-	-	-

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Bulukumba

2.4.4. PELAYANAN PENUNJANG URUSAN

2.4.4.1 Perencanaan Pembangunan

2.4.4.1.1 Tersediaanya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Tabel 2.315

Tersediaanya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Kab. Bulukumba Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tidak Ada	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bulukumba

2.4.4.1.2 Tersediaanya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Tabel. 2.316

Tersediaanya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kab. Bulukumba Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Ada	√	√	√	√	√
2	Tidak Ada	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Bulukumba

2.4.4.1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Tabel 2.317

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Kab. Bulukumba Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Ada	√	√	√	√	√
2	Tidak Ada	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bulukumba

2.4.4.1.4 Tersedianya Dokumen RTRW yang telah di tetapkan dengan PERDA

Tabel 2.318

Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kab. Bulukumba Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Ada	Ada	Ada	Ada	√	√
2	Tidak Ada	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bulukumba

2.4.4.1.5 Penjabaran Konsistinsi Program RPJMD ke dalam RKPD

Tabel 2.319

Penjabaran Konsistinsi Program RPJMD ke dalam RKPD Kab. Bulukumba Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ Program RKPD	521	269	307	305	298
2	∑ Program RPJMD	260	260	260	260	260
3	Persentase	200,38	103,46	118,08	117,31	114,62

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bulukumba

2.4.4.1.6 Penjabaran Konsistinsi Program RKPD ke dalam APBD

Tabel 2.320

Penjabaran Konsistinsi program RKPD ke dalam APBD Kab. Bulukumba Tahun 2015-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ Program RKPD	521	269	307	305	298
2	∑ Program APBD	568	248	306	305	298
3	Persentase	91,73	108,47	100,33	100,00	100,00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bulukumba

2.4.4.1.7 Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW

Tabel 2.321

Kesesuai Rencana Pembangunan dengan RTRW Kab. Bulukumba Tahun 2015-2017

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Kesesuaian program/ kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang	-	-	-
2	Dokumen RTRW	-	-	-
3	Persentase	-	-	-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bulukumba

2.4.4.2 KEUANGAN

2.4.4.2.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Tabel 2.322

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kab. Bulukumba Tahun 2015-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba

2.4.4.2.2 Persentase SILPA

Tabel 2.323

Persentase SILPA Kab. Bulukumba Tahun 2015-2019

NO.	TAHUN	SILPA	APBD	PERSENTASE
1	2015	109.373.087.710,18	1.370.710.592.644,79	7,98
2	2016	92.598.569.344,28	1.418.879.167.317,96	6,53
3	2017	8.249.679.255,60	1.490.352.730.160,00	0,55
4	2018	18.483.237.488,36	1.478.746.559.991,48	1,25
5	2019	31.055.741.286,80	1.527.213.761.837,36	2,03

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2.4.4.2.3 Persentase SILPA terhadap APBD

Tabel 2.324

Persentase SILPA terhadap APBD
Kab. Bulukumba Tahun 2015-2019

NO.	TAHUN	SILPA	APBD	PERSENTASE
1	2015	109.373.087.710,18	1.331.962.405.570,00	8,21
2	2016	92.598.569.344,28	1.528.918.342.046,00	6,06
3	2017	8.249.679.255,60	1.543.657.553.185,43	0,53
4	2018	18.483.237.488,36	1.478.746.559.991,48	1,25
5	2019	31.055.741.286,80	1.527.213.761.837,36	2,03

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2.4.4.2.4 Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Tabel 2.325

Persentase Belanja Pendidikan (20%)
Kab. Bulukumba Tahun 2015-2019

NO.	TAHUN	Belanja Bidang Urusan Pendidikan	APBD	PERSENTASE
1	2015	603.641.865.915,00	1.331.962.405.570,00	45,32
2	2016	586.402.133.421,47	1.528.918.342.046,00	38,35
3	2017	498.679.256.784,71	1.543.657.553.185,43	32,31
4	2018	466.788.739.078,00	1.478.746.559.991,40	31,57
5	2019	468.837.996.077,00	1.527.213.761.837,36	30,70

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2.4.4.2.5 Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Tabel 2.326

Persentase Belanja Kesehatan(10%) Kab. Bulukumba Tahun 2015-2019

NO.	TAHUN	Belanja Bidang Urusan Pendidikan	APBD	PERSENTASE
1	2015	236.926.098.369,00	1.331.962.405.570,00	17,79
2	2016	277.912.133.421,47	1.528.918.342.046,00	18,18
3	2017	498.679.256.784,71	1.543.657.553.185,43	32,31
4	2018	254.619.337.906,75	1.478.746.559.991,40	17,22
5	2019	287.445.548.397,00	1.527.213.761.837,36	18,82

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2.4.4.2.6 Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Tabel 2.327

Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Kab. Bulukumba Tahun 2015-2019

NO.	TAHUN	BELANJA LANGSUNG	APBD	PERSENTASE
1	2015	770.172.753.737,00	1.331.962.405.570,00	57,82
2	2016	735.284.227.104,50	1.528.918.342.046,00	48,09
3	2017	836.521.229.518,00	1.543.657.553.185,43	54,19
4	2018	674.622.211.079,31	1.478.746.559.991,40	45,62
5	2019	692.774.070.833,00	1.527.213.761.837,36	45,36
NO.	TAHUN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	APBD	PERSENTASE
1	2015	749.156.423.294,00	1.331.962.405.570,00	56,24
2	2016	932.448.247.151,56	1.528.918.342.046,00	60,99
3	2017	774.559.295.403,71	1.543.657.553.185,43	50,18
4	2018	727.652.665.654,00	1.478.746.559.991,40	49,21
5	2019	826.905.241.004,00	1.527.213.761.837,36	54,14

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2.4.4.2.7 Bagi Hasil Kabupaten / Kota dan Desa

Tabel 2.328

Bagi hasil Kabupaten / Kota dan Desa
Kab. Bulukumba Tahun 2015-2019

NO.	TAHUN	JUMLAH BELANJA BAGI HASIL KAB/ KOTA/DESA	APBD	PERSENTASE
1	2015	40.096.006.947,00	1.331.962.405.570,00	2,64
2	2016	5.420.786.539,00	1.528.918.342.046,00	0,33
3	2017	5.640.702.200,00	1.543.657.553.185,43	50,18
4	2018	3.589.440.542,00	1.478.746.559.991,40	0,24
5	2019	6.223.178.546,00	1.527.213.761.837,36	0,14

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2.4.4.2.8 Penetapan APBD

Tabel 2.329

Penetapan APBD

Kab. Bulukumba Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tepat Waktu	√	√	√	√	√
2	Tidak Tepat Waktu	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2.4.4.3. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

2.4.4.3.1. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tabel 2.330

Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kab. Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ ASN yang mengikuti pendidikan dan pendidikan formal	57	288	1.015	803	923
2	Jumlah ASN	7.621	6.593	6.540	6.343	6.207
3	Persentase	0,75	4,37	15,52	12,66	14,87

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kab. Bulukumba

2.4.4.3.2 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Tabel 2.331

Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kab.
Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019

1	∑ ASN yang mengikuti pendidikan dan pendidikan Struktural		429	32	118	67
2	Jumlah Total Jabatan		716	930	853	867
3	Persentase		59,92	3,44	13,83	7,73

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kab. Bulukumba

2.4.4.3.3 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Tabel 2.332

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah
Kab. Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	33	33	37	37	37

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kab. Bulukumba

2.4.4.3.4 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

Tabel 2.333

Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah
Kab. Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jabatan Administrasi		865	930	853	867

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kab. Bulukumba

2.4.4.3.5 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Tabel 2.334

Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada
Instansi Pemerintah Kab. Bulukumba Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu	3.925	4.116	3.893	3.881	3.883

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kab. Bulukumba

2.4.4.4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2.4.4.4.1 Persentase Implementaasi Rencana Kelitbangan

Tabel 2.335

Persentase Implementaasi Rencana Kelitbangan
Tahun 2015-2017 Kab. Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ kelitbangan dalam RKPDP	3	3	6	10	7
2	∑ kelitbangan dalam RPJMD	10	17	15	20	25
3	Persentase	30,00	17,65	40,00	50,00	28,00

Sumber : Badan Pelatihan dan Pengembangan Daerah Kab. Bulukumba

2.4.4.4.2 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tabel 2.336

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Tahun 2015-2017
Kab. Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ kelitbangan yang ditindaklanjuti	3	3	6	10	7
2	∑ kelitbangan dalam renja perangkat daerah	10	17	15	20	25
3	Persentase	30,00	17,65	40,00	50,00	28,00

Sumber : Badan Pelatihan dan Pengembangan Daerah Kab. Bulukumba

2.4.4.5 PENGAWASAN

2.4.4.5.1 Persentase Tindak Lanjut Temuan

Tabel 2. 337
Persentase Tindak Lanjut Temuan
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	∑ temuan yang ditindak lanjuti	59	59	57	36	8
2	∑ total temuan	60	64	59	38	11
3	Persentase	98,33	92,19	96,61	89,76	91,34

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kab. Bulukumba

2.4.4.5.2 Persentase Pelanggaran Pegawai

Tabel 2. 338
Persentase Pelanggaran Pegawai
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah ASN yang di kenai sanksi	2	10	12	9	2
2	Jumlah total ASN	7.598	6.593	6.540	6.540	6.237
3	Persentase	0,026	0,152	0,183	0,14	0,14

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kab. Bulukumba

2.4.4.5.3 Jumlah Temuan BPK

Tabel 2.339
Jumlah Temuan BPK Tahun 2015-2019 Kabupaten Bulukumba

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Temuan BPK	20	25	22	17	5

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kab. Bulukumba

2.2. EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BULUKUMBA TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2019

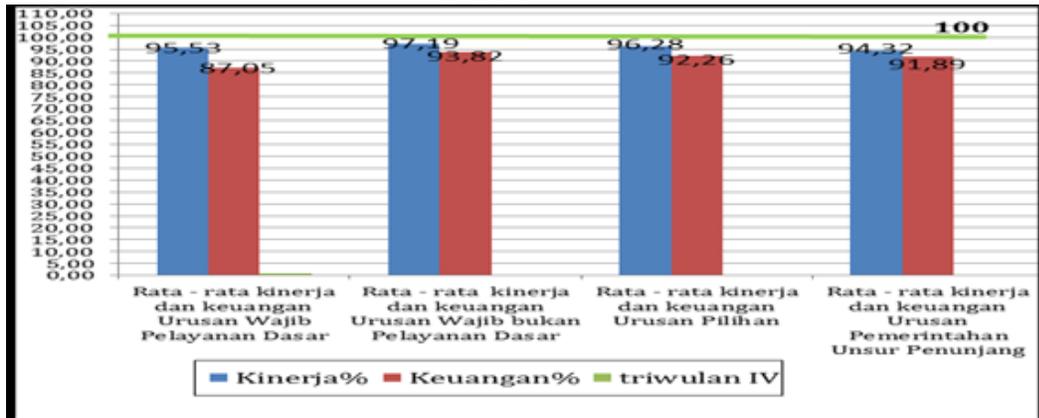
Pengukuran capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/kegiatan RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019, digunakan beberapa kriteria penilaian seperti yang terlihat pada tabel 2.340 berikut:

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	SIMBOL
1	91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI	ST
2	76% ≤ 90%	TINGGI	T
3	66% ≤ 75%	SEDANG	S
4	51% ≤ 65%	RENDAH	R
5	≤ 50%	SANGAT RENDAH	SR

Secara umum, rata-rata capaian kinerja dan keuangan RKPD Kabupaten Bulukumba Triwulan IV Tahun 2019 adalah rata-rata capaian kinerja mencapai **96,82%**, dalam kategori **Sangat Tinggi (ST)** dan rata-rata capaian keuangan mencapai **92,26%** dalam kategori **Tinggi (T)**.

Gambar 2.2

Perbandingan rata - rata tingkat capaian kinerja dan keuangan Evaluasi Hasil RKPD Kab.Bulukumba Triwulan IV Tahun 2019 dan rata - rata tingkat capaian kinerja dan keuangan evaluasi hasil RKPD berdasarkan urusan



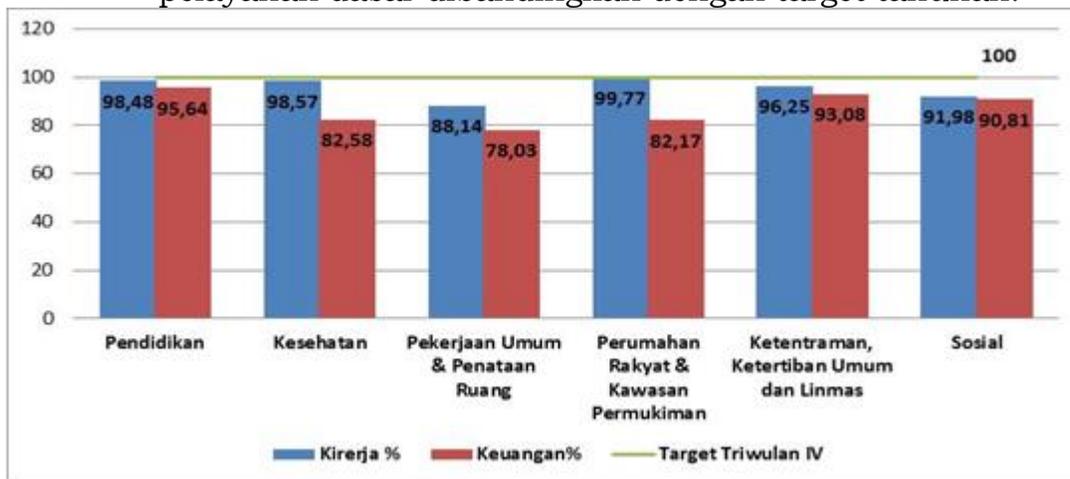
Capaian kinerja dan keuangan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan unsur penunjang, diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Dalam RKPD Kabupaten Bulukumba terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar, dari 6 urusan wajib tersebut tidak terdapat urusan yang tingkat capaian kinerjanya telah mencapai target triwulan IV (100 persen).

Gambar 2.3

Tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar dibandingkan dengan target tahunan.

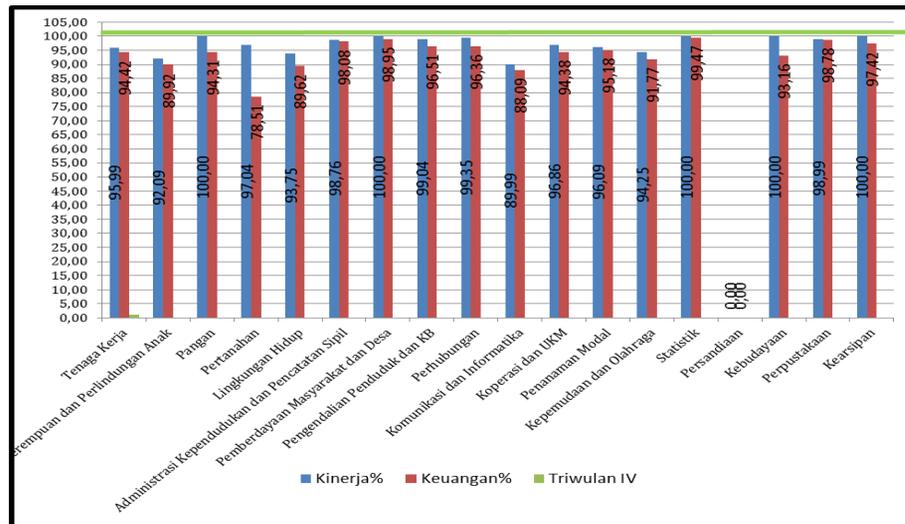


2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Dalam RKPD Kabupaten Bulukumba terdapat 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, dari 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar tersebut terdapat 5 urusan yang mencapai target kinerja triwulan IV (100 persen), yaitu Pangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kebudayaan, Kearsipan sedangkan untuk 13 urusan lainnya belum mencapai target triwulan IV (100 persen) baik kinerja dan keuangannya.

Gambar 2.4

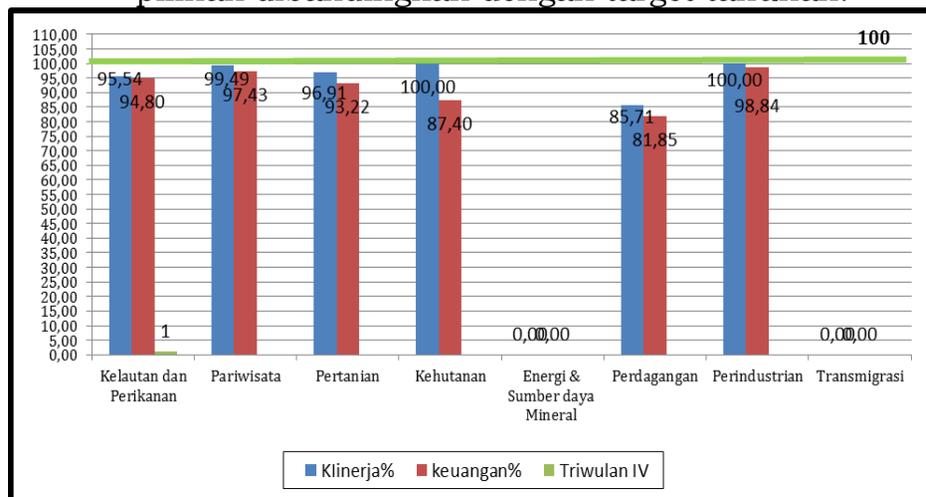
Tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan berdasarkan urusan wajib bukan pelayanan dasar dibandingkan dengan target tahunan.



3. Urusan Pilihan

Dalam RKPD Kabupaten Bulukumba terdapat 6 urusan pilihan, dari 6 urusan pilihan terdapat 2 urusan yang mencapai target kinerja triwulan IV (100 persen) yaitu kehutanan dan perindustrian sedangkan untuk 4 urusan lainnya belum mencapai target triwulan IV (100 persen) baik kinerja dan keuangannya.

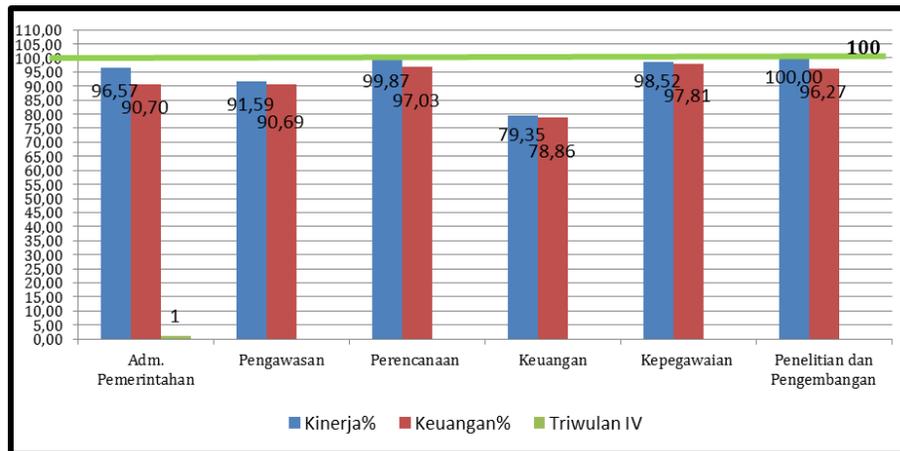
Gambar 2.5
Tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan berdasarkan urusan pilihan dibandingkan dengan target tahunan.



4. Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang

Dalam RKPD Kabupaten Bulukumba terdapat 6 urusan pemerintahan unsur penunjang, dari 6 urusan pemerintahan unsur penunjang tersebut terdapat 1 urusan yaitu urusan Penelitian dan Pengembangan yang tingkat capaian kinerjanya telah mencapai target triwulan IV (100 persen), sedangkan untuk 5 urusan lainnya belum mencapai target triwulan IV (100 persen) baik kinerja dan keuangannya.

Gambar 2.6
Tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan berdasarkan urusan pemerintahan unsur penunjang dibandingkan dengan target tahunan.



Berikut ini akan disajikan tabel rata-rata capaian kinerja dan keuangan Evaluasi Hasil RKPd Kabupaten Bulukumba Triwulan IV Tahun 2019 berdasarkan urusan, sebagai berikut:

Tabel 2.341

Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Keuangan Evaluasi Hasil Rkpd Kabupaten Bulukumba Triwulan IV Tahun 2019 Berdasarkan Urusan

NO	URUSAN	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPd			
		KINERJA		KEU	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan	98,48	ST	95,64	ST
2	Kesehatan	98,57	ST	82,58	T
3	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	88,14	T	78,03	T
4	Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	99,77	ST	82,17	T
5	Ketentram, Ketertiban Umum dan Linmas	96,25	ST	93,08	ST
6	Sosial	91,98	ST	90,81	T
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
1	Tenaga Kerja	95,99	ST	94,42	ST
2	Pemb. Perempuan dan Perlindungan Anak	92,09	ST	89,92	T
3	Pangan	100,00	ST	94,31	ST
4	Pertanahan	97,04	ST	78,51	T
5	Lingkungan Hidup	93,75	ST	89,62	T
6	Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98,76	ST	98,08	ST
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00	ST	98,95	ST
8	Pengendalian Penduduk dan KB	99,04	ST	96,51	ST
9	Perhubungan	99,35	ST	96,36	ST
10	Komunikasi dan Informatika	89,99	T	88,09	T
11	Koperasi dan UKM	96,86	ST	94,38	ST
12	Penanaman Modal	96,09	ST	95,18	ST
13	Kepemudaan dan Olahraga	94,25	ST	91,77	ST
14	Statistik	100,00	ST	99,47	ST
15	Persandiaan	0,00	SR	0,00	SR
16	Kebudayaan	100,00	ST	93,16	ST

17	Perpustakaan	98,99	ST	98,78	ST
18	Kearsipan	100,00	ST	97,42	ST
Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang					
1	Kelautan dan Perikanan	95,54	ST	94,80	ST
2	Pariwisata	99,49	ST	97,43	ST
3	Pertanian	96,91	ST	93,22	ST
4	Kehutanan	100,00	ST	87,40	T
5	Energi & Sumber daya Mineral	0,00	SR	0,00	SR
6	Perdagangan	85,71	T	81,85	T
7	Perindustrian	100,00	ST	98,84	ST
8	Transmigrasi	0,00	SR	0,00	SR
Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang					
1	Adm. Pemerintahan	96,57	ST	90,70	T
2	Pengawasan	91,59	ST	90,69	T
3	Perencanaan	99,87	ST	97,03	ST
4	Keuangan	99,19	ST	98,57	ST
5	Kepegawaian	98,52	ST	97,81	ST
6	Penelitian dan Pengembangan	100,00	ST	96,27	ST
RKPD KABUPATEN BULUKUMBA		96,82	ST	92,63	ST

Sumber : Dokumen "Evaluasi RKPD 2019 Triwulan 4"

Berikut ini akan dibahas terkait capaian kinerja dan keuangan serta permasalahan sehingga capaian kinerja dan keuangan tidak mencapai target maksimal (100 persen) di tahun 2019 per urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan, total rata-rata capaian kinerja mencapai 98,48 persen (sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 95,64 persen (sangat tinggi).

2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan, total rata-rata capaian kinerja mencapai 98,57 persen (sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 82,58 persen (tinggi).

3. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk Urusan Wajib Pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, total rata-rata capaian kinerja mencapai 88,14 persen (tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 78,03 persen (sedang).

4. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, total rata-rata capaian kinerja mencapai 99,77 persen (sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 82,17 persen (tinggi).

5. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat

Untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, total rata-rata capaian kinerja mencapai 96,25 persen (Sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 93,08 persen (Sangat Tinggi).

6. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial, total rata-rata capaian kinerja mencapai 91.98 persen (Sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 90.81persen (Tinggi).

7. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

Untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja, total rata-rata capaian kinerja mencapai 95.99 persen (Sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 94.42 persen (Sangat tinggi).

8. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, total rata-rata capaian kinerja mencapai 92.09 persen (Sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 89.92 persen (Tinggi).

9. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan

Untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan, total rata-rata capaian kinerja mencapai 100 persen (Sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 94.31 persen (Sangat tinggi).

10. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanian

Untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanian, total rata-rata capaian kinerja mencapai 97.04 persen (Sangat Tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 78.51persen (Tinggi).

11. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup, total rata-rata capaian kinerja mencapai 93.75 persen (Sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 89.62 persen (Tinggi).

12. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, total rata-rata capaian kinerja mencapai 98.76 persen (sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 98.08 persen (Sangat tinggi).

13. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, total rata-rata capaian kinerja mencapai 100 persen (sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 98.95 persen (sangat tinggi).

14. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, total rata-rata capaian kinerja mencapai 99.04 persen (Sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 96.51 persen (Sangat tinggi).

15. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

Untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan, total rata-rata capaian kinerja mencapai 99.35 persen (Sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 96.36 persen (Sangat tinggi).

16. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

Untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika, total rata-rata capaian kinerja mencapai 89.99 persen (Sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 88.09 persen (Sangat tinggi).

17. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan UKM

Untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan UKM, total rata-rata capaian kinerja mencapai 96.86 persen (Sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 94.38 persen (Sangat tinggi).

18. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

Untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal, total rata-rata capaian kinerja mencapai 96.09 persen (Sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 95.18persen (Sangat tinggi).

19. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga

Untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga, total rata-rata capaian kinerja mencapai 94.25 persen (Sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 91.77 persen (Sangat tinggi).

20. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik

Untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik, total rata-rata capaian kinerja mencapai 100 persen (Sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 99.47 persen (Sangat tinggi).

21. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian

Untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian, total rata-rata capaian kinerja mencapai 0,00 persen (sangat rendah), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 0,00 persen (sangat rendah).

22. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan

Untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan, total rata-rata capaian kinerja mencapai 100 persen (Sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 93.16 persen (Sangat tinggi).

23. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan

Untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan, total rata-rata capaian kinerja mencapai 98.99 persen (sedang), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 98.78 persen (Sangat tinggi).

24. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan

Untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan, total rata-rata capaian kinerja mencapai 100 persen (sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 97.42 persen (sangat tinggi).

25. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Untuk urusan pilihan kelautan dan perikanan, total rata-rata capaian kinerja mencapai 95.54 persen (sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 94.80 persen (sangat tinggi).

26. Urusan Pilihan Pariwisata

Untuk Urusan Pilihan Pariwisata, total rata-rata capaian kinerja mencapai 99.49 persen (sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 97.43 persen (sangat tinggi).

27. Urusan Pilihan Pertanian

Untuk Urusan Pilihan Pertanian, total rata-rata capaian kinerja mencapai 96.91 persen (sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 93.22 persen (sangat tinggi).

28. Urusan Pilihan Kehutanan

Untuk Urusan Pilihan Kehutanan, total rata-rata capaian kinerja mencapai 100 persen (sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 97.40 persen (sangat tinggi).

29. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

Untuk Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, tidak terdapat program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2019.

30. Urusan Pilihan Perdagangan

Untuk Urusan Pilihan Perdagangan, total rata-rata capaian kinerja mencapai 85.71 persen (tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 81.85 persen (tinggi).

31. Urusan Pilihan Perindustrian

Untuk Urusan Pilihan Perindustrian, total rata-rata capaian kinerja mencapai 100 persen (sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 98.84 persen (sangat tinggi).

32. Urusan Pilihan Transmigrasi

Untuk Urusan Wajib Transmigrasi, tidak terdapat program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2019.

33. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Untuk Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, total rata-rata capaian kinerja mencapai 96.57 persen (sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 91.59 persen (sangat tinggi).

34. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

Untuk Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan, total rata-rata capaian kinerja mencapai 91.59 persen (sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 90.69 persen (sangat tinggi).

35. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Untuk Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan, total rata-rata capaian kinerja mencapai 99.87 persen (sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 97.03 persen (sangat tinggi).

36. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Untuk Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan, total rata-rata capaian kinerja mencapai 99.19 persen (sangat tinggi),



sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 98.57 persen (sangat tinggi).

37. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

Untuk Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, total rata-rata capaian kinerja mencapai 98.52 persen (sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 97.81 persen (sangat tinggi).

38. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Untuk Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan, total rata-rata capaian kinerja mencapai 100 persen (sangat tinggi), sedangkan total rata-rata capaian keuangan mencapai 96.27 persen (sangat tinggi)

Uraian diatas dapat dilihat pada matriks evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba triwulan IV tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.																	
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD		APBD		I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)	K	Rp (000)													
										Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)													Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8*100	15=7+13	16=15/6*100	17	18	Predikat Kinerja																												
6	1 03 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Meningkatnya bagian badan jalan yang kokoh	Paket	0,00	- 0,00	- 1,00	11.723.000,00	12.821.684,25	0,00	- 0,01	89.430,00	0,77	8.227.636	0,22	3.616.702	1,00	11.933.768,300	100,00	101,80	93,07	1,00	11.933.768,30	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab	Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00 101,80 93,07 0,00 0,00																		
7	1 03 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatnya arus lalu lintas barang dan jasa	Km	0,00	- 0,00	- 18,40	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	- 0,00	- 12,33	49.900	6,07	899.837	18,40	949.737,25	100,00	94,97	94,97	18,40	949.737,25	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab	Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00 94,97 94,97 0,00 0,00																			
8	1 03 23	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tersedianya sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	Paket	0,00	- 0,00	- 1,00	419.719,00	419.719,00	0,00	- 0,00	1.900,00	0,40	119.130	0,59	16.124	1,00	137.154,000	100,00	32,68	32,68	1,00	137.154,00	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab	Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00 32,68 32,68 0,00 0,00																		
9	1 03 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan	Paket	0,00	- 0,00	- 1,00	132.850,00	132.850,00	0,02	2.500,00	0,13	17.300,00	0,35	27.120	0,50	51.980	1,00	98.900,000	100,00	74,44	74,44	1,00	98.900,00	0,00	0,00	PUTR	APBD Kab	Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00 74,44 74,44 0,00 0,00																	
10	1 03 24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Mengembalikan fungsi jaringan irigasi pada kondisi awal	Paket	0,00	- 0,00	- 1,00	109.528,00	109.528,00	0,00	- 0,05	5.655,00	0,00	- 0,95	101.460	1,00	107.115,00	100,00	97,80	97,80	1,00	107.115,00	0,00	0,00	Dinas PSDA	APBD Kab	Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 95,78 81,27 78,91 0,00 0,00																			
11	1 03 25	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Tersedianya air baku untuk kebutuhan masyarakat	Paket	0,00	- 0,00	- 1,00	23.383,00	23.383,00	0,00	- 0,04	1.030,40	0,07	1.540	0,12	2.720	0,23	5.289,90	22,62	22,62	22,62	0,23	5.289,90	0,00	0,00	Dinas PSDA	APBD Kab	Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 22,62 22,62 22,62 0,00 0,00																		
12	1 03 26	Program Pengembangan dan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumberdaya air lainnya	Meningkatnya pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	Paket	0,00	- 0,00	- 1,00	842.260,00	842.260,00	0,37	310.688,20	0,01	7.042,50	0,00	2.834	0,62	418.563	1,00	739.127,70	100,00	87,76	87,76	1,00	739.127,70	0,00	0,00	Dinas PSDA	APBD Kab	Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,00 87,76 87,76 0,00 0,00																	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kejadian (Output))	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.				
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD		APBD	I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)	K	Rp (000)
										Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13/8*100	15=7*13	16=15/6*100	17	18															
1	06	05	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin daerah pesisir, daerah tertinggal dan	Terlaksananya Pemberian Bantuan Sarana/Alat Pertukangan, Peternakan, dan Bantuan alat pertanian bagi Keluarga	orang	0,00	-	0,00	-	50,00	66.373,00	66.373,00	3,69	4.895,00	5,10	6.760,00	3,10	4.118	35,14	46.638	47,02	62.411,00	94,03	94,03	94,03	47,02	62.411,00	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab	
1	06	07	Aksesibilitas penanganannya dan pengembangan kemiskinan *	Terlaksananya biaya operasional, sosialisasi monitoring dan evaluasi kegiatan BKPT (Rasta) dan Bimbingan Pemantauan	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	226.305,00	226.305,00	0,01	1.450,00	0,02	3.505,00	0,11	24.442	0,84	190.146	0,97	219.542,59	97,01	97,01	97,01	0,97	219.542,59	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab	
1	06	08	Mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM) SIKS-NG dan E-PMKS	Terlaksananya Pemutakhiran data MPM dan SIKS-NG untuk data bdt kemiskinan dan E-PMKS untuk data PMKS	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	292.938,00	205.938,00	0,00	1.310,00	0,01	3.135,00	0,11	20.991	0,24	49.211	0,36	74.646,33	36,25	25,48	36,25	0,36	74.646,33	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		90,22	76,85	79,54	0,88	147094,46	0,00	0,00								
Predikat Kinerja																		T	T	T			SR	SR								
6	06	16	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	669.082,50	669.082,50	0,16	108.390,00	0,24	162.759,13	0,26	171.056	0,34	223.192	1,00	665.396,90	100,00	99,45	99,45	1,00	665.396,90	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab	
1	06	10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat dan kejadian luar biasa	Terlaksananya Operasional Tim Penanganan Bencana Pemberian bantuan Logistik kepada Korban Bencana	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	83.715,10	83.715,10	0,16	13.503,10	0,16	13.018,00	0,00	-	0,68	57.135	1,00	83.656,10	100,00	99,93	99,93	1,00	83.656,10	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100,00	66,46	99,69	1,00	374526,50	0,00	0,00								
Predikat Kinerja																		ST	S	ST			SR	SR								
7	06	17	Program pembinaan anak terlarang	Meningkatnya kualitas pembinaan anak terlarang	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	22.500,00	22.500,00	1,00	22.500,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	22.500,00	100,00	100,00	100,00	1,00	22.500,00	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100,00	100,00	100,00			0,00	0,00								
Predikat Kinerja																		ST	ST	ST			SR	SR								
8	06	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada penyandang cacat	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	121.645,00	121.645,00	0,57	69.937,00	0,01	1.237,80	0,06	7.760	0,12	14.915	0,77	93.850,00	77,15	77,15	77,15	0,77	93.850,00	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		77,15	77,15	77,15			0,00	0,00								
Predikat Kinerja																		T	T	T			SR	SR								
9	06	19	Program Pembinaan Panti Asuhan /panti Jompo	Meningkatnya pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	40.598,00	40.598,00	0,08	3.070,00	0,10	3.898,00	0,07	2.825	0,76	30.750	1,00	40.543,00	100,00	99,86	99,86	1,00	40.543,00	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100,00	99,86	99,86			0,00	0,00								
Predikat Kinerja																		ST	ST	ST			SR	SR								
10	06	20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Napi, PSK, Narkoba, dll)	Terlaksananya pembinaan eks penyandang penyakit sosial	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	10.600,00	10.600,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,78	8.320	0,78	8.320,00	78,49	78,49	78,49	0,78	8.320,00	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		78,49	39,25	78,49			0,00	0,00								
Predikat Kinerja																		T	SR	T			SR	SR								
11	06	21	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	73.740,60	123.740,60	0,07	5.140,00	0,08	5.565,00	0,82	108.201	0,04	4.780	1,00	123.685,60	100,00	167,73	99,96	1,00	123.685,60	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab	
1	06	05	Pemberdayaan Karang taruna dan Pekerja sosial masyarakat	Terlaksananya pemberian Bantuan UEP kepada karang taruna (6 KLP) dan tali asih TKSK (10 Orang)	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	260.096,70	260.096,70	0,00	-	0,05	12.100,00	0,64	166.108	0,31	81.437	1,00	259.644,55	100,00	99,83	99,83	1,00	259.644,55	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab	
1	06	06	Pelestarian dan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, kebermisan, kejujuran, dan KSN	Terlaksananya Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejujuran, Kebermisan dan KSN dan Terlaksananya Pemeliharaan /Rehab TMP Taccorong dan TMP Mappijalan	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	122.660,50	159.660,50	0,01	1.220,00	0,29	35.843,00	0,21	45.146	0,29	46.899	0,81	129.107,80	80,86	105,26	80,86	0,81	129.107,80	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab	
1	06	07	Pengembangan Program Keluarga Harapan	Terlaksananya operasional TIM Koordinasi PKH	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	90.244,00	90.244,00	0,01	1.250,00	0,04	4.345,00	0,15	13.043	0,79	71.526	1,00	90.164,00	100,00	99,91	99,91	1,00	90.164,00	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab	
1	06	08	Penguatan kelembagaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya sosialisasi Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	90.244,00	90.244,00	0,01	1.250,00	0,04	4.345,00	0,15	13.043	0,79	71.526	1,00	90.164,00	100,00	99,91	99,91	1,00	90.164,00	0,00	0,00	Dinas Sosial	APBD Kab	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		95,22	118,18	95,14			0,00	0,00								
Predikat Kinerja																		ST	ST	ST			SR	SR								
12	06	22	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	55.907,00	55.907,00	1,89	8.797,34	1,24	5.797,00	2,50	11.660	5,24	24.402	10,87	50.656,817	90,61	90,61	90,61	10,87	50.656,82	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab	
1	06	01	Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana	Terlaksananya identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana pasca bencana	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	799.200,00	799.200,00	0,00	-	0,10	80.340,00	0,67	537.450	0,23	180.282	1,00	798.072,000	100,00	99,86	99,86	1,00	798.072,000	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab	
1	06	02	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Terlaksananya monitoring rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	799.200,00	799.200,00	0,00	-	0,10	80.340,00	0,67	537.450	0,23	180.282	1,00	798.072,000	100,00	99,86	99,86	1,00	798.072,000	0,00	0,00	BPBD	APBD Kab	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		95,31	95,23	95,23	5,94	424364,41	0,00	0,00								
Predikat Kinerja																		ST	ST	ST			SR	SR								

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.																
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD		APBD		I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K			Rp (000)	K	Rp (000)													
										Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)													Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)									
														Predikat Kinerja				T	T	T				SR	SR																					
9	2	02	18	01	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	250.000,00	250.000,00	0,04	9.296,10	0,00	1.055,00	0,26	64.708	0,59	146.267	0,89	221.325,80	88,53	88,53	88,53	0,89	221.325,80	0,00	0,00	Dinas P3A	APBD Kab													
				02	Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Terlaksananya Bimbingan persiapan Lomba P2K3	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas P3A	APBD Kab													
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				88,53	88,53	88,53	0,44	110662,90	0,00	0,00																						
														Predikat Kinerja				T	T	T				SR	SR																					
10	2	02	20	01	Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama dan kesra	Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama dan kesejahteraan rakyat	Kali	0,00	-	0,00	-	3,00	545.807,85	545.807,85	0,00	-	2,33	503.102,25	0,60	30.642	0,07	12.024	3,00	545.768,63	100,00	99,99	99,99	3,00	545.768,63	0,00	0,00	Sekretariat Daerah	APBD Kab													
				02	Pengajian Rutin	Peningkatan pemahaman dan pembinaan mental pegawai dan Masyarakat	Kali	0,00	-	0,00	-	12,00	37.123,00	37.123,00	2,07	6.400,00	1,39	4.300,00	5,28	9.600	3,27	16.823	12,00	37.123,00	100,00	100,00	100,00	12,00	37.123,00	0,00	0,00	Sekretariat Daerah	APBD Kab													
				03	Insentif Imam Masjid	Peningkatan SDM dan kesejahteraan Imam Masjid	Orang	0,00	-	0,00	-	70,00	299.156,40	299.156,40	-	17,54	74.956,40	17,20	73.500	35,26	150.635	70,00	299.091,40	100,00	99,98	99,98	70,00	299.091,40	0,00	0,00	Sekretariat Daerah	APBD Kab														
				05	Pelaksanaan Safari Ramadhan	Pembinaan keagamaan melalui safari Ramadhan	Kecamatan	0,00	-	0,00	-	10,00	139.989,65	139.989,65	-	9,75	137.904,65	0,25	1.365	0,00	-	10,00	139.269,65	100,00	99,49	99,49	10,00	139.269,65	0,00	0,00	Sekretariat Daerah	APBD Kab														
				07	Pembinaan dan pelatihan guru TKA/TPA	Terwujudnya pembinaan dan kesejahteraan guru TKA/TPA dan Madin	orang	0,00	-	0,00	-	68,00	338.140,00	338.140,00	-	16,74	85.950,00	34,20	167.340	17,06	82.950	68,00	336.240,00	100,00	99,44	99,44	68,00	336.240,00	0,00	0,00	Sekretariat Daerah	APBD Kab														
				10	Pembinaan dan penilaian UKS	Semakin berkualitasnya pembinaan dan pelaksanaan lomba sekolah sehat.	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	102.920,50	102.920,50	3,00	-	3,00	5.280,00	3,00	26.771	3,00	70.599	12,00	102.649,54	100,00	99,74	99,74	12,00	102.649,54	0,00	0,00	Sekretariat Daerah	APBD Kab													
				12	Pelayanan Ibadah Haji	Terlaksananya perjalanan Jamaah Haji dari Debarkasi ke Embarkasi dan sebaliknya	kali	0,00	-	0,00	-	2,00	266.710,50	266.710,50	-	1,55	1.220,00	0,36	253.469	0,09	11.259	2,00	265.947,76	100,00	99,71	99,71	2,00	265.947,76	0,00	0,00	Sekretariat Daerah	APBD Kab														
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100,00	99,76	99,76				0,00	0,00																					
														Predikat Kinerja				ST	ST	ST				SR	SR																					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN														3.489.129,54	3.489.129,54		144.851,89	1.001.649,70	958.530,96	1.124.731,49	3.229.764,04																									
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)				92,09	89,92	89,92				0,00	0,00																					
														PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 10)				ST	T	T				SR	SR																					
1	2	03	01	01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Ketahanan Pangan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	40.366,80	32.834,23	3,00	8.274,65	3,00	7.232,88	3,00	6.740	3,00	8.173	12,00	30.420,416	100,00	75,36	92,65	12,00	30.420,42	0,00	0,00	Ketahanan Pangan	APBD Kab													
				02	Penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.	Terlaksananya Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	0,00	-	0,00	-	3,00	6.900,00	6.900,00	0,00	-	1,41	1.366,25	1,09	1.819	0,50	2.735	3,00	5.920,860	100,00	85,81	85,81	3,00	5.920,86	0,00	0,00	Ketahanan Pangan	APBD Kab													
				06	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adm. Keuangan dan barang, tersedianya jasa operator, pengarsipan dan sopir	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	32.000,00	32.000,00	3,00	8.250,00	3,00	7.250	3,00	8.250	3,00	8.250	12,00	32.000,000	100,00	100,00	100,00	12,00	32.000,00	0,00	0,00	Ketahanan Pangan	APBD Kab													
				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	orang	0,00	-	0,00	-	2,00	24.000,00	24.000,00	0,82	6.000,00	0,18	6.000,00	0,67	6.000	0,33	6.000	2,00	24.000,000	100,00	100,00	100,00	2,00	24.000,00	0,00	0,00	Ketahanan Pangan	APBD Kab													
				09	Penyediaan bahan bacaan kepustakaan	Tersedianya bahan bacaan	buah	0,00	-	0,00	-	10,00	600,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Ketahanan Pangan	APBD Kab													
				18	Rapat-rapat: koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Koordinasi keluar daerah berjalan dengan baik	Kali	0,00	-	0,00	-	60,00	159.108,00	169.829,00	20,00	38.817,01	11,52	43.933,00	18,48	53.127	10,00	33.873	60,00	169.750,216	100,00	106,69	99,95	60,00	169.750,22	0,00	0,00	Ketahanan Pangan	APBD Kab													
				19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tersedianya ATK, pengadaan dan makan minum rapat	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	52.085,78	59.938,83	3,00	16.233,53	3,00	12.282,75	3,00	13.092	3,00	18.322	12,00	59.930,775	100,00	115,06	99,99	12,00	59.930,78	0,00	0,00	Ketahanan Pangan	APBD Kab													
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				100,00	97,15	96,40	16,83	53670,38	0,00	0,00																						
														Predikat Kinerja				ST	ST	ST				SR	SR																					
2	2	03	02	07	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Unit	0,00	-	0,00	-	13,00	6.000,00	4.571,40	0,00	-	13,00	4.571,40	0,00	-	0,00	-	13,00	4.571,40	100,00	76,19	100,00	13,00	4.571,40	0,00	0,00	Ketahanan Pangan	APBD Kab													
				08	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya AC, Vacuum Cleaner, Lemari esisip	Unit	0,00	-	0,00	-	15,00	17.793,00	17.793,00	0,00	-	15,00	17.793,00	0,00	-	0,00	-	15,00	17.793,00	100,00	100,00	100,00	15,00	17.793,00	0,00	0,00	Ketahanan Pangan	APBD Kab													
				09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Laptop, Printer, Camera, scan, Scan Barcode, modem	Unit	0,00	-	0,00	-	15,00	17.793,00	17.793,00	0,00	-	15,00	17.793,00	0,00	-	0,00	-	15,00	17.793,00	100,00	100,00	100,00	15,00	17.793,00	0,00	0,00	Ketahanan Pangan	APBD Kab													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.				
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD		APBD		I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K			Rp (000)			
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
1	2	05	15	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan kab.Bulukumba	- terpenuhinya Pengelolaan Persampahan kab.Bulukumba - Terbangunnya TPST Bira, - Tersusunnya DED TPST, Tersusunnya Dokumen Lingkungan TPST.	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	6.019.899,05	6.088.388,30	3,00	683.574,30	3,00	1.185.467,15	3,00	1.715.621	3,00	2.319.286	12,00	5.903.948,00	100,00	98,07	96,97	12,00	5.903.948,00	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab	
	2	05	15	04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	Tersedianya petugas kebersihan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	2.287.431,94	2.287.431,94	3,00	361.510,65	3,00	520.836,04	3,00	526.503	3,00	705.895	12,00	2.114.744,36	100,00	92,45	92,45	12,00	2.114.744,36	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							100,00	95,26	94,71			0,00	0,00					
Predikat Kinerja																							ST	ST	ST			SR	SR					
4	2	05	16	01	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Terciptanya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persen	0,00	-	0,00	-	20,00	42.120,00	42.120,00	0,21	450,00	2,82	5.940,00	0,42	885	16,55	20.741	20,00	28.016,00	100,00	66,51	66,51	20,00	28.016,00	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab	
2	05	16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Tersedianya data DTBP 3 sungai dan data hasil uji kualitas air sungai	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	642.578,50	642.578,50	0,06	39.642,50	0,12	79.812,43	0,70	447.699	0,12	47.346	1,00	614.499,50	100,00	95,63	95,63	1,00	614.499,50	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab		
2	05	16	04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Tersedianya Data Hasil Inventarisasi Usaha/ Kegiatan yang Belum dan yang Memiliki Dokumen LH serta Izn PPLH	Dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	47.300,00	47.299,90	0,00	280,00	0,03	2.145,00	0,06	1.870	0,91	39.236	1,00	43.530,90	100,00	92,03	92,03	1,00	43.530,90	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab		
2	05	16	06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Tersedianya sosialisasi peraturan pengelolaan LB3 dan terlaksananya pengawasan pengelolaan LB3 bagi usaha/ kegiatan	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	30.570,00	30.570,00	0,29	8.845,00	0,14	4.335,00	0,41	12.510	0,16	2.340	1,00	28.030,00	100,00	91,69	91,69	1,00	28.030,00	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab		
2	05	16	12	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	pemberian informasi, penanganan dampak kerusakan lingkungan,serta upaya pemulihan kerusakan lingkungan	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	19.860,00	19.860,00	3,00	1.130,00	3,00	5.830,00	3,00	8.245	3,00	4.655	12,00	19.860,00	100,00	100,00	100,00	12,00	19.860,00	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							100,00	89,17	89,17			0,00	0,00					
Predikat Kinerja																							ST	T	T			SR	SR					
5	2	05	17	01	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terciptanya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Paket	0,00	-	12,00	-	1,00	43.640,00	43.640,00	0,00	-	0,66	28.600,00	0,17	7.365	0,18	3.475	1,00	39.440,00	100,00	90,38	90,38	13,00	39.440,00	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab	
2	05	17	05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terbentuknya 10 kelompok kampung iklim utama + 1 kelompok kampung iklim lestari	Kecamatan	0,00	-	12,00	-	5,00	51.690,00	51.690,00	0,00	-	0,00	-	4.89	50.525	0,11	995	5,00	51.520,00	100,00	99,67	99,67	17,00	51.520,00	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab		
2	05	17	06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Sosialisasi Profil Keaneekaragaman hayati Bulukumba	Kecamatan	0,00	-	12,00	-	5,00	51.690,00	51.690,00	0,00	-	0,00	-	4.89	50.525	0,11	995	5,00	51.520,00	100,00	99,67	99,67	17,00	51.520,00	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							100,00	95,02	95,02	21,00	30320,00	0,00	0,00					
Predikat Kinerja																							ST	ST	ST			SR	SR					
6	2	05	18	01	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Tersedianya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Dokumen	0,00	-	12,00	-	12,00	33.495,00	33.495,00	0,00	-	0,00	-	0,62	1.720	11,38	29.700	12,00	31.420,00	100,00	93,81	93,81	24,00	31.420,00	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab	
2	05	18	02	Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan hasil hutan	Dokumen	0,00	-	12,00	-	12,00	20.946,25	20.946,25	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							50,00	46,90	46,90			0,00	0,00					
Predikat Kinerja																							SR	SR	SR			SR	SR					
7	2	05	19	01	Program peningkatan Kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kecamatan	0,00	-	0,00	-	10,00	60.051,00	60.051,00	0,14	975,00	3,32	23.071,00	4,21	21.991	2,33	12.214	10,00	58.251,00	100,00	97,00	97,00	10,00	58.251,00	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab	
2	05	19	02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya Pembiayaan dan Penilaian Adwiyata Bimtek Adwiyata tersedianya dokumen SLHD dan SILHD	Dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	14.001,00	14.001,00	0,00	-	0,02	240,00	0,44	6.110	0,55	7.640	1,00	13.990,00	100,00	99,92	99,92	1,00	13.990,00	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							100,00	98,46	98,46			0,00	0,00					
Predikat Kinerja																							ST	ST	ST			SR	SR					
8	2	05	24	06	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terwujudnya jalur hijau dan meningkatnya partisipasi masyarakat	Paket	0,00	-	0,00	-	4,00	406.240,00	402.376,53	0,00	-	0,07	1.550,00	0,93	94.106	3,00	303.103	4,00	398.759,00	100,00	98,16	99,10	4,00	398.759,00	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab	
2	05	24	06	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah, terbangunnya RTH Kecamatan (hasil musrembang anak), Tersedianya Terpeliharanya seluruh taman kota di beberapa kec.secara optimal tersedianya petugas taman kota sebanyak 49	Persen	0,00	-	0,00	-	100,00	996.471,90	1.024.471,90	25,00	298.295,90	25,00	230.707,86	25,00	169.402	25,00	316.114	100,00	1.014.519,31	100,00	101,81	99,03	100,00	1.014.519,31	0,00	0,00	DLHK	APBD Kab		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							100,00	99,98	99,06			0,00	0,00					
Predikat Kinerja																							ST	ST	ST			SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN												11.691.884,47	11.790.907,47		1.600.448,98		2.320.626,67		3.332.368,62		4.010.752,40		11.299.778,59											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8)																							93,75	90,33	89,62			0,00	0,00					
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8)																							ST	T	T			SR	SR					
1	2	06	01	01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran																												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.							
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		K		K		K		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)	K	Rp (000)			
											RKPD	APBD	I	II	III	IV	Rp (000)	Rp (000)																	Rp (000)	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=13*100	15=14/100	16=15*100	17	18																				
2	17	02	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Melancarkan bagian koordinasi dan konsultasi	4 mobil	0,00	-	0,00	-	4,00	37.108,75	37.108,75	0,76	7.046,00	1,28	11.882,00	0,68	6.355	1,27	11.826	4,00	37.108,750	100,00	100,00	100,00	4,00	37.108,75	0,00	0,00	Dinas	APBD Kab						
2	17	02	28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya penggunaan peralatan kantor yang maksimal	1 M.pintar	0,00	-	0,00	-	1,00	8.100,00	9.150,00	0,33	3.050,00	0,25	2.800,00	0,23	1.600	0,19	1.700	1,00	9.150,000	100,00	112,96	100,00	1,00	9.150,00	0,00	0,00	Dinas	APBD Kab						
2	17	02	31 Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	Pelaksanaan rehab gedung/kantor perpustakaan	1 unit	0,00	-	0,00	-	1,00	99.320,00	99.320,00	0,00	-	0,00	-	0,28	28.296	0,72	70.370	1,00	98.666,000	100,00	99,34	99,34	1,00	98.666,00	0,00	0,00	Dinas	APBD Kab						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100,00	124,46	99,89	76677,98	0,00	0,00														
Predikat Kinerja																		ST	ST	ST		SR	SR														
3	2	17	05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur																																	
2	17	05	03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya potensi SDM yang berkualitas	Orang	0,00	-	0,00	-	7,00	29.476,45	29.476,45	0,00	-	6,07	26.526,45	0,93	2.950	0,00	-	7,00	29.476,45	100,00	100,00	100,00	7,00	29.476,45	0,00	0,00	Dinas	APBD Kab						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100,00	100,00	100,00		0,00	0,00														
Predikat Kinerja																		ST	ST	ST		SR	SR														
4	2	17	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Badan	Penyusunan laporan evaluasi renstra SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	0,00	-	0,00	-	7,00	1.012,50	1.012,50	1,26	182,00	0,00	-	1,96	346	3,78	484	7,00	1.012,50	100,00	100,00	100,00	7,00	1.012,50	0,00	0,00	Dinas	APBD Kab						
2	17	06	04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tertibnya administrasi keuangan	Dokumen	0,00	-	0,00	-	7,00	1.073,75	1.073,75	7,00	1.073,75	0,00	-	0,00	-	0,00	-	7,00	1.073,75	100,00	100,00	100,00	7,00	1.073,75	0,00	0,00	Dinas	APBD Kab						
2	17	06	05 penyusunan program kerja SKPD	Terwujudnya perencanaan DPK dan mengetahui perkembangan realisasi	Dokumen	0,00	-	0,00	-	7,00	29.675,50	29.675,50	2,34	7.163,00	0,97	6.896,75	2,54	6.854	1,15	8.762	7,00	29.675,50	100,00	100,00	100,00	7,00	29.675,50	0,00	0,00	Dinas	APBD Kab						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100,00	100,00	100,00		0,00	0,00														
Predikat Kinerja																		ST	ST	ST		SR	SR														
5	2	17	15 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya budaya baca dan pembinaan perpustakaan																																	
2	17	15	02 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Penyediaan koleksi buku-buku perpustakaan	Papket	0,00	-	0,00	-	1,00	49.171,70	49.171,70	0,00	-	1,00	49.171,70	0,00	-	0,00	-	1,00	49.171,70	100,00	100,00	100,00	1,00	49.171,70	0,00	0,00	Dinas	APBD Kab						
2	17	15	03 Bimbingan Teknis sosialisasi peraturan perundang undangan Perpustakaan	Pelaksanaan Bimtek pengelola perpustakaan /sosialisasi peraturan perundang undangan	kecamatan	0,00	-	0,00	-	10,00	12.322,55	16.072,55	0,00	-	0,00	-	7,93	12.753	2,07	3.320	10,00	16.072,55	100,00	130,43	100,00	10,00	16.072,55	0,00	0,00	Dinas	APBD Kab						
2	17	15	04 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Buku	Pemeliharaan berkala sarana pengolahan dan penyimpanan buku	Expl	0,00	-	0,00	-	15727,00	35.875,00	0,00	-	2843,44	7.750,00	5924,36	12.250	6959,20	15.875	15727,00	35.875,00	100,00	100,00	100,00	15727,00	35.875,00	0,00	0,00	Dinas	APBD Kab							
2	17	15	05 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum,	Pelaksanaan pembinaan pustaka	pembina dan jenis	0,00	-	0,00	-	4,00	153.450,20	147.660,20	0,29	10.800,00	0,82	30.822,50	1,89	64.732	1,00	41.127	4,00	147.481,50	100,00	96,11	99,88	4,00	147.481,50	0,00	0,00	Dinas	APBD Kab						
2	17	15	06 Publikasi Minat dan Budaya Baca	Publikasi serta pelayanan pustaka	kecamatan	0,00	-	0,00	-	10,00	64.600,00	64.600,00	1,04	6.704,00	0,84	5.395,00	1,50	9.685	6,63	40.252	10,00	62.036,00	100,00	96,03	96,03	10,00	62.036,00	0,00	0,00	Dinas	APBD Kab						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100,00	104,51	99,18		0,00	0,00														
Predikat Kinerja																		ST	ST	ST		SR	SR														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN										942.215,02	942.215,02	209.115,59	263.909,59	203.434,00	259.611,78	936.070,95																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)										98,99	104,77	98,78	0,00	0,00																							
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5)										ST	ST	ST		SR	SR																						
1	2	18	01 Urusan Wajib Bukan Pelayan Dasar Kearsipan	Tertibnya pembinaan dan pengawasan kearsipan																																	
2	18	15	01 Penyusunan regulasi/pedoman kearsipan	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip, Regulasi, Tentang Sistem Kalsifikasi	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	14.599,00	26.486,00	3,00	924,00	3,00	2.147,00	3,00	14.685	3,00	7.900	12,00	25.656,00	100,00	175,74	96,87	12,00	25.656,00	0,00	0,00	Dinas	APBD Kab						
2	18	15	xx Sosialisasi kearsipan	Terlaksananya kegiatan penyediaan informasi tentang cara pengelolaan arsip	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	26.486,00	22.648,00	0,00	-	0,75	1.407,00	9,00	17.344	2,25	3.897	12,00	22.648,00	100,00	85,51	100,00	12,00	22.648,00	0,00	0,00	Dinas	APBD Kab						
2	18	15	xx Pembinaan kearsipan OPD dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlaksananya pengelolaan Arsip Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan	Bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	22.648,00	14.599,00	3,00	508,00	3,00	2.424,00	3,00	7.952	3,00	1.915	12,00	12.799,00	100,00	56,51	87,67	12,00	12.799,00	0,00	0,00	Dinas	APBD Kab						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100,00	105,92	94,85	61103,00	0,00	0,00														
Predikat Kinerja																		ST	ST	ST		SR	SR														
2	2	18	16 Program perlindungan dan pengamanan arsip vital	Pelestarian dokumen/ arsip daerah																																	
2	18	16	01 Identifikasi arsip vital (analisis organisasi, pendataan, pengolahan, hasil pendataan	Terlaksananya pendanaan dan penentu arsip yang memenuhi kriteria sebagai arsip vital	Dokumen	0,00	-	0,00	-	1,00	29.001,00	29.001,00	0,11	3.044,00	0,08	7.983,95	0,47	7.767	0,34	10.206	1,00	29.001,00	100,00	100,00	100,00	1,00	29.001,00	0,00	0,00	Dinas	APBD Kab						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		100,00	100,00	100,00	29001,00	0,00	0,00														
Predikat Kinerja																		ST	ST	ST		SR	SR														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN										92.734,00	92.734,00	4.476,00	13.961,95	47.748,00	23.918,05	90.104,00																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)										100,00	102,96	97,42	0,00	0,00																							
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)										ST	ST	ST		SR	SR																						
URUSAN PILIHAN																																					
1	3	01	01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran																																	
3	01	01	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa pelayanan komunikasi sumberdaya air dan listrik kantor	bulan	0,00	-	0,00	-	12,00	174.006,00	174.006,00	3,00	48.219,72	3,00	38.252,17	3,00	35.500	3,00	32.905	12,00	154.877,014	100,00	89,01	89,01	12,00	154.877,01	0,00	0,00	Dinas	APBD Kab						
3	01	01	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan	unit	0,00	-	0,00	-	37,00	5.400,00	5.400,00	4,03	1.011,58	0,00	26,93	3.506	6,05	804	37,00	5.321,655	100,00	98,55	98,55	37,00	5.321,66	0,00	0,00	Dinas	APBD Kab							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2019 Tahun			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.		
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	I		II		III		IV		K	Rp (000)	K	RKPD Rp (000)	APBD Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)
												K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)													
1	4 06 06 01	penyusunan program kerja SKPD	Perencanaan program dan kegiatan OPD	Dokumen	0,00	-	0,00	-	10,00	39.814,50	39.814,50	1,39	5.664,75	3,29	13.416,95	4,19	13.606	1,14	7.068	10,00	39.755,50	100,00	99,85	99,85	10,00	39.755,50	0,00	0,00	Balitbang	APBD Kab		
Predikat Kinerja																									ST	ST	ST			SR	SR	
8	4 06 33 01	Program pengkajian, penelitian, dan pengembangan SDA	Terwujudnya pengkajian, penelitian dan pengembangan sumberdaya alam	Paket	0,00	-	0,00	-	3,00	466.510,00	566.510,00	0,85	132.550,00	0,16	25.133,00	1,59	235.326	0,40	103.452	3,00	496.460,67	100,00	106,42	87,63	3,00	496.460,67	0,00	0,00	Balitbang	APBD Kab		
4	06 33 01	Studi kelayakan keadaan umum dan prospek pengembangan pembangunan SDA	Mewujudkan perencanaan litbang melalui studi kelayakan dan prospek pengembangan SDA	Paket	0,00	-	0,00	-	3,00	38.356,00	59.356,00	0,00	-	0,42	5.320,00	0,13	5.390	2,46	48.496	3,00	59.206,00	100,00	154,36	99,75	3,00	59.206,00	0,00	0,00	Balitbang	APBD Kab		
4	06 33 xx	sosialisasi hasil hasil penelitian	penyediaan jurnal piniis researc dan sosialisasi hasil kajian	Paket	0,00	-	0,00	-	3,00	38.356,00	59.356,00	0,00	-	0,42	5.320,00	0,13	5.390	2,46	48.496	3,00	59.206,00	100,00	154,36	99,75	3,00	59.206,00	0,00	0,00	Balitbang	APBD Kab		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									100,00	130,39	93,69			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																									ST	ST	ST			SR	SR	
9	4 06 34 01	Program pengkajian, penelitian, dan pengembangan SDM	Penelitian dan pengembangan potensi sumberdaya manusia	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	313.256,04	313.256,04	0,14	45.000,00	0,00	-	0,55	94.031	0,31	126.890	1,00	265.921,00	100,00	84,89	84,89	1,00	265.921,00	0,00	0,00	Balitbang	APBD Kab		
4	06 34 01	Kajian penelitian prospek pengembangan SDM	Terlaksananya penerbitan izin penelitian dan lomba karya ilmiah	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	313.256,04	313.256,04	0,14	45.000,00	0,00	-	0,55	94.031	0,31	126.890	1,00	265.921,00	100,00	84,89	84,89	1,00	265.921,00	0,00	0,00	Balitbang	APBD Kab		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									100,00	84,89	84,89			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																									ST	T	T			SR	SR	
11	4 06 34 01	program penyelenggaraan pemerintahan	Penelitian dan pengembangan potensi sumberdaya manusia	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	122.041,25	126.041,25	0,37	46.800,00	0,03	3.600,00	0,57	51.655	0,03	23.871	1,00	125.926,00	100,00	103,18	99,91	1,00	125.926,00	0,00	0,00	Balitbang	APBD Kab		
4	06 34 01	Kajian peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penerbitan izin penelitian dan lomba karya ilmiah	Paket	0,00	-	0,00	-	1,00	122.041,25	126.041,25	0,37	46.800,00	0,03	3.600,00	0,57	51.655	0,03	23.871	1,00	125.926,00	100,00	103,18	99,91	1,00	125.926,00	0,00	0,00	Balitbang	APBD Kab		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																									100,00	103,18	99,91			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																									ST	ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN										1.379.922,34	1.514.922,34		265.314,83		239.869,61		493.724,10		390.883,06		1.389.791,59				1.389.791,59							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 11)																									100,00	109,42	96,27			0,00	0,00	
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 11)																									ST	ST	ST			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM SEMUA URUSAN										678.124.496,26	676.087.675,28		42.049.597,15		142.584.300,1		122.767.207,3		187.905.469,5		626.887.673,72				734.383.206,74							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 224)																									96,82	94,17	92,63			0,00	0,00	
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 224)																									ST	ST	ST			SR	SR	

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Bulukumba Triwulan IV Tahun 2019



2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah terus saja menjadi sorotan publik, dimana masyarakat menjadi semakin cerdas dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pemerintah Daerah harus memainkan peran yang nyata melalui komitmen yang kuat untuk menjamin seluruh proses manajemen pembangunan daerah dilaksanakan secara utuh, baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Manajemen pembangunan yang baik harus menggabungkan aspek kepemimpinan struktural dengan aspek kepemimpinan partisipatif, sehingga aktivitas pembangunan akan terbingkai dalam partisipasi publik yang sinergi dengan dinamika politik kedaerahan.

Masih terdapat sejumlah permasalahan pembangunan mendasar yang dihadapi Kabupaten Bulukumba sampai saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi infrastruktur (pendidikan, kesehatan, kebinamargaan dan keciptakarya) yang belum maksimal dan merata.
2. Masalah kebersihan lingkungan (persampahan) dan masih tingginya aktifitas masyarakat yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.
3. Masih rendahnya kompetensi SDM tenaga pendidik dan kesehatan serta sebarannya yang tidak merata.
4. Sarana dan prasarana penunjang untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian masih terbatas serta belum optimalnya pembinaan desa mandiri pangan
5. Masih banyaknya potensi wisata yang belum terkelola dengan baik dan kurangnya promosi pariwisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara.
6. Tingginya tingkat pengangguran terbuka yang disebabkan karena rendahnya kualitas tenaga kerja dan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan.
7. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan masih rendahnya akses pelayanan dasar terhadap masyarakat miskin.
8. Rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah dan belum optimalnya promosi dan kerjasama antarpelaku UMKM.
9. Masih kurangnya bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap SDM aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa.
10. Belum optimalnya penanganan banjir dalam kota dan koordinasi penanganan bencana
11. Keterbatasan sumber-sumber pembiayaan dan rendahnya realisasi penerimaan PAD.
12. Belum efisiennya penerapan dan pemanfaatan IT pada semua *stakeholder* yang berperan pada pemerintahan dan penentu kebijakan.
13. Belum optimalnya proses penerbitan dokumen perizinan

2.3.1 Permasalahan untuk Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan untuk perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dimaksudkan sebagai permasalahan yang bersifat makro yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Analisis permasalahan ini dilakukan pada tiga level. Pertama, masalah pokok, yakni permasalahan yang melibatkan indikator level impact yang sifatnya makro dan akan dipecahkan melalui misi, tujuan dan sasaran. Kedua, masalah, yakni menyebabkan dari masalah pokok,



kompleksitasnya lebih terjabarkan dari masalah pokok, dan akan dipecahkan melalui rumusan strategi. Ketiga, akar masalah, yakni penyebab dari masalah dan akan dipecahkan melalui rumusan arah kebijakan. Berdasarkan pemahaman itu maka pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bulukumba dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Rendahnya Sumberdaya manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba pada tahun 2019 (68,28), meningkat dari tahun 2018 (67,70). IPM ini lebih rendah dari IPM Provinsi (71,66), Yang menjadi catatan penting Kabupaten Bulukumba untuk peningkatan Pertumbuhan IPM tahun 2019 yang hanya 0,58 persen. IPM adalah indikator untuk mengukur kualitas (derajat perkembangan manusia) dari hasil pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Peningkatan IPM menjadi manifestasi dari pembangunan manusia yang ditafsirkan sebagai sebuah keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kemampuan memperluas pilihan – pilihan pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Masalah pokok ini disebabkan oleh dua masalah. Pertama, Rendahnya derajat pendidikan masyarakat. Harapan lama sekolah (HLS) tahun 2019 sebesar 12,91. Harapan lama sekolah (HLS) juga masih dibawah capaian propinsi sebesar 13,36. Rata-rata lama sekolah (RLS) juga masih dibawah capaian propinsi. Pada tahun 2019 sebesar 7,43, lebih rendah dibanding propinsi yang mencapainya 8,26 pada tahun 2019. Kedua, rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Usia harapan hidup (UHH) pada tahun 2019 bertambah menjadi 67,69 Capaian ini berada dibawah rata-rata propinsi sebesar 70,43. Akar dari masalah ini adalah (1) Terbatasnya daya tampung sarana-prasarana pendidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan dalam memberikan akses secara merata sesuai geografi wilayah; (2) Rendahnya pemerataan guru PAUD, SD, SMP dan pendidikan kesetaraan dalam pelayanan pendidikan sesuai standar pada seluruh wilayah; (3) Terbatasnya jangkauan sarana dan prasarana kesehatan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan sesuai standar; (4) Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan sesuai standar pada seluruh wilayah; (5) Belum terjangkaunya seluruh warga masyarakat oleh jaminan sosial kesehatan.

(2) Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Rata rata pengeluaran perkapita Kabupaten Bulukumba pada tahun 2019 sebesar Rp. 10.480.000,00. Nilai ini lebih rendah dari rata-rata pengeluaran perkapita Sulawesi Selatan (Rp. 11.120.000,00). Namun demikian, persentase penduduk miskin tersebut merupakan yang terendah ketujuh dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Masalah lain adalah masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Peningkatan PDRB per kapita penduduk Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini terlihat sangat signifikan dan konsisten, pada tahun 2015 PDRB per kapita baru sebesar Rp.23.630.000,00 dan pada tahun 2019 telah mencapai Rp.33.800.000 sementara di tahun yang sama PDRB Sulawesi Selatan mencapai angka Rp. 57.030.000,00.



(3) Belum optimalnya fungsi infrastruktur wilayah

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Pada tahun pada tahun 2019 panjang jalan dalam kondisi baik hanya 91,77%, sisanya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Indikasi lain dari masalah pokok ini adalah belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan baik untuk mobilitas antar pulau (pelabuhan/dermaga) maupun mobilitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan atau antara dataran rendah dengan dataran tinggi (terminal dan marka jalan). Masalah lain terkait infrastruktur wilayah adalah keterpenuhan sarana-prasarana perumahan dan pemukiman yang belum mencukupi. Rasio rumah layak huni pada tahun 2019 sebesar 92,33%, persentase kawasan kumuh sebesar 83,52% dan rumah tinggal bersanitasi sebanyak 76,92%. Rumah tinggal yang tidak mengakses air bersih masih terdapat di berbagai wilayah terutama pada kepulauan dan dataran tinggi.

(4) Belum optimalnya pemenuhan standar dalam pelayanan dasar

Untuk urusan pendidikan, pelayanan pendidikan dasar belum sepenuhnya memenuhi standar minimal. Cakupan 100% terhadap penerima layanan untuk urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pemukiman dan perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, dan sosial sesuai PP 02/2018 belum terpenuhi semua. Untuk urusan pendidikan ini mencakup layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk urusan kesehatan ini mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita DM, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberculosis, orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia. Untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ini mencakup layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Untuk urusan perumahan dan permukiman ini mencakup penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Untuk urusan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat ini mencakup pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Untuk urusan sosial ini mencakup layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, anak telantar di luar panti, lanjut usia telantar di luar panti, layanan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Masalah utama dalam pemenuhan SPM untuk layanan-layanan tersebut adalah kelengkapan data penerima layanan dan kecukupan SDM, sarana/prasarana dan fasilitas dalam penyelenggaraan layanan.



(5) Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang

Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bulukumba sudah mengalami peningkatan dan mencapai Nilai B tahun 2019. Dalam pengelolaan keuangan, opini BPK atas laporan keuangan juga telah memenuhi kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian opini didasarkan atas laporan keuangan sesuai standar dan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan. Menurutnya pencapaian WTP tersebut menjadi komitmen dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, dalam beberapa aspek perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik masih perlu menjawab berbagai tantangan, khususnya dalam merespons berbagai dinamika lingkungan strategis pemerintahan daerah. Karena itu, agenda reformasi birokrasi memerlukan percepatan dalam berbagai ranah. Beberapa masalah terkait hal ini adalah masih terbatas SDM aparatur dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengawasan, pengelolaan teknologi informasi, dan pengelolaan keuangan; belum optimalnya ketersediaan data dalam sistem informasi pembangunan daerah terkait indikator kinerja kunci sesuai kewenangan berbagai urusan, indikator SPM dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; serta masih rendahnya kemampuan daerah dalam mencapai kapasitas keuangan dengan kontribusi PAD yang signifikan.

(6) Adanya kerentanan ekologi dalam mendukung keberlanjutan pembangunan

Untuk kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Bulukumba dibagi menjadi dua yaitu kawasan rawan banjir dan kawasan rawan tanah longsor, yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe; dan Kawasan rawan tanah longsor berada di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang. Kondisi ekologis Kabupaten Bulukumba rentan terhadap berbagai bencana. Ini disebabkan Kabupaten Bulukumba yang membentang disepanjang Pesisir Pantai, ada 7 wilayah kecamatan yang termasuk wilayah pesisir pantai di daerah Kabupaten Bulukumba. Bencana banjir sering terjadi di daerah aliran Sungai Bialo, Sungai Balantiyeng, Sungai Anyorang, dan Sungai Bijawang, terutama di daerah muara dan alirannya pada daerah Palatte, Bampang, dan Lembang. Banjir disebabkan tingginya curah hujan di sekitar bagian hulu, daerah pengalirannya cukup sempit. Batuan penyusunan adalah batuan gunungapi yang permeabilitas dan porositasnya rendah, adanya penggunaan tanah untuk budidaya pertanian didaerah lereng yang tidak sesuai dengan topografi dan kondisi Akar masalah dari kerentanan ekologis ini adalah kondisi tutupan lahan yang terus mengalami degradasi terutama pada lahan berkemiringan di wilayah pegunungan. Pada wilayah pesisir, kerentanan ekologis ini disebabkan oleh tutupan mangrove yang juga mengalami degradasi, meskipun pada sisi lain upaya rehabilitasi mangrove terus berjalan melalui inisiatif masyarakat dan peranan pemerintah.



2.3.2 Permasalahan untuk Penyelenggaraan Urusan

2.3.2.1 Permasalahan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar

(1) Urusan Pendidikan

1. Dalam hal pendidikan anak usia dini (PAUD), partisipasi PAUD telah mengalami peningkatan sejak 2015 hingga 2019. Pada 2015 cakupan PAUD sebesar 92,61 dan pada tahun 2019 menjadi 97,34. Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan PAUD adalah kecenderungan tidak berimbangannya penambahan jumlah penyelenggara PAUD dengan jumlah anak usia dini yang membutuhkan PAUD.
2. Dalam hal pendidikan dasar, APM SD/MI Kabupaten Bulukumba telah mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 82,25% menjadi 98,48% tahun 2019, APM SMP/MTs Kabupaten Bulukumba juga mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 61,31% menjadi 82,36% tahun 2019 dan APM SMA/MA/SMK Kabupaten Bulukumba meningkat dari tahun 2018 sebesar 50,83% menjadi 65,88% tahun 2019. Akar masalah yang dihadapi adalah belum meratanya ketercukupan dan kualitas sarana/prasarana serta tenaga kependidikan SD dan SMP, khususnya pada wilayah pegunungan/dataran tinggi dan kepulauan/pesisir.
3. Jumlah Guru SD/MI di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2018/2019 sebanyak 3.605 guru meningkat menjadi 3.881 tahun 2019/2020, Jumlah guru SMP/MTs pada tahun 2018/2019 sebanyak 1.960 guru meningkat menjadi 2.031 tahun 2019/2020 dan guru SMA/SMK/MA pada tahun 2018/2019 sebanyak 1.450 guru meningkat menjadi 1.864 tahun 2019/2020.

(2) Urusan Kesehatan

1. Dihubungkan dengan TPB, masalah pokok yang dihadapi adalah belum terwujudnya jaminan hak universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi. Secara lebih spesifik, akar masalahnya adalah belum tercapainya cakupan 75,28% angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk penduduk berpendapatan terbawah.
2. Dihubungkan dengan SPM kesehatan, permasalahan yang dihadapi adalah belum tercapainya semua ibu hamil dalam memperoleh pelayanan antenatal K4 (5.262 dari 7.625 ibu hamil), belum tercapainya semua ibu nifas dalam memperoleh tiga kali pelayanan nifas, belum tercapainya penanganan semua neonatas yang mengalami komplikasi, belum tercapainya semua anak balita dengan pelayanan pemantauan sesuai standar, belum tercapainya pemeriksaan kesehatan pada seluruh murid SD, serta belum tercapainya pelayanan kesehatan pada penyakit khusus seperti TBC, HIV/AIDS, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, dan gangguan jiwa berat.
3. Permasalahan di balik belum terpenuhinya berbagai pelayanan sesuai standar adalah jumlah dan kualitas pelayanan pada posyandu, ketercukupan puskesmas, poliklinik dan posyandu, serta ketercukupan tenaga dokter dan tenaga medis. Ini berakibat pada masih tingginya angka kematian bayi dan angka kematian balita.

(3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Dihubungkan dengan TPB dan SPM, masalah yang dihadapi adalah belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air



minum yang aman. Pada tahun 2018 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan sebesar 22,78% meningkat menjadi 23,05% tahun 2019.

2. Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019 hanya sekitar 94,33%. Ini berakibat pada belum optimalnya aksesibilitas wilayah, khususnya pada desa-desa pegunungan dan dataran tinggi dan perkotaan.
 3. Irigasi dalam kondisi baik baru 80,13%, panjang jaringan irigasi belum menjangkau seluruh wilayah persawahan.
 4. Dalam hal penataan ruang, rasio bangunan ber-IMB belum mencakup semua bangunan, ini terlihat dari data tahun 2019 sebesar 0,42%.
- (4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1. Dihubungkan dengan TPB, masalah pokok yang dihadapi adalah belum tercapainya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai. Belum tercapai 100% akses terhadap sanitasi yang layak secara merata bagi semua, dan masih terjadinya praktik buang air besar di tempat terbuka khususnya pada kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
 2. Dihubungkan dengan SPM, rumah layak huni belum mencapai cakupan 100%. Persentase kawasan kumuh mencapai hingga 0,55 dan lingkungan perumahan yg didukung PSU masih terbatas. Tantangan yang juga dihadapi adalah penyediaan rumah layak huni kepada korban bencana yang kemungkinan terjadi dalam lima tahun kedepan.
- (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1. Dihubungkan dengan SPM, pelayanan ketertiban dan ketenteraman masih menghadapi masalah dalam hal kecukupan personil polisi pamong praja dan keterbatasan sarana-prasarananya dalam menjangkau berbagai wilayah untuk penyelesaian gangguan ketertiban dan ketenteraman, patroli penjagaan ketertiban dan ketenteraman serta penegakan Perda.
 2. Dalam fungsi perlindungan masyarakat, pelayanan informasi rawan bencana belum optimal, begitu pula cakupan pelayanan bencana kebakaran berdasarkan Tingkat Waktu Tanggap Wilayah Manajemen Kebakaran kabupaten mencapai 80% pada tahun 2019.
- (6) Urusan Sosial
- Dalam hal SPM, masalah utama yang dihadapi adalah persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial pada Tahun 2019 adalah 91,99 persen. Begitu pula kemampuan SDM dan sarana-prasarana serta ketersediaan data belum mendukung sepenuhnya dalam rangka perlindungan sosial untuk anak terlantar di luar panti, lanjut usia terlantar di luar panti, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. Panti sosial yang selama ini menyediakan sarana/prasarana pelayanan kesejahteraan sosial ada 18 unit, dan WKBSM yg menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos ada dua unit.



2.3.2.2 Permasalahan pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

(1) Urusan Tenaga Kerja

1. Dalam hal pencari kerja yang ditempatkan dan pekerja yang difasilitasi mendapatkan jaminan sosial, permasalahan yang dihadapi adalah belum tersedianya data yang lengkap tentang pekerja dan pencari kerja secara termutakhirkan.
2. Masalah lain adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kesempatan kerja (bursa kerja) belum memadai dalam kondisi peluang kesempatan kerja dan lapangan berusaha tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja. Selain itu, perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan belum memadai.

(2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum terwujudnya akses bagi seluruh perempuan terhadap pelayanan dasar dan sumberdaya ekonomi serta kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, sumberdaya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro.
2. Belum optimalnya penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender pada seluruh perangkat daerah, termasuk penggunaan data terpilah gender dalam penentuan isu strategis dan penerama manfaat kegiatan.
3. Masih tertinggalnya kompetensi dan kemampuan perempuan untuk terlibat bekerja pada lembaga pemerintah/birokrasi tahun 2019 sebesar 97,16%, dan lembaga legislative 20% , kecuali terhadap kelembaga swasta sebesar 2,84%
4. Efektifnya pelaporan kejadian kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan terhadap anak, mencapai 100% serta tercakupnya semua korban kekerasan dengan pelayanan pada unit penanganan terpadu serta layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial dan bantuan hukum mencapai 100%.

(3) Urusan Pangan

1. Identifikasi dan pemetaan wilayah rawan pangan, terutama kecukupan konsumsi energi dan protein, belum akurat sepenuhnya sebagai dasar dalam melakukan intervensi kejadian rawan pangan khususnya pada wilayah pegunungan/dataran tinggi serta pesisir dan pulau.
2. Pemantauan dan analisis akses pangan, harga pangan, cadangan pangan dan pengembangan model distribusi, pemasaran hasil, dan sistem informasi pangan belum optimal, kecuali ketersediaan pangan utama mengalami peningkatan dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 38.913 menurun menjadi 38.913 pada tahun 2018.
3. Sinergi dan koordinasi antar stakeholder dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan yang beredar di pasaran belum efektif menekan peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar.

(4) Urusan Lingkungan Hidup

1. Kualitas tutupan lahan terus menurun seiring dengan bertambahnya luas lahan kritis dan tingkat kerusakan hutan seiring dengan semakin menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan, khususnya pada daerah dataran tinggi/pegunungan serta dampaknya pada daerah di bawahnya.
2. adanya pengakuan terhadap masyarakat yang memiliki potensi sebagai masyarakat hukum adat serta teridentifikasinya dan termanfaatkannya pengetahuan lokal yang mereka miliki dalam



- pengelolaan lingkungan hidup.
3. Pemantauan, pengukuran dan pengendalian kualitas tutupan lahan, air dan udara belum terkordinasikan secara rutin dan efektif berbasis RPPLH.
- (5) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Terbatasnya jangkauan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada wilayah terpencil pegunungan dan pulau.
- (6) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran desa yang baik belum terpenuhi secara merata termasuk khususnya dalam penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan pelayanan.
 2. Kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) level desa belum efektif dalam mendorong keberdayaan masyarakat serta dalam bekerjasama dengan pendamping desa dan pendamping lokal desa.
 3. Kecukupan SDM terlatih dan perlengkapan peralatan/fasilitas pada posyandu berkembang secara tidak berimbang dengan kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya ibu hamil dan bayi.
 4. Kapasitas SDM dan kelembagaan pemerintahan desa dalam menjalankan kewenangan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa belum mencukupi belum berkembang seiring dengan dinamika kebutuhan desa, termasuk dalam relasi antara kepala desa dengan BPD.
- (7) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Adanya arahan kebijakan pengendalian kependudukan level daerah yang dijadikan dasar bagi perangkat daerah untuk mengintegrasikan pertimbangan kependudukan dalam penyelenggaraan program/kegiatan.
 2. Terbatasnya jumlah dan sarana/prasarana dalam mendorong penyuluh lapangan KB serta pelayanan KB dalam meningkatkan partisipasi pasangan usia subur untuk menggunakan alat kontrasepsi.
- (8) Urusan Perhubungan
1. Tidak berimbangnya penyelesaian sarana-prasarana perhubungan darat kebutuhan masyarakat pengguna layanan terminal, dan izin trayek.
 2. Belum optimalnya fungsi dari prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan raya dalam upaya pengendalian dan pengamanan lalu lintas termasuk penataan parkir.
 3. Belum optimalnya pengawasan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum serta uji KIR secara berkala dalam menjamin keamanan dan keselamatan penumpangan.
- (9) Urusan Komunikasi dan Informatika
1. Belum efektifnya fungsi kelompok informasi masyarakat (KIM) tingkat kecamatan sebagai wadah penyebaran informasi public dari pemerintah kepada masyarakat dan wadah pertukaran informasi di antara masyarakat.
 2. Belum tercakupinya seluruh wilayah dalam layanan informasi melalui akses poin.
 3. Belum terpenuhinya dengan cukup SDM bidang teknologi komunikasi dan informasi pada perangkat daerah dalam membangun sistem data terintegrasi dan on-line antar perangkat daerah.



- (10) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 1. Masih adanya UKM no BPR/LKM aktif (39.120 unit) dari total UKM no BPR/LKM yang ada (39.156), dimana UKM yang aktif menghadapi masalah rendahnya kemampuan manajerial dan teknologi produksi.
 2. Besarnya porsi usaha mikro (8.120) dalam total UMKM yang ada (39.156). Usaha mikro ini memproduksi dalam omzet yang besar dan daya saing produk yang tinggi sehingga perkembangannya untuk menjadi usaha kecil dan menengah terpenuhi.
- (11) Urusan Penanaman Modal
 1. Terbatasnya kemampuan daerah dalam penyiapan sarana-prasarana dan lahan sebagai upaya kemudahan bagi investor dalam melakukan investasi.
 2. Serapan tenaga kerja pada investasi yang berlangsung belum berimbang dengan angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja.
- (12) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
 1. Belum adanya prestasi pemuda, atlet dan cabang olah raga yang bersaing pada internasional disebabkan terbatasnya pelatih bersertifikat dan kurang teridentifikasinya bakat olah raga terutama dari kalangan pelajar.
 2. Kurangnya sarana-prasarana dan fasilitas dalam pembinaan prestasi pemuda dan olah raga, termasuk pembinaan prestasi olah raga di sekolah.
 3. Rendahnya etos kewirausahaan dan keterampilan kalangan generasi muda dalam memanfaatkan potensi daerah untuk perkembangan ekonomi.
- (13) Urusan Statistik
 1. Belum tersedianya data indikator pembangunan daerah yang sesuai dengan Permendagri 86/2017 dalam penerbitan buku Daerah Dalam Angka, PDRB, dan IPM Daerah.
 2. Belum efektifnya pengintegrasian data dan informasi pembangunan dan pelayanan antar perangkat daerah berbasis web-site daerah.
- (14) Urusan Persandian
 1. Kurangnya penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.
 2. Kurangnya SDM persandian yang andal pada perangkat daerah
- (15) Urusan Kebudayaan
 1. Belum optimalnya upaya inventarisasi, pelestarian dan pengelolaan secara terpadu benda budaya, situs budaya dan kawasan cagar budaya.
 2. Belum terinventarisasinya dengan akurat berbagai karya budaya daerah yang dapat dimanfaatkan dalam pemajuan kebudayaan daerah, termasuk bahasa daerah.
- (16) Urusan Perpustakaan
 1. Tidak berimbangnya perkembangan jumlah buku bacaan dengan perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan.
 2. Terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan (pustakawan, tenaga teknik dan penilai) dalam mendorong pelayanan perpustakaan yang lebih baik.
- (17) Urusan Kearsipan
 1. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM pengelola kearsipan dalam mendukung perbaikan sistem kearsipan, penyelamatan dokumen daerah dan pemeliharaan sarana prasana kearsipan.



2. Belum tersediannya sarana-prasarana pengelolaan kearsipan yang memenuhi standar berjalannya pengelolaan arsip yang baku pada perangkat daerah.

4.1.2.3. Urusan Pilihan

(1) Urusan Pariwisata

1. Banyaknya destinasi wisata baru/objek wisata baru didaerah lain sehingga mengakibatkan penurunan jumlah capaian kunjungan wisatawan yaitu dari tahun 2018 sebanyak 88,78 menurun menjadi 80,17 pada tahun 2019.
2. Adanya kenaikan tarif retribusi objek wisata sehingga capaian kunjungan wisatawan menurun.

(2) Urusan Pertanian

1. Adanya stagnasi dan kecenderungan kemunduran produksi pada usaha tani spesifik lokal seperti palawija.
2. Masih rendahnya rata-rata kualifikasi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam mendukung peningkatan produktivitas usaha tani melalui pengembangan teknologi yang sesuai kondisi lokal khususnya pada petani padi sawah.

(3) Urusan Perdagangan

1. Belum efektifnya pembinaan pelaku usaha informal perdagangan, termasuk pedagang kaki lima dan pedagang asongan, terutama dalam hal ketertiban lokasi dagang dan kualitas produk yang diperdagangkan.
2. Belum efektifnya pengawasan mutu dan peredaran barang dagangan dalam rangka melindungi konsumen baik pada usaha dagang formal maupun informal.

(4) Urusan Perindustrian

1. Belum efektifnya pembinaan pelaku industri kerajinan terkait akurasi data sebagai dasar pembinaan dan SDM yang berkompetensi dalam melakukan pembinaan.
2. Belum berkembangnya kawasan industri berbasis potensi dan keunggulan daerah dengan daya saing yang kuat.

(5) Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Belum kuatnya pengetahuan dan kesadaran nelayan tentang penangkapan ikan yang ramah lingkungan dibalik perkembangan teknologi penangkapan yang digunakan.
2. Belum efektifnya kelompok nelayan sebagai wahana kerjasama dan wadah belajar dalam peningkatan kemampuan dan penguatan kelembagaan nelayan dalam menjalankan usaha penangkapan maupun budidaya yang produktif dan ramah lingkungan.
3. Belum berkembangnya usaha-usaha peningkatan nilai tambah produk perikanan.
4. Rendahnya pendapatan nelayan kecil dalam menunjang kehidupan keluarga yang layak.

4.1.2.4. Penunjang Urusan

(1) Perencanaan

1. Kurang akuratnya penjabaran dan konsistensi RPJMD ke dalam RKPD dan RKPD ke dalam APBD terutama dalam hal indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif baik pada level program maupun kegiatan.
2. Belum tersediannya secara komprehensif, akurat dan terkini data-data



- hasil evaluasi pada level output, outcome dan impact sebagai dasar dalam penyusunan rencana, pengendalian, dan pelaporan kinerja.
3. Belum berkembangnya pembahasan prioritas Renja/RKPD dalam proses musrenbang RKPD secara substantif berbasis fakta dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.
 4. Belum efektifnya kordinasi perangkat daerah berdasarkan bidang perencanaan baik dalam penyusunan rencana, pengendalian maupun pemanfaatan rekomendasi hasil evaluasi.
 5. Belum kuatnya pengintegrasian dokumen pendukung perencanaan daerah mencakup dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Induk Pariwisata, Rencana Induk Kelitbangan, Road Map Sistem Inovasi Daerah, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah, Pengarusutamaan Gender dan sebagainya kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- (2) Keuangan
1. Belum optimalnya sinkronisasi antara aplikasi perencanaan dan aplikasi keuangan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
 2. Belum optimalnya sinergitas sistem aplikasi pengelolaan aset, termasuk pencatatan dan penilaian barang milik daerah, untuk mendukung laporan keuangan secara akrual.
 3. Masih besarnya porsi SILPA dalam penyelenggaraan keuangan daerah.
 4. Masih besarnya porsi belanja tidak langsung dalam APBD.
- (3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
1. Kecilnya porsi ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. disebabkan karna jumlah keseluruhan ASN yang berhak mengikuti pelatihan adalah 803 orang sampai tahun 2018 tetapi pegawai yang mengikuti pelatihan struktural pada tahun 2019 sebanyak 923 orang.
 2. Belum proporsionalnya perbandingan pemangku jabatan structural/pimpinan, jabatan fungsional dan jabatan adminsitratif.
 3. Kecilnya porsi ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
- (4) Penelitian dan Pengembangan
1. Kurangnya pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence*).
 2. Terbatasnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pengembangan ekonomi daerah.
 3. Terbatasnya SDM dan sarana/prasarana kelitbangan daerah dalam mendukung kegiatan kelitbangan yang berkualitas.
 4. Kurang berkembangnya iklim inovasi dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah.
- (5) Pengawasan
1. Belum terpenuhinya secara cukup SDM pengawasan serta kekuatan kelembagaan pengawasan dalam mencapai tingkat kematangan.
 2. Belum optimalnya dampak perubahan dari tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran administrasi dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan di setiap perangkat daerah.
 3. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN belum berjalan sesuai aturan.
 4. Belum kuatnya komitmen dan kompetensi dalam pencapaian akuntabilitas keuangan dan kinerja yang baik.



- (6) Sekretariat Dewan
1. Belum efektifnya dukungan dalam penyelenggaraan fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting yang dijalankan oleh legislative daerah.
 2. Belum kuatnya integrasi program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD.
- (7) Sekretariat Daerah
1. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan oleh sekretariat daerah dalam penyelenggaraan tugas perangkat daerah.
 2. Masih adanya tumpang tindih pelaksanaan kegiatan antara perangkat daerah dan sekretariat daerah.
 3. Belum optimalnya implementasi road map reformasi birokrasi.
 4. Belum efektifnya fungsi hubungan masyarakat dalam menginformasikan kebijakan pemerintah daerah kepada publik.
- (8) Pemerintah Kecamatan
1. Belum optimalnya fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan.
 2. Belum optimalnya fungsi kordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan PD di kecamatan, penerapan dan penegakan Perda.
 3. Belum efektifnya fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan di desa dan kelurahan.

2.4 ISU STRATEGIS DAERAH

2.4.1 Identifikasi Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi yang perlu diperhatikan atau dalam penyelenggaraan pembangunan kedepan. Isu strategis pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan diidentifikasi pada level internasional, nasional dan daerah.

Tabel 2.343
Identifikasi Isu Strategis

Tingkat Isu	Isu Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
Tingkat Internasional:		
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1. Kemiskinan perdesaan dan perkotaan (T1)	Penanggulangan Kemiskinan melalui koordinasi bidang terkait
	2. Gizi, pangan dan pertanian berkelanjutan (T2)	Penanganan Gizi dan Peningkatan ketersediaan paangan utama dan pertanian yang berkelanjutan
	3. Kehidupan sehat pada semua usia (T3)	Pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan serta pengembangan pola hidup sehat dalam masyarakat
	4. Akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan (T4)	Pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan dan peningatan dukungan terhadap dukungan pelayanan pendidikan
	5. Kesetaraan gender,	Penetapan regulasi tentang



Tingkat Isu	Isu Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
	pem-berdayaan perempuan dan perlindungan anak (T5)	kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	6. Air bersih dan sanitasi (T6)	Peningkatan cakupan penggunaan air bersih khususnya pada masyarakat pedesaan
	7. Kesempatan kerja yang produktif dan pekerjaan yang layak (T8)	Peningkatan kesempatan kerja dan perbekalan dan pelatihan tenaga kerja
	8. Infrastruktur, industri dan inovasi (T9)	Peningkatan infrastuktur wilayah, penungktan industri dan Inovasi.
	9. Kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat dan antara kawasan perdesaan dengan perkotaan (T10)	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan desa tertinggal
	10. Pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni (T11)	Bedah rumah dan pembangunan PSU pada pemukiman kumuh
	11. Limbah B3 dan timbulan sampah (T12)	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengeloan persampahan dan optimalisasi kinerja pengelolaan layanan persampahan
	12. Perubahan iklim (T13)	Penurunan emisi gas rumah kaca
	13. Penangkapan ikan dalam batasan biologis aman (T14)	Perda penangkapan ikan dalam batasan bioglas aman
	14. Pemeliharaan tutupan lahan (T15)	Pemantauan dan pengendalian tutupan lahan
	15. Konflik dan Tatakelola Pemerintahan (T16)	Penanganan konflik dan Reformasi Birokrasi
	16. Pendapatan Pemerintah Daerah (17)	Percepatan dan peningkatan PAD
Masyarakat Ekonomi Asean	1. Daya saing produk dalam masyarakat ekonomi Asean	Peningkatan daya saing produk
	2. Daya saing tenaga kerja dalam masyarakat ekonomi Asean	Peningkatan daya saing tenaga kerja
Tingkat Nasional:		
Prioritas	1. Revolusi mental	Peningkatan pembangunan



Tingkat Isu	Isu Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
pembangunan nasional		mental spritual
	2. Pendidikan	Peningkatankualitas infrastruktur pendidikan dan tenaga kependidikan
	3. Kesehatan	Peningkatan pola hidup sehat dan pencapaian SPM
	4. Infrastruktur	Peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan pemukiman
	5. Kemandirian pangan	Peningkatan kemandirian pangan
	6. Kemandirian energi dan ketenagalistrikan	Pengembangan kemandirian energi dan ketenaga listrikan
	7. Kemaritiman dan kelautan	Pemanfaatan kelautan
	8. Industri dan pariwisata	Pengembangan kawasan industri dan pariwisata
	9. Pemerataan antar kelompok pendapatan	Pemerataan pendapatan kelompok marginal
	10. Pembangunan desa	Pengawasan pemanfaatan dana desa
	11. Pembangunan perbatasan	Penegasan pembangunan batas wilayah
	12. Pembangunan perkotaan	Pembangunan pemukiman kumuh perkotaan
	13. Kepatuhan dan penengakan hukum	Penegakan perda
	14. Keamanan dan ketertiban	Pengaktifan Kantibmas dan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat
	15. Politik dan demokrasi	Pendidikan politik dan demokrasi
	16. Tata kelola	Penataan dan reformasi birokrasi
Tingkat Daerah:		
Permasalahan Pembangunan Daerah	1. Pendidikan	Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan.
	2. Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan
	3. Kemiskinan dan Pengangguran	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
	4. Infrastruktur wilayah	Pembangunan infrastruktur wilayah khususnya pada daerah pegunungan dan dataran tinggi
	5. Lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
	6. Tatakelola	Penguatan sistem akunta-



Tingkat Isu	Isu Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
	pemerintahan	bilitas kinerja pemerintah daerah
	7. Pelayanan publik	Pemenuhan standar pelayanan minimal
	8. Ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Pengendalian gangguan ketertiban dan ketenteraman serta penanganan bencana

2.5 PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Ada beberapa gagasan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan pengelompokan urusan bidang komisi sebagai berikut:

2.5.1. Bidang Pemerintahan

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah menjadi konsensus nasional diharapkan mampu mempercepat upaya peningkatan kemakmuran daerah. Dalam perkembangannya, Daerah Kabupaten Bulukumba dengan segenap potensinya diharapkan mampu mengelola berbagai potensi tersebut dengan konsep Good Governance. Prinsip transparansi, akuntabilitas dan Profesionalitas harus mampu ditunjukkan secara nyata dalam pembangunan daerah dalam rangka merealisasikan konsep good governance tersebut.

Semangat pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan di daerah harus diapresiasi dalam bentuk berbagai turunan peraturan daerah. Dalam UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015, tentu saja membawa dampak perubahan yang signifikan dengan berbagai peraturan daerah yang ada sekarang. Beberapa perubahan kebijakan tersebut berimplikasi pada pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Demikian pula dengan telah ditetapkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kemudian membuat PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa. Proses penerapan undang-undang baru tentang desa membuat desa mempunyai aksesibilitas lebih dibandingkan sebelumnya. Pemerintah juga memberikan anggaran khusus dari APBN untuk dana pembangunan desa.

Menempatkan desa sebagai pertumbuhan juga sangat penting mengingat desa mempunyai modal pembangunan cukup besar dan kontinyu. Pemerintah Kabupaten Bulukumba tentu saja membutuhkan kajian-kajian baru yang kemudian di implementasikan dengan berbagai kebijakan daerah untuk mengatur beberapa kewenangan-kewenangan yang terbagi menjadi kewenangan pemerintah Kecamatan, dan pemerintah desa.

Penataan SDM dalam pemerintahan, baik Pemerintah daerah dan DPRD secara kelembagaan menjadi penting. Terlebih banyak anggota DPRD yang baru dan menjadi bagian dari mitra kerja pemerintah daerah. Terlebih menyikapi UU pemerintah daerah yang baru, UU pemerintah desa, dan beberapa perubahan UU lainnya membutuhkan banyak peningkatan kapasitas dan pengetahuan DPRD maupun pemerintah daerah.

Beberapa Prioritas program bidang ini diantaranya adalah :

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Publik
- 2) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi terutama sektor pariwisata



- 3) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati.
- 4) Program peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; Mendorong peran aktif DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam program-program pembangunan, mulai dari penguatan kapasitas, pengetahuan, keterampilan hingga pada konteks perencanaan, kebijakan, implementasi hingga evaluasinya.
- 5) Program penataan peraturan perundang-undangan;
- 6) Program penguatan lembaga yang terkait khusus dengan Desa
- 7) Program pengawasan Produk hukum;
- 8) Program analisis kebijakan pembangunan ;
- 9) Program pencegahan dini bencana dan penanggulangan bencana ;
- 10) Program pengembangan investasi dan inventarisasi aset daerah sehingga tidak mudah diklaim oleh oknum tertentu.
- 11) Program pengembangan dan pembinaan BUMD dan lembaga keuangan :
 - a) Melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD dan capaian – capaian target dalam kontribusi pendapatan daerah.
 - b) Perbaiki kebijakan dan tata kelola BUMD sebagai bentuk sumber pendapatan daerah
- 12) Mendorong program – program kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

2.5.2. Bidang Ekonomi dan Keuangan

Urusan bidang ekonomi dan keuangan mempunyai beberapa sub bidang yang terkait dengan program-program peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan aset daerah. Bidang-bidang dibawah ekonomi disajikan sebagai berikut :

a. Urusan Pariwisata

Visi Pariwisata Kabupaten Bulukumba yang ingin menjadikan Kabupaten Bulukumba sebagai tujuan wisata terkemuka di Sulawesi Selatan tentu saja menjadi tujuan yang tidak mudah diperoleh dengan usaha-usaha yang normatif saja. Kabupaten Bulukumba dengan potensi khas budaya memang telah menjadi fenomena pariwisata nasional yang membedakan dengan daerah lainnya.

Namun dengan segala potensi yang dimiliki Kabupaten Bulukumba, apabila tidak dikelola dengan baik maka bukan tidak mungkin akan ketinggalan dengan daerah yang lain. Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata yang semakin kompetitif dan trend pasar yang terus meningkat maka pembangunan pada bidang ini harus di dorong lebih kuat dan di arahkan secara tepat untuk meningkatkan daya saing dalam peta kepariwisataan nasional dan regional.

Beberapa prioritas program pariwisata, diantaranya yaitu :

- 1) Program pengembangan pemasaran pariwisata.
Program peningkatan promosi melalui teknologi informasi, penguatan branding pariwisata Kabupaten Bulukumbadan pengembangan arsitektur berciri khas dan berkarakter Bulukumba dan peningkatan kecintaan wisata berbasis budaya dan wisata edukatif dengan menggerakkan para siswa dari sekolah-sekolah di Kabupaten Bulukumba maupun promosi kepada siswa di luar Kabupaten Bulukumba.
- 2) Program pengembangan destinasi pariwisata.



Program Pengembangan wisata edukasi dan *agrotourism* sebagai asset dan potensi Kabupaten Bulukumba yang potensial, peningkatan kecintaan wisata berbasis budaya dan wisata edukatif dan Pengembangan destinasi wisata berbasis religi.

- 3) Program pengembangan kemitraan pariwisata
Program peningkatan akses serta sarana prasarana pariwisata (jalan, parkir serta transportasi publik).
- 4) Program pengembangan desa wisata.
 - a) Program penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya desa wisata/kampung wisata/komunitas wisata yang dikembangkan sebagai ciri khas Kabupaten Bulukumba yang memiliki *value* dan merupakan deferensiasi Pariwisata berbasis budaya
 - b) Program bantuan pengembangan infrastruktur wisata desa, wisata kampung, wisata komunitas. Konsep pengembangan wisata tidak hanya terkonsentrasi pada Dinas Pariwisata semata namun semua OPD turut andil untuk menempatkan program kegiatannya agar pembangunan sektor wisata lebih cepat dan efektif.

b. Urusan Perikanan dan Kelautan

Beberapa prioritas program pembangunan perikanan dan kelautan adalah:

1. Pengembangan Perikanan Tangkap/Nelayan Kecil
2. Peningkatan Perikanan Budidaya Air Tawar
3. Pengembangan Budidaya Air Payau.
4. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
5. Program pengembangan perikanan tangkap.
6. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.
7. Program pengembangan budidaya perikanan.
 - a) Menginisiasi dan mengembangkan sentra-sentra perikanan air tawar, sentra perikanan dan biota laut lainnya di muara sungai tepi pantai, berbasis masyarakat dan sistim informasi terpadu.
 - b) Peningkatan prasarana penangkapan perikanan darat dan laut yang ramah lingkungan.
8. Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau, dan air tawar.

Optimalisasi pengembangan perikanan budidaya dan optimalisasi lahan perikanan tangkap di air tawar, yaitu di sungai, sawah, embung, danau dan waduk.
9. Program peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan perikanan dan kelautan.
 - a) Fasilitasi teknologi, permodalan, manajemen, pemasaran dan perubahan mindset bagi nelayan.
 - b) Fasilitasi teknologi terutama pembuatan pakan murah, sehingga petani dan peternak bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi, karena selama ini biaya terbesar terserap di pakan ikan.
- 10 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan perkiraan iklim laut



1. Program rehabilitasi ekosistem dan cadangan sumberdaya alam.
2. Pengembangan konservasi bakau sebagai basis konservasi pantai dan pengembangan perikanan payau
3. pengendalian dan penataan kawasan wilayah pesisir secara terpadu sehingga tidak ada tumpang tindih pemanfaatan wilayah pesisir, antara pemanfaatan untuk pariwisata, perikanan/tambak, permukiman dan sempadan pantai.
4. pengendalian dan penataan kawasan wilayah pesisir secara terpadu sehingga tidak ada tumpang tindih pemanfaatan wilayah pesisir, antara pemanfaatan untuk pariwisata, perikanan/tambak, permukiman dan sempadan pantai.

c. Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Seperti kita ketahui sektor pertanian saat ini masih menjadi tumpuan hidup masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Bulukumba pada khususnya. Sektor pertanian sebagai penghasil dari kebutuhan pangan masyarakat menjadi vital untuk mendapatkan perhatian dan prioritas.

Sektor pertanian menyimpan masalah yang serius di masa depan apabila tidak mendapatkan respon yang memadai. Fenomena klasik yang sering mengemuka seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk adalah semakin meningkatnya kebutuhan permukiman. Hal ini menyimpan problem sosial yang sangat dilematis, dimana lahan-lahan pertanian yang sebelumnya Hijau dan subur menjadi kawasan permukiman yang pada akhirnya menghilangkan fungsi awal sebagai lahan produktif.

Perda yang telah ditetapkan, yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tentunya diharapkan mampu menahan laju penyusutan lahan pertanian tersebut. Namun hal ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena banyak pengembang yang mengabaikan peraturan daerah ini. Bayangan masalah ini sebenarnya apabila dicermati lebih dekat ternyata belumlah mencakup seluruh aspek-aspek pertanian. Kita ketahui di dalam aspek pertanian ada kesejahteraan petani yang perlu di perhatikan.

Perda yang telah ditetapkan, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan tentunya diharapkan mampu menahan laju penyusutan lahan pertanian tersebut. Namun hal ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena banyak pengembang yang mengabaikan peraturan daerah ini. Bayangan masalah ini sebenarnya apabila dicermati lebih dekat ternyata belumlah mencakup seluruh aspek-aspek pertanian. Kita ketahui di dalam aspek pertanian ada kesejahteraan petani yang perlu di perhatikan oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah daerah selain menunjukkan rasa perhatian kepada lahan pertanian, tetapi juga kepada pelaku tani itu sendiri dengan memberikan segala hal yang dibutuhkan agar para petani ini semakin produktif di dalam menggarap lahannya.

Dalam menyikapi kebutuhan pangan di Kabupaten Bulukumba yang semakin besar pada tahun-tahun mendatang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk dan industri perhotelan yang pesat menjadikan komoditas-komoditas primer dan unggulan di Kabupaten Bulukumba untuk ditingkatkan. Produksi hasil pertanian perlu dijaga dan mendapat



perhatian yang cukup sehingga diharapkan di Kabupaten Bulukumba memiliki ketahanan pangan yang baik.

Hal ini penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten bulukumba ini. Prioritas program bidang pertanian dan ketahanan pangan adalah:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian
3. Program Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanian dan infrastruktur Pertanian.
4. Program Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan petani.
 - a) Penguatan kelembagaan petani melalui : Studi penguatan kelembagaan petani, Pelibatan SDM sarjana Pertanian, Pemberdayaan kelembagaan petani berorientasi kepada agribisnis, *pilot project* untuk pengembangan agribisnis.
 - b) peningkatan produktifitas hasil pertanian dengan intensifikasi dan upaya kreatifitas teknologi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.
5. Program peningkatan produksi tanaman pangan.
 - a) Peningkatan penerapan teknologi pertanian : traktor, *sprayer*, mesin panen dan lain-lain dalam rangka penerapan teknologi pertanian yang menyebabkan rendahnya produktivitas hasil pertanian.
 - b) Fasilitasi teknologi hasil pertanian dan kemudahan dalam mendapatkan pupuk dan bibit untuk menunjang produktivitas petani.
 - c) Peningkatan infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi
 - d) Peningkatan subsidi untuk petani melalui bantuan pupuk organik, subsidi harga panen studi tentang kelayakan subsidi harga produk pertanian.
6. Program Revitalisasi Pertanian dan menjadikan Pertanian sebagai Lokomotif Pembangunan menuju Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Petani.
7. Pemberdayaan ekonomi pedesaan dengan mengaktifkan kelembagaan BUMDesa.
8. Pengembangan subterminal Agribisnis sebagai pusat transaksi hasil/produksi pertanian di Kota Bulukumba.
9. Program peningkatan produk hasil peternakan.
10. Pengembangan sentra-sentra baru penghasil ternak di seluruh Kabupaten Bulukumba sehingga setiap kabupaten memiliki sentra-sentra penghasil ternak sendiri.

d. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Peran koperasi sebagai soko guru perekonomian dan usaha kecil menengah sebagai denyut nadi perekonomian di Kabupaten Bulukumba selayaknya mendapatkan perhatian yang kuat dan luas.

Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang bersifat berkesinambungan agar koperasi dapat kembali tumbuh subur di Kabupaten Bulukumba ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu pendampingan pra koperasi, koperasi pemula dan koperasi mantap dengan sistem manajemen yang berbeda sehingga mereka bisa naik tingkatan sesuai kemampuannya.

Melalui dominasi UKM tersebut maka perekonomian di daerah kabupaten bulukumba memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik di



mata nasional. Oleh karena itu, pembinaan usaha kecil dan menengah di kabupaten Bulukumba mutlak diperlukan sehingga usaha kecil menengah dapat terus berjalan dan mampu meningkatkan diri.

Adapun beberapa prioritas program urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu:

1. Sosialisasi Undang-undang Koperasi yang baru dan peningkatan kapasitas manajemen perkoperasian sehingga kehidupan perkoperasian di Kabupaten Bulukumba bisa lebih baik lagi,
2. Fasilitasi tempat pameran UKM dengan konsep bagi hasil atau harga terjangkau.
3. Pendampingan terhadap UKM dan mendampingi kelompok Pengusaha kecil menengah serta Pengrajin, hal ini juga perlu penanganan yang terpola sehingga pengentasan ketergantungan dari pola asuh dapat berjalan dengan baik.
4. Penguatan sumber daya UMKM secara berkesinambungan dan terintegrasi antar stake holder
5. Program penguatan sumber daya (modal, SDM, Manajemen, Jejaring) Koperasi dan UMKM.
6. Penguatan Sentra industri kecil berbasis kelompok atau masyarakat sebagai ciri khas pengembangan wilayah.

e. Urusan Penanaman Modal

Kabupaten Bulukumba memiliki potensi harus dikembangkan dengan kerjasama dari segala pihak. Momentum seperti ini mampu memberikan penjelasan dan jaminan kepada investor asing untuk melirik Daerah kabupaten Bulukumba sebagai tempat menanamkan modal, hendaknya mampu dijadikan catatan bahwa Kabupaten Bulukumba memiliki suatu magnet dan potensi yang besar bagi datangnya penanaman modal.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu keseriusan dan energi yang lebih untuk mempersiapkan hal ini, untuk mengakselerasi perekonomian daerah sekaligus mengurangi pengangguran secara signifikan di Bulukumba. Pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dengan membawa lebih besar lagi sumber daya sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Kabupaten Bulukumba.

Dalam hal ini upaya peningkatan penanaman modal merupakan cermin dari keterbukaan daerah didalam bermitra dan bekerjasama dengan para investor dalam rangka mengakselerasi kemajuan dan pembangunan daerah.

Berikut prioritas program dalam urusan penanaman modal :

1. Program peningkatan investasi, sehingga akan terbentuk lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran/kemiskinan.
2. Program penguatan iklim investasi dan realisasi investasi
 - a) Peningkatan investasi, sehingga akan terbentuk lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran/kemiskinan, yang saat ini masih berkisar 18%.
 - b) Peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi melalui investasi.
3. Program peningkatan promosi kerjasama dan pemerataan pertumbuhan investasi dengan memberikan kemudahan dalam pelayanan perijinan dengan konsep perijinan 1 atap sehingga



- para investor dan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam hal perijinan sesuai mekanisme yang berlaku.
4. Program kemudahan dalam pelayanan perijinan dengan konsep perijinan satu atap sehingga para investor dan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam hal perijinan sesuai mekanisme yang berlaku.
 5. Penguatan Lembaga Penjamin Kredit Daerah .
 6. Program Paket Investasi yang menarik bagi investor yang terintegrasi antar stake holder yang menguatkan ekonomi kreatif.

2.4.2 Bidang Pembangunan

Urusan pekerjaan Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD adalah membangun infra struktur public dengan tersedianya infrastruktur jalan yang baik maka hal ini merupakan modal utama untuk mendorong akselerasi kegiatan ekonomi masyarakat dengan kondisi jalan yang baik dan mulus maka transportasi public untuk angkutan manusia maupun barang menjadi lancar, akselerasi perekonomian menjadi lebih cepat disamping itu kemudahan untuk menjangkau daerah-daerah tujuan wisata menjadi lebih meningkat sehingga visi untuk menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara bisa terwujud.

Disamping jalan-jalan yang berstatus jalan propinsi tidak kalah urgensinya adalah jalan dan jembatan pedesaan dengan kondisi jalan dan jembatan pedesaan yang memadai maka akan membuka akses ke daerah-daerah yang terisolir, disamping semakin lancarnya transportasi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian bagi warga desa. Perumahan pedesaan yang dihuni oleh keluarga-keluarga miskin pada umumnya merupakan rumah tinggal yang sebenarnya tidak layak huni baik ditinjau dari segi kesehatan maupun keselamatan terhadap terjadinya bencana, oleh sebab itu subsidi atau bantuan untuk mewujudkan rumah tinggal yang layak bagi keluarga miskin harus dilakukan.

Tata kelola air sesuai dengan fungsinya baik air untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun air untuk keperluan usaha pertanian (irigasi) haruslah direncanakan secara komprehensif, ketersediaan air bersih bagi daerah-daerah yang sering terjadi bencana kekeringan harus bisa ditingkatkan dengan program-program pembangunan embung-embung, telaga-telaga maupun dengan pembangunan sumur-sumur bor, disamping pemeliharaan sempadan sungai untuk menanggulangi bencana banjir, dengan membangun tanggul-tanggul maupun crosdam dan sebagainya.

Beberapa program terkait infrastruktur, perhubungan dan lingkungan hidup, diantaranya yaitu :

- a. Program Peningkatan jalan dan Jembatan.
- b. Program Rehabilitasi maupun pemeliharaan jalan dan jembatan.
- c. Program pembangunan maupun pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong.
- d. Program peningkatan jalan dan jembatan pedesaan/daerah terpencil.
- e. Program peningkatan, pengelolaan bangunan gedung,
- f. Program peningkatan layanan jasa pengujian bangunan konstruksi.
- g. Program pengaturan jasa konstruksi.
- h. Program monitoring dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Gedung.
- i. Program rehabilitasi perumahan kumuh dan rumah tidak layak huni.
- j. Program pengembangan perumahan.
- k. Program lingkungan sehat perumahan.



- l. Program relokasi perumahan pada daerah bencana.
- m. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, telaga, embung serta sumber daya air lainnya.
- n. Program pengendalian banjir.
- o. Program penataan, pengendalian penggunaan air tanah.
- p. Program pengembangan pengelolaan air limbah .
- q. Program pengendalian pemanfaatan ruang.
- r. Program perubahan data base jalan yang dibiayai dalam Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.4.3 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Orientasi urusan sosial harus mewadahi segenap persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Penyandang masalah kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan diharapkan menjadi arah kebijakan yang dibangun pada tahun berjalan. Hal ini penting karena persoalan tersebut merupakan persoalan yang terus ada tiap tahun dan selayaknya ada political will yang lebih jelas, sehingga keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat lebih nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.

Urusan kesejahteraan rakyat merupakan gabungan dari beberapa bidang gerak pembangunan. Fungsi dari bidang komisi ini lebih fokus pada kesejahteraan rakyat secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Beberapa urusan yang tergabung dalam bidang komisi ini Adalah :

A. Urusan Pendidikan :

Berikut beberapa rencana dan prioritas program pendidikan yaitu :

- 1) Program pendidikan anak usia dini (PAUD)
 - a. Peningkatan anggaran dan subsidi bagi sekolah serta dukungan terwujudnya Generasi Emas yang potensial melalui PAUD, TK, TPA, dll
 - b. Pengembangan pendidikan PAUD, TK, TPA
- 2) Program wajib belajar pendidikan dasar dengan Perluasan dan pemerataan pendidikan dasar.
- 3) Program pendidikan non formal dan informal
 - a. Peningkatan pendidikan informal dan non formal
 - b. Mengupayakan terwujudnya program Pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar, untuk manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Bulukumba
 - c. Peningkatan kewirausahaan bagi pemuda dalam rangka penguatan ekonomi kreatif di kalangan pemuda
 - d. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui Pelatihan sumber daya yang mendukung profesionalitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
- 4) Program peningkatan manajemen pelayanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan olah raga di sekolah negeri maupun swasta
 - b. Pemantapan dan peningkatan prestasi anak didik siswa dan mahasiswa, berdasar angka naik kelas dan prestasi Ujian Nasional (UN)
5. Program pengembangan unggulan mutu pendidikan
 - a. Penyelenggaraan even-even olahraga, lomba dan olimpiade pendidikan, baik prestasi maupun non prestasi



b. Pemberian penghargaan bagi pelajar dan atlet berprestasi

B. Urusan Kesehatan, Perempuan dan Anak

Beberapa program terkait kesehatan, perempuan dan anak, diantaranya :

- 1) Program pembinaan kesehatan ibu dan keluarga, Pemberdayaan perempuan untuk ketahanan keluarga dan Peningkatan Pengarus utamaan gender dalam semua aspek pembangunan
- 2) Program farmasi perbekalan kesehatan, ketersediaan obat esensial generik di fasilitas layanan kesehatan dasar.
- 3) Program pelatihan kesehatan dan peningkatan mutu diklat kesehatan melalui :
 - a) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan lembaga diklat kesehatan
 - b) Peningkatan pengawasan praktek tenaga kesehatan dan pengobatan alternatif.
- 4) Program pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
 - a) Standarisasi pelayanan dan peningkatan sarana prasarana serta kualitas pelayanan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan kelas III hingga puskesmas
 - b) Pembangunan Infrastruktur RSUD-RSUD dan Fasilitasi Alat kesehatan yang memadai, misal CT Scan, dll
- 5) Program pengembangan puskesmas.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan perlunya *pengembangan puskesmas rawat inap.*
- 6) Program pembinaan kesehatan anak dan remaja
 - a) Peningkatan gizi anak sekolah dengan pemberian/subsidi makanan dan minuman sehat dan bergizi (makanan+susu)
 - b) Pemeriksaan kesehatan dan pencegahan gangguan dan penyakit reproduksi, secara gratis
 - c) Peningkatan pemberian makanan tambahan/PMT di posyandu dan sekolah.
- 7) Program pencegahan dan pengendalian penyakit
- 8) Program pengembangan lingkungan sehat
 - a) Pengembangan lingkungan sehat melalui pembentukan kampung hijau dan sehat.
 - b) Pengembangan kampung ramah anak
- 9) Program pembinaan kesehatan bayi dan balita
- 10) Program peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD, Jamkesos

C. Urusan Budaya

Beberapa prioritas program budaya, yaitu :

Program pengembangan nilai budaya

- a. Pengembangan nilai-nilai budaya untuk ketahanan bangsa
- b. Program fasilitasi kreatifitas kegiatan dan melestarikan nilai nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat, melalui pembentukan pusat-pusat kebudayaan berbasis kampung/desa.
- c. Penggalan/pengayakan nilai-nilai luhur dan Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga tata nilai dan nilai budaya.



D. Urusan Agama

Terealisasinya landasan kehidupan beragama sebagai nafas kehidupan masyarakat diharapkan mampu menurunkan segenap persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Persoalan sosial yang dimaksud diantaranya adalah persoalan yang mencakup menurunnya pengamalan nilai-nilai ajaran agama sehingga menimbulkan beraneka perilaku masyarakat yang cenderung negatif dan persoalan kerukunan antar umat beragama yang saat ini perlu ditingkatkan lagi sehingga toleransi dan kedamaian dalam beragama dapat dirasakan di seluruh penjuru atau pelosok desa di daerah kabupaten Bulukumba.

Dalam kondisi yang mengedepankan sikap Budaya Sipaka Tau menekankan adanya sikap gotong royong dan saling bahu membahu di dalam mengisi pembangunan walaupun dalam keyakinan agama yang berbeda. Toleransi yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Kabupaten Bulukumba harus tetap lestari dan berkembang maju sehingga mampu menjadi salah satu ciri khas Bulukumba.

Adapun beberapa prioritas program urusan agama yaitu :

1. Fasilitasi peningkatan kualitas umat beragama
2. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa
3. Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
4. Peningkatan upaya-upaya pencegahan penyimpangan ajaran agama.
5. Peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dan kegiatan ibadah
6. Peningkatan Kerukunan antar umat beragama
7. Penguatan organisasi keagamaan dalam membangun keberagaman dan toleransi dalam kebhinekaan sebagai ciri khas Kabupaten Bulukumba.

Secara khusus DPRD sebagai refresentasi masyarakat lembaga kontrol dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah menyampaikan beberapa hal yang penting untuk menjadi atensi khusus pemerintah daerah sebagaimana yang banyak menjadi fokus perhatian masyarakat dewasa ini yakni

1. Perlunya pemerintah daerah untuk secara serius melakukan rekrutmen, seleksi dan penempatan pejabat atau mutas dalam konteks untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang lebih optimal sehingga kompetensi menjadi pertimbangan utama selain disiplin dan loyalitas, tentu dengan tetap mengacu kepada aturan dan ketentuan yang ada.
2. Perlunya memperhatikan hal-hal penting terutama pada proses rekrutmen pada lembaga-lembaga pelayanan publik yang tentu sangat bersentuhan dengan ranah masyarakat. Dalam konteks ini kami ingin mengambil contoh pelayanan rumah sakit yang masih banyak disorot berbagai kalangan, baik Ormas, OKP maupun lembaga Kontrol di bidang pelayanan publik.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kerangka ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2021 yang didalamnya juga memuat kerangka pendanaan tahun yang sama, merupakan gambaran tentang perkiraan keadaan ekonomi Kabupaten Bulukumba Tahun 2021, perkiraan tersebut didasari pada perekonomian global, nasional dan regional.

Dalam rangka memenuhi target kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021, gambaran tentang kondisi perekonomian tahun bersangkutan menjadi bagian penting untuk merumuskan kerangka pendanaan yang selanjutnya akan dituangkan pada KUA dan PPAS Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 sebagai pedoman penyusunan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021. Kerangka pendanaan tersebut menjadi basis dalam pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien.

Uraian tentang perkiraan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba beserta kerangka pendanaannya diharapkan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dalam upaya pencapaian target kinerja tahun Keempat dari RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021.

Kebijakan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba tahun 2021 diarahkan pada **“Pembangunan Sumber Daya Manusia dan pemantapan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas”**. Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 dimulai dengan penguatan daya tahan ekonomi dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi nasional seperti nilai tukar dolar terhadap rupiah, suku bunga, inflasi dan lapangan kerja. Penguatan ekonomi sektoral diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 dan juga diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berimplikasi pada pertumbuhan yang merata di setiap sektor pembangunan. Hal ini menjadi prioritas penguatan ekonomi sektoral berbasis kerakyatan agar secara merata dapat tercipta kondisi ekonomi yang berdaya saing tinggi serta mendorong kerjasama daerah dalam rangka mengembangkan serta mengoptimalkan semua potensi yang ada di daerah.

Untuk mencapai tujuan dari arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba tahun 2021 maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap semua program yang telah dan sedang dilaksanakan untuk kemudian dilakukan penajaman terhadap prioritas pembangunan daerah.
2. Mengupayakan melahirkan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan dengan tetap menyelaraskan dengan isu dan permasalahan yang muncul pada setiap bidang.
3. Dengan keterbatasan APBD maka fokus penganggaran pembangunan ekonomi akan lebih diarahkan pada upaya pemecahan masalah utamanya



permasalahan yang muncul pada masyarakat golongan menengah ke bawah, sedangkan pembangunan ekonomi yang sifatnya ekspansif di upayakan untuk dianggarkan secara kemitraan baik dengan pihak swasta maupun pemerintah provinsi dan pusat.

4. Terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta menumbuhkan iklim investasi dengan menjamin adanya kepastian hukum bagi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Bulukumba serta mendorong *high-cost economy*.
5. Menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019

3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Perkembangan PDRB menggambarkan secara jelas perkembangan perekonomian suatu daerah. Kondisi perekonomian suatu daerah/wilayah sangat tergantung pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta kemampuan daerah itu untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki.

3.1.1.1.1 Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Bulukumba mengalami kenaikan, dari 8.121,33 milyar rupiah pada tahun 2018 menjadi 8.567,46 milyar rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,49%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ini disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan pada beberapa sub sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha, terutama pada Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 3.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bulukumba
Berdasarkan Harga berlaku dan harga Konstant Tahun 2015-2019

TAHUN	HARGA BERLAKU		HARGA KONSTAN	
	Jumlah (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5
2015	9.568,40	14,29	6.774,32	5,62
2016	10.769,94	13,08	7.232,84	6,77
2017	12.068,74	12,52	7.730,91	6,89
2018	13.193,92	9,32	8.121,33	5,05
2019	14.214,59	7,74	8.567,46	5,49
RATA-RATA		11,38		5,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, 2020

3.1.1.1.2 PDRB Berdasarkan Struktur Lapangan Usaha

Selama lima tahun terakhir (2015–2019) struktur perekonomian Kabupaten Bulukumba didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; industri pengolahan; Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Hal ini



dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Bulukumba.

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, pertanian, kehutanan dan perikanan peranannya berangsur angsur menurun. Sedangkan dua lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan usaha lainnya masing-masing kurang dari lima persen. Salah satu penyebab menurunnya peranan pertanian, kehutanan dan perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Tabel 3.2
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bulukumba
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 - 2019

No	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,93	41,01	40,39	38,68	37,17
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,39	2,60	2,65	2,82	2,71
3.	Industri Pengolahan	6,91	6,80	6,66	6,50	6,85
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
6.	Konstruksi	8,80	9,30	9,79	10,19	10,18
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,59	15,76	15,89	16,41	17,19
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,30	2,35	2,27	2,33	2,39
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,58	0,63	0,68	0,74	0,76
10.	Informasi dan Komunikasi	2,85	2,83	2,99	3,09	3,23
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,23	3,39	3,31	3,35	3,53
12.	Real Estate	3,97	4,28	4,47	4,50	4,35
13.	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,77	6,17	5,89	6,08	6,39
15.	Jasa Pendidikan	2,77	2,89	3,01	3,12	3,01
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,09	1,14	1,18	1,24	1,31
17.	Jasa Lainnya	0,62	0,65	0,69	0,75	0,80
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bulukumba, 2019

3.1.1.1.3 PDRB Perkapita

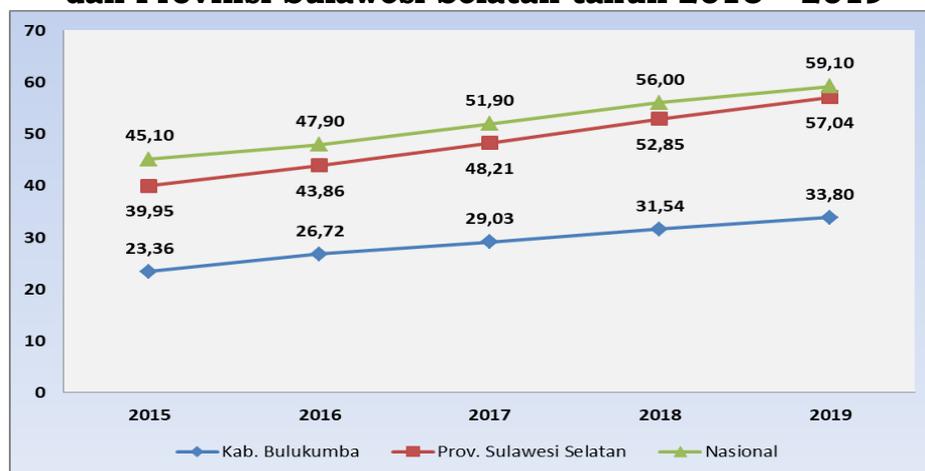
Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.



Nilai PDRB per kapita Bulukumba Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan, dan telah melampaui target dan capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 yakni 28,63 juta rupiah (2019). Namun capaian ini masih berada dibawah rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan 57,04 juta rupiah dan Nasional 59,10 juta rupiah.

Pada tahun 2015 PDRB perkapita tercatat sebesar 23,63 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 33,80 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Gambar 3.1
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 - 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bulukumba, 2019

Tabel 3.3
Perkembangan PDRB Perkapita (ADHK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019

No	Kabupaten / Kota	Pertumbuhan PDRB Perkapita (Juta Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kep. Selayar	20,92	22,22	23,66	25,48	27,16
2	Bulukumba	16,50	17,50	18,60	19,41	20,37
3	Bantaeng	22,21	23,70	25,29	27,19	29,96
4	Sinjai	22,74	24,19	25,79	27,53	29,04
Sulawesi Selatan		29,43	31,26	33,23	35,23	37,35
Nasional		35,16	36,47	37,85	39,34	40,84

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

Perkembangan PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Bulukumba pada tahun 2019 menduduki urutan 4 diantara 4 kabupaten di kawasan selatan, capaian PDRB Perkapita (ADHK) yang tertinggi adalah Kabupaten Bantaeng sebesar 29,96 juta rupiah, diurutan kedua adalah Kabupaten Sinjai sebesar 29,04 juta rupiah, selanjutnya Kabupaten Selayar menempati posisi ketiga sebesar 27,16 juta rupiah dan Kabupaten Bulukumba sebesar 20,37 juta rupiah.



3.1.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba pada tahun 2018 dan 2019 menduduki urutan 17 dari 24 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan. IPM Kabupaten Bulukumba berdasarkan kriteria *United Nations Development Programme* (UNDP) termasuk golongan sedang yaitu 67,70 pada tahun 2018 dan 68,28 pada tahun 2019 atau laju pertumbuhan sebesar 0,90 (urutan ketujuh tertinggi di Sulsel).

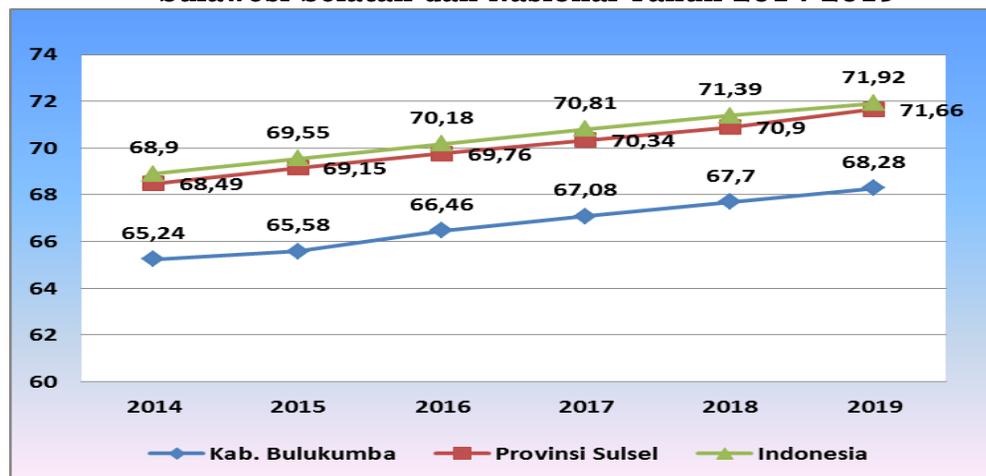
Khusus untuk di Kawasan Selatan, capaian IPM Kabupaten Bulukumba menempati posisi kedua setelah Kabupaten Bantaeng. Jika diperbandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah. Hal ini dapat kita lihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 3.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba, Kabupaten
Tetangga, Provinsi dan Nasional
Tahun 2014-2019

NO	URAIAN	TAHUN						Laju Pertumbuhan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bulukumba	65,24	65,58	66,46	67,08	67,70	68,28	66,72
2.	Sinjai	63,83	64,48	65,36	65,80	66,24	67,05	65,46
3.	Bantaeng	65,77	66,20	66,59	67,27	67,76	68,30	66,98
4.	Kep. Selayar	63,66	64,32	64,95	65,39	66,04	66,91	65,21
	Sulawesi Selatan	68,49	69,15	69,76	70,34	70,90	71,66	70,05
	Nasional	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	70,45

Sumber : Indikator Makro Sosial Ekonomi Sulsel Triwulan IV, 2019

Gambar 3.2
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Bulukumba, Provinsi
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014-2019

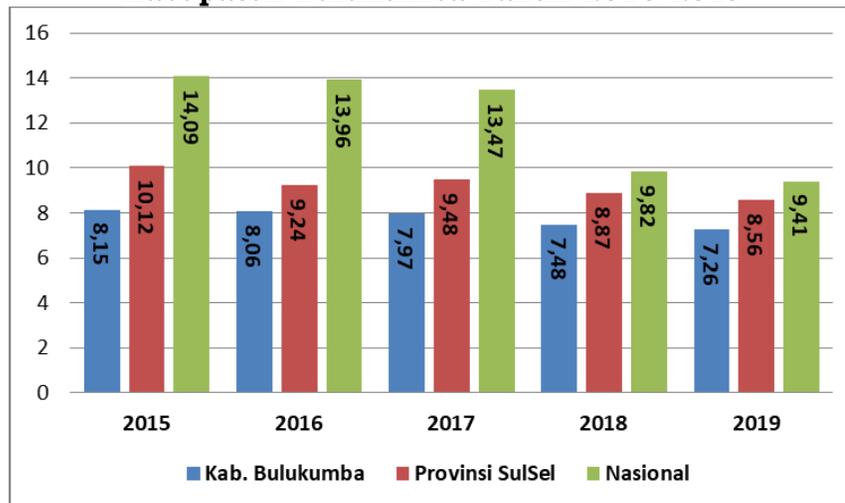


Sumber : Indikator Makro Sosial Ekonomi Sulsel Triwulan IV, 2019

3.1.1.3 Kemiskinan

Selama kurun waktu 2015-2019 terjadi penurunan secara konstan terkait dengan angka kemiskinan di Kabupaten Bulukumba. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Jika melihat data lima tahun terakhir, terjadi penurunan sebesar 0,89%.

Gambar 3.3
Persentase Kemiskinan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-2019



Sumber : Indikator Makro Sosial Ekonomi Sulsel Triwulan IV, 2019

Posisi relatif persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba tahun 2019 masih lebih rendah yaitu 7,26 persen jika dibandingkan dengan persentase tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 8,56 persen dan persentase tingkat kemiskinan Indonesia (Nasional) yaitu 9,41 persen.

Capaian Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 sebesar 0,60, nilai tersebut merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan capaian beberapa kabupaten di sekitarnya. Demikian juga halnya dengan Angka Penduduk Miskin, pada tahun 2019 Kabupaten Bulukumba menempati urutan terendah sebesar 7,26%.

Tabel 3.5
Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten/Kota,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bulukumba	1,22	1,72	1,10	1,06	0,60
2.	Sinjai	1,67	1,66	1,04	1,18	1,08
3.	Bantaeng	1,30	1,78	1,43	1,74	1,35
4.	Kep. Selayar	2,24	2,19	3,74	2,82	2,87
	Sulawesi Selatan	0,65	0,92	0,83	0,56	0,81
	Nasional	1,84	1,74	1,79	1,63	1,50

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2019

Tabel 3.6
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bulukumba	8,15	8,06	7,97	7,48	7,26
2.	Sinjai	9,26	9,41	9,24	9,28	9,14
3.	Bantaeng	9,53	9,51	9,66	9,23	9,03
4.	Kep. Selayar	12,94	13,11	13,28	13,13	12,83
	Sulawesi Selatan	9,39	9,4	9,38	9,06	8,69
	Nasional	11,13	10,7	10,12	13,1	12,6

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2019



3.1.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

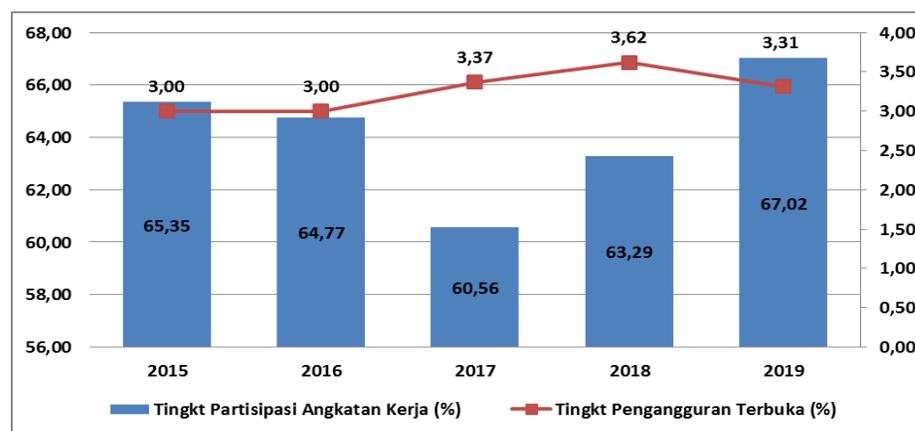
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bulukumba tahun 2015-2019 berfluktuasi, TPAK tahun 2018 yaitu 63,29% dan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 67,02%. TPAK sebesar 67,02% artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, sebanyak 67 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada periode tertentu.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba tahun 2015-2019 mengalami tren yang berfluktuasi, TPT tahun 2018 yaitu 3,62% dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 3,31%. TPT sebesar 3,31% artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) terdapat 3 orang yang merupakan pengangguran.

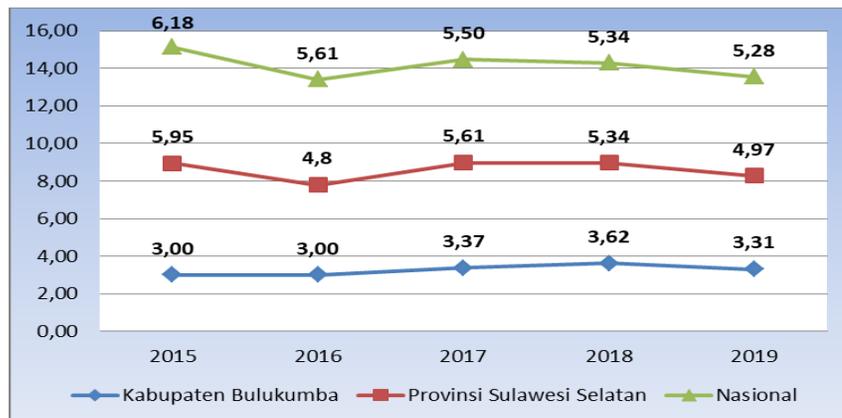
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional pada tahun yang sama.

Gambar 3.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Bulukumba Tahun 2015-2019 (Persen)



Sumber : BPS Bulukumba (Bulukumba Dalam Angka Tahun 2020)

Gambar 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2020

Tabel 3.7
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019

No	Kabupaten / Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kep. Selayar	0,90	0,90	2,34	1,88	1,17
2	Bulukumba	3,00	3,00	3,37	3,62	3,31
3	Bantaeng	4,07	4,07	3,31	2,81	2,12
4	Sinjai	1,55	1,55	4,53	2,14	2,28
Sulawesi Selatan		5,95	4,80	5,61	5,34	4,97
Nasional		6,18	5,61	5,50	5,34	5,27

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

3.1.2 Tantangan dan Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan 2021

Secara umum, kondisi ekonomi nasional diharapkan mampu mendorong kondisi ekonomi regional dan daerah dimana pada tahun 2020 perekonomian global diproyeksikan stagnan, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan yang patut menjadi pertimbangan yaitu:

1. Ketidakpastian Global

ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun.

2. Wabah *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

Corona jelas telah memukul telak ekonomi Indonesia, dimana terdapat kasus penderita Covid-19 yang meningkat tajam pada periode Maret dan April 2020. Hal ini tentunya mempengaruhi sektor ekonomi khususnya Indeks saham Bursa Efek Indonesia yang melemah 33 persen dibandingkan dengan awal 2020, terburuk sejak 2015. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok ke level 16.273, terendah sejak Juni 1998. Investor asing di pasar uang dan pasar modal terus menarik dananya dari pasar Indonesia. Situasi ini belum akan berhenti karena



wabah corona di Indonesia makin luas. Kasus dan korban corona juga terus bertambah.

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Stagnan

Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem perpajakan dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; dan (5) intermediasi sektor keuangan yang rendah dan pasar keuangan yang dangkal.

4. Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas dengan jasa transportasi asing, tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen pada tahun 2000 menjadi 21,0 persen pada tahun 2018. Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mencapai 3 persen PDB, sementara beberapa negara peers sudah mencatatkan surplus. Di tengah kondisi keuangan global yang ketat, peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

5. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui distance learning, pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui fin-tech, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Studi dari McKinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi-transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.

Berdasarkan data *World Economic Outlook* IMF pada Januari 2019, pertumbuhan ekonomi global untuk 2018 sekarang diperkirakan sebesar 3,7% atau 0,1 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 juga menunjukkan penurunan sebesar 0,2% menjadi 3,5%. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 0,1% dari proyeksi tahun 2019 menjadi 3,6%. Penurunan pertumbuhan global terjadi karena diperkirakan merupakan dampak negatif yang dihasilkan dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain tarif, isu yang



dianggap menjadi penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi global adalah sikap kebijakan dan keketatan perdagangan dunia. Prioritas kebijakan utama bagi negara-negara guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi global adalah menyelesaikan secara cepat dan kooperatif mengenai kesepakatan perdagangan serta mengatasi ketidakpastian kebijakan yang dihasilkan.

Pada proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi global akan meningkat 0,1% yang didasarkan pada kenaikan pertumbuhan ekonomi kawasan eropa dan beberapa negara berkembang. Negara berkembang pada tahun 2020 tingkat pertumbuhan ekonominya diproyeksikan naik sebesar 0,4% sedangkan pada negara-negara di kawasan eropa akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1%. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global pada tahun berikutnya, semua negara diwajibkan meningkatkan potensi pertumbuhan output dan memperkuat penyangga fiskal dan keuangan di lingkungan yang memiliki beban utang tinggi dan kondisi keuangan yang ketat.

Namun demikian, resiko perang dagang, normalisasi kebijakan moneter negara maju, perlambatan ekonomi China, resiko geopolitik, melambatnya harga komoditas serta rendahnya produktivitas global merupakan beberapa hal yang harus menjadi perhatian.

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,17 persen. Angka ini tertinggi dalam lima tahun terakhir di tengah perlambatan ekonomi dunia. Secara keseluruhan, faktor pendorong pertumbuhan nasional tahun 2018 berasal dari permintaan domestik, yaitu konsumsi dan investasi. Di sisi lain, net ekspor berkontraksi karena ekspor yang melambat ditengah impor yang tinggi.

Konsumsi swasta tumbuh meningkat sejalan dengan terjaganya daya beli dan pengeluaran LNPRT untuk kegiatan Pemilu sementara konsumsi Pemerintah tumbuh melambat. Sedangkan investasi melambat akibat banyaknya proyek infrastruktur yang berada dalam tahap akhir. Ekspor juga melambat sejalan dengan kondisi eksternal. Ekspor dan permintaan domestik yang tumbuh melambat menyebabkan impor melambat cukup dalam pada triwulan IV sehingga kontraksi net ekspor berkurang.

Berdasarkan asumsi ekonomi Makro yang tercantum dalam APBN 2019 yang disusun oleh Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 diperkirakan sebesar 5,5-6,2 persen. Selanjutnya untuk tingkat inflasi di tahun 2020 diperkirakan berada pada kisaran 2,0-4,0 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp.14.200 - 14.500 per dolar AS.

Untuk mencapai target tersebut di tahun 2021 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka ditetapkanlah 7 Prioritas Nasional (PN), 24 Program Prioritas (PP), dan 102 Kegiatan Prioritas (KP). 7 Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan Publik.

Dengan meningkatnya kasus Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia pada awal Maret 2020 sampai dengan pertengahan April, hal ini direspon Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa provinsi. Hal ini tentunya mempengaruhi sektor perekonomian di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan kondisi global tersebut dan sesuai tema RKP 2021 yaitu **“Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Sosial”**, dengan target ekonomi makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2021, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi 4,5–5,5 persen; (2). Inflasi daerah dikisaran 3,0 persen; (3). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,5-8,2 persen; (4). Angka Kemiskinan 9,2-9,7 persen, (5). Rasio Gini sebesar 0,377-0,379; dan (6). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,78-72,90.

Untuk penanganan dampak Covid-19 pada tahun 2021 Pemerintah Pusat melakukan penyesuaian target pembangunan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Kepala Bappenas) pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2020, arah pembangunan nasional pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sementara itu, Perekonomian Sulawesi Selatan triwulan IV 2019 tumbuh 6,48% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2019 yang tercatat 7,19% (yoy). Dari sisi lapangan usaha, melambatnya pertumbuhan disebabkan oleh kinerja usaha pertanian yang mengalami kontraksi. Demikian pula lapangan usaha perdagangan, industri pengolahan dan konstruksi di tengah peningkatan kinerja lapangan usaha pertambangan. Di sisi pengeluaran, melambatnya pertumbuhan disebabkan oleh menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga sejalan kontraksi lahan usaha pertanian. Adapun konsumsi pemerintah dan LNPRT mengalami akselerasi di triwulan terakhir 2019 sebagai dampak dari upaya memaksimalkan penyerapan anggaran. Akselerasi juga terjadi pada kinerja investasi yang pada triwulan sebelumnya diduga masih wait and see terkait hasil pileg dan pilpres. Sementara itu, net ekspor memburuk meskipun kinerja ekspor mengalami perbaikan mengingat tingginya kenaikan impor terutama bahan baku dan barang modal sejalan dengan akselerasinya investasi.

Untuk keseluruhan tahun 2019, ekonomi Sulsel masih bedaya tahan meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi mencapai 6,92%. Adapun faktor yang menahan penurunan lebih rendah lagi antara lain dukungan fiskal dan LNPRT serta industri pengolahan dan konstruksi yang mengalami akselerasi, selain itu kinerja investasi juga tercatat relatif stabil.

Realisasi belanja fiskal di Sulawesi Selatan tahun 2019 secara



presentase lebih rendah dari tahun sebelumnya. Serapan tahun laporan mencapai 90,0%, sementara tahun 2018 sebesar 94,5%. Realisasi belanja sebesar Rp 61 triliun tersebut sekitar setengahnya dari total alokasi anggaran berasal dari APBD Kabupaten/kota, sekitar sepertiga merupakan APBN, dan sisanya berasal dari APBD Provinsi.

Realisasi belanja APBD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mencapai 96,2% dari pagu anggaran sebesar Rp9,93 triliun, secara nominal lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Penyerapan anggaran didominasi belanja operasional dengan pangsa 71,30%. Sementara itu, realisasi belanja APBN mengalami peningkatan baik nominal maupun presentase. Realisasi belanja APBN mencapai 91,85% dari pagu anggaran, lebih tinggi dibandingkan sebesar 90,67% dari pagu anggaran terutama terkait belanja pegawai dan belanja barang serta bantuan sosial.

Laju inflasi Sulsel pada triwulan IV tahun 2019 tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan III 2019. Inflasi selama triwulan IV 2019 tercatat sebesar 2,35% (yoy), lebih rendah dari sasaran inflasi 3,5±1%. Kondisi tersebut terutama kontraksi inflasi administered prices sejalan koreksi harga tarif angkutan udara, sementara inflasi volatile food masih berada di atas 4%.

Pada triwulan I 2020, tekanan inflasi diperkirakan akan sedikit meningkat namun masih dalam kisaran sasaran. Tekanan inflasi pada akhir triwulan 1 2020 diperkirakan berasal dari tekanan inflasi inti menjelang bulan Ramadhan yang secara historis meningkatkan permintaan bahan makanan. Untuk itu, TPID Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat koordinasi secara intensif dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan dan mengefektifkan jalur distribusi yang efisien utamanya untuk kabupaten/kota penyangga pangan termasuk hortikultura dan peternakan.

Ke depan, untuk mendorong Sulsel sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan kawasan, beberapa kebijakan atau rekomendasi yang dapat dilakukan: (1) Strategi diversifikasi ekspor yang mengarah pada negara non mitra dagang utama. Hal ini diperlukan untuk memitigasi risiko perbaikan ekonomi global yang tidak seperti perkiraan semula. Strategi tersebut dapat diarahkan pada ekspor ke negara yang selama ini bukan pangsa utama Sulsel seperti Timur Tengah dan Amerika Latin. Peluang ekspor ke Timur Tengah dapat dioptimalkan melalui strategi mitra dagang “halal food.” Indonesia yang merupakan mayoritas muslim memiliki pengetahuan mumpuni mengenai manajemen produk halal yang dapat dijadikan kekuatan dari branding produk ekspor Indonesia; (2) Konsistensi reformasi struktural melalui penguatan industri agribisnis. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel menjadi lebih bernilai tambah serta terus menekan angka kemiskinan maka pemerintah perlu mengubah struktur ekonomi dari agrikultur (berbasis pertanian) menjadi industri. Untuk tetap mempertahankan potensi ekonomi yang berbasis agraris, pemerintah dapat fokus mengembangkan industri berbasis agrikultur atau disebut agribisnis. Peningkatan nilai tambah hedaknya diarahkan pada komoditas unggulan Sulsel seperti kakao, beras, kopi, hingga ikan dan udang; (3) Memperluas program peremajaan tanaman dan pemenuhan bibit berkualitas, penguatan kelembagaan komoditas spesifik, dan monitoring pemenuhan standar kualitas komoditas; (4) Mempersiapkan



sekolah vokasi dan teknis kejuruan yang sesuai dengan sektor yang menjadi potensi daerah; (5) Penguatan kelembagaan petani dan peternak sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Problematika kelembagaan petani merupakan masalah pokok yang harus dimitigasi melalui pembentukan badan usaha seperti koperasi. Dengan kelembagaan petani, maka isu permodalan dan daya saing akan teratasi; (6) Memantau secara berkala risiko terhadap pelaku korporasi dan rumah tangga, yang didukung dengan hasil survei (SK, SKDU) dan liaison; (7) Meningkatkan pembinaan UMKM dan penyediaan database/informasi UMKM di daerah yang telah bankable, agar dapat ditindaklanjuti oleh perbankan.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi untuk tetap tinggi, mitigasi inflasi Sulsel dapat dilakukan melalui beberapa hal: (1) TPID di masing-masing zona di Sulsel perlu menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi di tiap zona dengan mengacu kepada Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulsel. Roadmap di tiap zona ini sangat penting agar program pengendalian inflasi di tiap zona lebih terpadu dengan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi; (2) Penguatan kerjasama antar daerah perlu semakin ditingkatkan yang didasarkan pada data Sistem Informasi Harga Pangan (SIGAP) di kabupaten/kota. Ke depan, data di SIGAP diharapkan dapat memberikan informasi tentang data surplus-defisit komoditas antar daerah; (3) Penggunaan bibit unggul yang tahan cuaca buruk, pengaturan pola tanam serta manajemen persediaan (termasuk penggunaan cold storage).

Dengan melihat kondisi perekonomian global dan nasional tersebut dan sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021, maka RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 mengusung tema “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial yang di Dukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM**”, dengan target ekonomi makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2021, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi 6,1 persen; (2). Inflasi daerah dikisaran 3,0 persen; (3). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,2 persen; (4). Angka Kemiskinan 9,1 persen, (5). Rasio Gini sebesar 0.414; dan (6). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72.22 (7). Pendapatan Perkapita Rp. 67.760.000,-

Untuk mencapai target tersebut di tahun 2021 maka ditetapkanlah 6 Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan
4. Percepatan pemulihan ekonomi dan transformasi perlindungan sosial
5. Pengelolaan sumberdaya alam berbasis kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana serta perubahan iklim
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelolah serta pelayanan publik

Sementara itu, perekonomian Kabupaten Bulukumba pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2018. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bulukumba tahun 2019 mencapai 5,49 persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 5,05 persen. Diproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 (*Tren Analisis*) akan mengalami penurunan menjadi 5,32 persen akibat pandemi *Covid-19*.



Dimana perekonomian Kabupaten Bulukumba tetap bertumpu pada Sektor Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Sejalan dengan itu, aktivitas ekonomi masih bertumpu pada zona Makassar dengan porsi hingga 78 persen dari pembentukan inflasi Sulawesi Selatan. Adapun zona lainnya adalah Parepare (7 persen), Palopo (6,4 persen), Watangpone (5,8 persen), sedangkan Zona Bulukumba dengan 2,8 persen. Inflasi lebih banyak dipicu oleh *volatile food* merespon tarikan permintaan bahan makanan yang lebih tinggi dari ketersediaan pasokan yang ada. Inflasi pada kelompok *volatile food* didorong oleh komoditas yang rentan terhadap perubahan cuaca.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba tahun 2019 sebanyak 30.490 jiwa (7,26 persen), dan jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan penduduk miskin tahun 2018 yaitu 31.250 jiwa (7,48 persen), atau mengalami penurunan sebesar 0,49 persen. Diproyeksi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba tahun 2020 (*Tren Analisis*) akan mengalami penurunan menjadi 7,21 persen.

Posisi relatif persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba tahun 2019 masih lebih rendah yaitu 7,26 persen jika dibandingkan dengan persentase tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 8,69 persen dan persentase tingkat kemiskinan Indonesia (Nasional) yaitu 9,41 persen.

Selanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba tahun 2019 yaitu 3,31 persen, jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan TPT tahun 2018 yaitu 3,62 persen. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Bulukumba diproyeksi mengalami kondisi yang stagnan, bahkan terjadi peningkatan pada angka 3,62-4,00 (*tren analisis*), dengan catatan eskalasi Pandemi Covid-19 semakin meluas/meningkat yang mempengaruhi sektor usaha khususnya Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) yang selama ini menjadi penopang perekonomian masyarakat di Kabupaten Bulukumba.

Dengan melihat kondisi perekonomian global, nasional, dan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dan sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, maka RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 mengusung tema “**Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemantapan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas**”, dengan target ekonomi makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2021, antara lain: (1). Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen; (2). Inflasi berkisar antara 2,5-4,5 persen; (3). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,50-5,00 persen; (4). Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00-7,17 persen (5). Gini Ratio sebesar 0,32- 0,35, dan (6). Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,86-69,44 persen.

Untuk mencapai target tersebut di tahun 2021, maka ditetapkanlah 7 Prioritas Pembangunan di Kabupaten Bulukumba. 7 Prioritas Pembangunan tersebut, yaitu:

1. Peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan, pemuda dan olahraga untuk SDM yang berkualitas
2. Penguatan kewirausahaan disertai dengan pemantapan nilai dan semangat kegotongroyongan
3. Pengembangan sektor unggulan daerah untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat



4. Pemantapan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi
5. Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur dasar pemukiman
6. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.
7. Penguatan penanganan dampak sosial dan kesiap-siagaan bencana.

Selain dari pada itu untuk mendorong peningkatan daya saing daerah yang merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 di tegaskan bahwa setiap daerah harus mengembangkan inovasi daerah melalui potensi lokal dan melakukan koordinasi dan pelaporan hingga ke pemerintah pusat.

Seiring dengan dinamika pembangunan di Kabupaten Bulukumba, terdapat beberapa inovasi yang telah dilaksanakan di tahun 2019 dan rencana akan dilakukan di tahun 2021. Inovasi yang telah dilaksanakan di tahun 2020 yaitu:

1. Pembentukan Tim Verifikasi Perencanaan Kabupaten Bulukumba sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap program kegiatan yang akan memastikan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah.
2. Mempermudah pelayanan administrasi kependudukan melalui mobil online KTP, yaitu mobil layanan yang didesain nyaman untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan dan perekaman administrasi kependudukan.

Inovasi perencanaan dan pembangunan yang rencanakan akan dilakukan di tahun 2021, yaitu:

1. Mendorong pengembangan Pariwisata Desa karena masih banyak obyek wisata yang belum bisa dioptimalkan potensinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba sehingga didorong untuk pengembangan potensi wisata setiap desa melalui Bumdesa sehingga pembangunan pariwisata di daerah bisa berkembang lebih cepat.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan Kabupaten Bulukumba tahun 2021 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021, yang mana tahun rencana merupakan tahun ke 5 (lima) dari RPJMD. Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2021 yang dituangkan dalam dokumen RKPD ini, juga merupakan bentuk konsistensi dari fungsi perencanaan dan penganggaran dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2021 merupakan kerangka awal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba tahun bersangkutan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Konsistensi perencanaan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah yang didasarkan pada proyeksi kondisi ekonomi serta tantangannya, maka kebijakan Keuangan Kabupaten Bulukumba tahun 2021 di arahkan pada “peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan”, dan berdasarkan arah kebijakan keuangan tersebut maka fokus penganggaran tahun bersangkutan lebih diarahkan pada program dan kegiatan yang secara langsung berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang menunjang peningkatan



ekonomi masyarakat khususnya sektor unggulan, serta pembangunan sarana prasarana lainnya dengan tidak mengabaikan sub sektor lainnya.

3.2.1 Realisasi dan Proyeksi Keuangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 dan Kerangka Pendanaannya.

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan fiskal daerah dapat diukur melalui penerimaan pendapatan daerah, meliputi (1).pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2).Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak; (3).Lain-lain pendapatan yang sah.

Kemampuan fiskal Kabupaten Bulukumba tahun 2020 diharapkan mampu mendukung kebijakan penganggaran yang di fokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan yang di aplikasikan melalui prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang telah ditetapkan Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Bulukumba tahun 2021.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan konstruksi awal kemampuan fiskal daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang didalamnya memuat kebijakan penganggaran serta kerangka pendanaannya. Untuk mengukur dan menjaga konsistensi proses perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan maka arah kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan melalui dokumen RKPD harus saling berkaitan sebagai satu rangkaian proses perencanaan tahunan yang merupakan dasar dari penyusunan APBD.

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak dapat mengacu pada Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil pendapatan Realisasi pendapatan di tahun 2020 pendapatan sebesar Rp.1.546.625.357.324,00 dan di tahun 2021 proyeksi pendapatan menurun menjadi Rp.1.541.925.357.324,00 atau diproyeksi pendapatan mengalami penurunan sebesar 0,30 persen. Proyeksi penurunan pendapatan berdasarkan RPJMD tersebut sangat tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan di tahun 2020 sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba harus melakukan perhitungan proyeksi pendapatan daerah secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan Penerimaan PAD tahun sebelumnya sesuai dengan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba yang akan dimasukkan dalam KUA/PPAS yang akan menjadi pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021.

Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut, maka kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba diarahkan pada “penguatan kapasitas kelembagaan pengelola potensi serta penguatan regulasi dan strategi pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam kerangka optimalisasi



sumber-sumber pendapatan”. Secara umum Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 difokuskan pada:

1. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
2. Meneliti dan mengkaji potensi, eksplorasi potensi serta penerapan manajemen pengelolaan pendapatan yang efektif.
3. Melakukan perbaikan mekanisme pemungutan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
4. Perbaikan kinerja dan efisiensi manajemen pada badan usaha milik daerah.
5. Peningkatan koordinasi dalam rangka perolehan dan pengelolaan pendapatan daerah.
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber-sumber pendapatan daerah
7. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.
8. Pemberian *punishment* dan *reward* bagi aparatur pengelola pendapatan daerah.
9. Kebijakan pendapatan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018.



Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2022

NO. URUT	URAIAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020	TARGET/PROYEKSI TAHUN 2021	TARGET/PROYEKSI TAHUN 2022
4	PENDAPATAN	1.546.625.357.324,00	1.541.925.357.324,00	1.588.235.767.874,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	192.999.078.805,00	188.299.078.805,00	197.413.578.805,00
4 . 1 . 01	Pendapatan Pajak Daerah	47.104.741.349,00	47.604.741.349,00	49.459.741.349,00
4 . 1 . 02	Pendapatan Retribusi Daerah	17.544.337.456,00	17.544.337.456,00	18.421.337.456,00
4 . 1 . 03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
4 . 1 . 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122.350.000.000,00	117.150.000.000,00	123.532.500.000,00
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.291.170.434.119,00	1.291.170.434.119,00	1.328.366.344.669,00
4 . 2 . 01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.078.880.219.000,00	1.078.880.219.000,00	1.116.076.129.550,00
4 . 2 . 01 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak	13.763.410.000,00	13.763.410.000,00	13.763.410.000,00
4 . 2 . 01 . 02	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	3.875.074.000,00	3.875.074.000,00	3.875.074.000,00
4 . 2 . 01 . 03	Dana Alokasi Umum	743.918.211.000,00	743.918.211.000,00	781.114.121.550,00
4 . 2 . 01 . 04	Dana Alokasi Khusus	317.323.524.000,00	317.323.524.000,00	317.323.524.000,00
4 . 2 . 02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	149.208.609.000,00	149.208.609.000,00	149.208.609.000,00
4 . 2 . 02 . 01	Dana Penyesuaian	149.208.609.000,00	149.208.609.000,00	149.208.609.000,00
4 . 2 . 03	Transfer Pemerintah Provinsi	63.081.606.119,00	63.081.606.119,00	63.081.606.119,00
4 . 2 . 03 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	63.081.606.119,00	63.081.606.119,00	63.081.606.119,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	62.455.844.400,00	62.455.844.400,00	62.455.844.400,00
4 . 3 . 01	Pendapatan Hibah	53.424.600.000,00	53.424.600.000,00	53.424.600.000,00
1 . 3 . 03	Pendapatan Lainnya	9.031.244.400,00	9.031.244.400,00	9.031.244.400,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2020.



3.2.3 Arah Kebijakan Belanja

Belanja daerah merupakan bentuk kuantitatif dari semua bentuk pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan fungsi otonomi daerah, belanja daerah tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Penganggaran belanja daerah harus terstruktur dan mengarah pada pencapaian target dari tiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan secara berjenjang. Berdasarkan kelompok belanja, maka belanja daerah diurai menjadi 4 (empat) kelompok belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer berdasarkan tujuan pembelanjannya.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.2.3.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.3.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

- a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;



- b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- e. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

3.2.3.3 Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

3.2.3.4 Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2021, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2020 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya



dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar Daerah provinsi;
- b. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
- c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota diluar wilayahnya;
- d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Berdasarkan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bulukumba yang di fokuskan pada pembangunan dan penguatan ekonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bulukumba tahun 2005-2025 periode ke 4 (Empat) maka kebijakan belanja daerah Kabupaten Bulukumba secara makro diarahkan pada “pembelanjaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan penerapan prinsip-prinsip pembelanjaan yang transparan dan akuntabel serta efisien, efektif dan proporsional”. Kebijakan belanja tersebut merupakan bagian dari strategi penganggaran pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2021, arah kebijakan makro belanja tersebut adalah bentuk upaya pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menjamin keberlangsungan proses pembangunan di Kabupaten Bulukumba. Arah kebijakan belanja tersebut juga merupakan bentuk sinergitas perencanaan kegiatan satu tahunan pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun tersebut.



Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

NO. URUT	URAIAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020	TARGET/PROYEKSI TAHUN 2021	TARGET/PROYEKSI TAHUN 2022
5	BELANJA	1.542.621.762.324,00	1.549.009.562.324,00	1.588.235.767.874,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	1.042.477.194.746,00	1.023.247.837.746,00	1.034.158.645.246,00
5 . 1 . 01	Belanja Pegawai	640.447.689.944,00	660.447.689.944,00	660.447.689.944,00
5 . 1 . 02	Belanja Barang	344.583.997.802,00	344.583.997.802,00	354.583.997.802,00
5 . 1 . 03	Belanja Bunga	393.200.000,00	0,00	0,00
5 . 1 . 04	Belanja Hibah	56.052.307.000,00	16.716.150.000,00	17.551.957.500,00
5 . 1 . 05	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.575.000.000,00
5 . 2	BELANJA MODAL	300.077.121.165,00	325.348.730.094,00	359.925.134.024,00
5 . 2 . 01	Belanja Tanah	2.215.951.000,00	7.215.951.000,00	5.000.000.000,00
5 . 2 . 02	Belanja Peralatan dan Mesin	52.539.186.689,00	52.539.186.689,00	52.539.186.689,00
5 . 2 . 03	Belanja Bangunan dan Gedung	90.457.924.914,00	90.457.924.914,00	90.457.924.914,00
5 . 2 . 04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	148.523.438.917,00	168.795.047.846,00	205.587.402.776,00
5 . 2 . 05	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.340.619.645,00	6.340.619.645,00	6.340.619.645,00
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	7.584.205.000,00	7.584.205.000,00	1.000.000.000,00
5 . 3 . 01	Belanja Tak Terduga	7.584.205.000,00	7.584.205.000,00	1.000.000.000,00
5 . 4	BELANJA TRANSFER	192.483.241.413,00	192.828.789.484,00	193.151.988.604,00
5 . 4 . 01	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA			
5 . 4 . 01 . 01	Bagi Hasil Pajak	4.525.281.637,00	4.710.474.135,00	4.945.974.000,00
5 . 4 . 01 . 02	Bagi Hasil Retribusi	1.594.078.172,00	1.754.433.745,00	1.842.133.000,00
5 . 4 . 02	Belanja Bantuan Keuangan	186.363.881.604,00	186.363.881.604,00	186.363.881.604,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.003.595.000,00	(7.084.205.000,00)	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2020



3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah pengeluaran pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah penerimaan daerah sehingga terjadi defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah.

Pada tahun 2021 kebijakan pembiayaan makro Kabupaten Bulukumba diarahkan pada “efisiensi dan efektifitas pembiayaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”. Melihat keterbatasan APBD Kabupaten Bulukumba, maka untuk mensiasati kondisi tersebut maka penganggaran pembangunan yang bersifat ekspansif akan diupayakan dianggarkan secara kemitraan baik dengan melibatkan kerja sama pihak swasta, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah Pusat.

Selain itu, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 diberbagai aspek kehidupan, baik di aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Kebijakan new normal menuntut untuk dilakukan pembatasan kontak fisik namun unsur pemerintah daerah dituntut untuk tetap produktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat umum.

Kebijakan tersebut tercermin pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba untuk Tahun Anggaran 2021, yang tujuannya bermuara pada penanganan dampak pandemi Covid-19 pada aspek pemerintahan, sosial ekonomi, dan kesehatan.



Tabel 3.10
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2020-2022

NO. URUT	URAIAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020	TARGET/PROYEKSI TAHUN 2021	TARGET/PROYEKSI TAHUN 2022
6	PEMBIAYAAN			
6 . 1	PENERIMAAN DAERAH	7.084.205.000,00	85.159.706.000	0,00
6 . 1 . 01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	7.084.205.000,00	7.084.205.000,00	
6 . 1 . 04	Penerimaan Pinjaman Daerah		78.075.501.000,00	
6 . 2	PENGELUARAN DAERAH	11.087.800.000,00	78.075.501.000,00	0,00
6 . 2 . 01	Pembayaran Pokok Utang	11.087.800.000,00	0,00	
6 . 2 . 05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		78.075.501.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(4.003.595.000,00)	7.084.205.000,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, 2020



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan kondisi pemerintahan di Kabupaten Bulukumba tahun 2021, dimana pada tahun ini merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Bulukumba, maka secara prosedural prioritas dan sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2021 merujuk pada visi misi Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, dengan visi **“Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Dilandasi pada Pemerintahan yang Demokratis dan Religius”**, dan untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkanlah misi pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan;
2. Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah;
3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia;
6. Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah;
7. Penataan ruang dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana;
8. Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat;

Rumusan strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Visi:

Masyarakat Bulukumba yang Sejahtera dan Terdepan melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Dilandasi pada Pemerintahan yang Demokratis dan Religius

Tabel 4.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bulukumba

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
<i>Misi 1 Menuntaskan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan</i>				
1 Mewujudkan pembangunan, penguatan, dan pemerataan infrastruktur dasar masyarakat	1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik daerah yang berkeadilan.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	100



Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
yang berdayaguna.				
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	100
		Persentase luas jaringan irigasi yang terpelihara dan direhabilitasi	%	100
	2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase kawasan kumuh	%	0,06
2 Mewujudkan penyelenggaraan kesehatan masyarakat yang berkualitas	3 Meningkatnya kualitas, kuantitas, dan cakupan infrastruktur kesehatan masyarakat.	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	%	95
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	97
		Persentase cakupan pelayanan anak balita	%	90
	4 Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat dasar dan rujukan.	Persentase kepuasan pelanggan rawat jalan dan rawat inap	%	95
3 Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas	5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta cakupan infrastruktur pendidikan masyarakat.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		
		a. ruang kelas	%	23,67
		b. perpustakaan	%	45
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik		
		a. ruang kelas	%	200
		b. perpustakaan	Unit	23
		c. laboratorium	Unit	25
		Sekolah pendidikan SMA kondisi bangunan baik		



Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
		a. ruang kelas	%	75,67
		b. perpustakaan	%	79
		c. laboratorium	%	76
	6 Meningkatkan mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
		a. SD sederajat	%	100
		b. SMP sederajat	%	100
		c. SMA sederajat	%	100
		Angka Partisipasi Murni (APM)		
		a. SD sederajat	%	100
		b. SMP sederajat	%	100
		c. SMA sederajat	%	100
	7 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan.	Persentase pendidik yang tersertifikasi pada satuan pendidikan.		
		a. SD sederajat	%	65
		b. SMP sederajat	%	70,55
		c. SMA	%	95
		d. SMK	%	60
	8 Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat	Angka melek huruf	%	93
Misi 2. Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah				
4 Mewujudkan penataan dan pengelolaan potensi daerah	9 Meningkatkan produktivitas komoditi pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan masyarakat dalam mendorong ketahanan pangan daerah.	Pertumbuhan PDRB	%	8,5
		PDRB perkapita	Rp	32.904.996,77
		Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan terhadap PDRB	%	36.706
		Pertumbuhan populasi ternak		
		a. Sapi potong	Ekor	92.110
		b. Kerbau	Ekor	1.727
		c. Kuda	Ekor	30.146
		d. Kambing	Ekor	44.928
		e. Ayam Buras	Ekor	1.255.623
		f. Ayam ras pedaging	Ekor	3.613.984



Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
		g. Ayam ras petelur	Ekor	456.924
		h. Itik	Ekor	37.042
		Jumlah produksi perikanan	Ton	205.502
	10 Berkembangnya potensi dan daya tarik wisata.	Jumlah kunjungan wisatawan	Org	400.000
<i>Misi 3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah</i>				
5 Peningkatan pendapatan masyarakat	11 Menurunnya angka kemiskinan masyarakat.	Jumlah penduduk miskin	Jiwa	17.316
	12 Menurunnya tingkat pengangguran daerah.	Angka partisipasi angkatan kerja	%	97
		Angka pengangguran terbuka	%	0,64
6 Peningkatan daya saing dan mendorong pengembangan ekonomi kreatif	13 Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat.	Persentase koperasi berprestasi	%	3,11
	14 Meningkatnya daya saing dan produktivitas UMKM.	Jumlah UMKM aktif non BPR/LKM	Unit	11.200
7 Meningkatkan iklim dan minat investasi	15 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang profesional.	Jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Buah	6.671
		Jumlah produk hukum daerah terkait perizinan	Buah	11
		Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Apl.	1
	16 Meningkatkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN	Jumlah nilai investasi:		
		a. PMDN	Rp.	160 milyar
		b. PMA	\$	6,4 juta
<i>Misi 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif</i>				
8 Menciptakan sumberdaya manusia yang berjiwa entrepreneur	17 Meningkatnya daya saing dan pengembangan kewirausahaan.	Jumlah usahawan yang dibina	Org	544
9 Meningkatkan kreativitas pemuda dan prestasi olahraga	18 Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah organisasi pemuda	Unit	47



Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
		Jumlah prestasi karya ilmiah remaja	Kali	21
		Jumlah organisasi olahraga	Unit	36
		Jumlah prestasi olahraga yang dicapai	Kali	71
<i>Misi 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia</i>				
10 Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih	19 Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa.	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang menyelesaikan jenjang pendidikan formal S1, S2, dan S3.	Org	31
		Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Org	563
		Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Org	1.020
	20 Meningkatnya efektivitas kelembagaan pemerintah	Jumlah produk hukum yang terkait dengan kelembagaan	Buah	3
	21 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	%	100
		Kategori penilaian SAKIP dari Kementerian PAN dan RB		CC
	22 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini	WTP
		Persentase pertumbuhan jumlah pendapatan daerah	%	10,48
	23 Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.	Cakupan penerbitan kartu keluarga (KK)	%	95
		Cakupan	%	100



Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
		penerbitan KTP-el		
		Jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk		220
		Cakupan penerbitan akta kematian.	%	0,9
11 Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	24 Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum, dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum.	Persentase tindak lanjut temuan	%	100
		Penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah	Kasus	5
	25 Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan kesejahteraan sosial.	Persentase cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif.	%	18,5
		Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan terpadu.	Kasus	150
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	8,24
<i>Misi 6. Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antar daerah</i>				
12 Meningkatkan jejaring kerjasama antardaerah dan dengan stakeholder dalam pembangunan daerah	26 Meningkatnya kerjasama antar daerah, masyarakat, dan dunia usaha.	Jumlah kerjasama antar daerah	Buah	7



Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
<i>Misi 7. Penataan ruang dan Pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana</i>				
13 Mewujudkan penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup, budaya, dan penanggulangan bencana	27 Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang secara optimal.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	30
	28 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah.	Persentase Penanganan Sampah	%	100
	29 Meningkatnya infrastruktur dan kesiapsiagaan bencana.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100
	30 Memajukan seni dan budaya serta memelihara dan melindungi situs sejarah maupun benda-benda kepurbakalaan.	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Buah	25
<i>Misi 8. Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, Suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat</i>				
14 Menciptakan iklim demokrasi dan politik yang kondusif	31 Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	25
15 Mewujudkan ketertiban dan ketenteraman serta suasana religius dalam kehidupan bermasyarakat	32 Terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.	Jumlah peraturan daerah/ peraturan bupati yang diawasi dan dipantau	Buah	16
	33 Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama	Jumlah pemuka agama/ lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/fasilitas.	Org	484

4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 maka Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bulukumba diarahkan pada:

1. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi;
2. Optimalisasi potensi unggulan daerah;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
4. Pengembangan bidang pendidikan;



5. Pembangunan bidang kesehatan;
6. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan;
7. Pemantapan insfrastruktur daerah.

4.2.1 Sinergitas Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba

Sinergitas proses perencanaan pembangunan merupakan suatu keharusan dalam proses pembangunan, perumusan proses perencanaan harus dilakukan secara berjenjang demi mewujudkan konsistensi arah dan tujuan pembangunan sehingga terwujud pembangunan yang padu dan berkelanjutan.

Dalam merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bulukumba tetap memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi agar pembangunan tahunan Kabupaten Bulukumba dapat menunjang pembangunan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan pusat. Untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, Pemerintah mengusung tema pembangunan **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, dengan 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan pada tahun 2021, yaitu:

Tabel 4.2

Prioritas Nasional dan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

7 Prioritas Nasional Tahun 2021	Prioritas Kabupaten Tahun 2021
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan, pemuda dan olahraga untuk SDM yang berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2. Penguatan kewirausahaan disertai dengan pemantapan nilai dan semangat kegotongroyongan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3. Pengembangan sektor unggulan daerah untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Pemantapan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Kab. Bulukumba
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur dasar pemukiman.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan Publik.	7. Penguatan penanganan dampak sosial dan kesiap-siagaan bencana.



4.2.2 Sinergitas Perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Kabupaten Bulukumba

Prioritas Pemerintah pusat tersebut kemudian menjadi cerminan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi dalam merencanakan pembangunan daerah tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2028. Untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusung tema pembangunan **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial yang di Dukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM”**, dengan 6 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2021, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan
4. Percepatan pemulihan ekonomi dan transformasi perlindungan sosial
5. Pengelolaan sumberdaya alam berbasis kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana serta perubahan iklim
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelolah serta pelayanan publik

Tabel 4.3

Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bulukumba
Tahun 2021

Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	Prioritas Kabupaten Kabupaten Tahun 2021
1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing	1. Peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan, pemuda dan olahraga untuk SDM yang berkualitas
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2. Penguatan kewirausahaan disertai dengan pemantapan nilai dan semangat kegotongroyongan
3. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	3. Pengembangan sektor unggulan daerah untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat
4. Percepatan pemulihan ekonomi dan transformasi perlindungan sosial	4. Pemantapan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Kab. Bulukumba
5. Pengelolaan sumberdaya alam berbasis kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana serta perubahan iklim	5. Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur dasar pemukiman.
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelolah serta pelayanan publik	6. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.
	7. Penguatan penanganan dampak sosial dan kesiap-siagaan bencana.



Prioritas tahun 2021 banyak dipengaruhi dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Kabupaten Bulukumba juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu guna menyongsong era baru pasca pandemi Covid-19.

Melihat tema dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, maka untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021, mengusung tema pembangunan **“Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pemantapan Infrastruktur untuk mendorong Pertumbuhan yang Berkualitas”**, dengan 7 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2021.

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan pemantapan pembangunan infrastruktur diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang usaha dan mengelola potensi unggulan demi menopang pertumbuhan yang berkualitas.

Selain 7 prioritas pembangunan yang ditetapkan, maka terdapat 25 program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 yang tetap menjadi prioritas jangka menengah untuk dapat dicapai yaitu:

Tabel 4.4
Kesesuaian Program dengan Prioritas terhadap Misi RPJMD

NO	MISI RPJMD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS
1.	Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan.	Kesehatan	1. Layanan Mobil Ambulance 24 Jam yang Dilengkapi dengan Dokter dan Paramedis.
		Kesehatan	2. Peningkatan Insentif Dokter dan Paramedis.
		Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3. Pembangunan Waduk dan Penyelesaian Jaringan Irigasi Induk, Sekunder dan Tersier untuk Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan.
		Perhubungan	4. Pembangunan/Penyiapan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Berbasis Internet.
2.	Mengoptimalkan potensi sumberdaya	Pertanian	5. Asuransi Pertanian dan Peternakan.



NO	MISI RPJMD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS
	daerah pada sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan pariwisata.	Pertanian	6. Penguatan Sistem Pertanian Organik dan Labelisasi Pupuk Organik/Bibit Lokal.
		Pariwisata	7. Pengembangan Pariwisata Inklusif Berbasis Masyarakat.
3.	Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah.	Pertanian	8. Pengembangan Rumah Produksi Petani, Peternak, dan Nelayan.
4.	Menciptakan sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif.	Pemerintahan Umum	9. Pengaturan Tenaga Honorer Pendidik dan Tenaga Kesehatan dengan Peraturan Bupati.
		Pendidikan	10. Revitalisasi SKB Bulukumba Sebagai Pusat Pengembangan Kapasitas SDM Tenaga Pendidik yang Terintegrasi dengan Pusat Kegiatan PGRI.
		Pemuda dan Olahraga	11. Penguatan Fungsi Stadion Mini Bulukumba Sebagai Pusat Olahraga Masyarakat.
		Pemuda dan Olahraga	12. Penyiapan Sarana dan Prasarana Olahraga Baru Dalam Rangka Penyiapan Bulukumba Sebagai Tuan Rumah Porda.
5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance) serta penegakan supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13. Santunan Kematian bagi Masyarakat yang Tidak Mampu berupa pemberian akta kematian gratis.
		Pemerintahan Umum	14. Pendelegasian Kewenangan kepada Kecamatan dan Desa Dalam Rangka Kreatifitas Pelayanan.
		Pemerintahan Umum	15. Peningkatan Pendapatan Tetap dan Tunjangan Aparatur Desa/Kelurahan.
		Pemerintahan Umum	16. Alokasi 12 Persen Dana Bagi Hasil Untuk Alokasi Dana Desa (ADD).
		Pemerintahan Umum	17. Dana Infrastruktur Dasar Pedesaan/Kelurahan.
		Pemerintahan Umum	18. Insentif Berbasis Kinerja Bagi PNS, Unit Kebencanaan, dan Keamanan.
		Pemerintahan Umum	19. Layanan Prima (Bebas KKN dan Pungli) Masyarakat.
		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	20. Pembaharuan Unit Pemadam Kebakaran dan Penempatan Unit Kebakaran di Kecamatan.
6.	Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah.	Pemerintahan Umum	21. Pengembangan Sentra Kemaritiman Selatan-Selatan.



NO	MISI RPJMD	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS
7.	Penataan ruang dan Pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana.	Kebudayaan	22. Penguatan Kebudayaan Daerah melalui Pembangunan Gedung Kesenian dan Museum.
8.	Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat	Sosial	23. Bantuan Modal untuk Kelompok Perempuan/Majelis Taklim, Pemuda, Kelompok Wanita Tani, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
		Pemerintahan Umum	24. Program Memakmurkan Masjid dan Peningkatan Insentif Imam Masjid Serta Guru TK/TPA.
		Sosial	25. Pengarusutamaan Penyandang Cacat, Gender dan Masyarakat Marginal dalam Akses Pelayanan Publik.

4.2.3 Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Sebagai bentuk konsistensi pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulukumba yang mana pada tahun ini merupakan tahun kelima dan merupakan tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2021.

Sasaran pembangunan Kabupaten Bulukumba tahun 2021 merupakan bentuk konsistensi pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan proses pembangunan secara terstruktur yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021, penetapan prioritas dan sasaran pembangunan tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menyukseskan tujuan pembangunan kewilayahan dan nasional khususnya terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan (*Pro-Poor*), Penciptaan Lapangan Kerja (*Pro-Job*), Pertumbuhan Ekonomi, (*pro growth*), Pembangunan berkelanjutan (*Pro-environment*).

Terdapat 33 sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021, dari 33 sasaran tersebut kemudian dirinci dalam 128 indikator sasaran tahunan dan jangka menengah yang akan dicapai, adapun 33 sasaran yang akan dicapai tersebut yaitu:

Tabel 4.5
Sasaran Pembangunan Tahun 2021

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
1.	Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan	1. Mewujudkan pembangunan, penguatan, dan pemerataan infrastruktur dasar masyarakat yang berdayaguna.	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik daerah yang berkeadilan. 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman.



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
	berkeadilan;	2. Mewujudkan penyelenggaraan kesehatan masyarakat yang berkualitas.	3. Meningkatnya kualitas, kuantitas, dan cakupan infrastruktur kesehatan masyarakat. 4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat dasar dan rujukan.
		3. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas	5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta cakupan infrastruktur pendidikan masyarakat. 6. Meningkatnya mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. 7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan. 8. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat.
2.	Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah.	4. Mewujudkan penataan dan pengelolaan potensi daerah.	9. Meningkatnya produktivitas komoditi pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan masyarakat dalam mendorong ketahanan pangan daerah. 10. Berkembangnya potensi dan daya tarik wisata.
3.	Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah.	5. Peningkatan pendapatan masyarakat.	11. Menurunnya angka kemiskinan masyarakat. 12. Menurunnya tingkat pengangguran daerah.
		6. Peningkatan daya saing dan mendorong pengembangan ekonomi kreatif.	13. Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat. 14. Meningkatnya daya saing dan produktivitas UMKM.
		7. Meningkatkan iklim dan minat investasi.	15. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang profesional. 16. Meningkatkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN.
4.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif.	8. Menciptakan sumberdaya manusia yang berjiwa enterpreneur.	17. Meningkatnya daya saing dan pengembangan kewirausahaan.
		9. Meningkatkan kreativitas pemuda dan prestasi olahraga.	18. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan bersih (<i>clean governance</i>) serta penegakan supremasi hukum	10. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih	19. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa. 20. Meningkatnya efektivitas kelembagaan pemerintah 21. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. 22. Meningkatnya kualitas pelayanan



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4
	dan hak azasi manusia.		publik dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan. 23. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.
		11. Penegakan Supremasi Hukum dan HAM.	24. Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum, dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum. 25. Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan kesejahteraan sosial.
6.	Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah.	12. Meningkatkan jejaring kerjasama antar daerah dan dengan stakeholder dalam pembangunan daerah	26. Meningkatnya kerjasama antar daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
7.	Penataan ruang dan Pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana.	13. Mewujudkan penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup, budaya, dan penanggulangan bencana.	27. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang secara optimal. 28. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah. 29. Meningkatnya infrastruktur dan kesiapsiagaan bencana. 30. Memajukan seni dan budaya serta memelihara dan melindungi situs sejarah maupun benda-benda kepurbakalaan.
8.	Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, Suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat.	14. Menciptakan iklim demokrasi dan politik yang kondusif	31. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik
		15. Mewujudkan ketertiban dan ketenteraman serta suasana religius dalam kehidupan bermasyarakat.	32. Terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. 33. Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama

4.2.4 Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) dengan RKPD Tahun 2021

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*—berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030.



Indonesia bertekad untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Pasalnya, Indonesia adalah salah satu negara yang turut membidani kelahiran SDGs. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 menunjukkan komitmen negara dan seluruh elemen bangsa melaksanakan SDGs. “Sesuai peraturan itu, presiden sebagai kepala negara juga memimpin sendiri pelaksanaan SDGs secara inklusif.”

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) People (manusia), 2) Planet (bumi), 3) Prosperity (kemakmuran), 4) Peace (perdamaian), dan 5) Partnership (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik

Tujuh belas tujuan SDG's tersebut adalah tanpa kemiskinan; tanpa kelaparan; hidup sehat dan kesejahteraan; kualitas pendidikan; kesetaraan gender; air bersih dan sanitasi layak; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi, dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan; kota dan pemukiman yang berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; penanganan perubahan iklim; ekosistem laut; ekosistem darat; perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan, kemitraan untuk mencapai tujuan.

Sejak SDGs disahkan tahun 2015, Pemerintah Daerah (Pemda) Kota/Kabupaten diyakini akan memainkan peran sentral dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Dekat dengan warga, memiliki kewenangan dan dana, dapat melakukan beragam inovasi dan ujung tombak penyedia layanan publik serta kebijakan dan program pemerintah, menjadi pertimbangan pentingnya peran Pemda. Beragam keunggulan Pemda tersebut harus dapat digunakan sebaik mungkin dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Kegagalan MDGs yang tidak mampu mengoptimalkan peran Pemda tidak boleh terulang.

Seluruh Tujuan dan Target SDGs secara langsung maupun tidak, sangat terkait dengan kerja-kerja Pemda Kota dan Kabupaten. Meningkatkan pengetahuan Pemda dan kemudian mengajak untuk melaksanakan SDGs menjadi sebuah tantangan tersendiri. Terlebih untuk negara seperti Indonesia yang memiliki lebih kurang 500 Kota dan Kabupaten, yang masing-masing memiliki situasi yang berbeda baik secara politik, ekonomi dan sosial.

Terdapat beberapa faktor yang akan membuat pelaksanaan SDGs di daerah bisa berjalan dengan baik, yaitu pertama adanya komitmen politik yang kuat di tingkat lokal, kedua adanya birokrasi di tingkat lokal yang mampu menterjemahkan dan mengoperasionalkan SDGs dan ketiga adanya kelompok masyarakat sipil kuat di tingkat lokal.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan



kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB menjadi salah satu acuan dalam pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba. RKPD Bulukumba Tahun 2021 telah mengarusutamakan pencapaian TPB dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan dan indikator yang terukur. Integrasi TPB dalam Program Prioritas RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021, sebagaimana pada Tabel 4.1 berikut:



Tabel 4.6

Matriks Integrasi TPB/SDGs Terhadap Program Prioritas RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun		
INDIKATOR Tujuan 1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur		
No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
1	Program 1: Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya	Dinas Sosial
2	Program 2: Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3	Program 3: Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
4	Program 4: Program pengembangan lingkungan sehat	Dinas Kesehatan
5	Program 5: Program Wajib Belajar pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan
6	Program 6: Program Pembangunan / Pengembangan Perekonomian	Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah
7	Program 7: Program Pengembangan Perumahan	DPPP
8	Program 8: Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	DPMD
9	Program 9: Pengembangan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
10	Program 10: Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	DTPHP
11	Program 11: Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Program 12: Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata
13	Program 13: Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi UKM
14	Program 14: Program peningkatan produksi hasil peternakan	DPK



15	Program 15: peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	DPK
16	Program 16: Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
17	Program 17: Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Dinas PUTR
18	Program 18: Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Indikator SDGs: 1.3.1.(A) Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan
19	Program 1: Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 1.3.1.(B) Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	
20	Program 1: Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
	Indikator SDGs: 1.3.1.(C) Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin Dan Rentan Yang Terpenuhi Hak Dasarnya Dan Inklusivitas.	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
21	Program 1: Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Prioritas)	Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 1.3.1.(D) Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial
22	Program 1: Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 1.4.1.(B) Persentase Anak Umur 12-23 Bulan Yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap	Dinas Kesehatan
23	Program 1: Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
	Indikator Sdgs: 1.4.1.(C) Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (Cpr) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (Pus) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin.	DPPKB
24	Program 1: Program Keluarga Berencana	DPPKB
	Indikator SDGs: 1.4.1.(D) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan.	Dinas Perkimtan
25	Program 1: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Perkimtan
	Indikator SDGs: 1.4.1.(E) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan	Dinas Perkimtan



	Sanitasi Layak Dan Berkelanjutan.	
26	Program 1: Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perkimtan
	Indikator SDGs: 1.4.1.(F) Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	Dinas Perkimtan
27	Program 1: Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perkimtan
	Indikator SDGs: 1.4.1.(I) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI – SMP/MTs Sederajat.	DISDIKBUD
28	Program 1: Peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKBUD
	Indikator SDGs: 1.4.1.(J) Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran.	Disdukcapil
29	Program 1: Program Penataan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
	Indikator SDGs: 1.5.1* Jumlah Korban Meninggal, dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang.	BPBD
30	Program 1: Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
	Indikator SDGs: 1.5.1.(A) Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah	BPBD
31	Program 1: Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
	Indikator SDGs: 1.5.1.(B) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sosial	BPBD, Dinas Sosial
32	Program 1: Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Prioritas)	BPBD, Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 1.5.1.(C) Pendampingan Psikososial Korban Bencana Sosial	Dinas Sosial
33	Program 1: Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (Prioritas)	Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 1.5.1.(E) Indeks Risiko Bencana pada Pusat-Pusat Pertumbuhan yang Berisiko Tinggi.	BPBD
34	Program 1: Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
	Indikator SDGs: 1.5.2.(A) Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana.	BPBD
35	Program 1: Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
	Indikator SDGs: 1.5.3* Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah.	BPBD
36	Program 1: Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD



	Indikator SDGs: 1.A.1* Proporsi Sumber Daya yang Dialokasikan oleh Pemerintah Secara Langsung Untuk Program Pemberantasan Kemiskinan.	Bappeda, BPKD
37	Program 1: peningkatan produksi hasil peternakan	DPK
38	Program 2: Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial
No	Pembangunan Daerah Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
39	Program 1 : Pengembangan Ketahanan Pangan	Dinas ketahanan Pangan
40	Program 2: Peningkatan Kesejahteraan Petani	
TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN : Mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan		
	Indikator SDGs: 2.1.1.(A) Prevalensi Kekurangan Gizi (<i>Underweight</i>) pada Anak Balita	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Kanwil Agama, BPOM
41	Program 1: Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
42	Program 2: Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
43	Program 3: Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan
44	Program 4: perencanaan sosial dan budaya	Bappeda
45	Program 5 : Pengembangan Ketahanan Pangan	Dinas ketahanan pangan
	Indikator SDGs: 2.1.2* Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat, Berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Ketahanan pangan



46	Program 1: Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	Dinas ketahanan pangan
	Indikator SDGs: 2.1.2.(A) Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari.	Dinas Ketahanan Pangan
47	Program 1: Pengembangan Ketahanan Pangan	Dinas ketahanan pangan
	Indikator SDGs: 2.2.1 Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita.	Dinas Ketahanan pangan
48	Program 1: Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
49	Program 2: Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
50	Program 3: Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
51	Program 4: peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dinas Kesehatan
52	Program 5 : Pengembangan Ketahanan Pangan	Dinas ketahanan Pangan
	Indikator SDGs: 2.2.1.(A) Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) pada Anak Di Bawah Dua Tahun/Baduta.	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Perkimtan, Bagian Kesra, Kanwil Agama, BPOM, Bappeda
53	Program 1: Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
54	Program 2: Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
55	Program 3: Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan
56	Program 4: Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	Dinas ketahanan pangan



57	Program 5 : Pengembangan Ketahanan Pangan	Dinas ketahanan pangan
	Indikator SDGs: 2.2.2.* Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak pada Usia Kurang dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe.	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Perkimtan, Bagian Kesra, Kanwil Agama, BPOM, Bappeda
58	Program 1: Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas kesehatan
59	Program 2: Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
60	Program 3: Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	Dinas Kesehatan
61	Program 4 : Pengembangan Ketahanan Pangan	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 2.2.2.(A) Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil.	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahana Pangan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, Dinas Perkimtan, Biro Kesra, Kanwil Agama, BPOM, Bappelitbangda
62	Program 1: Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
63	Program 2: Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 2.2.2.(B) Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif.	Dinas Kesehatan
64	Program 1: Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan



65	Program 2: Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
TUJUAN 3 : Kehidupan Sehat Dan Sejahtera : Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Di Semua Usia		
INDIKATOR Tujuan 3 : Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih		
	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).	
	3.1.2.(A) Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Di Fasilitas Kesehatan	
	3.2.1* Angka Kematian Balita (Akba) Per 1000 Kelahiran Hidup.	Dinas Kesehatan
	3.2.2*Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1000 Kelahiran Hidup.	Dinas Kesehatan
	3.2.2.(A) Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup.	Dinas Kesehatan
	3.2.2.(B) Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi.	Dinas Kesehatan
No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
66	Program 1: Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
67	Program 2: Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
68	Program 3: Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
69	Program 4: peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.3.3* Kejadian Malaria Per 1000 Orang	Dinas Kesehatan, Bagian Kesra
	3.3.1.(A) Prevalensi Hiv Pada Populasi Dewasa.	
	3.3.2.(A) Insiden Tuberkulosis (Itb) Per 100.000 Penduduk.	
	3.3.3.(A) Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mencapai Eliminasi Malaria	
	3.3.4.(A) Persentase Kabupaten/Kota Yang Melakukan Deteksi Dini Untuk Infeksi Hepatitis B.	
	3.3.5* Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filariasis Dan Kusta).	



	3.3.5.(A) Jumlah Kab/ Kota Dengan Eliminasi Kusta	
	3.3.5.(B) Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Eliminasi Filariasis (Berhasil Lolos Dalam Survei Penilaian Transmisi Tahap I).	
70	Program 1: Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.4.1.(A) Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≤18 Tahun.	Dinas Kesehatan
71	Program 1: Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
72	Program 2: Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.4.1.(B) Prevalensi Tekanan Darah Tinggi.	Dinas Kesehatan
73	Program 1: Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan
74	Program 2: Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.4.1.(C) Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur ≥18 Tahun	Dinas Kesehatan
75	Program 1: Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan
76	Program 2: Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.4.2* Angka Kematian (Insidens Rate) Akibat Bunuh Diri	Dinas Kesehatan
77	Program 1: Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.4.2.(A) Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa	Dinas Kesehatan
78	Program 1: Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 3.5.1.(E) Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	Dinas Kesehatan & Biro Kesra
	3.5.2* Konsumsi Alkohol (Liter Per Kapita) Oleh Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir.	Dinas Kesehatan, Biro Kesra
79	Program 1: Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan, Biro Kesra
	Indikator SDGs: 3.7.1* Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) atau Pasangannya yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern	Dinas Kesehatan, DPPKB



	3.7.1.(A) Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin.	
	3.7.1.(B) Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern.	
	3.7.2* Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	
	3.7.2.(A) Total Fertility Rate (TFR)	
80	Program 1: Program Keluarga Berencana	
	Indikator SDGs: 3.8.2* Jumlah Penduduk Yang Dicapai Asuransi Kesehatan atau Sistem Kesehatan Masyarakat Per 1000 Penduduk	Dinas Kesehatan, Disdukcapil
81	Program 1: Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan,
	Indikator SDGs: 3.8.2.(A) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn).	Dinas Kesehatan
82	Program 1: Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan,
	Indikator SDGs: 3.A.1* Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥15 Tahun	Dinas Kesehatan
83	Program 1: Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan,
84	Program 2: Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan,
	Indikator SDGs: 3.B.1.(A) Persentase Ketersediaan Obat Dan Vaksin Di Puskesmas	Dinas Kesehatan
85	Program 1: Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan,
	Indikator SDGs: 3.C.1* Rasio Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
86	Program 1: Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan,
TUJUAN 4 : Pendidikan Berkualitas : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua;		
INDIKATOR Tujuan 4. Persentase SD/MI-SMP/MTs Berakreditasi Minimal B		
No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	



87	Program 1: Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKBUD
	Indikator SDGs: 4.1.1.(d/e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI – SMP/MTs Sederajat	DISDIKBUD
	Indikator SDGs: 4.1.1.(G) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥15 Tahun.	
	Indikator SDGs: 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Di (1) Sd/Mi/Sederajat; (2) Smp/Mts/Sederajat; (3) Sma/Smk/Ma/Sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki Di (4) Perguruan Tinggi.	
88	Program 1: Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKBUD
	Indikator SDGs: 4.6.1.(A) Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥15 Tahun	DISDIKBUD
	Indikator SDGs: 4.6.1.(B) Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 Tahun dan Umur 15-59 Tahun	DISDIKBUD
89	Program 1: Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKBUD
	Indikator SDGs: 4.A.1* Proporsi Sekolah Dengan Akses Ke: (A) Listrik (B) Internet Untuk Tujuan Pengajaran, (C) Komputer Untuk Tujuan Pengajaran, (D) Infrastruktur Dan Materi Memadai Bagi Siswa Disabilitas, (E) Air Minum Layak, (F) Fasilitas Sanitasi Dasar Per Jenis Kelamin, (G) Fasilitas Cuci Tangan (Terdiri Air, Sanitasi, Dan Higienis Bagi Semua (Wash).	DISDIKBUD
90	Program 1: Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKBUD, Dinas Kesehatan
91	Program 2: Program Pendidikan Non Formal	DISDIKBUD,DP3A
92	Program 3: Program Penyediaan Air Bersih	Disperkimtan
93	Program 4: Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 4.C.1* Persentase Guru TK, SS, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang Bersertifikat Pendidik	Dinas Pendidikan
94	Program 1: Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan



TUJUAN 5 : Kesetaraan Gender : Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan;		
INDIKATOR Tujuan 5 Jumlah Kebijakan Yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan		
No	Pembangunan Daerah Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
95	Program 1: Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Dinas PP3A
96	Program 2: Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
	Indikator SDGs: 5.2.1* Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Atau Emosional) oleh Pasangan atau Mantan Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir	Dinas PP3A
97	Program 1: Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Dinas PP3A
98	Program 2: Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Dinas PP3A
	Indikator SdDGs: 5.2.1.(A) Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	Dinas PP3A
99	Program 1: Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Dinas PP3A
	Indikator SDGs: 5.2.2.(A) Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif	Dinas PP3A
100	Program 1: Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Dinas PP3A
	Indikator SDGs: 5.2.2* Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir	Dinas PP3A
101	Program 1: Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Dinas PP3A
	Indikator SDGs: 5.3.1* Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun Dan Sebelum Umur 18 Tahun	Dinas PP3A
102	Program 1: Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Dinas PP3A
103	Program 2: Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Dinas PP3A
	Indikator SDGs: 5.3.1.(C) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI-SMP/MTs Sederajat	DISDIKBUD



104	Program 1: Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DISDIKBUD
	Indikator SDGs: 5.5.1* Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah Dan Pemerintah Daerah	Dinas PP3A
105	Program 1: Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Dinas PP3A
	Indikator SDGs: 5.5.2* Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Manajerial	Dinas PP3A
106	Program 1: Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Dinas PP3A
	Indikator SDGs: 5.6.1.(A) Unmet Need Kb (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak Terpenuhi).	DPPKB
107	Program 1: Program Keluarga Berencana	
	Indikator SDGs: 5.6.1.(B) Pengetahuan Dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (Pus) Tentang Metode Kontrasepsi Modern	Disdukcapil / Dinas P3A & KB
108	Program 1: Program Keluarga Berencana	Dinas P3A & KB
	Indikator SDGs: 5.B.1* Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam.	Diskominfo
109	Program 1: Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Diskominfo
Tujuan 6 : Air Bersih Dan Sanitasi Layak : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua		
Indikator Tujuan 6. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak		
No	Pembangunan Daerah Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
110	Program 1: Program Lingkungan Sehat Perumahan	Dinas Perkimtan
111	Program 2: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Perkimtan
	Indikator SDGs: 6.1.1.(B) Kapasitas Prasarana Air Baku Untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri, Serta Penyediaan Air Baku untuk Pulau-Pulau.	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan



112	Program 1: Program Lingkungan Sehat Perumahan	Dinas PUPR
113	Program 2: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 6.1.1.(C) Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Amandan Berkelanjutan	Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan
114	Program 1: Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olahraga	Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan
115	Program 2: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 6.2.1.(A) Proporsi Populasi Yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan Dengan Sabun dan Air	Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan
116	Program 1: Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 6.2.1.(C) Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan
117	Program 1: Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs: 6.2.1.(D) Jumlah Desa/Kelurahan Yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan
118	Program 1: Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan
	Indikator SdDGs: 6.3.2.(B) Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku	DLHK
119	Program 1: Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 6.5.1.(C) Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya Air Yang Dibentuk.	DLHK, Dinas PSDA
120	Program 1: Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	DLHK, Dinas PSDA
121	Program 2: Program Pengendalian Banjir	Dinas PSDA



122	Program 3: Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Dinas PSDA
123	Program 3: Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	DLHK
	Indikator Sdgs: 6.5.1.(G) Kegiatan Penataan Kelembagaan Sumber Daya Air.	Dinas PUTR
124	Program 1: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR
	Indikator Sdgs: 6.6.1.(D) Luas Lahan Kritis Dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) Yang Direhabilitasi.	DLHK
125	Program 1: Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	DLHK
TUJUAN 8 : Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua		
Indikator Tujuan 8 : Pertumbuhan PDRB		Bagian Ekonomi pembangunan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan BPS
Indikator Tujuan 8. PDRB Per Kapita		
No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
126	Program 1: Program pengembangan industri kecil dan menengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Indikator Sdgs: 8.3.1* Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian, Berdasarkan Jenis Kelamin.	Dinas Tenaga Kerja
127	Indikator Sdgs: 8.3.1.(A) Persentase Tenaga Kerja Formal.	Dinas Tenaga Kerja
128	Indikator Sdgs: 8.3.1.(B) Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian.	Dinas Tenaga Kerja
129	Program 1: Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja
129	Program 2 : Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
	Indikator Sdgs: 8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur	Dinas Tenaga Kerja



	Indikator Sdgs: 8.5.2.(A) Persentase Setengah Pengangguran	Dinas Tenaga Kerja
130	Program 1: Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
	Indikator Sdgs: 8.9.1* Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap Pdrb	Dinas Pariwisata
131	Program 1: Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	Dinas Pariwisata
TUJUAN 9 : Industri, Inovasi Dan Infrastruktur : Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Kreatif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi;		
INDIKATOR TUJUAN 9. Panjang Pembangunan Jalan Tol		
No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator Sdgs: 9.1.1.(C) Panjang Jalur Kereta Api	Dinas Perhubungan
132	Program 1: Perencanaan Dan Fasilitasi Pengembangan Transportasi	Dinas Perhubungan
	Indikator Sdgs: 9.1.2.(B) Jumlah Dermaga Penyeberangan	Dinas Perhubungan
133	Program 1: Perencanaan Dan Fasilitasi Pengembangan Transportasi	Dinas Perhubungan
	Indikator SDGs: 9.1.2.(C) Jumlah Pelabuhan Strategis	Dinas Perhubungan
134	Program 1: Penyelenggaraan Kepelabuhanan Dan Angkutan Pelayaran	Dinas Perhubungan
	Indikator SDGs: 9.2.1* Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Pdb Dan Per Kapita	Dinas Perindustrian
	Indikator Sdgs: 9.4.1* Rasio Emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur	DLHK
135	Indikator Sdgs: 9.4.1(A) Persentase Perubahan Emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca	DLHK
136	Program 1: Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator Sdgs: 9.5.1* Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Terhadap PDB	DLHK
Indikator Tujuan 9 : Industri, Inovasi Dan Infrastruktur		
137	Program 1: Program Pembangunan Inovasi dan Teknologi	Balitbangda



	Indikator Sdgs: 9.C.1.(A) Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam	Dinas Kominfo
138	Program 1: Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo
	Indikator Sdgs: 9.C.1.(B) Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet	Dinas Kominfo
139	Program 1: Program Pengembangan E-Government	Dinas Kominfo
TUJUAN 10 : Berkurangnya Kesenjangan : Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara;		
INDIKATOR TUJUAN 10. Indeks Gini		
No	Pembangunan Daerah Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
	Indikator Sdgs: 10.1.1.(B) Jumlah Daerah Tertinggal Yang Terentaskan.	DPMD
140	Program 1: Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	DPMD
141	Program 2: Program Peningkatan Peran Perempuan Perdesaan	DPMD
142	Program 3: Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	DPMD
143	Program 4 : Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkimtan
144	Program 5 : Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perkimtan
145	Program 6 : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Perkimtan
146	Program 7 : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan
147	Program 8: Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
	Indikator SDGs: 10.4.1.(B) Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja
148	Program 1: Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja



Tujuan 11 : Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan		
Indikator Tujuan 11. Jumlah Kawasan Perkotaan Metropolitan Yang Terpenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).		
No	Pembangunan Daerah Program/Kegiatan	Instansi Pelaksana
	Indikator SDGs: 11.2(A) Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum Di Perkotaan.	Dinas Perhubungan
149	Program 1: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dinas Perhubungan
150	Program 2: peningkatan pelayanan angkutan	Dinas Perhubungan
	Indikator SDGs: 11.3.2.(B) Jumlah Lembaga Pembiayaan Infrastruktur.	Dinas PUTR, Dinas Perkimtan
151	Program 1: Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Dinas PUTR
	Indikator Sdgs: 11.4.1.(A) Jumlah Kota Pusaka Di Kawasan Perkotaan Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang Dan Kota Kecil.	Dinas Pariwisata
152	Program 1: Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas PUTR
	Indikator Sdgs: 11.5.1* Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang.	BPBD
153	Program 1: Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD
154	Program 2: Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
	Indikator Sdgs: 11.5.1.(A) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD
155	Program 1: Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD
156	Program 2: Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
	Indikator SDGs: 11.5.1.(C) Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca Dan Iklim Serta Kebencanaan.	BPBD
157	Program 1: Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
158	Program 2: Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 11.5.2.(A) Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	BPBD
159	Program 1: Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	
	Indikator SDGs: 11.B.2* Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (Prb) Tingkat Daerah.	BPBD



160	Program 1: Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
161	Program 2: Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 11.6.1.(A) Persentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani.	DLHK, Perkimtan
162	Program 1: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DLHK, Perkimtan
	Indikator SDGs: 11.6.1.(B) Jumlah Kota Hijau Yang Mengembangkan Dan Menerapkan Green Waste Di Kawasan Perkotaan Metropolitan.	DLHK
163	Program 1: Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 11.7.1.(A) Jumlah Kota Hijau Yang Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Metropolitan Dan Kota Sedang	DLHK
164	Program 1: Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	DLHK
Tujuan 12 : Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab		
Indikator Tujuan 12. Umlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri)		
No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
165	Program 1: Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 12.6.1.(A) Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	DLHK, Dinas Perdagangan
166	Program 1: Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 12.7.1.(A) Jumlah Produk Ramah Lingkungan Yang Teregister	DLHK
167	Program 1: Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	DLHK



TUJUAN 13 :Penanganan Perubahan Iklim :Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya		
Indikator Tujuan 13. Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (Prb) Tingkat Nasional Dan Daerah.		
No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
168	Program 1: Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
169	Indikator SDGs: 13.1.2* Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang.	BPBD
170	Program 1: Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
171	Program 2: Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD
	Indikator SDGs: 13.2.1.(A) Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).	Bappeda (KLHS)
	Program 1: Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	DLHK
172	Program 2: Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	DLHK
TUJUAN 14 : Ekosistem Lautan : Melestarikan Dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan		
INDIKATOR TUJUAN 14. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha		
No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
173	Program 1: Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Perikanan
174	Program 2: Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
175	Program 3: Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Dinas Perikanan
176	Program 4: Program Pengembangan Usaha dan Kelembagaan	Dinas Perikanan



	Indikator SDGs: 14.B.1* Ketersediaan Kerangka Hukum/ Regulasi/ Kebijakan/ Kelembagaan Yang Mengakui Dan Melindungi Hak Akses Untuk Perikanan Skala Kecil	Dinas Perikanan
178	Program 1: Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
179	Program 2: Program Pengembangan Usaha dan Kelembagaan	Dinas Perikanan
	Indikator SDGs: 14.B.1.(A) Jumlah Kab/ Kota Dengan Peningkatan Akses Pendanaan Usaha Nelayan	Dinas Perikanan
180	Program 1: Program Pengembangan Usaha dan Kelembagaan	Dinas Perikanan
181	Program 2: Program pengembangan budidaya perikanan	Dinas Perikanan
	Indikator SDGs: 14.B.1.(B) Jumlah Nelayan Yang Terlindungi.	Dinas Perikanan
182	Program 1: Program pengembangan perikanan tangkap	Dinas Perikanan
183	Program 2: Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Dinas Perikanan
TUJUAN 15 : Ekosistem Daratan : Melindungi, Merestorasi, Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggunaan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati		
Indikator Tujuan 15. Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.		
No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator SDGs: 15.1.1.(A) Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.	DLHK
184	Program 1: Program rehabilitasi hutan dan lahan	DLHK
	Indikator SDGs: 15.2.1.(A) Luas Kawasan Konservasi Terdegradasi Yang Dipulihkan Kondisi Ekosistemnya	DLHK
185	Program 1: Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 15.2.1.(B) Luas Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem	



186	Program 1: Program rehabilitasi hutan dan lahan	DLHK
	Indikator SDGs: 15.2.1.(D) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	DLHK
187	Program 1: Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	DLHK
	Indikator SDGs: 15.3.1.(A) Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan	DLHK
188	Program 1: Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	DLHK
	Indikator SDGs: 15.6.1* Tersedianya Kerangka Legislasi, Administrasi Dan Kebijakan Untuk Memastikan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Merata	DLHK
189	Program 1: Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLHK
190	Program 2: Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	DLHK
	Indikator SDGs: 15.9.1.(A) Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	DLHK
191	Program 1: Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLHK
TUJUAN 16 : Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Tangguh : Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel Dan Inklusif Di Semua Tingkat		
INDIKATOR TUJUAN 16. Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya		
No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator SDGs: 16.2.1.(A) Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun Yang Mengalami Hukuman Fisik Dan/Atau Agresi Psikologis Dari Pengasuh Dalam Setahun Terakhir.	DP3A
	Indikator SDGs: 16.2.1.(B) Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan.	DP3A
192	Program 1: Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	DP3A
193	Program 2: Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	DP3A



	Indikator SDGs: 16.6.1.(B) Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sakip) Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bappeda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
194	Program 1: Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Biro Organisasi Dan Tata Laksana
	Program 2: Program perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
	Indikator SDGs: 16.6.1.(D) Persentase Instansi Pemerintah Yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
195	Program 1: Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
	Indikator SDGs: 16.10.2.(C) Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Untuk Mengukur Kualitas Ppid Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan.	Dinas Kominfo
196	Program 1: Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo
TUJUAN 17 : Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan : Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan		
Indikator Tujuan 17. Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi Terhadap Pdb Menurut Sumbernya.		
No	Pembangunan Daerah	Instansi Pelaksana
	Program/Kegiatan	
	Indikator SDGs: 17.8.1* Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet.	Diskominfo
197	Program 1: Program Pengembangan E-Government	Diskominfo
198	Program 2: Program Pengembangan E-government	Diskominfo
	Indikator SDGs: 17.8.1.(A) Persentase Kabupaten 3t Yang Terjangkau Layanan Akses Telekomunikasi Universal Dan Internet.	Diskominfo
199	Program 1: Program Pengembangan E-Government	Diskominfo
	Indikator Sdgs: 17.18.1.(A) Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) Yang Merasa Puas	BPS



	Dengan Kualitas Data Statistik.	
	Indikator Sdgs: 17.18.1.(B) Persentase Konsumen Yang Menjadikan Data Dan Informasi Statistik BPS Sebagai Rujukan Utama.	BPS
200	Program 1: Program Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Sektoral	BPS
	Indikator Sdgs: 17.18.1.(C) Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral, Dan Khusus Yang Terdapat Dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa).	BPS
201	Program 1: Program Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Sektoral	BPS
202	Program 2: Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Diskominfo
	Indikator Sdgs: 17.18.1.(D) Persentase Indikator SDGs Terpilah Yang Relevan Dengan Target.	Bappeda / BPS
203	Program 1: Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda / BPS
	Indikator SDGs: 17.19.2.(C) Jumlah Pengunjung Eksternal Yang Mengakses Data Dan Informasi Statistik Melalui Website.	Diskominfo
204	Program 1: Program Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Sektoral	Diskominfo



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021

5.1 Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Program dan Kegiatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

Untuk matriks rencana kerja dan pendanaan daerah program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1

Rekap pagu Matriks Rencana Kerja dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 Kabupaten Bulukumba

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	PAGU
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	124.370.864.950,00
2	Dinas Kesehatan	216.334.278.200,00
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	112.472.089.767,00
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	18.666.214.400,00
5	Dinas Perumahan, Permukiman & Pertanahan	57.214.913.870,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa & Politik	1.241.814.500,00
7	Satpol PP & Pemadam Kebakaran	7.624.654.250,00
8	Dinas Sosial	3.495.714.950,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.190.043.100,00
10	Dinas Tenaga Kerja	1.489.671.350,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA	1.336.949.475,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	2.251.036.450,00
13	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	9.774.278.150,00
14	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	3.449.526.100,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.530.530.000,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk & KB	4.642.992.400,00
17	Dinas Perhubungan	1.903.316.300,00
18	Dinas Komunikasi & Informatika	3.488.785.150,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	1.973.023.300,00
20	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.660.910.100,00
21	Dinas Pemuda & Olahraga	4.839.506.750,00
22	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	1.032.671.850,00
23	Dinas Perikanan	5.560.213.500,00
24	Dinas Pariwisata	7.941.156.600,00
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	6.814.211.000,00



26	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	2.881.663.000,00
27	Dinas Perdagangan & Perindustrian	8.727.388.000,00
28	Sekretariat Daerah	13.285.514.964,00
29	Sekretariat DPRD	16.614.629.941,00
30	Kantor Camat Ujung Bulu	11.326.644.050,00
31	Kantor Camat Ujung Loe	1.811.033.000,00
32	Kantor Camat Bulukumpa	4.189.389.000,00
33	Kantor Camat Rilau Ale	1.669.188.750,00
34	Kantor Camat Gantarang	4.552.691.750,00
35	Kantor Camat Kindang	2.010.426.000,00
36	Kantor Camat Herlang	3.039.182.000,00
37	Kantor Camat Bontotiro	1.482.501.000,00
38	Kantor Camat Bontobahari	5.716.852.000,00
39	Kantor Camat Kajang	3.222.874.000,00
40	Inspektorat Daerah	7.737.400.000,00
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.150.288.379,00
42	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.801.710.450,00
43	Badan Pendapatan Daerah	3.510.632.000,00
44	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.075.860.900,00
45	Badan Penelitian & Pengembangan Daerah	1.344.013.250,00
JUMLAH		714.449.248.896,00

Tabel 5.2
MATRIKS RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1				2	3	4	5	6	7
1	01	01		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				124.370.864.950,00	
1	01	01	2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.605.394.150,00	
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulukumba	12 Bln	142.583.150,00	DAU
1	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Lancarnya Operasional Kendaraan Dinas Operasional	Bulukumba	98 unit	69.400.000,00	DAU
1	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lancarnya Pengelolaan keuangan dan administrasi kantor	Bulukumba	12 Bln	71.300.000,00	DAU
1	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Bulukumba	2 org	51.300.000,00	DAU
1	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulukumba	12 unit	16.750.000,00	DAU
1	01	01	09	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya fasilitas rumah tangga kantor	Bulukumba	5 kali	3.962.500,00	
1	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah	Bulukumba	99 org	355.244.000,00	DAU
1	01	01	21	3 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulukumba	12 bln	894.854.500,00	DAU
1	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				907.315.000,00	
1	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bertambahnya Perlengkapan gedung kantor	Bulukumba	6 unit	50.000.000,00	DAU
1	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bertambahnya gedung kantor	Bulukumba	1 kegiatan	58.000.000,00	DAU
1	01	02	21	Pengadaan Moubeleur Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana Kantor	Bulukumba	1 kegiatan	25.000.000,00	DAU
1	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Kebersihan dan Penataan Kantor	Bulukumba	12 Bln	29.315.000,00	DAU
1	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Meningkatnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Bulukumba	1 unit	15.000.000,00	DAU
1	01	02	42	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/opesrasional	Meningkatnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Bulukumba	22 unit	15.000.000,00	DAU
1	01	03		Pemeliharaan Rutin berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Kantor berfungsi dengan baik	Bulukumba	12 Unit	15.000.000,00	DAU
1	01	03	01	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung kantor	Meningkatnya Sarana Perkantoran	Bulukumba	1 Paket	700.000.000,00	DID
1	01	05	02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000,00	

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	01	05	03	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pengetahuan pejabat pemegang eselon	Bulukumba	1 kegiatan	50.000.000,00	DAU
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				150.000.000,00	
1	01	05	03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya sistem pelaporan kinerja SKPD	Bulukumba	1 dokumen laporan	100.000.000,00	DAU
1	01	05	03	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Meningkatnya sistem pelaporan keuangan	Bulukumba	1 dokumen laporan	25.000.000,00	DAU
1	01	05	03	7 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Meningkatnya sistem pelaporan keuangan	Bulukumba	1 dokumen laporan	25.000.000,00	DAU
1	01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini				1.325.000.000,00	
1	1	xx	15	Penambahan ruang kelas sekolah	Bertambahnya ruang kelas sekolah	Bulukumba	3 paket	360.000.000,00	DAK
1	1	xx	15	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya perbaikan bangunan sekolah	Bulukumba	2 paket	240.000.000,00	DAK
1	1	xx	15	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Terlaksananya program PAUD	Bulukumba	1 kegiatan	100.000.000,00	DAU
1	1	xx	15	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Pelatihan pendidikan dan bantuan, serta pendampingan lembaga PAUD	Bulukumba	1 kegiatan	75.000.000,00	DAU
1	1	xx	15	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini	Validasi, Akurasi dan ketersediaan data PAUD	Bulukumba	1 kegiatan	75.000.000,00	DAU
1	1	xx	15	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan organisasi profesi (HIMPAUDI dan GOPTKI) untuk peningkatan mutu PAUD	Bulukumba	1 kegiatan	75.000.000,00	DAU
1	1	xx	15	Bantuan Operasional Pendidikan PAUD (BOP PAUD)	Meningkatnya mutu PAUD	Bulukumba	3 TK Negeri	300.000.000,00	DAK NF
1	1	xx	15	8 Manajemen BOP PAUD	Meningkatnya tata kelola satuan pendidikan PAUD	Bulukumba	12 Bln	100.000.000,00	DAU
1	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				112.078.155.800,00	
1	1	xx	16	Penambahan ruang kelas sekolah	Bertambahnya ruang kelas sekolah SDN dan SMPN	Bulukumba	27 Paket	3.874.481.800,00	DAU /DAK
				Penambahan RKB SD. Neg. No: 179			1 Paket	120.250.000,00	DAU
				Pembangunan Ruang Kelas Baru SD.98			1 Paket	120.250.000,00	DAU
				Pembangunan / Rehab UPT SPF SDN 11			1 Paket	120.250.000,00	DAU
				Penambahan Ruang Kelas SD. 65 Balangriri			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Penambahan Ruang Belajar SDN 241 Barugae			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pembangunan RKB Dua Lantai SDN 37 Palambarae			1 Paket	250.000.000,00	DID
				Penambahan Ruang Belajar SDN 98 Bontomanai			1 Paket	500.000.000,00	DID

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Penambahan ruangan kelas sekolah SDN 337 Mallombong			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Penambahan RKB SDN 312 Sapaya			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pembangunan Ruang Kelas Sekolah SD 339 Dumpu			1 Paket	300.000.000,00	DID
				Penambahan RKB SD 313 Papinjeng			1 Paket	100.000.000,00	DID
				RKB bangunan SD 252 SAPIRI			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pengadaan RKB SDN 192 Tanah Towa			1 Paket	513.731.800,00	DID
				Pembangunan RKB SDN 351 Kawasan			1 Paket	300.000.000,00	DID
				Pembangunan RKB SDN 333 Tibona			1 Paket	200.000.000,00	DID
				Pembangunan RKB SD 341 Batu			1 Paket	200.000.000,00	DID
				Pembangunan RKB SMPN			5 Paket	650.000.000,00	DAK
1	1	xx	16	Penambahan ruang guru sekolah	Bertambahnya ruang guru sekolah SDN		19 Paket	2.680.000.000,00	DAU /DAK
				Kantor SDN 98 Bontomanai			1 Paket	130.000.000,00	DAU
				Kantor SD 252 SAPIRI			1 Paket	150.000.000,00	DID
				Kantor SDN 88 Batukaropa			1 Paket	150.000.000,00	DID
				Kantor SDN 79 Lajae			1 Paket	150.000.000,00	DID
				Pembangunan Ruang Guru SD			10 paket	2.100.000.000,00	DAK
1	1	xx	16	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Tersedianya taman, lapangan upacara (Paving Blok),fasilitas parkir dan Pagar SDN dan SMPN		117 Paket	12.350.000.000,00	DAU/ DID
				Paving Blok SDN 1 Terang-Terang			1 Paket	100.000.000,00	DAU
				Pavin Blok SDN 207 Dampang			1 Paket	100.000.000,00	DAU
				Paving Blok SDN 184			1 Paket	100.000.000,00	DAU
				Paving Blok SD 73 Bulukumpa			1 Paket	100.000.000,00	DAU
				Pavin Blok SDN 238 Mattoangin Tibona			1 Paket	100.000.000,00	DAU
				Pavin Blok SD 280 Lembang Nyora			1 Paket	100.000.000,00	DAU
				Pavin Blok SD 240 Biroro Tanete			1 Paket	100.000.000,00	DAU
				Paving Blok SD 103 Kalimporo			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pavin Blok SDN 153 Tombolo			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Peving Blok SDN 329 Palambarae			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Lanjutan Peving Blok SDN 37 Palambarae			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pavin Blok SD 275 Gattareng			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Paving Blok Sd 230 Palambarae			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Paving Blok SD 39 Bontonyeleng			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Paving Blok SD 206			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pavin blok SDN 266 Toroliya			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Peving Blok SDN 184			1 Paket	100.000.000,00	DID

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Paving Blok SD 201 Garanta			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SD 21 Seppang			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SDN 89 Batukaropa			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SDN 277			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SD 312 Sapaya			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SDN 312 Sapaya			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SD 339 Dumpu			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SD 252 SAPIRI			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SDN 115 Balagana			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SDN 311 Luraya			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving blok SD 108			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving blok SD 251			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving blok SD 309			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving SDN 285 DASSA			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SD No. 244 Salassae			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok sekolah SD 305 Taggentung			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Lanjutan Paving Blok SDN 175 Bulu-bulo			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SDN 333 Tibona			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SDN 304 Batuhulang			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SDN 243 Elle'e (Elle'e)			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SDN 157 Sapolohe			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SDN No. 133 Hila-Hila			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SD 261 Bilamporoa			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SDN 288 Liang-liang			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SDN 67 Loisa			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Paving Blok SDN 334 Binuang			1 Paket	100.000.000,00	DID
	Pagar SDN 11 Kalumeme			1 Paket	100.000.000,00	DAU
	Rehab pagar SD 323 Gantarang			1 Paket	100.000.000,00	DAU
	Pagar SD 182 Rilau Ale			1 Paket	100.000.000,00	DAU
	Pagar SD 6 Kasuara			1 Paket	100.000.000,00	DAU
	Pagar SD 8 Nipa			1 Paket	100.000.000,00	DAU
	Pagar SDN 11 Kalumeme			1 Paket	100.000.000,00	DAU
	Pagar SDN 275 Gantarang			1 Paket	100.000.000,00	DAU
	Rehabilitas Pagar Sekolah SD 37 Palambarae			1 Paket	100.000.000,00	DAU
	Rehabilitas Pagar Sekolah SD 34 Bialo			1 Paket	100.000.000,00	DAU
	Pagar SDN 86 Longi			1 Paket	100.000.000,00	DAU
	Pagar SD 240 Harue.			1 Paket	100.000.000,00	DAU

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pagar SD 238 Mattoangin Tibona			1 Paket	100.000.000,00	DAU
				Pagar SD 280 Lembang Nyora (Lanjutan)			1 Paket	100.000.000,00	DAU
				Pagar SD 210 (Lanjutan)			1 Paket	100.000.000,00	DAU
				Pagar SD 240 Biroro Tanete			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SD 187 Bonto manai			1 Paket	100.000.000,00	DID
				PagarSDN 116 Lembanna Kajang			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 149 Tamalala			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 190 Tanah Jaya			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SD 337 Mallombong			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 37 Palambarae			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SD 45 Dampang			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Renovasi pagar di SD 173 Matekko			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SD 229 Gattareng			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SD 299 Lahumbung			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SD 25 Lonrong			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 182 Dannuang			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SD Takkue			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 187 Bontomanai			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 339 Dumpu			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 106 Labojo			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN SD 250 Koli-Koli			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 283 Ganting			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 116			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 216			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SD 215 Dassa			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 285 dassa			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 101 Kajang			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar dan Gerbang SDN 100 CENTRE			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SD 248 Laikang			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 244 Salassae			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar dan Rehab SD 189 Barugae			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 76 taggentung			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 178 Bulu-bulu			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Lanjutan Pagar SD 62 Waepejje			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 333 Tibona (Bulo Sanni)			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 304 Batuhulang (Bontomanai)			1 Paket	100.000.000,00	DID

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pagar SDN 243 Elle'e (Elle'e)			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 219 Bakung-Bakung			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SD No. 143 Para-para			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SD 320 Maakkiung			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 194 Macinna			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 119 Karassing			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SD 317 Bae'a			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SD 126 Rabanna			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SD 256 Kajang-Kajang			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SD 130 Bontobeang			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SDN 86 Longi			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SMP 14 Bulukumpa.			1 Paket	100.000.000,00	DAU
				Pagar SMP 43 Bulukumba			1 Paket	100.000.000,00	DAU
				Paving Blok SMPN 10 Bulukuba			1 Paket	100.000.000,00	DAU
				Pagar SMP 39 Bulukumba			1 Paket	150.000.000,00	DID
				Lanjutan Pagar SMPN 47 Bulukumba			1 Paket	150.000.000,00	DID
				Pagar Sekolah SMP Satap			1 Paket	150.000.000,00	DID
				Pagar SMP 5 Bulukumba			1 Paket	150.000.000,00	DID
				Paving Blok SMPN 33 Bulukumba			1 Paket	150.000.000,00	DID
				Paving blok SMP 14 Bulukumba			1 Paket	150.000.000,00	DID
				Paving Blok SMP 44 Sapobonto			1 Paket	150.000.000,00	DID
				Paving Blok SMPN 15 Bulukumba			1 Paket	150.000.000,00	DID
				Paving Block SMPN 21 Bulukumba			1 Paket	300.000.000,00	DID
				Paving blok SMP 18 Bulukumba			1 Paket	150.000.000,00	DID
				Pagar SMP 46 Bulukumba			1 Paket	100.000.000,00	DID
				Pagar SMP 27 Bulukumba			1 Paket	100.000.000,00	DID
1	1	xx	16	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Tersedianya ruang unit kesehatan sekolah SDN dan SMPN		15 Paket	2.432.500.000,00	DAU /DAK
					UKS SDN 116 Usa		15 Paket	1.042.500.000,00	DAU
					Pembangunan Ruang UKS SD dan SMPN		20 paket	1.390.000.000,00	DAK
1	1	xx	16	Pembangunan perpustakaan sekolah	Trsedianya perpustakaan sekolah SDN dan SMPN		23 Paket	5.600.000.000,00	DAU /DAK/DID
					Pembangunan Gedung Perpustakaan SD 240 Biroro Tanete		1 Paket	150.000.000,00	DAU
					Pembangunan Gedung Perpustakaan SD 149 Tamalala		1 Paket	150.000.000,00	DAU

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
						Perpustakaan SD 200 Dannuang		1 Paket	150.000.000,00	DID
						Perpustakaan SD 106 Labojo		1 Paket	150.000.000,00	DID
						Perpustakaan SD 252 SAPIRI		1 Paket	150.000.000,00	DID
						Perpustakaan SDN 285 DASSA		1 Paket	150.000.000,00	DID
						Perpustakaan 248		1 Paket	150.000.000,00	DID
						Perpustakaan SDN 238 Mattoanging		1 Paket	150.000.000,00	DID
						Perpustakaan SD 312 Sapaya		1 Paket	150.000.000,00	DID
						Rehab Ruang Perpustakaan SDN 33 Barabba		1 Paket	150.000.000,00	DID
						Perpustakaan SDN 116		1 Paket	150.000.000,00	DID
						Permb.Perpustakaan SD		1 Paket	1.900.000.000,00	DAK
						Perpustakaan SMPN Satap 18 Bulukumba		1 Paket	150.000.000,00	DAU
						Pembangunan Perpustakaan SMPN		10 Paket	1.900.000.000,00	DAK
1	1	xx	16		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya sarana air bersih dan sanitary SDN dan SMPN		30 Paket	500.000.000,00	DID
1	1	xx	16		Pengadaan mebeluer sekolah	Tersedianya mebeluer sekolah SDN dan SMPN		2 Paket	100.000.000,00	DAU
						Penyediaan Mobiler SMP SATAP (Meja dan Kursi)		1 Paket	50.000.000,00	DAU
						Penyediaan Mobiler SMP Satap		1 Paket	50.000.000,00	DAU
1	1	xx	16		Pengadaan sarana mobilitas sekolah	Tersedianya sarana mobilitas sekolah SDN dan SMPN		30 Paket	1.000.000.000,00	DID
1	1	xx	16		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya perbaikan bangunan sekolah SDN dan SMPN		15 Paket	1.500.000.000,00	DAK
1	1	xx	16		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya Perbaikan ruang kelas sekolah SDN dan SMPN		56 Paket	18.666.574.000,00	DAU /DAK
						Rehabilitas Ruangan kelas SD 238 Mattoangin Tibona		1 Paket	120.250.000,00	DAU
						Rehabilitas SD 195 Ekatiro		1 Paket	120.250.000,00	DAU
						Rehabilitasi SDN160 Tarampang		1 Paket	120.250.000,00	DAU
						Rehab Infrastruktur Sekolah (SD 299)		1 Paket	360.750.000,00	DID
						Rehab Gedung Kelas 4,5.6 SDN 89		1 Paket	360.750.000,00	DID
						Rehab Gedung Kelas 4,5.6 SDN 88		1 Paket	240.500.000,00	DID
						Rehab Ruang Kelas SDN 312 Sapaya		1 Paket	360.750.000,00	DID
						Rehabilitasi SD 109 Kajang Keke		1 Paket	240.500.000,00	DID
						Rehab Gedung Kelas SD 108		1 Paket	240.500.000,00	DID
						Rehab Gedung Kelas SD 111 Kassibuta		1 Paket	240.500.000,00	DID
						Rehab Berat SD 215 Dassa		1 Paket	240.500.000,00	DID
						Rehab Gedung SDN 285 DASSA		1 Paket	240.500.000,00	DID
						Sanitasi dan Rehab Gedung SDN 100 CENTRE		1 Paket	240.500.000,00	DID

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
					Rehabilitas gedung SDN 74 Tamarellang		1 Paket	240.500.000,00	DID
					Rehab 3 RK SD 117 Lembangtunbu		1 Paket	360.750.000,00	DID
					Rehab 3 RK SDN 33 Barabba		1 Paket	360.750.000,00	DID
					Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDN DAK		10 Paket	9.178.074.000,00	DAK
					Rehab. sedang/berat ruang kelas SMPN DAK		30 Paket	5.400.000.000,00	DAK
1	1	xx	16	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Terlaksananya Perbaikan ruang guru sekolah SDN dan SMPN		20 Paket	3.200.000.000,00	DAK
					Rehab 15 Ruang Guru SD		15 Paket	1.950.000.000,00	DAK
					Rehab 15 Ruang Guru SD		5 Paket	1.250.000.000,00	DAK
1	1	xx	16	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	Terlaksananya Perbaikan laboratorium dan praktikum sekolah SDN dan SMPN		5 Paket	1.500.000.000,00	DAK
					Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah SMPN		5 Paket	1.500.000.000,00	DAK
1	1	xx	16	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Terlaksananya perbaikan perpustakaan sekolah SDN dan SMPN		5 Paket	500.000.000,00	DAU /DAK/DID
1	1	xx	16	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB	Bertambahnya ruang kelas baru SMP dan SMPLB		5 Paket	650.000.000,00	DAK
1	1	xx	16	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta persantren salfiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Meningkatnya mutu pendidikan ditiap satuan pendidikan		1 kegiatan	54.424.600.000,00	DAK NF
1	1	xx	16	Penyediaan Biaya manajemen BOS	Meningkatnya pengelolaan dan administrasi dana bos		1 kegiatan	300.000.000,00	DAU
1	1	xx	16	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Terselenggaranya seleksi Lomba OSN, O2SN, FLSN dan Lomba Debat Bahasa Inggris bagi SD/MI dan SMP/MTs		8 kegiatan	100.000.000,00	DAU
1	1	xx	16	Pelaksanaan Ujian Sekolah SMP/MTs dan UASBNSD	Terlaksananya ujian sekolah		1 kegiatan	100.000.000,00	DAU
1	1	xx	16	Penyediaan operasional Program bantuan siswa miskin PIP SD dan SMP	Terlaksananya penyelenggaraan admnistrasi kegiatan		1 kegiatan	100.000.000,00	DAU
1	1	xx	16	9 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sarana dan penunjang belajar	Terpeliharanya bangunan dan sarana penunjang belajar perpustakaan, kelas dan pagar sekolah SDN dan SMPN		30 Paket	2.500.000.000,00	DAU /DAK/DID
1	01	18		Program Pendidikan Non Formal				3.250.000.000,00	
1	1	xx	18	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Meningkatnya Mutu pendidikan non formal		1 kegiatan	150.000.000,00	DAU

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	1	xx	18	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Meningkatnya pengelolaan pendidikan kursus dan kelembagaan		1 kegiatan	75.000.000,00	DAU
1	1	xx	18	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terlaksanannya program pendidikan keaksaraan (Biaya Manajemen BOP Kesetaraan)		1 kegiatan	250.000.000,00	DAU
1	1	xx	18	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan non formal pada SKB		4 Paket	2.500.000.000,00	DAK
1	1	xx	18	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Validasi, Akurasi dan ketersediaan data keaksaraan		1 kegiatan	75.000.000,00	DAU
1	1	xx	18	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Suksesnya pelaksanaan Apresiasi PAUDNI		1 kegiatan	100.000.000,00	DAU
1	1	xx	18	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Tersedianya kurikulum nasional dan muatan lokal		1 kegiatan	50.000.000,00	DAU
1	1	xx	18	10 Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal	Terlaksananya Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal		1 kegiatan	50.000.000,00	DAU
1	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				805.000.000,00	
1	1	xx	20	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Meningkatnya pelayanan sertifikasi pendidik		1 kegiatan	80.000.000,00	DAU
1	1	xx	20	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Tersedianya asesor guru dan kepala sekolah		1 kegiatan	100.000.000,00	DAU
1	1	xx	20	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Meningkatnya kompetensi pendidik		1 kegiatan	350.000.000,00	DAU
1	1	xx	20	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya kompetensi pendidik		1 kegiatan	100.000.000,00	DAU
1	1	xx	20	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Validasi, Akurasi dan ketersediaan data pendidikan		1 kegiatan	75.000.000,00	DAU
1	1	xx	20	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Kenaikan Pangkat/gol bagi PNS		1 kegiatan	50.000.000,00	DAU
1	1	xx	20	12 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan	Pemerataan guru di Kab. Bulukumba		1 kegiatan	50.000.000,00	DAU
1	1	xx	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				2.450.000.000,00	
1	1	xx	22	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Meningkatnya Pengawasan dan kinerja pelaksanaan pendidikan		1 kegiatan	150.000.000,00	DAU
1	1	xx	22	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Pemberian Beasiswa Mahasiswa S1		1 kegiatan	900.000.000,00	DAU

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	1	xx	22	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan	Meningkatnya pengelolaan dan administrasi dan pelayanan DAK bidang Pendidikan		1 kegiatan	100.000.000,00	DAU
1	1	xx	22	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Bertambahnya pengetahuan di bidang pendidikan		1 kegiatan	350.000.000,00	DAU
1	1	xx	22	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpenuhinya target pelaksanaan kegiatan		1 kegiatan	150.000.000,00	DAU
1	1	xx	22	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Renja SKPD		1 kegiatan	100.000.000,00	DAU
1	1	xx	22	Sosialisasi dan pelatihan Pengembangan Sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)	Validasi, Akurasi, sinkronisasi dan ketersediaan data pendidikan ditingkat satuan pendidikan		1 kegiatan	350.000.000,00	DAU
1	1	xx	22	Sosialisasi dan pelatihan Pengembangan Sistem Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Terlaksananya Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditingkat satuan pendidikan		1 kegiatan	350.000.000,00	DAU
1	17	xx	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				1.350.000.000,00	
1	17	xx	16	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya		1 kegiatan	100.000.000,00	DAU
1	17	xx	16	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Terselenggaranya pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah		1 kegiatan	50.000.000,00	DAU
1	17	xx	16	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Perencanaan pembangunan Museum dan Panggung Kesenian Bulukumba		1 kegiatan	1.000.000.000,00	DAU
1	17	xx	16	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Berkembangnya potensi kebudayaan dan pariwisata		1 kegiatan	50.000.000,00	DAU
1	17	xx	16	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	Terjaganya bahan pustaka melalui Perekaman dan digitalisasi		1 kegiatan	50.000.000,00	DAU
1	17	xx	16	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Pelestraian dan pengembangan hasil karya lokal bernilai ekonomi		1 kegiatan	50.000.000,00	DAU
1	17	xx	16	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	Tersedianya data base sistem informasi sejarah purbakala		1 kegiatan	50.000.000,00	DAU
1	17	xx	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				400.000.000,00	
1	17	xx	17	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terciptanya kesenian dan kebudayaan daerah yang baru		1 kegiatan	50.000.000,00	DAU
1	17	xx	17	Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan	Tersedianya data base sistem informasi bidang kebudayaan		1 kegiatan	50.000.000,00	DAU
1	17	xx	17	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terlaksananya loka karya/seminar dan dialog kebudayaan		1 kegiatan	50.000.000,00	DAU
1	17	xx	17	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya/keikutsertaan dalam festival budaya daerah		1 kegiatan	200.000.000,00	DAU

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	17	xx	17	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	Terselenggaranya Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal		1 kegiatan	50.000.000,00	DAU
1	02	01		DINAS KESEHATAN				216.334.278.200,00	
1	02	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.899.523.620	
1	02	01	01	02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Sarana telepon,air & listrik serta internet lingkup dinkes berfungsi optimal	Dinkes	100%	860.472.000,00	APBD
1	02	01	01	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	meningkatnya kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	Dinkes	100%	102.000.000,00	APBD
1	02	01	01	07 Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Dinkes	100%	171.688.900,00	APBD
1	02	01	01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Meningkatnya kebersihan kantor dalam lingkup Dinkes	Dinkes	12 bln	344.400.000,00	APBD
1	02	01	01	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.	Meningkatnya pemenuhan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Dinkes	100%	10.000.000,00	APBD
1	02	01	01	14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya ketersediaan peralatan rumah tangga lingkup Dinkes	Dinkes	100%	9.000.000,00	APBD
1	02	01	01	18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.	Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam peningkatan upaya kesehatan	Luar Daerah	12 bln	120.962.720,00	APBD
1	02	01	01	19 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Meningkatnya penatausahaan kesekretariatan lingkup Dinkes dan 20 puskesmas	Dinkes	12 bln	281.000.000,00	APBD
1	02	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.				1.209.121.350	
1	02	01	02	07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Meningkatnya perlengkapan kantor lingkup Dinkes	Dinkes	1 paket	75.000.000,00	APBD
1	02	01	02	09 Pengadaan peralatan gedung kantor.	Persentase peralatan kantor yang tersedia	Dinkes	1 paket	51.552.350,00	APBD
1	02	01	02	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor	Dinkes	100%	10.569.000,00	APBD
1	02	01	02	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	Berfungsinya secara optimal kendaraan dinas operasonal	Dinkes	12 unit	150.000.000,00	APBD
1	02	01	02	26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	Perlengkapan gedung kantor terpelihara dengan optimal	Dinkes	100%	12.000.000,00	APBD
1	02	01	02	28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Peralatan gedung kantor terpelihara dengan optimal	Dinkes	100%	10.000.000,00	APBD
1	02	01	02	42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas bangunan Gedung Kantor secara optimal	Gedung Dinkes	1 paket	900.000.000	APBD
1	02	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.				36.167.950	
1	02	01	05	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya jenjang pendidikan dan pelatihan bagi SDM Kesehatan	Dinkes + RS + 20 Puskesmas	160 orang	36.167.950,00	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
						Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan fungsional yang telah mengikuti uji kompetensi untuk naik jenjang jabatan fungsional				
1	02	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				5.637.700	
1	02	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja SKPD	Dinkes	100%	2.625.700,00	APBD
1	02	01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan akhir tahun	Dinkes	100%	3.012.000,00	APBD
1					URUSAN WAJIB					
1	02	01	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				3.064.795.800	
1	02	01	15	01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatnya pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Dinkes	100%	3.032.731.000,00	DAK & APBD
1	02	01	15	05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Meningkatnya penggunaan obat rasional serta mutu pengelolaan obat di Puskesmas dan jaringannya	20 Puskesmas	100%	32.064.800,00	APBD
1	02	01	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat				87.925.684.178	
1	02	01	16	02	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Meningkatnya persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga pada masyarakat	20 Puskesmas	100%	56.372.500,00	DBH-PR
1	02	01	16	03	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Terpenuhinya sarana dan prasarana Puskesmas dalam mengakses pelayanan di masyarakat	20 Puskesmas	100%	22.001.500.000,00	DAK
1	02	01	16	04	Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah	Meningkatnya status kesehatan calon jamaah haji secara optimal	1 Kali	100%	70.176.000,00	DBH-PR
1	02	01	16	05	Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya status gizi ditandai dengan menurunnya kasus gizi kurang/ buruk	20 Puskesmas	100%	150.000.000,00	DBH-PR
1	02	01	16	06	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Adanya dokumen persyaratan BLUD Puskesmas	20 Puskesmas	100%	340.000.000,00	DBH-PR
1	02	01	16	07	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	Meningkatnya pemanfaatan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan terpeliharanya alat kesehatan melalui pengawasan alat kesehatan dan PKRT	20 Puskesmas	100%	100.000.000,00	APBD
1	02	01	16	09	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya efektivitas program desa siaga dalam peningkatan kesehatan masyarakat	10 Kecamatan	100%	31.342.000,00	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	02	01	16	12	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.	Kasus-kasus kegawatduratan tertangani dengan cepat dan tepat	20 Puskesmas	100%	593.280.000,00	APBD
1	02	01	16	14	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Meningkatnya cakupan air bersih/ minum serta gerakan Stop BAB's	20 Puskesmas	100%	63.839.000,00	APBD
1	02	01	16	16	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gratis.	Meningkatnya kepesertaan JKN-KIS dalam upaya universal coverage	20 Puskesmas	100%	22.578.110.000,00	DBHP
1	02	01	16	18	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatnya kinerja petugas dalam upaya pelayanan kesehatan yang paripurna	20 Puskesmas	100%	3.369.120.050,00	APBD
1	02	01	16	20	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	Meningkatnya kualitas manajemen puskesmas	20 Puskesmas	100%	54.812.550,00	APBD
1	02	01	16	24	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Terwujudnya pelaksanaan program JKN yang efektif dan efisien	20 Puskesmas	100%	20.621.194.078,00	DBHP
1	02	01	16	25	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Meningkatnya cakupan pelayanan program luar gedung di Puskesmas dalam upaya penurunan kasus dan masalah kesehatan	20 Puskesmas	100%	17.895.938.000,00	APBN
1	02	01	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan				98.210.400	
1	02	01	17	01	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat dibidang Obat dan Makanan	Terjaminnya kesehatan masyarakat akan keamanan, khasiat dan mutu obat yang beredar	20 Puskesmas	100%	30.000.000,00	APBD
1	02	01	17	02	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	menurunnya kasus keracunan makanan akibat bahan berbahaya	2 Desa	100%	68.210.400,00	APBD
1	02	01	18		Program Pengembangan Obat Asli Indonesia				16.894.050	
1	02	01	18	02	Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alam Indonesia	Meningkatnya pemanfaatan pengobatan tradisional di masyarakat dan sarana kesehatan	20 Puskesmas	100%	16.894.050,00	APBD
1	02	01	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				94.901.550	
1	02	01	19	01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat.	Meningkatnya pemanfaatan media promosi kesehatan	20 Puskesmas	100%	55.555.750,00	APBD
1	02	01	19	02	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat.	Meningkatnya penyuluhan hidup bersih dan sehat	2 Kecamatan	100%	10.230.050,00	APBD
1	02	01	19	03	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	Meningkatnya kemandirian desa siaga serta strata Posyandu dan poskesdes yang lebih tinggi	20 Posyandu	100%	29.115.750,00	APBD
1	02	01	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat				499.800.000	
1	02	01	20	02	Pemberian makanan tambahan dan vitamin	Meningkatnya status gizi masyarakat khususnya pada bayi dan balita	20 Puskesmas	100%	271.900.000,00	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	02	01	20	03	Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, Gaky, Kekurangan Vit. A dan Zat Gizi Mikro Lainnya	Meningkatnya berat badan bayi/ balita KEP serta peningkatan ukuran LILA pada Bumil KEK	20 Puskesmas	100%	227.900.000,00	APBD
1	02	01	21		Program pengembangan Lingkungan Sehat				303.691.300	
1	02	01	21	01	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Tersusunnya dokumen kajian lingkungan sehat untuk pengembangan Sanitasi Lingkungan	10 Kecamatan	100%	92.153.200,00	APBD
1	02	01	21	02	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Persentase meningkatnya lingkungan sehat di Sekolah, TTU dan TPM	10 Kecamatan	100%	64.547.100,00	APBD
1	02	01	21	03	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Adanya penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten untuk menciptakan tatanan Kabupaten Sehat	10 Kecamatan	100%	146.991.000,00	APBD
1	02	01	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				301.570.125	
1	02	01	22	01	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Menurunnya populasi vektor penyebab penyakit	20 Puskesmas	100%	32.700.000	APBD
1	02	01	22	05	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penderita Ispa ditemukan dan diobati, Persentase penderita rabies ditangani sesuai tatalaksana, persentase penderita malaria yang sembuh	20 wilayah Puskesmas	100%	39.701.050	APBD
1	02	01	22	06	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemi	Persentase penderita diare dan kecacangan yang ditangani dan sembuh	20 wilayah Puskesmas	100%	20.410.000	APBD
1	02	01	22	08	Peningkatan Imunisasi	Menurunnya angka kesakitan kecacatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	136 Desa	100%	83.157.150	APBD
1	02	01	22	09	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan wabah	Persentase Meningkatnya sistem surveilance epidemiologi dan KLB dapat tertangani <24 jam	136 Desa	100%	15.879.900	APBD
1	02	01	22	10	Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit)	Terkonfirmasi status HIV-Aids pada populasi kunci dan populasi berisiko	20 wilayah Puskesmas	100%	37.164.000	APBD
1	02	01	22	12	Penanggulangan penyakit TB Paru	Persentase penurunan angka kesakitan & kematian penyakit TB Paru menjadi 2,1 per 1000 penduduk per tahun	20 Puskesmas	100%	23.948.000	APBD
1	02	01	22	13	Penanggulangan penyakit kusta	Persentase penurunan Prevalensi penyakit kusta	20 Puskesmas	100%	48.610.025	APBD
1	02	01	23		Program Standarisasi pelayanan Kesehatan				1.272.765.252	
1	02	01	23	01	Penyusunan Standar Kesehatan.	Adanya dokumen maklumat layanan kesehatan di puskesmas	4 Puskesmas	100%	11.223.950	APBD
1	02	01	23	02	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan.	Persentase puskesmas berprestas	4 Puskesmas	100%	35.304.650	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	02	01	23	03	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan.	Persentase peningkatan alur komunikasi data serta persentase puskesmas yang menyusun buku profil kesehatan	Dinkes	100%	54.425.480	APBD
1	02	01	23	06	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.	Persentase capaian program kesehatan yang terlaksana	Dinkes	100%	50.000.000	APBD
1	02	01	23	09	Akreditasi Puskesmas	Adanya dokumen hasil pendampingan dan survei re-akreditasi	9 Puskesmas	7	1.057.926.000	APBD
1	02	01	23	10	Lomba /Seleksi Tenaga Kesehatan berprestasi	Persentase tersedianya tenaga kesehatan di puskesmas dan meningkatnya profesionalisme tenaga kesehatan teladan di dalam memberikan pelayanan kesehatan	20 Puskesmas	20	63.885.172	APBD
1	02	01	25		Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas /puskesmas pembantu dan Jaringannya.				3.278.365.000	
1	02	01	25	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas.	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang laik pakai	Dinkes	100%	644.806.000	APBD
1	02	01	25	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang laik pakai	Dinkes	100%	2.633.559.000	DBH-PR
1	02	01	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia				37.611.000	
1	02	01	30	01	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Meningkatnya kesehatan usila dan angka harapan hidup sampai 72, tahun	20 wilayah Puskesmas	100%	11.140.000	APBD
1	02	01	30	03	Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan.	Terbentuknya daerah binaan perkesmas di wilayah kerja puskesmas	20 Puskesmas	100%	26.471.000	APBD
1	02	01	31		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan				86.072.825	
1	02	01	31	01	Pengawasan, Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri	Persentase makanan hasil produksi rumah tangga yang layak & memenuhi Syarat Kesehatan	Dinkes	100%	20.153.000	APBD
1	02	01	31	02	Pengawasan dan Pengendalian keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga	Persentase makanan hasil produksi rumah tangga yang layak & memenuhi Syarat Kesehatan	175 Sarana PRT	100%	31.292.125	APBD
1	02	01	31	03	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restoran	Meningkatnya cakupan TPM laik hygiene sanitasi	80 RM/Restoran	100%	34.627.700	APBD
1	02	01	32		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak				2.515.705.000	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	02	01	32	03	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.	Tercapainya peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir	20 Puskesmas	100%	12.750.000	APBD
1	02	01	32	04	Jaminan Persalinan	Meningkatnya persalinan di sarana pelayanan kesehatan	20 Puskesmas	100%	2.502.955.000	APBD
1	02	01	33		Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa				133.189.100	
1	02	01	33	01	Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	persentase penurunan penderita penyakit jantung dan pembuluh darah	20 Puskesmas	100%	41.881.800	APBD
1	02	01	33	02	Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik	persentase penurunan penderita penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	20 Puskesmas	100%	22.836.000	APBD
1	02	01	33	04	Pengendalian Penyakit Paru Obstruktif Kronik	persentase penurunan penderita penyakit paru obstruktif kronik	20 Puskesmas	100%	24.005.000	APBD
1	02	01	33	5	Pengendalian Penyakit Jiwa, Kesehatan Indera dan Napza	persentase penurunan penderita penyakit Jiwa	136 Desa	100%	44.466.300	APBD
1	02	01	26		Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Paru-paru / Sakit Mata				27.554.572.000	
1	02	01	26	01	Pembangunan rumah sakit		RS	12 Bulan	10.000.000.000	
1	02	01	26	17	Rehabilitasi bangunan rumah sakit		RS	12 Bulan	2.000.000.000	
1	02	01	26	18	Pengadaan Alat-alat Kesehatan rumah sakit		RS	12 Bulan	11.804.572.000	
1	02	01	26		Pengadaan alat kalibrasi dan alat pemeliharaan		RS	12 Bulan	750.000.000	
1	02	01	26		Pengadaan prasarana listrik rumah sakit		RS	12 Bulan	3.000.000.000	
1	02	01	34		Program Pelayanan Kesehatan BLUD		RS		86.000.000.000	
			34	01	Program Pelayanan Kesehatan BLUD		RS	12 Bulan	86.000.000.000	
1	03	01			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				112.472.089.767,00	
1	03	1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				13.253.570.000	
1	03	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik	Terbayarnya penggunaan daya listrik kantor dan PJU	Kec. Ujung Bulu	12 Bln	12.500.000.000	DAU
1	03	1	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya STNK Kendaraan Dinas/operasional	Kec. Ujung Bulu	41 unit	28.000.000	DAU
1	03	1	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi keuangan	Kec. Ujung Bulu	12 Bln	250.670.000	DAU
1	03	1	01	08	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Bersihnya dalam dan luar kantor	Kec. Ujung Bulu	12 Bln	30.000.000	DAU
1	03	1	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Kec. Ujung Bulu	20 item	1.000.000	DAU
1	03	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik kantor	Kec. Ujung Bulu	8 item	2.900.000	DAU

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
1	03	1	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan kantor	Kec. Ujung Bulu	20 item	1.000.000	DAU
1	03	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Kec. Ujung Bulu	100 kali	350.000.000	DAU
1	03	1	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terlaksananya penatausahaan kesekretariatan	Kec. Ujung Bulu	12 Bln	90.000.000	DAU
1	03	1	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				250.800.000	
1	03	1	02	03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gudang penyimpanan aspalt	Dinas PUTR		-	DAU
1	03	1	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasioanal	Kec. Ujung Bulu		-	DAU
1	03	1	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kec. Ujung Bulu		31.500.000	DAU
1	03	1	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur kesekretariatan	Kec. Ujung Bulu		25.300.000	DAU
1	03	1	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Kec. Ujung Bulu		25.000.000	DAU
1	03	1	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan	Kec. Ujung Bulu		14.000.000	DAU
1	03	1	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas / operasional	Kec. Ujung Bulu		75.000.000	DAU
1	03	1	02	28	Peralatan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kec. Ujung Bulu		30.000.000	DAU
1	03	1	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung kantor yang layak	Kec. Ujung Bulu		50.000.000	DAU
1	03	1	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				145.000.000	
1	03	1	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kemampuanASN DPUTR	Dinas PUTR		145.000.000	DAU
1	03	1	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				35.000.000	
1	03	1	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunya laporan keuangan akhir tahun	Dinas PUTR		-	DAU
1	03	1	06	05	Penyusunan program kerja SKPD	Tersusunya dokumen perencanaan	Dinas PUTR		-	
1	03	1	06	07	Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	Tersusunnya dokumen pelaporan	Dinas PUTR		35.000.000	DAU
1	03	1	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya jumlah jalan dan jembatan kondisi mantap			77.930.719.767	
1	03	1	15	01	Perencanaan pembangunan jalan	Jumlah dokumen perencanaan jalan	Dinas PUTR		1.550.000.000	
1	03	1	15	02	Pembangunan Jalan	Terbangunnya jalan kabupaten			25.000.000.000	
					Pembangunan jalan pantai Merpati (Jl. Menuju Jemb. S.Bialo Kel. Bentengenge dan Kel. Bintarore) (lanjutan)		Kec. Ujung Bulu			
					Pembangunan jalan kec. Ujung Bulu (kompleks Akper)		Kec. Ujung Bulu			
					Perintisan dan Perkerasan Papanjaya Desa Lembanna Kec. Kajang		Kec. Kajang			
					Perintisan Jalan Bangkala - Tusera Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Perintisan Jalan Barang II - BUI Lingk. Barang Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Perintisan Jalan Baru Biring Borong Dusun Balagana Desa Tanah Towa Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Perintisan Jalan Baru di Kalumpang Dusun Tombolo Desa Tanah Towa Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Perintisan Jalan Baru Dowa - Limbung Desa Tambangan Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Perintisan Jalan Baru Dusun Balambina Desa Tanah Towa Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Perintisan Jalan Baru Dusun Pangi Desa Tanah Towa Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Perintisan Jalan Baru Tombong Ratu Lingk. Lurayya Kel. Laikang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Perintisan Jalan Jalaya - Daloba Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang		Kec. Kajang		-	
				Perintisan Jalan Karrasaya - Bontonangka Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang		-	
				Perintisan Jalan Karrasaya - Malleleng Desa Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang		-	
				Perintisan Jalan Nanasaya Lingk. Daloba Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang		Kec. Kajang		-	
				Perintisan Jalan Setapak K. Tengah Kassi Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang		Kec. Kajang		-	
				Perintisan Jalan Tubung - Tubung Jalaya Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Perkerasan Jalan Salu - Babalaikang - Salu - Kaluku Lohe Kel. Laikang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Perkerasan jalan Tocidu Desa Mattoanging Kec. Kajang		Kec. Kajang		-	
				Perintisan Jalan Batumenteng Desa Balangtaroang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa		-	
				Perintisan Jalan Desa Baruga Riattang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Perintisan dan Perkerasan Poros Anrang - Somba Palioi Desa Anrang Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Perintisan Jalan Bantilang Desa Bajiminasa Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Perkerasan Jalan Desa Bontoharu Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Perintisan Jalan dan Perkerasan Bijawang Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Perintisan Jalan Dsn Bontoloe Desa Balong Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
					Perintisan Jalan Dsn Bulu Lonrong Desa Lonrong Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
					Perintisan Jalan Pesisir Pantai Dsn Lembang - Kapasa Desa Salemba Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
					Perintisan Jln. Baru di Belakang Kantor Desa Seppang Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
					Perkerasan Jalan Buhung Oroa - Ma'rere Dsn Mattoanging Desa Balleanging Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
					Perkerasan Jalan Dsn Batua Desa Garanta Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
					Perkerasan Jalan Dsn Bontoloe Desa Balong Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
					Perkerasan Jalan Dsn Mattoanging Desa Balleanging Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
					Perkerasan Jalan Dsn Salebboe Desa Padangloang Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
					Perkerasan Jalan Tapampang - Jahun - Jahun Dsn Mattoanging Desa Balleanging Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
					Perkerasan/Perintisan Jalan Lingkar Pabbambaeng Passimbungan Desa Anrihua Kec. Kindang		Kec. Kindang			
					Perkerasan/Perintisan Jln. Tembus Sinjai Pasca Longsor Dsn Tabbuakang Desa Kahayya Kec. Kindang		Kec. Kindang			
					Perintisan Jalan Kindang					
					Perintisan Jalan Tanah Jaya Daloba					
					Pengerasan Bara-Barae Ling.Pattiroang					
					Pengerasan Jalan Buhung Oroa Ke Mare'Re Desa Balleanging					
					Pengerasan Balang Pesoan					
					Pengerasan Dusun Lempongge Desa Sapobonto					
					Pengerasan Jalan Balla Daparae Desa Bonto Bangun					
					Pengerasan Jalan Desabonto Macinna					
					Pengerasan Jalan Kec. Gantarang					
					Pengerasan Jalan Ruas Seppa - Aka-Aka Desa Tambangan					
					Pengerasan Jalan Tarampang Ke Jahun-Jahun					
					Pengerasan Jalan Ujung Tiro Ke Pantai Samboang (Lanjutan)					
					Perencanaan Pembagunan jalan		Kec. Rilau Ale			
					Pengawasan Pembangunan jalan		Kec. Rilau Ale			
1	03	1	15	05	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya jembatan kabupaten			25.700.000.000	

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Jembatan Lingk.Balombessie Kel. Jawi2 Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Ling Bontorihu Kel.Ballasaraja Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Rehab Jembatan Harue- Balumbang Sarajoko Kel.Ballasaraja Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Ballapale Bontorihu Kel.Ballasaraja Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Balleanging-Tamarellang Kel.Ballasaraja Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Ballapale Bontorihu Kel.Ballasaraja Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Jl.Lembangnge Desa Balangpesoang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Rehab Jembatan Jl.Karet Desa Balangpesoang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Rehab Jembatan Bambaungan Desa Balangtaroang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Rehab Jembatan Cilallang Desa Balangtaroang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Rehab Jembatan Batu Menteng Desa Balangtaroang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Rehab Jembatan Bonto Baju Desa Balangtaroang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Kallae Desa sapobonto Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Kindang Desa sapobonto Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan pape Desa sapobonto Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Rehabilitasi Jembatan Pape Desa sapobonto Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Tappalang desa Bontobulaeng Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Rehab Jembatan Sabberaga desa Bulu-Bulu Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Rehab Jembatan Palipi desa Bulu-Bulu Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Salajueng-Jo'jolo - Batu Tujua, Salassae Desa Salassae Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Ma'remme-Palampang Desa Salassae Kec. Bulukumpa (lanjutan)		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Batu Tujua Desa Salassae Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Bolonge -Kalakae Desa Salassae Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Jembatan Batuhulang -Karama Desa Salassae Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Rehab Jembatan Bonto Tangnga-Tobariana Desa Salassae Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Rehab Jembatan Bolonge-Bontoharu Desa Salassae Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Poros Ma'Ganrang - Bukit Madu Desa Bontomangiring Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Ma'janganDesa Bontomangiring Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Pa'liling Elle'e Desa Bontomangiring Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Bontomanai II Desa Bontomangiring Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Desa Bontomangiring Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Poros Bulo Bulo -kupang Desa Bontomangiring Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Kalakae Desa Jojjolo Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Bontoa Desa Jojjolo Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Lajae Desa Jojjolo Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Bippajeng Desa Jojjolo Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Sungai Liku Kukusan Lembangnyora Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Bontosumanga Desa Tibona Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Padang Malabo - Anisia Desa Tibona Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Mattoangin - Tibona Desa Tibona Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Bonto sumanga Desa Tibona Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Sumpang Ale-Sinjai Desa Tibona Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Bontorannu Desa Batulohe Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Jembatan Salodua Desa Baruga Riattang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Duicker Kel. Jawi2 Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Duicker Kel.Ballasaraja Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Duicker Tamarellang Kel.Ballasaraja Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Duicker Lempangan Kel.Ballasaraja Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Duicker Dusun Manyaha Desa Kambuno Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
	Duicker Balangtaroang Desa Balangtaroang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
	Duicker Desa Jojjolo Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
	Duicker Batulohe desa Batulohe Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
	Duicker Lahola Kel. Tanuntung Kec. Herlang		Kec. Herlang			
	Duicker Poros Toku Ke SMPN 28 Bulukumba Kel. Tanuntung Kec. Herlang		Kec. Herlang			
	Jembatan Jalan Langsung Desa Karama Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
	Jembatan Jalan Pendidikan Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
	Jembatan Balla-Daparae Buttakeke Desa Bontobangun Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
	Jembatan Batu Leppa Desa Bontomate'ne Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
	Jembatan Jl. A. Pattitingi Kel. Palampang Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
	Jembatan Bontosunggu-Bentenge Desa Bontoharu Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
	Jembatan Ruas Pangi2 Desa Swatani Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
	Rehab Jembatan Balantien Siknon Desa Bonto Bangun Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
	Rehab Jembatan Jl. Lambara Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
	Jembatan Savana Desa Bontomacinna Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
	Jembatan dsn Karampuang Desa Bukit Tinggi Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
	Jembatan Tokka Kel. Jalanjang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
	Jembatan Dusun Makbar Desa Bontomacinna Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
	Jembatan Kampung Baru Desa Bontomacinna Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
	Jembatan Batulonggae Desa Bontomasila Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
	Jembatan di Paggentungan Desa Padang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
	Jembatan Desa Gattareng - Desa Benteng Gantarang		Kec. Gantarang			
	Jembatan Baruttunge Dsn Bua Desa Paenre Lompoe Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
	Jembatan Tanjongnge Desa Bukit Harapan Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Jembatan Jalan Pahlawan Dusun Jokka Desa Bontonyeleng Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Jembatan Jalan Tuli III Dusun Paobeccengnge Desa Bontonyeleng Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				jembatan Dusun Macinna Desa Polewali Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Jembatan Dusun lajae Desa Polewali Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Jembatan Dusun Ponci Desa Polewali Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Jembatan Borong Loe Tengah Desa Benteng Gantarang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Jembatan Bonto Bulaeng Desa Benteng Gantarang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Jembatan Lahumbung Desa Benteng Gantarang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Jembatan Polewali Desa Palambarae Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Duicker Kel. Mariorennu Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Duicker dsn parapoe Desa Bontomasila Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Duicker Paobeccengnge Desa Bontonyeleng Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Duicker Likukorong Desa Bontonyeleng Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Duicker Jokka Desa Bontonyeleng Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Duicker Topa'leo Desa Bontonyeleng Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Duicker Seka Desa Bontonyeleng Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Duicker Ponci Desa Taccorong Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Duicker Koko Loangnge Desa Taccorong Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Duicker Borong Kaluku'e Desa Taccorong Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Duicker Desa Polewali Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Duicker Jalan Hijau dsn Bonto walie Desa Polewali Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Duicker Dsn Basokeng Desa Dwitiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Duicker di Kampis Kel. Ekatiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Duicker Hila-hila Kel. Ekatiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Duicker Jatia Desa Bontotangnga Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Duicker Bontotangnga Desa Bontotangnga Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
	Duicker Depan SD 346 Timbula Desa Bontotangnga Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
	Duicker Timbula Desa Bontotangnga Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
	Rehab Jembatan Sumur Panjang Dato Tiro Hila - Hila Desa Ekatiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
	Rehab Jembatan Desa Pantama Kec. Kajang		Kec. Kajang			
	Rehab Jembatan Seppa Jampang Desa Tambangan Kec. Kajang		Kec. Kajang			
	Rehabilitasi Jembatan Tamalaju - Bungaya Desa Bontorannu Kec. Kajang		Kec. Kajang			
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Jannaya - Bungaya Desa Lembanna Kec. Kajang		Kec. Kajang			
	Rehab Jembatan Bontomanai - Bulu Sanni Desa Bontomangiring Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
	Rehab Jembatan Sabberaga Desa Bulu - Bulu Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
	Rehabilitasi Jembatan Jl. Lambara Desa Bontomai Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
	Rehabilitasi Jembatan Galung Boddong Desa Bontolohe Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
	Rehab Jembatan Harue- Balumbang Sarajoko Kel.Ballasaraja Kec. Bulukumpa		Kec. Ujung Loe			
	Duicker Pao Mittae Karassing					
	Duicker Polewali					
	Duicker S. Parman-Jl. Mappijalan Loka (Rehabilitasi)					
	Duicker Batu Susung Karassing					
	Duicker Desa Balon-Sapiri Pangka Balleanging					
	Duicker Di Dusun Ukke'E Taccorong					
	Duicker Jl. Durian Loka					
	Jembatan Balampesoan Palangka					
	Jembatan Desa Malleleng- Desa Lembanna					
	Jembatan Jalanjang					
	Jembatan Poros Kapasa-Paranyelling Desa Salemba					
	Jembatan Sungai Liku Kukusan Lembangnyora Bonto Minasa					
	Jembatan Balombassie Jawi-Jawi					
	Jembatan Benteng Paleoi Garuntungan					

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
					Jembatan Bonto Bulaeng Tahap Ii (Dua)					
					Jembatan Bontomatene Tahap Ii (Dua)					
					Jembatan Cobbu Desa Balangtaroang					
					Jembatan Dusun Bippajeng Jojjolo					
					Jembatan Dusun Bontokamase Jojjolo					
					Jembatan Dusun Lajae Jojjolo					
					Jembatan Dusun Lembang Jojjolo					
					Jembatan Jl. Cengkeh Tahap Ii (Dua)					
					Jembatan Kacibo Desa Balong					
					Jembatan Pabbolong Desa Bonto Bulaeng					
					Jembatan Pangi-Pangi Swatani					
					Jembatan Paranglohe Pammangkulu (Rehabilitasi)					
					Jembatan Penghubung Bonto Macinna Sampai Bonto Masila					
					Jembatan Penghubung Kecamatan Pataro					
					Jembatan Perbatasan Desa Sopa Menuju Desa Balibo					
					Jembatan Salo Dua Kaseseng (Pelebaran)					
					Jembatan Sapanang Bonto Macinna					
					Jembatan Sungai Parigi Dua Dusun Pasimbungan Balibo					
1	03	1	15	09	Peningkatan Jalan					
					Peningkatan Jalan DAK /DAU	Meningkatnya kapasitas dan struktur jalan			25.680.719.767	
					Tarampang - Ara		Bonto Bahari			
					Tarampang - Lemo-Lemo		Bonto Bahari			
					Karampuang - Lemo-Lemo		Bonto Bahari			
					Benjala - Lotong-Lotong		Bonto Bahari			
					Ara - Mandala Ria		Bonto Bahari			
					Kasuso - Darubia		Bonto Bahari			
					Pembuatan Perahu - Kaluku Bodoa - Kantor Camat		Bonto Bahari			
					Patonpongan - Limbua		Bonto Bahari			
					Tarampang - Pasar Lama		Bonto Bahari			
					Pasaraya Baru - Sapo		Bonto Bahari			
					Biralohé - Karampuang		Bonto Bahari			
					Tanetang - Buleng		Bonto Bahari			
					Tanetang - Maluha		Bonto Bahari			
					Tabuntuleng - Pasilohe		Bonto Bahari			
					Bontona - Maruegi		Bonto Bahari			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Jalan Dalam Kelurahan Sapolohe		Bonto Bahari			
				Jalan Dalam Kelurahan Benjala		Bonto Bahari			
				Jalan Dalam Kelurahan Tanahberu		Bonto Bahari			
				Jalan Dalam Kelurahan Tanahlemo		Bonto Bahari			
				Karampuang - Hila-Hila		Bonto Bahari, Bontotiro			
				Tarapang - Salo Bundang		Bonto Bahari,Bonto Tiro			
				Jalan Dalam Kelurahan Eka Tiro		Bonto Tiro			
				Jalan Dalam Kelurahan Buhung Bundang		Bonto Tiro			
				Bonto Tangnga - Hila-Hila		Bontotiro			
				Sakui Kui - Kalumpang		Bontotiro			
				Ere Lebu - Para-Para		Bontotiro			
				Tamalanrea - Batang		Bontotiro			
				Hila-Hila - Basokeng		Bontotiro			
				Hila-Hila - Para-Para		Bontotiro			
				Jatia - Sattulua		Bontotiro			
				Salo Bundang - Sattulua Batang		Bontotiro			
				Salu-Salu - Basokeng		Bontotiro			
				Buhung Lantang - Caramming		Bontotiro			
				Tamalala - Pasar Batang		Bontotiro			
				Bonto Barua - Manyampa		Bontotiro			
				Erelebu - Pattiroang Pakubalaho		Bontotiro			
				Buhung Bundang - Pattiroang		Bontotiro			
				Bontotangnga - Tulekko		Bontotiro			
				Kalumpang - Masuli'Na		Bontotiro			
				Caramming - Lamanda		Bontotiro			
				Pattompongan - Parmaisaile		Bontotiro			
				Buhunglantang - Dohung		Bontotiro			
				Limbia - Samakkore		Bontotiro			
				Timbula - Borong Tarampang		Bontotiro			
				Borong Tarampang - Bontobulaeng		Bontotiro			
				Borong - Salo		Bontotiro			
				Basokeng - Bonto Kamase		Bontotiro			
				Bungaya - Bontopuang		Bontotiro			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Bonto Tangga - Dongi		Bontotiro,Ujung Loe			
				Annisia - Jojjolo		Bulukumpa			
				Bulo-Bulo - Sapobonto		Bulukumpa			
				Wae Pejje - Assipetungge		Bulukumpa			
				Tanete - Balangtaroang Pape'E		Bulukumpa			
				T. Pahlawan - Tanete - Tibona		Bulukumpa			
				Balangriri - Tibona		Bulukumpa			
				Cilallang - Assipettunge		Bulukumpa			
				Kaseseng - Assipettunge		Bulukumpa			
				Harue - Salo Dua		Bulukumpa			
				Cilallang - Sapobonto		Bulukumpa			
				Balangtaroang - Sapobonto		Bulukumpa			
				Munte - Inru' Lamung		Bulukumpa			
				Temba - Assipettunge		Bulukumpa			
				Balangtaroang - Hulo		Bulukumpa			
				Leppang-Leppang - Lembang Nyoro		Bulukumpa			
				Tibona - Mattoanging		Bulukumpa			
				Sapobessi - Salassae		Bulukumpa			
				Balangriri - Bontoa		Bulukumpa			
				Balla Saraja - Tamarellang		Bulukumpa			
				Biroro - Jl. Langsung Tanete		Bulukumpa			
				Panololo - Batukarambu		Bulukumpa			
				Bontoa - Balihuko		Bulukumpa			
				Lembang - Bonto Kamase		Bulukumpa			
				Balla Tinggia - Batukarambu		Bulukumpa			
				Balangriri - Tampalisu		Bulukumpa			
				Batuhulang Bukit Madu		Bulukumpa			
				Balumbung - Batutujua		Bulukumpa			
				Kampung Baru - Pattiroang		Bulukumpa			
				Mattoanging - Batas Sinjai		Bulukumpa			
				Kampung Baru - Mattoanging		Bulukumpa			
				Tibona - Bonto Sumanga		Bulukumpa			
				Buhungtellang - Batas Sinjai		Bulukumpa			
				Tibona - Padang Malabo		Bulukumpa			
				Biroro - Tappalang		Bulukumpa			
				Sabberaga - Bontobaju		Bulukumpa			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Bontobaju - Kaseseng		Bulukumpa			
				Serre - Pumpikatu		Bulukumpa			
				Kaseseng - Kambuno		Bulukumpa			
				Jalan Dalam Kelurahan Jawi-Jawi		Bulukumpa			
				Jalan Dalam Kelurahan Tanete		Bulukumpa			
				Jalan Dalam Kelurahan Ballasaraja		Bulukumpa			
				Kampung Baru - Kareppekang		Gantarang			
				Sopa - Bontonyeleng		Gantarang			
				Bicari - Uluparang		Gantarang			
				Bola Cippe - Bonto Sunggu		Gantarang			
				Kasuara - Borong Rappoa		Gantarang			
				Sapiri - Gattareng		Gantarang			
				Palimmassang - Dampang		Gantarang			
				Bonto Macinna - Jepuru		Gantarang			
				Batu Ara - Malewang		Gantarang			
				Kampung Baru - Padi		Gantarang			
				Dampang - Bontorita		Gantarang			
				Bonto Sunggu - Bonto Ulu		Gantarang			
				Kamangi - Lassang-Lassang		Gantarang			
				Kampung Baru - Gusungnge		Gantarang			
				Punjutanah - Karampuang		Gantarang			
				Mode - Bonto Tanae		Gantarang			
				Bonto Sunggu - Lembang		Gantarang			
				Ompoa - Bontorita		Gantarang			
				Pesantren - Ponci		Gantarang			
				Bontomasila - Kalibong Aloe		Gantarang			
				Bontonyeleng - Bangkengbuki		Gantarang			
				Bontoraja - Benteng Gattareng		Gantarang			
				Btn Bonto Kamase - Bocco-Boccoe		Gantarang			
				Jalanjang - Parapoe		Gantarang			
				Mannaungi - Dauleng Batas Bantaeng		Gantarang			
				Ponci - Tabbuttu		Gantarang			
				Dusuru' - Bonto Tanae		Gantarang			
				Taccorong - Panggala		Gantarang			
				Mariorennu - Pundoli		Gantarang			
				Biringkalapa - Celleng		Gantarang			DAU
				Masarang - Mannaungi		Gantarang			

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Barabba - Batulonggae		Gantarang			
	Lembange - Tpa		Gantarang			
	Jalan Dalam Kelurahan Mariorennu		Gantarang			
	Jalan Dalam Kelurahan Jalanjang		Gantarang			
	Jalan Dalam Kelurahan Matteko		Gantarang			
	Karassing - Kupang		Herlang			
	Batuasang - Tanuntung		Herlang			
	Bonto Beang - Turungan Beru		Herlang			
	Gunturu - Tanuntung		Herlang			
	Gunturu - Bajange Dajo		Herlang			
	Singa - Borong		Herlang			
	Bonto Tangnga - Bonto Barua		Herlang			
	Durian - Dajo		Herlang			
	Tanuntung - Alorang		Herlang			
	Tanuntung - Laloha		Herlang			
	Borong - Sattulua		Herlang			
	Lassanru - Pattonga		Herlang			
	Rambanna - Ereingung		Herlang			
	Gunturu - Salo'Bai		Herlang			
	Macinna - Parang Loe		Herlang			
	Macinna - Kodiang Keke		Herlang			
	Turungan Beru - Dajo		Herlang			
	Salibang - Batu Tiroa		Herlang			
	Paorembaya - Tombolo		Herlang			
	Bajang - Kaleleng		Herlang			
	Jalan Dalam Kelurahan Bontokamase		Herlang			
	Jalan Dalam Kelurahan Tanuntung		Herlang			
	Tanuntung - Basokeng		Herlang, Bontotiro			
	Tanah Jaya - Laikang		Kajang			
	Mattoanging - Pantama		Kajang			
	Kassi Buta - Pataro		Kajang			
	Tuboga - Tana Toa		Kajang			
	Tana Toa - Maccini		Kajang			
	Barang I - Laikang		Kajang			
	Barang li - Usa		Kajang			
	Tanah Jaya - Sonra		Kajang			

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Panalolo - Balangsiknong		Kajang			
	Arajang - Lembang Lohe		Kajang			
	Bontorannu - Lembanna		Kajang			
	Kassipute - Pantai Wisata		Kajang			
	Na'Nasayya - Binanga Eja		Kajang			
	Pattiroang - Sapanang		Kajang			
	Pattonga - Monroa		Kajang			
	Takkalaya - Dumpu		Kajang			
	Paeka - Bontoa		Kajang			
	Kaneka - Tupare		Kajang			
	Jannaya - Lembanna		Kajang			
	Kaleleng - Laikang		Kajang			
	Jalayya - Daloba		Kajang			
	Arajang Tanetea		Kajang			
	Jampang - Lembanna		Kajang			
	Lembanna - Kajuara		Kajang			
	Batusang - Kosang		Kajang			
	Bentengriaja - Patihi		Kajang			
	Patihi - Batas Sinjai		Kajang			
	A'Nisia - Patihi		Kajang			
	Jalan Dalam Kelurahan Laikang		Kajang			
	Jalan Dalam Kelurahan Tanah Jaya		Kajang			
	Bontorannu - Dampang Kayu		Kajang, Herlang, Ujung Loe			
	Palioi - Bansalaia		Kindang			
	Borong Rappoa - Kindang		Kindang			
	Borongrappoa - Asayya		Kindang			
	Dampang - Tujuang		Kindang			
	Palioi - Uluparang		Kindang			
	Pattalasang - Baturapa		Kindang			
	Balangdidi - Bontorita		Kindang			
	Cempadidie - Pa'Baengbaeng		Kindang			
	Ulugalung - Bajiminasa		Kindang			
	Balangdidi - Borong Rappoa		Kindang			
	Cilibo Bungayya		Kindang			
	Matterodeceng - Tabbuakkang		Kindang			
	Jalan Dalam Kelurahan Borong Rappoa		Kindang			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Batu Karopa - Kampung Baru		Kindang			
				Palampang - Bontobulaeng		Rilau Ale			
				Bontomanai - Kindang		Rilau Ale			
				Katangka - Lappecu		Rilau Ale			
				Palampang - Sapepe		Rilau Ale			
				Bontomanai - Seppang		Rilau Ale			
				Palampang - Palangisang		Rilau Ale			
				Katappo - Balimbing		Rilau Ale			
				Bonto Bulaeng - Longi		Rilau Ale			
				Ganjenge - Talle-Talle		Rilau Ale			
				Pangie - Bajiminasa		Rilau Ale			
				Swatani - Pangi-Pangi		Rilau Ale			
				Bontomanai - Talle-Talle		Rilau Ale			
				Katangka - Bonto Haru		Rilau Ale			
				Bulo Lohe - Smp 3 Bontomanai		Rilau Ale			
				Parukku - Talle-Talle		Rilau Ale			
				Bontomanai - Ulugalung		Rilau Ale			
				Sapepe - Pandang-Pandang		Rilau Ale			
				Panaikang - Galung Boddong		Rilau Ale			
				Palampang - Masagena		Rilau Ale			
				Palampang - Mapparahu		Rilau Ale			
				Bontobangun - Pangngalloang		Rilau Ale			
				Bontobangun - Jonjoro		Rilau Ale			
				Jalan Dalam Kelurahan Palampang		Rilau Ale			
				Ganjenge - Ujung Loe		Rilauale			
				Balleanging - Kalikia		Ujung Loe			
				Manjalling - Lumpakeng		Ujung Loe			
				Jana - Dongi		Ujung Loe			
				Batua - Dongi		Ujung Loe			
				Balong - Lonrong		Ujung Loe			
				Mattorowalie - Bodo		Ujung Loe			
				Polewali Lonrong		Ujung Loe			
				Galagang - Bonto Barua		Ujung Loe			
				Kapasa - Paranjalling		Ujung Loe			
				Dannuang - Kapasa		Ujung Loe			
				Lumpakeng - Tanru Tedong		Ujung Loe			
				Seppang - Takkue		Ujung Loe			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Kalicompeng - Kacibo		Ujung Loe			
				Patuku - Mattoanging		Ujung Loe			
				Palatae - Babenang		Ujung Loe			
				Tanrutedong - Patuku		Ujung Loe			
				Jalan Dalam Kelurahan Danuang		Ujung Loe			
				Ulutedong - Dampang Kayu		Ujung Loe			
				Jalan ambo Gia - Bontoa Jojjolo		Ujung Loe, Kajang			
				Pemeliharaan Jalan Ibu Kota Kecamatan Bulukumpa					
				Pemeliharaan Jalan Karapuang Sampai Hila-Hila Kel. Ekatiro					
				Pemeliharaan Jalan Laston Di Desa Bonto Sunggu Ke Desa Bukit Tinggi					
				Pemeliharaan Jalan Laston Ruas Kaseseng Mallenreng Baruga Riatang					
				Pemeliharaan Jalan Masuk RSUD Kec. Ujung Loe					
				Pemeliharaan Jalan Palampang					
				Pemeliharaan Jalan Poros Bonto Tangga Sampai Dongi					
				Pemeliharaan Jalan Poros Salu Sampai Basokeng					
				Pemeliharaan Jalan Ruas Batas Sungai Borong					
				Pemeliharaan Jalan Tamalanrea Sampai Batang					
				Pemeliharaan Jalan Ruas TMP-Tibona					
				Peningkatan Jalan Ak Mappanganro					
				Peningkatan Jalan Bintarore					
				Peningkatan Jalan Caile					
				Peningkatan Jalan Depan Mesjid Al - Asyari					
				Peningkatan Jalan Desa Balleanging					
				Peningkatan Jalan Ela - Ela					
				Peningkatan Jalan Gallarang Bonggong					
				Peningkatan Jalan Ibu Kota Kel. Danuang					
				Peningkatan Jalan Kalumeme					
				Peningkatan Jalan Laston (Dusun Masagena Bt.Sunggu)					
				Peningkatan Jalan Laston Jl. Cengkeh Panasa					
				Peningkatan Jalan Laston Palampang-Masagena (Barana-Panaikang)					
				Peningkatan Jalan Laston Polewali					

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Peningkatan Jalan Laston Ruas Bonto Bangun-Jonjoro (Lanjutan)					
				Peningkatan Jalan Laston Ruas Bulu-Bulo - Kupang (Lanjutan)					
				Peningkatan Jalan Laston Ruas Bulu-Bulo- Sapobonto					
				Peningkatan Jalan Laston Ruas Dalam Bonto Manai					
				Peningkatan Jalan Laston Ruas Ganjenge					
				Peningkatan Jalan Laston Ruas Harue - Salodoa					
				Peningkatan Jalan Laston Ruas Harue-Sabberaga					
				Peningkatan Jalan Laston Ruas Jl. Mangga					
				Peningkatan Jalan Laston Ruas Jl. Mawar					
				Peningkatan Jalan Laston Ruas Kampung Baru					
				Peningkatan Jalan Laston Ruas Kaseseng-Kambuno					
				Peningkatan Jalan Laston Ruas Kota Bonto Manai					
				Peningkatan Jalan Laston Ruas Marana-Kamp.Jera					
				Peningkatan Jalan Laston Ruas Sapepe Pandang-Pandang (Lanjutan)					
				Peningkatan Jalan Laston Ruas Smp 16 (Lanjutan)					
				Peningkatan Jalan Laston Ruas Swatani Pangi-Pangi (Lanjutan)					
				Peningkatan Jalan Laston Sapobessi-Salassae					
				Peningkatan Jalan Loka					
				Peningkatan Jalan Lorong Cacca'E Dusun Salebbo					
				Peningkatan Jalan Pengaspalan					
				Peningkatan Jalan Poros Bijawang Salemba, Dusun Latamba					
				Peningkatan Jalan Poros Butta Pute Limbua					
				Peningkatan Jalan Ruas Buhung Lantang Dohung (Lanjutan)					
				Peningkatan Jalan Ruas Ibu Kota Kecamatan (Belakang Pasar Hila-Hila)					
				Peningkatan Jalan Ruas Salo Sampai Borong					
				Peningkatan Jalan Ruas Tamalala Sampai Pasar Batang					
				Peningkatan Jalan Ruas Tarapang Sampai Salo Bundang					
				Peningkatan Jalan Tanah Kongkong					
				Peningkatan Jalan Terang-Terang					
				Peningkatan Jl. Laston Ruas Palampang					

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Ruas Balangpesoang Kampong Baru Batas Sungai (Lanjutan)					
	Ruas Barugae Tangentun					
	Ruas Batas Intulamun Tanggentu					
	Ruas Batas Sinjai Bulukumba					
	Ruas Bonto Matene Kel. Tanete					
	Ruas Bonto Minasa -Pale					
	Ruas Dauhe Dusun Dauhe- Darubiah					
	Ruas Jalan Pasar Bonto Bahari					
	Ruas Jl. Lanto Dg. Pasewang Tembus Jalan Durian					
	Ruas Kel. Sapolohe					
	Ruas Batulohe-Bontoa (Lanjutan)					
	Ruas Jalan Cendana Caile					
	Ruas jalan Gia Batulohe (Lanjutan)					
	Ruas Jl. A.Haeba Bulo-Bulo					
	Ruas Jl. Cengkeh					
	Ruas Jl. Maruden Dan Jl. Pepaya Tanete					
	Ruas Kacibo					
	Ruas Laston - Dusun Tarassi Jl. Sukamaju					
	Ruas Laston (Lanjutan)					
	Ruas Laston (Kaneka-Tupare)					
	Ruas Laston (Ruas Pattongnga - Monroa)					
	Ruas Laston Ibu Kota					
	Ruas Laston Jl Pettarani Samping Mangnguluang					
	Ruas Laston Jl. Garuda Samping Masjid H. Abd. Karim Tembus Perumaham Tiara 3					
	Ruas Laston Jl. Lanto Dg Pasewang Tembus Jl. Durian					
	Ruas Laston Pengaspalan					
	Ruas Laston Poros Dusun Sapaya					
	Ruas Laston Ruas Annisiah - Jojjolo					
	Ruas Laston Ruas Balumbung - Batutujua					
	Ruas Laston Ruas Batu Menteng Lembang Kahu					
	Ruas Lembang, Kaseseng, Mallenreng					
	Ruas Leppang-Leppang Lembangan (Lanjutan)					
	Ruas Leppang-lppeang -Lembang nyora (Lanjutan)					
	Ruas Marana Bajiminasa					
	Ruas Palampang Marana					

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Ruas Pengaspalan Di Jl. Mawar (Bulu Lohe- Smp 3 Bontomanai)					
	Ruas Poros Tanah Toa- Maccini					
	Ruas Swatani Kacibo					
	Ruas Tanah Jaya Kassi					
	Ruas Temba-Temba Assipettunge (Lanjutan)					
	Pembetonan					
	Pembetonan Bahu Desa Pakubalaho Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
	Pembetonan dsn dwitiro Desa Dwitiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
	Pembetonan Desa Bontotangga Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
	Pembetonan Paulambusu Desa Lamanda Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
	Pembetonan Talumaya -Lamanda Desa Tamalanrea Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
	Pembetonan Tihu Keke - Desa Tamalanrea Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
	Pembetonan Desa Batang (Lanjutan) Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
	Pembetonan Dusun Tukade Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
	Pembetonan Kampung Lojong Bilamporoa Desa Bontotangga Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
	Pembetonan Jalan Masuk Pustu Desa Bontotangga Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
	Pembetonan Bilamporoa Desa Bontotangga Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
	Pembetonan SD 154 Desa Bontotangga Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
	Pembetonan Timbula SMA 11 Bulukumba) Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
	Pembetonan Lingkar Pasar bajang Desa Gunturu Kec. Herlang		Kec. Herlang			
	Pembetonan bassiu Desa Gunturu Kec. Herlang		Kec. Herlang			
	Pembetonan Pammangkulu Desa Gunturu Kec. Herlang		Kec. Herlang			
	Pembetonan karangpuang (Bonto Balle) Desa Gunturu Kec. Herlang		Kec. Herlang			
	Pembetonan Karipo-Mangala Desa Gunturu Kec. Herlang		Kec. Herlang			
	Pembetonan Dusun Bajang Desa Gunturu Kec. Herlang		Kec. Herlang			
	Pembetonan Batu-Dajo Desa Gunturu Kec. Herlang		Kec. Herlang			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembetonan Dusun Salibang Desa Borong Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Dusun Sappang Desa Borong Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Macinna Desa Pataro Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Paranglohe Desa Pataro Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Bontomanumpa Desa Pataro Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Lombongan Desa Pataro Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Kadiengkekea Desa Pataro Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Pattiju Desa Pataro Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Monrokalolo Desa Pataro Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Salobbai - Gunturu Desa Pataro Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Bontomanumpa Desa Pataro Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Babalohe Desa Karassing Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Pallantikang Desa Karassing Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Bontolohe Desa Karassing Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Ranja Kel. Tanuntung Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Buayya Kel. Tanuntung Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Alorang-Pammanogasa Kel. Tanuntung Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Bonto Bainang Desa Tugondeng Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Lahatung Desa Tugondeng Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Dusun Jatia Desa Tugondeng Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Bonto Sura -Jatia Desa Tugondeng Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Jln Kr Karassing Desa Tugondeng Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Bontosura (Lapangan Sepak Bola)Desa Tugondeng		Kec. Herlang			
				Pembetonan Lahatung -Sapi Sapiri Desa Tugondeng Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Jalan Jln Babana Kel. Bontokamase Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Jalan Jln Beang Tubarania - Kel. Bontokamase Kec. Herlang		Kec. Herlang			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembetonan Jalan Jln Bonto Ra'ra Kel. Bontokamase Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Jalan Kel. Bontokamase Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Jalan Botodega Dg Matika Kel. Bontokamase Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Lingk. Nipisi Kel. Bontokamase Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Desa Lembanglohe Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Dsn kassibuta Desa Lembang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan babalaikang Kel. Laikang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan jln Beringin Desa Lembanglohe Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Desa Mattoanging Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Jln SMA Kajang Desa Lembanglohe Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Jalan Tujaji Pungkorong Desa Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Teteaka Desa Tambangan Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Dusun Kassi Lohe Desa Lembang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Jln Soppo Desa Lembanglohe Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Kel. Tanahjaya Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan dsn Bontonangka Desa Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Dusun Lembang Desa Bontobiraeng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Balangsiknong Desa Tambangan Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Dusun Bontoa Desa Lembanna Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Dusun sisihorong Desa Sangkala Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Desa Tambangan Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Desa Bontobiraeng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Desa Batunilamung Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Desa Sangkala Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Desa Lolisang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Dusun Kajuara Desa Bontobiraeng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Bontoa Desa Batunilamung Kec. Kajang		Kec. Kajang			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembetonan limbung Desa Tambangan Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Dusun Lamantang Desa Bontobiraeng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan dsn Bontonangka Desa Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Kel. Laikang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Dusun Ganta Desa Bontobiraeng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan dsn Tupare Desa Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Lingk. Daloba Kel. Tanahjaya Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Tanahjaya Kel. Tanahjaya Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Desa Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Bangsalayya Desa Bangsalayya (Ljt) Kec. Kindang		Kec. Kindang			
				Pembetonan SD 352 na'na Kel. Borongrappoa Kec. Kindang		Kec. Kindang			
				Pembetonan Empa-Palayya-Kec. Kindang		Kec. Kindang			
				Pembetonan Kel. Borongrappoa Kec. Kindang (lanjutan)		Kec. Kindang			
				Pembetonan Lempongge Kel. Borongrappoa Kec. Kindang		Kec. Kindang			
				Pembetoan jln Pattimbuseng I dan II Desa Seppang Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Lingk. Batuloe, Kel. Dannuang Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Desa Garanta Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Allu Desa Tamatto Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Bara'lohe Desa Paccarammengang Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Kailie Desa Manjalling Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Possitanah, Desa Tamatto Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Tamappalalo Desa Tamatto Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Lingk. Appasarengge Kel. Dannuang Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Lingk. Babana Kel. Dannuang Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembetonan Lingk. Paeranyelling Kel. Danjuang Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Desa Seppang Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan dsn batuloe Desa Seppang Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Kalicompeng Desa Balong Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dusun Kapasa Desa Salemba Kec. Ujungloe (lanjt)		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dusun Lembang, Desa Salemba Kec. Ujungloe (lanjt)		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Bomba Kec. Ujungloe		Kec. Ujungloe			
				Pembetonan Dsn Dongi, Desa Manyampa Kec. Ujungloe		Kec. Ujungloe			
				Pembetonan Dsn Luppung, Desa Manyampa Kec. Ujungloe		Kec. Ujungloe			
				Pembetonan Dsn Tanah Eja, Desa Manyampa Kec. Ujungloe		Kec. Ujungloe			
				Pembetonan lingk. Pasaraya lama kel. Sapolohe		Kec. Ujungloe			
				Pembetonan lingk. Sapolohe kel. Sapolohe		Kec. Bontobahari			
				Pembetonan Masuli'na Pinggir Pantai		Kec. Bontobahari			
				Pembetonan Parenren Desa Lembanna		Kec. Bontotiro			
				Pembetonan Mehu-Masuli'na		Kec. Bontotiro			
				Pembetonan bantimurung-Samboang Kel. Ekatiro		Kec. Bontotiro			
				Pembetonan bahu jalan Kel. Tanete Kec. Bulukumpa		Kec. Bontotiro			
				Pembetonan Lingk Biroro Kel. Tanete Kec. Bulukumpa (lanjutan)		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Pattiroang Kelurahan Jawi - Jawi Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Bontorihu Kelurahan Jawi - Jawi Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Balombessie Kelurahan Jawi - Jawi Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Marodeng Kelurahan Jawi - Jawi Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Kelurahan Jawi - Jawi Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Jl. Manggis Kelurahan Jawi - Jawi Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Jl. Hati Murni Kel. Jawi - Jawi Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembetonan jln Masagena Kel. Jawi - Jawi Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Jalan Pattiroang Kel. Jawi - Jawi Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Kelurahan Ballasaraja Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan dsn Buhung Tellang Desa Balangpesoang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Jl. Manggis Desa Balangpesoang Kec. Bulukumpa (lanjt)		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Dusun Tallang Lumu Desa Balangpesoang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Desa Balangpesoang Kec. Bulukumpa (Lanjt)		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Desa Barugae Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Jal. Ambo Jia Desa Kambuno Kec. Bulukumpa (Lanjutan)		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Bandu-Barugae Desa Kambuno Kec. Bulukumpa (Lanjutan)		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Dusun Mannyaha Desa Kambuno Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Temba - Assipettungge Desa Kambuno Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Cilallang - Bontobulaeng Desa Balangtaroang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Bambaungan - Sapobonto Desa Balangtaroang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Jl. Tobarania- Salassae Desa Bulo - Bulo Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Batu Tujua -Mallebbang Desa Salassae Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Bolonge-Dusun Kalakae Desa Salassae Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Batuhulang-Karama Desa Salassae Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Bukit Madu Desa Bontomangiring Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan bonto sua Desa Bontomangiring Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Jl. Kukumba Desa Bontomangiring Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan saukang lembang Desa Bontomangiring Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Mallebbang Desa Jojjolo Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembetonan Lembang Desa Jojjolo Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Balumbang Desa Jojjolo Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Bontokamase Desa Jojjolo Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Jl. Kampong Toa Desa Jojjolo Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Keramat - Bontoa Desa Jojjolo Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Lembang (Batu - Batua) Desa Jojjolo Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Pala - Palae Ballatinggia Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Jl. Petai Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Buhung Tellue Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Jalan Lompo Gia Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Ballatinggia Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Jl pendidikan Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Jl.Taqwa Ulugalung Desa Tibona Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Puang Lonsang Desa Tibona Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Jl. Abd Malik Desa Tibona Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Jl.Puang Tenri Desa Tibona Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Tibona -Mattoanging Desa Tibona Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Tibona - Bolaperringnge Desa Tibona Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Tibona - dusun Ulugalung Desa Tibona Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Botulohe Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Bontoa Botulohe Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Pembetonan Jl.Pariwisata Mallenreng Desa Baruga Riattang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				pembetonan Kaseseng-Mallenreng Desa Baruga Riattang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembetonan Jl. Bonto Malengu Kel. Jalanjang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Pembetonan Jln. Samping Kapas (Lanjutan) Kel. Jalanjang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Pembetonan Gusunge Dalam Kel. Jalanjang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Pembetonan Borong Jatie Kel. Jalanjang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Pembetonan Sapiri Riataang Kel. Jalanjang Kec. Gantarang (lanjt)		Kec. Gantarang			
				Pembetonan Jln. Bonto Malengu Kel. Jalanjang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Pembetonan Jln. Andi Pasarr Petta Tanra IV Kel. Jalanjang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Pembetonan Jln. Samping Kapas (Lanjutan) Kel. Jalanjang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Pembetonan Jln. Bakukung Kel. Jalanjang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Pembetonan Panyutanah Kel. Jalanjang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Pembetonan Lappana Ajuarae Kel. Jalanjang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Pembetonan Kel. Mariorennu Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Pembetonan Masjid Jami Baburrahman Kel. Mariorennu Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Pembetonan BTN Somba V Desa Paenre Lompoe Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Pembetonan dusun paobeccengnge Desa Bontonyeleng Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Pembetonan dusun paobeccengnge Desa Bontonyeleng Kec. Gantarang (lanjt)		Kec. Gantarang			
				Pembetonan Ke Jembatan Dusun Bukit Asri Desa Polewali Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Pembetonan Jl.Jawi-jawi Dusun Lajae		Kec. Gantarang			
				Pembetonan Desa Polewali Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Pembetonan dusun Kirasa Desa Palambarae Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Pembetonan jalan Pao Jawae Desa Palambarae Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
				Pembetonan Lingkar Pasar Bassiu-Bajang Desa Gunturu Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Poros bassiu-kaleleng Desa Gunturu Kec. Herlang		Kec. Herlang			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembetonan Poros Pammangkulu-Macinna Desa Gunturu Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Poros jalan Karangpuang (Bonto Balle) Desa Gunturu Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Lingkar Karipo-Mangala Desa Gunturu Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Lingkar Dusun Bajang Desa Gunturu Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Dusun Borong Desa Borong Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Dusun Sappang Desa Borong Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Macinna Ke Pallamassang Desa Pataro Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Bontomanumpa Ke Paranglohe Desa Pataro Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Dusun Paggantengan Desa Pataro Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Salobbai - Gunturu Desa Pataro Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Bontomanumpa- Kadengkekea Desa Pataro Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Babalohe Desa Karassing Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Ranja-Hali-Bontobanna Kel. Tanuntung Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Depan Mesjid Nurul Hidatah Batu Panyu Kel. Tanuntung		Kec. Herlang			
				Pembetonan Bonto Bainang-makurarang Desa Togondeng Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Lahatung-Tusampe Desa Togondeng Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Dusun jatia-Bonto Sura Desa Togondeng Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Bonto Sura - Sembo Desa Togondeng Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan lassanru-Tusampe Desa Togondeng Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Jln Babana Kel. Bontokamase Desa Bontokamase Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Jln Beang Tubarania Desa Bontokamase Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Jln Bonto Ra'ra Desa Bontokamase Kec. Herlang		Kec. Herlang			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembetonan Panranglohe-Toku Desa Bontokamase Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Botodega Dg Matika Desa Bontokamase Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Desa Lolisang Kec. Kajang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Dusun Lamantang Desa Bontobiraeng Kec. Kajang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Lingk. Barang-Nanasaya Kel. Tanahjaya Kec. Kajang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Dusun Laharre Desa Bontobiraeng Kec. Kajang		Kec. Herlang			
				Pembetonan Dusun Bontoa Desa Lembanna Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan dsn Tupare Desa Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Desa Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Jalan Sembang Desa Lembanna Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Jalan Tukampu dsn Tupare Desa Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Jln Soppo Desa Lembanglohe Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Kalimporo Desa Tambangan Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan lamantang Desa Bontobiraeng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Ling. Daloba Kel. Tanahjaya Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Batunilamung Desa Batunilamung Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Batusang Desa Batunilamung Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan dsn Balleangin Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Dsn Lembang Desa Bontobiraeng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Dusun Kassi Puteh Desa Lolisang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Dusun Dumpu Desa Sangkala Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan Dusun Tangkalaya Desa Sangkala Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Pembetonan dsn Tupare Desa Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Pembetonan Kel. Laikang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
	Pembetonan kaluku Lohe Seppang Kel. Laikang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
	Pembetonan Tanahjaya Kel. Tanahjaya Kec. Kajang		Kec. Kajang			
	Pembetonan Teteaka Desa Tambangan Kec. Kajang		Kec. Kajang			
	Pembetonan palioi - sopa desa benteng palioi		Kec. Kindang			
	Pembetonan bangsalaya desa borong rappoa (lanjutan)		Kec. Kindang			
	Pembetonan baturapa - bontoa br. Rappoa Kel borong rappoa		Kec. Kindang			
	Pembetonan jalan pendidikan SD 45 baturapa desa borong rappoa		Kec. Kindang			
	Pembetonan jl. Kampung baru br. Rappoa Kel. borong rappoa		Kec. Kindang			
	Pembetonan jl. Pendidikan SD 352 na'na br. Rappoa desa borong rappoa		Kec. Kindang			
	Pembetonan kawasan wisata air terjun dusun gamaccya desa kahayya		Kec. Kindang			
	Pembetonan Bahu Jalan Ibu Kota kecamatan Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
	Pembetonan Buttalolo Desa Bontomate'ne Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
	Pembetonan Jl. Terakhir Kel. Palampang Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
	Pembetonan Jalan Kepala Canna (lanjutan) Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
	Pembetonan Ruas Swatani - Tammatto Desa Swatani Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
	Pembetonan Batupangka - Desa Bangun (Lanjut)		Kec. Rilau Ale			
	Pembetonan Bonto Baju Palipungan Desa Baji'Minasa (Lanjutan)		Kec. Rilau Ale			
	Pembetonan Karama Bonto Mangiring		Kec. Rilau Ale			
	Pembetonan jalan baruga ganjenge desa tanah harapan		Kec. Rilau Ale			
	Pembetonan jalan darincing Kel. Palampang (lanjutan)		Kec. Rilau Ale			
	Pembetonan jalan lingkungan Batupangka Kel. Palampang		Kec. Rilau Ale			
	Pembetonan jalan Lingkungan Marana kel. Palampang		Kec. Rilau Ale			
	Pembetonan jalan rambutan ganjenge desa tanah harapan		Kec. Rilau Ale			
	Pembetonan jalan Temmassongo kel. Palampang		Kec. Rilau Ale			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembetonan lingkungan palampang Kel. Palampang		Kec. Rilau Ale			
				Rabat beton jln. H. bagia bontomasunggu desa anrang		Kec. Rilau Ale			
				Pembetonan jl. Abd. Majid Kel. Caile		Kec. Ujung Bulu			
				Pembetonan Kel. Tanah Kongkong		Kec. Ujung Bulu			
				Pembetonan Kel. Ela2		Kec. Ujung Bulu			
				Pembetonan Jl. Nenas Blkg Masjid Agung		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Belakang Pasar Desa Seppang Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Desa Garanta Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Desa Seppang Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Bara'lohe Desa Paccarammengang Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Kailie Desa Manjalling Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Tamappalalo Desa Tamatto Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Luppung, Desa Manyampa Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Lingk. Babana Kel. Dannuang Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Bomba Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Alarayya, Desa Manyampa Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Galagang Desa Paccarammengang Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan dsn batuloe Desa Seppang Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Dongi, Desa Manyampa Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Kalicompeng Desa Balong Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Longki Desa Balong Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Luppung, Desa Manyampa Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Mattirowalie Desa Seppang Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Salebboe Desa Padang Loang Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Tanah Eja, Desa Manyampa Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembetonan Dusun Kapasa Desa Salemba Kec. Ujungloe (lanjt)		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dusun Mattoanging Desa Balleanging Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Alarayya, Desa Manyampa Kec. Ujungloe (Lanjtan)		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Dsn Alarayya, Desa Manyampa Kec. Ujungloe (lanjt)		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Samping SDN 19 Dsn Tanah Eja Desa Manyampa Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Pintujung Desa Paccarammengang Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Jln Poros Desa Manyampa Kec. Ujungloe		Kec. Ujung Loe			
				Pembetonan Langlangge Desa Darubiah Kec. Bonto Bahari		Kec. Bontobahari			
				Pembetonan Lingk. Pasaraya Baru (Kel. Sapolohe) Kec. Bonto Bahari		Kec. Bontobahari			
				Pembetonan Dusun Bakung - Bakung Kec. Bonto Bahari		Kec. Bontobahari			
				Pembetonan - Barang II					
				Pembetonan - Dusun Saukeng, Singa					
				Pembetonan Bahu Jalan Ruas Kaseseng Mallenreng Baruga Riattang					
				Pembetonan Bahu Jalan Ruas Timba Assipettunge Kambuno					
				Pembetonan Bahu Jalan, Antara Lain : 1.Jl.H.A.Paki, 2. Jl. Pembangunan,3.Jl.Manggis,4.Jl. Hati Murni (Lanjutan)					
				Pembetonan Batu Jalan, Antara Lain; 1. Jl. Durian, 2. Jl. Mangga,3.Jl.Nenas,4.Jl. Jambu (Lanjutan)					
				Pembetonan Batuasang-Kosang Desa Batunilamung					
				Pembetonan Bontonangka-Baturaga (Lanjutan) Desa Malleleng					
				Pembetonan Dekat Rumah Pintar Jl. Menara					
				Pembetonan Desa Mattoanging					
				Pembetonan Dsn Batu Lonrong Desa Lonrong (Lanjutan)					
				Pembetonan Dusun Bungeng Desa Bialo					
				Pembetonan Dusun Cori Desa Bonto Macinna					
				Pembetonan Dusun Kamangi Kel. Mariorennu					

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembetonan Dusun Parang Luara Benteng Gantareng					
				Pembetonan Dusun Salibang Desa Borong					
				Pembetonan Dusun Takku'E Desa Seppang					
				Pembetonan Jalan Gunturu-Salobbai (Riqid)					
				Pembetonan Jl. Abd. Majid Caile					
				Pembetonan Jl. Ambo Ila (Lanjutan) Kambuno					
				Pembetonan Jl. Kepala Canna (Lanjutan) Desa Panggalloang					
				Pembetonan Jl.Muh.Said Kambuno (Lanjutan)					
				Pembetonan Kampong Jera Palampang					
				Pembetonan Menuju Jonjo Desa Balleanging					
				Pembetonan Ruas Balleanging Tamarellang Kel. Ballasaraja					
				Pembetonan Ruas Baruga Taggettung (Lanjutan)					
				Pembetonan Ruas Bulo-Bulo-Sapo Bonto					
				Pembetonan Ruas Jari-Jari Manrusui (Lanjutan)					
				Pembetonan Ruas Jl. Kelapa-Maradeng Jawi-Jawi					
				Pembetonan Ruas Swatani Pangi-Pangi (R.A Dallang)					
				Pembetonan Samping Rumah Usman G Desa Balleanging					
				Pembetonan Bahu Jalan Bontomanai					
				Pembetonan Bahu Jalan Palampang					
				Pembetonan Bahu Jalan Bontoharu					
				Pembetonan Bahu Jalan Karama Dan Swatani					
				Pembetonan Ballasarajae					
				Pembetonan Bonto Baji					
				Pembetonan Bontominasa					
				Pembetonan Desa Babana Kel.Dannuang					
				Pembetonan Desa Bialo					
				Pembetonan Desa Boro Jatie, Kel. Jalanjang					
				Pembetonan Dsn Babana Kel. Dannuang					
				Pembetonan Dsn Boddia Paccarammengang Pintujung					
				Pembetonan Dsn Borong Cinranane-Palimassang					
				Pembetonan Dusun Kacibo					
				Pembetonan Dusun Kampong Baru.					

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembetonan Jalan Lingkar Kuburan Pungkarese Desa Bira (Lanjutan)					
				Pembetonan Jalan Sapolohe					
				Pembetonan Jalanjang					
				Pembetonan Jojjolo					
				Pembetonan Lokasi Tobulu Kel. Ballasaraja					
				Pembetonan Salassae					
				Pembetonan Tambangan					
				Pembetonan Tanah Jaya Kajang					
				Pembetonan Tanah Towa					
				Pembetonan Tanete					
				Pembetonan Tibona					
1	03	1	17	Program Pembangunan turap/talud/brojong/Beton Jalan	Prosentase Panjang talud pengaman jalan			12.032.000.000	
1	03	1	17	03	Pembangunan turap/talud/bronjong/Beton Jalan				
				Drainase Jl. Sultan Hasanuddin dari Depan ICDT ke Jembatan Teko Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu		Ujung Bulu			
				Drainase Lingk. Loka - Lingk. Bt. Kamase - Lingk. Bt. Matene Kel. Loka Kec. Ujung Bulu		Ujung Bulu			-
				Drainase/Talud Depan Kantor Lurah Ekatiro Erelebu Barat Desa Ekatiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Depan Masjid ke Pelelangan Ikan Erelebu Utara Desa Ekatiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Depan Puskesmas Bontotiro Hila - Hila Desa Ekatiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Desa Lamanda Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud di Dusun Kalumpang Tengah Desa Tritiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Dusun Jatie Desa Bontotanga Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Dusun Salobundang - Ekatiro Buhungbundang Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Erekeke Desa Dwitiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Jalan Karaeng Loeta Desa Bontotanga Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Jannaya - Salu - Salu Desa Dwitiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Kantor Koramil ke Tatturaeng Dato Tiro Desa Ekatiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Drainase/Talud Makam Dato Tiro Kantor KUA Lama Dato Tiro Desa Ekatiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Makam Dato Tiro MTSn Dato Tiro Desa Ekatiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Poros Desa Manyampa - Bontotangnga - Bontomarannu Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Samping Pasar - MTSn Desa Bontotanga Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Samping Pasar Desa Bontotanga Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Bahu Jalan Poros Sakui - Kui Kalumpang Lobi Desa Caramming Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Bontosuka - Tunumbeng - Bontomarannu Desa Bontotanga Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Depan Kantor KUA Lama Lingk. Dato Tiro Desa Ekatiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Desa Lamanda Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Desa Pakubalaho Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Dusun Timbula - Bontobarua Desa Bontotanga Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Jalan Kabupaten Kiri Kanan Poros Batang Desa Batang Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Pembuangan Sumur Panjang Hila - Hila Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Permandian Dekat Sumur Panjang Hila - Hila Desa Ekatiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Poros Kampung Baru - Majjangka Erelebu Barat Desa Ekatiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Poros Kampung Baru - Majjangka Erelebu Barat Desa Ekatiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud se Desa Bontobarua Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud SMA 11 Bulukumba Timbula Desa Bontotanga Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Drainase/Talud Dusun Batu Putih Desa Mattoanging Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud /Tanggul Jalan Balangsiknong - Malleleng Desa Tambangan Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Dusun Jannaya Desa Lembanna Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jalan Poros Kassi Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jalan Poros Nanasaya Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang		Kec. Kajang			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Drainase/Talud Jalan Tambi Karya Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jln. Dusun Jatia Desa Sangkala Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Kaluku Lohe Kel. Laikang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Lapangan Tarangkolang Daloba Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Limbung - Pabbentengan Desa Tambangan Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Lingk. Jalaya Kassi Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Lorong Hidayat Daloba Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Poros Ululembang - Kosang - Batusang - Sinjai Desa Batunilamung Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud /talud Malleleng - Mattoanging Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud /Tanggul Poros Raowa - Lolisang Desa Pantama Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Batu Asang Desa sapanang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Batu Menteng - Balo - Balo Bontobaji Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Batu Menteng - Lembang Keke Bontobaji Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Dusun Kassi Puteh Desa Lolisang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Dusun Sapanang Desa Sapanang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Dusun Tabbuakang Desa Mattoanging Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Ibu Kota Desa Tambangan Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jalan Possi Tanah - Mattoanging Desa Possi Tanah Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jalan Batu Raga/Timbunan Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jalan Bontonangka Desa Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jalan Dusun Usa Desa Lembang Lohe Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jalan Dusun Usa Desa Lembang Lohe Kec. Kajang		Kec. Kajang			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Drainase/Talud Jalan Janggo Tuo Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jalan Kampung Baru - Batu Menteng Bontobaji Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jalan Lembang Bu'ne Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jalan Likuboddong Loboro Tupare Desa Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jalan Nanasaya Lingk. Daloba Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jalan Pendidikan Dusun Jannaya Desa Lembanna Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jalan Poros Kampung Baru - Dusun Jannaya Desa Lembanna Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jalan Poros Possi Tanah - Mattoanging Desa Possi Tanah Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jalan Poros Tammadohong Desa Lembanna Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud jalan Pungkorong Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jalan Tihele/Timbunan Bontonangka Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jln. Pengairan Dusun Sisihorong Desa Sangkala Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jln. Poros Ammatoa Anisia 001/002 Desa Pattiroang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Kaluku Lohe - Salu Kel. Laikang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Lembang - Lembanga Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Patihi Desa Sapanang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Pattiroang - Sapanang Desa Pattiroang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Poros Bontonangka Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Poros Bunja Batu Pute Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Poros Jannaya Desa Lembanna Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Poros Karangbangbantia - Desa Lembang Lohe - Desa Lembang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Poros Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Poros sapiri - Bunjangan Malleleng Kec. Kajang		Kec. Kajang			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Drainase/Talud Poros Ululembang - Kosang - Batusang - Sinjai Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Rallaya Desa sapanang Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Ruas Jalan Kabupaten Poros Tangkalaya - Dumpu Desa Sangkala Kec. Kajang		Kec. Kajang			
				Drainase/Talud Jalan Poros Tanete - Kajang Desa Batulohe Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Balangriri - Tibona Desa Tibona Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Jalan Tobarania Desa Bulo - Bulo Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Jl. Andi Haeba Desa Bulo - Bulo Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Balleanging - Tamarellang (Tobulu) Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Dusun Karangpuang Desa Barugae Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Harue Balombong Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Jl. Cengkeh Kel. Tanete Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Jl. Durian Kel. Tanete Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Jl. Kopi Kel. Tanete Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Paroto Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Salodua - Malenreng - Kaseseng - Lembangge Desa Baruga Riattang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Tamarellang - Paroto Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Assipetunge Bambaungan Desa Kambuno Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Bandu Barugae Desa Kambuno Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Bulo-bulo - Kupang Desa Salassae Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Jeri - Jeri Salodua Desa Kambuno Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Kaseseng Assipetunge Desa Baruga Riattang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Mannyaha Assipetunge Desa Kambuno Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Poros Bandu Barugae Desa Kambuno Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Drainase/Talud Poros Bukit Madu - Batuhulang (Bukit Madu - Batu Laisi - Elle'e) Desa Bontomangiring Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Ruas Annisia Jojjolo Desa Jojjolo Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Sabberaga Harue Desa Bulo - Bulo Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Temba Barugae Desa Kambuno Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Temba Jeri - Jeri Desa Kambuno Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Temba/Assipetunge Desa Kambuno Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
				Drainase/Talud Desa Bontoharu Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Desa Topanda Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Jalan Poros palampang-Palangisang Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase Bt. Bangun - Jonjoro Desa Bonto Bangun Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase Desa Anrang Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase Jalan Asapa Desa Anrang Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase Poros Lempongge - Palangisang Desa Karama Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Andi Maddolangeng Wilayah Darincing Kel. Palampang Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Batukaropa-Kampung Baru Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Desa Bontolohe Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Ibu Kota Kecamatan Lingk. Marana - palampang - tammasrongo Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Jalan A. Manrihu Lingk. Marana Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Jalan Andi Maddolengeng (Depan Mesjid Babu) Lingk. Tammasong Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Jalan H. Bagia Desa Anrang Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Jalan H. Mappiasse Lingkungan Palampang Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Jalan Kampung Jera Lingk. Marana Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Jalan Pendidikan Desa Bontomai Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Drainase/Talud Jalan Poros Batupangka - Batu Lappae Desa Batupangka Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Poros Marana Samping MAM Palampang Lingk. Marana Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Desa Bajiminasa Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Dusun Batukaropa Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Dusun Kapparae Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Dusun Katangka Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Dusun Tojaga Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Jalan Poros Parukku - Kindang Dusun Mattoanging - Dusun Tonrong Desa Anrang Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Jalan Ta'buntulu Desa Anrang Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Jln. Buttakeke - Jonjoro Desa Bonto Bangun Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale			
				Drainase/Talud Bibir Jalan Poros Dongi - Jana Desa Manyampa Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Caccae Dsn Salebboe Desa Padangloang Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Dsn Latamba Desa Padangloang Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Dsn Longki Desa Balong Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Dsn Padodo - Polewali Desa Bijawang Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Dsn Palangisang Desa Balleanging Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Dsn Salebboe Desa Padangloang Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Dsn Sapiri Pangka Desa Balleanging Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Manyampa - Bt. Tangnga Desa Manyampa Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Poros Kalikia Balleanging - Manyampa Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Poros Polewali - Tokombeng Dsn Tokombeng Desa Bijawang Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Salu - Salu Desa Seppang Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Bibir Jalan Poros Kalikia - Balleanging Desa Manyampa Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Drainase/Talud Bibir Jalan Poros Mampua - Bt. Banua Desa Manyampa Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Campagarigi Desa Bijawang Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Campagarigi Desa Bijawang Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud di Jalan Kindang Tokombeng Desa Bijawang		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Dsn Galagang Desa Paccarammengang		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Dsn Bara'lohe Desa Paccarammengang		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Dsn Kalicompeng Desa Balong Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Dsn Patuku Desa Balong Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Dsn Polewali - Tokombeng Desa Bijawang		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Dsn Sarajatoae Desa Padangloang		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Jalan Poros Desa Seppang Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Jln. Kp. Baru Dsn Lembang Desa Padangloang Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Poros Manyampa Dsn Mattoanging Desa Balleanging Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Poros Padangloang Dsn Polewali Desa Salemba Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Ruas Padangloang - Salemba Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Ruas Polewali Tokombeng Desa Bijawang Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud Sepanjang Jalan Poros Danjuang Kel. Danjuang Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe			
				Drainase/Talud di Jalan Bui Desa Ara Kec. Bontobahari		Kec. Bontobahari			
				Drainase/Talud Jalan Poros Pendakian Kasuso Dusun Biralohé Desa Darubiah Kec. Bontobahari		Kec. Bontobahari			
				Drainase/Talud Lingk. Pasaraya Baru Kel. Sapolohe Kec. Bontobahari		Kec. Bontobahari			
				Drainase/Talud Poros Poros Bt. Gantarang Sipaenre Kec. Kindang		Kec. Kindang			
				Drainase/Talud Anrihua Borong Anrihua Desa Anrihua Kec. Kindang		Kec. Kindang			

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Drainase/Talud Anrihua Poros Anrihua Desa Anrihua Kec. Kindang		Kec. Kindang			
	Drainase/Talud Depan Rumahnya Sannu Asayya Desa Borong Rappoa Kec. Kindang		Kec. Kindang			
	Drainase/Talud Dusun Cibollo Kam. Latai Desa Kindang Kec. Kindang		Kec. Kindang			
	Drainase/Talud Dusun Sapayya Desa Kindang Kec. Kindang		Kec. Kindang			
	Drainase/Talud Dusun Ulugalung Desa Tamaona Kec. Kindang		Kec. Kindang			
	Drainase/Talud Dusun Uluarang Desa Benteng Palioi Kec. Kindang		Kec. Kindang			
	Drainase/Talud Galung Lohe Desa Tamaona Kec. Kindang		Kec. Kindang			
	Drainase/Talud Poros Pattallassang - Baturapa Dusun Pattallassang - Oro - Bajiminasa Desa Orogading Kec. Kindang		Kec. Kindang			
	Drainase/Talud Poros Pattallassang - Baturapa Dusun Pattallassang - Oron - Bajiminasa Desa Orogading Kec. Kindang		Kec. Kindang			
	Drainase/Talud Tamaona-Orogading Desa Tamaona Kec. Kindang		Kec. Kindang			
	Drainase/Talud Tujuang Raya - Uluarang Desa Mattirowalie Kec. Kindang		Kec. Kindang			
	Drainase/Talud Tujuang Raya - Uluarang Desa Mattirowalie Kec. Kindang		Kec. Kindang			
	Drainase/Talud di Kampung Baru Desa Bonto Macinna Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
	Drainase/Talud Dusun Barabba Desa Bialo Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
	Drainase/Talud Dusun Mattoangin Desa Padang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
	Drainase/Talud Dusun Ompoa Desa Benteng Malewang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
	Drainase/Talud Dusun Palimassang - Desa Dampang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
	Drainase/Talud Jalan Poros Bulukumba - Sawere Borong Jatie Kel. Jalanjang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
	Drainase/Talud Jalan Poros Dusun Bontonyeleng - Annie Desa Bukit harapan kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
	Drainase/Talud Karampuang Poros Desa Bukit Tinggi Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			
	Drainase/Talud Poros Bontoraja Desa Bontoraja Kec. Gantarang		Kec. Gantarang			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Drainase/Talud Poros Gunturu - Parangloe Macinna Desa Gunturu Kec. Herlang		Kec. Herlang			
				Drainase Malleleng (Kaneka-Tupare)					
				Drainase (Jawi-Jawi)					
				Drainase Ibukota Desa (Lanjutan) Lembang Lohe					
				Drainase Jl. Pembangunan Tanete					
				Drainase Balang Bessi.					
				Drainase Balang Pesoan					
				Drainase Ballasaraja Balleanging					
				Drainase Batu Lohe					
				Drainase Batuasang-Kosang Desa Batunilamung					
				Drainase Batunilamung					
				Drainase Benteng Gantarang					
				Drainase Bonto Masila					
				Drainase Bonto Minasa					
				Drainase Bonto Rannu					
				Drainase Bonto Sunggu					
				Drainase Bontomangape Kalumeme					
				Drainase Bontomihu Batulohe					
				Drainase Bontonyeleng					
				Drainase Bontotiro					
				Drainase Btn 1 (Lanjutan) Kel. Loka					
				Drainase Bukit Harapan					
				Drainase Camba - Camba Desa Paenre Lompoe					
				Drainase Cambang Boko Sampai Tujuan Raya Mattirowalie					
				Drainase Depan Kantor Desa Manyampa					
				Drainase Depan Kantor Lurah Palampang					
				Drainase Depan Mesjid Baburahman Desa Ballenaging					
				Drainase Depan Pasar Sampai Sd 20 Manyampa					
				Drainase Desa Balleanging					
				Drainase Desa Bonto Biraeng					
				Drainase Desa Bonto Masila					
				Drainase Desa Bontobangung					
				Drainase Desa Bontoharu					
				Drainase Desa Bontolohe					
				Drainase Desa Padang Loang					

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Drainase Desa Padodo Desa Bijawang (Lanjutan)					
	Drainase Desa Panggalloang					
	Drainase Desa Polewali Desa Biajawang (Lanjutan)					
	Drainase Desa Sapanang					
	Drainase Desa Sapobonto					
	Drainase Desa Seppang					
	Drainase Desa Swatani					
	Drainase Desa Tamatto					
	Drainase Di Dusun Bangkit Bukit Harapan					
	Drainase Di Dusun Katindro Jangan Bonto Sunggu					
	Drainase Di Kasinambungan Dusun Campadidia Dampang					
	Drainase Di Pasar Bonto Bahari Kel. Tanah Beru					
	Drainase Dsn Bonto Matene Desa Padang					
	Drainase Dsn Borong Cinrae Desa Padang					
	Drainase Dsn Mattoanging Desa Balleanging					
	Drainase Dsn Palimassang Desa Padang					
	Drainase Dsn. Palangisang Desa Balleanging					
	Drainase Dsn.Mattoanging Desa Balleangin					
	Drainase Dusun Allu Desa Tamatto					
	Drainase Dusun Balapangi Pamtama					
	Drainase Dusun Batunilamung Jojjolo					
	Drainase Dusun Bayang - Bayang, Desa Gattareng					
	Drainase Dusun Bentenge Dan Bonto Haru					
	Drainase Dusun Biroro Tanete					
	Drainase Dusun Bonto Baji Balang Taroang					
	Drainase Dusun Bonto Bulaeng Gantareng					
	Drainase Dusun Bontomasunggu Desa Anrang					
	Drainase Dusun Bulu Lonrong Desa Lonrong					
	Drainase Dusun Dusuru Desa Bontoraja					
	Drainase Dusun Jepuru Bontomate'Ne Desa Padang					
	Drainase Dusun Kalammessang, Kel. Mariorennu					
	Drainase Dusun Kalepang Desa Benteng Malewang					
	Drainase Dusun Kamangi Kel. Mariorennu					
	Drainase Dusun Kaneka Desa Tambangan					
	Drainase Dusun Kassi Lohe Lembang					
	Drainase Dusun Lahumbung, Desa Bonto Raja					
	Drainase Dusun Longki					

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Drainase Dusun Longki Desa Balong (Lanjutan)					
	Drainase Dusun Makkaninong Desa Bonto Macinna					
	Drainase Dusun Malewang Desa Benteng Malewang					
	Drainase Dusun Mallebbang Desa Jojjolo					
	Drainase Dusun Pa"Lipungang Desa Baji"Minasa					
	Drainase Dusun Padi / Mattoangin, Desa Padang					
	Drainase Dusun Polewali Desa Salebba					
	Drainase Dusun Sapiri (Kaneka-Tupare) Deas Malleleng					
	Drainase Dusun Sapiri Desa Maleleng					
	Drainase Dusun Sarajatoae Desa Padangloang					
	Drainase Dusun Tukombeng Desa Bijawang					
	Drainase Herlang					
	Drainase Jalan Poros Kaneka Tupare Desa Malleleng					
	Drainase Jalan Tambi Karya Desa Malleleng					
	Drainase Jalan Tani Sikuyu Desa Bonto Nyeleng					
	Drainase Jawi - Jawi.					
	Drainase Jl. Pettarani Dalam Belakang Mangguluang Tanah Kongkong					
	Drainase Jl. Poros Kapasa Paranyelling Desa Salemba					
	Drainase Kampung Cina Ke Borong Rappoa Dusun Kantisang Balibo					
	Drainase Kanbuno					
	Drainase Kel. Tanuntung					
	Drainase Kelurahan Ballasaraja					
	Drainase Kota Bt. Manai					
	Drainase Laloasa Sampai Jannakeke (Lanjutan) Buhung Bundang					
	Drainase Lanjutan Dusun Bontodidi Desa Mattoanging					
	Drainase Lingkungan Babana Dannuang					
	Drainase Lingkungan Batuppi Kel. Bintarore (Lanjutan)					
	Drainase Lingkungan Paranyelling Dannuang					
	Drainase Lonrong					
	Drainase Mariorennu					
	Drainase Mattoangin					
	Drainase Orogading					

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Drainase Padang					
	Drainase Paenre Lompoa					
	Drainase Palambarae					
	Drainase Pendakian Dusun Pompantu Lembanna					
	Drainase Polewali					
	Drainase Poros Balong					
	Drainase Poros Borong Rappoa Batas Desa Dampang Sampai Desa Anrihua					
	Drainase Poros Borong Tellu Sopa Sampai Sopa Dampang					
	Drainase Poros Manyampa Desa Manyampa					
	Drainase Poros Patalassang Batu Rapa Orogading					
	Drainase S. Parman-Jl. Mappijalan Loka (Rehabilitasi)					
	Drainase Sapolohe					
	Drainase Seppang					
	Drainase Sipaenre					
	Drainase Sopa					
	Drainase Tammatto					
	Drainase Tanah Beru					
	Drainase Tanah Jaya					
	Drainase Tanete					
	Drainase.Talud Desa Bonto Masila					
	Drainase/Talud Dusun Kacibo Swatani					
	Drainase/Talud - Dusun Usa , Pandang Jahaya Lembang Lohe					
	Drainase/Talud Ruas Salo Dua Kaseseng Tanete					
	Drainase/Talud + Duicker Temba Kel. Tanete					
	Drainase/Talud Depan Pesantren Bontoraja					
	Drainase/Talud Desa Bontoharu					
	Drainase/Talud Desa Seppang					
	Drainase/Talud Dsn Pabbentengan Desa Balong					
	Drainase/Talud Dsn Bt Bulaeng '(Lanjutan)					
	Drainase/Talud Dsn Katangka Ds Batu Karopa (Lanjutan)					
	Drainase/Talud Dsn Patuku Ujung Loe					
	Drainase/Talud Dusun Aluparang Raya Benteng Palioi					
	Drainase/Talud Dusun Bangkingbuki Bulit Harapan					
	Drainase/Talud Dusun Bolaperinggi Tibona					

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Drainase/Talud Dusun Mampua Desa Manyampa					
				Drainase/Talud Dusun Paleoi Desa Benteng Palioi					
				Drainase/Talud Dwitiko Sampai Bonto Bulaeng (Lanjutan) Dwitiro					
				Drainase/Talud Jalan Tani Dusun Batu Longgae Bonto Masila					
				Drainase/Talud Jl. Durian Temba (Lanjutan) Tanete					
				Drainase/Talud Jl. Kelapa Kel. Jawi-Jawi (Lanjutan)					
				Drainase/Talud Jl. Kopi (Lanjutan) Tanete					
				Drainase/Talud Jl. Pepaya Ling. Biroro Maradeng					
				Drainase/Talud - Karangrang Bantia, Torassi Lembang					
				Drainase/Talud Macongi Barugae					
				Drainase/Talud Macongi Desa Barugae					
				Drainase/Talud Polewali					
				Drainase/Talud Poros Talle-Talle (Lanjutan) Bonto Manai					
				Drainase/Talud Ruas Assipettunge-Mallenreng Kambuno					
				Drainase/Talud Ruas Baruga Riattang Balang Taroang (Lanjutan)					
				Drainase/Talud Ruas Kaseseng-Mallenreng Baruga Riattang(Lanjutan)					
				Drainase/Talud Ruas Tappalang Bonto Bulaeng (Lanjutan)					
				Drainase/Talud Ruas Timba Assipettunge (Lanjutan) Kambuno					
				Drainase/Talud Sapiri Pangka Desa Balleanging					
				Drainase/Talud Seppang					
				Drainase/Talud Sopa					
				Drainase/Talud Tamappalolo Desa Tamatto					
				Drainase/Talud Tanah Jaya Daloba					
				Drainase/Talud Tanete (Lanjutan)					
				Drainase/Talud Anrihua					
				Drainase/Talud Balibo					
				Drainase/Talud Ballasarajae					
				Drainase/Talud Barang Loe Desa Paccaremmengang					
				Drainase/Talud Bontominasa					
				Drainase/Talud Bontonyeleng					
				Drainase/Talud Bontosunggu					

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Drainase/Talud Bukit Harapan					
				Drainase/Talud Dampang					
				Drainase/Talud Desa Balleangin					
				Drainase/Talud Desa Pataro					
				Drainase/Talud Dsn Barana Prs Bonto Mnai Talle-Talle					
				Drainase/Talud Dusun Bonto Bayu Balang Taroang					
				Drainase/Talud Dusun Kaluku Benteng Palioi					
				Drainase/Talud Dusun Mattoangin, Batu Longgae Dan Lingkungan Panju Tanah					
				Drainase/Talud Dusun Palangisan Desa Balleangin					
				Drainase/Talud Garanta Padang Monro					
				Drainase/Talud Gattareng					
				Drainase/Talud Jawi- Jawi					
				Drainase/Talud Kapparae Dan Batu Karopa					
				Drainase/Talud Mattirowalie					
				Drainase/Talud Paccarammengang					
				Drainase/Talud Palampang					
				Drainase/Talud Palipungan Baji Minasa					
				Drainase/Talud Ruas Kaseseng-Balangtaroang (Lanjutan)					
				Drainase/Talud Salassae					
				Drainase/Talud Sepanjang Jalan Poros Borong Rappoe					
				Drainase/Talud Tamaona					
				Drainase/Talud Tibona					
				Drainase Tibona					
				Talud - Dusun Pa'Gantengan Desa Pataro					
				Talud Desa Bialo					
				Talud Desa Bonto Mangiring					
				Talud Desa Bonto Raja					
				Talud Desa Salassae					
				Talud Dusn Sawerer Desa Bonto Raja					
				Talud Dusun Malleleng					
				Talud Maleleng					
				Talud Penahan Dinding Tebing Dusun Balumbung Jojjolo					
				Talud Penahan Dinding Tebing Dusun Batunilamung Jojjolo					

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Talud Pengaman Tebing - Ling. Barang/Barang II					
				Talud Poros Parukku Desa Bulolohe (Lanjutan)					
				Tanggul Desa Bonto Mangiring					
1	03	1	18	Program Pemeliharaan jalan dan jembatan				7.900.000.000	
1	03	1	18	03 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan berkala jalan	se Kec. Bulkum		5.000.000.000	
1	03	1	18	06 Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan	se Kec. Bulkum		1.500.000.000	
				Teko - Lajae		Ujung Bulu			
				Jalan Dalam Kelurahan Bulukumba		Ujung Bulu			
				Rehabilitasi Ruas Buhung Lantang Dohung Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Rehabilitasi berkala Tamalanrea - pasar Batang Desa Batang		Kec. Bontobahari			
				Rehabilitasi berkala poros Kalumpang Desa Tritiro Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			
				Ruas Batutujua - Desa Bonto Haru Desa Salassae		Kec. Bulukumpa			
				Ibukota Kec. Bontobahari (sekitar PLN)		Kec. Bontobahari			
				Poros SMA 14 Bulukumpa Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa			
1	03	1	18	07 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan jalan dan sarana umum	Jumlah lampu jalan yang terpasang	se. Kab. Bulkum		700.000.000	
				Pemasangan Lampu Jalan Gang/Lorong Lingk. Loka - Lingk. Bt. Kamase - Lingk. Bt. Matene Kel. Loka Kec. Ujung Bulu		Ujung Bulu		700.000.000	DAU
				Pemasangan Tiang dan Lampu Jalan Kel. Terang - Terang Kec. Ujung Bulu		Ujung Bulu			DAU
				Pemasangan Tiang Lampu Jalan Belakang Pasar Sentral Kel. Caile Kec. Ujung Bulu		Ujung Bulu			
				Pemasangan Tiang Lampu Jalan BTN Baruga Lorong 2 dan Lorong 3 Ujung Kel. Caile Kec. Ujung Bulu		Ujung Bulu			
				Pemasangan Tiang Lampu Jalan Gang 1 Jl. Cendana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu		Ujung Bulu			
				Pemasangan Tiang Lampu Jalan Jl. Garuda Lorong Sampai Masjid H. Abd. Karim Kel. Caile Kec. Ujung Bulu		Ujung Bulu			
				Pemasangan Tiang Lampu Jalan Jl. Matahari Lorong 1 Kel. Caile Kec. Ujung Bulu		Ujung Bulu			
				Pemasangan Tiang Lampu Jalan Matajang Kel. Caile Kec. Ujung Bulu		Ujung Bulu			
				Lampu Jalan Desa Lamanda Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
				Lampu Jalan Ibu Kota Hila - Hila Kec. Bontotiro		Kec. Bontotiro				
				Lampu Jalan Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang		Kec. Kajang				
				Lampu Jalan Kel. Jawi - Jawi Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa				
				Lampu Jalan Desa Lonrong Kec. Ujung Loe		Kec. Ujung Loe				
				Lampu Jalan dan Sarana Umum Kel. Tanahberu, Kel. Sapolohe, Kel. Tanahlemo dan Kel. Benjala Kec. Bontobahari		Kec. Bontobahari				
				Lampu Desa Ara Kec. Bontobahari		Kec. Bontobahari				
				Lampu Lingk. Pasaraya Baru Kel. Sapolohe Kec. Bontobahari		Kec. Bontobahari				
				Lampu Jalan Semua Dusun Desa Mattirowalie Kec. Kindang		Kec. Kindang				
				Lampu Jalan Desa Bonto Macinna Kec. Gantarang		Kec. Gantarang				
				Lampu Jalan Dusun Ompoa Desa Benteng Malewang Kec. Gantarang		Kec. Gantarang				
				Pengadaan & Pemasangan Lampu Jalan Materisasi)						
				Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan						
				Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jalan (Nutrisasi Lanjutan						
				Pengadaan Lampu Jalan Daerah Bontosunggu						
				Pengadaan Lampu Jalan Daerah Gantarang Paenre Lompoe						
				Pengadaan Lampu Jalan Daerah Gantarang Polewali						
				Pengadaan Lampu Jalan Desa Salassae						
				Pengadaan Lampu Jalan Gattareng						
				Pengadaan Lampu Jalan Untuk Desa Terpencil						
				Pengadaan Lampu Tenaga Surya						
				Pengadaan Tiang Listrik Penerangan Lampu						
1	03	1	20	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan				150.000.000		
1	03	1	20	01	Inspeksi kondisi Jalan dan jembatan	Terbangunnya legger jalan kabupaten	se Kec. Bulkum		150.000.000	
1	03	1	22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan				100.000.000		
1	03	1	22	.01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Tersusunnya dokumen leger jalan	se Kec. Bulkum	20.000.000	DAU	
1	03	1	22	.04	Up kondisi jalan dan jembatan	Terbitnya dokumen kondisi jalan dan jembatan	se Kec. Bulkum	80.000.000		
1	03	1	23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan				385.000.000	DAU	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	03	1	23	04	Pengadaan alat-alat berat	Terbelinya alat berat	Dinas PUTR		-	DAU
1	03	1	23	06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Terbelinya alat-alat ukur dan bahan laboratorium	Dinas PUTR		250.000.000	
1	03	1	23	10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terlaksananya pemeliharaan alat berat	Dinas PUTR		50.000.000	DAU
1	03	1	23	11	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat.	Meningkatnya kondisi alat-alat berat	Dinas PUTR		25.000.000	DAU
1	03	1	23	12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Terpeliharanya peralatan PUTR	Dinas PUTR		60.000.000	DAU
1	03	1	32		Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi				50.000.000	DAU
1	03	1	32	01	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)	Meningkatnya kapasitas pelaku jasa konstruksi	Dinas PUTR		50.000.000	DAU
1	03	1	34		Program Perencanaan tata Ruang				120.000.000	
1	03	1	34	01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Tersedianya dokumen penyusunan rencana tata ruang	4 kec		-	DAU
1	03	1	34	02	Penetapan kebijakan RDTRK, RTRK dan RTBL	Tersedianya dokumen kebijakan Rencana tata ruang	3 Kec.		-	DAU
1	03	1	34	05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersedianya rencana detail	Dinas PUTR		120.000.000	DAU
1	03	1	36		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				160.000.000	
1	03	1	36	01	Pengawasan pemanfaatan ruang	Terwujudnya pengendalian dan pemanfaatan ruang	se Kec. Bulkum		120.000.000	DAU
1	03	1	36	09	Koordinasi Penataan Ruang	Terlaksananya koordinasi penataan ruang			40.000.000	DAU
1	03	02			DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR				18.666.214.400,00	
1	03	02	01		A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				915.535.400	
1	03	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi jasa komunikasi, listrik dan air.			100.000.000	APBD
1	03	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya koordinasi antar instansi			20.000.000	APBD
1	03	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan.			250.000.000	APBD
1	03	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Kebersihan Kantor			27.911.400	APBD
1	03	02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya pelayanan Dinas PSDA			2.624.000	APBD
1	03	02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya koordinasi antar instansi			400.000.000	APBD
1	03	02	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Meningkatnya pelayanan Dinas PSDA			115.000.000	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	03	02	02		B. Program Peningkatan Sarana dan prasarana kerja Dinas PSDA			755.000.000	
1	03	02	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Sarana dan prasarana kerja guna mendukung tugas pokok.		270.000.000	APBD
					Pengadaan Kendaraan Operasional Mobil (Pick Up)				
					Pengadaan Kendaraan Motor Sampah				
					Pengadaan kendaraan Dinas Roda Dua				
1	03	02	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya prasarana kerja guna mendukung tugas pokok		10.000.000	APBD
1	03	02	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana dan prasarana kerja guna mendukung pelayanan.		15.000.000	APBD
					Gelas Ukur 6 Buah				
					AC duduk 1 Unit				
					Tabung Ukur Curah Hujan 3 Buah				
					Proyektor/Focus 2 Unit				
					Pengadaan Printer 1 Buah				
1	03	02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya Sarana dan prasarana kerja.		5.000.000	APBD
1	03	02	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Mobil Jabatan	Meningkatnya Sarana dan prasarana kerja guna mendukung koordinasi dan tugas pokok.		40.000.000	APBD
1	03	02	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional.	Meningkatnya Sarana dan prasarana kerja guna mendukung koordinasi dan tugas pokok.		60.000.000	APBD
1	03	02	02	26	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terjaga baiknya perlengkapan gedung kantor		5.000.000	APBD
1	03	02	02	42	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		350.000.000	APBD
1	03	02	05		C.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			250.000.000	
1	03	02	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Pengetahuan dan Pola Kepemimpinan Pejabat di Lingkup OPD		50.000.000	APBD
1	03	02	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Meningkatkan pengetahuan aparat.		100.000.000	APBD
1	03	02	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan pengetahuan aparat.		100.000.000	APBD
1	03	02	06		D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD			350.000.000	
1	03	02	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja PSDA.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah.		100.000.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	03	02	06	07	Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD	Meningkatnya kinerja dan pelaporan monev LHP Dinas PSDA.			250.000.000	APBD
1	03	02	24		E. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa,dan jaringan pengairan lainnya				8.745.679.000	
1	03	02	24	08	Pembangunan Pintu Air	Terselenggaranya Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi			300.000.000	APBD
					Pintu Air DI. Irigasi Babana		Ujungloe			
					Pintu Air DI. Passimbungan		Kindang			
					Pintu Air Irigasi Kec. Gantarang		Gantarang			
					Pintu Air DI. Buakang Tangngayya		Kindang			
					Pintu Air Irigasi Kec. Rilau Ale		Rilau Ale			
					Pintu Air Irigasi Kec. Bulukumpa		Bulukumpa			
					Pintu Air DI. Balantikeke (BB1)		Ujungloe			
					Pintu Air Irigasi Kalicompeng		Ujungloe			
					Pintu Air Irigasi Kec. Kajang		Kajang			
					Pembangunan Pintu Air Paenre Tengae		Gantarang			
					Pembangunan Pintu Air DI. Sangkala		Kajang			
					Pintu Air D.I Bayang-Bayang Desa Bonto Raja		Gantarang			
					Pemb. Pintu Air Irigasi Buakang Tangngayya		Kindang			
1	03	02	24	10	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi			4.183.995.400	APBN (DAK)
					Anisia		Bulukumpa			
					Babana		Ujung Loe			
					Balakang		Rilau Ale			
					Balang Bessi		Bulukumpa			
					Balang Riri		Bulukumpa			
					Balangtieng		Rilau Ale			
					Balangtikeke		Ujung Loe			
					Bali Konrong		Kindang			
					Bara Batu		Bulukumpa			
					Barana		Rilau Ale			
					Batu Eja		Rilau Ale			
					Bintanaja		Gantarang			
					Bonto Mate'ne		Gantarang			
					Bonto Pao		Bulukumpa			

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Bonto Rita		Kindang			
	Bonto Ulu		Gantarang			
	Danggarehang		Kajang			
	Galung Beru		Gantarang			
	Galung Lohe		Bulukumpa			
	Garumbang I		Rilau Ale			
	Hisang I		Kindang			
	Hulo		Bulukumpa			
	Hisang II		Kindang			
	Ili		Bulukumpa			
	Jalepeng		Rilau Ale			
	Jammu		Bulukumpa			
	Jampue		Gantarang			
	Jannae		Bulukumpa			
	Kadieng		Rilau Ale			
	Kantisang		Kindang			
	Kaseseng		Bulukumpa			
	Kaseseng II		Bulukumpa			
	Kassi Buleng		Bulukumpa			
	Katimbang		Gantarang			
	Latambang		Bulukumpa			
	Laumang		Gantarang			
	Lembang Nyorang		Bulukumpa			
	Lonrong		Ujung Loe			
	Madauleng		Rilau Ale			
	Maremme		Bulukumpa			
	Matunggaleng		Bulukumpa			
	Oddungan		Kindang			
	Pacollong		Kindang			
	Paenre Lompoa		Gantarang			
	Pagentungan		Gantarang			
	Pakombong I		Bulukumpa			
	Pakombong II/PTR		Bulukumpa			
	Palioi		Kindang			
	Pandang-pandang		Rilau Ale			
	Panggilingan		Ujung Loe			
	Pao Canie		Bulukumpa			

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Pao Lohe		Bulukumpa			
	Parigi		Kindang			
	Pattoengan		Bulukumpa			
	Pattontongan		Rilau Ale			
	Punranga		Gantarang			
	Sapobonto Lakatoang		Bulukumpa			
	Sarajoko I-II		Bulukumpa			
	Sarre		Bulukumpa			
	Ta'bangka		Rilau Ale			
	Ta'gentung		Bulukumpa			
	Tanah Kongkong		Gantarang			
	Tibona		Bulukumpa			
	Tuli		Gantarang			
	Aho Lagading		Bulukumpa			
	Badu		Kajang			
	Baji Areng		Gantarang			
	Balang Bina		Kajang			
	Balibutta		Bulukumpa			
	Balla Pale		Bulukumpa			
	Balleanging		Kindang			
	Bandu		Bulukumpa			
	Bangsalaya		Kindang			
	Bantilang		Rilau Ale			
	Batu Lapsi		Gantarang			
	Batu Lassu		Kajang			
	Batu Nilamung		Kajang			
	Batulohe		Bulukumpa			
	Bilang Rea		Kindang			
	Bili		Kajang			
	Bobo		Kajang			
	Bokong		Gantarang			
	Bole-Bole		Bulukumpa			
	Bollie		Bulukumpa			
	Bongkasae		Bulukumpa			
	Bongki		Kindang			
	Bonto manipi		Bulukumpa			
	Bonto Raja		Gantarang			

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Bonto Rihu		Rilau Ale			
	Bonto-Bontoa		Kindang			
	Borong Kondo		Rilau Ale			
	Borong Loe		Gantarang			
	Borong Parring		Kindang			
	Buakang Tangaya		Kindang			
	Cambang Boko		Gantarang			
	Capenge		Rilau Ale			
	Cilellang		Bulukumpa			
	Cinranae		Bulukumpa			
	Daloba		Kajang			
	Donggo		Gantarang			
	Garumbang II		Rilau Ale			
	Kabibing		Kajang			
	Ka'bung		Kajang			
	Kalibong		Kindang			
	Kalicompeng		Ujung Loe			
	Kalimulasa		Kindang			
	Kalle' E		Bulukumpa			
	Kampenni		Bulukumpa			
	Kanaria		Bonto Tiro			
	Karambu Lotong		Rilau Ale			
	Karosi		Kajang			
	Kirasa		Gantarang			
	Kullenge		Bulukumpa			
	Labutakkang		Bulukumpa			
	Lambeang		Kajang			
	Lembang Tinurung		Bulukumpa			
	Liku Mitti		Rilau Ale			
	Maesa		Gantarang			
	Mangottong		Rilau Ale			
	Ma'jangka		Rilau Ale			
	Manyoleng		Rilau Ale			
	Memangan		Rilau Ale			
	Munte Rilau		Bulukumpa			
	Napenge		Rilau Ale			
	Oro		Kindang			

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
					Pabbuaya		Kajang			
					Pakanre Lembang		Bulukumpa			
					Paku-Paku		Kajang			
					Pa'lelang		Bulukumpa			
					Palipi		Bulukumpa			
					Palimpungang		Rilau Ale			
					Palimpungang I		Rilau Ale			
					Pamborong		Rilau Ale			
					Panrioang Meong		Bonto Tiro			
					Panrioang Jarang		Kindang			
					Paradae		Bulukumpa			
					Passimbungan		Kindang			
					Passorengan		Kajang			
					Pasuru		Rilau Ale			
					Pattompongan		Bonto Tiro			
					Pulanting		Bulukumpa			
					Sakku		Kajang			
					Sapaya		Kajang			
					Sarrae		Bulukumpa			
					Soppeng		Kajang			
					Sumpang Ale		Bulukumpa			
					Tamarellang		Bulukumpa			
					Tanah Illi		Rilau Ale			
					Tihele		Kajang			
					Tinurung		Kajang			
					Toddoe		Rilau Ale			
					Toga		Kajang			
					Tombong		Gantarang			
1	03	02	24	15	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Terselenggaranya Kegiatan Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi			400.000.000	APBD
1	03	02	24	16	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Meningkatnya Peran Serta P3A Dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi			100.000.000	APBD
1	03	02	24	27	Pengelolaan Data Curah Hujan , Debit Sungai Dan Data pertanian	tersedianya data curah hujan, debit sungai dan data pertanian			250.000.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
					Pembangunan Stasiun Curah Hujan					
					- Kec. Kindang		Kindang			
					- Kec. Kajang		Kajang			
					- Kec. Bonto Bahari		Bonto Bahari			
					- Kec. Gantarang		Gantarang			
					- Kec. Bulukumpa		Bulukumpa			
					Rehabilitasi Stasiun Curah Hujan					
					- Kindang		Kindang			
					- Basokeng Kec. Bonto Tiro		Bonto Tiro			
					- Borong Rappoa Kec. Kindang		Kindang			
1	03	02	24	28	Peningkatan Jaringan Irigasi	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi pada kondisi awal.			2.761.683.600	APBD
					Irigasi Barana Kec. Bulukumpa		Bulukumpa			
					Irigasi Pangkae Desa Balangtarang		Bulukumpa			
					Irigasi Lompo Sapiri Desa Kambuno		Bulukumpa			
					Irigasi Jeri - Jeri		Bulukumpa			
					Irigasi pulohe sabberga desa Bulu Bulu		Bulukumpa			
					Irigasi Pao Apangnge - Jojjolo		Bulukumpa			
					Irigasi Garompong desa Salassae		Bulukumpa			
					Irigasi Pulonggo - Bulu bulu		Bulukumpa			
					Irigasi Cilallang - Balangtarang		Bulukumpa			
					Irigasi Buakang Tangayya		Kindang			
					Irigasi Buroncong Desa Topanda		Rilau Ale			
					Irigasi Pasuru (Bendung) Desa Bonto Bangun		Rilau Ale			
					Irigasi Maroangin Jonjoro Desa Pangalloang		Rilau Ale			
					Irigasi Lohaya - Karama		Rilau Ale			
					Irigasi Tuli 2 - Bukit Harapan		Gantarang			
					Irigasi Bonto Ulu Desa Dampang		Gantarang			
					Irigasi Bontomangape - Paenre Lompoa		Gantarang			
					Irigasi Bontoraja Sekunder Bayang-bayang (P3A Dusuru)		Gantarang			
					Irigasi Palimassang (sekunder Bayang Bayang desa padang)		Gantarang			
					Irigasi Passimbungan		Kindang			
					Irigasi Paenre Samelang - Sopa		Kindang			
					Irigasi Kalicompeng		Ujung Loe			
					Irigasi Babana (saluran sekunder Balong)		Ujung Loe			

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Irigasi Balntikeke		Ujung Loe			
	Irigasi Lonrong		Ujung Loe			
	Irigasi atubung - Tambangan		Kajang			
	Irigasi Bontoa - Lembanna		Kajang			
	Irigasi Re're		Kajang			
	Irigasi Manri'risi		Bontotiro			
	Irigasi Batu Lamung Jongkia		Kindang			
	Irigasi Desa Tammaona		Kindang			
	Irigasi Desa Somba Palioi		Kindang			
	Irigasi Pandang pandang		Rilau Ale			
	Irigasi Tibona		Rilau Ale			
	Irigasi Desa Kec. Kindang		Kindang			
	Irigasi Pao Canie Kel. Tanete		Bulukumpa			
	Irigasi Tamarellang Kel. Ballasaraja		Bulukumpa			
	Irigasi Lompo Sapiri Desa Kambuno		Bulukumpa			
	Irigasi Bawi Kec. Gantarang		Gantarang			
	Irigasi Bawi-Bawi Kec. Gantarang		Gantarang			
	D.I. Biroro		Bulukumpa			
	D.I. Badong		Bulukumpa			
	D.I. Jera Buajae		Bulukumpa			
	D.I. Cobbu		Bulukumpa			
	D.I. Lompo Boddong		Bulukumpa			
	D.I. Buhung Lembang		Bulukumpa			
	D.I. Pao Apange		Bulukumpa			
	D.I. Tuagere		Bulukumpa			
	D.I. Lembang Galla		Bulukumpa			
	D.I. Baruttgart		Bulukumpa			
	D.I. Galung Lembang		Bulukumpa			
	D.I. Paenre Poke		Bulukumpa			
	D.I. Buhung Lassa		Bulukumpa			
	D.I. Paenre Lompoa		Bulukumpa			
	D.I. Buhung Loae		Bulukumpa			
	D.I. Batu Menteng		Bulukumpa			
	D.I. Batu Lompoe		Bulukumpa			
	D.I. Bocca		Bulukumpa			
	D.I. Terroe		Bulukumpa			
	D.I. Libboe		Bulukumpa			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				D.I. Pakkae		Bulukumpa			
				D.I. Tobulu		Bulukumpa			
				D.I. Songi Panda		Bulukumpa			
				D.I. Bonto Leppae		Rilau Ale			
				D.I. Jempang Pali		Rilau Ale			
				D.I. Bongki Galung		Rilau Ale			
				D.I. Paenre Punranga		Rilau Ale			
				D.I. Pusingkuru		Rilau Ale			
				D.I. Timboho		Rilau Ale			
				D.I. Lotong-Lotong		BontoBahari			
				D.I. Batu Leppa		BontoTiro			
				D.I. Manririsi		BontoTiro			
				D.I. Rere		BontoTiro			
				D.I. Uhea		BontoTiro			
				D.I. Pumbosi		BontoTiro			
				D.I. Pattanangan Bissua		BontoTiro			
				D.I. Kalanting		Herlang			
				D.I. Kalumpang		Kajang			
				D.I. Be'lang		Kajang			
				D.I. Cobbu Bakara		Kindang			
				D.I. Parigi Anrihua		Kindang			
				D.I. Bijawang-Anruling		Kindang			
				D.I. Oro Keke		Kindang			
				D.I. Matilu		Kindang			
				D.I. Oro Pattalassang		Kindang			
				D.I. Tassika		Kindang			
				D.I. Buakang Sapaya		Kindang			
				D.I. Ere Marro		Kindang			
				D.I. Buakang A'nisia		Kindang			
				D.I. Dongi		Kindang			
				D.I. Sempo		Kindang			
				D.I. Buakang Dampara		Kindang			
				irigasi tersier Marana		Rilau Ale			
				Irigasi Jalepeng Primer		Rilau Ale			
				Irigasi Pasuru (Bendung) Desa Bajiminasa		Rilau Ale			
				Irigasi Cilibbo Desa Karama		Rilau Ale			
				irigasi Panyutanah		Gantarang			

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Irigasi Katimbang Toe		Gantarang			
	Irigasi Kalamassang 2 (kalebong Aloe)		Gantarang			
	Irigasi Dusun Katimbang		Gantarang			
	Irigasi Camba-camba (BTN bongkas)		Gantarang			
	irigasi Jampue		Gantarang			
	D.I Tuli		Gantarang			
	Irigasi Sekunder Jatie (Lanjutan)Jokka		Gantarang			
	Irigasi D.I Bacari		Gantarang			
	Irigasi Beccikang 2		Gantarang			
	Irigasi D.I Bobo		Gantarang			
	Irigasi D.I Kirasa		Gantarang			
	Irigasi Bontoraja		Gantarang			
	Irigasi Kabibing		Kajang			
	Irigasi Sangkala		Kajang			
	irigasi Bungaya		Kajang			
	Irigasi Sapaya		Kajang			
	Irigasi Bobo		Kajang			
	Irigasi Desa Sangkala		Kajang			
	Irigasi Lompok Kabibing		Kajang			
	Irigasi Sekunder Kadieng		Kajang			
	Irigasi Dusun Kanari		Kajang			
	Irigasi Sakku		Kajang			
	irigasi Pabbuaya Bongkina		Kajang			
	Irigasi Galoggo		Kajang			
	Irigasi Dusun Kassibuta,kaluku sipoko		Kajang			
	Irigasi galung Beru , Borong Rappoa		Kindang			
	Irigasi Bongki		Kindang			
	Irigasi Uluparang 1		Kindang			
	Irigasi Sungai Kirasa		Kindang			
	irigasi Bingkeke		Kindang			
	D.I irigasi Kalimulasa II		Kindang			
	D.I irigasi A'nisia		Kindang			
	Irigasi D.I Galung Berua		Kindang			
	Irigasi D.I Lambe-lambe		Kindang			
	irigasi Uluparang,Palioi,Kaluku dan Br.paku		Kindang			
	D.I Hisang I		Kindang			
	Irigasi Tappalang		Kindang			

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Irigasi Rappo Lohea,Manririsi		Bonto Tiro			
	Irigasi Sekunder Maddongko		Ujung Loe			
	Irigasi Tersier Manni		Ujung Loe			
	Irigasi Sekunder kacimpo		Ujung Loe			
	Irigasi Sekunder Capagarigi		Ujung Loe			
	Irigasi Sekunder desa Seppang		Ujung Loe			
	Irigasi Anggalengeng		Ujung Loe			
	Irigasi jln.pattimbuseng desa seppang		Ujung Loe			
	Irigasi Dsn Tanah Cellae,desa Seppang		Ujung Loe			
	Irigasi Dsn Lembang,desa salemba		Ujung Loe			
	Irigasi Dsn Kapasa,desa salemba		Ujung Loe			
	Irigais Tersier Dsn.parunge,jatie desa Manjalling		Ujung Loe			
	irigasi sekunder Dsn.Kalicipeng desa balong		Ujung Loe			
	Irigasi Kalanting-Pallantikan		Herlang			
	Irigasi Kaseseng I		Bulukumpa			
	Irigasi Badong		Bulukumpa			
	Irigasi Jeri-Jeri		Bulukumpa			
	Irigasi Manjalling Desa Manjalling		Ujung Loe			
	Irigasi Pakombong II		Bulukumpa			
	Irigasi maddinging		Bulukumpa			
	Irigasi Ballapale		Bulukumpa			
	Irigasi Tamarellang		Bulukumpa			
	Irigasi Tersier Desa Barugae		Bulukumpa			
	Irigasi Galung Barue		Bulukumpa			
	Irigasi Pulonggo		Bulukumpa			
	Irigasi Ulu Galung		Bulukumpa			
	Irigasi Bollia 2		Bulukumpa			
	Irigasi Munte Desa Sapobonto		Bulukumpa			
	Irigasi Penre Tengngae Desa Bulo-Bulo		Bulukumpa			
	Irigasi Hulo		Bulukumpa			
	Irigasi Pattimbuseng Desa Seppang		Ujung Loe			
	Irigasi Lingk. Parangjalling Kel. Dannuang		Ujung Loe			
	Irigasi Desa Padang Loang		Ujung Loe			
	Irigasi Desa Lonrong		Ujung Loe			
	Irigasi Desa Biajawang		Ujung Loe			
	Irigasi Tersier Desa Bijawang		Ujung Loe			
	Irgasi Sekunder Desa Bijawang		Ujung Loe			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Irigasi Tersier Desa PadangLoang		Ujung Loe			
				Irigasi Sekunder Desa PadangLoang		Ujung Loe			
				Irigasi Paenre Tangngae Desa Bulu-Bulu		Bulukumpa			
				Irigasi Ballangtinggia Desa Bontominasa		Bulukumpa			
				Irigasi Kampenni		Bulukumpa			
				Irigasi Tekobalumbang		Bulukumpa			
				Irigasi Balumbang		Bulukumpa			
				Irigasi Para-para malebbang		Bulukumpa			
				Irigasi Bola Perringe		Bulukumpa			
				Irigasi Lembang Tinurang		Bulukumpa			
				D.I Lambocca Tanete		Bulukumpa			
				Irigasi Ulu galung Desa Anrihua		Kindang			
				Irgasi Bonto-Bontoa Desa Anrihua		Kindang			
				Irigasi Hisang 2 Desa Tamaona		Kindang			
				Irigasi Paenre Parigi 1 Anrihua		Kindang			
				Irigasi Tundako		Kindang			
				Irigasi Paenre Parigi 2 Balibo		Kindang			
				Irigasi Balleanging Dsn Pabbotoan		Kindang			
				Irigasi Galng Berua Balleanging		Kindang			
				Irigasi Dampara Dsn Balleangin		Kindang			
				Irigasi Borong Tokka Anrihua		Kindang			
				Irigasi Ajuarae Barombong		Gantarang			
				Irigasi Galung Barue Kel. Jalanjang		Gantarang			
				Irigasi Borong-borong Labbue Desa Bontomasila		Gantarang			
				Irigasi Tombolo Dsn Jonjoro Desa Pangngaloang		Rilau Ale			
				Irigasi Di Campaga Desa Bonto Bangun		Rilau Ale			
				Irigasi Assun Batua Desa Bonto Bangun		Rilau Ale			
				D.I Borong Dasi Bontomanai		Rilau Ale			
				D.I Manggottong		Rilau Ale			
				Pembangunan daerah irigasi		Kec. Ujung Loe			
				Irigasi Kalicompeng		Kec. Ujung Loe			
				SALURAN IRIGASI CEMPAE		UJUNG LOE			
				REHABILITASI IRIGASI KALOTORO		UJUNG LOE			
				Pembangunan Irigasi Lingkungan Paranyelling		Ujung Loe			
				IRIGASI		UJUNG LOE			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembangunan Saluran Irigasi di Bongki Dusun Campadidie		Gantarang			
				Daerah Irigasi Bontoraja		Gantarang			
				Rehabilitas Pembangunan Irigasi Parigi Satu Dusun Pasimbungan		Kindang			
				Pembangunan Irigasi Kantisang Dusun Pasimbungan		Kindang			
				Irigasi Dusun Bontomate'ne (Lanjutan)		Gantarang			
				Irigasi Dusun Palimassang batas Desa Padang - Bontomacinna		Gantarang			
				Pembanguna Irigasi Lawarenge		Gantarang			
				Pembangunan Irigasi		Gantarang			
				Irigasi Manggottong		Rilau Ale			
				Irigasi		Bulukumpa			
				Pembangunan Irigasi		Bulukumpa			
				Rehabilitasi sekunderDaerah Irigasi (Lanjutan)		Kajang			
				D.I Jawi - Jawi		Bulukumpa			
				D. I TEMBA.		Bulukumpa			
				D. I Balombisi.		-			
				D.I Sapayya		Kajang			
				Irigasi Borong Kaluku Desa Anrihua		Kindang			
				Irigasi Tudangko Desa Anrihua		Kindang			
				D.I Lompo Sapiri		Bulukumpa			
				D.I Jari-jari		Bulukumpa			
				D.I Calleleng		Bulukumpa			
				D.I Pao Cania		Bulukumpa			
				D.I Biroto		Bulukumpa			
				D.I Badong		Bulukumpa			
				D.I Jera Buajae		Bulukumpa			
				D.I Lompo Boddong		Bulukumpa			
				D.I Lambocca		Bulukumpa			
				Pembangunan Bendungan Sungai paragi satu Dusun Pasimbungan		Kindang			
				Pengadaan Pengairan Skunder Dusun Batu Longgae		Gantarang			
				Pengadaan Talud Dusun Mattoangin, Batu Longgae dan Lingkungan Panju Tanah		Gantarang			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
				Saluran Pembuang D.I Galung Beru		Gantarang				
				Irigasi Batu Eja Desa Bontolohe		Rilau Ale				
				Irigasi Galung Boddong Desa Bontolohe		Rilau Ale				
				irigasi Lakatoang		Bulukumpa				
				Irigasi desa Barombong		Gantarang				
				Irigasi Borong Kalukua desa Anrihua		Kindang				
				Irigasi attekko desa sipaenre		Kindang				
1	03	02	24	29 Inventarisasi Asset Irigasi	tersedianya data asset irigasi dan data penanganan irigasi			200.000.000	APBD	
1	03	02	24	30 Perencanaan Sumber Daya Air	<i>Tersedianya Dokumen Database Perencanaan dan master plan JPA dan JSA</i>			200.000.000	APBD	
1	03	02	24	31 Perencanaan Pembangunan Jaringan Sumber air	tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan Jaringan Sumber Air			200.000.000	APBD	
1	03	02	24	32 Perencanaan Pembangunan Jaringan Pemanfaatan Air	tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan Jaringan Pemanfaatan Air			350.000.000	APBD	
1	03	02	25	F. Program Penyediaan dan Pengelolaan air Baku					350.000.000	
1	03	02	25	4 Pembangunan Sumur Sumur air Tanah						
					Tersedianya fasilitas air baku yang menunjang pemanfaatan air tanah			300.000.000	APBD	
				Sumur Air Tanah Kel. Tanete Kec. Bulukumpa		Ujung Bulu				
				Sumur Air Tanah Kel. Palampang Kec. Rilau Ale		Bulukumpa				
				Sumur Air Tanah Baji Kel Jalanjang Kec. Gantarang		Rilau Ale				
				Sumur Air Tanah Batu loe Kel. Dannuang		Gantarang				
				Sumur Air Tanah Ballasaraja Kec. Bulukumpa		Ujung Loe				
				Sumur Air Tanah Paenrelompoa Kec. Gantarang		Bulukumpa				
				Sumur Air Tanah Kel. Metekko. Kec. Gantarang		Gantarang				
				Sumur Air Tanah Kec. Kindang		Kindang				
				Sumur Air Tanah Kel. Bintarore		Gantarang				
				Sumur Bor Persawahan		Gantarang				
				SUMUR BOR BONTO ULU		GANTARANG				

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
					SUMUR BOR		GANTARANG/KI NDANG			
					Pengadaan Sumur Bor dalam Dusun Bonto kamase, Tambokkenge, dan Puadoli		Gantarang			
					Pengadaan Sumur Bor dangkal Dusun Tamangingisi		Gantarang			
					Pengadaan Sumur Bor Temba		Rilau ale			
					Pengadaan Sumur Bor		Rilau ale			
					SUMUR BOR		BONTOTIRO			
					Sumur Bor Sawah kelompok tani makmur		Rilau ale			
					Sumur Bor sawa Kelompok tani Nusantara		Rilau ale			
1	03	02	25	05	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air	tersedianya Rencana Tata Tanam Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan pelaku usaha			50.000.000	APBD
1	03	02	26		G. Program Pengembangan dan pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya				1.200.000.000	APBD
1	03	02	26		Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Meningkatnya fungsi Pengelolaan Air Baku			1.200.000.000	
					Pembangunan Bendungan					
					Bendungan Bontorihu		Rilau Ale- Bulukumpa			
					Bendungan Kec. Kindang		Kindang			
					Pembangunan Embung					APBD
					Embung Dusun Bonto Ulu		Gantarang			
					Embung Desa Garuntungan		Kindang			
					Embung Liku Korong Kec. Gantarang		Gantarang			
					Embung Lembang		Bonto Bahari			
					Embung Seppang Kec. Ujung loe		Ujungloe			
					Embung Desa Tammaona		Kindang			
					Embung Kel.Bejala		Bontobahari			
					Embung Desa Borong kec. Herlang		Herlang			
					Embung Sangkala		Kajang			
					Embung Anrihua		Kindang			
					Embung Somba Palioi		Kindang			
					Embung Kec. Kindang		Kindang			
					Embung Kec. Gantarang		Gantarang			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Embung Kec. Ujungloe		Ujungloe			
				Embung Cilallang Kec. Bulukumpa		Bulukumpa			
				Embung Pattiroang, Bungaya		Kajang			
				Embung Sangkala		Kajang			
				Embung Bantinobo		Kajang			
				Embung Mattoanging		Kajang			
				Embung Dsn.Padodo,Desa Bijawang		Ujung Loe			
				Embung Dsn Mattirowalie,Desa seppang		Ujung Loe			
				EMBUN		KINDANG			
				EMBUN DUSUN ALUPARANG RAYA		KINDANG			
				Pembangunan Dam / Cekdam					
				Dam / Cekdam Tappalang					
				Dam/ Cekdam Bijawang					
				Dam / Cekdam Borong Rappoa					
				Dam / Cekdam Bonto Rihu					
				Dan/ Cekdam Kec. Kajang					
1	03	02	28	H. Program Pengendalian Banjir				6.100.000.000	APBD
1	03	02	28	03 Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Terciptanya kondisi sungai / kanal yang stabil pada tebing dan pengaliran			1.500.000.000	APBD
				Normalisasi Sungai					
				Normalisasi Alur S.Balangtieng - Desa Lonrong		Ujung Loe			
				Normalisasi Alur & Pembuatan Bangunan Pengatur S.Balangtieng - Balangtikeke, Kec. Ujung Loe		Ujung Loe			
				Normalisasi Alur Muara Lama S. Bialo		Ujung Bulu			
				Pemb. Jetty pengarah muara S. Sapiri		Gantarang			
				Lanjutan Normalisasi Sungai Lajae		Gantarang			
				Normalisasi sungai Lolisang		Kajang			
				Normalisasi sungai didepan Bendung D.I Lonrong		Ujung Loe			
				Normalisasi Sungai Balangtieng		Ujung Loe			
				Normalisasi sungai Ceppie		Ujung Loe			
				Pembangunan tanggul kanal taccorong (lapas bulukumba)		Gantarang			
				b. Perkuatan Tebing Sungai					
				Perkuatan Tebing Sungai Sapiri		Gantarang			
				Perkuatan Tebing Sungai Salo Turu Ele		Gantarang			
				Perkuatan Tebing Salo Kaloro Loe		Gantarang			
				Perkuatan Tebing Sungai Lajae		Gantarang			
				Dusun Bocco Bocco'e Kec. Gantarang		Gantarang			

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Perkuatan Tebing Sungai Manjalling		Ujung Loe			
	Perkuatan Tebing Sungai Manyampa		Bonto Bahari			
	Perkuatan Tebing Sungai Bajangnge		Herlang			
	Perkuatan Tebing Sungai Balangtieng- Dannuang		Ujungloe			
	Perkuatan Tebing Sungai Balangtieng- Manjalling		Ujungloe			
	Perkuatan Tebing Sungai Durian Kec. Kajang		Kajang			
	Perkuatan Tebing Sungai Solarian Kec. Kajang		Kajang			
	Perkuatan Tebing Sungai Sumalaya Kec. Kajang		Gantarang			
	Perkuatan Tebing Sungai Na'na		Kindang			
	Perkuatan Tebing Sungai Dusun Tojaga desa Batukaropa		Rilau Ale			
	Perkuatan Tebing Sungai Balantieng Babana dannuang		Ujungloe			
	Perkuatan Tebing Sungai Balantieng		rilau Ale /bulukumpa			
	Perkuatan Tebing Sungai Dajo		Herlang			
	Perkuatan Tebing Sungai Bialo		Ujung Bulu			
	Perkuatan Tebing saluran Sungai togambang		Gantarang			
	Penguatan tebing sungai tekona-babana		Herlang			
	Perkuatan Tebing sungai Dsn Bajang Desa Gunturu		Herlang			
	Perkuatan Tebing Sungai Salo loange		Gantarang			
	Lanjutan Pembangunan Perkuatan Tebing sungai Balantieng		Ujung Loe			
	Penguatan Tebing Sungai Balantieng		Ujung Loe			
	Penguatan Tebing Sungai Balantieng		Ujung Loe			
	Pengadaan Tanggul Bayang-bayang Dusun Galung Beru		Gantarang			
	Pengadaan Tanggul Penahan Ombak dekat Pantai Marina		Gantarang			
	penahan banjir dusun bajanga		Herlang			
	c. Rehabilitasi Kanal Dalam Kota					
	Rehab. Kanal Caile		Ujung Bulu			
	Rehab. Kanal Labuang Korong		Ujung Bulu			
	Rehab. Kanal Teppongnge		Ujung Bulu			
	Rehab. Kanal Loka		Ujung Bulu			
	d. Pembangunan Kanal					

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembangunan Kanal Taccorong					
				Pembangunan Kanal Sekunder Polewali		Gantarang			
				Pembangunan & Pengerukan Kanal Seppa Lajae		Gantarang			
				Pembangunan Kanal BolaCippe		Gantarang			
				Pembangunan Kanal Jawi-Jawi - LajaE		Gantarang			
				Pembangunan Kanal Teko-Kasuara		Gantarang			
				Pengerukan		Ujung Bulu			
				Pengerukan		Ujung Loe			
				Pengerukan Gantarang		gantarang			
				Pengerukan Kirasa		gantarang			
				e. Pembuatan bangunan pengatur sungai					
				Pembuatan Bangunan Pengatur		Ujung Loe			
				S.Balangtieng - Balangtikeke, Kec. Ujung Loe					
				Pemb. Jetty pengarah muara S. Sapiri		Gantarang			
				Kec.Gantarang					
				Penanggulangan Banjir dalam Kota					
1	03	02	28 05	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir			400.000.000	APBD
				Belanja Bahan/ Meterial					
				- Borjong Anyaman					
				- Pompa Air					
				- Pipa Saluran 8 inchi					
				Belanja Bahan Baku Bangunan Penaggulangan darurat Bencana (swaklola)					
				- Wilayah UPT SDA I (S.Bialo - Bijawang)					
				- Wilayah UPT II SDA II (S.Balangtieng)					
				- Wilayah UPT SDA III (Anyorang)					
				- Wilayah UPT IV IV (S.Sangkala-Basokeng)					
				-Wilayah UPT SDA V (S.Balantikeke- Bampang)					
				Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana JSA					
				- Petugas kebersihan Kanal					
				- Lomba Kebersihan Kanal					
				Bronjong sungai samping jual Ayam Potong didepan Mall		Gantarang			

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
					Bronjong Sungai Manyampa		Ujung Loe			
					Bronjong/ Talud Sungai Maetang Desa Balong		Ujung Loe			
1	03	02	28	07	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukaan Sungai / Kali	Terciptanya Kondisi Sungai/Kali/Kanal pembuang yang bersih dan fungsi pengaliran lancar dalam mencegah banjir.			2.000.000.000	APBD
					Pengecatan & Pembangunan Pagar (Railing) Kanal					
					Pemb. Pagar Kanal M. Noor					
					Pemb. Pagar Kanal Pasissirie		Ujung Bulu			
					Pemb. Pagar Kanal Loka		Ujung Bulu			
					Pemb. Pagar Kanal Kasimpureng		Ujung Bulu			
					Pengecatan Kanal Dalam Kota		Ujung Bulu			
					Pengadaan Alat Operasional Kanal					
					Perlengkapan Pekerja Kanal					
					Pengerukan sungai Kab. Bulukumba (Muara sungai Bialo)		Ujung Bulu			
					Pengerukan Sungai Lolisang Kec. Kajang		Kajang			
					Pengerukan Sungai Caccae Kec. Ujung Loe		Ujung Loe			
					Pengerukan Sungai lajae (hulu) desa Polewali		Gantarang			
					Pengerukan Sungai Balang Sapiri		Gantarang			
					Pengerukan Sungai Lembang Keke		Gantarang			
					Pengerukan Sungai Durian		Kajang			
					Pengerukan Sungai Aka-aka		Kajang			
					Pengerukan Sungai Paku-Paku Desa Lembang Lohe		Kajang			
					Pengerukan Saluran Empang Desa Lembanna		Kajang			
					Pengerukan Saluran Pembuangan Desa Manjalling		Ujung Loe			
					Pengerukan Saluran Pembuangan Desa Garanta		Ujung Loe			
					Pengerukan Saluran Pembuangan Desa Manyampa		Ujung Loe			
					Pengerukan sungai Tambak Desa Manyampa		Ujung Loe			
					Pengerukan Sungai Desa Paenre Lompoe		Gantarang			
					Pengerukan Kanal Tepponege		Gantarang			
					Pengerukan Kanal Dalam Kota		Ujung Bulu			

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
					Pengerukan Sungai Kirasa Desa Palambarae-Taccorong		Kindang			
					Pengerukan dan Perkuatan Tebing Kanal Taccorong BTN puri		Gantarang			
1	03	02	28	09	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Terbangunnya Prasarana pengaman pantai			2.200.000.000	APBD
					Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai					
					Tanggul Pengaman Pantai Para-Para		Bonto Tiro			
					Tanggul Pengaman Pantai Samboang		Bonto Tiro			
					Tanggul Pengaman Pantai Butung Kec. Herlang		Herlang			
					Tanggul Pengaman Pantai Alorang Kec.Herlang		Herlang			
					Tanggul Pengaman Pantai Dajo Kec. Herlang		Bonto Bahari			
					Tanggul Pengaman Pantai P. Liukang		Bonto Bahari			
					Tanggul Pengaman Pantai Sapolohe		Bonto Bahari			
					Tanggul Pengaman Pantai Kasuso		Bonto Bahari			
					Tanggul Pengaman Pantai Bampang		Bonto Bahari			
					Tanggul Pengaman Pantai Bajangnge		Herlang			
					Tanggul Pengaman Pantai Pattinoang		Herlang			
					Tanggul Pengaman Pantai Liang- Liang		Herlang			
					Tanggul Pengaman Pantai Kasisilasayya, Kajang		Kajang			
					Tanggul Pengaman Pantai Tanajaya Kec. Kajang		Kajang			
					Tanggul Pengaman Pantai Pantama Kec. Kajang		Kajang			
					Tanggul Pengaman Pantai Panrangluhu		Bonto Bahari			
					Tanggul pengaman pantai muara kanal terang terang		Ujung Bulu			
					Tanggul Pantai Gusunge Bentenge		Ujung Bulu			
					Tanggul Pantai Labuang Korong		Ujung Bulu			
					Tanggul Pengaman Pantai merpati		Ujung Bulu			
					Tanggul Pesisir Pantai Desa Pantama		Kajang			
					Tanggul Pengaman Pantai lingk. Kassi		Kajang			
					Tanggul Pulau Liukang Loe		Bontobahari			
					Tanggul Pengaman Pantai Dsn.Bajang & Dsn Bassiu		Herlang			
					Tanggul Pengaman Pantai Butung II Kel.Bontokamase		Herlang			
					Tanggul Sungai Lingk.Babana Kel.Dannuang		Ujung Loe			
					Tanggul Sungai Bampang Kel. Sapolohe		Bontobahari			
					Tanggul Pengaman Pantai Kel.Sapolohe		Bonto Bahari			
					Tanggul Pengaman Pantai Desa Darubiah		Bonto Bahari			
					Tanggul Pengaman Pantai Kel Jalanjang		Gantarang			
					Tanggul Pengaman Pantai Kel Mariorennu		Gantarang			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Tanggul Pengaman Pantai Cappa Batua Lingk. Kassi		Kajang			
				Tanggul Bayang-Bayang dusun Galung Beru		Gantarang			
				Tanggul Penahan Ombak dekat pantai Marina		Gantarang			
				Tanggul Banjir S.Lajae		Gantarang			
				Pembangunan Pemecah Ombak					
				Pemb. Pemecah Ombak Pantai P. Liukang		Kajang			
				Pemb. Pemecah Ombak Pantai Bampang-tanah lemo		Bonto Bahari			
				Pemb. Pemecah Ombak Pantai Bajangnge		Herlang			
				Pemb. Pemecah Ombak Pantai Pattinoang		Herlang			
				Pemecah Ombak Lassang-Lassang		Gantarang			
				Pemecah Ombak Laikang		Kajang			
				Penahan Ombak Link. Kassi		Kajang			
				Pemecah Ombak Kel.Sapolohe		Bontobahari			
				Pemecah Ombak Lingk.tokambang		Bontobahari			
				Pemecah Ombak Turungan Beru		Herlang			
				Tanggul Pengaman Pantai Cappa Batua Lingk. Kassi		Kajang			
				Tanggul Bayang-Bayang dusun Galung Beru		Gantarang			
				Tanggul Penahan Ombak dekat pantai Marina		Gantarang			
				Tanggul Banjir S.Lajae		Gantarang			
				Pembangunan Pemecah Ombak					
				Pemb. Pemecah Ombak Pantai P. Liukang		Kajang			
				Pemb. Pemecah Ombak Pantai Bampang-tanah lemo		Bonto Bahari			
				Pemb. Pemecah Ombak Pantai Bajangnge		Herlang			
				Pemb. Pemecah Ombak Pantai Pattinoang		Herlang			
				Pemecah Ombak Lassang-Lassang		Gantarang			
				Pemecah Ombak Laikang		Kajang			
				Penahan Ombak Link. Kassi		Kajang			
				Pemecah Ombak Kel.Sapolohe		Bontobahari			
				Pemecah Ombak Lingk.tokambang		Bontobahari			
				Pemecah Ombak Turungan Beru		Herlang			

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
1	04	01		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				57.214.913.870,00		
1	04	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				917.175.000,00		
1	04	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Bulukumba	76.560.000,00	APBD	
1	04	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.	Bulukumba	10.350.000,00	APBD	
1	04	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Terspenuhinya jasa administrasi keuangan.	Bulukumba	311.217.500,00	APBD	
1	04	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor.	Bulukumba	24.000.000,00	APBD	
1	04	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Bulukumba	6.000.000,00	APBD	
1	04	01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	Bulukumba	2.141.750,00	APBD	
1	04	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulukumba	264.478.000,00	APBD	
1	04	01	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Terpenuhinya penyediaan makan minum, ATK dan penggandaan.	Bulukumba	222.427.750,00	APBD	
1	04	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.			9.250.000.000,00		
1	04	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya bangunan gedung Kantor pemerintah	Bulukumba	7.700.000.000,00	APBD	
					Belanja Modal dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor			7.700.000.000,00	APBD	
					Pembangunan Kanto Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Lanjutan)		Kec. Ujung Bulu	1 Unit	500.000.000,00	APBD
					Pembangunan Mall Pelayanan Publik		Kec. Ujung Bulu	1 Unit	6.045.000.000,00	APBD
					Biaya Konsultansi MPP		Kec. Ujung Bulu	1 paket	455.000.000,00	APBD
					Pembangunan AULa Kantor Camat Gantarang		Kec. Gantarang	1 Unit	221.950.000,00	APBD
					Biaya Konsultansi Pembangunan Aula Kantor Camat Gantarang		Kec. Gantarang	1 paket	17.500.000,00	APBD
					Honorarium Pengadaan Barang dan jasa				10.550.000,00	
					Pembangunan Gedung Aula Kantor Camat Herlang		Kec. Herlang	1 Unit	221.950.000,00	APBD
					Biaya Konsultansi Pembangunan Aula Kantor Camat Herlang		Kec. Herlang	1 paket	17.500.000,00	APBD
					Honorarium Pengadaan Barang dan jasa				10.550.000,00	
					Penambahan Gedung Kantor Camat Bulukumpa		Kec. Bulukumpa	1 Unit	175.450.000,00	APBD
					Belanja Konsultansi Penambahan Gedung Kantor Camat Bulukumpa		Kec. Bulukumpa	1 paket	14.000.000,00	
					Honorarium Pengadaan Barang dan jasa				10.550.000,00	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
					Pembangunan Aula/Gedung Pertemuan Kantor Lurah Tanah Kongkong		Kec. Ujung Bulu	1 Unit	0	APBD
					Pembangunan Pagar Gedung JSN 45 Jl. Ahmad Yani		Kec. Ujung Bulu	400 M	0	APBD
					Pembangunan Kantor Lurah Caile		Kec. Ujung Bulu	1 Unit	0	APBD
					Pembangunan gedung serba guna (baruga)		Kec. Kajang	1 Unit	0	APBD
					Pengadaan GEMA Desa		Kec. Kajang	1 Unit	0	APBD
					Pembangunan gedung serbaguna Pabbontoang,buhung Batua,Balleanging		Kec. Kindang	1 Unit	0	APBD
					Pembangunan Gedung PKK Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa	1 Unit	0	APBD
					Penambahan Gedung Kantor Camat Bulukumpa		Kec. Bulukumpa	1 Unit	0	APBD
					Pembangunan aula kapasitas 1000 orang		Kec. Bulukumpa	1 Unit	0	APBD
					Pembangunan GEMA		Kec. Herlang	1 Unit	0	APBD
					Rumah Bangunan Damkar		Kec. Kajang	1 Unit	0	APBD
1	04	01	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulukumba	1 Unit	250.000.000,00	APBD
1	04	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulukumba	1 paket	150.000.000,00	APBD
1	04	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulukumba	1 paket	150.000.000,00	APBD
1	04	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulukumba	10 Unit	300.000.000,00	APBD
1	04	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya gedung kantor yang representatif	Bulukumba		0	APBD
1	04	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan operasional	Bulukumba	10 Unit	50.000.000,00	APBD
1	04	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor yang representatif	Bulukumba	1 paket	50.000.000,00	APBD
1	04	01	02	40	Rehabiltasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Tersedianya rumah Jabatan representatif	Bulukumba	1 paket	0	APBD
1	04	01	02	41	Rehabiltasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Tersedianya rumah Dinas representatif	Bulukumba	1 paket	600.000.000,00	APBD
					Biaya Konsultansi		Bulukumba	1 paket	42.000.000,00	APBD
					Rehab Rumah Jabatan Camat Herlang		Kec. Herlang	1 Unit	186.000.000,00	APBD
					Rehab Berat Rumah Dinas Camat Bontotiro		Kec. Bontotiro	1 Unit	186.000.000,00	APBD
					Rehab Berat Rumah Dinas Camat Kajang		Kec. Kajang	1 Unit	186.000.000,00	APBD
1	04	01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Bulukumba	1 paket	0	APBD
					Rehabilitasi berat bangunan kantor Lurah Bentenge		Kec. Ujung Bulu	1 Unit	0	APBD
					Rehab Kantor Lurah Kalumeme		Kec. Ujung Bulu	1 Unit	0	APBD
					Rehab Kantor Lurah Loka		Kec. Ujung Bulu	1 Unit	0	APBD
					Rehab Gedung Juang 45		Kec. Ujung Bulu	1 Unit	0	APBD
					Renovasi Kantor Veteran Jl. Ahmad Yani		Kec. Ujung Bulu	1 Unit	0	APBD
					Rehab Kantor Camat Ujung Bulu (Lantai 2)		Kec. Ujung Bulu	1 Unit	0	APBD
					Rehabilitasi Gedung Kantor Lurah Matekko		Kec. Gantarang	1 Unit	0	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Rehabilitasi Tribun Lapangan H.A. Sultan Dg. Radja, Lingkungan Ponre		Kec. Gantarang	1 Unit	0	APBD
				Rehab Gedung Masyarakat Ujung Loe Lingkungan Batuloe		Kec. Ujung Loe	1 Unit	0	APBD
				Rehabilitasi aula kantor lurah palampang		Kec. Rilau Ale	1 Unit	0	APBD
				rehab berat kantor luah brongrapoa		Kec. Kindang	1 Unit	0	APBD
				Rehabilitasi sedang/berat Pembangunan Kantor Lurah Sapolohe		Kec. Bontobahari	1 Unit	0	APBD
				Rehabilitasi sedang/berat Pembangunan Kantor Lurah Tanahlemo		Kec. Bontobahari	1 Unit	0	APBD
1	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				300.000.000,00	
1	04	05	01	pendidikan dan pelatihan formal	PNS yang telah mengikuti Diklatpim II dan III	Makassar	3 Org	100.000.000,00	APBD
1	04	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikut bimbingan teknis	Makassar	20 Org	200.000.000,00	APBD
1	04	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				358.000.000,00	
1	04	06	05	penyusunan Program kerja SKPD	tersedianya review rencana strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	Bulukumba	6 Dokumen	50.000.000,00	APBD
1	04			Petugas IT (Operator Aplikasi SIPPA, Si INSAN, SIM BPB, SIM SPAM, KRISNA, OMSPAM)				108.000.000,00	
1	04	06		monitoring,Evaluasi program kegitan SKPD	terwujudnya laporan monitoring dan Evaluasi kegiatan dinas	Bulukumba	36 Dokumen	200.000.000,00	APBD
1	04	15		Program pembangunan sistem pendaftaran tanah				78.000.000,00	
1	04	15	01	penyusunan sistem pendaftaran tanah	Jumlah Persil Tanah Pemda yang bersertifikat	Bulukumba		78.000.000,00	APBD
				Pengadaan sertifikat tanah		Kec. Kajang	100 Sertifikat	26.000.000,00	APBD
				Pengadaan sertifikat tanah		Kec. Kajang	150 Sertifikat	26.000.000,00	APBD
				Penyusunan Database Asset Tanah		Kab. Bulukumba	1 Dokumen	26.000.000,00	APBD
1	04	15		Program pengembangan perumahan				2.040.271.050,00	
1	04	15	02	penyusunan norma,standar,pedoman,dan manual(NSPM)	tersedianya perda tentang perumahan dan kawasan permukiman	Bulukumba		50.000.000,00	APBD
1	04	15	06	Pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terwujudnya pengelolaan PKR-MBR di tingkat kabupaten	Bulukumba		1.640.271.050,00	DAK/ APBD
				Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni		Kec. Ujung Bulu	50 Unit	0	DAK/ APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Perbaikan Rumah tidak layak Lingkungan Loka, Ling. Bontokamase, Ling. Bonto matene		Kec. Ujung Bulu		0	DAK/ APBD
				Rehab Rumah Tak layak Huni Ling. Ela-Ela, Kalumeme, BT. Mangape, BTN Ujung Bulu		Kec. Ujung Bulu	50 Unit	0	DAK/ APBD
				Bedah Rumah Kel. Kasimpureng		Kec. Ujung Bulu	80 Unit/KK	0	DAK/ APBD
				Perbaikan Rumah Masyarakat Miskin		Kec. Ujung Bulu	100 Unit	0	DAK/ APBD
				Rehab/Bedah Rumah		Kec. Gantarang	50 Unit	0	DAK/ APBD
				Rehab Rumah Miskin		Kec. Gantarang	10 Unit	0	DAK/ APBD
				Bedah Rumah Benteng Malewang		Kec. Gantarang	100 Unit	0	DAK/ APBD
				Rehab Rumah Layak Huni		Kec. Gantarang	7 Unit	0	DAK/ APBD
				Bantuan Bedah Rumah bagi warga miskin		Kec. Kajang	20 Unit	0	DAK/ APBD
				Bedah rumah Desa Pantama		Kec.Kajang	30 Unit	0	DAK/ APBD
				Bantuan bedah rumah bagi keluarga miskin		Kec. Kajang	100 Unit	0	DAK/ APBD
				Bantuan Bedah Rumah		Kec. Kajang	50 Unit	0	DAK/ APBD
				Bedah Rumah Bajiminasa / Oro / Pattalassang / Matilu		Kec. Kindang	75 Unit	0	DAK/ APBD
				Bedah rumah		Kec. Bulukumpa		0	DAK/ APBD
				Pengadaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		Kec. Herlang	100 Unit	0	DAK/ APBD
				Bedah Rumah Untuk Warga Miskin		Kc. Ujung Loe		0	DAK/ APBD
1	04	15	13	Penyusunan Data Rumah Umum Khusus Negara Komersil dan Swadaya	Terwujudnya Pembangunan Perumahan Nelayan	Bulukumba		50.000.000,00	APBD
1	04	15	15	Penyediaan Rumah Umum Khusus Negara Komersil dan Swadaya	Terwujudnya Pembangunan Perumahan Nelayan	Bulukumba		0	APBD
1	04	15	17	Peningkatan Kualitas Prasarana Perumahan	Terlaksananya pengelolaan prasarana dan sarana di kawasan perumahan	Bulukumba		300.000.000,00	APBD
1	04	15	17	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang perumahan	Tersebar nya informasi/sosialisasi peraturan daerah tentang perumahan dan kawasan permukiman			0	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	04	15	17	Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan	Terwujudnya masterplan dan DED rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman			0	APBD
1	04	15		Program Lingkungan Sehat Perumahan				200.000.000,00	
1	04	15	07	Penyusunan Data Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum	Tersedianya data perencanaan pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum	Bulukumba	1 Dokumen	200.000.000,00	APBD
				Pendataan/penyusunan Perencanaan rumah Tidak layak huni, Perumahan berbasis Komunitas dan rumah Khusus		Tersebar di 1 Kabupaten	1 Dokumen	200.000.000,00	APBD
1	04	15	10	Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Terwujudnya Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum		0	0	APBD
1	04	15		Program Penataan Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				13.261.473.000,00	
1	04	15	03	Pengadaan/Pembebasan/ Pengamanan Tanah Pemerintah Daerah	Terwujudnya Kepastian Hukum Pemda atas Tanah	Bulukumba		13.261.473.000,00	APBD
				Pengadaan Tanah Sport Center		Kec. Gantarang		4.554.673.000,00	APBD
				Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan Pelabuhan Laut Lembang Keke Kel. Tanah Jaya Kec. Kajang		Kec. Kajang		2.500.000.000,00	APBD
				Pengadaan Tanah Perluasan Pintu Gerbang Kawasan Wisata Tanjung Bira		Kec. Bontobahari	1 paket	50.000.000,00	APBD
				Biaya Apraisal Pengadaan Tanah Pasar Seni Kawasan Wisata Tanjung Bira		Kec. Bontobahari	1 paket	25.000.000,00	APBD
				Biaya Apraisal Pengadaan Tanah Perluasan Pintu Gerbang Kawasan wisata tanjung bira		Kec. bontobahari	1 paket	20.000.000,00	APBD
				Biaya Pengukuran Peta Bidang Pasar Seni Kawasan Wisata Tanjung Bira		Kec. Bontobahari	1 paket	1.700.000,00	APBD
				Biaya Pengukuran Peta Bidang Perluasan Pintu Gerbang Kawasan Wisata Tanjung Bira		Kec. Bontobahari	1 paket	500.000,00	APBD
				Honorarium Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Pasar Seni				4.800.000,00	APBD
				Honorarium Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Perluasan Pintu Gerbang Kawasan Wisata Bira				4.800.000,00	APBD
				Pengadaan Tanah Bandara		Kec. Bontobahari	78,35 Ha	5.000.000.000,00	APBD
				Pengadaan Tanah lokasi Kantor Camat Rilau Ale		Kec. Rilau Ale	1 Unit	800.000.000,00	APBD
				Perluasan Lahan Parkir Kantor Bupati Bulukumba		Kec. Ujung Bulu	1 Unit	300.000.000,00	APBD
				Pembebasan Lahan Perumahan Nelayan Desa Lolisang		Kec. Kajang	5.000 M	0	APBD
				Pembebasan Tanah Depag		Kec. Ujung Bulu	3500 M	0	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pengadaan Lokasi Perkuburan Umum Lingkungan Ponre		Kec. Gantarang	1 Unit	0	APBD
				Pengadaan/pembebasan/pengamanan tanah untuk pembangunan kantor (gedung serbaguna atau baruga)		Kec. Kajang	1 unit	0	APBD
				Pengadaan Tanah untuk Lokasi Hari Raya dan Kegiatan Umum lainnya Dusun Sisihorong, Dusun Kariango		Kec. Kajang	2 x 1 ha	0	APBD
				Pembeasan Lahan Pelabuan Niaga Kajang		Kec. Kajang	1 Unit	0	APBD
				Pengadaan Lokasi Perkuburan Desa Pantama		Kec.Kajang	1000 Meter	0	APBD
				Pengadaan Lahan Rumah Sakit Kec. Bontobahari		Kec. Bontobahari	6 Ha	0	APBD
				Perluasan Lahan Pelabuhan Bira		Kec. Bontobahari	1 Unit	0	APBD
				Pengadaan Lahan untuk Lapangan Sepakbola Kel. Sapolohe		Kec. Bontobahari		0	APBD
				Pengadaan Lahan Rumah Susun Nelayan		Kec. Kajang	1 Unit	0	APBD
				Pengadaaan Lahan Pengembangan TPA		Desa Polewali, Kec. Gantarang	1 Unit		
1	04	17		Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan				50.000.000,00	
1	04	19	01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terwujudnya Kepastian Hukum Pemda atas Tanah	Bulukumba		50.000.000,00	APBD
1	04	19		Program pengembangan Permukiman				12.850.000.000,00	
1	04	19	01	Penyusunan Data Permukiman	Terwujudnya Data Permukiman dibidang Permukiman	Bulukumba		450.000.000,00	APBD
				Penyusunan Database Drainase dan Jalan Lingkungan		Kec. Ujung Bulu	1 paket	150.000.000,00	
				Penyusunan Database Kawasan dan Permukiman Kumuh (Skala Kawasan)		Kec. Ujung Bulu	1 paket	150.000.000,00	
				Review Pengendalian Banjir Dalam Kota (Drainase)		Kec. Ujung Bulu	1 paket	150.000.000,00	
1	04	15	04	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	berkurangnya luas permukiman kumuh	Bulukumba		2.000.000.000,00	APBD
				Biaya Konsultansi		Kab. Bulukumba	1 paket	100.000.000,00	APBD
				BOP			1 paket	100.000.000,00	
				Pembangunan Rabat Beton permukiman kumuh		Kec. Kajang	1 Paket	100.000.000,00	APBD
				Pembangunan Rabat Beton permukiman kumuh Ling. Batulohe		Kec. Ujung Loe	1 paket	100.000.000,00	

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembangunan Rabat Beton permukiman kumuh Lingkungan Bonto Kamase		Kec. Ujung Bulu	1 paket	100.000.000,00	
				Pembangunan Drainase Permukiman Kumuh Matekko Danau		Kec. Gantarang	1 paket	100.000.000,00	
				Pembangunan Rabat Beton Permukiman Kumuh Matekko Danau		Kec. Gantarang	1 paket	100.000.000,00	
				Pembangunan Drainase Permukiman Kumuh (Pasar Palampang)		Kec. Rilau Ale	1 paket	100.000.000,00	
				Pembangunan Drainase Permukiman Kumuh (Pasar Tanete)		Kec. Bulukumpa	1 paket	100.000.000,00	
				Pembangunan Rabat Beton Lingkungan Bentenge 1 Kawasan Pantai Merpati		Kec. Ujung Bulu	1 paket	100.000.000,00	
				Pembangunan Drainase Permukiman Kumuh Lingkungan Eka Damai (Jl. Datotiro) Kawasan Pantai Merpati		Kec. Ujung Bulu	1 paket	100.000.000,00	
				Pembangunan Rabat Beton Permukiman Kumuh Lingkungan Eka Damai (Jl. Datotiro) Kawasan Pantai Merpati		Kec. Ujung Bulu	1 paket	100.000.000,00	
				Pembangunan Drainase Permukiman Kumuh Lingkungan Ela-Ela (Batas Kalumeme) Kawasan Leppe'e		Kec. Ujung Bulu	1 paket	100.000.000,00	
				Pembangunan Rabat Beton Permukiman Kumuh Lingkungan Ela-Ela (Batas Kalumeme) Kawasan Leppe'e		Kec. Ujung Bulu	1 paket	100.000.000,00	
				Pembangunan Drainase Permukiman kumuh Lingkungan Tanuntung Kawasan Hero Lange-Lange		Kec. Herlang	1 paket	100.000.000,00	
				Pembangunan Rabat Beton Permukiman kumuh Lingkungan Tanuntung Kawasan Hero Lange-Lange		Kec. Herlang	1 paket	100.000.000,00	
				Pembangunan Drainase Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh (Pasar Batukaropa)		Kec. Rilau Ale	1 paket	100.000.000,00	
				Pembangunan Drainase Permukiman Kumuh Pasar Borong Rappoa		Kec. Kindang	1 paket	100.000.000,00	
				Pembangunan Drainase Permukiman Kumuh Lingkungan Basokeng		Kec. Bontotiro	1 paket	100.000.000,00	
				Pembangunan Rabat Beton Permukiman Kumuh Lingkungan Basokeng		Kec. Bontotiro	1 paket	100.000.000,00	
1	04	15	05	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan dan Permukiman Perdesaan	Jumlah panjang jalan dan drainase yang terbangun	Bulukumba		10.000.000.000,00	APBD
1	04	15	07	Jalan Lingkungan		Bulukumba		0	APBD
				Belanja Konsultansi			1 Paket	700.000.000,00	APBD
				BOP				100.000.000,00	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Pembangunan Rabat beton (Lanjutan)		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Pembetonan Jalan/Paving Blok Jl. Nangka Lr. 1		Kec. Ujung Bulu	1 paket	0	APBD
	Pembangunan Paving Blok Komp. Akper		Kec. Ujung Bulu	1 paket	0	APBD
	Pembangunan Jalan rabat Beton Jl. Nenas Lorong 1		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Pembangunan Paving Block Jl. Dg. Meru (BTN ujungbulu)		Kec. Ujung Bulu	1 paket	0	APBD
	Pembangunan Paving Block Jl. Stapak usaha karya		Kec. Ujung Bulu	1 paket	0	APBD
	Pembangunan Paving Block Jl. Mujair 1		Kec. Ujung Bulu	1 paket	0	APBD
	Pembangunan Paving Block Jl. Ahmad Yani (stapak)		Kec. Ujung Bulu	1 paket	0	APBD
	Pembangunan Paving Block Jl. Lamuru		Kec. Ujung Bulu	1 paket	0	APBD
	Pembangunan Paving Block Jl. Simbula		Kec. Ujung Bulu	1 paket	0	APBD
	Pembangunan Paving Block Jl. Toddopuli		Kec. Ujung Bulu	1 paket	0	APBD
	Pembangunan Paving Block Jl. Titang II Lr I		Kec. Ujung Bulu	1 paket	0	APBD
	Pembangunan Paving Block Jl. Paus		Kec. Ujung Bulu	1 paket	0	APBD
	Pembangunan Rabat Beton Ling. .Ela-Ela		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Paving Blok Lorong/Kampung Jl. Cakalang		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Jl. Jati Lorong 1		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Jl. Jati Lorong 2		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Jl. Jati Lorong 3		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Jl. Jati Gang 1 Lorong 3		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Jl. Jati Lorong 4		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Lorong Belakang SMP PGRI tembus ke Jl. Jati		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Jl. Matahari Gang 1		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Jl. Matahari Gang 1a Lr 7		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Jl. Matahari Gang 2		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Jl. Matahari Gang 2a Lr 7		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Jl. Matahari Gang 2b Lr 7		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Jl. Matahari Gang 2c Lr 7		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Jl. Matahari Gang 2d Lr 7		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Jl. Matahari Gang 3 Lr 7 (Jalanan masih Tanah)		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Jl. Cendana Lorong 2 Tembus ke jalan melati		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Jl. Cendana Lorong 5 (Depan Rumah SEKDA)		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Jl. Cendana Lorong 7 (depan Masjid Cendana)		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Rabat Beton Jl. Cendana Lorong 8 (depan KTR Notaris)		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton Jl.BTN Madina		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton JL. BAKTI ADIGUNA LR 1 Gang 1		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton JL. BAKTI ADIGUNA LR 1 Gang 2 dan 3		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton JL. MERPATI (BTN ZAM-ZAM 1) lorong 1 (jalanan Tanah)		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton JL. MERPATI (BTN ZAM-ZAM 1) Lorong 2 (Jalanan Tanah)		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton JL. MERPATI (BTN ZAM-ZAM 1) Lorong 5 (Jalanan Tanah)		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton Jl. GARUDA LR 5 depan Wisma Jurana (Jalanan Tanah)		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton JL. GARUDA LR samping Masjid H. Abd. Karim Depan BTN Cendana (Jalanan Tanah)		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton JL. BAKTI ADIGUNA (jalanan Jalur dua masuk ke BTN Fuad Arafah)		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton Jl Teratai		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton JL. Ahmad Yani		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton Jl. Melati		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton Jl. Bung Tomo (Jl. Ince Mansur)		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton Jl. Elang Lorong		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rabat beton Jl. Kusuma Bangsa Lorong		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Paving Blok Jl. Teratai samping SMK		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rehab Jalan Paving Blok dan Pembangunan Drainase Jl. Jati		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Paving Blok Jl. Kusuma Bangsa Lrg. SDN. 1 Terang- Terang		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Paving Blok Jl. Ahmad Yani		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Paving Blok Jl. Nuri		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Paving Blok Jl. Tekukur		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Paving Blok Jl. Bangau depan rumah A. Rusmin		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Paving Blok Jl. Abdul Majid		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton / Pevin Blok		Kec. Ujung Bulu	1 paket	0	APBD
				Pevin Blok Lorong 7 Jl. Mappijalan		Kec. Ujung Bulu	1 paket	0	APBD
				Pevin Blok		Kec. Ujung Bulu	1 paket	0	APBD
				Pevin Blok		Kec. Ujung Bulu	1 paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton / Pevin Blok Lingkungan Bt. Mangape		Kec. Ujung Bulu	1 paket	0	APBD
				Rabat Beton Dsn Galagang		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Rabat Beton Dsn Bara'lohe, Dsn Galagang		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton Dsn Kailie Poros Sappatoa		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton Jln. Lingkar Batu Babbulu Dsn Bulu Lonrong		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton Jalan Stapak Dekat Rumah Kadus Dusun Polewali		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton Dsn Kapasa Desa Salemba		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton Dsn Lembang Desa Salemba		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton Dsn Possitana Desa Tamatto		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton Dsn Allu Desa Tamatto		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton Dsn Tamappalalo Desa Tamatto		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton Dsn Salebboe		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton Desa Garanta		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton Dsn Batuloe Desa Seppang		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton Batuloe/Belakang Pasar Desa Seppang		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton Bodo/ Dsn Mattirowalie Desa Seppang		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton Lingkungan Batuloe		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Kalikia, Tammate		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Tau Sinara, Tappampang		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Dsn Mampua		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Dsn Dongi		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Buhung Barania Dsn Tanah Eja		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Dsn Tanah Eja		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Bomba Manyampa Toa Dsn Mampua Desa Tamatto		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Ceddang- Pao Jahayya Dsn Tanah Eja Desa Manyampa		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Mampua-Paojahayya		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Mampua-Lianga		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Tau Sinara, Kalikia Dsn Alarayya		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Belakang SDN 19 Manyampa		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Mallatei-SMPN 11		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Jalan Beton/Paving Blok Mallatei-salaha Dsn Dongi		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton Desa Bontoharu		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton di lorong Depan Kantor Desa		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton Dusun Babana		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton Batunilamung		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton di Bangkala Dusun Ta'lohea		Kec. Kajang		0	APBD
				Rabat Beton Ruas Jl. Kamp. Baru Pattiroang		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembetonan Lingkungan Biroro		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembetonan Jalan Ambojia (Lanjutan)		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembetonan Bandu Barugae		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembetonan Dusun Mannyaha		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembetonan Temba/Assipetonge		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembetonan Assipetonge		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton/ Pavin Blok Kompleks Lap. Lembangnyora (Lanjutan)		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton / Paving blok uhung Tellue- Tampilisu (Lanjutan)		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton / Pahing Blok Buhung TeJl.A.Pawawoi Ballatinggia (Lanjutan)		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton Lonrong Pumpikatu		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton Jl. Pembangunan Kel. Jawi-Jawi		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton Balombessie Ke Bonto Rihu		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton Jl. Purna Karya Balombessie		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton Jl. Kelapa Kel. Jawi-Jawi		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton Kampung Baru Pattiroang		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton Jl. Masagena Kel. Jawi- Jawi		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton Pattiroang (lanjutan)		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton Jl.Remaja (lanjutan)		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton jalan keramat		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Rabat Beton Mallebbang		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Rabat Beton Jalan Pekuburan Tonda		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Pemasangan Vavin Blok		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Pemasangan Vavin Blok		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Cilallang - Bontobulaeng		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Lonrong Pumpikatu		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Pangie 100 meter (Lanjutan)		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Lanjutan Pembetonan Jl. Tobarania 4 mx20 cm		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Rabat beton Poros Munte Barat Ili		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Rabat beton Batuhulang - Labuajang		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Rabat beton Batuhulang - Barang Rita		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Rabat beton Bolongge - Jojjolo		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Rabat beton Bolongge - Batuhulang		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Rabat beton Bolongge - Sobbu		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Rabat beton lorong ibukota desa Salassae		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Lingk. Pasaraya Lama (Kel. Sapolohe)		Kec. Bontobahari	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Lingk. Pasaraya baru (Kel. Sapolohe)		Kec. Bontobahari	1 Paket	0	APBD
	Pemb. Rabat Beton Dusun Maroanging		Kec. Bontobahari	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton menuju ke Perkuburan Umum Pakkekeang batua Dusun Lambua		Kec. Bontobahari	1 Paket	0	APBD
	Pengecoran Lapangan Sepak Bola Erelebu		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
	Pembuatan Jalan Setapak Samping Kantor Camat (COR Beton)		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Lamanda		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Lamanda-Pakubalaho		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Lamanda-Tamalanrea		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Lamanda-Caramming		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Lamanda Tamalanrea		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Lamanda-Buhungbundang		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Jalan Lingkar Lap. Sepakbola		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
	Pembangunan Jalan Beton		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
	Pembangunan Jalan Beton		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
	Pevin Blok Dusun Kalanting		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
	Rabat Beton Dusun Salibang		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
	Pembangunan Paving Blok di BTN Somba V		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
	Pembangunan Paving Blok di BTN Bayu Perdana IV		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
	Pembangunan Drainase		Bulukumba		-	
	Drainase Jl. Sungai Kapuas		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
	Pembangunan Drainase Jl. Dg. Meru (BTN ujungbulu)		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembangunan Drainase Jl. Paus		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rehab Drainase Jl. Lamuru		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rehab Drainase Jl. Simbula		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rehab Drainase Jl. Toddopuli		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rehab Drainase Jl. Titang II		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rehab Drainase Jl. Lure I		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rehab Drainase Jl. Lure II		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rehab Drainase Jl. Lure III		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rehab Drainase Jl. Cumi-Cumi Lr. 1		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rehab Drainase Jl. Cumi-Cumi Lr. 2		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rehab Drainase Jl. Titang Raya		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Plat Penutup Drainase Jl. Cumi - Cumi, Lr I		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Plat Penutup Drainase Jl. Tinumbu		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Plat Penutup Drainase Jl. Titang Raya		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pemb. Drainase BTN Ujung Bulu		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rehabilitasi Draenase Jl. Sunu Lorong 1		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Rehabilitasi Draenase Jl. Sunu Lorong 12		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Jl. S Majidi		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Jl. Melati Lr. 1		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Jl. Melati		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Jl. Bung Tomo		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Jl. S Majidi		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase ling. Tanetea RW 4 RT 1 (TIPE 50)		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Jl. Appel Lr 3 (Tipe 50)		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Jl. Appel Lr 2 (TIPE 50)		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Jl. Serikaya		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Caile RW 4		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Jl. Garuda		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Jl. Kusuma Bangsa Lorong		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Jl. Samratulangi Komp.BTN Bongkas		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				perbaikan drainase Belakang Pasar Sentral		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase dari Jl. Samratulangi ke Jl. Bakti Adiguna (belakang MM Cendana)		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase antara Jl. Puyu dengan Jl. Merpati		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Jl. Cendana Lorong 5 kiri/kanan		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembangunan Drainase Jl. Cendana Lorong 7 Kiri/Kanan		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Lokasi Jl. Bakti Adiguna dari Ir 1 (samping toko Acend) ke jl. Poros Bakti Adiguna		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Jl. Jati Lorong 2 kiri/kanan		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Jl. Cendana Ir 2 ke Jl. Melati		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Jl. Cendana Ir 2 ke Jl. Melati		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Perbaikan Saluran Drainase Komplek Bumi Citra Nusantara Jl. Kusuma Bangsa		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Lingkungan Batuppi (lanjutan)		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangun drainase poros Bontorita-Gusunge Dusun Kessi-Dusun Toroliya		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase (Lanjutan) Dusun Karampuang		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Dsn Possitana Desa Tamatto		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Dsn Allu Desa Tamatto		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Dsn Tamappalalo Desa Tamatto		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Dsn Tanru Tedong Desa Garanta		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Takkue/Dsn Batuloe		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Takkue Desa Seppang		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Dsn Tanah Cellae Desa Seppang		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Dsn Mattirowalie Desa Seppang		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Dusun Tukombeng		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Drainase Jl. Poros Kapasa Paranyelling		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Dsn. Palangisang		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Dsn.Mattoanging		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase (Lanjtan) Pangalloang		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
				Pemb. Drainase Padaidi		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
				Pemb. Drainase Pangi-pangi		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
				Pemb. Drainase Poros Karama Palangisang		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Dsn Barana		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Desa Bontolohe		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Desa Bontoharu		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembangunan Drainase di Jln. Prima Logam		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
				Pemb. Drainase di samping Kantor Desa		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
				Pembanguna Drainase		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
				Drainase Jl. H. Mappiasse Lingk. Palampang		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
				Drainase Lingk. Marana, Lingk. Palampang, Lingk. Tammasrongo		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan drainase jalan Tumbiga Dsn Tamalaju		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Dusun Bontoa		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Poros Karangbangantia ke Desa Lembang Lohe		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Dusun Uluparang		Kec. Kindang	1 Paket	0	APBD
				Drainase Jl. Tambi karya		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
				Drainase Dusun Sapiri		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
				Drainase Dusun Kaneka		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
				Drainase Ruas Jalan Taman Makam Pahlawan-Tibona		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Harue-Balihuko		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Lonrong		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Cilallang		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Kelurahan Sapolohe		Kec. Bontobahari	1 Paket	0	APBD
				Pembuatan Drainase Poros Langlangge		Kec. Bontobahari	1 Paket	0	APBD
				Pembuatan Drainase Poros Langlangge Dusun Bakung-Bakung		Kec. Bontobahari	1 Paket	0	APBD
				Pembuatan Drainase Maroanging- Bontobiraeng		Kec. Bontobahari	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Tuhalolo		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
				Pembuatan Drainase Kampung Beru ke Majjangka		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
				Drainase Dusun Bonto Tappalang		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
				Drainase Kantor Camat - Polsek		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
				Pembuatan Drainase Bintamurung ke Batas Tritiro		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Drainase dari Erelebu-Samboang		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Desa Lamanda		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Dusun Malewang		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Dusun Kalepang		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Dusun Bonto Bulaeng		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Dusun Dusuru		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase Jalan Tani Sikuyu		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase di Kasinambungan Dusun Campadidi		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembangunan Drainase		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Drainase di Dusun Bangkit Bukit		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
1	04	15	06	Pengentasan Kawasan Kumuh berbasis Masyarakat	Pengurangan Jumlah Luas Kawasan Kumuh (BOP KOTAKU dan BOP DUTAKU), dan BOP TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi)	Bulukumba	12 Bln	400.000.000,00	APBD
				BOP Kotaku			12 Bln	100.000.000,00	APBD
				BOP Dutaku			12 Bln	150.000.000,00	APBD
				BOP TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi)			12 Bln	150.000.000,00	APBD
1	04	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				0	
1	04	21	17	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah	tersedianya Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah	Bulukumba	1 dok	0	APBD
1	04	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				17.109.994.820,00	
1	04	27	01	Penyediaan Prasarana dan Sarana air minum bagi masyarakat rendah	Terlaksananya Penyediaan Air Minum			9.335.378.820,00	APBD
				Peningkatan SPAM Desa Gattareng Kec. Gantarang		Kec. Gantarang	1 Paket	350.000.000,00	APBD/ DAK
				Peningkatan SPAM Desa Karassing Kec. Herlang		Kec. Herlang	1 Paket	350.000.000,00	APBD/ DAK
				Peningkatan SPAM Desa Pataro Kec. Herlang		Kec. Herlang	1 Paket	282.000.000,00	APBD/ DAK
				Peningkatan SPAM Desa Lembanglohe Kec. Kajang		Kec. Kajang	1 Paket	350.000.000,00	APBD/ DAK
				Peningkatan SPAM Kel. Laikang Kec. Kajang		Kec. Kajang	1 Paket	250.000.000,00	APBD/ DAK
				Peningkatan SPAM Desa Bontobaji Kec. Kajang		Kec. Kajang	1 Paket	350.000.000,00	APBD/ DAK
				Peningkatan SPAM Desa Jojjolo Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa	1 Paket	250.000.000,00	APBD/ DAK
				Peningkatan SPAM Desa Kambuno Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa	1 Paket	350.000.000,00	APBD/ DAK
				Peningkatan SPAM Desa Baruga Riattang Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa	1 Paket	250.000.000,00	APBD/ DAK
				Peningkatan SPAM Desa Karama Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale	1 Paket	250.000.000,00	APBD/ DAK

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Peningkatan SPAM Desa Batukaropa Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale	1 Paket	250.000.000,00	APBD/ DAK
				Peningkatan SPAM Desa Bontobangun Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale	1 Paket	250.000.000,00	APBD/ DAK
				Peningkatan SPAM Desa Bontoharu Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale	1 Paket	350.000.000,00	APBD/ DAK
				Peningkatan SPAM Desa Bontomate'ne Kec. Rilau Ale		Kec. Rilau Ale	1 Paket	375.000.000,00	APBD/ DAK
				Perluasan SPAM Desa Mattoanging Kec. Kajang		Kec. Kajang	1 Paket	350.000.000,00	APBD/ DAK
				Perluasan SPAM Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa	1 Paket	200.000.000,00	APBD/ DAK
				Biaya Penunjang			1 Paket	256.972.000,00	APBD/ DAK
				Pengembangan MA Lotong-lotong (Pengadaan Air Bersih/Perpipaan Lotong-Lotong)		Kec. Bontobahari	1 Paket	4.000.000.000,00	APBD
				Pengadaan Alat Geolistrik		Kec. Ujung Bulu	1 Unit	150.000.000,00	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Ling. Bentenge dan Ling. Appasarenge.		Ujung Bulu	2 Titik		APBD
				Pembuatan sumur dalam BT. Mangape		Ujung Bulu	1 Paket	121.406.820,00	APBD
				Pembangunan Sumur Bor Ling. Matajang		Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Sumur Bor Lingkungan Caile RW 1		Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Sumur Bor Lingkungan Caile RW 2		Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Air Bersih Umum (Arsium)		Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Sumur Bor Lingkungan Batuppi		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Desa Benteng Gantarang		Kec. Gantarang	4 Unit	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Dusun Ompoa		Kec. Gantarang	5 Unit	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Air bersih Dusun Bocco-boccoe		Kec. Gantarang	2 Unit	0	APBD
				Sumur Bor Gapoktan Mabbulo Sibatang		Kec. Gantarang	2 Unit	0	APBD
				Sumur Bor Dusun Palimassang		Kec. Gantarang	3 Unit	0	APBD
				Pembangunan Sumur Bor Dusu Raeo		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Air bersih Bono Lembanna Dusun Cabalu		Kec. Gantarang	2 Unit	0	APBD
				Sumur Bor Mushollah Dusun Katimbang		Kec. Gantarang	1 Unit	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Dusun pamanggolo		Kec. Gantarang	5 Unit	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Dusun Benteng		Kec. Gantarang	5 Unit	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Dusun Kulepang		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Sumur Bor Dusun Bontomacinna		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Sumur Bor air bersih		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Sumur BOR 5 Dusun Untuk Air Bersih Dusun Bontoraja		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Di Kompleks Mesjid Nurul Jihad Paobeccengnge		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Desa Benteng Gantarang		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Dusun Kulepang		Kec. Gantarang	5 Unit	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Dusun Malewang		Kec. Gantarang	5 Unit	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Samping Kanan Kantor Desa Bonto Masila		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Lingkungan Borong kau-kaue		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Lingkungan Borong pellenge		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Dangkal Lingkungan Biring Kelapa		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor		Kec. Gantarang	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Dusun Borong		Kec. Kindang	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Dusun Kampung Cina		Kec. Kindang	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor		Kec. Kindang	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Dusun Tujuang Raya		Kec. Kindang	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Air Bersih Dusun Pangi		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
				SUMUR BOR		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
				Sumur Bor Desa Paccarammengang		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Sumur Bor Desa Manjalling		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Sumur Bor Air Bersih Desa Balong		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Sumur Bor Bappu/Dsn Batuloe		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Dsn Kp. Tengnga		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Dsn Mattirowalie Desa Seppang		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembuatan Sumur Bor Dsn Mattoanging		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Sumur Bor Dusun Patuku		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Sumur Bor Dusun Tala		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor di Mesjid Al-Ansar		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pembangunan Sumur Bor		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Dusun Kalicompeng		Kec. Ujung Loe	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumor Bor Tiap Masjid		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
				Pemb. Sarana Air Bersih Bontomanai		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Panasa		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
				Pengadaan Sumur Bor Kacibo		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
	Pengadaan Perpipaan Air Bersih		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
	Pemb. Sumur Bor Dusun Katangka		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
	Pemb. Sumur Bor Desa Bobtoharu		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
	Pengeboran Air Tanah Kel. Palampang		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
	Pembangunan Sumur Bor Dusun Bontomasunggu		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD
	Pembangunan Sumur Bor Desa Sangkala		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
	Pembangunan Sumur Bor Desa Batunilamung		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
	Pengadaan Air Bersih Dusun Kassi Puteh		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
	Pengadaan Air Bersih & Sumur Bor Dusun Ta'lohea		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
	Pengeboran Sumur Bor Desa Lembanna		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
	Pengadaan Air Bersih Desa Bonto Baji		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
	Sumur bor dusun jannayya		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
	Sumur bor dusun Jampang		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
	Sumur Bor Dusun Dumpu		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
	Sumur Bor Dusun Kalimporo		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
	Sumur Bor Dusun Pattompongang		Kec. Bontotiro	1 Paket	0	APBD
	Pembangunan sumur Bor		Kec. Kindang	1 Paket	0	APBD
	Pengadaan Sumur Bor		Ke. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Pembangunan sumur bor		Ke. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Pembangunan sumur bor Desa Bontobulaeng		Ke. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Pengadaan Sumur Desa Bontomangiring		Ke. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Pembangunan sumur bor		Ke. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Pembangunan sumur bor		Ke. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Pembangunan SPAM/ Sumur Bor Desa Bontomangiring		Kec. Bulukumpa	1 Paket	0	APBD
	Pengadaan Sumu Bor Desa Ara		Kec. Bontobahari	1 Paket	0	APBD
	Pengadaan Sumu Bor Desa Lembanna		Kec. Bontobahari	1 Paket	0	APBD
	Pembuatan Sumur Bor		Kec. Bontobahari	1 Paket	0	APBD
	Pengadaan Perpipaan Air Bersih Desa Ara		Kec. Bontobahari	1 Paket	0	APBD
	Pengadaan Perpipaan Air Bersih Desa Lembanna		Kec. Bontobahari	1 Paket	0	APBD
	Pengadaan Sumur Bor		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
	Pengadaan Sumur Bor		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
	Pengadaan Sumur Bor Desa Pakubalaho		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
	Pengadaan Sumur Bor Desa Bontotangnga		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
	Pengadaan Sumur Bor		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
	Perpipaan Dusun Salibang		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
	Perpipaan Dusun Borong		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembangunan Sumur Bor		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
				Sumur Bor Dalam		Kec. Kindang	1 Paket	0	APBD
				Sumur Bor Dusun Bontolohe		Kec. Herlang	1 Paket	0	APBD
1	04	27	02	Penyediaan Prasarana dan Sarana air Limbah	Terlaksananya Program Sanitasi	Bulukumba		6.074.616.000,00	DAK/ APBD
1	04	27	02	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Caramming Kec. Bontotiro		Kec.Bontotiro	1 Paket	250.000.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Buhungbundang Kec. Bontotiro		Kec.Bontotiro	1 Paket	250.000.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan Tangki Septik skala individual Desa Batang Kec. Bontotiro		Kec.Bontotiro	1 Paket	250.000.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan Tangki septik skala individual Desa Bontomarannu Kec. Bontotiro		Kec.Bontotiro	1 Paket	250.000.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan Tangki Septik skala individual Desa Bontobarua Kec. Bontotiro		Kec.Bontotiro	1 Paket	250.000.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Lamanda Kec. Bontotiro		Kec.Bontotiro	1 Paket	250.000.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Karassing Kec. Herlang		Kec. Herlang	1 Paket	250.000.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan Tangki Septik skala individual Desa Pataro Kec. Herlang		Kec. Herlang	1 Paket	250.000.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan Tangki septik skala individual Desa Lembanglohe Kec. Kajang		Kec. Kajang	1 Paket	250.000.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan Tangki Septik skala Individual Desa Salassae Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa	1 Paket	250.000.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Kambuno Kec. Bulukumpa		Kec. Bulukumpa	1 Paket	250.000.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan Tangki septik Skala Individual Desa Benteng palioi Kec. Kindang		Kec. Kindang	1 Paket	250.000.000,00	DAK/ APBD
				Biaya Penunjang				149.616.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan Tangki Septik skala individual Kel. Tanah Kongkong		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	300.000.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan Tangko Septik skala individual Kel. Loka		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	300.000.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan Tangki Septik skala individual Kel. Bentenge		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	300.000.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kel. Caile		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	300.000.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan Tangki Septik skala individual Desa Padangloang		Kec. Ujung Loe	1 Paket	325.000.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan Tangki septik skala individual Kel. Jawi-Jawi		Kec. Bulukumpa	1 Paket	300.000.000,00	DAK/ APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
				Pembangunan Tangki Septik Skala individual Desa Karama		Kec. Rilau Ale	1 Paket	300.000.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Bontomatene		Kec. Rilau Ale	1 Paket	300.000.000,00	DAK/ APBD
				Pembangunan MCK++ dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan agama Kel. Kalumeme		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	500.000.000,00	DAK/ APBD
				Pengadaan Septik Tank		Ujung Bulu	13 Unit	0	DAK/ APBD
				Pengadaan Jambang Keluarga (MCK individual)		Ujung Bulu	100 Unit/KK	0	DAK/ APBD
				Pembangunan Jambang Keluarga Kel. Caile			4 Unit	0	DAK/ APBD
				pembangunan MCK Umum		Kec. Rilau Ale	4 Unit	0	DAK/ APBD
				pembangunan MCK Umum		Kec. Kajang	4 Unit	0	DAK/ APBD
				Sanitasi Batunilamung		Kec. Kajang	1 Paket	0	DAK/ APBD
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah		Kec. Herlang	139 KK	0	DAK/ APBD
1	04	27	07	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	Terlaksananya Penyediaan Air Minum	Bulukumba		1.000.000.000,00	APBD
				Biaya Konsultasi			1 Paket	70.000.000,00	
				BOP				120.000.000,00	
				Rehabilitasi Pemeliharaan dan Prasarana Air Minum Desa Bontorannu		Kec. Kajang	1 Paket	270.000.000,00	APBD
				rehabilitas pemeliharaan dan prasarana air minum		Kec. Kajang	1 Paket	270.000.000,00	APBD
				Perbaikan Perpipaan Air Bersih Ling.Bonto Beang		Kec. Herlang	1 Paket	270.000.000,00	APBD
1	04	27	08	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	Terlaksananya Penyediaan Air Limbah	Bulukumba		600.000.000,00	APBD
1	04	27	10	penyediaan Air Minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)	Terlaksananya Program Air Minum	Bulukumba	12 Bulan	100.000.000,00	APBD
				Rehab. Pamsimas		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD
				Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)		Kec. Kajang	1 paket	0	APBD
				Perbaikan Sumur Bor dan peningkatan sistem sanitasi dan air minum sehat bagi masyarakat. (Program PAMSIMAS)		Kec. Rilau Ale	1 Paket	0	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
				Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)		Kec. Kajang	1 Paket	0	APBD	
				Pengembangan jaringan perpipaan PANSIMAS LKM Pemuda Kreatif Lingk. Pasaraya Baru		Kec. Bontobahari	1 Paket	0	APBD	
1	04	01	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya prasarana, sarana Teras Bulukumba (Water Front City)			500.000.000,00		
1	04	01	29	Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur	Tersedianya prasarana, sarana Teras Bulukumba (Water Front City)			500.000.000,00		
				Pembangunan Teras Bulukumba		Kec. Ujung Bulu	1 Paket	500.000.000,00	APBD	
1	04	0	0	Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Perizinan Bangunan Gedung	Terwujudnya perizinzn mendirikan bangunan (BOP IMB)			300.000.000,00		
1	04	0	0	Penyelenggaraan Perizinan Bangunan Gedung	Terwujudnya perizinzn mendirikan bangunan (BOP IMB)	Bulukumba		300.000.000,00	APBD	
1	05	01		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.241.814.500,00		
1	05	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				382.068.550		
1	05	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulukumba	12 Bulan	20.400.000	APBD
1	05	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bulukumba	100%	1.090.000	APBD
1	05	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan.	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	Bulukumba	12 Bulan	29.405.500	APBD
1	05	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya jasa petugas kebersihan	Bulukumba	12 Bulan	18.000.000	APBD
1	05	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor	Bulukumba	12 Bulan	1.770.000	APBD
1	05	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya bahan kebersihan kantor	Bulukumba	12 Bulan	3.429.000	APBD
1	05	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulukumba	12 Bulan	206.878.770	APBD
1	05	01	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terlaksananya pelayanan penatausahaan kesekretariatan SKPD	Bulukumba	12 Bulan	101.095.280	APBD
1	05	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				323.312.250		
1	05	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulukumba	100%	20.000.000	APBD
1	05	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Bulukumba	100%	29.500.000	APBD
1	05	01	02	09	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4, dan roda 2	Bulukumba	100%	231.000.000	APBD
1	05	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya kursi dan lemari arsip	Bulukumba	100%	10.550.000	APBD
1	05	01	02	22	pemeliharaan berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Bulukumba	100%	5.000.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	05	01	02	23	pemeliharaan berkala mobil jabatan	Terlaksanya mobil jabatan kantor	Bulukumba	100%	0	APBD
1	05	01	02	24	pemeliharaan berkala kendaraan dinas /operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/oporasional roda empat 1 buah dna roda dua 2 buah	Bulukumba	12 Bulan	17.512.250	APBD
1	05	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bulukumba	12 Bulan	4.750.000	APBD
1	05	01	02	42	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya tempat pertemuan kegiatan (Aula)	Bulukumba	100%	5.000.000	APBD
1	05	01	05		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan				53.038.000	
1	05	01	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya pelaporan keuangan semesteran	Bulukumba	100%	10.000.000	APBD
1	05	01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun	Bulukumba	100%	10.000.000	APBD
1	05	01	06	04	Penyusunan Program Kerja SKPD	Tersedianya dokumen renja 'Reenstra, anjab, RKA DPA perubahan dan laporan keuangan.	Bulukumba	100%	33.038.000	APBD
1	05	01	04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.				0	
1	05	01	04	01	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan	Bulukumba	100%	0	APBD
1	05	01	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				120.402.000	
1	05	01	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Komplik Sosial Kab. Bulukumba	Bulukumba	12 Bulan	36.627.000	
1	05	01	15	07	Operasi Pengamanan dan Ketertiban Umum	Terlaksananya penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat inpres No.2 tahun 2013	Bulukumba	12 Bulan	58.580.000	APBD
1	05	01	15		Forum ketahanan ekonomi daerah	Terbentuknya forum ketahanan ekonomi daerah daerah	Bulukumba	12 Bulan	0	
1	05	01	15		Tim kewaspadaan dini daerah	Terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini Daerah Sesuai Permen No.2 Tahun 2018	Bulukumba	12 Bulan	0	APBD
1	05	01	15		Fasilitasi pemberantasan dan pencegahan narkoba	Terbentuknya Tim Terpadu Penanggulangan Narkoba Kab, Bulukumba Sebagai Pelaksanaan Permendagri No.12 Tahun 2019	Bulukumba	12 Bulan	25.195.000	APBD
1	05	01	06		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				79.356.400	
1	05	01	17	01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Terlaksananya Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama	Bulukumba	12 Bulan	36.950.000	APBD
1	05	01	17	02	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Bulukumba	100%	30.450.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	05	01	17	04	Pengembangan Sistem Aplikasi Data Base Ormas	Tersedianya Data Base Organisasi Kemasyarakatan	Bulukumba	12 Bulan	11.956.400	APBD
1	05	01	17		Sosialisasi Pengawasan Ormas	Terlaksananya Sosialisasi Permendagri No.56 Tahun 2017	Bulukumba	12 Bulan	0	APBD
1	05	01	07		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terpeliharanya kehidupan berbangsa dan bernegara			12.661.000	
1	05	01	18	03	Seminar Talk Show Diskusi Penguatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Seminar, Talk Show Peningkatan/Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Bulukumba	100%	12.661.000	APBD
1	05	01	08		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan				38.386.750	
1	05	01	19	01	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Gerakan Bela Negara dan Pemantauan Pengawasan orang asing yang ada di Kab. Bulukumba	Bulukumba	100%	38.386.750	APBD
1	05	01	19		Penanganan konflik sosial	Terlaksananya Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosialn	Bulukumba	100%	0	APBD
1	05	01	19		Operasi pengawasan dan penantauan orang asing	Meningkatnya Upaya Penciptaan Suasana Kondusif	Bulukumba	100%	0	APBD
1	05	01	19		Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Terlakananya Sosial Pencegahan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba		100%	0	APBD
1	05	01	09		Program Pendidikan Politik Masyarakat				121.273.000	
1	05	01	21	01	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Politik Melalui Kegiatan Penyuluhan	Bulukumba	100%	12.145.000	APBD
1	05	01	21	01	Pendidikan politik bagi perempuan	Terlaksananya Sosialisasi Politik bagi Perempuan	Bulukumba	100%	0	APBD
1	05	01	21	03	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Terlaksananya Pendidikan Politik Bagi	Bulukumba	100%	15.845.000	APBD
1	05	01	21	03	Bimbngan Tekhnis Pertanggungjawaban Bantuan partai politik	Terlaksananya cara penyusunan pertanggungjawaban bantuan partai politik	Bulukumba	100%	80.724.700	APBD
1	05	01	21	04	Penyusunan Data Base Partai Politk/ fasilitasi keuangan partai politik	Tersusunnya Data Base Partai Politik dan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Bulukumba	100%	9.627.000	APBD
1	05	01	21	05	Monitoring ,Evaluasi,dan Pelaporan	Terlaksanya koordinasi dan Konsultasi Pemantauan Situasi Politik dan Kondisi Kamtibmas	Bulukumba	100%	2.931.300	APBD
1	05	01	10		Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu				111.316.550	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	05	01	23	01	Desk Pemilu	Terlaksananya Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang Aman dan Damai	Bulukumba	100%	111.316.550	APBD
1	05	02			SATUAN POLISI PAMON PRAJA DAN DAMKAR				7.624.654.250,00	
1	05	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	429.785.000,00	
1	05	02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa pelayanan komunikasi dan listrik kantor	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	57.600.000,00	APBD
1	05	02	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan Randis/operasional	Terpenuhinya pembayaran surat surat kendaraan operasional	Kec. Ujung Bulu	32 Unit	25.000.000,00	APBD
1	05	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	68.460.000,00	APBD
1	05	02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	17.060.000,00	APBD
1	05	02	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	-	APBD
1	05	02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerapan bangunan kantor	Kec. Ujung Bulu	1 Paket	-	APBD
1	05	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar	Kec. Ujung Bulu	1 Tahun	-	APBD
1	05	02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat koordinasi ke luar daerah	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	165.000.000,00	APBD
1	05	02	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Tersedianya Pelayanan Jasa Kesekretariatan Kantor	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	96.665.000,00	APBD
1	05	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	124.888.000,00	
1	05	02	02	05	Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kKendaraan Dinas /Operasional	Kec. Ujung Bulu	1 Paket	-	APBD
1	05	02	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor	Kec. Ujung Bulu	1 Paket	-	APBD
1	05	02	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor	Kec. Ujung Bulu	1 Paket	17.000.000,00	APBD
1	05	02	02	10	Pengadaan Mobileur	Tersedianya Mebeleur Kantor Satpol. PP dan Damkar	Kec. Ujung Bulu	1 Paket	46.000.000,00	APBD
1	05	02	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Dinas/Operasional	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	7.100.000,00	APBD
1	05	02	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	51.788.000,00	APBD
1	05	02	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	3.000.000,00	APBD
1	05	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan Disiplin Aparatur Satpol.PP dan Damkar		100%	-	
1	05	02	03	01	Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Tersedianya Mesin /Kartu Absensi	Kec. Ujung Bulu	1 Paket	-	APBD
1	05	02	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan	Kec. Ujung Bulu	1 Paket	-	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	05	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kepastian Sumber Daya Aparatur		100%	-	
1	05	02	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terakomodirnya Aparat Satpol.PP yang Belum Mengikuti Diklat Dasar	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	-	APBD
1	05	02	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Peraturan Perundang Undangan	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	-	APBD
1	05	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian dan Keuangan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Berbasis Data yang Akurat		100%	7.000.000,00	
1	05	02	06	01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusun Laporan Capaian Kinerja Ikhtisan dan Realisasi kinerja	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	2.500.000,00	APBD
1	05	02	06	02	Penyusunan Pelaporan semesteran	Tersusunnya Laporan Semesteran	Kec. Ujung Bulu	2 Kali		APBD
1	05	02	06	03	Penyusunan Pelaporan Progonis Realisasi Anggran	Tersusunnya Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	Kec. Ujung Bulu	2 Kali		APBD
1	05	02	06	04	Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Satpol.PP	Kec. Ujung Bulu	1 Kali	2.500.000,00	APBD
1	05	02	06	05	Penyusunan Program Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Program	Kec. Ujung Bulu	2 Kali	2.000.000,00	APBD
1	05	02	06	06	Penatausahaan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Pelayana Administrasi Kepegawaian	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	-	APBD
1	05	02	06	07	Monitoring, Evaluasi Program Kerja SKPD	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Program Kerja	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	-	APBD
1	05	02	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		100%	3.118.612.200,00	
1	05	02	15	02	Pembangunan Pos Jaga/Ronda	Tersedianya Pos Jaga/Ronda	Kec. Ujung Bulu	1 Paket	-	APBD
1	05	02	15	03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan Anggota Satpol.PP dan Linmas	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan		APBD
1	05	02	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan		APBD
1	02	02	15	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	-	APBD
1	05	02	15	07	Operasi pengamanan dan ketertiban umum	Terlaksananya Operasi Kantrantibmas dan Penegakan Perda Dalam Wil.Kab.Bulukumba Serta Tersedianya Tunj Lauk Pauk Bagi Aparatut Satpol.PP dan Linmas	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	2.648.533.200,00	APBD
1	05	02	15	08	Operasional penegakan aturan kawasan tanpa rokok (KTR)	Terlaksananya Operasi Penegakan Peraturan Larangan Merokok di Tempat Tertentu dalam Wilayah Kab. Bulukumba	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	470.079.000,00	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	05	02	15	09	Pengawasan dan Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati	Terlaksananya Pengawasan Bupati dan Wakil Bupati	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	-	APBD
					Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala daerah		100%	-	
					Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan	Terlaksananya Penyelidikan dan Penyidikan	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	-	APBD
1	05	02	16		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		100%	50.260.000,00	
1	05	02	16	01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	Terciptanya Hubungan yang Harmonis antara Aparatur Satpol.PP Kab./Kota se Sulawesi Selatan	Kec. Ujung Bulu	1 kali	50.260.000,00	APBD
1	05	02	16	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di Daerah	Terpenuhinya Tugas Tugas Linmas	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	-	APBD
1	05	02	25		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesiagaan pencegahan bahaya kebakaran		12 Bulan	3.894.109.050,00	
1	05	02	25	05	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	-	APBD
1	05	02	25	07	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran	Kec. Ujung Bulu	1 Tahun	-	APBD
1	05	2	25	8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kec. Ujung Bulu	1 PAKet	50.000.000,00	APBD
1	05	02	25	09	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	258.114.050,00	APBD
1	05	02	25	12	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Kec. Ujung Bulu	12 Bulan	3.585.995.000,00	APBD
1	06	01			DINAS SOSIAL				3.495.714.950,00	
1	1	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			369.686.350	
1	1	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik	Bulukumba	100% 12 bulan	60.000.000	APBD
1	1	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas roda dua dan roda empat	Bulukumba	100% 12 Bulan 12 unit	11.500.000	APBD
1	1	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan dan tersedianya jasa operator komputer	Bulukumba	100% 12 bulan	20.455.350	APBD
1	1	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor	Bulukumba	100% 2 Orang 12 Bulan	13.000.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	1	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor dan tersedianya jaringan listrik	Bulukumba	1 paket	1.749.999	APBD
1	1	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya tugas, rapat koordinasi dan konsultasi	Bulukumba	68 kali	188.820.000	APBD
1	1	01	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Penyediaan ATK, cetak, makan minum rapat dan tamu, umbul-umbul tiang dan tersedianya jasa tenaga non PNSD (Tenaga kontrak, operator dan sopir eselon II)	Bulukumba	4 Jenis	74.161.001	APBD
1	1	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.				610.400.000	APBD
					Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya shelter yang memadai buat PMKS dan Tempat Parkir	Bulukumba	2 paket	45.000.000	APBD
1	1	01	03	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat	Bulukumba	3 unit	400.000.000	APBD
1	1	01	04	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (AC), Lemari Es, Dispenser, Alat CCTV, Wireleass	Bulukumba	8 Unit	10.000.000	APBD
1	1	01	05	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Bulukumba	8 Unit	55.000.000	APBD
1	1	01	06	10	Pengadaan mobeleur	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa Meubeler	Bulukumba	28 Unit	40.900.000	APBD
					Pengelolaan Data Pusat Layanan Data Sosial	Tersedianya layanan data sosial yang teritegritas dan valid	Bulukumba	100% 12 Bulan		APBD
1	1	01	07	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpelihara dan terawatnya tempat kerja	Bulukumba	1 Paket	25.000.000	APBD
1	1	01	07	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional SKPD	Bulukumba	12 Unit	30.000.000	APBD
1	1	01	07	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpelihara peralatan kantor	Bulukumba	10 Unit	4.500.000	APBD
1	1	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.				60.000.000	APBD
1	1	01	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya kontribusi Bimtek.	Dalam Provinsi	15 kali	15.000.000	APBD
1	1	01	05	05	Pelatihan dan Pendidikan Struktural	Tersedia kontribusi pelatihan dan pendidikan struktural	Dalam Provinsi	2 orang	45.000.000	APBD
1	1	01	06		Program peningkatan pengetahuan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				145.733.000	APBD
1	1	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	Bulukumba	4 Dokumen	5.000.000	APBD
1	1	01	07	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bulukumba	1 Dokumen	2.000.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	1	01	08	07	Monitoring, evaluasi program kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi kegiatan Dinas Sosial Kab. Bulukumba	Bulukumba	13 Dokumen 12 Bulan	45.903.000	APBD
					Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Tersedianya usulan kegiatan dana konsentrasi, dan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Bulukumba	3 Dokumen	33.180.000	APBD
1	1	01	09	08	Penyusunan Program kerja dan SPM OPD	Terlaksananya penyusunan program kerja OPD yang tepat tujuan dan sasaran serta pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Bulukumba	6 Dokumen	59.650.000	APBD
1	1	01	15		Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya				555.000.000	APBD
1	1	01	15	04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin perkotaan dan pedesaan	Terlaksananya pemberian bantuan UEP (Mesin Jahit, Perbengkelan, Pertukangan, Jual-Jualan, Tata Rias) dan RTLH bagi masyarakat miskin	Bulukumba	70% 20 Paket	200.000.000	APBD
1	1	01	15	05	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin daerah pesisir, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil	Terlaksananya Pemberian Bantuan Sarana/Alat Bantu Pekerjaan Nelayan (bantuan Jaring), KUBE dan UEP bagi keluarga miskin di wilayah pesisir	Bulukumba	70% 30 Paket	55.000.000	APBD
					Monitoring dan evaluasi kegiatan RASTRA	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan RASTRA				APBD
1	1	01	15	06	Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin	Terlaksananya Operasional Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin	Bulukumba	70%		APBD
1	1	01	15	07	Akselarasi penanganan dan penanggulangan kemiskinan *	Terlaksananya biaya operasional, sosialisasi monitoring dan evaluasi kegiatan BPNT (Rastra) dan Bimbingan Pemantapan Penerima Bantuan KUBE FM	Bulukumba	75% 2 Kegiatan 12 Bulan		APBD
1	1	01	15	08	SIKS-NG dan E-PMKS	Terlaksananya Pemutakhiran data SIKS-NG untuk data BDT kemiskinan dan data PMKS untuk E-PMKS	Bulukumba	75 % 12 Bulan	300.000.000	APBD
1	1	01	16		Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial				700.000.000	APBD
1	1	01	16	10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Terlaksananya Operasional Petugas Tim TAGANA Penanganan Bencana, tersedianya bantuan dan logistik korban bencana alam dan sosial, dan tersedianya jasa petugas TAGANA	Bulukumba	75 % 12 Bulan 1 Paket 100 orang	700.000.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	1	01	16	12	Pelayanan perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar	Tersedianya pelayanan dan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar yang nonproduktif, bantuan UEP bagi lansia produktif, dan bantuan RTLH	Bulukumba	12 Bulan 20 orang 15 Paket		APBD
					Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak	Tersedianya bantuan dan layanan sosial bagi korban perdagangan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, dan anak terlantar	Bulukumba	12 Bulan 10 Orang		APBD
1	1	01	16	09	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Terlaksananya pemberian bimbingan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan PMKS rawan sosial ekonomi (RSE) dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Bulukumba	50 orang		APBD
					Pembinaan dan Pelayanan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis.	Tersedianya pelayanan dan pembinaan bagi gelandangan dan pengemis, terlaksananya pendataan bagi gelandangan dan pengemis.	Bulukumba	12 Bulan		APBD
					Fasilitasi pengiriman klien PMKS ke balai/panti rehabilitasi sosial	Tersedianya layanan dan bantuan rehabilitasi sosial bagi PMKS, tersedianya pelayanan dan pengiriman klien PMKS ke Balai Panti Rehabilitasi Sosial	Bulukumba	12 Bulan		APBD
1.1	1.1	01	17		Program Pembinaan Anak Terlantar				25.000.000	APBD
1.1	1.1	01	17	07	Pelayanan dan pemberian santunan sosial Anak Panti asuhan dan Non Panti Asuhan	Terlaksananya pemberian bantuan permakanan bagi anak dalam dan luar panti Asuhan/LKS Anak.	Bulukumba	5 Panti 12 Bulan	25.000.000	APBD
1	1	01	18		Program pembinaan para penyandang Disabilitas dan eks trauma				240.000.000	APBD
1	1	01	18	04	Pendayagunaan para penyandang disabilitas dan eks trauma*	Terlaksananya pemberian bantuan sosial alat bantu bagi penyandang disabilitas fisik, bantuan UEP bagi penyandang disabilitas produktif dan terlaksananya evakuasi dan pelayanan bagi disabilitas mental	Bulukumba	12 Bulan 20 Paket	150.000.000	APBD
1	1	01	19	03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo	Terpenuhinya sarana dan prasarana panti asuhan dan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan penghuni panti	Bulukumba	12 Bulan 10 Paket	90.000.000	APBD
					Pengadaan sarana panti persinggahan	Terpenuhinya sarana pendukung dan kebutuhan rumah singgah bagi orang terlantar	Bulukumba	1 Paket		APBD
1	1	01	19	04	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)				65.000.000	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
1	1	01	20	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Terlaksananya operasional kegiatan dan bantuan UEP bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Napi, dll), dan sosialisasi bagi siswa mengenai bahaya narkoba dan HIV/AIDS	Bulukumba	12 Bulan 5 Paket 1 Kegiatan	65.000.000	APBD	
1	1	01	20	04	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			724.895.600	APBD	
1	1	01	21	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Terlaksananya pelaksanaan BIMTEK pemantapan petugas TAGANA bagi tenaga pemula (pelatihan shelter, evakuasi bencana, pendirian tenda, dapur umum) dalam penanggulangan bencana	Bulukumba	90%		APBD	
1	1	01	22	03	Pemberdayaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat	Terlaksananya pemberian Bantuan UEP kepada karang taruna (3KLP) dan tali asih TKSK (10 Orang), pelaksanaan KEMA BAKTI Karang Taruna	Bulukumba	12 Bulan 3 Paket	64.895.600	APBD
1	1	02	21	05	Pelestarian dan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, dan KSN	Terlaksananya Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan, Keperintisan dan KSN dan Terlaksananya Pemeliharaan / Rehab TMP Taccorong	Bulukumba	2 Kegiatan 1 Paket	220.000.000	APBD
1	1	01	21	06	Pengembangan Program Keluarga Harapan	Terlaksananya operasional TIM Koordinasi dan pendamping PKH	Bulukumba	75%	125.000.000	APBD
					Peningkatan peran aktif dan dunia usaha	Tersedianya operasional pembentukan forum CSR	Bulukumba	75%		APBD
					Profil Dinas Sosial	Tersedianya data dan informasi terkait kegiatan Dinas Sosial	Bulukumba	75% 1 Paket		APBD
1	1	01	21	07	Pengembangan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) bagi PMKS	Terlaksananya kegiatan SLRT bagi PMKS	Bulukumba	75% 12 Bulan	150.000.000	APBD
1	1	01	21	08	Penguatan kelembagaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya sosialisidan biaya operasional Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Bulukumba	12 Bulan 2 Kegiatan	15.000.000	APBD
1	1	01	21	09	Pengembangan penguatan pusta kesejahteraan sosial (puskesos)	Terlaksananya sosialisasi dna biaya operasional bagi pembentukan penguatan dan layanan sosial PUSKESOS di Dsesa/Kelurahan	Bulukumba	12 Bulan 5 Paket	150.000.000	

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
1	06	02		BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH				2.168.733.100,00		
1	06	02	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			459.088.250		
1	06	02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	BPBD	12 BULAN	32.400.000	APBD
1	06	02	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	BPBD	11 UNIT	17.900.000	APBD
1	06	02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	BPBD	12 BULAN	40.290.000	APBD
1	06	02	01	08	penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	BPBD	12 BULAN	32.939.000	APBD
1	06	02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor	BPBD	1 PAKET	3.500.000	APBD
1	06	02	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	BPBD	12 BULAN	-	APBD
1	06	02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPBD	12 BULAN	191.524.500	APBD
1	06	02	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Tersedianya Alat Tulis Kantor, bahan cetakan, makan minum kantor, dan gaji jasa pihak ketiga	BPBD	12 BULAN	140.534.750	APBD
1	06	02	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur		106.390.000	APBD	
1	06	02	02	03	Pengadaan pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor	BPBD	1 UNIT	-	APBN/APBD
1	06	02	02	05	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	BPBD	3 UNIT	-	APBD
1	06	02	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	BPBD	3 UNIT	-	APBD
1	06	02	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor	BPBD	6 UNIT	20.840.000	APBD
1	06	02	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	BPBD	9 UNIT	-	APBD
1	06	02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	BPBD	1 PAKET	-	APBD
1	06	02	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	BPBD	11 UNIT	75.550.000	APBD
1	06	02	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	BPBD	12 UNIT	5.000.000	APBD
1	06	02	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	BPBD	15 UNIT	5.000.000	APBD
1	06	02	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		40.000.000		
1	06	02	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur penanggulangan bencana	BPBD	6 ORANG	20.000.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	06	02	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	BPBD	8 ORANG	20.000.000	APBD
1	06	02	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan			-	
1	06	02	06	05	Penyusunan program kerja SKPD	Program kerja SKPD (Renja, RKA, DPA, Revisi Renstra)	BPBD	4 DOKUMEN	-	APBD
1	06	02	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPBD	1 DOKUMEN	-	APBD
1	06	02	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	BPBD	1 DOKUMEN	-	APBD
1	06	02	23		PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan pelaksanaan rehabilitasi			317.595.500	
1	06	02	23	01	Pemantauan daerah wilayah rawan bencana	Terlaksananya pemantauan daerah potensi rawan bencana	BULUKUMBA	10 KECAMATAN	41.014.000	APBD
1	06	02	23	03	Rapat-rapat koordinasi kesiap-siagaan dan rencana penanggulangan bencana	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam menghadapi bencana	BULUKUMBA	4 KALI	-	APBD
1	06	02	23	04	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Terlaksananya Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di 10 Kecamatan	BULUKUMBA	10 KECAMATAN	120.555.500	APBD
1	06	02	23	04						
1	06	02	23	06	Penyusunan Perda Penanggulangan Bencana	Tersusunnya Perda Penanggulangan Bencana	BULUKUMBA	1 DOKUMEN	106.026.000	APBD
					Aktifasi posko terpadu siaga bencana	Terlaksananya aktifasi posko terpadu siaga bencana alam	BULUKUMBA	2 KALI	-	APBD
					Pemberdayaan pos siaga bencana	Terlaksananya pos siaga bencana	BULUKUMBA	12 BULAN	-	APBD
1	06	02	24	02	Peningkatan kapasitas TRC dan relawan penanggulangan bencana	Terselenggaranya pelatihan tanggap darurat bencana bagi TRC dan Relawan Bencana	BULUKUMBA	1 KALI	50.000.000	APBD
1	06	02	26		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terlaksananya sosialisasi pemahaman kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana			-	
1	06	02	26	01	Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Terbentuknya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana	BULUKUMBA	2 KALI	-	APBD
1	06	02	26	02	Sosialisasi penanggulangan bencana di sekolah	Terbentuknya pemahaman dan kesadaran anak didik dalam menghadapi bencana	BULUKUMBA	2 KALI	-	APBD
1	06	02	24		PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan logistik bencana			1.027.959.850	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	06	02	24	01	Pemberdayaan Pos Siaga Tanggap Darurat	Terlaksananya pos siaga tanggap darurat dan penyaluran logistik bencana	BPBD	12 BULAN	888.451.850	APBD
1	06	02	24	02	Rapat-rapat koordinasi penanganan Tanggap Darurat Bencana	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi tanggap darurat bencana	BULUKUMBA	6 KALI	-	APBD
1	06	02	24	03	Penyiapan sarana prasarana, peralatan untuk penanggulangan bencana daerah	Tersedianya sapras, peralatan untuk penanggulangan bencana daerah	BULUKUMBA	15 UNIT	80.680.000	APBD
1	06	02	24	03	Mobilisasi/Operasionalisasi Logistik bencana	Terlaksananya mobilisasi/operasionalisasi logistik bencana	BULUKUMBA	1 PAKET	58.828.000	APBD
1	06	02	22		PROGRAM REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA	Terwujudnya pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana			217.699.500	
1	06	02	22	01	Identifikasi Dan Verifikasi Kondisi Kerusakan Dan Kerugian Sarana dan Prasarana	Terlaksananya identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana pasca bencana	BULUKUMBA	12 BULAN	49.463.000	APBD
1	06	02	22	04	Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terlaksananya fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	BULUKUMBA	1 DOKUMEN	168.236.500	APBD
1	06	02	22	02	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				
					- Pembangunan tanggul penahan banjir Dusun Sabberaga Desa Bulu-bulo		KEC. BULUKUMPA	100 METER		APBD
					- Pembangunan tanggul penahan longsor Dusun Sappabesi Desa Bulu-bulo (jalan poros provinsi Desa Bulu-Bulo)		KEC. BULUKUMPA	150 METER		APBD
					- Pembangunan bronjong Dusun Tanetea Desa Lembang Lohe (Aliran Sungai Paku-Paku)		KEC.KAJANG	400 METER		APBD
					- Rehabilitasi jembatan Dusun Bonto Tangnga Desa Salassae		KEC. BULUKUMPA	5 METER		APBD
					Pembangunan tanggul penahan longsor Dusun Bonto Tangnga Desa Salassae		KEC. BULUKUMPA	120 METER		APBD
					- Pembangunan tanggul penahan banjir Butung Kelurahan Bonto Kamase		KEC. HERLANG	100 METER		APBD
					Pembangunan talud penahan dan normalisasi sungai Desa Kambuno		KEC. BULUKUMPA	200 METER		APBD
					Pembangunan tanggul penahan longsor Desa Sipaenre		KEC. KINDANG	100 METER		APBD
					Pembangunan tanggul penahan banjir dan abrasi Lingk. Daloba Kelurahan Laikang		KEC. KAJANG	90 METER		APBD
					Pembangunan tanggul penahan banjir dan longsor Desa Bijawang		KEC. UJUNG LOE	120 METER		APBD
					Pembangunan tanggul penahan banjir dan normalisasi sungai Dusun Bajang Desa Gunturu		KEC. HERLANG	400 METER		APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
					Pembangunan tanggul penahan banjir kelurahan Jalanjang		KEC. GANTARANG	200 METER		APBD
					Pembuatan Tanggul Tanah Longsor		DUSUN ASSUNG BATUA, KEC. RILAU ALE	50 METER		APBD
					Pembuatan Tanggul Penahan Banjir		DUSUN KAPASA, KEC. UJUNG LOE	400 METER		APBD
					Pembuatan Talud Jalan dan Decker		PERBATASAN KEL. TANUNTUNG DAN DESA SINGA, KEC. HERLANG	17 METER		APBD
2	01	01			DINAS TENAGA KERJA				1.489.671.350	
2.01	2.01	01	01		Program pelayanan administrasi perkantoran				379.235.900,00	
2.01	2.01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	50.200.200,00	ABPD
2.01	2.01	01	01	06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	Meningkatnya legalitas dan penggunaan kendaraan dinas	Bulukumba	4 unit	2.250.000,00	ABPD
2.01	2.01	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Dokumen administrasi keuangan yang tertib	Kantor Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	62.566.600,00	ABPD
2.01	2.01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor	Kantor Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	25.308.750,00	ABPD
2.01	2.01	01	01	08	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulukumba	1 paket	1.500.000,00	ABPD
2.01	2.01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi antar daerah, provinsi dan pusat	Bulukumba	47 kali	174.367.000,00	ABPD
2.01	2.01	01	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Dokumen administrasi keuangan yang tertib	Kantor Dinas Tenaga Kerja	12 bulan	63.043.350,00	ABPD
2.01	2.01	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				76.456.000,00	
2.01	2.01	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Terciptanya kelancaran operasional kantor	Bulukumba	2 unit	15.356.000,00	ABPD
2.01	2.01	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terwujudnya optimalisasi penggunaan peralatan kantor	Bulukumba	15 unit	1.100.000,00	ABPD
2.01	2.01	01	02		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terciptanya kondisi kantor yang aman yang nyaman	Bulukumba	1 paket	60.000.000,00	ABPD
2.01	2.01	01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				22.125.000,00	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2.01	2.01	01	05	01	pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur	Bulukumba	1 Orang	22.125.000,00	ABPD
2.01	2.01	01			Program peningkatan pengetahuan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				21.190.050,00	
2.01	2.01	01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP.RENJA.dan Laporan Bulanan SKPD	Bulukumba	12 bulan	4.999.850,00	ABPD
2.01	2.01	01			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan anggaran keunangan akhir tahun 2019	Bulukumba	3 bulan	1.999.700,00	ABPD
2.01	2.01	01			Monitoring, evaluasi program kegiatan SKPD	Terantau dan terkendalinya pelaksanaan kegiatan APBD maupun APBN di kabupaten Bulukumba	Bulukumba	12 bulan	14.190.500,00	ABPD
2.01	2.01	01	15		Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja				435.806.500,00	
2.01	2.01	01	15	06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi pencari kerja/Remaja putus sekolah	Kab. Bulukumba	112 siswa	435.806.500,00	ABPD
2.01	2.01	01	16		Program peningkatan kesempatan kerja				415.122.800,00	
2.01	2.01	01	16	02	Penyebarnya Informasi Bursa Tenaga Kerja	Meningkatnya pengetahuan tenaga kerja mengenai informasi bursa tenaga kerja	Kab. Bulukumba	30 orang	177.689.000,00	ABPD
2.01	2.01	01	16	05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Meningkatnya pemahaman tentang manajemen usaha dan tersedianya sarana usaha bagi kelompok usaha baru	Kab. Bulukumba	2 Kelompok	150.739.500,00	ABPD
2.01	2.01	01	16		Pendayagunaan para penyandang cacat	Meningkatnya pengetahuan bagi para penyandang cacat	Kab. Bulukumba	20 orang	12.553.300,00	ABPD
2.01	2.01	01	16		Sosialisasi Pengiriman TKI Keluar Negeri	Meningkatnya Pengirimn TKI Keluar Negeri	Kab. Bulukumba	30 orang	20.291.200,00	ABPD
2.01	2.01	01	01		Pembinaan Program Pelatihan dan Pemagangan	Meningkatkan pelatihan dan pemagangan bagi pencari kerja	Kab. Bulukumba	30 orang	26.829.800,00	APBD
2.01	2.01	01	01		Pembinaan Standarisasi dan Kompetensi Tenaga Kerja	Meningkatnya Kemampuan Tenaga Kerja untuk menghadapi Persaingan kerja	Kab. Bulukumba	30 orang	27.020.000,00	APBD
2.01	2.01	01	17		Program perlindungan & pengembangan lembaga ketenagakerjaan				139.735.100,00	
2.01	2.01	01	17	02	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terwujudnya Hubungan yang Harmonis dan Perlindungan Jasmani Sosial tenaga Kerja	Kab. Bulukumba	1 kegiatan	112.557.100,00	ABPD
2.01	2.01	01	17	04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Terwujudnya Hubungan yang Harmonis dan Perlindungan Jasmani Sosial tenaga Kerja	Kab. Bulukumba	1 kegiatan	15.066.000,00	ABPD
2.01	2.01	01	01	02	Pengupahan dan Jaminan Puma Kerja	Terciptanya Hubungan Kerja yang Harmonis antara Pekerja dan Pemberi Kerja 4	Kab. Bulukumba	1 kegiatan	12.112.000,00	ABPD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
2	02	01		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.336.949.475,00		
2	02	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Adminstrasi Perkantoran			272.783.750,00		
2	02	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	Bulukumba	100%	34.120.000,00	DAU
2	02	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaranaan dinas/operasional	Bulukumba	100%	5.000.000,00	DAU
2	02	01	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya kesejahteraan pengelola administrasi keuangan	Bulukumba	100%	52.132.500,00	DAU
2	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya kesejahteraan pengelola kebersihan kantor	Bulukumba	100%	12.000.000,00	DAU
2	02	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Tersedianya peralatan listrik	Bulukumba	100%	1.500.000,00	DAU
2	02	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terwujudnya koordinasi dan kesepahaman di tingkat atas	Bulukumba	100%	100.000.000,00	DAU
2	02	01	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terpenuhinya ATK, Barang Cetak dan makan Minum Rapat	Bulukumba	100%	68.031.250,00	DAU
2	02	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			310.309.550,00	
2	02	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan Kantor P2TP2A	Bulukumba	100%	250.000.000,00	DAU
2	02	01	02	07	Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya suasana kerja yang nyaman dan aman	Bulukumba	100%	10.809.550,00	DAU
2	02	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Bulukumba	100%	12.500.000,00	DAU
2	02	01	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mobileur dalam mendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran	Bulukumba	100%	15.000.000,00	DAU
2	02	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Bulukumba	100%	5.000.000,00	DAU
2	02	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Bulukumba	100%	15.000.000,00	DAU
2	02	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bulukumba	100%	2.000.000,00	DAU
2	02	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur			33.846.000,00	
2	02	01	05	03	Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang undangan	Terwujudnya peningkatran SDM Aparatur	Bulukumba	100%	11.721.000,00	DAU
					Pendidikan dan pelatihan Formal	Terlaksananya Latpim III	Bulukumba	100%	22.125.000,00	

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
2	02	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem pelaporan Kinerja SKPD		30.103.000,00		
2	02	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tertibnya administrasi keuangan	Bulukumba	100%	1.500.000,00	DAU
2	02	01	06	04	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Tersedianya data/laporan kegiatan yang akurat	Bulukumba	100%	1.500.000,00	DAU
2	02	01	06	05	Penyusunan Program Kerja SKPD	Meningkatnya sistem perencanaan Program / kegiatan SKPD	Bulukumba	100%	27.103.000,00	DAU
2	02	01	15		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Anak & Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup & dan perlindungan perempuan		365.000.000,00		
2	02	01	15	03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi dan penguatan Focal Point PUG	Bulukumba	100%	15.000.000,00	DAU
2	02	01	15	05	Gerakan Sayang Ibu	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Gerakan Sayang Ibu	10 Kec	100%	100.000.000,00	DAU
2	02	01	15	06	Peringatan Hari Anak	Terwujudnya pelaksanaan peringatan hari anak	Bulukumba	100%	50.000.000,00	DAU
2	02	01	15	7	Pengembangan Kota Layak Anak	Terlaksananya Monev Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak, Rapat Gugus Tugas KLA	10 Kec	100%	50.000.000,00	DAU
2	02	01	15	8	Penguatan Forum Anak Kabupaten Bulukumba	Terlaksananya Musrenbang anak, Penyusunan Program Kerja, Pemilihan Duta Anak, Evaluasi Program Kerja	Bulukumba	100%	150.000.000,00	DAU
2	02	01	16		Program Penguatan Kelembagaan, Pengarusutamaan Gender & Anak	Meningkatnya penguatan kelembagaan, PUG dan Anak		154.907.175,00		
2	02	01	16	01	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan	Pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota dan Pelaksanaan Pertemuan POKJA PUG	Bulukumba	100%	15.000.000,00	DAU
2	02	01	16	02	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Optimalnya lembaga P2TP2A	Bulukumba	100%	50.000.000,00	DAU
2	02	01	16	04	Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Tesusunnya bahan/media komunikasi Informasi dan edukasi, Buku Pedoman Gender dan Anak serta Publikasi Data dan Informasi Gender dan Anak	Bulukumba	100%	14.907.175,00	DAU
2	02	01	16	06	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak	Tersedianya jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di Kecamatan	10 Kec	100%	15.000.000,00	DAU

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	02	01	16	07	Evaluasi PUG dan Perlindungan Anak	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan PUG dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Bulukumba	100%	30.000.000,00	DAU
2	02	01	16	08	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	Terselenggaranya pengembangan sistem informasi gender dan Anak (SIGA) di Kab. Bulukumba	Bulukumba	100%	30.000.000,00	DAU
2	02	01	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup & dan perlindungan perempuan			130.000.000,00	
2	02	01	17	02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban dan KDRT	Meningkatnya kualitas layanan terhadap perempuan korban kekerasan, Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	20 orang	100%	-	DAU
2	02	01	17	11	Peringatan Hari Ibu	Terwujudnya pelaksanaan hari Ibu	Bulukumba	100%	30.000.000,00	DAU
2	02	01	17	14	Peningkatan Ketahanan Keluarga	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	5 Kec	100%	100.000.000,00	DAU
2	02	01	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			40.000.000,00	
2	02	01	18	01	Pembinaan Organisasi Perempuan	Peningkatan SDM anggota Organisasi Perempuan	Bulukumba	100%	40.000.000,00	DAU
2	03				DINAS KETAHANAN PANGAN				2.251.036.450,00	
2	03	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			342.916.475,00	
2	03	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik kantor dan langganan TV kabel	Bulukumba	12 Bulan	41.298.141,00	APBD
2	03	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Bulukumba	3 Unit	5.250.000,00	APBD
2	03	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan barang, jasa operator komputer, pengarsipan dan jasa sopir	Bulukumba	12 Bulan	79.140.000	APBD
2	03	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Bulukumba	2 Orang	24.000.000,00	APBD
2	03	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulukumba	32 Kali	153.063.000,00	APBD
2	03	01	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tersedianya alat tulis kantor, penggandaan dan makan minum rapat	Bulukumba	1 Tahun	40.165.334,00	APBD
2	03	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			50.014.150,00	
2	03	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor dan alat pendingin ruangan	Bulukumba	1 Paket	11.641.000,00	APBD
2	03	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Bulukumba	1 Paket	11.742.650,00	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	03	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bulukumba	3 Unit	24.430.500,00	APBD
2	03	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bulukumba	20 Unit	2.200.000,00	APBD
2	03	01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			22.125.000,00	
2	03	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Teraksananya diklat/bimtek sumber daya aparatur	Bulukumba	3 Orang	22.125.000,00	APBD
2	03	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Teraksananya program dan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	Bulukumba	4 Orang/Kali	0,00	
2	03	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			9.286.700,00	
2	03	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Sakip (sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) Lakip, renja, perjanjian kinerja dan evaluasi renstra	Bulukumba	4 Dokumen	4.695.700,00	APBD
2	03	01	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Terlaksanananya penyusunan laporan keuangan	Bulukumba	12 Bulan	4.591.000,00	APBD
2	03	01	07		Program Pengembangan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi pangan dan pengembangan pangan Lokal			186.664.375,00	
2	03	01	07	01	Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan	Terlaksananya demplot pemanfaatan lahan pekarangan di KWT	Bulukumba	10 KWT	131.478.050,00	APBD
						Terlaksananya pendampingan pemanfaatan lahan pekarangan		5 KWT		
						Terlaksananya Penanganan Stunting		KWT		
						Terlaksananya pengembangan Obor Pangan Lestari (OPAL)		5 OPD		
2	03	01	07	02	Promosi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Terlaksananya pelatihan B2SA dan petugas survey PPH		1 Kali	55.186.325,00	
						Terlaksananya Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS)		1 Kali		
						Terlaksananya pengambilan sampel / survei PPH		10 Kec		
						Terlaksananya lomba cipta menu dan festival pangan lokal B2SA Tk. Kabupaten		2 Kali		
						Terlaksananya pameran celebres agriculture expo dan forum		1 Kali		

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
						Terlaksananya lomba cipta menu dan festival pangan lokal B2SA Tk. Provinsi		1 Kali		
2	03	01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Kesejahteraan Petani			40.761.500,00	
2	03	01	15	06	Koordinasi dan Pemantauan Kondisi Ketahanan Pangan	Terlaksananya Pertemuan dan perumusan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	Bulukumba	1 Kali	5.314.000,00	APBD
						Terevaluasinya kebijakan Ketahanan Pangan		1 Tahun		
2	03	01	15	07	Penyusunan Rumusan Kondisi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Tersedianya data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), NBM dan FSVA	Bulukumba	10 Dokumen	35.447.500,00	APBD
2	03	01	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat			100.864.500,00	
2	03	01	16	14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terlaksananya Pendampingan dan pembinaan Desa Mandiri Pangan	5 Kec Kab. Bulukumba	10 Desa/Kel	42.727.500,00	APBD
						Tersedianya kebun bibit desa (KBD)		5 Desa/Kel		
2	03	01	16	40	Pembinaan, Pendampingan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pangan	Terlaksananya pembinaan, pendampingan, pengawasan keamanan pangan	10 Kec Kab. Bulukumba	12 Bulan	40.365.000,00	APBD
						Terlaksananya pendampingan, pembinaan, dan kerjasama produsen pangan segar dan produk pangan lainnya		10 Kecamatan		
2	03	01	16	41	Penyusunan rencana program anggaran, pemantauan dan evaluasi	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kegiatan ketahanan pangan	10 Kec Kab. Bulukumba	12 Bulan	17.772.000,00	APBD
						Tersedianya rencana program dan anggaran, pengendalian aset ketahanan pangan		1 Tahun		
						Terlaksananya sinkronisasi dan penyusunan program kegiatan		1 Tahun		
2	03	01	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan			1.498.403.750,00	
2	03	01	19	10	Penyediaan Infrastruktur Pangan dan Sumber Daya Pendukung Ketahanan Pangan	Tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat	Bulukumba	4 unit	632.690.000,00	APBD
2	03	01	19	11	Penyusunan Rumusan Distribusi, Harga dan Pasokan Pangan	Tersedianya hasil analisis pasokan dan harga pangan	Bulukumba	1 Dokumen	38.003.750,00	APBD
						Terlaksananya Pertemuan persiapan dan evaluasi perkembangan harga pangan	Bulukumba	20 Kali		
						Tersedianya hasil harga pangan pokok		1 Dokumen		
						Tersedianya pendampingan Dana APBN		1 Kali		
2	03	01	19	12	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan	Terlaksananya pembinaan dan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)	Bulukumba	12 Bulan	37.732.500,00	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
						Terlaksananya pembinaan dan penguatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)		12 Bulan		
						Terlaksananya pendampingan dan sinkronisasi dana dekon APBN Tahun 2020		12 Bulan		
2	03	01	19	13	Pembinaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Bulukumba	41 Ton	495.640.000,00	APBD
						Tersedianya laporan perkembangan cadangan pangan pemerintah (CPP)		2 Dokumen		
2	03	01	19	14	Pembinaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat	Tersedianya cadangan pangan masyarakat	Bulukumba	41 Ton	294.337.500,00	APBD
						Terlaksananya pembinaan cadangan pangan masyarakat		12 Bulan		
2	05	01	01		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				9.774.278.150,00	
2	05	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				APBD
2	05	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	DLHK	100%	204.600.000,00	APBD
2	05	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional DLHK	DLHK	100%	29.300.000,00	APBD
2	05	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan	DLHK	100%	62.107.200,00	
2	05	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan DLHK	DLHK	100%	6.500.000,00	APBD
2	05	01	01	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Kantor DLHK	DLHK	100%	7.260.000,00	
2	05	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan pegawai kantor DLHK	DLHK	100%	2.220.000,00	APBD
2	05	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya pendanaan untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pada DLHK Kab. Bulukumba	DLHK	100%	295.831.000,00	APBD
2	05	01	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Tersedianya Penatausahaan SKPD	DLHK	100%	252.031.550,00	APBD
2	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.					
2	05	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor DLHK	DLHK	100%	5.500.000,00	APBD
2	05	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor DLHK	DLHK	100%	49.790.000,00	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	05	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.	Terlaksananya perbaikan Gedung Kantor DLHK	DLHK	100%	31.250.000,00	APBD
2	05	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional DLHK	DLHK	100%	62.750.000,00	APBD
2	05	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja DLHK	DLHK	100%	7.830.000,00	APBD
2	05	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					APBD
2	05	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kemampuan Pegawai DLHK	DLHK	100%	44.250.000,00	
2	05	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					APBD
2	05	01	06	05	Penyusunan Program Kerja SKPD	Terlaksananya Program Kerja DLHK	DLHK	12 bulan	21.823.250,00	
2	05	01	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					APBD
2	05	01	15	02	Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	- terpenuhinya Pengelolaan Persampahan kab.Bulukumba Terbangunnya TPST Bira, Tersusunnya DED TPST, Tersusunnya Dokumen Lingkungan TPST,	DLHK		4.533.417.800,00	
2	05	01	15	04	Kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tersedianya petugas kebersihan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Bulukumba	80%	2.345.359.450,00	
2	05	01	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					APBD
2	05	01	16	01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terlaksananya koordinasi persiapan penilaian adipura dan tersedianya pengelolaan sampah	Bulukumba	100%	56.025.750,00	APBD
2	05	01	16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Tersedianya data DTBP 3 sungai dan data hasil uji kualitas air sungai	kab bulukumba	100%	24.604.950,00	APBD/ DAK/DAU
2	05	01	16	04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Tersedianya Data Hasil Inventarisasi Usaha/ Kegiatan yang Belum dan yang Memiliki Dokumen LH serta Izin PPLH	Bulukumba	100%	28.848.750,00	APBD
2	05	01	16	06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Tersedianya sosialisasi peraturan pengelolaan LB3 dan terlaksananya pengawasan pengelolaan LB3 bagi usaha/ kegiatan	rumah sakit dan puskesmas dan klinik di kab, bulukumba	90%	27.498.900,00	APBD
2	05	01	16	12	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	dlhk	1 dokumen	20.513.800,00	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
3	04	01	16		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan				APBD	
3	04	01	16	06	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, penghijauan lingkungan dan pemeliharaan tanaman	Bulukumba	100%	92.422.800,00	APBD
3	04	01	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan				APBD	
3	04	01	17	01	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terselenggaranya Keg. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan tertanamnya di kawasan masyarakat adat	Bulukumba	100%	61.715.850,00	APBD
3	04	01	17	07	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDH	Tersusunnya Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA	Bulukumba	100%	51.556.750,00	APBD
2	05	01	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				APBD	
2	05	01	17	05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terbentuknya 10 kelompok kampung iklim utama + 1 kelompok kampung iklim lestari	kec.rilau ale,kindang gantarang,bontoba hari dan kajang	10 kecamatan	48.311.850,00	APBD DAN DAK
2	05	01	17	06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	inventarisasi data potensi kerusakan lingkungan dan pemantauan kerusakan lingkungan	kab bulukumba	10 kecamatan	16.530.750,00	APBD,APBN,DAK
2	05	01	19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup				APBD	
2	05	01	19	01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Terlaksananya Bimtek Adiwiyata Terlaksananya peningkatan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat, Saka Kalpataru,	10 kecamatan	165 sekolah Adiwiyata, 1saka dan 1 MHA	62.648.700,00	APBD
2	05	01	19	02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	tersedianya dokumen SLHD dan SILHD	1 dokumen	DLHK	180.000.000,00	APBD
2	05	01	20		Program Peningkatan Pengendalian Polusi				APBD	
2	05	01	20	03	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Tersedianya bahan kimia dan Terpeliharanya Laboratorium	kab bulukumba	14 Parameter	139.394.750,00	APBD,APBN,DAK
2	05	01	24		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				APBD	
2	05	01	24	05	kegiatan penataan ruang terbuka hijau (RTH)	Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah, terbangunnya RTH Kecamatan (hasil musrembang anak), Tersedianya sarana pelengkap Lingkaran Pinisi	kab bulukumba	10 Kecamatan	234.201.000,00	APBD,DAK

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	05	01	24	06	Kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terpeliharanya seluruh taman kota di beberapa kec,secara optimal tersedianya petugas taman kota sebanyak 49 tersedianya bibit RTH dan tong sampah pemilah untuk titik pantau adipura Tertatanya 39 taman kota.	kab bulukumba	5 kecamatan	768.183.300,00	APBD
2	6	1			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.449.526.100,00	
2	6	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2	06	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	549.464.150	
2	06	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik.	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik.	Bulukumba	12 bulan	147.266.800	APBD
2	06	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional.	Bulukumba	10 unit	7.000.000	APBD
2	06	01	01	07	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa administrasi Keuangan	Bulukumba	12 bulan	-	APBD
2	06	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulukumba	12 bulan	24.000.000	APBD
2	06	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik.	Bulukumba	1 paket	2.114.000	APBD
2	06	01	01	13	penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulukumba	100%	-	APBD
2	06	01	01	14	penyedia peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dan peralatan pembersih	Bulukumba	12 Bulan	2.500.000	APBD
2	06	01	01	18	rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksana Kordinasi Dan Konsultasi keluar Daerah	Bulukumba	12 Bulan	172.449.000	APBD
2	06	1	1	19	penatausahaan kesekretariatan OPD	Tersedianya ATK, penggandaan, dan barang cetakan.	Bulukumba	12 Bulan	194.134.350	APBD
2	06	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.	Bulukumba	100%	245.957.100	
2	06	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Bulukumba	2 Unit	-	APBD
2	06	01	02	07	pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedia perlengkapan gedung kantor	Bulukumba	1 Paket	29.000.000	APBD
2	06	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor.	tersedianya peralatanan kantor	Bulukumba	1 Paket	107.141.250	APBD
2	06	01	02	10	Pengadaan mebeleur.	tersedianya mebeleur	Bulukumba	1 Paket	16.449.600	APBD
2	06	01	02	22	pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Bulukumba	1 paket	4.107.000	APBD
2	06	01	02	24	pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor.	Bulukumba	10 unit	59.775.250	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	06	01	02	28	pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor.	Bulukumba	1 Paket	29.484.000	APBD
2	06	01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	Bulukumba	1 Paket	-	APBD
2	06	01	05		program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur	Bulukumba		22.125.000	APBD
2	06	01	05	01	pendidikan dan pelatihan formal	terlaksana kegiatan dan pelatihan (diklat PIM III)	Bulukumba	1 Orang	22.125.000	APBD
2	06	01	06		program peningkatan sistem pelaporan capaian kerja dan Keuangan	Meningkatkan Kualitas Pelaporan	Bulukumba		32.526.600	APBD
2	06	01	06	04	Penyusunan pelaporan Bulanan Dan Tahunan	Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun.	Bulukumba	12 Bulan	5.625.000	APBD
2	06	01	06	05	Penyusunan program kerja OPD	tersedianya pelaporan perencanaan dan pelaporan	Bulukumba	12 Bulan	26.901.100	APBD
2	06	01	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tertatanya Administrasi Kependudukan	Bulukumba		2.599.453.250	
2	06	01	15	01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Terlaksananya Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Bulukumba	12 Bulan	1.479.704.700,00	DAK
2	06	01	15	02	Pelatihan tenaga dan pengelola SIAK	Terlaksananya pelatihan tenaga pengelola SIAK	Bulukumba	55 Orang	12.525.100	APBD
2	06	01	15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).	Terbangunnya Updating dan Pemeliharaan SIAK.	Bulukumba	12 Bulan	5.485.000	APBD
2	06	01	15	05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	Tersusunnya pemumanfaatan data kependudukan	Bulukumba	100%	9.168.000	APBD
2	06	01	15	08	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan.	Meningkatnya Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan.	Bulukumba	12 Bulan	616.058.000	APBD
2	06	01	15	09	peningkatan data base kependudukan	Tersedianya Database Kependudukan.	Bulukumba	1 Dokumen	5.631.900	APBD
2	06	01	15	10	penyusunan kebijakan kependudukan	Terlaksananya penyusunan perbub kependudukan	Bulukumba	24 Laporan	64.869.700	APBD
2	06	01	15	12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	telaksananya sosialisasi kebuijakan kependudukan	Bulukumba	1 Kali	119.150.300	DAK
2	06	01	15	13	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan.	Bulukumba	100%	5.390.000	APBD
2	06	01	15	16	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil	Meningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil	Bulukumba	12 Bulan	213.517.900	APBD
2	06	01	15	17	Verifikasi Dan Konfersi Data Kependudukan	Terlaksananya verifikasi Dan Konfersi Data Kependudukan	Bulukumba	1 Dokumen	4.858.000	APBD
2	06	01	15	18	Penata usahaan Kelahiran	Terciptanya Data Administrasi Penata usahaan Kelahiran	Bulukumba	12 Bulan	23.083.600	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	06	01	15	19	penata usahaan Perkawinan dan Perceraian	Terlaksananya penata usahaan Perkawinan dan Perceraian	Bulukumba	12 Bulan	7.880.000	APBD
2	06	01	15	20	analisis data kependudukan	Tersusunnya analisis data kependudukan (Buku Agregat kependudukan)	Bulukumba	100%	11.481.050	APBD
2	06	01	15	21	penyusunan buku profil kependudukan	Terlaksananya penyusunan buku profil kependudukan	Bulukumba	1 Dokumen	10.350.000	APBD
2	06	01	15	22	penatausahaan perubahan status anak kewrga negaraan dan kematian	terlaksananya penata usahaan perubahan status anak kewarganegaraan dan kematian	Bulukumba	100%	10.300.000	APBD
2	07				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				2.530.530.000,00	
2	07	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			285.583.950,00	
2	07	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pembayaran listrik, telepon dan air	Bulukumba	12 Bulan	45.960.000,00	APBD
2	07	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perpanjangan STNK dan service	Bulukumba	5 unit	3.200.000,00	APBD
2	07	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Bulukumba	12 Bulan	10.200.000,00	APBD
2	07	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Bulukumba	2 orang	20.400.000,00	APBD
2	07	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Bulukumba	1 paket	4.015.000,00	APBD
2	07	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas	Bulukumba	12 Bulan	103.259.000,00	APBD
2	07	01	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Tersedianya ATK, barang cetakan, makanan & minuman rapat	Bulukumba	12 Bulan	98.549.950,00	APBD
2	07	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat			34.400.000,00	
2	07	01	02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya alat kebersihan dan pengecatan	Bulukumba	12 Bulan	5.000.000,00	APBD
2	07	01	02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Bulukumba	2 unit	25.000.000,00	APBD
2	07	01	02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya jasa service perlengkapan gedung kantor	Bulukumba	13 Unit	4.400.000,00	APBD
2	07	01	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja dan laporan keuangan	Bulukumba		26.145.300,00	
2	07	01	6	04	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 2016	Bulukumba	1 dokumen	1.000.000,00	APBD
2	07	01	6	05	Penyusunan Program Kerja SKPD	Jumlah Dokumen dan laporan yang diselesaikan	Bulukumba	6 dokumen	25.145.300,00	APBD
2	07				URUSAN WAJIB					

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
2	07	01	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		1.628.137.500,00		
2	07	01	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kegiatan Semalan di Desa	Bulukumba	9 Kec dan Luar Provinsi	31.913.000,00	APBD
2	07	01	15	05	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pendataan Profil Desa/Kel	Bulukumba	109 Desa	44.723.500,00	APBD
2	07	01	15	06	Pertemuan Pokjanel Posyandu	Terlaksananya Pertemuan Pokjanel Posyandu Kabupaten/Kecamatan	Bulukumba	1 Tahun	25.500.000,00	APBD
2	07	01	15	09	Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang desa	Terlaksananya perubahan perda tentang desa	Bulukumba	100%	31.001.000,00	APBD
2	07	01	15	10	Pemilihan kepala desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa	Bulukumba	64 Desa	1.495.000.000,00	APBD
2	07	01	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Terciptanya penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan		105.797.500,00		
2	07	01	16	02	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Terlaksananya pembinaan badan usaha milik desa dan Penilaian lomba bumdes	Bulukumba	109 Desa	53.225.000,00	APBD I
2	07	01	16		Fasilitasi Pembentukan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan	Bulukumba	2 Kecamatan	52.572.500,00	APBD
2	07	01	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa		109.952.250,00		
2	07	01	17	01	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Terlaksananya penguatan kelompok dalam mewujudkan program Pamsimas dan PPSP	Bulukumba	10 desa	35.729.750,00	APBD
2	07	01	17	05	Penilaian Perlombaan Desa/Kel	Terlaksananya Penilaian perlombaan Desa/Kel di setiap kecamatan	Bulukumba	9 desa	41.522.500,00	APBD
2	07	01	17	07	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat	Bulukumba	1 kali	10.700.000,00	APBD
2	07	01	17	08	Penetapan Batas Wilayah Desa	Terlaksananya kegiatan penetapan batas wilayah desa	Bulukumba	109 Desa	22.000.000,00	APBD
2	07	01	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa		135.497.500,00		
2	07	01	18	02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pelatihan pengelolaan keuangan desa	Bulukumba	109 desa	55.671.000,00	APBD
2	07	01	18	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertibnya pengelolaan administrasi ADD dan Dana Desa, Dana Bergulir PNPM dan Bumdes	Bulukumba	109 desa	32.712.500,00	APBD
2	07	01	18	05	Peningkatan kapasitas pemerintahan desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa	Bulukumba	64 Orang	47.114.000,00	APBD
2	07	01	19		Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan di perdesaan		205.016.000,00		
2	07	01	19		Pembinaan kelembagaan PKK	Berfungsinya kelembagaan PKK di Desa/kel	Bulukumba	6 Kali	205.016.000,00	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
2	08			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4.642.992.400,00		
2	08	01	01	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran			351.972.750,00		
2	08	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik di Kantor DPPKB dan 10 Balai Penyuluh	BLK dan 10 Balai	12 Bulan	80.298.000,00	DAU
2	08	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BLK	5 Unit	7.030.000,00	DAU
2	08	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Terlaksananya Pemberian honor bagi pengelola keuangan	BLK	12 Bulan	14.939.650,00	DAU
2	08	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pemberian bagi tenaga kebersihan kantor	BLK	2 Org	24.000.000,00	DAU
2	08	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan kantor	Tersedianya Peralatan Listrik	BLK	1 Paket	989.400,00	DAU
2	08	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Dalam & luar daerah	12 Bulan	159.101.550,00	DAU
2	08	01	01	21	penatausahaan sekretariat SKPD	Tersedianya ATK, Bahan Pembersih, Barang Cetak dan Makan Minum Rapat	BLK	100%	65.614.150,00	DAU
2	08	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			105.253.450,00	
2	08	01	02	4	Pengadaan Kendaraan Operasional Mobil jabatan	Tersedianya Mobil Jabatan untuk kadis	BLK	1 Unit	-	DAU
2	08	01	02	5	Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan dinas roda dua	BLK	4 Unit	-	DAU
2	08	01	02	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya laptop, printer, AC dan Sound System	BLK	6 Unit	40.865.950,00	DAU
2	08	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Pengadaan sarana kerja pada kantor DPPKB	BLK	6 Buah	13.687.500,00	DAU
2	08	01	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Dilaksanakannya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	BLK	100%	5.700.000,00	DAU
2	08	01	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas/ Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional (5 Unit)	BLK	5 Unit	40.000.000,00	DAU
2	08	1	2	25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	BLK	100%	5.000.000,00	DAU
2	08	1	2	42	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Penambahan ruangan dan perbaikan garasi	BLK	100%	-	DAU
2	08	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur				-	
2	08	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Latpim Eselon IV (4 org)	BLK	4 Org	-	DAU

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	08	01	05	02	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek Perundangan	BLK	100%	-	DAU
2	08	01	06		Program Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan				22.890.200,00	
2	08	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	BLK	3 Laporan	1.500.000,00	DAU
2	08	01	06	04	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Terlaksananya Pelaporan Akhir Tahun	BLK	1 Laporan	1.500.000,00	DAU
2	08	01	06	05	Penyusunan Program Kerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan Program / Kegiatan SKPD	BLK	6 Dokumen	19.890.200,00	DAU
2	08	01	07	07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	BLK	100%	-	DAU
2	08	01	15		Program Keluarga Berencana				3.918.457.150,00	
2	08	01	15	01	Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Tersedianya Pelayanan KB Melalui Kegiatan TNI Manunggal KB-KES, Kegiatan Bulan Bhakti Bhayangkara, Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB - KES, kegiatan bulan bhakti KB-IBI dan Pelayanan KB Mobile	10 Kec	5 Keg.	112.385.150,00	DBHPR
2	08	01	15	04	Pelayanan KIE	Operasional KIE KIT-KES melalui pelayanan kelompok	10 Kec	12 Bulan	15.666.000,00	DBHPR
2	08	01	15	05	Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatnya Pengetahuan Kader (150 orang)	10 Kec	150 org	15.000.000,00	DBHPR
2	08	01	15	07	Bantuan Operasional Keluarga berencana (BOKB)	Terlaksananya Bantuan, Operasional Keluarga Berencana	10 kec	12 Bulan	2.112.876.000,00	DAK Non Fisik
2	08	01	15	08	Pemberdayaan ekonomi Keluarga	Tersedianya sosialisasi dan Pelatihan Kelompok UPPKS bagi Keluarga Miskin	10 kec	100 org	12.530.000,00	DBHPR
2	08	01	15	11	Peningkatan Dukungan Sarana dan prasarana penyuluhan KB	Terlaksananya dukungan sarana dan prasarana penyuluhan KB	10 kec	11 Unit	1.650.000.000,00	DAK Fisik
2	08	01	16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja KRR			1	42.774.350,00	
2	08	01	16	01	Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Terlaksananya Advokasi dan KIE tetang kesehatan Reproduksi Remaja	BLK	450 Org	42.774.350,00	DBHPR
2	08	01	16	02	Pengembangan Pusat Informasi dan Konsultasi	terlaksananya pengembangan pusat informasi dan konsultasi	BLK	100%	-	DAU
2	08	01			Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan	Terlaksananya Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan	10 Kec	100%	-	DAU
2	08	01	17		Program Pelayanan Kontrasepsi				49.530.000,00	
2	08	01	17	01	Pelayanan Konseling KB	Terlaksananya Pelatihan R/R bagi PLKB/PKB	10 Kec	50 Org	9.530.000,00	DBHPR

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	08	01	17	03	Pengadaan alat Kontrasepsi	Tersedianya alat kontrasepsi berupa side efec untuk pelayanan KB	10 Kec	1 Paket	40.000.000,00	DBHPR
2	08	01	18		Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri				61.201.500,00	
2	08	01	18	01	Pembentukan Kelompok masyarakat peduli KB	Terlaksananya Pembentukan Pelatihan dan Pembinaan Kelompok	10 Kec	10 Klp	8.891.000,00	DBHPR
2	08	01	18	03	Koordinasi Pengelolaan Program kependudukan dan keluarga berencana (KKB)	Terlaksananya Pengelolaan Program KKB dan sosialisasi sekolah siaga Kependudukan (SSK)	10 Kec	5 Sekolah	20.000.000,00	DBHPR
2	08	01	18	05	Pengelolaan Data dan Informasi program KB	Terlaksananya Pengelolaan KB Rutin	BLK	12 Bulan	32.310.500,00	DBHPR
2	08	01	21		Program Peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS				25.000.000,00	
2	08	01	21	01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS	Terlaksananya Penyuluhan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS	Sekolah	5 Sekolah	25.000.000,00	DBHPR
2	08	01	22		program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				21.000.000,00	-
2	08	01	22	01	pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	terlaksananya sosialisasi pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	10 Kec	100%	21.000.000,00	DBHPR
2	08	01	23		Program Penyiapan Tenaga pendamping kelompok bina keluarga				26.000.000,00	
2	08	01	23	01	Pelatihan Tenaga Pendamping Bina keluarga	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendamping Bina Keluarga	10 Kec	150 Org	26.000.000,00	DBHPR
2	08	1	25		Program Kelembagaan dan Jaringan KB				18.913.000,00	
2	08	01	25	01	Orientasi manunggal TNI KB - KES	Terlaksananya Orientasi, Manunggal TNI KB - KES	10 Kec	1 Keg.	-	DAU
2	08	01	25	02	Bulan Bhakti KB - KES Bhayangkara	Terlaksananya Bulan Bhakti KB - KES Bhaangkari	10 Kec	1 Keg.	-	DAU
2	08	01	25	03	Bulan Bhakti KB - IBI	Terlaksananya Bulan Bhakti KB - IBI	10 Kec	1 Keg.	-	DAU
2	08	01	25	04	Kesatuan Gerak PKK KB - KES	Terlaksananya Kesatuan Gerak PKK KB - KES	10 Kec	1 Keg.	-	DAU
2	08	01	25	07	Hari Keluarga Tingkat Nasional	Terlaksananya Hari Keluarga Tk. Nasional	10 Kec	1 Kali	18.913.000,00	DBHPR

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	09	01		DINAS PERHUBUNGAN				1.924.626.300,00	
2	09	01	2'0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				411.398.700,00	
2	09	01	2'0 1	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik.	Tersedianya jasa belanja listrik dan belanja internet.	Bulukumba	12 Bulan	47.130.000,00	APBD
2	09	01	01	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Tersedianya asuransi kendaraan dan STNK serta izin operasi kendaraan dinas operasional	Bulukumba	24 Buah	21.115.000,00	APBD
2	09	01	01	07 Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan	Bulukumba	12 Bulan	75.985.500,00	APBD
2	09	01	01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor.	Bulukumba	12 Bulan	25.744.400,00	APBD
2	09	01	01	09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Tersedianya peralatan kerja kantor yang layak pakai.	Bulukumba	29 Bulan	6.900.000,00	APBD
2	09	01	01	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan bangunan kantor.	Bulukumba	24 Buah	750.000,00	APBD
2	09	01	01	18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.	Tersedianya rapat koordinasi dan belanja perjalanan dinas luar daerah	Bulukumba	12 Bulan	134.465.750,00	APBD
2	09	01	01	19 Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Tersedianya ATK, barang cetakan dan penggandaan serta makanan dan minuman.	Bulukumba	12 Bulan	99.308.050,00	APBD
2	09	01	02	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				474.705.850,00	
2	09	01	02	05 Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Operasional. Roda 4 Dan Roda 2	Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Operasional. Roda 4 dan Roda 2	Bulukumba	3 Unit	342.912.500,00	APBD
2	09	01	02	09 Pengadaan peralatan gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor berupa PC ALL In one printer .	Bulukumba	8 Buah	35.882.500,00	APBD
2	09	01	02	10 Pengadaan mebeleur.	Tersedianya pengadaan Meubeleur	Bulukumba	2 Buah	15.246.000,00	APBD
2	09	01	02	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Terpeliharanya Gedung kantor, pagar kantor dan terminal	Bulukumba	12 Bulan	12.500.000,00	APBD
2	09	01	02	23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.	Tersedianya mobil jabatan	Bulukumba	18 Unit	21.599.850,00	APBD
2	09	01	02	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Bulukumba	12 Bulan	16.565.000,00	APBD
2	09	01	02	25 Pengadaan Tempat Parkir Bus Sekolah	Terwujudnya tempat Parkir Bus Sekolah	Bulukumba	1 Paket	30.000.000,00	APBD
2	09	01	02	26 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional.	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor.	Bulukumba	1 Unit	-	APBD
2	09	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.				22.150.000,00	
2	09	01	05	01 Pendidikan dan pelatihan formal.	Terlaksananya dan terwujudnya pendidikan dan pelatihan formal aparatur.	Bulukumba	2 Orang	22.150.000,00	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
2	09	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			19.870.150,00		
2	09	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bulukumba	12 Bulan	-	APBD
2	09	01	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	Bulukumba	12 Bulan	-	APBD
2	09	01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Bulukumba	12 Bulan	-	APBD
2	09	01	06	05	Penyusunan program kerja SKPD	Tersedianya Dokumen Program Kerja SKPD dan Renstra	Bulukumba	12 Bulan	19.870.150	APBD
2	09	01	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			499.565.000,00	APBD	
2	09	01	15	01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Bandara)RTT (Sisi Udara)dan sisi Darat	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Bandara) (Sisi Darat)	Bulukumba	1 Paket	-	APBD.Prov
2	09	01	15	02	Prencanaan Amdal	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pelabuhan (Amdal)	Bulukumba	3 Paket	-	APBD /PROV
2	09	01	15	04	Sosialisasi kebijakan bidang perhubungan	Meningkatnya Kesadaran Berlalu Lintas bagi anak sekolah	Bulukumba	4 Kali	-	APBD
2	09	01	15	07	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan darat	Terwujudnya penagihan retribusi terminal,perparkiran dan terminal pembantu	Bulukumba	12 Bulan	429.565.000,00	APBD
2	09	01	15	09	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya pembangunan halte bus	Kec.Rilau Ale	1 Paket	-	APBD.Prov
	09	01	15	13	Pemeliharaan Lampu Traffic Light dan Warning	Tersedianya Lampu Traffic Light dan Warning	Kab.bulukumba	1 Paket	20.000.000,00	APBD.Prov
						Tersedianya pembangunan halte bus	Kel. Mariorenu Kec. Gantarang	1 Paket	-	APBD/.Prov
						Tersedianya pembangunan halte bus	Bonto Lohe Kec. Ujung Loe	1 Paket	-	APBD/.Prov
						Tersedianya pembangunan halte bus	Depan Unismuh Kel.Tanah Kongkong. Kec. Ujung Bulu	1 Paket	-	APBD/.Prov
						Tersedianya pembangunan halte bus	Bundara Tanah Beru Kec.Bonto Bahari	1 Paket	-	APBD.Prov

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	09	01	15	11	Pemeliharaan Lampu Traffic Light	Terlaksananya Pemeliharaan Traffic Light	Bulukumba	1 Paket	-	APBD
2	09	01	15	13	Perencanaan Pembebasan jalan Pembangunan Pelabuhan Laut Lembang Keke Kec. Kajang	Terwujudnya Perencanaan Pembebasan jalan Pembangunan Pelabuhan Laut Lembang Keke Kec. Kajang	Kec. Kajang	1 Paket	50.000.000,00	APBD/APBN/APBD Prov
2	09	01	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				32.850.000,00	APBD
2	09	01	16	01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Bulukumba	12 Bulan	32.850.000,00	APBD
2	09	01	16	02	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Terpeliharanya kawasan terminal dan kenyamanan petugas parkir	Bulukumba	1 paket	-	APBD
2	09	01	17	03	Rehabilitasi Kantor Dinas Perhubungan	Terlaksananya Rehabilitasi Kantor/Dinas perhubungan	Bulukumba	1 Paket	-	APBD
2	09	01	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Pelayanan Angkutan			412.003.000,00	
2	09	01	17	01	Kegiatan penyuluhan bagi para supir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Terwujudnya penyuluhan para supir untuk peningkatan disiplin penumpang	Bulukumba	3 kalin	-	APBD
2	09	01	17	02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	terwujudnya sarana transportasi Laut yang tertib dan tercapainya PAD retribusi pelayanan kepelabuhanan dan penagihan retribusi parkir	Bulukumba	12 Bulan	-	APBD
2	09	01	17	03	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Terwujudnya sarana transportasi Darat yang baik	Bulukumba	2 kali	-	APBD
2	09	01	17	04	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna keselamatan Penumpang	Terwujudnya pengawasan peningkatan pelayanan angkutan dan meningkatnya pendapatan asli daerah	Bulukumba	12 Bulan	-	APBD
2	09	01	17	06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	terlaksananya penjagaan keamanan di terminal penumpang	Bulukumba	12 Bulan	-	APBD
2	09	01	17	07	Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama	terpeliharanya alat deteksi tsunami, reviter, dan tersedianya pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat.	Bulukumba	12 Bulan	21.310.000,00	APBD
2	09	01	17	08	Pengadaan Prasarana Alat Deteksi Tsunami	Terlaksananya Pengadaan Prasarana Alat Deteksi Tsunami	Bulukumba	1 Paket	-	APBD
2	09	01	17	09	Pemeliharaan Prasarana Alat Deteksi Tsunami dan Cuaca	Terwujudnya Pemeliharaan Prasarana Alat Deteksi Tsunami dan Cuaca	Bulukumba	12 Bulan	-	APBD
2	09	01	17	12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	tersedianya pelayanan kendaraan bus sekolah kepada siswa sekolah.	Bulukumba	12 Bulan	233.345.000,00	APBD
2	09	01	17	14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Terwujudnya Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Bulukumba	12 Bulan	-	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	09	01	17	15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Terlaksanya kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Terminal Bulukumba	2 kali	-	APBD
2	09	01	17	18	pengawasan lalu lintas dan angkuatan jalan terpadu	tersedianya belanja pengawasan dan penerbitan angkutan umum dan pengaturan lalu lintas jalan.	Bulukumba	1 Kali	157.348.000,00	APBD
2	09	01	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				52.083.600,00	
2	09	01	19		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terselesainya Masalah-masalah dilapangan	Bulukumba	6 Bulan	52.083.600,00	APBD
2	09	01	19	05	Pengadaan Rambu-Rambu LLAJ	menurunya angka kecelakaan lalu lintas	Se Kab. Bulukumba	20 Buah	-	APBD/APBN/APBD Prov
2	09	01	19	06	Marka jalan 15.000 Km Kab. Bulukumba	menurunya angka kecelakaan lalu lintas	Bulukumba	3 Paket	-	APBD/APBN/APBD Prov
2	09	01	19		Pagar pengaman jalan (Guardrail)	Terwujudnya pembangunan pagar pengaman jalan Kab. Bulukumba	Sapo Bonto.Kec. Bulukumpa	50 Meter	-	APBD/APBN/APBD Prov
	09	01	19		Pagar pengaman jalan (Guardrail)	Terwujudnya pembangunan pagar pengaman jalan Kab. Bulukumba	Depan KUA Basokeng Ds.Dato TiroTri Tiro Kec. Bt.Tiro	50 M	-	APBD/APBN/APBD Prov
	09	01	19		Pagar pengaman jalan (Guardrail)	Terwujudnya pembangunan pagar pengaman jalan Kab. Bulukumba	Poros Gunturu - Tanuntung,Singa,Tanuntung,Bonto Kamase, Bajange Turungen , Mcinna Kec.Herlang.	500 Meter	-	APBD/APBN/APBD Prov
	09	01	19		Pagar pengaman jalan (Guardrail)	Terwujudnya pembangunan pagar pengaman jalan Kab. Bulukumba	Ds.Marajo ,Bonto Rannu , Malleleng Kec. Kajang	150 Meter		APBD/APBN/APBD Prov

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	09	01	19	Pagar pengaman jalan (Guardrail)	Terwujudnya pembangunan pagar pengaman jalan Kab. Bulukumba	,Nana,Orogading, Kindang,Tamaona ,Kahaya Somba Palioi , Borong Rappoa Kec.Kindang	500 Meter	-	APBD/APBN/APBD Prov
	09	01	19	Pagar pengaman jalan (Guardrail)	Terwujudnya pembangunan pagar pengaman jalan Kab. Bulukumba	Kel. Palampang dan Bodo Baji , Swatani , Pangaloang Kec. Rilau Ale	150 Meter		APBD/APBN/APBD Prov
2	09	01	19	Warning light (lampu hati-hati)	menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Depang Ktr Camat Bt.Bahari,Bonto Tiro,Bulukumpa	6 Unit	-	APBD/APBN/APBD Prov
2	09	01	19		menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Depan Kantor DPRD	1 Unit		APBD/APBN/APBD Prov
					menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Manyampa Kec. Ujung Loe	1 Unit		APBD
	09	01	19		menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Ompoa Bt.Malewang , Tala Barombong Kec.Gantarang	2 Unit		APBD/APBN/APBD Prov
2	09	01	19	APILL (traffig liht)	menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Kec. Ujung Bulu	1 Paket	-	APBD/APBN/APBD Prov
2	09	01	19	APILL (traffig liht)	menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Kec. Bulukumpa	1 Paket		APBD/APBN/APBD Prov
2	09	01	19	Deliniator	menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Bulukumba	20 Biji		APBD
2	09	01	19	Paku jalan	menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Kec.Ujung Bulu	500 Biji		APBD/APBN/APBD Prov
2	09	01	19	Cermin tikungan	menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Maleleng Kec, Kajang ,Tri Tiro Bonto Tiro	1 Paket		APBD/APBN/APBD Prov

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
	09	01	19	Pengadaan Lampu Jalan	Penerangan Jampu Jalan	Kel. Tanah Jaya,Batu Nilamung, Kec, Kajang	1 Paket		APBD/APB N/APBD Prov	
	09	01	19	Pengadaan Lampu Jalan	Penerangan Jampu Jalan	Bonto Rannu Kec. Bonto Tiro	25 Buah		APBD/APB N/APBD Prov	
2	09	01	19	Pembuatan Nama - nama Jalan	Terwujudnya Nama-nama Jalan	Kel.Loka Kec. Ujung Bulu	1 Paket		APBD	
2	09	01	19		Terwujudnya Nama-nama Jalan	KasimPureng Kec.Ujung Bulu	1 Paket		APBD	
	09	01	19		Terwujudnya Nama-nama Jalan	Kel.Bintarore Kec. Ujung Bulu	1 Paket		APBD	
	09	01	19		Terwujudnya Nama-nama Jalan	Kel.Tanah Kongkong Kec.Ujung Bulu	1 Paket		APBD	
2	09	01	19		Terwujudnya Nama-nama Jalan	Mario Rennu Kec.Gantarang	1 Paket		APBD	
	09	01	19		Terwujudnya Nama-nama Jalan	Kel.matekko Kec. Gantarang	1 Paket		APBD	
	09	01	19		Terwujudnya Nama-nama Jalan	Kel.Jalanjang Kec. Gantarang	1 Paket		APBD/APB N/APBD Prov	
2	09	01	19	Pembuatan Tanda CARFREE DAY 1 Paket	Terwujutnya pembuatan tanda Carfree day	Bulukumba	1 Paket	-	APBD.	
2	09	01	20	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				-		
2	09	01	20	01	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	Terwujudnya Pembangunan gedung alat pengujian kendaraan bermotor	Bulukumba	1 Unit	-	APBD/APB N/APBD Prov
2	09	01	20	02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Terwujudnya alat pengujian kendaraan bermotor	Bulukumba	1 Unit	-	APBD/APB N/APBD Prov

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
2	10	01		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI				3.488.785.150,00		
2	10	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			556.341.935		
2	10	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kab. Bulukumba	12 Bulan	78.000.000	APBD
2	10	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/ operasional Diskominfo T.A. 2021	Kab. Bulukumba	12 Bulan	5.013.935	APBD
2	10	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Pelayanan administrasi keuangan Dinas kominfo	Kab. Bulukumba	12 Bulan	96.734.000	APBD
2	10	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Pelayanan jasa kebersihan Dinas kominfo	Kab. Bulukumba	12 Bulan	26.515.000	APBD
2	10	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja/jumlah perbaikan	Kab. Bulukumba	12 Bulan	12.000.000	APBD
2	10	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	Kab. Bulukumba	12 Bulan	15.000.000	APBD
2	10	01	01	10	Penyediaan jasa perbaikan perlengkapan kerja	Tersedianya Pelayanan jasa perbaikan perlengkapan kerja/jumlah perbaikan	Kab. Bulukumba	12 Bulan	-	APBD
2	10	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kab. Bulukumba	100%	178.849.000	APBD
2	10	01	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Pelayanan jasa kesekretariatan kantor	Kab. Bulukumba	100%	144.230.000	APBD
2	10	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.			134.115.465	
2	10	01	02	09	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kab. Bulukumba	100%	20.000.000	APBD
2	10	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas roda 4	Kab. Bulukumba	100%	-	APBD
2	10	01	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas roda 2	Kab. Bulukumba	100%	-	APBD
2	10	01	02	06	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	Kab. Bulukumba	100%	-	APBD
2	10	01	02	07	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Bulukumba	100%	-	APBD
2	10	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya peremajaan Mebeleur (Meja dan Kursi Kerja) di Kantor Diskominfo	Kab. Bulukumba	100%	20.000.000	APBD
2	10	01	02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan kantor	Kab. Bulukumba	12 Bulan	4.255.465	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	10	01	02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Kab. Bulukumba	12 bulan	59.860.000	APBD
2	10	01	02	42	rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor diskominbfo	Kab. Bulukumba	100%	-	APBD
2	10	01	02	23	Pemeliharaan Rutin / Berkala mobil jabatan.	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan.	Kab. Bulukumba	12 Bulan	30.000.000	APBD
2	10	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur.			15.000.000	
2	10	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan formal	Kab. Bulukumba	100%	15.000.000	APBD
2	10	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			47.160.000	
2	10	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan tersedianya LAKIP Diskominfo	Kab. Bulukumba	100%	14.600.000	APBD
2	10	01	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	Kab. Bulukumba	12 Bulan	-	APBD
2	10	01	06	04	Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	tersedianya pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Bulukumba	12 Bulan	-	APBD
2	10	01	06	05	Penyusunan Program Kerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Laporan Kerja SKPD	Kab. Bulukumba	12 Bulan	32.560.000	APBD
2	10	01	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah	Tersedianya data statistik sektoral Kabupaten			43.280.000	
2	10	01	15	01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Kab. Bulukumba	100%	30.000.000	APBD
2	10	01	15	02	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Kab. Bulukumba	100%	13.280.000	APBD
2	10	01	15	05	Penyusunan Profil Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kecamatan / Kelurahan	Kab. Bulukumba	100%	-	APBD
					Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Media Massa			20.000.000	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
					Pengelolaan administrasi Sistem Persandian	Tertibnya administrasi sistem persandian	Kab. Bulukumba	100%	20.000.000	APBD
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Terkelolanya Komunikasi Informasi			833.844.750	
2	10	01	20	01	Pemantauan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	Tersedianya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Kab. Bulukumba	12 Bulan	80.797.000	
2	10	01	20	02	Pengelolaan Informasi berbasis agenda prioritas pemerintah	Tersedianya Layanan Informasi melalui Media Elektronik Radio Lokal	Kab. Bulukumba	12 Bulan	-	DBHPR
2	10	01	20	03	Pelaksanaan Lembaga Media Komunikasi	Tersedianya Operasional Kegiatan Radio SPL FM	Kab. Bulukumba	12 Bulan	206.879.000	APBD
2	10	01	20	04	Fasilitasi dan Konsultasi bagi Pengelola Informasi Publik	Terbentuknya Forum Konsultasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan PPID	Kab. Bulukumba	100%	81.780.750	
2	10	01	20	05	Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Informasi Publik	Tersebaranya Informasi Publik melalui Media Massa	Kab. Bulukumba	100%	304.267.000	
2	10	01	20	06	Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik	Terfasilitasinya Pelaksanaan KIM	Kab. Bulukumba	12 Bulan	-	
2	10	01	20	07	Penyelenggaraan Mediasi dan Ajudikasi Non Litigasi	Tersedianya Operasional Komisi Informasi Kabupaten Bulukumba	Kab. Bulukumba	12 Bulan	160.121.000	
2	10	01	21		Program Pengembangan E-goverment	Terwujudnya pelayanan publik secara elektronik (e-government)			1.839.043.000	
2	10	01	21	01	Layanan nama domain dan sub domain bagi Lembaga Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tersedianya Nama Domain dan Sub Domain Daerah, Tersedianya aplikasi layanan publik dan keperintahan yang terintegrasi (Pembuatan aplikasi berbagi pakai)	Kab. Bulukumba	100%	238.421.000	APBD
2	10	01	21	06	Layanan Akses Internet dan Intranet Pemda	Tersedianya Jumlah fasilitas layanan akses inter dan intranet SKPD dan 10 Kec serta Hot Spot Area Publik, Tersedianya sarana dan prasarana telekomunikasi pemerintah daerah (telepon, ip-phone, e-mail, video conference, radio komunikasi)	Kab. Bulukumba	100%	1.085.710.000	APBD
2	10	01	21	02	Layanan Infrastruktur Data Center	tersedianya Data center dan Recovery Data Center yang terintegrasi	Kab. Bulukumba	100%	428.501.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	10	01	21	03	Layanan Keamanan Informasi E-Government	tersedianya data dan informasi Indek Keamanan Informasi dan terlaksananya Pengawasan dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi	Kab. Bulukumba	100%	86.411.000	APBD
2	10	01	21	04	Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemda	Tersedianya sarana dan prasarana telekomunikasi pemerintah daerah (telepon, ip-phone,e-mail,video conference, radio komunikasi)	Kab. Bulukumba	100%	-	
2	10	01	21	07	Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan	Tersedianya aplikasi layanan publik dan pemerintahan yang terintegrasi (Pembuatan aplikasi berbagi pakai)	Kab. Bulukumba	100%	-	APBD
2	10	01	21	08	Pengembangan Sumber Daya TIK dan SDM Pemda dan Masyarakat	Terlaksananya Bintek TIK dan Jasa Tenaga Ahli Teknologi Informatika	Kab. Bulukumba	100%	-	APBD
					Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) / dan USO	Terselenggaranya pendampingan KPU/USO di wilayah Kab. Bulukumba	Kab. Bulukumba	100%	-	APBD
					Sosialisasi dan Deseminasi Bidang E-Government	Terselenggaranya sosialisasi dan diseminasi Bidang E-Government	Kab. Bulukumba	100%	-	APBD
					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				1.973.023.300,00	
11	01	04	01		Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi			574.895.912	
11	01	04	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat.	Jasa pelayanan surat menyurat ; materai 6000 dan 3000	Bulukumba	12 bulan	2.499.000	APBD
11	01	04	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulukumba	12 bulan	51.636.000	APBD
11	01	04	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Pemeliharaan & Perizinan kendaraan Dinas Operasional; 2 unit kend roda 4 dan 6 unit kend roda 2	Bulukumba	8 unit	5.640.000	APBD
11	01	04	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Pelayanan Admistrasi keuangan; honor operator, arsipatoris, sopir	Bulukumba	12 bulan	170.844.000	APBD
11	01	04	01	08	penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan kantor	Bulukumba	12 bulan	24.000.000	APBD
11	01	04	01	21	Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Jasa Kesekretariatan Kantor; ATK, barang cetakan & penggandaan, makan minum tamu/rapat	Bulukumba	12 bulan	85.277.162	APBD
11	01	04	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulukumba	1 paket	16.552.500	APBD
11	01	04	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Bulukumba	1 paket	6.247.250	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
					penyediaan bahan bacaan dan aperaturan perundang undangan	Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Bulukumba	16 buku	2.200.000	APBD
11	01	04	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulukumba	12 bulan	210.000.000	APBD
11	01	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Bulukumba		158.830.000	APBD
11	01	04	02	05	pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	Bulukumba	2 unit	20.000.000	APBD
11	01	04	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bulukumba	1 paket	35.000.000	APBD
11	01	04	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bulukumba	1 paket	15.000.000	APBD
11	01	04	02	10	Pengadaan Meubeler Kantor	Tersedianya mebeleur Kantor	Bulukumba	2 paket	25.000.000	APBD
11	01	04	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bulukumba	1 paket	15.000.000	APBD
11	01	04	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya rutin/berkala Mobil Jabatan	Bulukumba	1 unit	20.000.000	APBD
					Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Bulukumba	7 unti	17.500.000	APBD
11	01	04	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Bulukumba	1 paket	7.700.000	APBD
11	01	04	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Bulukumba	8 unit	3.630.000	APBD
					Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor	Rehabilitasi sedaang/BeratGedung Kantor	Bulukumba	1 unit		APBD
11	01	04	06		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.		Bulukumba		33.896.000	APBD
2.1	2.1	01	06	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Bulukumba	50 orang	18.896.000	APBD
1	1									
2.1	2.1	01	06	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya BinteK implemtasi Peraturan Perundang-undangan	Bulukumba	4 orang	15.000.000	APBD
1	1									
11	1	3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur				-	
11	1	3	1		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi (finger print)	Bulukumba	1 unit		APBD
11	01	04	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			65.155.800	
11	01	04	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bulukumba	1 dokumen	9.699.800	APBD
11	01	04	06	02	penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	Bulukumba	1 dokumen	5.456.000	APBD
11	01	04	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Bulukumba	1 dokumen	5.000.000	APBD
11	01	04	06	05	Penyusunan Program Kerja SKPD	Tersusunnya Program Kerja dan Monev OPD	Bulukumba	1 dokumen	45.000.000	APBD
11	01	04	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif.	Terwujudnya Iklim UMKM yang kondusif			302.000.000	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
11	01	04	15	06	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan usaha kecil menengah	Tersedianya dokumen dan data sarana UMKM serta berkembangnya kelompok usaha masyarakat yang dibina	Bulukumba	1 Paket/10 Kecamatan	95.000.000	APBD
11	01	04	15	07	Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah (Kegiatan Yang Mendukung Program RPJMD, Penanggulangan Kemiskinan Daerah)	Terlaksananya Pembinaan dan Bantuan Hibah sarana dan Prasarana UMKM (Mesin Jahit, Alat Perbengkelan, Peralatan Pengantun, Peralatan Kerajinan Tangan, Alat Pertukangan)		5 kelompok	100.000.000	APBD
11	1	4	15	8	Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil menengah (Kegiatan yang mendukung program RPJMD, Penanggulangan kemiskinan Daerah)	Terlaksananya fasilitasi pengembangan unit usaha koperasi dan UMKM		540 koperas/UMKM	107.000.000	APBD
11	01	04	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				645.745.588	
11	01	04		05	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Terjalinya Kerjasama Sarana Promosi Hasil Produksi	Bulukumba	500 Usaha/Koperasi	75.745.588	APBD
11	01	04	16	03	Menfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM	Terlaksananya Kemitraan Antara Pemerintah Daerah, BUMN dan Pelaku Usaha UMKM	Bulukumba	2 angkatan	25.000.000	APBD
2	01	04	17	06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	Bulukumba	4 angkatan / 100 orang	128.000.000	APBD
11	01	04	16	07	Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi / KUD	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Meningkatnya Managemn Pengelola Koperasi / KUD	120 Orang	417.000.000	DAK
11	01	04	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif bagi UMKM			50.000.000	
11	01	04	17	4	koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM		Bulukumba	12 bulan		APBD
11	01	04	17	5	pemantauan pengolaan penggunaan data pemerintah bagi UKM	Terlaksananya koordinasi dan pemantauan Pengelolaan Penggunaan dana Pemerintah Bagi UMKM	Bulukumba	12 bulan	20.000.000	APBD
2	01	04	17	9	penyelenggaraan promosi produk UMKM	Keikutsertaan Promosi Produk UMKM	Bulukumba	1 Paket	30.000.000	APBD
11	01	04	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi			142.500.000	
11	01	04	18	1	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Terlaksananya Koord.Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Bulukumba	12 bulan	27.500.000	APBD
11	01	04	18	04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Terlaksananya Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	Bulukumba	100 orang	30.000.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
11	01	04	18	05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi	Bulukumba	286 koperasi	30.000.000	APBD
11	01	04	18	06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Terlaksananya pengembangan jaringan kerjasama koperasi dan terbangunnya pasar koperasi	Bulukumba	2 paket	25.000.000	APBD
					Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Bulukumba	12 Bulan		APBD
11	01	04	18	10	Pelaksanaan penilaian Kesehatan Koperasi	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	Bulukumba	15 Koperasi	30.000.000	APBD
2	12	01			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				1.660.910.100,00	
2	12	01	1		Program Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			453.697.100,00	
2	12	01	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat	Bulukumba	12 Bulan	-	APBD
2	12	01	1	2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi dan listrik selama 12 bulan	Bulukumba	12 Bulan	66.002.775,00	APBD
2	12	01	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya jasa Administrasi STNK Mobil dan Motor	Bulukumba	8 Unit	3.561.325,00	APBD
2	12	01	1	7	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan DPMPTSP Tahun 2021	Bulukumba	12 Bulan	85.460.000,00	APBD
2	12	01	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa tenaga pembersih ruang dan halaman kantor	Bulukumba	2 Orang	24.000.000,00	APBD
2	12	01	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen/bahan instalasi listrik DPMPTSP 2021	Bulukumba	4 Jenis	2.500.000,00	APBD
2	12	01	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran lokal serta buku peraturan perundang-undangan	Bulukumba		-	APBD
2	12	01	1	18	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	12 Bulan	180.773.000,00	APBD
2	12	01	1	21	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terlaksananya penatausahaan kesekretariatan SKPD	Bulukumba	12 Bulan	91.400.000,00	APBD
2	12	01	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur			206.841.500,00	APBD
2	12	01	2	4	Pengadaan Mobil Jabatan	Terlaksananya pengadaan Mobil Jabatan DPMPTSP	Bulukumba		-	APBD
2	12	01	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua dan Empat DPMPTSP	Bulukumba		-	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	12	01	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan DPMPTSP	Bulukumba	5 Buah	26.350.000,00	APBD
2	12	01	2	9	Pengadaan peralatan Gedung kantor	Tersedianya pengadaan peralatan DPMPTSP	Bulukumba	10 Unit	50.000.000,00	APBD
2	12	01	2	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya pengadaan Mebeleur DPMPTSP	Bulukumba	24 Buah	30.187.500,00	APBD
2	12	01	2	22	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	Bulukumba	12 Bulan	5.000.000,00	APBD
2	12	01	2	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Tersedianya pemeliharaan mobil jabatan roda empat	Bulukumba		-	APBD
2	12	01	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bulukumba	8 Unit	30.304.000,00	APBD
2	12	01	2	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya perbaikan perlengkapan kerja DPMPTSP	Bulukumba	10 Unit	5.000.000,00	APBD
2	12	01	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja DPMPTSP	Bulukumba	20 Unit	10.000.000,00	APBD
2	12	01	2	29	Pemeliharaan Rutin/ berkala meubeler	Tersedianya pemeliharaan mebeleur kantor	Bulukumba		-	APBD
2	12	01	2	32	Rehabilitasi sedang / berat gudung kantor	Terwujudnya Rehabilitasi Gedung Kantor	Bulukumba	1 Paket	50.000.000,00	APBD
2	12	01	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan pengembangan SDM			41.640.000,00	APBD
2	12	01	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai DPMPTSP yang mengikuti LATPIM III	Bulukumba	1 Orang	22.125.000,00	APBD
2	12	01	5	4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Ikut sertanya Aparat DPMPTSP dalam, Latpim , Bimtek, Sosialisasi dan Seminar	Bulukumba	7 Orang	19.515.000,00	APBD
2	12	01	6		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			41.080.500,00	APBD
2	12	01	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Lakip	Bulukumba	1 Dok	1.070.000,00	APBD
2	12	01	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Bulukumba	1 Dok	1.856.250,00	APBD
2	12	01	6	5	Penyusunan Program Kerja SKPD	Terlaksananya penyusunan RKA, RKAP, DPA, DPAP, Renja dan Restra	Bulukumba	5 Dok	38.154.250,00	APBD
2	12	01	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tersedianya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			95.247.000,00	APBD
2	12	01	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Ikut sertanya Dalam Pameran Kab, Prop, dan Nasinal serta Rapat Koordinasi	Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	2 Kegiatan	95.247.000,00	APBD
2	12	01	15	6	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Bulukumba		-	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
2	12	01	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Relisasi Investasi	Tersedianya Peningkatan Iklim Investasi dan Relisasi Investasi		431.755.000,00	APBD	
2	12	01	16	05	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Tersedianya Buku penyusunan informasi penanaman modal	Bulukumba	150 Buku	49.775.000,00	APBD
2	12	01	16	06	Peningkatan kapasitas sistem dan SDM dalam rangka pemanfaatan SIPID	Jumlah sistem iformasi berbasis website	Bulukumba		-	APBD
2	12	01	16	07	Temu Usaha	Jumlah kegiatan temu usaha	Bulukumba		-	APBD
2	12	01	16	08	Penyusunan mitra bisnis potensial Bulukumba	Jumlah buku mengenai data dan informasi mitra lokal bulukumba	Bulukumba		-	APBD
2	12	01	16	10	Pemantauan Perkembangan penanaman modal	Penyusunan buku LKPM dan CD tata cara pengisian LKPM	Bulukumba	2 Semester	25.772.000,00	APBD
2	12	01	16	11	Kajian pemetaan potensi daerah	Jumlah Buku Kajian	Bulukumba	100 Buku	39.650.000,00	APBD
2	12	01	16	12	Pengawasan ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya pengawasan Perusahaan PMA/PMDN sesuai ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Bulukumba	10 PMA/PMDN	23.902.000,00	APBD
2	12	01	16	13	Penyusunan peraturan bupati di bidang penanaman modal	Jumlah peraturan bupati tentang penanaman modal	Bulukumba	2 Peraturan	44.386.000,00	APBD
2	12	01	16	14	Penyediaan sarana dan prasarana promosi investasi	Jumlah paket sarana dan prasarana promosi pameran yang disiapkan	Bulukumba	1 Paket	25.815.000,00	APBD
2	12	01	16	15	Pembinaan Perusahaan penanaman modal	Terlaksananya Sosialisasi tata cara pengisian LKPM	Bulukumba	2 Kecamatan	222.455.000,00	APBD
2	12	01	18		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Perizinan			390.649.000,00	APBD
2	12	01	18	1	Sosialisasi dan penyuluhan pelayanan Perizinan	Meningkatnya pelayanan perizinan	Bulukumba	3 Kecamatan	36.098.000,00	APBD
2	12	01	18	2	Peningkatan koordinasi dan kerjasama Dibidang Perizinan	Memudahkan dan memberi kepastian pelayanan perizinan	Bulukumba	23 Perizinan	10.398.000,00	APBD
2	12	01	18	3	Penyederhanaa Prosedur dan Peningkatan Pelayanan Perizinan	1. Pelayanan penerbitan Perizinan 2. Pengendalian proses permohonan izin	Bulukumba	23 Jenis / 12 Bulan	280.585.000,00	APBD
2	12	01	18	4	Penyusunan Data Base Perizinan	Tersedianya buku data base Perizinan 2021	Bulukumba	1 Buku	21.183.000,00	APBD
2	12	01	18	5	Pengawasan dan Pengaduan Perizinan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengaduan Perizinan	Bulukumba	12 Bulan	42.385.000,00	APBD
2	13				DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			4.839.506.750,00		
2	13	01	01		Program Pelayanan Adimistrasi Perkantoran	lancarannya pelayamnan adminsitasi perkantoran			566.383.350,00	
2	13	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik	Bulukumba	12 Bulan	54.000.000	APBD
2	13	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bulukumba	7 Unit	4.000.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	13	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Tersedianya jasa Administrasi keuangan	Bulukumba	12 Bulan	100.000.000	APBD
2	13	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	tersedianya jasa kebersihan kantor	Bulukumba	12 Bulan	24.000.000	APBD
2	13	01	01	09	Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bulukumba	8 Unit	4.000.000	APBD
2	13	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Bulukumba	1 Paket	2.248.000	APBD
2	13	01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Bulukumba	1 Paket	6.406.250	APBD
2	13	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulukumba	12 Bulan	229.828.000	APBD
2	13	01	01	19	Penata usahaan kesertarian SKPD	terlaksananya penata usahaan kesertarian SKPD	Bulukumba	12 Bulan	141.901.100	APBD
2	13	01	02		Program peningkatan sarana dan sarana aparatur	peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.427.843.000,00	
2	13	01	02	05	pengadaan kendaraan dinas operasional	tersedianya kendaraan dinas operasional	Bulukumba	3 Unit	88.050.000	APBD
2	13	01	02	07	pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	Bulukumba	4 Unit	31.050.000	APBD
2	13	01	02	09	pengadaan peralatan gedung kantor	tersediannya peralatan gedung kantor	Bulukumba	3 Unit	39.931.000	APBD
2	13	01	02	10	pengadaan mebeleur	terlaksananya pengadaan mebeleur	Bulukumba	17 Unit	35.750.000	APBD
2	13	01	02	24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Bulukumba	7 Unit	11.912.000	APBD
2	13	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Bulukumba	1 Paket	6.200.000	APBD
2	13	01	02	42	Rehab Berat/Sedang Gedung Kantor	Terlaksananya rehab berat/sedang gedung kantor	Bulukumba	1 Paket	1.214.950.000	APBD
2	13	01	05		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			45.000.000,00	
2	13	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Diklat Pim III	Bulukumba	2 Orang	45.000.000	APBD
2	13	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan			135.000.000,00	
2	13	01	06	01	penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar dan realisasi kinerja SKPD	terlaksananya penyusunan LAKIP dispora	Bulukumba	1 Dokumen	5.000.000	APBD
2	13	01	06	04	penyusunan laporan akhir tahun	tersedianya laporan AKGIR tahun dispora	Bulukumba	1 Dokumen	5.000.000	APBD
2	13	01	06	05	penyusunan program kerja SKPD	tersedianya renja, revuisi restra dan RKA/DPASKPD	Bulukumba	10 Dokumen	125.000.000	APBD
2	13	01	15		Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	meningkatkan pengembangan dan keserasian dan kebijakan pemuda			50.000.000,00	
2	13	01	15	01	Pendataan Potensi Kepemudaan	Tersedianya Data Potensi Kepemudaan	Bulukumba	10 Kecamatan	50.000.000	APBD
2	13	01	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan	meningkatnya peran pemuda			833.750.000,00	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	13	02	16	01	pembinaan organisasi kepemudaan	Terlaksananya Jambore Pemuda	Bulukumba	1 OKP	55.000.000	APBD
2	13	03	16	06	Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah dikalangan Pemuda	Terlaksananya PIR dan KIR	Bulukumba	5 Orang	178.750.000	APBD
2	13	04	16	07	lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Terlaksananya kegiatan pembinaan pemuda pelopor	Bulukumba	5 Orang	50.000.000	APBD
2	13	04	16	08	Pameran prestasi hasil karya pemuda	Terlaksananya lelang karya pemuda	Bulukumba	1 Paket	75.000.000	APBD
2	13	05	16	10	pelatihan paskibraka	terlaksannaynya kegiatan PASKIBRAKA	Bulukumba	75 Orang	475.000.000	APBD
2	13	05	17		Program peningkatan upaya peningkatan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	meningkatnya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			30.000.000,00	
2	13	05	17	01	pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	terlaksananya penyuluhan tentang bahaya inklubasi wirausaha muda	Bulukumba	50 Orang	30.000.000	APBD
2	13	05	19		Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	meningkatkan kebijakan dan manajaemen olah raga			181.300.000,00	
2	13	05	19	01	peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	terlaksannaya pelaksanaan mutu cabang olahraga dan tenaga dan pelatihan olahraga	Bulukumba	10 Orang	66.300.000	APBD
2	13	05	19	02	Pengkajian Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Olahraga	Tersusunnya Peraturan Daerah (PERDA) Keolahragaan	Bulukumba	1 Paket	65.000.000	APBD
2	13	05	19	08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Dispora	Bulukumba	12 Bulan	50.000.000	APBD
2	13	05	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	meningkatnya pembinaan ndan pemasyarakatan olahraga			526.000.000,00	
2	13	05	20	03	Pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat	terbentuknya club olahraga binaan dispora	Bulukumba	2 klub	100.000.000	APBD
2	13	05	20	04	Lomba Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Terlaksananya pembinaan atlet usia dini	Bulukumbda dan Provinsi	150 Orang	116.000.000	APBD
2	13	05	20	05	peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Terlaksananya kegiatan Senam BBTT (Baik, Benar, Terukur dan Teratur)	Bulukumba	50 Orang	35.000.000	APBD
2	13	05	20	06	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terlaksananya Kejurda dan Kejurnas	Luar Daerah	15 Medali	200.000.000	APBD
2	13	05	20	08	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi	Terlaksananya pemberian apresiasi/penghargaan bagi insan olahraga berprestasi	Bulukumba	40 Orang	75.000.000	APBD
2	13	05	21		Program peningkatan sarana dan sarana olahraga	meningkatnya sarana dan prasarana olahraga			1.044.230.400,00	
2	13	05	21	02	peningkatan pemabngunan sarana dan prasarana olahraga	terlaksananya pemabngunan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Olahraga	Kec. Caile	1 paket	794.230.400	APBD
							Kec. Caile	1 paket	170.000.000	APBD
2	13	05	21	07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Olahraga (GOR dan Stadion Mini)	Bulukumba	2 Unit	80.000.000	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	17			DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN				1.032.671.850	
2	17	01	01	Program pelayanan administrasi perkantoran				371.245.450	
2	17	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	Bulukumba	12 Bulan	24.000.000	APBD/ DAU
2	17	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional	Bulukumba	9 unit	7.500.000	APBD/ DAU
2	17	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulukumba	12 Bulan	149.295.450	APBD/ DAU
2	17	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulukumba	2 Orang	24.000.000	APBD/ DAU
2	17	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Bulukumba	1 Paket	1.500.000	APBD/ DAU
2	17	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Luar Bulukumba	45 kali	124.950.000	APBD/ DAU
2	17	01	01	19	Penatausahaan kesekretariatan	Bulukumba	1 Tahun	40.000.000,00	APBD/ DAU
2	17	01	02	Program peningkatan sarana dan Prasarana aparatur				235.173.900,00	
2	17	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Bulukumba	6 unit	60.000.000,00	APBD/ DAU
2	17	01	02	10	Pengadaan mebeleur	Bulukumba	6 unit	20.161.200,00	APBD/ DAU
2	17	01	02	22	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Bulukumba	1 Paket	6.000.000,00	APBD/ DAU
2	17	01	02	24	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas/operasional	Bulukumba	4 Mobil	21.012.700,00	APBD/ DAU
							5 Motor		
2	17	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bulukumba	10 Unit	8.000.000,00	APBD/ DAU
2	17	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Bulukumba	1 Paket	120.000.000,00	APBD/ DAU
2	17	01	05	Program peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur				17.202.500,00	
2	17	01	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Bulukumba	2 Orang	17.202.500,00	APBD/ DAU

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
2	17	01	06		Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan			50.000.000,00		
2	17	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja skpd	Tertibnya pelaporan evaluasi Renstra SKPD	Bulukumba	1 Dokumen	5.000.000,00	APBD/ DAU
2	17	01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tertibnya administrasi keuangan	Bulukumba	1 Dokumen	5.000.000,00	APBD/ DAU
2	17	01	06	05	Penyusunan program kerja skpd	Terwujudnya perencanaan DPK dan mengetahui perkembangan realisasi kegiatan Kecamatan	Bulukumba	7 Dokumen	40.000.000,00	APBD/ DAU
2	17	01	15		Program pengembangan budaya baca Dan pembinaan perpustakaan			232.050.000,00		
2	17	01	15	01	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan	Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan perpustakaan	Bulukumba	1 Paket	8.500.000,00	APBD/ DAU
2	17	01	15	02	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Bulukumba	1 Paket	35.550.000,00	APBD/ DAU
2	17	01	15	03	Bimbingan teknis Pengelola Perpustakaan Desa dan Kantor	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman aparat Tentang pengelolaan perpustakaan	Bulukumba	10 kec.	25.000.000,00	APBD/ DAU
2	17	01	15	04	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengelolaan Dan penyimpanan buku	Terpenuhinya kebuuhan sarana pengolahan dan penyimpanan buku	Bulukumba	1 Paket	13.000.000,00	APBD/ DAU
2	17	01	15	05	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan Sekolah dan perpustakaan masyarakat	Meningkatkan pembinaan dan lomba minat baca perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat	Bulukumba	1 Tahun	70.000.000,00	APBD/ DAU
2	17	01	15	06	Publikasi minat dan budaya baca	Meningkatkan minat baca masyarakat	Bulukumba	1 Tahun	80.000.000,00	APBD/ DAU
2	17	01	23		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			10.000.000,00		
2	17	01	23	02	Penyusunan sistem informasi teknologi terhadap layanan publik	terciptanya layanan otomasi dan pengembangan jaringan informasi perpustakaan	Bulukumba	1 Tahun	10.000.000,00	APBD/ DAU
2	17	01	16		Program penyelamatan dan pelestarian Dokumen/arsip daerah			25.000.000,00		
2	17	01	16	03	Penduplikasian dokumen arsip/daerah Dalam bentuk informatika	Terlaksananya penyelamatan penelusuran dan pelestarian arsip daerah	Bulukumba	1 Dokumen	25.000.000,00	APBD/ DAU
2	17	01	19		Program pengembangan dan Pengawasan kearsipan			72.000.000,00		
2	17	01	19	01	Pembinaan kearsipan opd dan pengembangan pemerintah daerah.	Terwujudnya penyusunan arsip OPD dalam penyelenggaraan perpustakaan dIdaerah	Bulukumba	40 orang	22.000.000,00	APBD/ DAU

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
2	17	01	19	02	Penyusunan regulasi/pembinaan kearsipan	Terciptanya regulasi /pedoman tentang JRA dan sistem klasifikasi keamanan arsip	Bulukumba	1 Draf 2 Dokumen	20.000.000,00	APBD/ DAU
2	17	01	16	03	Sosialisasi kearsipann	Terwujudnya kegiatan penyebaran informasi tentang regukasi kearsipan	Bulukumba	60 Orang	30.000.000,00	APBD/ DAU
2	17	01	20		Program pengembangan dan pengawasan arsp vital				20.000.000,00	
2	17	01	20	01	Identifikasi arsip vital	Terwujudnya pendataan dan penataan arsip yang memenuhi kriteria sebagai arsip vital	Bulukumba	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD/ DAU
3	01	01			DINAS PERIKANAN				5.560.213.500,00	
3	01	01	01		Program Administrasi Perkantoran	Lancarnya administrasi perkantoran			682.566.000	
3	01	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa telepon dan listrik	Bulukumba	12 Bulan	238.866.000	DAU
3	01	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan operasional	Bulukumba	35 Unit	9.300.000	DAU
3	01	01	01	07	Penyediaan jasa adminstrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Bulukumba	12 Bulan	49.700.000	DAU
3	01	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Bulukumba	12 Bulan	28.400.000	DAU
3	01	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulukumba	1 Paket	3.000.000	DAU
3	01	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Bulukumba	3 Koran	3.300.000	DAU
3	01	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk rapat koordinasi dan konsultasi	Bulukumba	12 Bulan	250.000.000	DAU
3	01	01	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Tersedianya ATK,Cetak,Penggandaan, Makan minum rapat dan jasa kolektor	Bulukumba	12 Bulan	100.000.000	DAU
3	01	01	02		Program Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas			151.245.000	
3	01	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Bulukumba	2 Unit	11.500.000	DAU
3	01	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Bulukumba	2 Unit	16.000.000	DAU
3	01	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeuler	Bulukumba	5 Unit	9.375.000	DAU
3	01	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bulukumba	1 Paket	7.500.000	DAU
3	01	01	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Bulukumba	1 Unit	-	DAU
3	01	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bulukumba	5 Unit	100.000.000	DAU

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
3	01	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bulukumba	10 Unit	5.000.000	DAU
3	01	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bulukumba	5 Unit	1.870.000	DAU
3	01	01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terehabetasinya gedung kantor	Bulukumba		-	DAU
3	01	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Meningkatnya kualitas SDM aparatur dinas			36.554.000	
3	01	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal			1 Orang	36.554.000	DAU
3	01	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kesesuaian laporan keuangan dan realisasi			42.360.000	
3	01	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bulukumba	1 Dokumen	5.000.000	DAU
3	01	01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bulukumba	1 Dokumen	5.000.000	DAU
3	01	01	06	05	Penyusunan program kerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan program kerja SKPD	Bulukumba	2 Dokumen	12.360.000	DAU
3	01	01	06	07	Monitoring, Evaluasi,Program Kegiatan SKPD	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi,Program Kegiatan SKPD	Bulukumba	4 Kuartal	20.000.000	DAU
3	01	01	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi budidaya perikanan Budidaya			995.000.000	
3	01	01	20	03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Terlaksananya operasional Balai Benih Ikan	Bulukumba	12 Bulan	40.000.000	DAU
						Rehabilitasi Balai Benih Ikan/Pasar Benih Ikan	Kec. Rilau Ale	1 Paket	115.000.000	DAU
3	01	01	20	04	Pengelolaan Kawasan Budidaya Air Payau	Tersedianya jembatan penghubung tambak	Bulukumba	1 Unit	55.000.000	DAU
						Rehabilitasi jembatan penghubung tambak	Bulukumba		-	DAU
3	01	01	20	05	Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Payau	Tersedianya saprodi Tambak percontohan	Bulukumba	1 Paket	25.000.000	DAU
3	01	01	20	06	Pengelolaan Kawasan Budidaya Air Tawar	Terlaksananya pemantauan kesehatan dan penyakit ikan Pelatihan	Bulukumba	6 Kali	15.000.000	DAU
3	01	01	20	07	Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Tawar	Terlaksananya pelatihan budidaya air tawar	Bulukumba	6 Kali	15.000.000	DAU
3	01	01	20	08	Peningkatan Sapra Kawasan Budidaya Air Payau	Rehab saluran Irigasi Tambak	Babana Dannuang,Kajang	1 paket	100.000.000	DAU
						Tersedianya Bangsal Kerja Rumput Laut	Mariorenu, Matekko, Salemba	1 Unit	80.000.000	DAU

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
3	01	01	20	09	Pembinaan Kawasan Budidaya Air Payau	Terlaksananya DIKLAT Pengelolaan & Perlindungan kawasan budidaya	Tanahtoa Kajang	6 Kali	15.000.000	DAU
						Terlaksananya pemantauan kesehatan dan penyakit ikan	Bulukumba	6 Kali	15.000.000	DAU
3	01	01	20	10	Peningkatan Sapra Budidaya Air Payau	Tersedianya bantuan pakan	Dusun Kapasa Salemba	5.000 Kg	30.000.000	DAU
						Tersedianya bibit udang (Benur)	(Lembang Salemba, Manyampa, Garanta), (Pantama, Lembanna), Ukke'e Taccorong	100.000 Ekor	10.000.000	DAU
						Tersedianya bibit bandeng (Nener)	(Ukke'e Taccorong, Palambara), (Pantama, Lembbanna), (Lembang Salemba, Manyampa)	100.000 Ekor	25.000.000	DAU
						Tersedianya saprodi rumput laut	Kasimpurang, Kalumeme, (Mariorennu, Matekko), (Kapasa Salemba, Babana, Paranyelling Babana Dannuang, Luppung Manyampa)	1 Paket	75.000.000	DAU
						Tersedianya perahu pengangkut rumput laut	Ujung Loe, Ujung Bulu	10 Unit	180.000.000	DAU
						Pengadaan pintu saluran air	Lembanna	5 Paket	-	DAU
						Pengadaan Hand Tractor Mini untuk Tambak	Bulukumba	2 Paket	-	DAU
						Mesin Pompa air untuk tambak	Mariorennu	3 Unit	-	DAU
3	01	01	20	11	Pembinaan SDM Pembudidaya & Aparatur Budidaya Air Payau	Terlaksananya Pelatihan Budidaya air payau dan Laut Budidaya Perikanan	Bulukumba	7 Paket	25.000.000	DAU
						Pelatihan Budidaya penangkapan dan pengolahan hasil perikanan	Lingk. Ela-Ela, Kalumeme			

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
3	01	01	20	12	Peningkatan Sapra Kawasan Budidaya Air Tawar	Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	Desa Anrang, Desa Pangalloang, Desa Bajiminasa, Desa Salassae, Lingk.Durian Tanuntung, Ulugalung Lonrong, Bululohe, Karassing, Bonto Biraeng, Bonto rannu,Lamantang , Bulo,Lembang Kajang, Borong Rappoa, BontoBangun, Tamatoa.,Lembanna kajang	1 Unit	75.000.000	DAU
						Pengadaan Mesin Pakan Ikan	Bulo-Bulo Kec. Bulukumpa		-	DAU
3	01	01	20	13	Pembinaan Kawasan Budidaya Air Tawar	Terlaksananya DIKLAT Pengelolaan & Perlindungan kawasan budidaya Air tawar	Bulukumba	6 Kali	15.000.000	DAU
3	01	01	20	14	Peningkatan Sapra Budidaya Air Tawar	Tersedianya bibit Ikan Nila	Desa Anrang, Bonto Mate'ne,Dusun Pamanggolo Benteng Malewang, Dusun Kulepang, Bontorannu, Bonto Biraeng, Lembanna, Kahayya, Borong Rappoa, Kindang	10.000 Ekor	10.000.000	DAU
						Tersedianya Ikan Mas	Bonto Mate'ne, Bontonyeleng, Manyampa, Bontorannu Kajang, Benjala	10.000 Ekor	5.000.000	DAU
						Tersedianya Ikan Lele	Garanta,Bonto Mate'ne, Bonto Mangiring, Ukke'e Taccorong, Kirasa Palambarae, Bululohe, Batunihulang, Lembang Lohe	10.000 Ekor	5.000.000	DAU

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
						Tersedianya Ikan Bawal	Dusun Malewang Benteng Malewang		-	
						Tersedianya Ikan Patin	Ompoa Gantarang, Benteng Malewang, Bonto Mangiring		-	
						Tersedianya Indukan Lele	Bulukumba, Kindang	10.000 Ekor	50.000.000	DAU
3	01	01	20	15	Pembinaan SDM & Aparatur Budidaya Air Tawar	Terlaksananya pelatihan Budidaya Perikanan Air Tawar	Bulukumba	6 Kali	15.000.000	DAU
3	01	01	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi tangkapan ikan			3.059.738.500	
3	01	01	21	01	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Tersedianya < 3 GT				
						Perahu Fiber 0,8 Gt	Mariorenu	20 Unit	350.000.000	DAK
						Perahu Papan (Jonson) 1,5 GT	Bulukumba	10 Unit	250.000.000	DAK
						Perahu Sampan Kayu 1 GT	Bulukumba	10 Unit	190.000.000	DAK
						Tersedianya alat tangkap ramah lingkungan (jaring insang)	Laikang	20 Unit	70.000.000	DAK
						Tersedianya alat bantu penangkapan (Fish Finder)	Bulukumba	20 Unit	100.000.000	DAK
						Percontohan Budidaya Udang Tradisional	Bulukumba	3 Paket	165.000.000	DAK
						Percontohan Nila di Kolam/Tambak	Bulukumba	3 Paket	165.000.000	DAK
						Percontohan Budidaya Ikan Hias	Bulukumba	1 Paket	33.000.000	DAK
						Percontohan Budidaya Patin di Kolam	Bulukumba	2 Paket	110.000.000	DAK
						Percontohan Budidaya Ikan Nila/Udang Galah dengan adi (MINAPADI)	Bulukumba	2 Paket	66.000.000	DAK
						Percontohan Budidaya Lele di kolam	Bulukumba	2 Paket	110.000.000	DAK
						Pengembangan Jalan Produksi	Babana Dannuang, Luppung Manyampa	500 Meter	150.000.000	DAK
						Pembangunan PITAP (Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif)	Bulukumba	500 Meter	150.000.000	DAK

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
						Jasa konsultan perencana		1 Paket	44.000.000	DAK
						Jasa konsultan pengawas		1 Paket	49.000.000	DAK
						BOP DAK		1 Paket	162.988.500	DAK
3	01	01	21	03	Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan	Terehabnya TPI	Bulukumba		-	DAU
3	01	01	21	05	Pengembangan lembaga usaha perikanan Tangkap	Terlaksananya sosialisasi fishing ground	Bulukumba	5 Kali	-	DAU
3	01	01	21	06	Pengembangan Minapolitan	Pengelolaan TPI	Bulukumba	1 Paket	50.000.000	DAU
						Pembangunan tambatan Perahu di sungai Bialo	Kasimpurang	1 Paket		
						Pembangunan TPI Bontokamase	Bonto Kamase Herlang		-	
3	01	01	21	07	Pendampingan Asuransi Nelayan & Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (SEHAT)	Sosialisasi asuransi nelayan & SEHAT	Bulukumba	2 kali	15.000.000	DAU
						Pelatihan Kelompok Nelayan	Ela-Ela,Kalumeme	3 kali	15.000.000	DAU
3	01	01	21	08	Pengembangan Sapra Nelayan Kecil	Tersedianya tali rumpon	Bonto Tiro, Herlang, Kajang	330 Roll	123.750.000	DAU
						Tersedianya perahu sampan 1 GT	Kasimpureng, Dannuang, Pantama		-	DAU
						Pengadaan Kapal penangkap ikan 3 Gt	Tanahberu, Desa Salemba	1 Unit	-	DAU
						Pengadaan Mesin Tempel	Kaluku Lohe Kajang	2 Unit	-	DAU
						Perahu Katinting	Bonto Tiro, Herlang, Kajang	6 Unit	-	DAU
						Pengadaan Purse Seine	Alorang, Lembanna, Tanahberu, Kasimpureng, Bonto Kamase	1 Paket	150.000.000	DAU
						Pengadaan Perahu Fiber	Bonto Tiro, Herlang, Kajang	10 Unit	190.000.000	DAU
						Pengadaan Kapal/Perahu 5 GT	Bonto Tiro, Herlang, Kajang	1 Unit	200.000.000	DAU

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
					Pengadaan Jaring Insang/Gill Net (Lanra)	Alorang,Kasimpureng, Mariorenu, Paranyelling Dannuang, Pantama, Desa Darubiah, Lembanna, Bira	6 Paket	125.000.000	DAU	
					Pengadaan mesin kapal	Alorang Tanuntung	1 Unit	26.000.000	DAU	
					Pengadaan alat tangkap sero	Bulukumba		-	DAU	
					Rehabilitasi pondok wisata (rumah peristirahatan nelayan)	Bulukumba		-	DAU	
					GPS (Alat Bantu)	Alorang Tanuntung		-	DAU	
3	01	01	24		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Tersedianya dokumen kajian kawasan dan supervisi serta monitoring pengembangan bidang kelautan dan perikanan		219.000.000		
3	01	01	24	01	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Tersedianya sarana olah data statistik 1 Paket	Bulukumba	1 Dokumen	44.000.000	DAU
					Penyusunan Naskah Akademik Perda Izin Usaha Daerah	Bulukumba	1 Dokumen	75.000.000	DAU	
					Penyusunan Dokumen UKL/UPL Pembangunan TPI Bonto Kamase Herlang	Bulukumba	1 Dokumen	100.000.000	DAU	
3	01	01	25		Program Pengembangan Usaha dan Kelembagaan	Tersedianya dokumen kajian kawasan dan supervisi serta monitoring pengembangan bidang kelautan dan perikanan		373.750.000		
3	01	01	25	01	Pembinaan kelembagaan, Akses IPTEK dan Informasi	Terlaksananya pembinaan kelompok usaha perikanan & Penguatan kelembagaan	Bulukumba	1 Kali	50.000.000	DAU
					Pelatihan pengolahan ikan wanita pesisir & penyediaan alat peraga pengolahan	Sapolohe, Doajang, Pattinoang Tanuntung	3 Kali	30.000.000	DAU	
3	01	01	25	02	Pembinaan Perizinan & Kemitraan Usaha	Terlaksanan pertemuan usaha	Bulukumba	1 Paket	20.000.000	DAU
					Expose hasil pembangunan perikanan	Bulukumba	1 Paket	20.000.000	DAU	
3	01	01	25	03	Pengembangan Sapra usaha Perikanan	Pengadaan Cold Box	Alorang, Paranyelling Dannuang	10 Unit	13.750.000	DAU
					Pengadaan Rumah Produksi Nelayan	Bulukumba	1 Unit	-	DAU	
					Rehabilitasi Sentra Kulner	Bulukumba	1 paket	200.000.000	DAU	
					Penghancur Es	Bulukumba	2 Unit	-	DAU	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
						Pengadaan Keranjang(Basket)	Bulukumba	50 Unit	-	DAU
						Penyediaan saran penjemuran rumput laut (para-para)	Bulukumba	1 Unit	40.000.000	DAU
1	17				DINAS PARIWISATA				7.941.156.600,00	
1	17	01	01		Program pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya Pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, dan akuntabel				
1	17	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Telepon/internet, air, dan listrik siap pakai	Kantor	12 bulan	125.000.000	DAU
1	17	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS, pengamanan	Kantor	12 bulan	62.000.000	DAU
1	17	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor yang bersih dan indah	Kantor	12 bulan	32.000.000	DAU
1	17	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Komponen instalasi listrik yang memenuhi standar	Kantor	12 bulan	25.000.000	DAU
1	17	01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan masak dan makan	Kantor	12 bulan	27.000.000	DAU
1	17	01	01	18	Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Perjalanan dinas luar daerah untuk rapat koordinasi dan konsultasi	Makassar, Jakarta	12 bulan	350.000.000	DAU
1	17	01	01	21	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tatausaha sekretariat yang profesional	Kantor	12 bulan	290.000.000	DAU
1	17	01	01		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sarana dan prasarana aparatur yang siap pakai				
					Pembangunan gedung kantor					
1	17	01	01	08	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan mobil pariwisata dan motor operasional pariwisata	Kantor	2 unit	300.000.000	DAU
1	17	01	01	09		Pengadaan traktor sampah pantai	Kantor	1 unit	180.000.000	DAU
1	17	01	01	10	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya laptop, printer, TV, AC, dan Kompresor	Kantor	26 unit	85.000.000	DAU
1	17	01	01	22	Pengadaan meubeleir	Tersedianya meja dan kursi pegawai, dan meubeleir Mess milik Pemda	Kantor	6 unit	20.000.000	DAU
1	17	01	01	24	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kantor	1 paket	25.000.000	DAU
1	17	01	01		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kantor	10 unit	17.000.000	DAU
1	17	01	01		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Kantor	29 unit	20.000.000	DAU
1	17	01	01		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi berat atap kantor	Kantor	1 paket	150.000.000	DAU
1	17	01			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur yang profesional				
					KEGIATAN :					

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	17	01		Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa, perencanaan, pariwisata, dan keuangan, serta Latpim	Dalam dan luar daerah	4 orang	45.000.000	DAU
1	17	01		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan yang akurat				
1	17	01		Penyusunan Program Kerja SKPD	perencanaan program kegiatan SKPD, RKA-RKAP, DPA-DPPA, SAKIP, RENJA SIPD, LPPD e-planning, DAK, Musrenbang, Laporan Rutin, Realisasi Fisik Keuangan	kantor	12 bulan	50.000.000	DAU
1	17	01		Monitoring Evaluasi Program Kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring dan pelaporan program kegiatan, pelaporan program kegiatan SKPD,	kantor	12 bulan	50.000.000	DAU
1	17	01		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dikenalnya kepariwisataan Bulukumba pada tingkat regional, nasional, dan internasional				
				KEGIATAN :					
1	17	01		Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Terlaksananya pameran pariwisata dan Penyebarluasan informasi via media cetak dan elektronik	Kantor	2 paket	150.000.000	DAU
1	17	01		Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Festival Pinisi 12th Tahun 2021	Bulukumba	1 paket	700.000.000	DAU
					Festival Dato Tiro 6th Tahun 2021	Bulukumba	1 paket	120.000.000	DAU
					Bira Run 5th 2021	Bulukumba	1 paket	190.000.000	DAU
					Tourism trail adventure III 2020	Bulukumba	1 paket	75.000.000	DAU
					Jelajah hutan karet 5th 2021	Bulukumba	1 paket	60.000.000	DAU
					Pesta Rakyat	Bulukumba	1 paket	150.000.000	DAU
					Ritual Songkabala Ri Bantilang 2020	Bulukumba	1 paket	65.000.000	DAU
					Pinisi Expo 2021	Bulukumba	1 paket	89.000.000	DAU
					Pementasan seni 2021	Bulukumba	1 paket	34.000.000	DAU
					Festival kuliner 2021	Bulukumba	1 paket	36.000.000	DAU
					Gowes wisata alam 3rd 2021 (tour de Bira)	Bulukumba	1 paket	150.000.000	DAU
					Gowes hutan karet 2nd 2021	Bulukumba	1 paket	50.000.000	DAU
1	17	01		Program: Pembangunan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya dan prasarana pariwisata sebagai upaya peningkatan arus kunjungan wisatawan, serta kesejahteraan masyarakat				
				KEGIATAN :					

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	17	01		Pengembangan Obyek pariwisata Unggulan	Pemeliharaan keindahan dan kebersihan Kawasan obyek wisata Bira dan Bontotiro	Bira dan Bt.tiro	1 paket	250.000.000	DAU
1	17	01		Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata	Terbangunnya sarana dan prasarana dalam kawasan pariwisata	Kawasan wisata Bira	1 paket	1.614.156.600	DAU /DAK
1	17	01		Pengembangan daerah tujuan wisata	Penyusunan amdal kawasan wisata Kahayya	Desa Bira Bt.Bahari	1 paket	250.000.000	DAU
					Penyusunan master plan Pantai Mandala Ria/ Batu Tungkarayya	Desa Ara Kec. Bontobahari	1 paket	250.000.000	DAU
					Penyusunan master plan Pantai Lemo-Lemo	Kel. Tana Lemo Kec. Bontobahari	1 paket	250.000.000	DAU
1	17	01		Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Bimtek kepariwisataan bagi industri kuliner	5 Kecamatan	1 paket	40.000.000	DAU
					pendataan usaha dan jasa pariwisata bidang akomodasi dan kuliner	5 Kecamatan	1 paket	25.000.000	DAU
					Sosialisasi jasa usaha pariwisata bidang transportasi	5 Kecamatan	1 paket	40.000.000	DAU
1	17	01		Program : Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata				
				KEGIATAN :					
1	17	01		Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Penguatan informasi dan database pariwisata	Kantor	1 paket	190.000.000	DAU
1	17	01		Pengembangan SDM dibidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerja sama dengan lembaga lainnya	Pemilihan Dara dan Daeng Bulukumba, Pemilihan putri pariwisata	Bulukumba	1 kali	100.000.000	DAU
1	17	01		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Pembentukan dan sosialisasi kelompok sadar wisata	Bulukumba	1 kali	50.000.000	DAU /DAK
1	17	01			Pelatihan Videografi, karya tulis, Fotografi Kepariwisataaan	Bulukumba	1 kali	100.000.000	DAU /DAK
1	17	01		Pelayanan Kepariwisataaan (DAK Non Fisik)	Pelatihan pemandu wisata	Kawasan wisata	1 kali	1.000.000.000	DAU /DAK
1	17	01		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (1.20.1.17.01.17)					
1	17	01		Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Meningkatnya capaian target PAD dari obyek wisata	Obyek wisata sumber PAD	120 kali	60.000.000	DAU

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
3	03	01		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				6.814.211.000,00		
3	03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik			497.000.000,00		
3	03	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	Terlaksananya jasa komunikasi, air dan listrik	Kabupaten Bulukumba	1 Tahun	72.000.000	APBD
3	03	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas.Operasional	Perpanjangan STNK dan KIR Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	Kabupaten Bulukumba	185 Unit	35.000.000	APBD
3	03	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan dan Laporan Keuangan	Kabupaten Bulukumba	1 Tahun	77.000.000	APBD
3	03	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan	Kabupaten Bulukumba	2 Orang	24.000.000	APBD
3	03	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik	Kabupaten Bulukumba	1 Paket	3.000.000	APBD
3	03	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Pelayanan Kebersihan kantor	Kabupaten Bulukumba	1 Paket	6.000.000	APBD
3	03	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bulukumba	1 Tahun	175.000.000	APBD
3	03	01	01	21	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Kabupaten Bulukumba	1 Tahun	105.000.000	APBD
3	03	01	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi yaitu :			893.226.000	
3	03	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas /Operasional Roda 2 dan Roda 4	Kabupaten Bulukumba		380.000.000	APBD
						Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Roda 4		1 Unit		
3	03	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Bulukumba		48.000.000	APBD
						Pengadaan Kamera CCTV				
						Pengadaan Intercom				
						Pengadaan AC		1 Unit		
						Pengadaan Kipas Angin		4 Unit		
3	03	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Bulukumba		68.915.000	APBD
						Pengadaan mesin ketik listrik		1 Unit		
						Pengadaan Laptop		5 Unit		
						Pengadaan Printer		5 Unit		

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
3	03	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	Kabupaten Bulukumba		20.000.000	APBD
						Pengadaan Filling Kabinet/lemari arsip		4 Unit		
3	03	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kabupaten Bulukumba	1 Paket	23.000.000	APBD
3	03	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Mobil Jabatan Kepala Dinas	Kabupaten Bulukumba	1 Unit	15.000.000	APBD
3	03	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kabupaten Bulukumba	4 Unit	31.500.000	APBD
3	03	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Bulukumba	8 Unit	4.000.000	APBD
3	03	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Bulukumba	10 Unit	5.000.000	APBD
3	03	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	Kabupaten Bulukumba	1 Paket	297.811.000	APBD
3	03	01	05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur sipil negara			60.000.000	
3	03	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terwujudnya Pegawai yang terampil dan Siap Pakai	Kabupaten Bulukumba	2 Orang	60.000.000	APBD
3	03	01	06		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan OPD TPHP			14.525.000	
3	03	01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terpenuhinya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Akhir Tahun	Kabupaten Bulukumba	1 Tahun	3.500.000	APBD
3	03	01	06	05	Penyusunan Program Kerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Renja, Renstra, RKA, dan DPA OPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bulukumba	Kabupaten Bulukumba	4 Dokumen	11.025.000	APBD
3	03	01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan petani, pelaku agribisnis dan lembaga tani			91.900.000	
3	03	01	15	01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terlaksananya pembinaan/pelatihan dan Pelaku Agribisnis	10 Kecamatan	10 Angkatan	15.000.000	APBD
3	03	01	15	03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Terlaksananya pembinaan gapoktan	10 Kecamatan	3 Kali	76.900.000	APBD
						Terlaksananya Revitalisasi kelembagaan petani	BPP 10 Kecamatan	50 Kelompok		
						Terlaksananya musyawarah mattirolaong ruma di tingkat Kecamatan	BPP 10 Kecamatan	10 Kecamatan		

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
3	03	01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian	Meningkatnya Produksi, Produktifitas Tanaman pangan hortikultura dan perkebunan			3.988.560.000		
3	03	01	16	02	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	Terpenuhinya Data lahan Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	25.012.000	APBD
3	03	01	16	12	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Meningkatnya keterampilan petani dalam pengolahan dan pasca panen	1 Kecamatan	1 Unit	75.000.000	APBD
						Terlaksananya kegiatan studi banding di sentra pengolahan hasil tanaman pangan	Luar Daerah	1 Kali		
3	03	01	16	15	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Meningkatnya jumlah lahan pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija			160.000.000	APBD
						Pengembangan Demplot Jagung hibrida	5 Kecamatan	25 Ha		
						Tersedianya areal pengembangan Varietas Unggul Baru (VUB)				
						Demplot uji varietas padi toleran terhadap salinitas	1 Kecamatan	3 Ha		
						Terbentuknya kawasan sentra produksi jagung	6 Kecamatan	10 Kelompok		
3	03	01	16	17	Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering	Meningkatnya jumlah lahan kering yang mengembangkan tanaman hortikultura	Kajang dan Bulukumpa		100.000.000	APBD
						Pengadaan bibit manggis		5 Ha		
						Pengadaan bibit durian		5 Ha		
						pengadaan bibit mangga		2 Ha		
3	03	01	16	20	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan bibit unggul kacang tanah	3 Kecamatan	3 Penangkar	90.000.000	APBD
						Tersedianya pestisida untuk pengendalian hama	10 Kecamatan	1 Tahun	15.000.000	
3	03	01	16	21	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Terpenuhinya Informasi Harga Pasar ditingkat Petani dan Pengecer	Kabupaten Bulukumba	1 Paket	20.000.000	APBD
						Pengadaan aplikasi harga pasar				
3	03	01	16	22	Peningkatan Mutu Keamanan Pangan	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida	10 Kecamatan	1 Tahun	55.000.000	APBD
						Terlaksananya pertemuan/sosialisasi asuransi usaha tani padi (AUTP)	10 Kecamatan	250 Orang		

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
3	03	01	16	24	Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan	Terlaksananya Pembangunan/Rehab.irigasi tersier, Pengembangan/Perbaikan Sumber-sumber Air (Irigasi Air Tanah Dalam/Dangkal), Embung,Dam parit, Long storage, Pompanisasi, bendung kecil), Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi Pertanian	10 Kecamatan			DAU /DAK
						Pembangunan Irigasi Tersier/Tanah dalam		2 Paket	361.000.000	DAK
						Rehabilitasi/Pembangunan Embung		3 Unit	342.000.000	DAK
						Pengadaan Sumur Dangkal/Dalam		2 Unit	180.000.000	DAU
						Pembangunan DAM parit		3 Unit	342.000.000	DAK
						Pembangunan Jalan Usaha Tani/JP		500 Meter	175.000.000	DAK
						Rehabilitasi/Pembangunan BPP		4 Paket	997.500.000	DAK
						Pengadaan Sarana BPP		4 Paket	651.500.000	DAK
						Pengadaan Pompanisasi		0 Paket	-	DAU
						Perencanaan dan pengawasan, panitia		1 Paket	151.000.000	DAK
3	03	01	16	29	Peningkatan Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk Pertanian	Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian	Kec. Bulukumpa, Kindang, Rialu Ale, Gantarang	2 Komoditi	60.000.000	APBD
						Intensifikasi tanaman lada		1 Ha		
						Intensifikasi tanaman cengkeh		1 Ha		
3	03	01	16	31	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monev dan Pelaporan Program/kegiatan Pembangunan Pertanian	10 Kecamatan	1 Tahun	35.038.000	APBD
						Pertemuan Monev dan Pelaporan Program/Kegiatan				
						Pengendalian SPIP				
						Pengamanan Aset Daerah				
						Survey CPCL Kegiatan				
3	03	01	16	32	Pengumpulan dan Pengelolaan Statistik Pertanian	Tersedianya Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kabupaten Bulukumba	1 Tahun	12.510.000	APBD
						Tersedianya Sinkronisasi Data dan Kesamaan Persepsi antara Petugas Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat dalam Pengolahan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.		2 Kali		

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
						Tersedianya Angka Ramalan, Angka Sementara dan Angka Tetap Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		3 Laporan		
3	03	01	16	33	Pengembangan Teknologi Budidaya Kacang-kacangan dan umbian	Meningkatnya produksi tanaman komoditi aneka kacang dan umbi	9 Kecamatan	9 Kelompok	75.000.000	APBD
						Pengadaan benih/bibit kacang tanah, kacang hijau		250 Kg		
						Kacang tanah bersertifikat		1200 Kg		
3	03	01	16	36	Pengembangan Tanaman Biofarmaka	Terlaksananya pengembangan tanaman jahe	Kec. Bonto Tiro, Gantarang, Kindang	2 Ha	66.000.000	APBD
						Pengadaan benih pupuk organik NPK				
3	03	01	17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian TPH	Terciptanya Kemitraan Usaha dengan Pihak Ketiga			100.000.000	
3	03	01	17	07	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah	Terlaksananya pameran hasil pertanian unggulan daerah	Bulukumba		100.000.000	APBD
						Pameran hari jadi Kab. Bulukumba		1 Kali		
						Pameran Phinisi Expo		1 Kali		
						Terlaksananya Pameran nasional	Luar Daerah	1 Kali		
						Pameran Pekan Raya Sul-Sel		1 Kali		
						Pameran Kopi Nasional/Ekspo Nasional		1 Kali		
						Tersedianya Media Informasi Penyuluh		1 Paket		
						Terlaksananya Pekan Nasional XVI	Padang	1 Kali		
3	03	01	18		Program Peningkatan dan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya pengetahuan petani dalam penerapan teknologi yang berwawasan ramah lingkungan			78.000.000	
3	03	01	18	01	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna	Mengoptimalkan lahan kritis menjadi lahan subur dengan pemanfaatan limbah sampah pertanian	3 Kecamatan	3 Paket	33.000.000	APBD
						Meningkatnya pengetahuan dalam penerapan teknologi pertanian Ramah Lingkungan terutama lahan cetak sawah baru				
3	03	01	18	06	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	Mengoptimalkan pemanfaatan alsintan	3 Kecamatan	3 Kelompok	45.000.000	APBD
						Teroperasionalnya alsintan secara tepat sasaran				
						Meningkatnya pengetahuan dalam pengoperasian dan pemanfaatan alsintan				
						Meningkatnya pengetahuan dalam penerapan teknologi pemanfaatan alsintan				

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
3	03	01	19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi, produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam rangka swasembada pangan			485.000.000		
3	03	01	19	02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Tersedianya Alat Mekanisasi Pertanian	10 Kecamatan	350.000.000	APBD	
					Pengadaan Handtraktor 2 roda		9 Unit			
					Pengadaan Handtraktor 4 roda		0 Unit			
					Pengadaan Pompa air		2 Unit			
					Pengadaan Cultivator		0 Unit			
					Pengadaan Electric Fan		0 Buah			
					Terlaksananya pelatihan bimtek pengolahan alsintan UPT Mekanisasi	Kabupaten Bulukumba	2 Kali			
					Terlaksananya pengujian alsintan		1 Paket			
					Terlaksananya pengorganisasian Brigade Alsintan termasuk pemeliharaan		1 Paket			
					Terlaksananya teknologi/membuat alat mesin pertanian, memodifikasi alat dan mesin pertanian yang telah ada untuk pengembangan fungsi alsintan		1 Paket			
3	03	01	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Tersedianya sumber benih unggul lokal perkebunan	3 Kecamatan	3 Kelompok	50.000.000	APBD
					Pemberian Sarana produksi cengkeh, pala manggis tanaman indukan terpilih/bersertifikat					
					Pembuatan papan register pohon sumber benih unggulan					
3	03	01	19	07	Pengembangan Sayuran Dataran Tinggi dan Rendah	Terlaksananya Pengembangan Sayuran dataran tinggi dan rendah	5 Kecamatan	2 Komoditi	85.000.000	APBD
					Pengembangan tanaman cabe berupa pemberian saprodi		4 Ha			
					Demplot bawang merah dataran rendah		75 Are			
3	03	01	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia penyuluh			226.000.000		
3	03	01	20	01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Terlaksananya pelatihan pengembangan kompetensi penyuluh pertanian (diklat tupoksi, konten penyuluhan)	Bulukumba	40 Orang	100.000.000	APBD
					Pelatihan Komptensi Penyuluh					

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
						Terlaksananya pembinaan monitoring evaluasi kinerja penyuluh pertanian pertanian	Bulukumba	10 Kecamatan		
						Pertemuan penyuluh pertanian	Bulukumba	11 Kali		
						Konsultasi dan koordinasi penyuluh pertanian	Kementerian	1 Kali		
						Koordinasi dan konsultasi inovasi teknis pertanian	Jawa Barat	1 Kali		
3	03	01	20	02	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Terlaksananya pertemuan penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan	Bulukumba	10 Kecamatan	126.000.000	APBD
						Pertemuan penyusunan program Kabupaten				
						Terlaksananya penyelenggaraan penyuluhan pertanian	BPP 10 Kecamatan	149 Orang Penyuluh		
						Pertemuan penyusunan Programa Kecamatan/BPP 10 Kecamatan				
						Tersedianya Honorarium THL TBPP	Bulukumba	59 Orang THL		
						Pertemuan teknis tingkat kabupaten				
3	03	01	25		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya kinerja jaringan irigasi tersier guna mendukung pelaksanaan areal tanam, indeks pertanaman dan produktivitas			25.000.000	
3	03	01	25	05	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Rehabilitasi jaringan irigasi	1 Kecamatan	1 Paket	25.000.000	APBD
						Pelatiha revitalisasi kelembagaan P3A	6 Kecamatan	1 Paket		
3	03	01	27		Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas tanaman perkebunan Berkelanjutan	meningkatnya Produktifitas Tanaman Perkebunan			55.000.000	
3	03	01	27	01	Dukungan Sarana dan Prasarana Komoditi Perkebunan	Tersedianya sarana prasarana yang mendukung komoditas perkebunan dan pengendalian hama terpadu	Kindang dan Rilau Ale	2 Paket	55.000.000	APBD
						Demplot Penggunaan beuvaria dan tricolor pada kopi dan lada				
3	03	01	28		Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hasil perkebunan melalui penyediaan sarana pengolahan hasil			200.000.000	
3	03	01	28	01	Pengembangan Pengolahan Hasil pertanian/perkebunan	Terlaksananya pembinaan kelompok tani kopi dan jambu mete	4 Kecamatan	3 Kelompok	200.000.000	APBD
						Tersedianya alat pengolahan kopi dan jambu mete		2 Paket		

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
3	03	01		Program Peningkatan kualitas bahan baku industri tembakau	Meningkatnya produktivitas dan kualitas tembakau dengan mengoptimalkan seluruh potensi			100.000.000		
3	03	01	29	01	Penanganan panen dan pasca panen bahan baku	Meningkatnya kualitas produk dan pemasaran tembakau	Kec. Kindang dan Bonto Tiro	1 Paket	60.000.000	DBHCT
3	03	01	29	01	Penerapan Pembudidayaan Sesuai GAP Tembakau	Terlaksananya Peningkatan Produksi Tembakau Dataran Tinggi melalui pertanaman penerapan GAP	Kec. Kindang dan Bonto Tiro		40.000.000	DBHCT
						pengadaan pupuk organik		29 Ha		
						Pelatihan petani		60 Orang		
3	03	02			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			2.881.663.000,00		
3	03	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran			489.100.400,00	
3	03	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya pembayaran tagihan listrik, air, dan telepon	dinas keswan	12 bulan	78.000.000,00	APBD
3	03	02	01	06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas dan kendaraan operasional untuk proises BPKB	dinas keswan	34 unit	11.400.000,00	APBD
3	03	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	dinas keswan	12 bulan	86.604.000,00	APBD
3	03	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah penyedia jasa kebersihan kantor(orang)	dinas keswan	12 bulan	24.000.000,00	APBD
3	03	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan gedung yang diadakan (paket)	dinas keswan	57 buah	3.697.000,00	APBD
3	03	02	01	14	Penyediaan Peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	dinas keswan	39 buah	8.618.400,00	APBD
3	03	02	01	15	penyedia bahan bacaan dan peraturan per undang undangan	tersedia bahan bacaan dan peraturan per undang undangan	dinas keswan	1 tahun	960.000,00	APBD
3	03	02	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah kunjungan dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah(paket)	dinas keswan	75 kali	275.821.000,00	APBD
3	03	02	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Terpenuhinya kebutuhan kantor	dinas keswan	100%	136.823.750,00	APBD
3	03	02	02		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Produktivitas Kerja			259.597.272,00	
3	03	02	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	dinas keswan	3 unit	31.544.172,00	APBD
3	03	02	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan kantor yang tersedia(paket)	dinas keswan	6 unit	78.290.000,00	APBD
3	03	02	02	10	Pengadaan meubeler	jumlah mebeleur yang tersedia (paket)	dinas keswan	1 paket	46.950.000,00	APBD
3	03	02	02	24	pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/Operasional	jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin berkala	dinas keswan	2 unit	34.713.100,00	APBD
3	03	02	02	28	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan/ service	26 unit	2 unit	6.600.000,00	APBD
3	03	02	02	28	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya taman kantor		2 unit	16.500.000,00	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
3	03	02	02		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Bertambahnya luasan aula kantor	dinas keswan	1 unit	45.000.000,00	APBD
3	03	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	cakupan laporan keuangan yang disusun berdasarkan aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel			47.360.000,00	
3	03	02	06	01	penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	pelaporan capaian kinerja dan penyusunan renja (buku)	dinas keswan	1 paket	5.000.000,00	APBD
3	03	02	06	02	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	pelaporan keuangan akhir tahun	dinas keswan	1 paket	5.000.000,00	APBD
3	03	02	06	03	Penyusunan Program Kerja SKPD	pelaporan rencana kerja dan kegiatan rencana anggaran	dinas keswan	1 paket	12.360.000,00	APBD
3	03	02	06	04	Monitoring,Evaluasi Program Kegiatan SKPD	jumlah kegiatan yang dilakukan monitoring dan evaluasi	dinas keswan	12 bulan	25.000.000,00	APBD
3	03	02	21		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	meningkatkan derajat kesehatn hewan dan kesehatan hewan veteriner			807.050.228,00	
3	03	02	21	01	pendataan potensi peternakan	terlaksananya pengkartuan ternak besar (sapi, kuda dan kerbau)	dinas keswan	10 kecamatan	512.007.103,00	APBD
3	03	02	21	02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	vaksinasi dan pelayanan kesehatan hewan	dinas keswan	8400 Ekor	146.010.500,00	APBD
3	03	02	21	04	Pengawasan perdagangan Ternak Keluar Antar Daerah	Terkontrolnya Lalulintas Ternak di Kabupaten Bulukumba	dinas keswan	2 Pos	15.925.000,00	APBD
3	03	02	21	06	Penanganan penyakit Reproduksi dan Penyakit ternak	Tertanganinya Penyakit Reproduksi	dinas keswan	150 ekor	35.501.750,00	APBD
3	03	02	21	07	Pembinaan dan pengawasan bahan asal hewan (BAH)	Terpantaunya Bahan Asal Hewan (BAH) yang aman, Sehat, Utuh dan halal (ASUH) untuk dikonsumsi	dinas keswan	15 Lokasi (Pasar/Toko/RPH)	60.444.125,00	APBD
3	03	02	21	08	Optimalisasi pengelolaan rumah potong hewan	terlaksananya pengelolaan RPH sebagai penghasil bahan asal hewan yang asuh(bulan)	dinas keswan	1 paket	37.161.750,00	APBD
3	03	02	21	09	Optimalisasi pengelolaan puskesmas	Pelayanan Keswan, Laboratorium, Vaksinasi dan Reproduksi dan melakukan pengelolaan data terpadu.	dinas keswan	70 % ternak terlayani di 10 Kecamatan		APBD
3	03	02	22		Program Peningkatan Produksi Peternakan	Terlaksananya peningkatan produksi peternakan			1.123.823.100,00	
3	03	02	22	02	Pembibitan dan perawatan ternak	Terlaksananya pelayanan inseminasi buatan (dinas keswan	17325 dosis	165.733.000,00	APBD
						Terlaksananya insentif kelahiran inseminasi buatan		11944 ekor		
						Terlaksananya pembinaan teknis perbibitan dilokasi kawasan		1 kawasan		
						Terlaksananya pemeriksaan kebuntingan Inseminasi Buatan dan kawin alam		14931 ekor		

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
3	03	02	22	03	Pendistribusian bibit ternak pada masyarakat	Tersedianya bibit ternak yang akan didistribusikan kepada masyarakat yang terdiri dari - ternak besar (sapi) : 100 ekor	dinas keswan	20 ekor	330.000.000,00	APBD
3	03	02	22	11	Penatan ternak pemerintah	Terbentuknya tim inventarisasi bantuan ternak pemerintah yang sudah didistribusikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir	dinas keswan	10 kecamatan	26.415.000,00	APBD
3	03	02	22	12	Pengembangan sumber daya dan kelembagaan peternakan	Terlaksananya Bimtek Kelembagaan peternakan, tersedia Jasa Pihak ketiga untuk petugas teknis lapangan dan Pembinaan teknis Kelompok	dinas keswan	1 paket	157.425.100,00	APBD
3	03	02	22	xx	Penyediaan pengembangan pakan dan air	Tersedianya Hijauan Pakan ternak berkualitas pada kelompok tani ternak (70.000 stek)	dinas keswan	1 paket	45.480.000,00	APBD
						Tersedianya sumber air irigasi perpompaan untuk kebutuhan hijauan pakan ternak (2 unit)				
3	03	02	22	xx	Pemberdayaan klp masyarakat	tersedianya paket permodalan melalui sektor peternakan	dinas keswan	1 paket	398.770.000,00	APBD
3	03	02	22		Program Peningkatan Produksi Peternakan	meningkatnya daya saing produk unggulan yang dihasilkan		123.482.000	123.482.000,00	
3	03	02	22	05	Promosi atas hasil produksi sapi peternak unggulan daerah	Diikutinya / keikutsertaan pada ekspo/pameran produk unggulan daerah	dinas keswan	6 kali	73.482.000,00	APBD
3	03	02	22	xx	Pengembangan agribisnis peternakan	Tersedianya bantuan premi asuransi ternak (5000 ekor)	dinas keswan	1 paket	50.000.000,00	APBD
						Terlaksananya bimbingan teknis usaha agribisnis peternakan (4 Angkatan)				
3	03	02	22		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	meningkatnya hasil produksi hasil ternak			31.250.000,00	
3	03	02	22	01	Pengadaan sarana dan parasarana teknologi peternakan tepat guna	Tersedianya reaktor biogas sebagai sumber energi terbarukan (7 unit)	dinas keswan	1 paket	31.250.000,00	APBD
3	06	01			DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				8.727.388.000	
3	06	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				962.000.000	
3	06	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran Surat menyurat	Bulukumba		5.000.000	APBD
3	06	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Tersedianya Listrik, Telpn dan TV	Bulukumba		85.000.000	APBD
3	06	01	01	05	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Opersaional	Tersedianya Surat Kendaraan	Bulukumba		41.000.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
3	06	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Administrsai Keuangan	Bulukumba		275.000.000	APBD
3	06	01	01	08	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya Tenaga Listrik	Bulukumba		45.000.000	APBD
3	06	01	01	12	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Kantort terpeihara	Bulukumba		36.000.000	
3	06	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat-alat Rumah tangga	Bulukumba		5.000.000	APBD
3	06	01	01	15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Rapat-rapat/Koordinas dapat terpenuhii	Bulukumba		350.000.000	APBD
3	06	01	01	18	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Tersedianya Penata Usahaan	Bulukumba		120.000.000	APBD
3	06	01	01	19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				724.000.000	
3	06	01	02		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedinya Kendaraan Roda dan M Dinas	Bulukumba		65.000.000	APBD
3	06	01	02	01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedinya Perlengkapan Kantor	Bulukumba		65.000.000	APBD
3	06	01	02	07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersdianya Peralatan Kantot	Bulukumba		209.000.000	APBD
3	06	01	02	09	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur / Meja dan Kursi	Bulukumba		60.000.000	APBD
3	06	01	02	10	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor	Bulukumba		35.000.000	APBD
3	06	1	02	12	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedinya Kendaraan Dinas Operasional	Bulukumba		65.000.000	
3	06	01	02	22	Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedinya Perlengkaan Gedung Kantor	Bulukumba		25.000.000	APBD
3	06	01	02		Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	Tersedianya bangunani Gedung Kantor	Bulukumba		200.000.000	APBD
3	06	01	02	24	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				25.000.000	
3	06	01	02	28	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Olah raga	Bulukumba		25.000.000	
3	06	01	02		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				80.000.000	
3	06	01	03		Pendidikan dan Pelatihan Formal	SDM Asn Dagprint lebih menguasai Tupoksinya masing-masing			65.000.000	
3	06	01	03	01	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang menguasai teknis dan implementasi peraturan Perundang-undangan	Bulukumba		15.000.000	APBD
3	06	01	03	02	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan				162.500.000	
3	06	01	03	xx	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar reaalisasi kinerja SKPD	Tersedianya Data dan Laporan Capaian Kinerja	Bulukumba		62.500.000	APBD
3	06	01	04		Penyusunan pelaporan akhir tahun	Tersedianya Laporan Capaian Kegiatan Akhir Tahun	Bulukumba		15.000.000	APBD
3	06	01	04	01	Penyusunan Program Kerja OPD	Tersedianya Rencana Kerja OPD	Bulukumba		85.000.000	APBD
3	06	01	06		Program perlindungan konsumen dan				420.500.000	
3	06	01	06	01	pengamanan perdagangan					

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
3	06	01	06	04	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terdistribusinya Barang yang beredar dengan baik	Bulukumba		165.000.000	APBD
3	06	01	06	05	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetropolitan Daerah	Terlaksananya UTTP dengan pelayanan yang standar	Bulukumba		255.500.000	APBD
3	06	01	15		Program Pengembangan Industri Kecil Menengah				2.610.000.000	
3	06	01	15	03	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan Sumber Daya	Terwujudnya Suber Daya bagi IKM	Bulukumba		2.500.000.000	APBD
3	06	01	15	04						
3	06	01	15	05	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaxster industri	Terwujudnya Jaringan Klaster Industri	Bulukumba		110.000.000	APBD
3	07	01								
3	07	01			Program peningkatan kemampuan teknologi industri				50.000.000	
3	07				Pembinaan kemampuan teknologi industri	Terwujudnya hasil Produk IKM dengan kualitas lebih baik	Bulukumba		50.000.000	
3	07	01	15							
3	07	01	15	05	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi				70.000.000	
3	07	01	15	06						
3	07	01	16							
3	07	01	16	01	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Terwujudnya kemampuan berbasis Tehnologi Industri	Bulukumba		70.000.000	
3	07	01	16	02						
3	07	01	16	03	Program peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri				2.490.000.000	
3	06	01	17		Pengembangan Pasar Dstribusi Barang Produk	Terwujudnya Pengelolaan Pasar			2.135.000.000	
3	06	01	17	01	Peningkatan Sistim Jarngan Informasi Perdagangan	Terkendalinya hasil Produk Daerah			245.000.000	
3	06	01	18	02	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan	Terwujudnya Perkembangan Usaha Perdagangan			-	
3	06	01	18						110.000.000	
3	06	01	18		Program penataan struktur industri				120.000.000	
3	06	01	18	03	Penyediaan sarana dan prasarana klaster industri	Terwujudnya Klaster Industri	Bulukumba		120.000.000	
3	06	01	18	06	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan				35.000.000	
3	06	01	19		Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	Terwujudnya Penataan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan	Bulukumba		35.000.000	APBD
3	06	01	19	02	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial				115.000.000	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
3	06	01	19	xx	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Terwujudnya Sarana Informasi yang dapat diakses masyarakat	Bulukumba		115.000.000	APBD
1	03									
1	03	01	30		Program pembangunan infrastruktur pedesaan				863.388.000	
1	03	01	30	04	Pembangunan pasar pedesaan	Terwujudnya sarana Perdagangan yang lebih baik	Bulukumba		500.000.000	APBD
1	03	01	30	07	Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaan	Terwujudnya sarana Perdagangan yang lebih baik	Bulukumba		363.388.000	APBD
4	01	03			SEKRETARIAT DAERAH				13.285.514.964,00	
4	01	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.				4.417.819.600,00	
4	01	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Komunikasi Listrik dan Air dapat Terpenuhi	Bulukumba	12 Bulan	858.118.725,00	APBD
4	01	03	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulukumba	1 Tahun	8.650.000,00	APBD
4	01	03	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Bumi dan Bangunan Perjalanan luar provinsi 1 kali perjalanan provinsi 4 kali	Bulukumba	Bumi dan Bangunan	15.000.000,00	APBD
4	01	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Bulukumba	1 Tahun	50.100.000,00	APBD
4	01	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah	Bulukumba	1 tahun	137.650.000,00	APBD
4	01	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulukumba	1 Paket	194.380.000,00	APBD
4	01	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bangunan Kantor Daerah, Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	Bulukumba	3 Gedung	66.003.000,00	APBD
4	01	03	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulukumba	8 Jenis	53.650.000,00	APBD
4	01	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah ketersediaan koran, tabloid, majalah serta sarana dan prasarana komunikasi dan terjalannya kerjasama Media massa di Kab.Bulukumba'Langganan surat kabar 10 media cetak dan penyediaan layanan internet gratis free wifi di Kantor Bupati dan Lapangan Pemuda	Bulukumba	1 tahun	349.920.000,00	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	03	01	18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bulukumba	1 tahun	1.000.000.000,00	APBD
4	01	03	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Tersedianya Program Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Bulukumba	1 Tahun	1.640.043.875,00	APBD
4	01	03	01	23	Penyediaan Sarana Penunjang Keprotokolan	Tersedianya sarana penunjang keprotokolan	Bulukumba	1 tahun	44.304.000,00	APBD
4	01	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			3.516.746.864,00	
4	01	03	02	04	Pengadaan Kendaraan Dinas / Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan Bupati, Wakil Bupati	Bulukumba	Roda Empat 2 Unit	1.500.000.000,00	APBD
4	01	03	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Asisten	Bulukumba	Roda Empat 2 Unit	-	APBD
4	01	03	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulukumba	2 Unit	339.217.000,00	APBD
4	01	03	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	Bulukumba	5 Jenis	209.400.000,00	APBD
4	01	03	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulukumba	20 Unit	244.825.000,00	APBD
4	01	03	02	10	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya Mebeleur	Bulukumba	5 Jenis	42.250.000,00	APBD
4	01	03	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah jabatan	Bulukumba	2 Unit	69.195.000,00	APBD
4	01	03	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulukumba	2 Paket	41.700.000,00	APBD
4	01	03	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Setda, Asisten	Bulukumba	6 unit	92.876.000,00	APBD
4	01	03	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeiharaan Kendaraan Dinas Operasional	Bulukumba	35 unit	120.471.250,00	APBD
4	01	03	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor	Bulukumba	10 jenis	61.950.000,00	APBD
4	01	03	02	40	Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Jabatan	Terlaksananya Sedang/Berat Rumah Jabatan	Bulukumba	2 unit	610.359.514,00	APBD
4	01	03	02	42	Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Sedang/Berat Gedung Kantor	Bulukumba	8 paket	184.503.100,00	APBD
4	01	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Peningkatan Disiplin Aparatur			101.750.000,00	
4	01	03	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	Bulukumba	100%	48.000.000,00	APBD
4	01	03	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan	Bulukumba	100%	53.750.000,00	APBD
4	01	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.				122.035.750,00	
4	01	03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Lakip Sekretariat Daerah	Bulukumba	1 dokumen	5.085.000,00	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	03	06	05	Penyusunan program kerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja/Renstra Sekretariat Daerah	Bulukumba	2 Dokumen	116.950.750,00	
4	01	03	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Adanya peningkatan layanan komunikasi dan informasi lingkup Pemkab Bulukumba, baik infrastruktur maupun SDM			38.435.500,00	
4	01	03	15	05	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Persentase terlaksananya pembuatan sambutan Bupati /Wakil Bupati dan penyediaan alat tulis kantor	Bulukumba	1 tahun	38.435.500,00	APBD
4	01	03	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah			781.318.000,00	
4	01	03	16	01	Dialog/ Audiens Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH	Bulukumba	12 Bulan	148.000.000,00	APBD
4	01	03	16	02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH	Bulukumba	1 tahun	105.000.000,00	APBD
4	01	03	16	07	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)	Terpenuhinya kewajiban Kepala Daerah dalam Menyampaikan LPPD kepada Pemerintah dan ILPPD kepada Masyarakat	Bulukumba	2 dokumen	169.861.700,00	APBD
4	01	03	16	09	Peningkatan Tugas Kedinasan dan Tugas Operasional	Meningkatkan pelayanan kedinasan KDH/ WKDH	Bulukumba	12 bulan	227.736.000,00	APBD
4	01	03	16	19	Koordinasi dan Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri.	Terlaksananya pelayanan terhadap tamu dinas pemda	Bulukumba	12 bulan	130.720.300,00	APBD
4	01	03	17		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.				118.383.000,00	
4	01	03	17	20	Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan Daerah	Pengendalian Anggaran Dan Penyusunan RKA / RKAP / Serta DPA /DPAP Lingkup Sekretariat Daerah	Bulukumba	12 bulan	58.279.000,00	APBD
4	01	03	17	38	Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan	Terlaksananya Administrasi Perbendaharaan	Bulukumba	12 bulan	26.216.000,00	APBD
4	01	03	17	39	Penatausahaan Administrasi Pembukuan	Koordinasi Dan Penatausahaan Administrasi Pembukuan SKPD Sekretariat Daerah	Bulukumba	12 bulan	33.888.000,00	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	03	17	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana Dan Prasarana Daerah				15.847.100,00	
4	01	03	17	02 Koordinasi Produksi Daerah	Tersedianya informasi produksi daerah untuk promosi dan investasi	Bulukumba	100%	15.847.100,00	APBD
4	01	03	18	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Terlaksananya penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan			280.000.000,00	
4	01	03	18	02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya informasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, baik melalui media cetak maupun elektronik	Bulukumba	12 bulan	250.000.000,00	APBD
4	01	03	18	03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Terlaksananya diskusi (Coffee Morning) bersama dengan jurnalis, OKP dan elemen masyarakat lainnya	Bulukumba	12 bulan	30.000.000,00	APBD
4	01	03	19	Program Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Kehumasan dan Keprotokoleran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Koordinasi dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Keprotokoleran			167.637.500,00	
4	01	03	19	01 Koordinasi dan Pelatihan serta Pengaturan Acara-Acara Pemda	Terlaksananya Koordinasi dan Keprotokoleran	Bulukumba	12 bulan	167.637.500,00	APBD
4	01	03	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				222.018.425,00	
4	01	03	20	02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum, Penanganan Kasus dan Pertimbangan Hukum	Bulukumba	2 kasus	102.095.600,00	APBD
4	01	03	20	03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terwujudnya Pelayanan yang Prima di Kecamatan	Bulukumba	2 kali	23.951.000,00	APBD
4	01	03	20	06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Ditindaklanjutinya Temuan Aparat Pengawasan Fungsional	Bulukumba	90 lhp	30.477.075,00	APBD
4	01	03	20	09 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah (TPTGR)	Koordinasi Dan Pelaksanaan Proses TP-TGR	Bulukumba	12 bulan	65.494.750,00	APBD
4	01	03	20	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra				1.193.897.400,00	
4	01	03	20	01 Pelaksanaan STQ /MTQ Tk. Kabupaten, Tk. Propinsi dan Tk. Nasional	Terlaksananya STQ/MTQ Tk. Kabupaten dan Keikutsertaan dalam lomba STQ/MTQ Tk. Propinsi dan Nasional	Kab.Bulukumba, Tk.Propinsi dan Tk.Nasional	4 kali	583.146.000,00	APBD
4	01	03	20	05 Pengajian Rutin	Peningkatan pemahaman dan pembinaan mental pegawai dan Masyarakat	Bulukumba	12 bulan	37.123.000,00	APBD
4	01	03	20	07 Pelaksanaan Safari Ramadhan	Pembinaan keagamaan melalui safari Ramadhan	Bulukumba	1 kali	120.000.000,00	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	03	20	10	Pembinaan dan pelatihan guru TKA/TPA	Terwujudnya pembinaan dan kesejahteraan guru TKA/TPA dan Madin kontrak.	Bulukumba	218 orang	173.989.900,00	APBD
4	01	03	20	19	Pembinaan UKS	Semakin berkualitasnya pembinaan dan pelaksanaan lomba sekolah sehat.	Bulukumba	12 bulan	32.718.500,00	APBD
4	01	03	20	20	Pelayanan Calon Jemaah Haji	Terlayannya perjalanan Jamaah Haji dari Debarkasi ke Embarkasi dan sebaliknya	Bulukumba	2 kali	246.920.000,00	APBD
4	01	03	20		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				85.460.400,00	
4	01	03	20	03	Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah	Jumlah dokumen laporan realisasi dan aktivitas Pengadaan Pemerintah secara berkala	Bulukumba	12 bulan	85.460.400,00	APBD
4	01	03	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				53.422.550,00	
4	01	03	21	12	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj)	Terpenuhinya kewajiban Kepala Daerah dalam Menyampaikan LKPj kepada DPRD	Bulukumba	1 Dokumen	53.422.550,00	APBD
4	01	03	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				28.787.500,00	
4	01	03	23	04	Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi penetapan SPM OPD	Bulukumba	6 SKPD	28.787.500,00	APBD
4	01	03	26		Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan				525.609.475,00	
4	01	03	26	01	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan di Desa	Bulukumba	109 desa	113.334.400,00	APBD
4	01	03	26	03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Draft Rancangan Produk Hukum Daerah	Bulukumba	11 Ranperda	108.453.100,00	APBD
4	01	03	26	04	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Perda	Bulukumba	5 Kali	92.000.000,00	APBD
4	01	03	26	05	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyajian Informasi tentang Produk Hukum	Bulukumba	12 Bulan	15.686.000,00	APBD
4	01	03	26	06	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Terlaksananya Kajian Terhadap Produk Hukum Daerah	Bulukumba	800 Naskah	12.444.150,00	APBD
4	01	03	26	07	Penataan Dokumentasi Hukum	Tertatanya Produk Hukum Daerah	Bulukumba	800 Naskah	30.175.050,00	APBD
4	01	03	26	11	Sosialisasi dan Koordinasi Penegakan Hukum dan HAM	1. Terlaksananya Penyusunan Laporan RANHAM Kab.Bulukumba 2. Terlaksananya Koordinasi Penegakan Hukum dan HAM	Bulukumba	5 Laporan	15.616.400,00	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	03	26	13	Pembinaan Kelompok Kadarkum	Terlaksananya Pelaksanaan Kelompok Kadarkum	Bulukumba	1 Kelompok	85.109.475,00	APBD
4	01	03	26	14	Monitoring dan Evaluasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terwujudnya evaluasi penyusunan SOP OPD	Bulukumba	1 Laporan	52.790.900,00	APBD
4	01	03	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru				162.351.700,00	
4	01	03	27	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Permasalahan Tapal Batas Wilayah antar Daerah	Terlaksananya penegasan Batas Daerah 3 Segmen (Bulukumba- Sinjai di Desa Sapanang Kec. Kajang dan Di Desa Kahaya Kec. Kindang serta Bulukumba-Selayar di Pulau Betang Desa Bira Kec. Bontobahari)	Bulukumba	1 Tahun	37.382.500,00	APBD
4	01	03	27	04	Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru	Terlaksananya fasilitasi pemantapan SOTK Pemda Otonomi Baru	Bulukumba	1 Ranperda	64.875.000,00	APBD
4	01	03	27	11	Fasilitasi,Koordinasi, Moonitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	Tertibnya Administrasi Naskah Kerjasama	Bulukumba	1 Dokumen	23.011.400,00	APBD
4	01	03	27	12	Pendataan & Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan dan Unsur Budaya	Tersusunnya Nama-nama Rupabumi Kabupaten Bulukumba	Bulukumba	1 Dokumen	37.082.800,00	APBD
4	01	03	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				203.420.150,00	
4	01	03	30	18	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terfasilitasinya penyusunan dokumentasi anjab OPD	Bulukumba	12 bulan	67.507.000,00	APBD
4	01	03	30	20	Penyusunan Analisis Jabatan	Terfasilitasinya penyusunan dokumentasi anjab OPD	Bulukumba	37 Perangkat Daerah	13.447.150,00	APBD
4	01	03	30	26	Evaluasi pembinaan dan peningkatan unit pelayanan publik Kabupaten Bulukumba	Meningkatnya kualitas Unit Pelayanan Publik yang memberikan pelayanan pada masyarakat	Bulukumba	10 SKPD	47.950.000,00	APBD
4	01	03	30	27	Penyusunan Evaluasi jabatan	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Evaluasi Jabatan OPD	Bulukumba	1 Dokumen	7.415.000,00	APBD
4	01	03	30	28	Penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Dokumen Road Map RB	Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam tata kelola pemerintahan dan tersusunnya Dokumen Road Map RB	Bulukumba	1 dokumen	37.101.000,00	APBD
4	01	03	30	30	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNSD	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Standar Kompetensi Manajerial OPD	Bulukumba	37 SKPD	30.000.000,00	APBD
4	01	03	31		Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi				457.953.250,00	
4	01	03	31	01	Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	Jumlah Penyusunan informasi Pengadaan Barang/Jasa terhadap pengguna dan penyedia jasa konstruksi	Bulukumba	12 Bulan	50.046.000,00	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	03	31	04	Pengembangan Kapasitas Layanan pengadaan Barang/Jasa	Persentase terbentuknya layanan pengadaan secara elektronik dan persentase terlaksananya pelatihan LPSE pada Penyedia jasa dan pengguna konstruksi	Bulukumba	12 bulan	375.176.000,00	APBD
4	01	03	32	05	Peningkatan Kapasitas Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Bagi pelaku jasa konstruksi dan SIRUP bagi OPD	Bulukumba	36 OPD	32.731.250,00	APBD
4	01	03	32		Program Pembinaan Kecamatan				15.301.050,00	
4	01	03	35	07	Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Tertibnya adminstrasi Kecamatan dan Kelurahan	Bulukumba	100%	15.301.050,00	APBD
4	01	03	35		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Jabatan	Meningkatnya Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Jabatan			634.500.000,00	
4	01	03	38	01	Penyediaan Bahan Kebutuhan Rumah Tangga	Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH	Bulukumba	12 bulan	634.500.000,00	APBD
4	01	03	38		Program Pembangunan/Pengembangan perekonomian Daerah				142.819.750,00	
4	01	03	38	04	Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah	Jumlah Data Informasi Tingkat inflasi Daerah	Bulukumba	12 Laporan	50.000.000,00	APBD
4	01	03	38	05	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan/pembangunan secara berkala	Bulukumba	12 bulan	57.202.000,00	APBD
4	01	03	38	06	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan	Bulukumba	100%	35.617.750,00	APBD
4	01	04			SEKRETARIAT DPRD				16.614.629.941,00	
4	01	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3.236.542.591,00	
4	01	04	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan surat menyurat	Bulukumba	10 Kecamatan	1.960.000,00	APBD
4	01	04	01	02	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulukumba	12 Bulan	351.654.800,00	APBD
4	01	04	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terpeliharanya kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	Bulukumba	1 Kali	57.600.000,00	APBD
4	01	04	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan roda dua dan roda empat	Bulukumba	20 Unit	19.800.000,00	APBD
4	01	04	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya dan meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan	Bulukumba	12 Bulan	96.443.796,00	APBD
4	01	04	01	08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor sekretariat DPRD	Bulukumba	12 Bulan	175.000.000,00	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	04	01	12	Penyediaan komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor secara optimal	Bulukumba	12 Bulan	15.000.000,00	APBD
4	01	04	01	13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya cendramata/plakat	Bulukumba	15 Buah	10.000.000,00	APBD
4	01	04	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat-alat rumah tangga	Bulukumba	0	5.000.000,00	APBD
4	01	04	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya penyebaran informasi pembangunan daerah	Bulukumba	12 Bulan	162.152.000,00	APBD
4	01	04	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulukumba	12 Bulan	471.683.745,00	APBD
4	01	04	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Bulukumba	12 Bulan	1.870.248.250,00	APBD
4	01	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				994.246.550,00	
4	01	04	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan perlengkapan/sarana gedung kantor	Bulukumba	0	200.000.000,00	
4	01	04	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Bulukumba	0	332.000.000,00	APBD
4	01	04	02	10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebeleur kantor	Bulukumba	0	200.000.000,00	APBD
4	01	04	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Bulukumba	12 Bulan	20.000.000,00	APBD
4	01	04	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Tersedianya biaya perawatan mobil jabatan	Bulukumba	12 Bulan	105.403.550,00	APBD
4	01	04	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendraan dinas operasional	Terpeliharanya kendaraan roda empat dan roda dua	Bulukumba	16 Unit	80.007.500,00	APBD
4	01	04	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bulukumba	12 Bulan	19.635.500,00	APBD
4	01	04	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Bulukumba	12 Bulan	2.200.000,00	APBD
4	01	04	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya biaya rehab gedung kantor	Bulukumba	12 Bulan	30.000.000,00	APBD
4	01	04	02		Rehabilitasi sedang/berat Mobil Jabatan	Tersedianya biaya perbaikan mobil jabatan	Bulukumba	12 Bulan	5.000.000,00	APBD
4	01	04	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				501.550.000,00	
4	01	04	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Bulukumba	200 Pasang	501.550.000,00	APBD
4	01	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				150.000.000,00	
4	01	04	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bulukumba	12 Bulan	150.000.000,00	APBD
4	01	04	06		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan				75.000.000,00	
4	01	04	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya Kualitas Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Bulukumba	1 Dokumen	5.000.000,00	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	04	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Bulukumba	1 Dokumen	5.000.000,00	APBD
4	01	04	06	05	Penyusunan Program Kerja SKPD	Terlaksananya penyusunan program kerja SKPD	Bulukumba	12 Bulan	65.000.000,00	APBD
4	01	04	06	06	Penatausahaan administrasi kepegawaian	Tertibnya administrasi kepegawaian sekretariat DPRD	Bulukumba	12 Bulan	-	APBD
4	01	04	15		Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah				10.301.771.200,00	
4	01	04	15	01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terlaksananya rancangan peraturan daerah	Bulukumba	16 Buah Ranperda	391.086.300,00	APBD
4	01	04	15	02	Hearing, dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh agama dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat	Terwujudnya Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh agama	Bulukumba	12 Bulan	89.866.750,00	APBD
4	01	04	15	03	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Bulukumba	12 Bulan	111.765.250,00	APBD
4	01	04	15	04	Rapat-rapat Paripurna	Terlaksananya Rapat Paripurna DPRD	Bulukumba	12 Bulan	150.464.000,00	APBD
4	01	04	15	05	Kegiatan Reses	Terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat	Bulukumba	12 Bulan	1.000.000.000,00	APBD
4	01	04	15	06	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Terwujudnya Koordinasi antar Daerah,Provinsi dan Pusat	Bulukumba	12 Bulan	5.547.964.200,00	APBD
4	01	04	15	07	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Bulukumba	12 Bulan	2.476.245.000,00	APBD
4	01	04	15	09	Peningkatan Publikasi dan Informasi Kelembagaan DPRD	Terwujudnya publikasi dan informasi kegiatan DPRD	Bulukumba	12 Bulan	449.482.450,00	APBD
4	01	04	15	11	Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penerimaan aspirasi masyarakat	Bulukumba	12 Bulan	84.897.250,00	APBD
4	04	04	17		Program Peningkatan dan pengembangan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				45.000.000,00	
4	04	04	17	38	Penatausahaan administrasi perbendaharaan Daerah	Tertibnya Pelaksanaan Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan	Bulukumba	12 Bulan	-	APBD
4	04	04	17	39	Penatausahaan Administrasi Pembukuan	Tertibnya Pelaksanaan Penatausahaan Administrasi Pembukuan	Bulukumba	12 Bulan	45.000.000,00	APBD
4	01	04	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.				1.294.019.600,00	
4	01	04	26	03	Legislasi rancangan peraturan per undang-undang	Terciptanya peraturan daerah	Bulukumba	12 Bulan	934.961.650,00	APBD
4	01	04	26	04	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi perda inisiatif DPRD	Bulukumba	12 Bulan	260.697.500,00	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	04	26	06	Kajian peraturan Perundang -undangan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang -undangan Daerah	Terlaksananya sinkronisasi produk hukum DPRD	Bulukumba	12 Bulan	34.160.450,00	APBD
4	01	04	26	07	Penataan Dokumentasi Hukum	Tertatanya produk hukum DPRD dan buku-buku peraturan perundang-undangan	Bulukumba	12 bulan	64.200.000,00	APBD
4	04	04	37		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah				16.500.000,00	
4	04	04	37	01	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Tertatnya manajemen aset/barang daerah	Bulukumba	12 Bulan	16.500.000,00	APBD
4	1	9			KANTOR KECAMATAN UJUNG BULU				454.247.000,00	
4	1	9	1		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				311.275.200	APBD
4	1	9	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Ujung bulu	12 Bulan	960.000	APBD
4	1	9	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ujung bulu	12 Bulan	20.400.000	APBD
4	1	9	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Ujung bulu	12 Bulan	2.800.000	APBD
4	1	9	1	7	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	lancarnya Administrasi Keuangan	Ujung bulu	12 Bulan	45.215.000	APBD
4	1	9	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Ujung bulu	12 Bulan	30.522.000	APBD
4	1	9	1	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Ujung bulu	100%	6.050.000	APBD
4	1	9	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ujung bulu	100%	1.296.000	APBD
4	1	9	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ujung bulu	100%	41.538.000	APBD
4	1	9	1	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Ujung bulu	12 Bulan	162.494.200,00	APBD
4	1	9	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				39.609.800	APBD
4	1	9	2	9	Pengadaan peralatan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Ujung bulu	100%	14.000.000	APBD
4	1	9	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Ujung bulu	100%	5.066.800	APBD
4	1	9	2	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	lancarnya kegiatan operasional	Ujung bulu	100%	14.663.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	1	9	24	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	lancarnya kegiatan operasional	Ujung bulu	100%	5.880.000	APBD
4	1	9	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				4.748.000	APBD
4	1	9	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ujung bulu	100%	2.374.000	APBD
4	1	9	6	5	Penyusunan program kerja SKPD	Terlaksananya program kerja kecamatan	Ujung bulu	100%	2.374.000	APBD
4	1	9	24		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat				19.200.000	APBD
4	1	9	24	1	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Terwujudnya Rasa Aman pada Masyarakat	Ujung bulu	12 Bulan	19.200.000	APBD
4	1	9	32		Pogram pembinaan kecamatan				29.414.000	APBD
4	1	9	32	2	Sosialisasi pembinaan Aparat Kecamatan dan Kelurahan	Terwujudnya pembinaan kec. Dan Kel.	Ujung bulu	100%	14.040.000	APBD
4	1	9	32	7	Penataan dan pembinaan kecamatan dan kelurahan	Mendukung terlaksananya program pemerintahan	Ujung bulu	100%	15.374.000	APBD
2	2	9	20		Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra				50.000.000	APBD
2	2	9	20	1	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Propinsi	Meningkatnya Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra	Ujung bulu	100%	50.000.000	APBD
4	1	9	2		KELURAHAN BENTENGE				1.170.456.400,00	
14	1	9	2		Belanja Lansung		BENTENGE		100.140.400	APBD
4	1	9	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		BENTENGE		100.140.400	APBD
4	1	9	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko ,materai dan benda pos lainnya dalam jasa Surat Menyurat	BENTENGE	12 Bulan	9.000.000	APBD
4	1	9	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kelancaran komunikasi,Listrik dan Air	BENTENGE	12 Bulan	3.000.000	APBD
4	1	9	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	BENTENGE	100%	150.000	APBD
4	1	9	1	7	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honor PNS pengelola Keuangan	BENTENGE	12 Bulan	13.583.500	APBD
4	1	9	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa Tenaga Kebersihan Kantor	BENTENGE	12 Bulan	2.400.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	1	9	1	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tersedianya Honor jasa pihak ketiga,ATK,Barang Cetak,prangko &Materai,peggandaan dan Makan Minum Rapat dan Tamu	BENTENGE	12 Bulan	72.006.900	APBD
4	1	9	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		BENTENGE		8.550.000	APBD
4	1	9	2	28	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan grdung kantor	BENTENGE	100%	8.550.000	APBD
					PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN		BENTENGE		1.061.766.000	DAU
4	1	9	44		Program Peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan		BENTENGE		761.766.000	DAU
4	1	9	44	1	Pengadaan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Terlaksananya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	BENTENGE	100%	445.862.000	DAU
4	1	9	44	2	Pengadaan pembangunan pengembangan & pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi	Terlaksananya sarana dan prasarana Tranportasi	BENTENGE	100%	200.000.000	DAU
4	1	9	44	3	Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan	Terlaksananya sarana dan prasarana Kesehatan	BENTENGE	100%	50.000.000	DAU
4	1	9	44	4	Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan & Kebudayaan	BENTENGE	100%	65.904.000	DAU
4	1	9	45		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN		BENTENGE		300.000.000	DAU
4	1	9	45	1	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya pengembangan pelayanan Kesehatan Masyarakat	BENTENGE	12 Bulan	50.000.000	DAU
4	1	9	45	2	pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya pengembangan pelayanan pendidikan & Kebudayaan	BENTENGE	12 Bulan	50.000.000	DAU
4	1	9	45	3	pengelolaan kegiatan pengembangan usaha UMKM	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Kelompok UMKM	BENTENGE	100%	50.000.000	DAU
4	1	9	45	4	penguatan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Tanggap Bencana	BENTENGE	100%	50.000.000	DAU
4	1	9	45	5	pengelolaan kegiatan lembaga Masyarakat	Terlaksananya penguatan Kelembagaan Masyarakat	BENTENGE	12 Bulan	50.000.000	DAU
4	1	9	45	6	Pengelolaan kegiatan ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Terwujudnya Rasa Aman pada Masyarakat	BENTENGE	12 Bulan	50.000.000	DAU
4	1	9	3		KELURAHAN KASIMPURENG				1.136.842.600,00	
4	1	9	3		Belanja Lansung		KASIMPURENG		124.750.600	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	1	9	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		KASIMPURENG		117.900.600	APBD
4	1	9	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Fasilitas Listrik	KASIMPURENG	12 Bulan	2.400.000	APBD
4	1	9	1	7	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honor pengelola Keuangan	KASIMPURENG	12 Bulan	15.000.000	APBD
4	1	9	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya Honor petugas kebersihan kantor	KASIMPURENG	12 Bulan	4.810.850	APBD
4	1	9	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KASIMPURENG	100%	11.410.000	APBD
4	1	9	1	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tersedianya Anggaran penatausahaan	KASIMPURENG	12 Bulan	84.279.750	APBD
4	1	9	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		KASIMPURENG		6.850.000	APBD
4	1	9	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terciptanya Suasana kerja yang kondusif	KASIMPURENG	100%	1.500.000	APBD
4	1	9	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanga kendaraan Dinas Operasional	KASIMPURENG	100%	2.050.000	APBD
4	1	9	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terciptanya Suasana Kerja yang kondusif	KASIMPURENG	100%	3.300.000	APBD
					PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN				1.012.092.000	DAU
4	1	9	44		Program Peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan		KASIMPURENG		712.092.000	DAU
4	1	9	44	1	Pengadaan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Terlaksananya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	KASIMPURENG	100%	195.862.000	DAU
4	1	9	44	2	Pengadaan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Terlaksananya sarana dan prasarana Tranportasi	KASIMPURENG	100%	170.000.000	DAU
4	1	9	44	3	Pengadaan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Terlaksananya sarana dan prasarana Kesehatan	KASIMPURENG	100%	300.000.000	DAU
4	1	9	44	4	Pengadaan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan & Kebudayaan	KASIMPURENG	100%	46.230.000	DAU
4	1	9	45		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				300.000.000	DAU
4	1	9	45	1	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya pengembangan pelayanan Kesehatan Masyarakat	KASIMPURENG	12 Bulan	60.000.000	DAU
4	1	9	45	2	pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya pengembangan pelayanan pendidikan & Kebudayaan	KASIMPURENG	12 Bulan	40.000.000	DAU
4	1	9	45	3	pengelolaan kegiatan pengembangan usaha UMKM	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Kelompok UMKM	KASIMPURENG	100%	55.000.000	DAU

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	1	9	45	4	pengelolaan kegiatan lembaga Masyarakat	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Tanggap Bencana	KASIMPURENG	12 Bulan	46.000.000	DAU
4	1	9	45	5	penguatan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana	Terlaksananya penguatan Kelembagaan Masyarakat	KASIMPURENG	100%	42.000.000	DAU
4	1	9	45	6	Pengelolaan kegiatan ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Terwujudnya Rasa Aman pada Masyarakat	KASIMPURENG	12 Bulan	57.000.000	DAU
4	1	9	4		KELURAHAN LOKA				1.116.862.600,00	
4	1	9	4		Belanja Lansung		LOKA		143.254.600	APBD
4	1	9	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		LOKA		135.849.600	APBD
4	1	9	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	LOKA	12 Bulan	4.500.000	APBD
4	1	9	1	7	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	LOKA	12 Bulan	18.600.000	APBD
4	1	9	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor	LOKA	12 Bulan	6.000.000	APBD
4	1	9	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya Rapat dan kordinasi dan konsultasi keluar Daerah	LOKA	100%	15.780.000	APBD
4	1	9	1	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	LOKA	12 Bulan	90.969.600	APBD
4	1	9	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		LOKA		7.405.000	APBD
4	1	9	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	LOKA	12 Bulan	4.405.000	APBD
4	1	9	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	LOKA	100%	3.000.000	APBD
					PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN				973.608.000	DAU
4	1	9	44		Program Peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan		LOKA		673.608.000	DAU
4	1	9	44	1	Pengadaan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Terlaksananya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	LOKA	100%	150.000.000	DAU
4	1	9	44	2	Pengadaan pembangunan pengembangan & pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi	Terlaksananya sarana dan prasarana Tranportasi	LOKA	100%	100.000.000	DAU
4	1	9	44	3	Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan	Terlaksananya sarana dan prasarana Kesehatan	LOKA	100%	350.000.000	DAU

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	1	9	44	4	Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan & Kebudayaan	LOKA	100%	73.608.000	DAU
4	1	9	45		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				300.000.000	DAU
4	1	9	45	1	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya pengembangan pelayanan Kesehatan Masyarakat	LOKA	12 Bulan	50.000.000	DAU
4	1	9	45	2	pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya pengembangan pelayanan pendidikan & Kebudayaan	LOKA	12 Bulan	50.000.000	DAU
4	1	9	45	3	pengelolaan kegiatan pengembangan usaha UMKM	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Kelompok UMKM	LOKA	12 Bulan	50.000.000	DAU
4	1	9	45	4	penguatan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Tanggap Bencana	LOKA	100%	50.000.000	DAU
4	1	9	45	5	pengelolaan kegiatan lembaga Masyarakat	Terlaksananya penguatan Kelembagaan Masyarakat	LOKA	12 Bulan	50.000.000	DAU
4	1	9	45	6	Pengelolaan kegiatan ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Terwujudnya Rasa Aman pada Masyarakat	LOKA	12 Bulan	50.000.000	DAU
4	1	9	5		KELURAHAN TANAH KONGKONG				1.167.994.400,00	
4	1	9	5		Belanja Lansung		T.KONGKONG		134.535.400	APBD
4	1	9	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		T.KONGKONG		111.315.400	APBD
4	1	9	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	T.KONGKONG	12 Bulan	3.600.000	APBD
4	1	9	1	7	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	T.KONGKONG	12 Bulan	13.500.000	APBD
4	1	9	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	T.KONGKONG	12 Bulan	6.000.000	APBD
4	1	9	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	T.KONGKONG	100%	6.520.000	APBD
4	1	9	1	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Terlaksananya penatausahaan kesekretariatan SKPD	T.KONGKONG	12 Bulan	81.695.400	APBD
4	1	9	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	T.KONGKONG		23.220.000	APBD
4	1	9	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	T.KONGKONG	100%	6.500.000	APBD
4	1	9	2	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya peralatan gedung kantor	T.KONGKONG	100%	10.500.000	APBD
4	1	9	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	T.KONGKONG	100%	3.200.000	APBD
4	1	9	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	T.KONGKONG	100%	420.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	1	9	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	T.KONGKONG	100%	2.600.000	APBD
					PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN				1.033.459.000	DAU
4	1	9	44		Program Peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan		T.KONGKONG		733.459.000	DAU
4	1	9	44	1	Pengadaan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Terlaksananya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	T.KONGKONG	100%	250.597.000	DAU
4	1	9	44	2	Pengadaan pembangunan pengembangan & pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi	Terlaksananya sarana dan prasarana Transportasi	T.KONGKONG	100%	135.862.000	DAU
4	1	9	44	3	Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan	Terlaksananya sarana dan prasarana Kesehatan	T.KONGKONG	100%	167.000.000	DAU
4	1	9	44	4	Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan & Kebudayaan	T.KONGKONG	100%	180.000.000	DAU
4	1	9	45		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				300.000.000	DAU
4	1	9	45	1	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya pengembangan pelayanan Kesehatan Masyarakat	T.KONGKONG	12 Bulan	75.000.000	DAU
4	1	9	45	2	pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya pengembangan pelayanan pendidikan & Kebudayaan	T.KONGKONG	12 Bulan	60.000.000	DAU
4	1	9	45	3	pengelolaan kegiatan pengembangan usaha UMKM	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Kelompok UMKM	T.KONGKONG	12 Bulan	75.000.000	DAU
4	1	9	45	4	penguatan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Tanggap Bencana	T.KONGKONG	100%	30.000.000	DAU
4	1	9	45	5	pengelolaan kegiatan lembaga Masyarakat	Terlaksananya penguatan Kelembagaan Masyarakat	T.KONGKONG	12 Bulan	30.000.000	DAU
4	1	9	45	6	Pengelolaan kegiatan ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Terwujudnya Rasa Aman pada Masyarakat	T.KONGKONG	12 Bulan	30.000.000	DAU
4	1	9	6		KELURAHAN BINTARORE				1.351.383.400,00	
4	1	9	6		Belanja Lansung		BINTARORE		127.930.400	APBD
4	1	9	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		BINTARORE		122.330.400	APBD
4	1	9	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Tagihan Rekening Listrik	BINTARORE	12 Bulan	3.600.000	APBD
4	1	9	1	7	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa pengelola keuangan	BINTARORE	12 Bulan	15.360.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	1	9	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	BINTARORE	12 Bulan	6.000.000	APBD
4	1	9	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa pihak ketiga	BINTARORE	100%	2.400.000	APBD
4	1	9	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BINTARORE	12 Bulan	10.490.000	APBD
4	1	9	1	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan SKPD	BINTARORE		84.480.400	APBD
4	1	9	6		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		BINTARORE	100%	5.600.000	APBD
4	1	9	6	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Meja rapat dan meja komputer beserta print	BINTARORE	100%	3.600.000	APBD
4	1	9	6	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Dinas /Operasional	BINTARORE	100%	2.000.000	APBD
					PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN				1.223.453.000	DAU
4	1	9	44		Program Peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan		BINTARORE		923.453.000	DAU
4	1	9	44	1	Pengadaan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Terlaksananya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	BINTARORE	100%	400.000.000	DAU
4	1	9	44	2	Pengadaan pembangunan pengembangan & pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi	Terlaksananya sarana dan prasarana Transportasi	BINTARORE	100%	200.000.000	DAU
4	1	9	44	3	Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan	Terlaksananya sarana dan prasarana Kesehatan	BINTARORE	100%	173.453.000	DAU
4	1	9	44	4	Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan & Kebudayaan	BINTARORE	100%	150.000.000	DAU
4	1	9	45		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				300.000.000	DAU
4	1	9	45	1	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya pengembangan pelayanan Kesehatan Masyarakat	BINTARORE	12 Bulan	75.000.000	DAU
4	1	9	45	2	pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya pengembangan pelayanan pendidikan & Kebudayaan	BINTARORE	12 Bulan	60.000.000	DAU
4	1	9	45	3	pengelolaan kegiatan pengembangan usaha UMKM	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Kelompok UMKM	BINTARORE	12 Bulan	75.000.000	DAU
4	1	9	45	4	penguatan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Tanggap Bencana	BINTARORE	100%	30.000.000	DAU
4	1	9	45	5	pengelolaan kegiatan lembaga Masyarakat	Terlaksananya penguatan Kelembagaan Masyarakat	BINTARORE	12 Bulan	30.000.000	DAU

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	1	9	45	6	Pengelolaan kegiatan ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Terwujudnya Rasa Aman pada Masyarakat	BINTARORE	12 Bulan	30.000.000	DAU
4	1	9	7		KELURAHAN CAILE				1.608.310.800,00	
4	1	9	7		Belanja Lansung		CAILE		130.035.800	APBD
4	1	9	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		CAILE		120.397.650	APBD
4	1	9	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya komunikasi,sumber daya air dan prasarana listrik	CAILE	12 Bulan	2.400.000	APBD
4	1	9	1	7	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Lancarnya pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan	CAILE	12 Bulan	8.690.000	APBD
4	1	9	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lancarnya kebersihan kantor	CAILE	12 Bulan	18.000.000	APBD
4	1	9	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya kegiatan perjalanan Dinas keluar Daerah	CAILE	100%	9.310.000	APBD
4	1	9	1	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	CAILE	12 Bulan	81.997.650	APBD
4	1	9	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		CAILE		9.638.150	APBD
4	1	9	2	10	Pengadaan peralatan gedung kantor	lancarnya kegiatan panrita siaga aktif	CAILE	100%	8.322.250	APBD
4	1	9	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lancarnya pelayanan Administrasi	CAILE	100%	1.315.900	APBD
					PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN				1.478.275.000	DAU
4	1	9	44		Program Peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan		CAILE	100%	1.178.275.000	DAU
4	1	9	44	1	Pengadaan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Terlaksananya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	CAILE	100%	428.275.000	DAU
4	1	9	44	2	Pengadaan pembangunan pengembangan & pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi	Terlaksananya sarana dan prasarana Transportasi	CAILE	100%	250.000.000	DAU
4	1	9	44	3	Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan	Terlaksananya sarana dan prasarana Kesehatan	CAILE	100%	250.000.000	DAU
4	1	9	44	4	Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan & Kebudayaan	CAILE	100%	250.000.000	DAU
4	1	9	45		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				300.000.000	DAU
4	1	9	45	1	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya pengembangan pelayanan Kesehatan Masyarakat	CAILE	12 Bulan	75.000.000	DAU

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	1	9	45	2	pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya pengembangan pelayanan pendidikan & Kebudayaan	CAILE	12 Bulan	60.000.000	DAU
4	1	9	45	3	pengelolaan kegiatan pengembangan usaha UMKM	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Kelompok UMKM	CAILE	12 Bulan	75.000.000	DAU
4	1	9	45	4	penguatan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Tanggap Bencana	CAILE	100%	30.000.000	DAU
4	1	9	45	5	pengelolaan kegiatan lembaga Masyarakat	Terlaksananya penguatan Kelembagaan Masyarakat	CAILE	12 Bulan	30.000.000	DAU
4	1	9	45	6	Pengelolaan kegiatan ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Terwujudnya Rasa Aman pada Masyarakat	CAILE	12 Bulan	30.000.000	DAU
4	1	9	8		KELURAHAN ELA-ELA				1.016.484.000,00	
4	1	9	8		Belanja Lansung		ELA ELA		93.205.000	APBD
4	1	9	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	ELA ELA		66.420.000	APBD
4	1	9	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	ELA ELA	12 Bulan	2.320.000	APBD
4	1	9	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	ELA ELA	12 Bulan	107.000	APBD
4	1	9	1	7	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	ELA ELA	12 Bulan	5.000.000	APBD
4	1	9	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	ELA ELA	100%	8.400.000	APBD
4	1	9	1	9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga/alat kebersihan	ELA ELA	12 Bulan	1.297.500	APBD
4	1	9	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	ELA ELA		11.290.000	APBD
4	1	9	1	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Terlaksananya penatausahaan kesekretariatan SKPD	ELA ELA	100%	38.005.500	APBD
4	1	9	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	ELA ELA	100%	26.785.000	APBD
4	1	9	2	2	Pengadaan motor dinas operasional	Tersedianya kendaraan roda dua	ELA ELA	100%	12.000.000	APBD
4	1	9	6	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	ELA ELA	100%	5.125.000	APBD
4	1	9	2	9	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	ELA ELA	100%	4.000.000	APBD
4	1	9	2	10	Pengadaan peralatan Meubeler	Tersedianya peralatan gedung kantor	ELA ELA	100%	1.000.000	APBD
4	1	9	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	ELA ELA	100%	1.650.000	APBD
4	1	9	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	ELA ELA	100%	1.560.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	1	9	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	ELA ELA	100%	1.450.000	APBD
					PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN				923.279.000	DAU
4	1	9	44		Program Peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan		ELA ELA		623.279.000	DAU
4	1	9	44	1	Pengadaan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Terlaksananya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	ELA ELA	100%	250.000.000	DAU
4	1	9	44	2	Pengadaan pembangunan pengembangan & pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi	Terlaksananya sarana dan prasarana Tranportasi	ELA ELA	100%	150.862.000	DAU
4	1	9	44	3	Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan	Terlaksananya sarana dan prasarana Kesehatan	ELA ELA	100%	120.000.000	DAU
4	1	9	44	4	Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan & Kebudayaan	ELA ELA	100%	102.417.000	DAU
4	1	9	45		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				300.000.000	DAU
4	1	9	45	1	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya pengembangan pelayanan Kesehatan Masyarakat	ELA ELA	12 Bulan	50.000.000	DAU
4	1	9	45	2	pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya pengembangan pelayanan pendidikan & Kebudayaan	ELA ELA	12 Bulan	50.000.000	DAU
4	1	9	45	3	pengelolaan kegiatan pengembangan usaha UMKM	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Kelompok UMKM	ELA ELA	12 Bulan	50.000.000	DAU
4	1	9	45	4	penguatan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Tanggap Bencana	ELA ELA	100%	50.000.000	DAU
4	1	9	45	5	pengelolaan kegiatan lembaga Masyarakat	Terlaksananya penguatan Kelembagaan Masyarakat	ELA ELA	12 Bulan	50.000.000	DAU
4	1	9	45	6	Pengelolaan kegiatan ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Terwujudnya Rasa Aman pada Masyarakat	ELA ELA	12 Bulan	50.000.000	DAU
4	1	9	9		KELURAHAN KALUMEME				1.410.229.000,00	
4	1	9	9		Belanja Lansung		KALUMEME		96.021.000	APBD
4	1	9	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	KALUMEME		84.839.000	APBD
4	1	9	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KALUMEME	12 Bulan	1.548.000	APBD
4	1	9	1	7	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	KALUMEME	12 Bulan	12.000.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	1	9	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	KALUMEME	12 Bulan	3.600.000	APBD
4	1	9	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KALUMEME	100%	9.355.000	APBD
4	1	9	1	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Terlaksananya penatausahaan kesekretariatan SKPD	KALUMEME	12 Bulan	58.336.000	APBD
4	1	9	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	KALUMEME		11.182.000	APBD
4	1	9	2	10	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	KALUMEME	100%	6.000.000	APBD
4	1	9	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	KALUMEME	100%	3.282.000	APBD
4	1	9	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	KALUMEME	100%	1.900.000	APBD
					PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN				1.314.208.000	DAU
4	1	9	44		Program Peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan				1.014.208.000	DAU
4	1	9	44	1	Pengadaan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Terlaksananya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	KALUMEME	100%	195.862.000	DAU
4	1	9	44	2	Pengadaan pembangunan pengembangan & pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi	Terlaksananya sarana dan prasarana Transportasi	KALUMEME	100%	600.000.000	DAU
4	1	9	44	3	Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan	Terlaksananya sarana dan prasarana Kesehatan	KALUMEME	100%	180.000.000	DAU
4	1	9	44	4	Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan & Kebudayaan	KALUMEME	100%	38.346.000	DAU
4	1	9	45		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				300.000.000	DAU
4	1	9	45	1	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya pengembangan pelayanan Kesehatan Masyarakat	KALUMEME	12 Bulan	60.000.000	DAU
4	1	9	45	2	pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya pengembangan pelayanan pendidikan & Kebudayaan	KALUMEME	12 Bulan	40.000.000	DAU
4	1	9	45	3	pengelolaan kegiatan pengembangan usaha UMKM	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Kelompok UMKM	KALUMEME	100%	55.000.000	DAU
4	1	9	45	4	penguatan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Tanggap Bencana	KALUMEME	100%	46.000.000	DAU
4	1	9	45	5	pengelolaan kegiatan lembaga Masyarakat	Terlaksananya penguatan Kelembagaan Masyarakat	KALUMEME	12 Bulan	42.000.000	DAU

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	1	9	45	6	Pengelolaan kegiatan ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Terwujudnya Rasa Aman pada Masyarakat	KALUMEME	12 Bulan	57.000.000	DAU
4	1	9	10		KELURAHAN TERANG - TERANG				893.833.850,00	
4	1	9	10		Belanja Lansung				123.007.850	APBD
4	1	9	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			105.072.850	APBD
4	1	9	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	TERANG.2	12 Bulan	11.400.000	APBD
4	1	9	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	TERANG.2	12 Bulan	150.000	APBD
4	1	9	1	7	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	TERANG.2	12 Bulan	13.320.000	APBD
4	1	9	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	TERANG.2	100%	9.000.000	APBD
4	1	9	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	TERANG.2	12 Bulan	12.550.000	APBD
4	1	9	1	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Terlaksananya penatausahaan kesekretariatan SKPD.	TERANG.2		58.652.850	APBD
4	1	9	10	2	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana perkantoran	TERANG.2	100%	17.935.000	APBD
4	1	9	2	9	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	TERANG.2	100%	5.000.000	APBD
4	1	9	2	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya peralatan gedung kantor	TERANG.2	100%	4.000.000	APBD
4	1	9	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	TERANG.2	100%	3.735.000	APBD
4	1	9	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	TERANG.2	100%	2.100.000	APBD
4	1	9	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	TERANG.2	100%	3.100.000	APBD
					PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN				770.826.000	DAU
4	1	9	44		Program Peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan				470.826.000	DAU
4	1	9	44	1	Pengadaan pembangunan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Terlaksananya sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	TERANG.2	100%	170.826.000	DAU
4	1	9	44	2	Pengadaan pembangunan pengembangan & pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi	Terlaksananya sarana dan prasarana Transportasi	TERANG.2	100%	100.000.000	DAU
4	1	9	44	3	Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan	Terlaksananya sarana dan prasarana Kesehatan	TERANG.2	100%	100.000.000	DAU

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	1	9	44	4	Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya sarana dan prasarana Pendidikan & Kebudayaan	TERANG.2	100%	100.000.000	DAU
4	1	9	45		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				300.000.000	DAU
4	1	9	45	1	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya pengembangan pelayanan Kesehatan Masyarakat	TERANG.2	12 Bulan	80.000.000	DAU
4	1	9	45	2	pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Terlaksananya pengembangan pelayanan pendidikan & Kebudayaan	TERANG.2	12 Bulan	60.000.000	DAU
4	1	9	45	3	pengelolaan kegiatan pengembangan usaha UMKM	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Kelompok UMKM	TERANG.2	100%	55.000.000	DAU
4	1	9	45	4	penguatan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana lainnya	Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia Tanggap Bencana	TERANG.2	100%	50.000.000	DAU
4	1	9	45	5	pengelolaan kegiatan lembaga Masyarakat	Terlaksananya penguatan Kelembagaan Masyarakat	TERANG.2	12 Bulan	50.000.000	DAU
4	1	9	45	6	Pengelolaan kegiatan ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Terwujudnya Rasa Aman pada Masyarakat	TERANG.2	12 Bulan	5.000.000	DAU
4	01	10	01		KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE				400.720.000,00	
4	01	10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			274.542.750,00	APBD.
4	01	10	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya kegiatan administrasi kantor	Kantor camat ujung loe	12 bulan	7.200.000,00	APBD.
4	01	10	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor camat ujung loe	4 unit	2.000.000,00	APBD.
4	01	10	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Meningkat pengelolaan administrasi keuangan	Kantor camat ujung loe	12 bulan	99.036.250,00	APBD.
4	01	10	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terawatnya kebersihan kantor	Kantor camat ujung loe	12 bulan	12.500.000,00	APBD.
4	01	10	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor camat ujung loe	12 bulan	86.206.000,00	APBD.
4	01	10	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Terpenuhinya ATK, makan minum rapat dan penggandaan	Kantor camat ujung loe	12 bulan	67.600.500,00	APBD.
4	01	10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur			81.177.250,00	APBD.
4	01	10	02	05	Pengadaan kendaraan dinas	Tersedianya fasilitas kantor	Kantor camat ujung loe	1 unit	34.000.000,00	
4	01	10	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Kantor camat ujung loe	3 jenis	14.041.000,00	APBD.

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	10	02	10	Pengadaan Mebeleur	Terciptanya kenyamanan kerja	Kantor camat ujung loe	2 jenis	11.481.250,00	APBD.
4	01	10	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kantor camat ujung loe	1 kali	2.750.000,00	APBD.
4	01	10	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terawatnya mobil jabatan	Kantor camat ujung loe	1 unit	11.706.500,00	APBD.
4	01	10	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kantor camat ujung loe	4 unit	4.063.500,00	APBD.
4	01	10	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kantor camat ujung loe	10 jenis	3.135.000,00	APBD.
4	01	10	20		Program Pembinaan Kecamatan	Meningkatnya Fasilitas Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan.			45.000.000,00	
4	01	10	20	01	Fasilitasi penataan dan pembinaan kecamatan dan kelurahan	Terlaksananya fasilitasi penataan dan pembinaan kecamatan dan kelurahan (Panrita Siaga Aktif, Kabupaten Sehat, Musrenbang dan pelaksanaan pengawasan ADD dan BDD	Kantor camat ujung loe	2 kegiatan	45.000.000,00	APBD
4	01	10			KELURAHAN DANNUANG				1.410.313.000,00	
4	01	10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				95.820.000,00	
4	01	10	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Dannuang	12 Bulan	4.800.000,00	APBD
4	01	10	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Dannuang	12 Bulan	16.520.000,00	APBD
4	01	10	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Dannuang	4 Unit	1.000.000,00	APBD
4	01	10	01	13	Penyediaan jasa kebersihan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Dannuang	12 Bulan	3.600.000,00	APBD
4	01	10	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelurahan Dannuang	12 Bulan	7.310.000,00	APBD
4	01	10	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Terlaksananya penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Kelurahan Dannuang	12 Bulan	62.590.000,00	APBD
4	01	10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				44.500.000,00	
4	01	10	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kelurahan Dannuang	6 buah	44.500.000,00	APBD
4	01	10			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	10		Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman				681.531.000,00	
4	01	10		Drainase/Selokan	Peningkatan sarana pembuangan air limbah dan air hujan	Kelurahan Dannuang	4 Paket	205.000.000,00	DAU/ APBD
4	01	10		Bak Sampah/Kontainer Sampah	Tersedianya tempat pembuangan sampah	Kelurahan Dannuang	2 Unit	100.000.000,00	DAU/ APBD
4	01	10		Sumur Bor	Peningkatan kebutuhan air saat kemarau	Kelurahan Dannuang	1 Unit	20.000.000,00	DAU/ APBD
4	01	10		Lampu Penerangan lingkungan pemukiman	Tersedianya lampu penerangan jalan	Kelurahan Dannuang	1 paket	6.531.000,00	DAU/ APBD
4	01	10		Sarana dan prasarana pemukiman lainnya	Peningkatan sarana prasarana lingkungan	Kelurahan Dannuang	2 paket	350.000.000,00	DAU/ APBD
4	01	10		Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi				251.462.000,00	
4	01	10		Jalan Pemukiman Rabat Beton dan Paving Blok	Lancarnya transportasi	Kelurahan Dannuang	2 paket	251.462.000,00	DAU/ APBD
4	01	10		Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan				55.000.000,00	
4	01	10		Pengecetan POSKESLU Dannuang	Tersedianya tempat pelayanan kesehatan	Kelurahan Dannuang	1 Paket	5.000.000,00	DAU/ APBD
4	01	10		Pembangunan Posyandu	Tersedianya Pos pelayanan terpadu	Kelurahan Dannuang	2 Unit	50.000.000,00	DAU/ APBD
4	01	10		Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan				100.000.000,00	
4	01	10		Pembangunan Tempat Pendidikan Al-Quran (TPA)	Tersedianya TPA	Kelurahan Dannuang	1 paket	100.000.000,00	DAU/ APBD
4	01	10		Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				182.000.000,00	
4	01	10		Stunting tambahan makanan dan vitamin	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan vitamin	Kelurahan Dannuang	12 Kali	25.000.000,00	DAU/ APBD
4	01	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kampung KB	Tersedianya fasilitas untuk rumah dataku	Kelurahan Dannuang	5 Unit	25.000.000,00	DAU/ APBD
4	01	10		Bantuan kegiatan karang taruna	Tersedianya bantuan karang taruna	Kelurahan Dannuang	2 Kali	10.000.000,00	DAU/ APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	10		Pelatihan Perbengkelan dan Pertukangan	Meningkatkan pengetahuan masyarakat	Kelurahan Dannuang	1 Unit	25.000.000,00	DAU/ APBD
4	01	10		Insentif satgas kebersihan	Tersedianya petugas kebersihan lingkungan	Kelurahan Dannuang	12 Bulan	24.000.000,00	DAU/ APBD
4	01	10		Sosialisasi prilaku hidup bersih dan sehat	Meningkatkan kesadaran masyarakat hidup sehat	Kelurahan Dannuang	1 Kali	5.000.000,00	DAU/ APBD
4	01	10		Insentif kader posyandu	Meningkatkan kinerja kader posyandu	Kelurahan Dannuang	12 Bulan	32.000.000,00	DAU/ APBD
4	01	10		Insentif imam masjid	Meningkatkan kesejahteraan imam Masjid	Kelurahan Dannuang	12 Bulan	24.000.000,00	DAU/ APBD
4	01	10		Insentif guru mengaji TPA	Meningkatkan kesejahteraan guru mengaji	Kelurahan Dannuang	12 Bulan	12.000.000,00	DAU/ APBD
4	01			KECAMATAN BULUKUMPA				382.220.000,00	
4	01	11	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Administrasi			267.303.280	
4	01	11	01	02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik	Kec. Bulukumpa	12 Bulan	11.040.000	APBD
4	01	11	01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Perizinan dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Kec. Bulukumpa	2 Unit	958.780	APBD
4	01	11	01	07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kec. Bulukumpa	12 Bulan	67.272.000	APBD
4	01	11	01	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	Kec. Bulukumpa	12 Bulan	18.000.000	APBD
4	01	11	01	12 Penyediaan Komponem Listerik dan penerangan kantor	Tersedianya instalasi jasa listerik		3 gedung	2.845.000	
4	01	11	01	14 Penyediaan peralatan rumah tangga			2 unit	2.974.000	
4	01	11	01	18 Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Kec. Bulukumpa	16 Kali	29.000.000	APBD
4	01	11	01	19 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Penatusahaan SKPD	Kec. Bulukumpa	12 Bulan	135.213.500	APBD
4	01	11	02	Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana			105.136.720	
4	01	11	02	05 Pengadaan kendaraan dinas oporasional	tersedianya kendaraan dinas oporasional	Kec. Bulukumpa	1 unit	29.000.000	APBD
4	01	11	02	07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor	Kec. Bulukumpa	2 Unit	5.995.000	APBD
4	01	11	02	09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kec. Bulukumpa	2 Unit	12.379.220	APBD
4	01	11	02	10 Pengadaan Mobiler	Tersedianya Mobiler kantor	Kec. Bulukumpa	100 buah	12.000.000	APBD
4	01	11	02	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksaanaya pemeliharaan gedung kantor	Kec. Bulukumpa	3 buah	30.487.500	APBD
4	01	11	02	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kec. Bulukumpa	12 Bulan	12.275.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	11	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kec. Bulukumpa	2 Unit	3.000.000	APBD
4	01	11	06		Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	Laporan Capaian Kinerja			9.780.000	
4	01	11	06	04	Penyusunan Pelaporan semesteran	Tersusunya Laporan Akhir Tahun	Kec. Bulukumpa	1 Dokumen	4.880.000	APBD
4	01	11	06	04	Penyusunan Pelaporan akhir tahun	Tersusunya Laporan Akhir Tahun	Kec. Bulukumpa	1 Dokumen	4.900.000	APBD
					KELURAHAN JAWI-JAWI				1.379.021.000,00	
4	01	11	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				76.620.000	
4	01	11	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik	Kel. Jawi-Jawi Kec. Bulukumpa	12 Bulan	6.876.000	APBD
4	01	11	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kel. Jawi-Jawi Kec. Bulukumpa	12 Bulan	8.742.000	APBD
4	01	11	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	Kec. Bulukumpa	12 Bulan	-	APBD
4	01	11	01	12	Penyediaan Komponem Listerik dan penerangan kantor	Tersedianya instalasi jasa listerik		1 gedung	-	
4	01	11	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga			2 unit	-	
4	01	11	01	18	Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Kec. Bulukumpa	16 Kali	8.000.000	APBD
4	01	11	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Penatusahaan SKPD	Kec. Bulukumpa	12 Bulan	53.002.000	APBD
4	01	11	02		Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	Bertambahnya Perlengkapan gedung kantor			12.500.000	
4	01	11	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor	Kel. Jawi-Jawi Kec. Bulukumpa	2 Unit	2.500.000	APBD
4	01	11	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kel. Jawi-Jawi Kec. Bulukumpa	2 Unit	6.000.000	APBD
4	01	11	02	10	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Mobiler kantor	Kel. Jawi-Jawi Kec. Bulukumpa	2 Unit	3.000.000	APBD
4	01	11	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan gedung kantor	Kel. Jawi-Jawi Kec. Bulukumpa	2 Unit	1.000.000	APBD
4	01	11	44		Program Penguatan Sarana dan Prasarana Kelurahan				798.921.000	
4	01	11	44	1	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	Kel. Jawi-Jawi Kec. Bulukumpa	2 Paket	328.700.000	APBD
4	01	11	44	2	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Kel. Jawi-Jawi Kec. Bulukumpa	2 Paket	386.421.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	11	44	3	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	Kel. Jawi-Jawi Kec. Bulukumpa	1 Paket	4.800.000	APBD
4	01	11	44	4	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Kel. Jawi-Jawi Kec. Bulukumpa	1 Paket	79.000.000	APBD
4	01	11	45		Program Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Keluraha			490.980.000	
4	01	11	45	1	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan masyarakat	Kel. Jawi-Jawi Kec. Bulukumpa	1 Paket	107.000.000	APBD
4	01	11	45	2	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Kel. Jawi-Jawi Kec. Bulukumpa	1 Paket	40.000.000	APBD
4	01	11	45	3	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kel. Jawi-Jawi Kec. Bulukumpa	1 Paket	100.180.000	APBD
4	01	11	45	4	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan kelembagaan Kemasyarakatan	Kel. Jawi-Jawi Kec. Bulukumpa	1 Paket	158.800.000	APBD
4	01	11	45	5	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Kel. Jawi-Jawi Kec. Bulukumpa	1 Paket	14.000.000	APBD
4	01	11	45	6	Pengelolaan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Terlaksananya Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Kel. Jawi-Jawi Kec. Bulukumpa	1 Paket	71.000.000	APBD
					KELURAHAN TANETE				1.318.021.000,00	
4	01	11	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Administrasi			67.970.000	
4	01	11	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	12 Bulan	6.660.000	APBD
4	01	11	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	12 Bulan	9.600.000	APBD
4	01	11	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	12 Bulan	6.000.000	APBD
4	01	11	01	18	Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	5 Kali	2.270.000	APBD
4	01	11	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Penatusahaan SKPD	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	12 Bulan	43.440.000	APBD
4	01	11	02		Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana			16.750.000	
4	01	11	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	2 Unit	7.500.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	11	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	2 Unit	2.250.000	APBD
4	01	11	02	10	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Mobiler kantor	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	2 Unit	6.000.000	APBD
4	01	11	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan gedung kantor	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	2 Unit	1.000.000	APBD
4	01	11	44		Program Penguatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan			717.836.000	
4	01	11	44	1	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	1 Paket	228.700.000	APBD
4	01	11	44	2	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	1 Paket	190.000.000	APBD
4	01	11	44	3	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	3 Paket	20.136.000	APBD
4	01	11	44	4	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	1 Paket	279.000.000	APBD
4	01	11	45		Program Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan			515.465.000	
4	01	11	45	1	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan masyarakat	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	1 Paket	107.000.000	APBD
4	01	11	45	2	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	1 Paket	140.000.000	APBD
4	01	11	45	3	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	1 Paket	107.042.000	APBD
4	01	11	45	4	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan kelembagaan Kemasyarakatan	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	1 Paket	98.064.000	APBD
4	01	11	45	5	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	1 Paket	14.000.000	APBD
4	01	11	45	6	Pengelolaan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Terlaksananya Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Kel. Tanete Kec.Bulukumpa	1 Paket	49.359.000	APBD
					KELURAHAN BALLASARAJA				1.110.127.000,00	
4	01	11	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Administrasi			75.570.000	

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
4	01	11	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa	12 Bulan	600.000	APBD
4	01	11	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa	12 Bulan	32.000.000	APBD
4	01	11	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa	12 Bulan	6.000.000	APBD
4	01	11	01	18	Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa	5 Kali	2.270.000	APBD
4	01	11	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Penatusahaan SKPD	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa	12 Bulan	34.700.000	APBD
4	01	11	02		Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana			20.750.000	
4	01	11	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa	1 Unit	6.000.000	APBD
4	01	11	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa	2 Unit	10.000.000	APBD
4	01	11	02	10	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Mobiler kantor	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa	2 Unit	3.250.000	APBD
4	01	11	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa	1 unit	1.500.000	APBD
4	01	11	44		Program Penguatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa		696.319.000	
4	01	11	44	1	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa	1 Paket	175.000.000	APBD
4	01	11	44	2	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa	2 Paket	271.319.000	APBD
4	01	11	44	3	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa	1 Paket	100.000.000	APBD
4	01	11	44	4	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa	1 Paket	150.000.000	APBD
4	01	11	45		Program Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan			317.488.000	
4	01	11	45	1	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan masyarakat	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa	1 Paket	59.200.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	11	45	2	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa	1 Paket	68.835.500	APBD
4	01	11	45	3	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa	1 Paket	108.452.500	APBD
4	01	11	45	4	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan kelembagaan Kemasyarakatan	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa	1 Paket	35.000.000	APBD
4	01	11	45	6	Pengelolaan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Terlaksananya Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Kel. Ballasaraja Kec. Bulukumpa	1 Paket	46.000.000	APBD
4	01	12	01		KANTOR KECAMATAN RILAU ALE				459.614.750,00	
4	01	11	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				330.021.750,00	
4	01	11	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik	Kec. Rilau Ale	12 Bulan	20.763.600	APBD
4	01	11	01		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lancarnya Tugas dan Pelayanan Masyarakat	Kec. Rilau Ale		800.000	APBD
4	01	11	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Perizinan dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Kec. Rilau Ale	2 Unit	947.500	APBD
4	01	11	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kec. Rilau Ale	12 Bulan	91.740.000	APBD
4	01	11	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	Kec. Rilau Ale	12 Bulan	14.400.000	APBD
4	01	11	01		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terciptanya Kenyamanan Kerja	Kec. Rilau Ale		6.150.000	APBD
4	01	11	01	12	Penyediaan Komponem Listrik dan penerangan kantor	Tersedianya instalasi jasa listerik	Kec. Rilau Ale	3 gedung	4.558.675	APBD
4	01	11	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga		Kec. Rilau Ale	2 unit	6.962.400	APBD
4	01	11	01	18	Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Kec. Rilau Ale	16 Kali	69.700.000	APBD
4	01	11	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Penatusahaan SKPD	Kec. Rilau Ale	12 Bulan	113.999.575	APBD
4	01	11	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				129.593.000,00	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	11	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kec. Rilau Ale	2 Unit	35.000.000	APBD
4	01	11	02	10	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Mobiler kantor	Kec. Rilau Ale	100 buah	68.443.000	APBD
4	01	11	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksanayanya pemeliharaan gedung kantor	Kec. Rilau Ale	3 buah	11.400.000	APBD
4	01	11	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kec. Rilau Ale	12 Bulan	14.750.000	APBD
4	01	11	06		Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	Laporan Capaian Kinerja			-	
4	01	11	06	04	Penyusunan Pelaporan semesteran	Tersusunya Laporan Akhir Tahun	Kec. Rilau Ale	1 Dokumen	-	APBD
4	01	11	06	04	Penyusunan Pelaporan akhir tahun	Tersusunya Laporan Akhir Tahun	Kec. Rilau Ale	1 Dokumen	-	APBD
4	01	12	02		Kelurahan Palampang				1.209.574.000,00	
4	01	11	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Administrasi			76.620.000,00	
4	01	11	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	12 Bulan	6.876.000	APBD
4	01	11	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	12 Bulan	8.742.000	APBD
4	01	11	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	12 Bulan	-	APBD
4	01	11	01	12	Penyediaan Komponem Listerik dan penerangan kantor	Tersedianya instalasi jasa listerik	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	1 gedung	-	
4	01	11	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga		Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	2 unit	-	
4	01	11	01	18	Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	16 Kali	8.000.000	APBD
4	01	11	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Penatusahaan SKPD	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	12 Bulan	53.002.000	APBD
4	01	11	02		Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana			12.500.000	
4	01	11	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	2 Unit	2.500.000	APBD
4	01	11	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	2 Unit	6.000.000	APBD
4	01	11	02	10	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Mobiler kantor	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	2 Unit	3.000.000	APBD
4	01	11	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan gedung kantor	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	2 Unit	1.000.000	APBD
4	01	11	44		Program Penguatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan			628.274.000	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	11	44	1	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	2 Paket	328.700.000	APBD
4	01	11	44	2	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	2 Paket	215.774.000	APBD
4	01	11	44	3	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	1 Paket	4.800.000	APBD
4	01	11	44	4	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	1 Paket	79.000.000	APBD
4	01	11	45		Program Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan			492.180.000	
4	01	11	45	1	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan masyarakat	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	1 Paket	107.000.000	APBD
4	01	11	45	2	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	1 Paket	40.000.000	APBD
4	01	11	45	3	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	1 Paket	100.180.000	APBD
4	01	11	45	4	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan kelembagaan Kemasyarakatan	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	1 Paket	160.000.000	APBD
4	01	11	45	5	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	1 Paket	14.000.000	APBD
4	01	11	45	6	Pengelolaan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Terlaksananya Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Kel. Palampang Kec. Rilau Ale	1 Paket	71.000.000	APBD
4	01	13	01		KANTOR KECAMATAN GANTARANG				433.339.750,00	
4	01	13	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Administrasi			332.855.900,00	
4	01	13	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik	Kec. Gantarang	12 Bulan	16.800.000	APBD
4	01	13	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Perizinan dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Kec. Gantarang	2 Unit	1.200.000	APBD
4	01	13	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kec. Gantarang	12 Bulan	44.826.250	APBD
4	01	13	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	Kec. Gantarang	12 Bulan	25.003.750	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	13	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Makassar, Jakarta	13 Kali	77.398.500	APBD
4	01	13	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Penatusahaan SKPD	Kec. Gantarang	12 Bulan	167.627.400	APBD
4	01	13	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			95.525.600,00	
4	01	13	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kec. Gantarang	1 unit	35.911.250	
4	01	13	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor	Kec. Gantarang	1 Unit	18.750.000	APBD
4	01	13	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kec. Gantarang	3 Unit	17.034.350	APBD
4	01	13	02	10	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Mobiler kantor	Kec. Gantarang	2 Unit	9.250.000	APBD
4	01	13	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kec. Gantarang	1 Unit	13.380.000	APBD
4	01	13	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kec. Gantarang	2 Unit	1.200.000	APBD
4	01	13	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Capaian Kinerja			4.958.250,00	
4	01	13	06	04	Penyusunan Pelaporan akhir tahun	Tersusunya Laporan Akhir Tahun	Kec. Gantarang	1 Dokumen	4.958.250	APBD
4	01	13	01		Kelurahan Matekko				1.125.384.000,00	
4	01	13	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Administrasi			61.920.000	
4	02	13	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik	Kel. Matekko Kec. Gantarang	12 Bulan	6.000.000	APBD
4	04	13	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kel. Matekko Kec. Gantarang	12 Bulan	12.840.000	APBD
4	05	13	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	Kel. Matekko Kec. Gantarang	12 Bulan	6.600.000	APBD
4	07	13	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Makassar, Jakarta	5 Kali	3.080.000	APBD
4	08	13	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Penatusahaan SKPD	Kel. Matekko Kec. Gantarang	12 Bulan	33.400.000	APBD
4	01	13	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			10.000.000,00	
4	01	13	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kel. Matekko Kec. Gantarang	2 Unit	3.675.000	APBD
4	01	13	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kel. Matekko Kec. Gantarang	2 Unit	2.700.000	APBD
4	01	13	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kel. Matekko Kec. Gantarang	2 Unit	2.625.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	13	02	28	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Kel. Matekko Kec. Gantarang	2 Unit	1.000.000	APBD
4	01	13	44		Program penguatan sarana dan prasarana Kelurahan	Meningkatnya sarana dan prasarana Kelurahan			793.249.000,00	
4	01	13	44	01	Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan pemukiman	Bertambahnya fasilitas sarana dan prasarana lingkungan kelurahan	Kel. Matekko Kec. Gantarang	2 Paket	432.944.000	APBD
4	01	13	44	2	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Kel. Matekko Kec. Gantarang	2 Paket	285.703.000	APBD
4	01	13	44	3	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	Kel. Matekko Kec. Gantarang	1 Paket	74.602.000	APBD
4	01	13	45		Program Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan			260.215.000,00	
4	01	13	45	1	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan masyarakat	Kel. Matekko Kec. Gantarang	1 Paket	142.400.000	APBD
4	01	13	45	2	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Kel. Matekko Kec. Gantarang	1 Paket	48.000.000	APBD
4	01	13	45	3	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kel. Matekko Kec. Gantarang	1 Paket	10.175.000	APBD
4	01	13	45	4	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan kelembagaan Kemasyarakatan	Kel. Matekko Kec. Gantarang	1 Paket	42.480.000	APBD
4	01	13	45	5	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Kel. Matekko Kec. Gantarang	1 Paket	10.800.000	APBD
4	01	13	45	6	Pengelolaan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Terlaksananya Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Kel. Matekko Kec. Gantarang	1 Paket	6.360.000	APBD
4	01	13	03		Kelurahan Jalanjang				1.511.355.000,00	
4	01	13	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Administrasi			80.515.000	
4	01	13	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik	Kel. Jalanjang Kec. Gantarang	12 Bulan	8.760.000	APBD
4	01	13	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kel. Jalanjang Kec. Gantarang	12 Bulan	12.840.000	APBD
4	01	13	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	Kel. Jalanjang Kec. Gantarang	12 Bulan	6.000.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	13	01	18	Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Kel. Jalanjang Kec. Gantarang	5 Kali	4.625.000	APBD
4	01	13	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Penatusahaan SKPD	Kel. Jalanjang Kec. Gantarang	12 Bulan	48.290.000	APBD
4	01	13	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana			5.325.000	
4	01	13	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kel. Jalanjang Kec. Gantarang	2 Unit	500.000	APBD
4	01	13	02	10	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Mobiler kantor	Kel. Jalanjang Kec. Gantarang	2 Unit	3.475.000	APBD
4	01	13	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan gedung kantor	Kel. Jalanjang Kec. Gantarang	2 Unit	1.350.000	APBD
4	01	13	44		Program Penguatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.225.100.000	
4	01	13	44	01	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	Kel. Jalanjang Kec. Gantarang	1 Paket	165.905.000	APBD
4	01	13	44	02	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Kel. Jalanjang Kec. Gantarang	1 Paket	186.980.000	APBD
4	01	13	44	03	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	Kel. Jalanjang Kec. Gantarang	3 Paket	772.585.000	APBD
4	01	13	44	04	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Kel. Jalanjang Kec. Gantarang	1 Paket	99.630.000	APBD
4	01	13	45		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan			200.415.000,00	
4	01	13	45	01	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan masyarakat	Kel. Jalanjang Kec. Gantarang	1 Paket	109.000.000	APBD
4	01	13	45	02	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Kel. Jalanjang Kec. Gantarang	1 Paket	28.800.000	APBD
4	01	13	45	03	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kel. Jalanjang Kec. Gantarang	1 Paket	15.000.000	APBD
4	01	13	45	04	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan kelembagaan Kemasyarakatan	Kel. Jalanjang Kec. Gantarang	1 Paket	29.115.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	13	45	05	Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Kel. Jalanjang Kec. Gantarang	1 Paket	11.100.000	APBD
4	01	13	45	06	Pengelolaan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Terlaksananya Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Kel. Jalanjang Kec. Gantarang	1 Paket	7.400.000	APBD
4	01	13	04		Kelurahan Mariorenu				1.482.613.000,00	
4	01	13	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Administrasi			67.020.000	
4	01	13	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik	Kel. Mariorenu Kec. Gantarang	12 Bulan	3.720.000	APBD
4	01	13	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kel. Mariorenu Kec. Gantarang	12 Bulan	14.100.000	APBD
4	01	13	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	Kel. Mariorenu Kec. Gantarang	12 Bulan	5.232.000	APBD
4	01	13	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Makassar, Jakarta	5 Kali	7.850.000	APBD
4	01	13	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Penatusahaan SKPD	Kel. Mariorenu Kec. Gantarang	12 Bulan	36.118.000	APBD
4	01	13	02		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana			12.280.000	
4	01	13	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor	Kel. Mariorenu Kec. Gantarang	1 Unit	3.500.000	APBD
4	01	13	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kel. Mariorenu Kec. Gantarang	2 Unit	2.750.000	APBD
4	01	13	02	10	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Mobiler kantor	Kel. Mariorenu Kec. Gantarang	2 Unit	4.500.000	APBD
4	01	13	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kel. Mariorenu Kec. Gantarang	2 Unit	1.530.000	APBD
4	01	13	44		Program Penguatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.156.730.500	
4	01	13	44	01	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	Kel. Mariorenu Kec. Gantarang	1 Paket	306.110.500	APBD
4	01	13	44	02	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Kel. Mariorenu Kec. Gantarang	2 Paket	685.290.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	13	44	03	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	Kel. Mariorenu Kec. Gantarang	1 Paket	145.330.000	APBD
4	01	13	44	04	Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Bertambahnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Kel. Mariorenu Kec. Gantarang	1 Paket	20.000.000	APBD
4	01	13	45		Program Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan			246.582.500	
4	01	13	45	01	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan masyarakat	Kel. Mariorenu Kec. Gantarang	1 Paket	160.887.500	APBD
4	01	13	45	02	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Kel. Mariorenu Kec. Gantarang	1 Paket	28.800.000	APBD
4	01	13	45	03	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kel. Mariorenu Kec. Gantarang	1 Paket	31.020.000	APBD
4	01	13	45	04	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan kelembagaan Kemasyarakatan	Kel. Mariorenu Kec. Gantarang	1 Paket	24.400.000	APBD
4	01	13	45	06	Pengelolaan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Terlaksananya Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Kel. Mariorenu Kec. Gantarang	1 Paket	1.475.000	APBD
4	01	14	01		KANTOR KECAMATAN KINDANG				348.325.000,00	
4	01	14	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Administrasi			258.450.000	
4	01	14	1	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	Kec.Kindang	12 Bulan	3.000.000	APBD
4	01	14	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/oprasional	Kec.Kindang	2 Unit	4.000.000	APBD
4	01	14	1	7	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan	Kec.Kindang	12 Bulan	60.250.000	APBD
4	01	14	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Lancarnya administrasi perkantoran	Kec.Kindang	12 Bulan	20.000.000	APBD
4	01	14	1	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terpenuhinya peralatan rumah tangga	Kec.Kindang	12 Bulan	4.200.000	APBD
4	01	14	1	18	Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Makassar, Jakarta	13 Kali	99.000.000	APBD
4	01	14	1	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Meningkatnya Kinerja	Kec.Kindang	12 Bulan	68.000.000	APBD
4	01	14	2		Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana			44.560.000	
4	01	14	2	7	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional	kanto camat Kindang	1 unit		APBD
4	01	14	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	kanto camat Kindang	2 UNIT	11.000.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	14	2	23	Pemeliharaan Rutin berkala mobil jabatan	Terawatnya mobil jabatan	kanto camat Kindang		11.400.000	APBD
4	01	14	2	24	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	kanto camat Kindang		10.160.000	APBD
4	01	14	2	28	Pemeliharaan Rutin berkala peralatan gedung kantor/Rumah Jabatan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	kanto camat Kindang		12.000.000,00	APBD
4	01	14	6		Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	Laporan Capaian Kinerja			4.000.000	
4	01	14	6	4	Penyusunan Pelaporan akhir tahun	Tersusunya Laporan Akhir Tahun	Kec. Kindang	1 Dokumen	4.000.000	APBD
4	01	14	32		Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan				41.315.000	
4	01	14	32	2	Pembinaan Aparatur kecamatan dan Kelurahan	Terwujudnya SDM Aparatur yang berkualitas	kanto camat Kindang		18.815.000	DAU
4	01	14	32	7	Penataan dan Pembinaan Aparatur kecamatan dan kelurahan	Terlaksananya Monitoring /Evaluasi program ADD /BDD dan Musrenbang di Desa	kanto camat Kindang		22.500.000	DAU
4	01	13	01		Kelurahan BORONGRAPPOA				1.662.101.000,00	
4	01	14	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Administrasi			297.101.000	
4	01	14	01	02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lancarnya proses persurtan SKPD	Kel. Borongrappoa		1.500.000	APBD
4	01	14	01	02	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kel. Borongrappoa	12 Bulan	2.200.000	APBD
4	01	14	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas	lancarnya operasional kendaraan dinas operasional	Kel. Borongrappoa	12 Bulan	1.300.000	APBD
4	01	14	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Punggug Jalan	lancarnya kendaraan lalintas daerah	Kel. Borongrappoa	12 Bulan	3.000.000	APBD
4	01	14	01	07	penyediaan jasa Adminietrasi Keuangan	Lancarnya administrasi Keuangan dan Aministrasi Kantor	Kel. Borongrappoa		62.700.000	APBD
4	01	14	01	08	penyediaa jasa kebersihan Kantor	terpenuhinya kebersihan Kantor	Kel. Borongrappoa	12 Bln	6.000.000	APBD
					Penyediaan Blangko SPPD	terpenuhinya Blangko-blangko Sppd	Kel. Borongrappoa		300.000	APBD
4	01	14	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Lancarnya penyelenggraan rapat2 koordinasi keluar daerah	Kel. Borongrappoa		50.552.000	APBD
4	01	14	01	07	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kel. Borongrappoa	1 Thn	112.749.000	APBD
4	01	14	01	05	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	meningkat sdm aparatur	Kel. Borongrappoa		28.000.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	14	32	07	Penguatan Peningkatan Kakapasitas Tenaga Keamanan	tercapainya keamanan da ketertiban	Kel. Borongrappoa		28.800.000	APBD
					dan Ketertiban	lingkungan				
					Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana			5.000.000	
4	01	14	02	24	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas	terpenuhinya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Kel. Borongrappoa		2.500.000	APBD
4	01	14	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan Gedunh Kantor	terpenuhinya pemeliharaan rutin Gedung Kantor	Kel. Borongrappoa		2.500.000	APBD
4	01	13	44		Program Penguatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.225.000.000	
					Rehab puskesmas menjadi Pustu (peningkatan status)	Lancarnya pelayanan	Kel. Borongrappoa	1 unit	100.000.000	APBD
					Pengadaan sarana Perkuburan Umum	terpenuhinya kebersihan lingkungan	Kel. Borongrappoa	1 Unit	100.000.000	APBD
4	01	14	44	03	Pembangunan Taluk / Drainase	lancarnya saluran air	Kel. Borongrappoa		200.000.000	APBD
					Pembangunan Batas Lingkungan/RT/RW	terlakasanya pembangunan batas lingkungan	Kel. Borongrappoa	4 Paket	10.000.000	APBD
4	01	14	44	02	Rabat Beton	meningkatnya sarana transportasi	Kel. Borongrappoa		245.000.000	
4	01	14	45	01	Pembangunan Jembatan /Dekker/Gorong-gorong	Terlaksananya Pembangunan jembatan dan dekker	Kel. Borongrappoa	15 buah	180.000.000	
4	01	14	44	01	Perintisan jalan	terpenuhinya keamanan kantor	Kel. Borongrappoa	1 Paket	100.000.000	
4	01	14	44	02	Perkerasan Jalan		Kel. Borongrappoa		100.000.000	
4	01	14	44	04	Pengadaan Sarana Pendidikan Usia Dini	terpenuhinya sarana pendidika usia dini	Kel. Borongrappoa	1 Paket	150.000.000	
4	01	14	45	04	Pemberdayaan Kelompok	lancarnya pelayanan masyarakat	Kel. Borongrappoa	2 klp	40.000.000	
4	01	13	45		Program Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan			85.000.000	
4	01	14	32	07	Pembinaan Keagamaan	meningkatnya pembinaan keagamaan	Kel. Borongrappoa	12 bln	45.000.000	APBD
4	01	14	32	07	Pembinaan Olah Raga	meningkatnya pembinaan Olah Raga	Kel. Borongrappoa	12 bln	25.000.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	14	32	07	Pembinaan LPMK	Meningkatnya permusyawaratan masyarakat	Kel. Borongrappoa	13 bln	15.000.000	APBD
					Urusan Kesehatan		Kel. Borongrappoa		50.000.000,00	
4	01	14	32	07	insentib Kader Posyandu	Terpenuhinya Insentib kader posyandu	Kel. Borongrappoa	12 Bln	50.000.000	DAU
4	01	15	01		KANTOR KECAMATAN HERLANG				360.912.000,00	
4	01	10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			216.012.000,00	APBD.
4	01	10	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya kegiatan administrasi kantor	Kantor camat Herlang	12 bulan	9.000.000,00	APBD.
4	01	10	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor camat Herlang	4 unit	1.700.000,00	APBD.
4	01	10	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Meningkat pengelolaan administrasi keuangan	Kantor camat Herlang	12 bulan	51.240.000,00	APBD.
4	01	10	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terawatnya kebersihan kantor	Kantor camat Herlang	12 bulan	15.000.000,00	APBD.
4	01	10	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor camat Herlang	12 bulan	1.500.000,00	
4	01	10	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor camat Herlang	12 bulan	66.660.000,00	APBD.
4	01	10	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Terpenuhinya ATK, makan minum rapat dan penggandaan	Kantor camat Herlang	12 bulan	70.912.000,00	APBD.
4	01	10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur			72.900.000,00	APBD.
4	01	10	02	05	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kantor camat Herlang	3 unit	10.000.000,00	
4	01	10	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Kantor camat Herlang	2 unit	2.500.000,00	APBD.
4	01	10	02	10	Pengadaan Mebeleur	Terciptanya kenyamanan kerja	Kantor camat Herlang	4 Buah	5.000.000,00	APBD.
4	01	10	02	22	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	Kantor camat Herlang	5 Set	1.000.000,00	APBD.
4	01	10	02	23	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kantor camat Herlang	4 unit	15.000.000,00	APBD.
4	01	10	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kantor camat Herlang	4 unit	5.000.000,00	APBD.

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	10	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kantor camat Herlang	14 Unit	10.000.000,00	APBD.
4	01	10	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor camat Herlang	12 bulan	24.400.000,00	
4	01	15	20		Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama dan kesra	Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan Keagamaan			4.000.000,00	
4	01	15	20	01	Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan STQ tingkat Propinsi	Terlaksananya MTQ dan STQ	Kantor camat Herlang	1 Tahun	4.000.000,00	
4	01	10	20		Program Pembinaan Kecamatan	Meningkatnya Fasilitas Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan.			68.000.000,00	
4	01	10	20	01	Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Kantor camat Herlang	1 Tahun	68.000.000,00	APBD
4	01	15	01		Kelurahan Tanuntung				1.345.578.000,00	
4	01	10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
4	01	10	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sarana Listrik di lingkup Kantor Berfungsi optimal	Kelurahan Tanuntung	12 Bulan	7.200.000,00	APBD
4	01	10	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kelurahan Tanuntung	12 Bulan	16.290.000,00	APBD
4	01	10	01	13	Penyediaan jasa kebersihan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kelurahan Tanuntung	12 Bulan	4.200.000,00	APBD
4	01	10	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Perjalanan Dinas	Kelurahan Tanuntung	12 Bulan	68.000.000,00	APBD
4	01	10	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Tanuntung	12 Bulan	88.910.000,00	APBD
4	01	10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				115.339.000,00	
4	01	10	02	10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Kelurahan Tanuntung	6 buah	40.000.000,00	APBD
4	01	10	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Kelurahan Tanuntung	1 Paket	10.339.000,00	
4	01	10	02	22	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Peralatan Mobiler	Kelurahan Tanuntung	3 Buah	35.000.000,00	
4	01	10	02	10	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Pagar Kantor	Kelurahan Tanuntung	1 Paket	15.000.000,00	
4	01	10	02		Pemeliharaan Peralatan Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor	Kelurahan Tanuntung	1 Paket	15.000.000,00	

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
4	01	10		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.170.239.000,00		
4	01	15	44	02	Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Terlaksananya Pengembangan Pembukaan & pengerasan jalan	Kelurahan Tanuntung	5 Paket	1.058.039.000,00	
4	01	15	44	03	Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Terlaksananya Pembangunan jamban keluarga	Kelurahan Tanuntung	15 Buah	62.200.000,00	
						Terlaksananya Pembangunan Kampung KB	Kelurahan Tanuntung	1 Unit	50.000.000,00	
4	01	10			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bontokamase			60.000.000,00		
4	01	15	45	01	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya pelatihan kader posyandu	Kelurahan Tanuntung	1 Tahun	15.000.000,00	DAU/ APBD
						Terlaksananya pelatihan kader bina keluarga (BKB)	Kelurahan Tanuntung	1 Tahun	17.500.000,00	
						Terlaksananya pelatihan pengurus PKK	Kelurahan Tanuntung	1 Tahun	17.500.000,00	
4	01	15	45	02	Pengelolaan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terlaksananya pelatihan LPMK	Kelurahan Tanuntung	2 Unit	10.000.000,00	DAU/ APBD
4	01	15	03		Kelurahan Bontokamase			1.332.692.000,00		
4	01	10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			114.160.000,00		
4	01	10	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sarana Listrik di lingkup Kantor Berfungsi optimal	Kelurahan Bonto Kamase	12 Bulan	960.000,00	APBD
4	01	10	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kelurahan Bonto Kamase	12 Bulan	16.290.000,00	APBD
4	01	10	01	13	Penyediaan jasa kebersihan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kelurahan Bonto Kamase	12 Bulan	4.200.000,00	APBD
4	01	10	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Perjalanan Dinas	Kelurahan Bonto Kamase	12 Bulan	2.710.000,00	APBD
4	01	10	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelurahan Bonto Kamase	12 Bulan	90.000.000,00	APBD
4	01	10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			74.832.000,00		
4	01	10	02	10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Kelurahan Bonto Kamase	6 buah	22.000.000,00	APBD
4	01	10	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Kelurahan Bonto Kamase	2 Unit	8.755.000,00	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	10	02	22	Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor	Kelurahan Bonto Kamase	1 Paket	5.000.000,00	
4	01	10	02	10	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Peralatan Mobiler	Kelurahan Bonto Kamase	3 Buah	14.077.000,00	
4	01	10	02		Pengadaan Pagar Kantor	Terlaksananya Pembangunan Pagar Kantor	Kelurahan Bonto Kamase	1 Paket	25.000.000,00	
4	01	10			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.096.200.000,00	
4	01	15	44	02	Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Terlaksananya Pengembangan Pembukaan & pengerasan jalan	Kelurahan Bonto Kamase	5 Paket	1.046.200.000,00	
4	01	15	44	03	Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Terlaksananya Pembangunan jamban keluarga	Kelurahan Bonto Kamase	25 Buah	50.000.000,00	
4	01					Terlaksananya Pembangunan Kampung KB	Kelurahan Bonto Kamase		0,00	
4	01	10			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bontokamase				47.500.000,00	
4	01	15	45	01	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya pelatihan kader posyandu	Kelurahan Bonto Kamase	1 Tahun	15.000.000,00	DAU/ APBD
4	01					Terlaksananya pelatihan kader bina keluarga (BKB)	Kelurahan Bonto Kamase	1 Tahun	7.500.000,00	
4	01					Terlaksananya pelatihan pengurus PKK	Kelurahan Bonto Kamase	1 Tahun	15.000.000,00	
4	01	15	45	02	Pengelolaan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Terlaksananya pelatihan LPMK	Kelurahan Bonto Kamase	2 Unit	10.000.000,00	DAU/ APBD
4	01	16	01		KANTOR KECAMATAN BONTOTIRO				355.969.000,00	
4	01	16	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			309.169.000	
4	01	16	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Rekening Telepon, Air dan Listrik Kantor	Kantor Camat Bontotiro	1 Tahun	18.000.000	APBD
4	01	16	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor Camat Bontotiro	1 Tahun	2.500.000	APBD
4	01	16	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Camat Bontotiro	1 Tahun	34.460.000	APBD
4	01	16	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kantor Camat Bontotiro	12 Bulan	12.000.000	APBD
4	01	16	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kantor Camat Bontotiro	1 Tahun	2.700.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	16	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kantor Camat Bontotiro	1 Tahun	55.395.000	APBD
4	01	16	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Tersedianya Jasa Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Kantor Camat Bontotiro	1 Tahun	184.114.000	APBD
4	01	16	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran			46.800.000	
4	01	16	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Camat Bontotiro	1 Paket	-	APBD
4	01	16	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Kantor Camat Bontotiro	2 Unit	10.000.000	APBD
4	01	16	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kantor Camat Bontotiro	2 Unit	18.500.000	APBD
4	01	16	02	10	Pengadaan meubeleu	Tersedianya meubeleu	Kantor Camat Bontotiro	50 Buah	-	APBD
4	01	16	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	Kantor Camat Bontotiro	1 Unit	-	APBD
4	01	16	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Suku Cadang, Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Operasional	Kantor Camat Bontotiro	6 Unit	18.300.000	APBD
4	01	16	02		Kelurahan Ekatiro				1.126.532.000,00	
4	01	16	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			96.447.000	
4	01	16	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Air dan Listrik Kantor	Kantor Lurah Ekatiro	1 Tahun	1.716.000	APBD
4	01	16	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor Lurah Ekatiro	1 Tahun	250.000	APBD
4	01	16	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Lurah Ekatiro	1 Tahun	10.440.000	APBD
4	01	16	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kantor Lurah Ekatiro	12 Bulan	5.400.000	APBD
4	01	16	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kantor Lurah Ekatiro	1 Tahun	1.600.000	APBD
4	01	16	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kantor Lurah Ekatiro	1 Tahun	1.570.000	APBD
4	01	16	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Tersedianya Jasa Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Kantor Lurah Ekatiro	1 Tahun	75.471.000	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
4	01	16	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran		8.753.000		
4	01	16	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kantor Camat Bontotiro	2 Unit	6.100.000	APBD
4	01	16	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Suku Cadang, Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Operasional	Kantor Lurah Ekatiro	2 Unit	2.653.000	APBD
4	01	16	44		Pembangunan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana		638.932.000		
4	01	16	44	01	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Kantor Lurah Ekatiro	2 Paket	236.932.000	APBD
4	01	16	44	02	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	Kantor Lurah Ekatiro	1 Paket	302.000.000	APBD
4	01	16	44	03	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Kantor Lurah Ekatiro	1 Paket	100.000.000	APBD
4	01	16	45		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		382.400.000		
4	01	16	45	01	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kantor Lurah Ekatiro	2 Paket	147.000.000	APBD
4	01	16	45	02	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Kantor Lurah Ekatiro	1 Paket	175.400.000	APBD
4	01	16	45	03	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Kantor Lurah Ekatiro	1 Paket	20.000.000	APBD
4	01	16	45	04	Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Terlaksananya kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kantor Lurah Ekatiro	1 Paket	40.000.000	APBD
4	01	17	01		KANTOR KECAMATAN BONTOBAHARI			381.000.000,00	APBD	
4	01	17	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		272.603.000		
4	01	17	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik	Kec. Bontobahari	12 Bulan	18.300.000	APBD
4	01	17	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Perizinan dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Kec. Bontobahari	100%	1.000.000	APBD
4	01	17	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kec. Bontobahari	12 Bulan	69.196.000	APBD
4	01	17	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	Kec. Bontobahari	12 Bulan	12.000.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	17	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Bontobahari	12 Bulan	2.928.500	APBD
4	01	17	01	18	Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Makassar, Jakarta	12 Bulan	72.643.000	APBD
4	01	17	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Penatusahaan SKPD	Kec. Bontobahari	12 Bulan	96.535.500	APBD
4	01	17	02		Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur			57.667.000	
4	01	17	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Peralatan kantor	Kec. Bontobahari	100%	18.350.000	APBD
4	01	17	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor	Kec. Bontobahari	100%	2.700.000	APBD
4	01	17	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kec. Bontobahari	100%	10.000.000	APBD
4	01	17	02	10	Pengadaan Mobiler	Tersedianya Mobiler kantor	Kec. Bontobahari	100%	12.400.000	APBD
4	01	17	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kec. Bontobahari	100%	7.892.000	APBD
4	01	17	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kec. Bontobahari	100%	3.225.000	APBD
4	01	17	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kec. Bontobahari	100%	3.100.000	APBD
4	01	17	20		Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama				6.000.000	
4	01	17	20	01	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Propiinsi	Terselenggaranya kegiatan keagamaan	Kec. Bontobahari	100%	6.000.000	APBD
4	01	17	32		Program Pembinaan Kecamatan				44.730.000	
4	01	17	32	07	Fasilitasi Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Terselenggaranya Fasilitasi penataan dan pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Bontobahari	100%	44.730.000	APBD
4	01				KELURAHAN TANAHBERU				1.005.556.000,00	
4	01	17	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			70.940.000	
4	01	17	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya surat menyurat dari perlengkapannya	Kel. Tanahberu	12 Bulan	315.000	APBD
4	01	17	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya pembayaran rekening air dan listrik kantor	Kel. Tanahberu	12 Bulan	2.400.000	APBD
4	01	17	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya biaya untuk penyelesaian Administrasi Keuangan	Kel. Tanahberu	12 Bulan		APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	17	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya pembayaran rekening air dan listrik kantor	Kel. Tanahberu	12 Bulan	2.400.000	APBD
4	01	17	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya biaya untuk penyelesaian Administrasi Keuangan	Kel. Tanahberu	12 Bulan	1.900.000	APBD
4	01	17	01	18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat pelatihan serta perjalanan lainnya.	Kel. Tanahberu	12 Bulan	19.152.000	APBD
4	01	17	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Tersedianya Anggaran Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Kel. Tanahberu	12 Bulan	44.773.000	APBD
4	01	17	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur			6.500.000	
4	01	17	02	07	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan Kantor Kelurahan	Kel. Tanahberu	100%	1.500.000	APBD
4	01	17	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Peralatan gedung kantor dalam lingkup Kelurahan Tanahberu	Kel. Tanahberu	100%	5.000.000	APBD
4	01	17	44		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				700.000.000	
4	01	17	44	01	Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan pemukiman	Terpenuhinya sarana dan prasarana masyarakat di kelurahan	Kel. Tanahberu	100%	200.000.000	APBD
4	01	17	44	02	Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan Transportasi	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung Transporasi	Kel. Tanahberu	100%	200.000.000	APBD
4	01	17	44	03	Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan Kesehatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan masyarakat di kelurahan	Kel. Tanahberu	100%	150.000.000	APBD
4	01	17	44	04	Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan masyarakat di kelurahan	Kel. Tanahberu	100%	150.000.000	APBD
4	01	17	45		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				228.116.000	
4	01	17	45	01	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Masyarakat	Kel. Tanahberu	100%	50.000.000	APBD
4	01	17	45	02	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Masyarakat	Kel. Tanahberu	100%	25.000.000	APBD
4	01	17	45	03	Pengelolaan Kegiatan Lembaga kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan Lembaga Masyarakat	Kel. Tanahberu	100%	75.000.000	APBD
4	01	17	45	04	Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Terlaksananya Kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kel. Tanahberu	100%	28.116.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	17	45	05	Pengelolaan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa	Kel. Tanahberu	100%	50.000.000	APBD
4 01					KELURAHAN TANAHLEMO				1.628.777.000,00	
4	01	17	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			92.250.000	
4	01	17	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik.	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Fasilitas Air dan Listrik	Kel. Tanahlemo	12 Bulan	2.160.000,00	APBD
4	01	17	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Tersedianya biaya untuk penyelesaian administrasi keuangan	Kel. Tanahlemo	12 Bulan	11.750.000,00	APBD
4	01	17	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	Kel. Tanahlemo	12 Bulan	3.000.000,00	APBD
4	01	17	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	Kel. Tanahlemo	12 Bulan	1.400.000,00	APBD
4	01	17	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah dapat terpenuhi	Kel. Tanahlemo	12 Bulan	13.471.000,00	APBD
4	01	17	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Tersedianya Anggaran Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Kel. Tanahlemo	12 Bulan	60.469.000,00	APBD
4	01	17	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur			7.750.000	
4	01	17	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor dalam lingkup Kelurahan Tanahlemo	Kel. Tanahlemo	100%	5.500.000	APBD
4	01	17	02	22	Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Kantor dalam lingkup Kelurahan	Kel. Tanahlemo	100%	2.250.000	APBD
4	01	17			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.148.421.000	
4	01	17	44	01	Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan pemukiman	Terpenuhinya sarana dan prasarana masyarakat di kelurahan	Kel. Tanahlemo	100%	523.421.000	APBD
4	01	17	44	02	Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan Transportasi	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung Transporasi	Kel. Tanahlemo	100%	250.000.000	APBD
4	01	17	44	03	Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan Kesehatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan masyarakat di kelurahan	Kel. Tanahlemo	100%	175.000.000	APBD
4	01	17	44	04	Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan masyarakat di kelurahan	Kel. Tanahlemo	100%	200.000.000	APBD
4	01	17	45		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				380.356.000	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	17	45	01	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Masyarakat	Kel. Tanahlemo	100%	75.000.000	APBD
4	01	17	45	02	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Masyarakat	Kel. Tanahlemo	100%	75.000.000	APBD
4	01	17	45	03	Pengelolaan Kegiatan Lembaga kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan Lembaga Masyarakat	Kel. Tanahlemo	100%	150.000.000	APBD
4	01	17	45	04	Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Terlaksananya Kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kel. Tanahlemo	100%	30.356.000,00	APBD
4	01	17	45	05	Pengelolaan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa	Kel. Tanahlemo	100%	50.000.000	APBD
4	01				KELURAHAN SAPOLOHE				1.332.743.000,00	
4	01	17	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			82.720.000	
4	01	17	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telpon dan listrik kantor	Kel. Sapolohe	12 Bulan	3.180.000	APBD
4	01	17	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan barang	Kel. Sapolohe	12 Bulan	9.960.000	APBD
4	01	17	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kel. Sapolohe	12 Bulan	2.400.000	APBD
4	01	17	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan kerja	Kel. Sapolohe	12 Bulan	1.000.000	APBD
4	01	17	01	18	Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Koordinasi keluar daerah berjalan dengan baik	Kel. Sapolohe	12 Bulan	10.331.000	APBD
4	01	17	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Kesekretariatan SKPD dengan lancar	Kel. Sapolohe	12 Bulan	55.849.000	APBD
4	01	17			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.042.823.000	
4	01	17	44	01	Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan pemukiman	Terpenuhinya sarana dan prasarana masyarakat di kelurahan	Kel. Sapolohe	100%	250.000.000	APBD
4	01	17	44	02	Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan Transportasi	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung Transporasi	Kel. Sapolohe	100%	522.311.500	APBD
4	01	17	44	03	Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan Kesehatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan masyarakat di kelurahan	Kel. Sapolohe	100%	78.000.000	APBD
4	01	17	44	04	Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan masyarakat di kelurahan	Kel. Sapolohe	100%	192.511.500	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	17	45		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				207.200.000	
4	01	17	45	01	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Masyarakat	Kel. Sapolohe	100%	35.000.000	APBD
4	01	17	45	02	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Masyarakat	Kel. Sapolohe	100%	25.000.000	APBD
4	01	17	45	03	Pengelolaan Kegiatan Lembaga kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan Lembaga Masyarakat	Kel. Sapolohe	100%	67.200.000	APBD
4	01	17	45	02	Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Terlaksananya Kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kel. Sapolohe	100%	30.000.000	APBD
4	01	17	45	03	Pengelolaan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa	Kel. Sapolohe	100%	50.000.000	APBD
4	01				KELURAHAN BENJALA				1.368.776.000,00	
4	01	17	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			84.780.000	
4	01	17	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik.	Tersedianya jasa belanja listrik	Kel. Benjala Kec. Bontobahari	12 Bulan	780.000,00	APBD
4	01	17	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Tersedianya pelayanan administrasi keuangan.	Kel. Benjala Kec. Bontobahari	12 Bulan	13.360.000,00	APBD
4	01	17	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan	Kel. Benjala Kec. Bontobahari	12 Bulan	2.400.000,00	APBD
4	01	17	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	jumlah perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki	Kel. Benjala Kec. Bontobahari	12 Bulan	1.400.000,00	APBD
4	01	17	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.	Terselenggaranya rapat koordinasi dan belanja perjalanan dinas pelaksanaan bintek diluar daerah	Kel. Benjala Kec. Bontobahari	12 Bulan	10.331.000,00	APBD
4	01	17	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	tersedianya ATK, pranko, penggandaan, dan barang cetakan.	Kel. Benjala Kec. Bontobahari	12 Bulan	56.509.000,00	APBD
4	01	17	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur			3.640.000	
4	01	17	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kel. Benjala Kec. Bontobahari	100%	3.640.000,00	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
4	01	17		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				900.000.000		
4	01	17	44	01	Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan pemukiman	Terpenuhinya sarana dan prasarana masyarakat di kelurahan	Kel. Benjala Kec. Bontobahari	100%	300.000.000	APBD
4	01	17	44	02	Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan Transportasi	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung Transporasi	Kel. Benjala Kec. Bontobahari	100%	300.000.000	APBD
4	01	17	44	03	Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan Kesehatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan masyarakat di kelurahan	Kel. Benjala Kec. Bontobahari	100%	150.000.000	APBD
4	01	17	44	04	Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan masyarakat di kelurahan	Kel. Benjala Kec. Bontobahari	100%	150.000.000	APBD
4	01	17	45		Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				380.356.000	
4	01	17	45	01	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Kesehatan Masyarakat	Kel. Benjala Kec. Bontobahari	100%	75.000.000	APBD
4	01	17	45	02	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Masyarakat	Kel. Benjala Kec. Bontobahari	100%	75.000.000	APBD
4	01	17	45	03	Pengelolaan Kegiatan Lembaga kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan Lembaga Masyarakat	Kel. Benjala Kec. Bontobahari	100%	150.000.000	APBD
4	01	17	45	04	Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Terlaksananya Kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Kel. Benjala Kec. Bontobahari	100%	30.356.000,00	APBD
4	01	17	45	05	Pengelolaan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa	Kel. Benjala Kec. Bontobahari	100%	50.000.000	APBD
4	01	18	01		KANTOR KECAMATAN KAJANG				3.222.874.000,00	
4	01	18	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			646.134.900,00	
4	01	18	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	Sarana listrik di lingkup kantor berfungsi optimal	Kajang	3 kantor	18.000.000,00	APBD
4	01	18	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Tersediaan pemeliharaan/perizinan kendaraan dinas	Kajang	12 Unit	3.650.000,00	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	18	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Tersedianya pengelola administrasi keuangan	Kajang	3 kantor	55.320.000,00	APBD
4	01	18	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kajang	3 kantor	36.000.000,00	APBD
4	01	18	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	Terselaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kajang	44 Kali	114.888.000,00	APBD
4	01	18	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tersedianya penatausahaan perkantoran dan musrembang adat dan musrembang anak	Kajang	3 kantor	418.276.900,00	APBD
4	01	18	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Parasarana Aparatur			224.691.100,00	
4	01	18	02	05	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kajang	4 Unit	71.822.500,00	APBD
4	01	18	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kajang	3 Unit	30.000.000,00	APBD
4	01	18	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kajang	6 Unit	74.000.000,00	APBD
4	01	18	02	10	Pengadaan Mobelur	Tersedianya peralatan kantor	Kajang	100 Buah	10.000.000,00	APBD
4	01	18	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	Tersediaan pemeliharaan/perizinan Kendaraan dinas	Kajang	1 Tahun	31.368.600,00	APBD
4	01	18	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Tersedianya pemeliharaan rutin perlatan Kantor	Kajang	14 Unit	7.500.000,00	APBD
4	01	18	44		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.300.225.500,00	
4	01	18	44	02	pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	Terlaksananya Diklat Pim III	Kajang	1 Tahun	2.300.225.500,00	APBD
4	01	18	45		Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat di kelurahan			51.822.500,00	
4	01	18	45		Pengelolaan kegiatan pengembangan usha mikro kecil dan menengah	Terlaksananya Pengelolaan kegiatan pengembangan usha mikro kecil dan menengah	Kajang	1 Tahun	51.822.500,00	
4	01	18	02		Kelurahan Tanah Jaya					
4	01	18	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran				
4	01	18	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				
4	01	18	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Tersediaan Pemeliharaan/Perizinan Ked.Dinas				
4	01	18	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan				
4	01	18	01	08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan				
4	01	18	01	18	Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Tersedianya Perjalanan dinas				
4	01	18	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Terlaksananya penatausahaan kesekretariatan SKPD.				

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	01	18	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur				
4	01	18	02	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya kendaraan Dinas			
4	01	18	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan Kantor			
4	01	18	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor			
4	01	18	02	10	Pengadaan Mobelur	Tersedianya Peralatan Kantor			
4	01	18	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dianas	Tersediaan Pemeliharaan/Perizinan Ked.Dinas			
4	01	18	43	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
4	01	18	43		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan			
4	01	18	43	44	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana prasarana kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan			
				Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
					Pengelolaan Kergiatan Pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah	tersedianya Pelatihan Pengelolaan Kegiatan pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah			
4	01	18	03	Kelurahan Laikang					
4	01	18	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran				
4	01	18	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			
4	01	18	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Tersediaan Pemeliharaan/Perizinan Ked.Dinas			
4	01	18	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan			
4	01	18	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor			
4	01	18	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			
4	01	18	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Terlaksananya penatausahaan kesekretariatan SKPD			
4	01	18	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur				
4	01	18	02	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya kendaraan Dinas			
4	01	18	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor			
4	01	18	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor			
4	01	18	02	10	Pengadaan Mebeleur	persentase pengadaan mobiler			
4	01	18	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Tersedianya Alat-Alat Motor			
1	02			Urusan Kesehatan					
1	02	18	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	02	18	16	18	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dasar				
1	02	18	25		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Meningkatnya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya				
1	02	18	25	05	Pembangunan Posyandu	Terlaksananya Pembangunan Posyandu				
4	01	18	43		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
					Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana prasarana kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan				
4	01	18			Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
4	01	18			Pengelolaan Kergiatan Pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah	tersedianya Pelatihan Pengelolaan Kegiatan pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah				
4	02				INSPEKTORAT DAERAH				7.737.400.000,00	
4	02	01	01		Program pelayanan administrasi perkantoran				1.034.453.750	
4	02	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulukumba	12 Bulan	-	APBD
4	02	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	Persen pelayanan jasa komunikasi dan listrik	Bulukumba	12 Bulan	46.800.000	APBD
4	02	01	01	06	Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ Oprasional	Persentase Terlaksananya tugas-tugas kedinasan	Bulukumba	12 Bulan	11.550.000	APBD
4	02	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persen jasa administrasi keuangan	Bulukumba	12 Bulan	366.409.000	APBD
4	02	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persen pelayanan jasa kebersihan kantor	Bulukumba	3 Orang	25.510.000	APBD
4	02	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persen pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja	Bulukumba	12 Bulan	12.100.000	APBD
4	02	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Persen Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulukumba	12 Bulan	476.000	APBD
4	02	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persen Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulukumba	12 Bulan	-	APBD
4	02	01	01	18	Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Persen Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulukumba	12 Bulan	317.496.500	APBD
4	02	01	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Persen Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Bulukumba	12 Bulan	254.112.250	APBD
4	02	01	02							
4	02	01	02	04	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				1.677.505.000	
4	02	01	02	05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persen Pengadaan peralatan gedung kantor	Bulukumba	34 Unit	408.051.000	APBD
4	02	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persen Pengadaan Perlengkapang gedung kantor	Bulukumba	-	30.000.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	02	01	02	09	Pengadaan Mobiler	Persentase Pengadaan Mobiler	Bulukumba	-	81.650.000	APBD
4	02	01	02	10	Pengadaan Mobil Jabatan	Persen kendaraan Jabatan Yang diadakan	Bulukumba	-	-	APBD
4	02	01	02	22	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Persen kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Bulukumba	3 Unit	-	APBD
4	02	01	02	23	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Persen bangunan kantor yang terpelihara	Bulukumba	1 Unit	25.404.000	APBD
4	02	01	02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Persen mobil jabatan yang dipelihara	Bulukumba	1 Unit	25.000.000	APBD
4	02	01	02	25	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Persen kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Bulukumba	15 Unit	87.400.000	APBD
4	02	01	02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan gedung Kantor	Persen Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan gedung Kantor	Bulukumba	-	10.000.000	APBD
4	02	01	02	27	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung Kantor	Persen Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung Kantor	Bulukumba	-	10.000.000	APBD
					Rehabilitasi gedung kantor	Persen Rehabilitasi gedung kantor	Bulukumba	1 Paket	1.000.000.000	APBD
4	02	01	02							
4	02	01	02	1	Program peningkatan disiplin aparatur				-	
4	02	01	02	09	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	persentase pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Bulukumba	-	-	APBD
4	02	01	02	10	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Bulukumba	-	-	APBD
4	02	01	06		Pengadaan pakaian olahraga	Persentase pakaian olahraga yang diadakan	Bulukumba	-	-	APBD
4	02	01	06	01						
4	02	01	06	02	Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.				7.872.000	
4	02	01	06	03	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Bulukumba	-	7.872.000	APBD
4	02	01	06	04	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP)	Jumlah dokumen laporan Akuntabilitas Kinerja	Bulukumba	-	-	APBD
4	02	01	06	05	Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan Semesteran	Bulukumba	-	-	APBD
4	02	01	05		Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen laporan Renstra	Bulukumba	-	-	APBD
4	02	01	05	01	Penyusunan rencana kinerja tahunan	Jumlah Dokumen laporan Rencana Kerja Tahunan	Bulukumba	-	-	APBD
4	02	01	20							
4	02	01	20	01	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				1.206.220.000	
4	02	01	20	02	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen aparat pengawas mengikuti Diklat Formal	Bulukumba	39 Org	1.206.220.000	APBD
4	02	01	20	03						

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	02	01	20	04	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				3.811.349.250	
4	02	01	20	05	Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala	Pemberian opini dari BPK atas laporan keuangan OPD	Bulukumba	12 Bulan	1.381.810.000	APBD
4	02	01	20	06	Penangan kasus pengaduan Masyarakat kab. Bulukumba	Berkurangnya Jumlah Penangan kasus pengaduan dilingkup Pemkab Bulukumba	Bulukumba	12 Bulan	236.050.000	APBD
4	02	01	20	07	Pengawasan khusus pada wilayah pemerintah dibawahnya	Jumlah Pengawasan khusus pada wilayah pemerintah dibawahnya	Bulukumba	12 Bulan	1.091.200.000	APBD
4	02	01	20	xx	Tindak Lanjut Hasil temuan pengawasan	Persentase penyelesaian temuan hasil pengawasan	Bulukumba	12 Bulan	108.170.000	APBD
4	02	01	20	xx	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Prosentase Koordinasi pengawasan diantara APIP	Bulukumba	12 Bulan	374.397.250	APBD
4	02	01	20	xx	Pemutahiran data tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	persentase Terlaksananya pemutahiran data tindak lanjut temuan pengawasan	Bulukumba	12 Bulan	95.058.000	APBD
4	02	01	20	xx	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)	Persentase Terlaksananya penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Bulukumba	12 Bulan	378.885.000	APBD
					Maturitras Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terpenuhinya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3	Bulukumba	12 Bulan	87.810.000	APBD
					Sinergitas APIP dan APH	Terciptanya koordinasi pengawasan antara APIP dan APH	Bulukumba	12 Bulan	57.969.000	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
4	03			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				6.150.288.379,00		
4	03	1	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik			750.366.379		
4	03	1	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik Kantor Bappeda Pada 2 Rekening Listrik	Bappeda	12 Bln	140.000.000	APBD
4	03	1	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Perelatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda	12 Bln	7.500.000	APBD
4	03	1	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	Bappeda	2 Unit	3.000.000	APBD
4	03	1	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Pelayanan administrasi keuangan kantor Bappeda	Bappeda	12 Bln	124.680.000	APBD
4	03	1	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Pelayanan jasa kebersihan kantor Bappeda	Bappeda	12 Bln	24.000.000	APBD
4	03	1	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja	Bappeda	30 Unit	7.500.000	APBD
4	03	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	Bappeda	1 Paket	5.000.000	APBD
4	03	1	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Bappeda	1 Paket	15.000.000	APBD
4	03	1	01	18	Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bappeda	108 Kali	250.000.000	APBD
4	03	1	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Pelayanan jasa kesekretariatan kantor	Bappeda	1 Paket	173.686.379	APBD
4	03	1	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.214.821.000		
4	03	1	02	04	Pengadaan mobil jabatan	Tersedianya Pengadaan Mobil Jabatan Eselon II	Bappeda	1 Unit	400.000.000	APBD
4	03	1	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Motor Dinas Eselon IV	Bappeda	2 Unit	50.000.000	APBD
4	03	1	02	09	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan AC 1 PK	Bappeda	2 Unit	12.500.000	APBD
						Tersedianya Pengadaan AC 2 PK	Bappeda	2 Unit	12.500.000	APBD
4	03	1	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Monitor Vidio Wall 2x2 & Komputer Pc All In One	Bappeda	1 Paket	391.759.000	APBD
						Tersedianya Pengadaan Printer	Bappeda	4 Buah	11.440.000	APBD
						Tersedianya Pengadaan Laptop	Bappeda	4 Buah	52.372.000	APBD
						Tersedianya Pengadaan Mic	Bappeda	10 Buah	4.250.000	APBD
4	03	1	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Meja Pejabat Eselon III	Bappeda	1 Buah	6.775.000	APBD
						Tersedianya Kursi Tamu eselon III	Bappeda	1 Set	10.625.000	APBD
						Tersedianya Kursi untuk Data Center	Bappeda	6 Buah	12.600.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	03	1	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pengecatan Gedung Kantor & Pagar	Bappeda	1 Paket	7.500.000	APBD
						Perbaikan Plapon,Sekat Ruangan, Pentilasi dan Atap		1 Paket	7.500.000	APBD
						Perbaikan Jendela,Pintu Ruangan		1 Paket	5.000.000	APBD
						Pemeliharaan AC		22 Buah	5.000.000	APBD
4	03	1	02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat	Bappeda	2 Unit	25.000.000	APBD
4	03	1	02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara kondisinya	Bappeda	1 Paket	10.000.000	APBD
4	03	1	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi ruangan kantor Bappeda	Bappeda	1 Paket	190.000.000	APBD
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Sumberdaya Manusia Aparatur Bappeda			44.250.000	
4	03	1	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya Biaya DiklatPim Tk.III Bagi Pejabat Eselon III Bappeda	Bappeda	2 Orang	44.250.000	APBD
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terciptanya akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pada OPD Bappeda Kab. Bulukumba			1.500.000	
4	03	1	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Bappeda	1 Dok	1.500.000	APBD
					Program pengembangan data/ informasi				248.000.000	
4	03	1	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Bappeda	12 Bulan	124.000.000	APBD
4	03	1	15	05	Penyusunan profil daerah	Tersusunnya Buku Profil Daerah Kab.Bulukumba Tahun 2021	Bappeda	12 Bulan	124.000.000	APBD
					Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terwujudnya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			220.000.000	
4	03	1	18	01	Sosialisasi Kebijakan pemerintah dalam Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		Bappeda	1 Paket	220.000.000	APBD
								1 Dok		
						Tersedianya data Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Bulukumba		1 Dok		
						Terlaksananya keterpaduan program strategis Kabupaten, Propinsi dan Pusat		1 Paket		

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
						Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Bulukumba		1 Paket		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK)		1 Paket		
4	03	1	19		Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan kota serta kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik			660.000.000	
4	03	1	19	13	Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah	Terlaksananya koordinasi perencanaan prasarana wilayah, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika	Bappeda	1 Paket	220.000.000	APBD
4	03	1	19	14	Koordinasi Perencanaan Program Pengembangan Sumber Daya Pengairan dan Pembinaan Program PISP	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan program pengembangan sumber daya pengairan dan Pembinaan Program PISP	Bappeda	1 Paket	220.000.000	APBD
4	03	1	19	20	Koordinasi perencanaan pertanahan, perumahan dan permukiman	Terlaksananya koordinasi perencanaan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan	Bappeda	1 Paket	220.000.000	APBD
						Terlaksananya koordinasi perencanaan pamsimas dan sanimas		1 Paket		
						Terlaksananya koordinasi perencanaan penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat (PLKSDA-BM)		1 Paket		
						Terlaksananya percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)		1 Paket		
4	03	1	20		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Aparat Perencana di Bappeda Kab.bulukumba			106.351.000	
4	03	1	20	01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Aparat Perencana Pada OPD Bappeda Kab.Bulukumba	Bappeda	2 Kali	106.351.000	
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah			1.568.000.000	
4	03	1	21	01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah dokumen KUA dan PPAS Kabupaten	Bappeda	2 Dok	184.000.000	APBD
						Jumlah dokumen KUA-P dan PPAS-P Kabupaten	Bappeda	2 Dok		

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	03	1	21	05	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD Kab. Bulukumba Tahun 2022-2026	Bappeda	1 Dok	184.000.000	APBD
4	03	1	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Dokumen RKPD melalui Musrenbang guna mendapatkan dan menyusun program dan kegiatan prioritas tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Bappeda	1 Dok	186.000.000	APBD
						Terlaksananya Perencanaan Berbasis Elektronik (E-Planning) di Kabupaten Bulukumba	Bappeda	1 Paket		
4	03	1	21	11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	tersedianya laporan pemerintah daerah dan perjanjian kinerja pemerintah kabupaten bulukumba	Bappeda	2 Dok	184.000.000	APBD
4	03	1	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Bappeda	4 Dok	184.000.000	APBD
4	03	1	21	14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Bappeda	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA Bappeda Tahun 2020	Bappeda	2 Dok	58.000.000	APBD
						Tersedianya Dokkumen RKAP dan DPAP Bappeda Tahun 2020		2 Dok		
						Tersedianya Dokumen Renja Bappeda Tahun 2020		1 Dok		
						Tersedianya Dokumen LAKIP Bappeda Tahun 2018 dan PK 2019		2 Dok		
						Tersedianya Laporan Monitoring Bulanan Bappeda Kab. Bulukumba		12 Dok		
						Tersedianya Dokumen LPPD Bappeda T.A. 2019		1 Dok		
						Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi SAKIP Bappeda T.A. 2019		1 Dok		
4	03	1	21	15	Penyelenggaraan Pembangunan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dan dekonsentrasi	Bappeda	4 Dok	184.000.000	APBD
4	03	1	21	20	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD 2021-2026	Bappeda	1 Dok	220.000.000	APBD
4	03	1	21	23	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020	Bappeda	4 Dok	184.000.000	APBD
						Jumlah Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020		1 Dok		

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
					Program perencanaan pembangunan ekonomi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi			497.000.000	
4	03	1	22	13	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan	Terlaksananya Rapat koordinasi perencanaan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan	Bappeda	12 Bulan	125.000.000	APBD
						Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi perencanaan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan				
4	03	1	22	14	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang penanaman modal dan tenaga kerja	Terlaksananya Rapat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Bappeda	12 Bulan	124.000.000	APBD
						Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja di Provinsi dan Pusat				
4	03	1	22	15	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bappeda	12 Bulan	124.000.000	APBD
4	03	1	22	16	Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Laporan Realisasi DBH CHT Kabupaten Bulukumba	Bappeda	12 Bulan	124.000.000	APBD
4	03	1	23		Program perencanaan sosial dan budaya	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya			840.000.000	
4	03	1	23	08	Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan DBH Pajak Rokok	Terlaksananya kegiatan koordinasi, fasilitasi dan asistensi penggunaan DBH pajak rokok	Bappeda	1 Paket	105.000.000	APBD
4	03	1	23	12	Program Kabupaten/Kota Sehat	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, dan Pembinaan program kabupaten Sehat di semua tingkatan wilayah	Bappeda	1 Paket	105.000.000	APBD
						Terlaksananya Verifikasi dan fasilitasi Program Kabupaten Kota Sehat tingkat Provinsi dan Nasional		1 Paket		
						Terlaksananya rapat koordinasi program kabupaten/kota sehat		3 kali		
4	03	1	23	13	Koordinasi dan Fasilitasi Kelompok Kerja Penurunan AKI dan AKB	Terlaksananya kegiatan pertemuan Kelompok Kerja Penurunan AKI dan AKB tiga bulanan di Kab. Bulukumba	Bappeda	1 Paket	105.000.000	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
						Terlaksananya rapat koordinasi capaian kinerja penurunan AKI dan AKB Kab. Bulukumba		2 kali		
4	03	1	23	14	Koordinasi penyusunan laporan pencapaian SDG's 2018 2022	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi terkait pencapaian SDG's 2018-2021	Bappeda	1 Paket	105.000.000	APBD
						Terlaksananya Penyusunan laporan capaian Pembangunan Berkelanjutan SDG's 2016-2021		1 Dok		
4	03	1	23	15	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan arsip	Terlaksananya Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga, perpustakaan dan arsip	Bappeda	1 Paket	105.000.000	APBD
4	03	1	23	16	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan KB	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang Kesehatan.	Bappeda	1 Paket	105.000.000	APBD
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten Bulukumba		1 Paket		
						Terlaksananya Rapat Koordinasi Program Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten Bulukumba		2 kali		
4	03	1	23	17	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, kependudukan dan catatan sipil dan pembangunan desa	Terlaksananya Rapat dan Koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan.	Bappeda	1 Paket	105.000.000	APBD
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi lapangan Dana Kelurahan di Kab. Bulukumba		1 Paket		
4	03	1	23	20	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya penyusunan Dokumen Laporan Kinerja dan LP2KD,SPKD, Laporan Kinerja	Bappeda	3 Dok	105.000.000	APBD
						Terlaksananya Rapat Koordinasi per semester TKPKD		2 kali		
						Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Kemiskinan		1 kali		
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi lapangan program penanggulangan Kemiskinan		1 Paket		

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	04				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				6.801.710.450,00	DAU
4	04	02	01		Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran				1.464.382.789,00	DAU
4	04	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulukumba		144.858.689,00	DAU
4	04	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulukumba	17 STNK	10.600.000,00	DAU
4	04	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulukumba	12 Bulan	707.718.650,00	DAU
4	04	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulukumba	6 Orang	84.600.000,00	DAU
4	04	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulukumba	1 Paket	44.097.500,00	DAU
4	04	02	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulukumba	1 Paket	6.517.500,00	DAU
4	04	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulukumba	12 Bulan	1.020.000,00	DAU
4	04	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulukumba	12 Bulan	187.997.950,00	DAU
4	04	02	01	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Bulukumba	1 Tahun	276.972.500,00	DAU
4	04	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				315.876.880,00	DAU
4	04	02	02	04	<i>Pembangunan Gedung kantor</i>	<i>Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor dan Gudang Aset</i>	Bulukumba	1 Paket	-	DAU
4	04	02	02	05	Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedia Tersedianya Mobil Jabatan	Bulukumba	1 Unit	-	DAU
4	04	02	02	06	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedia Kendaraan Dinas Operasional	Bulukumba	2 Unit	49.500.000,00	DAU
4	04	02	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedia Perlengkapan Gedung Kantor	Bulukumba	2 Unit	150.000.000,00	DAU
4	04	02	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Bulukumba	4 Unit	30.000.000,00	DID
4	04	02	02	10	Pengadaan Mobileur	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Bulukumba	22 Buah	40.000.000,00	DAU
4	04	02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Bulukumba	1 Paket	-	DAU
4	04	02	02	23	Pemeliharaan Rutin/ berkala mobil jabatan	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Bulukumba	1 Unit	10.216.480,00	DAU
4	04	02	02	24	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 pada BPKD Kab. Bulukumba	Bulukumba	23 Unit	16.953.400,00	DAU

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	04	02	02	26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Bulukumba	1 Tahun	7.847.000,00	DAU
4	04	02	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Bulukumba	18 Unit	11.360.000,00	DAU
4	04	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				48.805.000,00	DAU
4	04	02	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kedisiplinan Aparat Lingkup BPKD	Bulukumba	1 Orang	22.125.000,00	DAU
4	04	02	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	Bulukumba	6 Orang	26.680.000,00	DAU
4	04	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				107.943.814,00	DAU
4	04	02	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan LKIP BPKD Kab. Bulukumba	Bulukumba	1 Dokumen	1.000.000,00	DAU
4	04	02	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan SKPD	Bulukumba	1 Dokumen	9.613.000,00	DAU
4	04	02	06	05	Penyusunan Program Kerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan BPKD	Bulukumba	4 Dokumen	68.525.614,00	DAU
4	04	02	06	06	Penatausahaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian BPKD	Bulukumba	12 Bulan	3.805.200,00	DAU
4	04	02	06	07	Monitoring Evaluasi Program Kegiatan SKPD	Terwujudnya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKD	Bulukumba	1 Dokumen	25.000.000,00	DAU
4	04	02	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				3.775.693.317,00	DAU
4	04	02	17	01	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Tersedianya analisa standar belanja sebagai pedoman penyusunan anggaran	Bulukumba	1 Dokumen	61.500.000,00	DAU
4	04	02	17	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersedianya Pedoman Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Lingkup Pemkab Bulukumba Semester 1 dan 2	Bulukumba	2 Dokumen	85.968.000,00	DAU
4	04	02	17	04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengendalian dan Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah OPD	Bulukumba	1 Tahun	47.407.500,00	DAU
4	04	02	17	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Terlaksananya Penyusunan Perda APBD Tahun 2020 dan Tersedianya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bulukumba	Bulukumba	1 Ranperda	183.600.000,00	DAU
4	04	02	17	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya Penyusunan Perbup Penjabaran APBD Tahun 2020 dan Tersedia Dokumen Perbup tentang Penjabaran APBD	Bulukumba	1 Ranperbup	188.139.500,00	DAU

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	04	02	17	08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020	Bulukumba	1 Ranperda Perubahan	265.274.000,00	DAU
4	04	02	17	09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Penyusunan Perbup Penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020	Bulukumba	1 Ranperbup Perubahan	280.219.000,00	DAU
4	04	02	17	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bulukumba	Bulukumba	1 Perda Pertanggungjawaban	41.644.900,00	DAU
4	04	02	17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bulukumba	Bulukumba	1 Perbup Pertanggungjawaban	100.452.250,00	DAU
4	04	02	17	13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengetahuan SDM operator SIMDA pelaporan keuangan SKPD Sekabupaten Bulukumba	Bulukumba	1 Kali	53.266.350,00	DAU
4	04	02	17	14	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengetahuan SDM Penatausahaan Laporan SKPD Lingkup Kab. Bulukumba	Bulukumba	1 Kali	36.151.750,00	DAU
4	04	02	17	15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengetahuan SDM dalam Penerapan Aplikasi Simda Keuangan Kab. Bulukumba dan Meningkatkan kapasitas SDM bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pemerintahan yang lebih Baik	Bulukumba	2 Kali	394.520.000,00	DAU
4	04	02	17	16	Sosialisasi/ Bimtek Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Meningkatnya SDM pada penyusunan laporan pertanggungjawaban SKPD	Bulukumba	1 Kali	27.383.050,00	DAU
4	04	02	17	20	Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan Daerah	Terwujudnya Penganggaran APBD Serta Pelaksanaanya	Bulukumba	12 Bulan	462.530.850,00	DAU
4	04	02	17	21	Penatausahaan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan akuntansi keuangan daerah	Bulukumba	1 Tahun	123.224.500,00	DAU
4	04	02	17	22	Penatausahaan Adm. Kas Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Kas Daerah yang Tertib	Bulukumba	1 Tahun	119.635.300,00	DBH-PR
4	04	02	17	23	Penatausahaan Adm. Gaji PNS	Terlaksananya Administrasi Gaji PNS daerah Pemerintah Daerah Kab. Bulukumba	Bulukumba	12 Bulan	169.398.650,00	DAU
4	04	02	17	24	Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Terlaksananya Pengendalian dan peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020	Bulukumba	1 Tahun	143.036.155,00	DAU
4	04	02	17	30	Penatausahaan Adm. Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru	Terwujudnya Tunjangan Profesi Guru Kab. Bulukumba	Bulukumba	1 Tahun	16.611.750,00	DAU
4	04	02	17	31	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah	Tersedianyan data laporan realisasi semester I APBD Kabupaten	Bulukumba	1 Buku	16.624.750,00	DAU

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	04	02	17	32	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pem. Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bulukumba	1 Dokumen	89.166.350,00	DAU
4	04	02	17	34	Penatausahaan Adm. Pertanggung Jawaban SKPD	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bulukumba	1 Tahun	148.113.362,00	DAU
4	04	02	17	35	Penatausahaan Adm. Bantuan Daerah	Terlaksananya Bantuan Hibah dan Bansos Lingkup Daerah Kab. Bulukumba	Bulukumba	10 Kecamatan	176.404.000,00	DAU
4	04	02	17	38	Penatausahaan Akuntansi Penerimaan Daerah	Terwujudnya laporan realisasi penerimaan daerah	Bulukumba	1 Tahun	85.587.000,00	DAU
4	04	02	17	39	Penatausahaan Akuntansi Pengeluaran Daerah	Tertibnya Penatausahaan penyerapan belanja daerah	Bulukumba	12 Bulan	53.780.700,00	DAU
4	04	02	17	40	Evaluasi dan Rekonsiliasi Pelaporan Penerimaan Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan Daerah di setiap SKPD	Bulukumba	32 SKPD	57.615.000,00	DAU
4	04	02	17	41	Evaluasi dan Rekonsiliasi Pelaporan Pengeluaran Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Pelaporan Belanja Daerah	Bulukumba	200 SKPD, Sekolah, UPT, Kec/Kel	38.835.500,00	DAU
4	04	02	17	43	Pengelolaan dana transfer	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Khususnya Dana Transfer yang Tertip dan Tepat Waktu	Bulukumba	1 Tahun	151.862.150,00	DBH-PR
4	04	02	17	45	Penyusunan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 12 tahun 2019	Bulukumba	1 Dokumen	52.279.000,00	
4	04	02	17	46	Evaluasi Laporan Penerimaan Non BUD	Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan Daerah di setiap SKPD	Bulukumba	32 SKPD	13.173.000,00	DAU
4	04	02	17	47	Evaluasi Laporan Pengeluaran Non BUD	Terlaksananya Rekonsiliasi Non BUD (Dana BOS, BLUD dan JKN)	Bulukumba	419 Sekolah, RSUD & Dinkes	17.690.000,00	DAU
4	04	02	17	48	Pengelolaan Piutang Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pencatatan Piutang Lainnya	Bulukumba	50 Peserta	74.599.000,00	DAU
4	04	02	18		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota				110.169.700,00	DAU
4	04	02	18	02	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	Meningkatnya kualitas penyusunan APBD dan Tertibnya Penganggaran dalam APBD	Bulukumba	2 Dokumen	23.042.500,00	DAU
4	04	02	18	07	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perhitungan APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas laporan pertanggungjawaban APBD	Bulukumba	1 Kali	14.480.700,00	DAU
4	04	02	18	08	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	Meningkatnya kualitas dan tertibnya dalam penganggaran APBD Perubahan	Bulukumba	1 Dokumen	24.582.500,00	DAU

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	04	02	18	13	Evaluasi Laporan Keuangan SKPD	Meningkatnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bulukumba	1 Tahun	48.064.000,00	DAU
4	04	02	37		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah				978.838.950,00	DAU
4	04	02	37	01	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Secara Tertib Administrasi, Fisik dan Hukum serta Peningkatan Sumber Daya Manusia.	Bulukumba	525 Orang	152.046.400,00	DAU
4	04	02	37	04	Pemanfaatan dan Penggunaan Aset Daerah	Meningkatnya Laporan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Bulukumba	1 Dokumen	126.563.400,00	DAU
4	04	02	37	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan/ Pemeliharaan Barang	Meningkatnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Bulukumba	5 Dokumen	123.467.400,00	DAU
4	04	02	37	10	<i>Pengelolaan Inventarisasi Barang Milik Daerah</i>	<i>Terlaksananya kegiatan inventarisasi Barang Milik Daerah dan Barang Milik Desa melalui koordinasi OPD terkait dalam rangka Pembukuan Data Aset Tetap Kabupaten Bulukumba</i>	<i>Bulukumba</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>100.000.000,00</i>	DAU
4	04	02	37	11	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Meningkatnya Laporan Semesteran Barang Milik Daerah Pemkab Bulukumba	Bulukumba	1 Dokumen	17.876.300,00	DAU
4	04	02	37	12	Penyusunan Laporan Akhir Tahun Barang Milik Daerah	Meningkatnya Laporan Barang Milik Daerah Kab. Bulukumba (Buku Mutasi Barang, Buku Penjelasan Mutasi Barang, Buku Daftar Inventarisasi Tanah Kabupaten dan Buku Daftar Kendaraan Dinas Kabupaten).	Bulukumba	5 Dokumen	77.304.350,00	DAU
4	04	02	37	13	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatnya Kegiatan Monitoring Barang Milik Daerah.	Bulukumba	1 Dokumen	65.707.550,00	DAU
4	04	02	37	15	Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah	Menibgkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kab . Bulukumba	Bulukumba	2 Aplikasi	153.005.550,00	DAU
4	04	02	37	18	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penertiban Pemeliharaan BMD	Bulukumba	2 Dokumen	120.745.750,00	DAU
4	04	02	37	19	Penyusunan dan Sosialisasi Paket Regulasi Pengelolaan BMD	Terbitnya Peraturan Bupati tentang Pengelolaan DMD dan terwujudnya Pemahaman mengenai pengelolaan BMD	Bulukumba	521 Orang	42.122.250,00	DAU

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
4	04	03	03	BADAN PENDAPATAN DAERAH				3.510.632.000		
4	04	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.042.703.850		
4	04	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Terlaksana komunikasi sumber daya air dan listrik	Bapenda	12 bulan	145.200.000	DAU
4	04	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan	Bapenda	12 bulan	13.417.600	DAU
4	04	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Terlaksananya pelayanan keuangan	Bapenda	12 bulan	116.760.000	DAU
4	04	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Bapenda	12 bulan	24.000.000	DAU
4	04	03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Bapenda	12 bulan	15.000.000	DAU
4	04	03	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksanan peralatan rumah tangga	Bapenda	12 bulan	6.000.000	DAU
4	04	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bapenda	12 bulan	2.400.000	DAU
4	04	03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi keluar daerah	Bapenda	12 bulan	167.987.600	DAU
4	04	03	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Terlaksananya penatausahaan sekretariat SKPD	Bapenda	12 bulan	551.938.650	DAU
4	04	03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.				594.302.000		
4	04	03	02	06	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Meningkatnya Sarana Kendaraan Dinas Operasional	Bapenda	4 roda empat 5 roda dua	250.000.000	DAU
4	04	03	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	Meningkatnya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor	Bapenda	2 paket	30.000.000	DAU
4	04	03	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatkan peralatan gedung kantor	Bapenda	30 buah/unit	240.000.000	DAU
4	04	03	02	10	Pengadaan mebeleur	Meningkatkan sarana mobiler kantor	Bapenda	3 buah	20.000.000	DAU
4	04	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran	Bapenda	1 paket	5.752.000	DAU
4	04	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran	Bapenda	43 unit	42.000.000	DAU
4	04	03	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran	Bapenda	15 unit	6.550.000	DAU
4	04	03	02		Pembangunan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	Bapenda	1 Paket	-	DAU
4	04	03	02		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran	Bapenda	1 paket	-	DAU
4	04	03	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				111.948.000		

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	04	03	05	01	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN	Terlaksananya Pendidikan ASN dan Diklatpim III	Bapenda	3 orang	98.388.000	DAU
4	04	03	05	02	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya SDM ASN Bapenda	Bapenda	7 orang	13.560.000	DAU
4	04	03	05	03	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya SDM ASN Bapenda	Bapenda	1 Orang	-	DAU
4	04	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				24.322.000	
4	04	03	06	01	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD	Tersedianyan Lakip	Bapenda	1 Dokumen	4.000.000	DAU
4	04	03	06	04	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan	Bapenda	1 Dokumen	5.000.000	DAU
4	04	03	06	05	penyusunan program kerja SKPD	Tersusunnya Program2 Kerja SKPD	Bapenda	6 Dokumen	15.322.000	DAU
4	04	03	39		program peningkatan dan pmbangan pengelolaan pendapatan daerah				1.737.356.150	
4	04	03	39	01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber Pendapatan Daerah	Tersedianya data wajib pajak dan retribusi	Bapenda	12 Bulan	277.326.000	DAU
4	04	03	39	03	Pemeliharaan Basis Data	Terpeliharanya Data PBB	Bapenda	12 Bulan	219.500.000	DAU
4	04	03	39	04	Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah	Terlaksannanya penagihan retribusi parkir	Bapenda	12 Bulan	240.938.000	DAU
4	04	03	39	06	Peningkatan Penerima Pajak Daerah	Terlaksannanya penagihan pajak- pajak Daerah	Bapenda	12 Bulan	159.670.000	DAU
4	04	03	39	08	Penyusunan Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Tersusunnya ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Bapenda	12 Bulan	64.500.150	DAU
4	04	03	39	09	Sosialisasi Peraturan perpajakan dan Retribusi Daerah	Terlaksananya sosialisasi pajak dan retribusi terhadap wajib Pajak	Bapenda	10 Kecamatan	117.481.000	DAU
4	04	03	39	10	Evaluasi Pengkajian PAD	Terlaksananya pengawasan pajak restribusi daerah	Bapenda	10 Kecamatan	77.422.000	DAU
4	04	03	39	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana PBB P2	Tersedianya sarana dan prasarana PBB_P2	Bapenda	12 Bulan	394.941.000	DBH-PR
4	04	03	39	12	Pengelolaan Sitem Informasi Pendapatan Daerah	Terlaksananya penata usahaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah melalui sinda pendapatan	Bapenda	12 Bulan	80.519.000	DAU
4	04	03	39	13	Pendistribusian SPPT, Penagihan dan monitoring PBB	Terwujutnya SPPT yang terdistribusi	Bapenda	10 Kecamatan	75.059.000	DBH-PR
4	04	03	39	14	Pengeloan Sistem Informasi BPHTB	Terlaksananay pengelolaan BPHTB Melalui Aplikasi BPHTB	Bapenda	12 Bulan	15.000.000	DBH-PR
4	04	03	39	15	Rekonsialisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi Penerimaan dengan Pengelolah PAD pendapatan pajak yang retribusi daerah	Bapenda	12 Bulan	15.000.000	DBH-PR

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
4	05	08		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				4.075.860.900,00		
4	05	08	01	Program pelayanan administrasi perkantoran				388.000.000,00		
4	05	08	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat dinas dan penandatanganan SKTM	Kab. Bulukumba	12 bulan	-	APBD
4	05	08	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telepon dan listrik	Kab. Bulukumba	12 bulan	42.000.000,00	APBD
4	05	08	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	penyusun Laporan pertanggung jawaban keuangan BKPSDM	Kab. Bulukumba	12 bulan	10.000.000,00	APBD
4	05	08	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Kab. Bulukumba	12 bulan	24.000.000,00	APBD
4	05	08	01		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Bulukumba	10 Buku	1.000.000,00	APBD
4	05	08	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Kab. Bulukumba	12 Bulan	5.000.000,00	APBD
4	05	08	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pemerintah provinsi dan pusat	Kab. Bulukumba	60 Kali	200.000.000,00	APBD
4	05	08	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tersediannya kebutuhan cetakan, ATK dan makan minum tamu	Kab. Bulukumba	12 Bulan	106.000.000,00	APBD
4	05	08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur			107.164.753,00	
4	05	08	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua dan Roda Empat	Tersedianya Motor Operasional Jabatan dan Roda Empat Operasional	Kab. Bulukumba	Unit	-	APBD
4	05	08	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BKPSDM	Tersedianya Peralatan Kantor Layak Pakai	Kab. Bulukumba	20 Unit	30.614.753,00	APBD
4	05	08	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Peralatan Kantor Mebeleur	Kab. Bulukumba	15 Buah	10.750.000,00	APBD
4	05	08	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Jasa dan bahan pemeliharaan Gedung Kantor BKPSDM	Kab. Bulukumba	1 Unit	22.000.000,00	APBD
4	05	08	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan Kepala BKPSDM	Kab. Bulukumba	10 Unit	22.000.000,00	APBD
4	05	08	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat dan Roda Dua	Kab. Bulukumba	65 Unit	10.000.000,00	APBD
4	05	08	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Jasa Service Peralatan Gedung Kantor	Kab. Bulukumba	1 Paket	10.000.000,00	APBD
4	05	08	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharannya mebeleur kantor BKPSDM	Kab. Bulukumba	25 Buah	1.800.000,00	APBD
4	05	08	02		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpenuhinya Gedung Kantor BKPSDM yang memadai dan Layak Pakai	Kab. Bulukumba	1 Paket	-	APBD
4	05	08	02		Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	Terpenuhinya fasilitas penunjangb gedung BKPSDM	Kab. Bulukumba	1 Paket	-	APBD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	
4	05	08	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersediannya Peningkatan Disiplin Aparatur		11.500.000,00	APBD	
4	05	08	03	01	Pengadaan Absensi Terintegrasi	Terpenuhinya Mesin Absensi yang terkoneksi serta terintegrasi	Kab. Bulukumba	1 Buah	-	APBD
4	05	08	03	05	Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Terpenuhinya Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu Pegawai	Kab. Bulukumba	1 paket	11.500.000,00	APBD
4	05	08	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Peningkatan Pengembangan SDM		70.000.000,00	APBD	
4	05	08	05		Pendidikan dan pelatihan peningkatan Kompetensi Lurah/Kepala Desa	Terlaksananya Diklat Peningkatan Kompetensi Lurah/Kepala Desa dan Sekretaris Desa	Kab. Bulukumba	1 kegiatan	35.000.000,00	APBD
4	05	08	05		Pendidikan dan Pelatihan Calon kepala Sekolah SD	Terlaksananya Diklat Calon Kepala Sekolah SD	Kab. Bulukumba	1 Kegiatan	-	APBD
4	05	08	05	03	Bimbingan/sosialisasi peraturan perundang-Undangan ASN	Terlaksananya kegiatan sosialisasi PP 46 tahun 201 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS & Sosialisasi PP 11 Tahun 2017 tentang ASN	Kab. Bulukumba	1 kegiatan	35.000.000,00	APBD
4	05	08	05		Sosialisasi Penilaian Kinerja	Terlaksananya Workshop Penyusunan SKP/Penilaian Kinerja	Kab. Bulukumba	1 kegiatan	-	APBD
4	05	08	05		Pendidikan dan Pelatihan Teknis penatausahaan aset milik daerah	Terlaksananya diklat penatausahaan Aset Milik Daerah	Kab. Bulukumba	1 kegiatan	-	APBD
4	05	08	05	08	Pelaksanaan Diklat satu pintu	Terlaksananya diklat satu pintu	Kab. Bulukumba	1 kegiatan	-	APBD
4	05	08	05	08	peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Pengiriman peserta diklat pengembangan kompetensi	Kab. Bulukumba	1 kegiatan	-	APBD
4	05	08	06		Program Peningkatan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Capaian Kinerja dan Keuangan		20.000.000,00		
4	05	08	06	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Tersusunnya Lakip, Renstra dan Laporan Bulanan	Kab. Bulukumba	12 Bulan	3.000.000,00	APBD
4	05	08	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Laporan Keuanan Akhir Tahun	Kab. Bulukumba	1 Dokumen	2.000.000,00	APBD
4	05	08	06	05	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan	Penyusunan, Renja, RKA, dan DPA BKPSDM	Kab. Bulukumba	5 Dokumen	15.000.000,00	APBD
4	05	08	28		Program Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur		90.000.000,00		
4	05	08	28	03	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kebutuhan Kediklatan	Kab. Bulukumba	100%	40.000.000,00	APBD
4	05	08	28	06	peningkatan keterampilan dan profesionalisme *	Terlaksananya peningkatan keterampilan dan profesionalisme apartaur pemda	Kab. Bulukumba	110 Orang	50.000.000,00	APBD
4	05	08	29		Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Peningkatan Pengembangan SDM		1.307.445.147,00		

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	05	08	29	01	Pendidikan dan Pelatihan Parajabatan bagi Calon ASN Daerah	Terlaksananya diklat prajabatan golongan II, dan Golongan III	Kab. Bulukumba	4 angkatan	1.239.945.147,00	APBD
4	05	08	29	02	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN Daerah	Terlaksananya Diklatpim Tk. IV dan pendampingan pada pelaksanaan dilkatpim III dan II	Kab. Bulukumba	1 Angkatan	67.500.000,00	APBD
4	05	08	29		Pendidikan dan apelatihan Fungsiaonal Bagi ASN Daerah	Terlaksananya diklat fungsional	Kab. Bulukumba	Orang	-	APBD
4	05	08	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya Pembinaan dan Penembangan Aparatur sesuai dengan Kompetensi			2.081.751.000,00	
4	05	08	30	01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir ASN	Ujian Dinas Tk. I dan Tk.II	Kab. Bulukumba	100 Orang	40.000.000,00	APBD
4	05	08	30	02	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Seleksi Penerimaan Calon ASN Formasi Khusus dan Seleksi Penerimaan Calon ASN formasi umum	Kab. Bulukumba	Orang	720.000.000,00	APBD
4	05	08	30	03	Penempatan ASN	Sidang baperjakat, terlaksananya seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka		12 Bulan	200.000.000,00	APBD
4	05	08	30	04	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis ASN	Pelaksanaan proses kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara		2 periode	180.000.000,00	APBD
4	05	08	30	05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi Kepeawaian	Pengembangan aplikasi SAPK dan penembangan aplikasi simpeg		1 Paket	190.000.000,00	APBD
	05	08	30	08	Pemberian Penghargaan bagi ASN Berprestasi	Terlaksananya koordinasi dan pemberian satya lencana bagi ASN		250 Orang	50.000.000,00	APBD
4	05	08	30	09	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Peningkatan disiplin bagi aparat pemerintah kabupaten, terlaksananya proses penananan ijasah palsu		80 Orang	150.000.000,00	APBD
4	05	08	30	11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Tersedianya bantuan ASN tugas belajar, S1, S2, dan S3		20 Orang	238.751.000,00	APBD
4	05	08	30	12	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Terlaksananya seleksi penerimaan IPDN		1 Paket	48.000.000,00	APBD
4	05	08	30	18	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Penyusunan SK tenaga Honorer DUK dan listing pegawai serta peremajaan data ASN		1 Paket	35.000.000,00	APBD
4	05	08	30	23	Pelayanan Administrasi Pensiun	Terlaksananya pengurusan Administrasi Pensiun Pegawai Negri Sipil		250 Orang	140.000.000,00	APBD
4	05	08	30	24	Penyusunan Formasi Kebutuhan ASN	Terlaksananya perumusan kebutuhan ASN dan penginputan Bzetting ASN		100%	35.000.000,00	APBD
4	05	08	30	31	Penyusunan dan Penilaian Kinerja/Prestasi Kerja	Terlaksananya Penyusunan dan Penilaian Prestasi Kerja ASN		6574 PNS	40.000.000,00	APBD

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	05	08	30	32	Koordinasi dan Fasilitasi bantuan Hukum/Advokasi bagi anggota korps ASN	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bantuan Hukum/Advokasi bagi anggota korps ASN		1 Kegiatan	-	APBD
4	05	08	30	34	Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional serta hari-hari Besar lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional serta hari-hari Besar lainnya		12 Bulan	15.000.000,00	APBD
4	05	08	30	35	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Aktifitas Seni dan Budaya Korps ASN	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Aktifitas Seni dan Budaya Korps ASN		1 Kegiatan	-	APBD
4	05	08	30		Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pekan Olahraga Korps ASN	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pekan Olahraga Korps ASN		1 Kegiatan	-	APBD
4	05	08	30		Koordinasi dan Fasilitasi bantuan pelayanan bagi anggota Korps ASN	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi pemberian bantuan pelayanan bagi anggota Korps ASN		12 Bulan		APBD
4	05	06			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1.344.013.250,00	
4	07	00			Program Administrasi Perkantoran				452.920.350,00	
4	07	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa rekening listrik	Bulukumba	12 Bulan	37.400.000,00	
4	07	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tertibnya operasional kendaraan dinas operasional	Bulukumba	9 Kendaraan	3.330.000,00	
4	07	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya administrasi keuangan SKPD	Bulukumba	12 Bulan	63.490.000,00	
4	07	06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya suasana bersih dan nyaman dalam kantor	Bulukumba	12 Bulan	24.000.000,00	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor					
4	07	06	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kelitbang	Di luar Bulukumba	48 Kali	234.079.000,00	
4	07	06	01	21	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Bulukumba	12 Bulan	90.621.350,00	
4	07	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-	-	53.006.900,00	D A U
4	07	06	02	09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatkan sarana dan prasarana komputerisasi	Bulukumba	1 unit	19.713.650,00	
4	07	06	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor tempat penyimpanan arsip	Bulukumba	1 Unit	3.532.250,00	
4	07	06	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Bulukumba	9 Unit	24.151.000,00	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	07	06	02	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik	Bulukumba	9 Unit	5.610.000,00	
4	07	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	-	25.853.000,00	D A U
4	07	06	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Mengikuti bimbingan teknis bidang litbang dan pengelolaan keuangan	Di luar Bulukumba	2 Orang	25.853.000,00	
4	07	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		-	-	66.510.000,00	D A U
4	07	06	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kerja SKPD	Laporan akuntabilitas OPD tahun 2020	Bulukumba	1 Dokumen	5.744.500,00	
4	07	06	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun 2020	Bulukumba	1 Dokumen	3.945.000,00	
4	07	06	06	05	Penyusunan Program Kerja SKPD	Tersedianya Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Evaluasi Renja	Bulukumba	6 Jenis	56.820.500,00	
4	07	06	33		Program Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Sumber Daya Alam		-	-	21.686.000,00	D A U
4	07	06	33	02	Sosialisasi Hasil-hasil Penelitian	Terlaksananya sosialisasi hasil-hasil penelitian	Bulukumba	1 Hari	21.686.000,00	
4	07	06	35		Program Pembangunan Inovasi dan Teknologi		-	-	290.754.000,00	D A U
4	07	06	35	01	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup	Tersedianya kajian dan pengembangan hutan wisata mangrove		1 Laporan	153.610.000,00	
4	07	06	35	02	Penelitian dan Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana Wilayah	Tersedianya kajian dan identifikasi kawasan pesisir pantai hutan mangrove		1 Laporan	70.506.000,00	
4	07	06	35	03	Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya kajian pencapaian sasaran keselamatan pasien di RSUD H. Sultan Daeng Radja		1 Laporan	66.638.000,00	
4	07	06	36		Program Pengembangan Sistem Informasi Daerah		-	-	16.210.000,00	D A U
4	07	06	36	02	Sosialisasi dan Publikasasi Hasil Kajian Penelitian	Penerbitan jurnal pinisi research	kab. Bulukumba	4 Terbitan	16.210.000,00	
4	07	06	37		Program penyelenggaraan Pemerintahan		-	-	75.753.000,00	D A U
4	07	06	37	02	Kajian Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kajian rancangan perda Kabupaten Bulukumba tentang kelitbang	kab. Bulukumba	1 Ranperda	75.753.000,00	
4	07	06	38		Program Pengembangan/ Pengkajian Ekonomi		-	-	226.645.000,00	D A U

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
4	07	06	38	01	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Litbang Isu-isu Strategis Bidang Ekonomi	Kajian dan potensi pengembangan koperasi berbasis syariah kajian kepuasan publik terhadap capaian pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba empat tahun terakhir	kab. Bulukumba	1 Laporan	226.645.000,00	
4	07	06	39		Program Pengembangan Sosial, Budaya dan Masyarakat Desa		-	-	114.675.000,00	D A U
4	07	06	39	01	Penelitian Kondisi Sosial, Budaya Masyarakat Kota dan Desa	Tersedianya kajian potensi dan strategis desa wisata Kabupaten Bulukumba	kab. Bulukumba	1 Laporan	114.675.000,00	



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12.1 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba menetapkan 41 indikator. IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel 6.1 :

Tabel 6.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bulukumba
Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2019		Target 2020	Target 2021
			Target	Realisasi		
	1	2	3	4	5	6
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	82,51	91,77	100	100
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	93	94,33	100	100
3	Persentase luas jaringan irigasi yang terpelihara dan direhabilitasi	%	85	80,13	14,55	100
4	Persentase kawasan kumuh	%	95,37	83,52	0,08	0,06
5	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	90,73	76,,92	76	80
6	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	%	91	69	93	95
7	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	95	79,4	96	97
8	Persentase cakupan pelayanan anak balita	%	80	69,10	85	90
9	Persentase kepuasan pelanggan rawat jalan dan rawat inap	%	88,8	83,91	92,5	95
10	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	112,28	80,84		
	a. SD sederajat	%	110,78	104,58	100	100
	b. SMP sederajat	%	110,90	75,16	100	100
	c. SMA sederajat	%	115,15	62,77	100	100
11	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	101,19	67,93		
	a. SD sederajat	%	107,91	88,05	98,00	100
	b. SMP sederajat	%	99,00	62,85	98,22	100
	c. SMA sederajat	%	96,67	52,90	98,25	100
12	Persentase pendidik yang tersertifikasi pada satuan pendidikan.	%	72,64	45,14		
	a. SD sederajat	%	59	47,96	65,00	65,00
	b. SMP sederajat	%	65,90	50,08	70,55	70,55
	c. SMA	%	92,75	39,71	95,00	95,00
	d. SMK	%	54,85	42,82	60,00	60,00
13	Angka melek huruf	%	92,56	0,37	93,00	93,00
14	Pertumbuhan PDRB	%	8,5	6,92	8,5	8,5
15	PDRB perkapita	Milyar	28,63	31,54	30,61	39,90
16	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan	%	108,24	40,39	36.706	36.706



No.	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2019		Target 2020	Target 2021
			Target	Realisasi		
	1	2	3	4	5	6
	terhadap PDRB					
17	Pertumbuhan populasi ternak	Ekor	4.510.807	3.921.597		
	a. Sapi potong	Ekor	82.726	76.434	87.308	92.110
	b. Kerbau	Ekor	1.670	1.620	1.698	1.727
	c. Kuda	Ekor	29.089	28.036	29.613	30.146
	d. Kambing	Ekor	38.426	35.229	41.989	44.928
	e. Ayam Buras	Ekor	966.235	745.015	1.091.846	1.255.623
	f. Ayam ras pedaging	Ekor	2.986.784	2.550.438	3.285.440	3.613.984
	g. Ayam ras petelur	Ekor	377.623	463.793	415.385	456.924
	h. Itik	Ekor	28.254	21.032	32.210	37.042
18	Jumlah produksi perikanan	Ton	189,062	235,999	197.282	205.502
19	Jumlah kunjungan wisatawan	Org	350,000	280,590	350.000	400.000
20	Jumlah penduduk miskin	Org	22.245	31.250	19.816	17.316
21	Angka partisipasi angkatan kerja	%	96	63,29	96,50	97
22	Angka pengangguran terbuka	%	0,89	3,62	0,73	0,64
23	Persentase koperasi berprestasi	%	2,84	7,46	3,11	3,11
24	Jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Buah	1.436	6.101	1.314	6.671
25	Jumlah nilai investasi:					
	a. PMDN	Rp.	5.000.000.000	89.394.000.000	20.000.000.000	160.000.000.000
	b. PMA	\$	200.000	0	200.000	6.400.000
26	Jumlah produk hukum yang terkait dengan kelembagaan	Buah	2	2	650	3.200
27	Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	%	100	100	100	100
28	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Persentase pertumbuhan jumlah pendapatan daerah	%	10	11,00	10	10,48
30	Cakupan penerbitan kartu keluarga (KK)	%	95	96	95	95
31	Cakupan penerbitan KTP-el	%	65	95	70	100
32	Jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk		210	31,91	220	220
33	Cakupan penerbitan akta kematian.	%	0,25	81	0,50	0,9
34	Persentase tindak lanjut temuan	%	80	91,34	100	100
35	Penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah	Kasus	100	50	5	5
36	Persentase cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif.	%	74,6	75,28	18,5	18,5
37	Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan terpadu.	Kasus	170	128	160	150
38	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan	%	100	91,99	7,61	8,24



No.	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2019		Target 2020	Target 2021
			Target	Realisasi		
	1	2	3	4	5	6
	Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial					
39	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	100	4,38	26,16	30
40	Persentase Penanganan Sampah	%	80	80	100	100
41	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	90	80	90	100

Sumber Data : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019

Dari 41 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD, maka terdapat 13 indikator kinerja yang telah memenuhi kriteria sangat berhasil atau 31,71 persen, 4 indikator kinerja yang telah memenuhi kriteria berhasil atau 9,76 persen, 11 indikator kinerja dengan kriteria cukup berhasil atau 26,83 persen, 4 indikator kinerja dengan kriteria kurang berhasil atau 9,76 persen dan 5 indikator kinerja lainnya dengan kriteria tidak berhasil atau 12,20 persen.

6.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau dikenal juga Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada masa jabatan pemerintah daerah.

Dari 128 indikator sasaran strategis tahun 2019 terhadap target jangka menengah didapatkan hasil yaitu 106 indikator sasaran dengan notifikasi hijau (sudah TERCAPAI/*On Track*) atau 82,81 persen, 10 indikator sasaran dengan notifikasi kuning (butuh kerja keras) atau 7,81 persen, dan 12 indikator sasaran dengan notifikasi merah (sulit tercapai) atau 9,38 persen.

Ada beberapa kriteria pengukuran yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mengukur capaian kinerja, yaitu:

Untuk mengukur kinerja tahunan digunakan kriteria sebagai berikut:

- Capaian >100% dengan notifikasi warna biru yang berarti sangat berhasil (SB).
- Capaian = 100% dengan notifikasi berhasil (B).
- Capaian $80\% \leq 99,99\%$ dengan notifikasi cukup berhasil (CB).
- Capaian $50\% \leq 79,99\%$ dengan notifikasi kurang berhasil (KB).
- Capaian $\leq 50\%$ dengan notifikasi tidak berhasil (TB).

Untuk mengukur kinerja jangka menengah dengan membandingkan kinerja tahun terakhir RPJMD dengan realisasi sampai dengan tahun berjalan digunakan kriteria sebagai berikut:

- Capaian $\geq 70\%$ dengan notifikasi 😊 tercapai/*on track/on trend*.
- Capaian $40\% \leq 69,99\%$ dengan notifikasi 😐 butuh kerja keras
- Capaian $0\% \leq 39,99\%$ dengan notifikasi ☹ yang berarti sulit untuk dapat dicapai.

Realisasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 diurai sebagai berikut:



“Peningkatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan yang Berkualitas”

Tabel 6.2
Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2019

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET JANGKA MENENGAH	TAHUN 2019				REALISASI KINERJA SD TAHUN 2019	CAPAIAN	NOTIFIKASI	NOTIFIKASI		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NOTIFIKASI						
1	2	3	4	5	6	15	16	17	18	15	16	17	18		
1 Menuntaskan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan	1 Mewujudkan pembangunan, penguatan, dan pemerataan infrastruktur dasar masyarakat yang berdayaguna.	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur publik daerah yang berkeadilan.	1 1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	100	82,51	91,77	111,22	SB	91,77	91,77	TERCAPAI	☺	
			2 2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	100	93	94,33	101,43	SB	94,33	94,33	TERCAPAI	☺	
			3 3	Persentase luas jaringan irigasi yang terpelihara dan direhabilitasi	%	100	85	80,13	94,27	CB	80,13	80,13	TERCAPAI	☺	
			4 4	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%	100	95,37	83,52	87,57	CB	171,29	171,29	TERCAPAI	☺	
		2 Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman	2 Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman	1 5	Rasio rumah layak huni	%	91,38	90,26	92,33	102,29	SB	92,33	101,04	TERCAPAI	☺
				2 6	Persentase kawasan kumuh	%	0,06	0,1	0,55	550,00	SB	0,55	916,67	TERCAPAI	☺
				3 7	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	Unit	93.519	93.119	102.619	110,20	SB	102.619	109,73	TERCAPAI	☺
				4 8	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	80	90,73	76,92	84,78	CB	154,1	192,63	TERCAPAI	☺
	5 9			Jumlah pasar rakyat yang dibangun/ direhabilitasi	Buah	45	35	43	123	SB	43	95,56	TERCAPAI	☺	
	6 10			Jumlah pelabuhan rakyat yang direhabilitasi	Buah	3	3	0	0	TB	0	0,00	SULIT TERCAPAI	☹	
	7 11			Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,13	0,145	0,015	189,66	SB	0,015	188,46	TERCAPAI	☺	
	8 12			Jumlah terminal angkutan penumpang yang	Buah	3	1	1	100	B	4	133,33	TERCAPAI	☺	



“Peningkatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan yang Berkualitas”

			9	13	telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Jumlah penyiaran TV/ Radio Lokal	Buah	11	11	25	227,27	SB	25	227,27	TERCAPAI	☺	
2	Mewujudkan penyelenggaraan kesehatan masyarakat yang berkualitas	3	Meningkatnya kualitas, kuantitas, dan cakupan infrastruktur kesehatan masyarakat.	1	14	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	%	95	91	69	75,82	KB	69	72,63	TERCAPAI	☺
			2	15	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	97	95	79,4	83,58	CB	79,4	81,86	TERCAPAI	☺	
			3	16	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	82,43	82,43	CB	82,43	82,43	TERCAPAI	☺	
			4	17	Cakupan pelayanan nifas	%	100	97	87	89,69	CB	87	87,00	TERCAPAI	☺	
			5	18	Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	%	100	97	92,00	94,85	CB	92,00	92,00	TERCAPAI	☺	
			6	19	Persentase cakupan pelayanan anak balita	%	85	80	69,10	86,38	CB	69,10	81,29	TERCAPAI	☺	
			7	20	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan sederajat	%	100	97	97,32	100,33	SB	97,32	97,32	TERCAPAI	☺	
			8	21	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	50	35	77	220,00	SB	77	154,00	TERCAPAI	☺	
			9	22	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	60	40	100	250,00	SB	100	166,67	TERCAPAI	☺	
			10	23	Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	50	30	25,4	84,67	CB	25,4	50,80	KERJA KERAS	☹	
			11	24	Cakupan pelayanan	%	50	64	43,79	68,42	KB	43,79	87,58	TERCAPAI	☺	



“Peningkatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan yang Berkualitas”

			12	25	kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	%	40	85	43,8	51,5	KB	43,8	109,50	TERCAPAI	☺
			13	26	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	%	26	15	85,52	570,13	SB	85,52	328,92	TERCAPAI	☺
			14	27	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	98	54	100	185,19	SB	100	102,04	TERCAPAI	☺
					Cakupan desa yang melaksanakan STBM	%									
		4	1	28	Persentase Pemberi pelayanan GD yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/ GELS/ALS	%	100	87,4	100	114,42	SB	100	100,00	TERCAPAI	☺
			2	29	Persentase kepuasan pelanggan rawat jalan dan rawat inap	%	95	88,8	83,91	94,49	CB	83,91	88,32	TERCAPAI	☺
			3	30	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	Unit	20	20	20	100,00	B	20	100,00	TERCAPAI	☺
	3	Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas	5		Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta cakupan infrastruktur pendidikan masyarakat.										
			1	31	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	34,34	32,25	69,20	214,57	SB	112,77	328,44	TERCAPAI	☺
					a. ruang kelas	%	23,67	21,5	121,49	565,07	SB	121,49	513,27	TERCAPAI	☺
			2	32	b. perpustakaan Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	45	43	16,91	39,33	TB	104,05	231,22	TERCAPAI	☺
					a. ruang kelas	%	27,06	24,41	102,38	419,36	SB	155,71	575,44	TERCAPAI	☺
					b. perpustakaan	%	33,18	30,24	262,86	869,25	SB	262,86	792,22	TERCAPAI	☺
					c. laboratorium	%	23	20	17,14	85,70	CB	97,14	422,35	TERCAPAI	☺
						%	25	23	27,14	118,00	SB	107,14	428,56	TERCAPAI	☺



“Peningkatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan yang Berkualitas”

		3	33	Sekolah pendidikan SMA kondisi bangunan baik	%	76,89	74,05	7,96	10,74	TB	94,33	122,68	TERCAPAI	😊
				a. ruang kelas	%	75,67	70,45	23	32,65	TB	109,37	144,54	TERCAPAI	😊
				b. perpustakaan	%	79	77,7	0,5	0,64	TB	86,87	109,96	TERCAPAI	😊
				c. laboratorium	%	76	74	0,37	0,50	TB	86,74	114,13	TERCAPAI	😊
	6	1	34	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	100,00	112,28	80,84	72,00	KB	175,45	175,45	TERCAPAI	😊
				a. SD sederajat	%	100	110,78	104,58	94,40	CB	212,47	212,47	TERCAPAI	😊
				b. SMP sederajat	%	100	110,90	75,16	67,77	KB	163,13	163,13	TERCAPAI	😊
				c. SMA sederajat	%	100	115,15	62,77	54,51	KB	150,74	150,74	TERCAPAI	😊
		2	35	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	100,00	101,19	67,93	67,13	KB	95,35	95,35	TERCAPAI	😊
				a. SD sederajat	%	100	107,91	88,05	81,60	CB	88,05	88,05	TERCAPAI	😊
				b. SMP sederajat	%	100	99,00	62,85	63,48	KB	62,85	62,85	KERJA KERAS	😞
				c. SMA sederajat	%	100	96,67	52,90	54,72	KB	135,15	135,15	TERCAPAI	😊
		3	36	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	100,00	107,67	67,93	63,10	KB	95,35	95,35	TERCAPAI	😊
				a. SD sederajat	%	100	120,10	88,05	73,31	KB	88,05	88,05	TERCAPAI	😊
				b. SMP sederajat	%	100	104,75	62,85	60,00	KB	62,85	62,85	KERJA KERAS	😞
				c. SMA sederajat	%	100	98,15	52,90	53,90	KB	135,15	135,15	TERCAPAI	😊
		4	37	Angka Putus Sekolah (APTS)	%	0,06	0,12	1,53	8,04	TB	1,53	4,13	SULIT	😞
				a. SD sederajat	%	0,04	0,06	1,1	5,45	TB	1,1	3,64	SULIT	😞
				b. SMP sederajat	%	0,1	0,16	1,6	10,00	TB	1,6	6,25	SULIT	😞
				c. SMA sederajat	%	0,05	0,15	1,9	7,89	TB	1,9	2,63	SULIT	😞
		5	38	Angka Melanjutkan (AM)	%	99,215	99,06	86,68	87,50	CB	177,73	179,13	TERCAPAI	😊
				a. SD ke SMP	%	99,68	100,61	66,81	66,40	KB	157,86	158,37	TERCAPAI	😊
				b. SMP ke SMA	%	98,75	97,50	106,54	109,27	SB	197,59	200,09	TERCAPAI	😊
		6	39	Persentase kelulusan	%	100,00	99,57	100,00	100,44	SB	100,00	100,00	TERCAPAI	😊
				a. SD sederajat	%	100	99,70	100	100,30	SB	100	100,00	TERCAPAI	😊
				b. SMP sederajat	%	100	99,85	100	100,15	SB	100	100,00	TERCAPAI	😊
				c. SMA sederajat	%	100	99,15	100	100,86	SB	100	100,00	TERCAPAI	😊
		7	40	Rasio guru dan murid	%	01,30	01,30	01,13	118,52	SB	01,13	118,52	TERCAPAI	😊
				a. SD sederajat	%	01,30	01,30	01,14	117,78	SB	01,14	117,78	TERCAPAI	😊
				b. SMP sederajat	%	01,30	01,30	01,12	120,00	SB	01,12	120,00	TERCAPAI	😊
				c. SMA sederajat	%	01,30	01,30	01,14	117,78	SB	01,14	117,78	TERCAPAI	😊
		8	41	Persentase jumlah satuan pendidikan yang sudah terakreditasi	%	71,00	63,35	97,50	153,91	SB	94,64	133,30	TERCAPAI	😊
				a. SD sederajat	%	98	85,95	100	116,35	SB	100	102,04	TERCAPAI	😊



“Peningkatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan yang Berkualitas”

			9	42	b. SMP sederajat c. SMA sederajat Persentase sekolah yang memanfaatkan pembelajaran berbasis TIK.	% % %	65 50 38	57,17 46,92 141	100 92,5 33,65	174,92 197,14 23,87	SB SB TB	91,43 92,50 133,65	140,66 185,00 351,71	TERCAPAI TERCAPAI TERCAPAI	😊 😊 😊	
			10	43	Jumlah siswa miskin yang memperoleh beasiswa	Org	33.500	28.709	36.912	128,57	SB	106.173	316,93	TERCAPAI	😊	
					a. SD sederajat	Org	20.000	16.500	14.367	87,07	CB	82.462	412,31	TERCAPAI	😊	
					b. SMP sederajat	Org	7.500	6.514	11.855	181,99	SB	15.955	212,73	TERCAPAI	😊	
					c. SMA	Org	5.000	4.742	7.921	167,04	SB	5.954	119,08	TERCAPAI	😊	
			11	44	d. SMK Jumlah medali peserta didik pada kejuaraan/lomba tingkat regional dan nasional.	Org Buah	1.000 10	953 5	2769 3	290,56 60,00	SB KB	1.802 14	180,20 140,00	TERCAPAI TERCAPAI	😊 😊	
			12	45	Jumlah kegiatan pembinaan pendidikan non formal.	Keg.	42	31	83,78	270,26	SB	120,78	287,57	TERCAPAI	😊	
		7	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan.	1	46	Persentase pendidik yang tersertifikasi pada satuan pendidikan.	%	72,64	68,13	45,14	66,26	KB	46,76	64,37	KERJA KERAS	😊
					a. SD sederajat	%	65	59	47,96	81,29	CB	54,43	83,74	TERCAPAI	😊	
					b. SMP sederajat	%	70,55	65,90	50,08	75,99	KB	50,08	70,99	TERCAPAI	😊	
					c. SMA	%	95	92,75	39,71	42,81	TB	39,71	41,80	KERJA KERAS	😊	
					d. SMK	%	60	54,85	42,82	78,07	KB	42,82	71,37	TERCAPAI	😊	
		8	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	1	47	Angka melek huruf	%	93,00	92,56	0,37	0,40	TB	98,37	105,77	TERCAPAI	😊
				2	48	Jumlah perpustakaan yang dibina	Unit	900	720	706	98,06	CB	706	78,44	TERCAPAI	😊
2	Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah	4	Mewujudkan penataan dan pengelolaan potensi daerah	9	Meningkatnya produktivitas komoditi pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan masyarakat dalam											
				1	49	Pertumbuhan PDRB	%	8,5	8,5	6,92	81,41	CB	6,92	81,41	TERCAPAI	😊
				2	50	PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)	Juta Rp.	14.526.785,63	12.712.190.000,00	13.193.580.000,00	103,79	SB	13.205.754.855,20	90906,24	TERCAPAI	😊
				3	51	PDRB perkapita	Rp.	32.904.998,77	28.630.000.000	31.540.000.000,00	110,16	SB	31.569.290.000,00	95940,71	TERCAPAI	😊
				4	52	Rata-rata pendapatan perkapita masyarakat petani	Rp.	528.128	107.702	194.100	180	SB	504.700	95,56	TERCAPAI	😊



“Peningkatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan yang Berkualitas”

		mendorong ketahanan pangan daerah.	5	53	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan terhadap PDRB	%	36,71	108,24	40,39	37,31	TB	40,39	110,02	TERCAPAI	☺
			6	54	PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan atas dasar harga berlaku (ADHB).	Juta Rp.	6.334.331,14	4.066.900	3.996.721	98,27	CB	3.996.721	63,10	KERJA KERAS	☹
			7	55	PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan atas dasar harga konstan (ADHK).	Juta Rp.	3.933.249,42	3.092.084	2.352.397	76,08	KB	3.204.454,0	81,47	TERCAPAI	☺
			8	56	Cakupan pembinaan kelompok tani	%	1	0,13	0,25	192,31	SB	0,25	25,00	SULIT TERCAPAI	☹
			9	57	Jumlah tempat pengolahan padi yang menggunakan teknologi	Unit	90	21	15	71,43	KB	47	52,22	KERJA KERAS	☹
			10	58	Pertumbuhan populasi ternak	Ekor	5.532.456	4.510.837	3.921.597	86,94	CB	3.921.597	70,88	TERCAPAI	☺
					a. Sapi potong	Ekor	92.100	82.756	76.434	92,36	CB	76.434	82,99	TERCAPAI	☺
					b. Kerbau	Ekor	1.727	1.670	1.620	97,01	CB	1.620	93,80	TERCAPAI	☺
					c. Kuda	Ekor	30.146	29.089	28.036	96,38	CB	28.036	93,00	TERCAPAI	☺
					d. Kambing	Ekor	44.928	38.426	35.229	91,68	CB	35.229	78,41	TERCAPAI	☺
					e. Ayam Buras	Ekor	1.255.623	966.235	745.015	77,10	KB	745.015	59,33	KERJA KERAS	☹
					f. Ayam ras pedaging	Ekor	3.613.984	2.986.784	2.550.438	85,39	CB	2.550.438	70,57	TERCAPAI	☺
					g. Ayam ras petelur	Ekor	456.924	377.623	463.793	122,82	SB	463.793	101,50	TERCAPAI	☺
					h. Itik	Ekor	37.024	28.254	21.032	74,44	KB	21.032	56,81	KERJA KERAS	☹
			11	59	Jarak rekonstruksi tata batas Tahura.	Km	39	25	1,5	6	TB	1,5	3,85	SULIT TERCAPAI	☹
			12	60	Luas areal komoditi perkebunan	Ha	39.237,50	38.987,50	37.792,00	96,93	CB	37.792,00	96,32	TERCAPAI	☺
			13	61	Jumlah desa mandiri pangan yang dibina	Desa	10	1	9	900,00	SB	9	90,00	TERCAPAI	☺
			14	62	Jumlah lumbung pangan yang dibangun	Unit	35	5	1	20,00	TB	52	148,57	TERCAPAI	☺
			15	63	Jumlah cadangan pangan pemerintah	Ton	150	30	3	10,00	TB	139	92,67	TERCAPAI	☺



“Peningkatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan yang Berkualitas”

			16	64	daerah Jumlah cadangan pangan masyarakat	Ton	250	50	32,86	66	KB	32,86	13,14	SULIT TERCAPAI	☹️						
			17	65	Pembinaan kelompok wanita tani	Klp	101	20	16	80	CB	16	15,84	SULIT TERCAPAI	☹️						
			18	66	Jumlah Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) yang dibentuk	Unit	109	109	107	98,17	CB	107	98,17	TERCAPAI	😊						
			19	67	Cakupan pembinaan kelompok nelayan	%	66,62	546	452	82,78	CB	452	678,47	TERCAPAI	😊						
			20	68	Jumlah produksi perikanan	Ton	205.502	189.062	235.999	124,83	SB	235.999	114,84	TERCAPAI	😊						
			10	Berkembangnya potensi dan daya tarik wisata.	1	69	Jumlah obyek wisata yang dikelola dan dikembangkan	Buah	12	10	13	130,00	SB	13	108,33	TERCAPAI	😊				
			2		70	Jumlah kunjungan wisatawan	Org	400.000	350.000	280.590	80,17	CB	280.590	70,15	TERCAPAI	😊					
			3	Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah	5	Peningkatan pendapatan masyarakat	11	Menurunnya angka kemiskinan masyarakat.	1	71	Jumlah penduduk miskin	Org	17.316	22.245	31.250	140,48	SB	31.250	19,53	SULIT TERCAPAI	☹️
							2		72	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dibina	Klp	500	469	175	37,31	TB	1332	266,40	TERCAPAI	😊	
							12	Menurunnya tingkat pengangguran daerah.	1	73	Angka partisipasi angkatan kerja	%	97	96	63,29	65,93	KB	63,29	65,25	KERJA KERAS	😞
2	74	Angka pengangguran terbuka			%	0,64	0,89		3,62	24,59	TB	3,62	17,68	SULIT TERCAPAI	☹️						
3	75	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun			Kasus	2	2		8	-200,00	TB	8	-200,00	SULIT TERCAPAI	☹️						
6	Peningkatan daya saing dan mendorong pengembangan ekonomi kreatif	13			Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat.	1	76	Persentase koperasi berprestasi	%	3,11	2,84	7,46	262,68	SB	7,46	239,87	TERCAPAI	😊			
		14			Meningkatnya daya saing dan produktivitas UMKM.	1	77	Jumlah UMKM aktif non BPR/LKM	Unit	11.200	11.150	38.753	347,56	SB	38.753	346,01	TERCAPAI	😊			
7	Meningkatkan iklim dan minat investasi	15	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan yang	1	78	Jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Buah	6.671	1.436	6.101	424,86	SB	6.101	91,46	TERCAPAI	😊					
		2		79	Jumlah produk	Buah	11	2	2	100	B	2	18,18	SULIT	☹️						



“Peningkatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan yang Berkualitas”

		profesional.	3	80	hukum daerah terkait perizinan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Apl	1	1	1	100	B	1	100,00	TERCAPAI	☺																																									
		16 Meningkatkan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN	1	81	Jumlah nilai investasi: a. PMDN b. PMA	Rp. \$	160.000.000.000 6.400.000.000	5.000.000.000 200.000	89.394.000.000 0	1787,88 0,00	SB TB	89.394.000.000 816.030	55,87 0,01	KERJA KERAS SULIT TERCAPAI	☹ ☹ ☹																																									
4	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif	8 Menciptakan sumberdaya manusia yang berjiwa entrepreneur	17	82	Meningkatnya daya saing dan pengembangan kewirausahaan.	Org	544	464	680	146,55	SB	680	125,00	TERCAPAI	☺																																									
																9 Meningkatkan kreativitas pemuda dan prestasi olahraga	18	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan	1	83	Jumlah organisasi pemuda	Unit	47	46	46	100,00	B	46	97,87	TERCAPAI	☺																									
		2	84	Jumlah prestasi karya ilmiah remaja	Kali	21	5	15	300,00	SB	15	71,43	TERCAPAI	☺																																										
		3	85	Jumlah organisasi olahraga	Unit	36	33	33	100,00	B	33	91,67	TERCAPAI	☺																																										
		4	86	Jumlah prestasi olahraga yang dicapai	Kali	71	15	31	206,67	SB	31	43,66	KERJA KERAS	☹																																										
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia	10 Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih	19	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa.	1	87	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang menyelesaikan jenjang pendidikan formal S1, S2, dan S3.	Org	155	31	30	96,77	CB	109	70,32	TERCAPAI	☺																																							
																		2	88	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Org	2815	563	550	97,69	CB	1567	55,67	KERJA KERAS	☹																										
																															3	89	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Org	1020	204	110	53,92	KB	765	75,00	TERCAPAI	☺													
																																												4	90	Jumlah aparatur yang memperoleh penghargaan	Org	1250	250	390	156	SB	917	73,36	TERCAPAI	☺



“Peningkatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan yang Berkualitas”

		20	Meningkatnya efektivitas kelembagaan pemerintah	1	92	Jumlah produk hukum yang terkait dengan kelembagaan	Buah	15	1	2	200,00	SB	65	433,33	TERCAPAI	☺	
		21	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1	93	Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	%	100	100	100	100	B	100	100,00	TERCAPAI	☺	
				2	94	Kategori penilaian SAKIP dari Kementerian PAN dan RB		CC	,B	,B	200	200	SB	B	200,00	TERCAPAI	☺
				3	95	Persentase tingkat keterisian data dalam sistem informasi pembangunan daerah	%	70	63	40	63,49	63,49	KB	40	57,14	KERJA KERAS	☹
		22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.	1	96	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini	WTP	WTP	WTP	100	B	WTP	100,00	TERCAPAI	☺	
				2	97	Persentase pertumbuhan jumlah pendapatan daerah	%	10,48	10	11	110,00	110,00	SB	3,73	35,62	SULIT TERCAPAI	☹
				3	98	Dokumen APBD	Dok.	2	2	2	100,00	100,00	B	2	100,00	TERCAPAI	☺
		23	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.	1	99	Cakupan penerbitan kartu keluarga (KK)	%	95	95	96	101,05	SB	197,55	207,95	TERCAPAI	☺	
				2	100	Cakupan penerbitan KTP-el	%	100	65	95	146,15	146,15	SB	196,55	196,55	TERCAPAI	☺
				3	101	Jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	220	210	31,91	15,19	15,19	TB	225,91	102,68	TERCAPAI	☺
				4	102	Cakupan penerbitan akta kematian.	%	0,9	0,25	81	32400,00	32400,00	SB	81,00	9000,00	TERCAPAI	☺
11	Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	24	Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum, dan budaya hukum dalam rangka	1	103	Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan	Buah	3.200	650	917	141,08	SB	3.649	114,03	TERCAPAI	☺	
				2	104	Persentase tindak lanjut temuan	%	100	80	91,34	114,175	114,175	SB	92,39	92,39	TERCAPAI	☺



“Peningkatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan yang Berkualitas”

		supremasi hukum.	3	105	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba	%	100	80	80	100,00	B	80	80,00	TERCAPAI	☺
			4	106	Penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah	Kasus	25	100	50	50	KB	62	248,00	TERCAPAI	☺
			5	107	Tingkat Maturitas SPIP Level 3	Level	3	3	3	100	B	3	100,00	TERCAPAI	☺
			6	108	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Level 3	Level	3	3	3	100	B	3	100,00	TERCAPAI	☺
		25 Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan kesejahteraan sosial.	1	109	Persentase cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif.	%	18,5	74,6	75,28	100,91	SB	75,28	406,92	TERCAPAI	☺
			2	110	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi	Set	142	100	100	100,00	B	100	70,42	TERCAPAI	☺
			3	111	Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan terpadu.	Kasus	150	170	128	124,71	SB	281	187,33	TERCAPAI	☺
			4	112	Jumlah sarana sosial yang direhabilitasi	Buah	23	18	6	33,33	TB	21	91,30	TERCAPAI	☺
			5	113	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	8,24	100	91,99	91,99	91,99	CB	91,99	1116,38	TERCAPAI



“Peningkatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan yang Berkualitas”

6	Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah	12	Meningkatkan jejaring kerjasama antardaerah dan dengan stakeholder dalam pembangunan daerah	26	Meningkatnya kerjasama antar daerah, masyarakat, dan dunia usaha.	1	114	Jumlah kerjasama antar daerah	Buah	7	5	3	60	KB	3	42,86	KERJA KERAS	☹️
7	Penataan ruang dan Pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana	13	Mewujudkan penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup, budaya, dan penanggulangan bencana	27	Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang secara optimal.	1	115	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	30	100	4,38	4,38	TB	46,09	153,63	TERCAPAI	☺️
						2	116	Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah perkotaan	%	30	15	32,98	219,87	SB	32,98	109,93	TERCAPAI	☺️
				28	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah.	1	117	Persentase Penanganan Sampah	%	100	80	80	100,00	B	179,98	179,98	TERCAPAI	☺️
						2	118	Persentase informasi kerusakan tanah untuk produksi biomassa baik potensi rusak IV, III, II, dan I	%	100	100	100	100,00	B	100	100	TERCAPAI	☺️
						3	119	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya, dan diinformasikan status mutu airnya	%	100	100	100	100,00	B	100	100	TERCAPAI	☺️
				29	Meningkatnya infrastruktur dan kesiapsiagaan bencana.	1	120	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pelatihan tanggap darurat bencana	Org	10	8	3	37,50	TB	3	s	TERCAPAI	☺️
						2	121	Presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	B	100	100	TERCAPAI	☺️
3	122	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) layanan	%			100	90	80	88,89	CB	80	80,00	TERCAPAI	☺️				



“Peningkatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan yang Berkualitas”

				Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)												
		30	Memajukan seni dan budaya serta memelihara dan melindungi situs sejarah maupun benda-benda kepurbakalaan.	1	123	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Buah	25	22	12	54,55	KB	38	152,00	TERCAPAI	☺
				2	124	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	4	3	6	200,00	SB	32	800,00	TERCAPAI	☺
8	Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, Suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat	14	Menciptakan iklim demokrasi dan politik yang kondusif	31	125	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik	Kali	25	5	14	280	SB	14	56,00	KERJA KERAS	☹
		15	Mewujudkan ketertiban dan ketenteraman serta suasana religius dalam kehidupan bermasyarakat	32	126	Terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.	Buah	16	15	15	100,00	B	15	93,75	TERCAPAI	☺
				33	Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama	1	127	Jumlah pemuka agama/ lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/fasilitas	Org	2805	484	143	29,55	TB	883	31,48
2	128	Jumlah sarana dan prasarana ibadah yang mendapatkan bantuan	Buah			75	74	36	48,65	TB	141	188,00	TERCAPAI	☺		

Sumber Data : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019



6.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

Target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 diurai pada tabel 6.3 sebagai berikut:

Tabel 6.3
Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kab. Bulukumba Tahun 2021

No	Fokus/Bidang Urusan/Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Target RPJMD 2021
ASPEK KESEJAHTERAAN				
I	Kemampuan Ekonomi Daerah			
1	Pertumbuhan PDRB	%	5,97	8,5
2	PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)	Rp	9.482.420,10	14.526,785,63
3	PDRB perkapita	Rp	23.100.527,78	32.904.996,77
4	Jumlah penduduk miskin	Jiwa	34.131	17.316
5	Persentase pertumbuhan jumlah pendapatan daerah.	%	5,27	10,48
II	Kesejahteraan Masyarakat			
A	Pendidikan			
1	Angka melek huruf	%	92,48	93
2	Angka Partisipasi Kasar (APK):			
	a. SD/MI	%	140,87	100
	b. SMP/MTs	%	146,26	100
	c. SMA//SMK/MA	%	126,06	100
3	Angka Partisipasi Murni (APM):			
	a. SD/MI	%	123,43	100
	b. SMP/MTs	%	102,46	100
	c.SMA//SMK/MA	%	91,93	100
B	Kesehatan			
1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	%	83	95
2	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	89	97
3	Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	%	95	100
4	Persentase cakupan pelayanan anak balita	%	64	90
ASPEK PELAYANAN UMUM				
A	Layanan Urusan Wajib			
I	Pendidikan			
1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik			
	a. Ruang kelas	%	18,03	23,67
	b. Perpustakaan	%	40	45
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik			
	a.Ruangkelas	%	20,07	200
	b.Perpustakaan	Unit	13	23
	c.Laboratorium	Unit	20	25
3	Sekolah pendidikan SMA/SMK kondisi bangunan baik			
	a.Ruangkelas	%	65,45	75,67
	b.Perpustakaan	%	74,9	79
	c.Laboratorium	%	71,92	76
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS):			
	a. SD/MI	%	134,63	100
	b. SMP/MTs	%	111,08	100
	c. SMA//SMK/MA	%	96,52	



No	Fokus/Bidang Urusan/Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Target RPJMD 2021
5	Angka Melanjutkan (AM)			
	a. SD ke SMP	%	103,58	99,68
	b. SMP ke SMA	%	93,39	98,75
6	Angka Putus Sekolah/Drop Out:			
	a. SD/MI	%	0,09	0,04
	b. SMP/MTs	%	0,22	0,1
	c. SMA//SMK/MA	%	0,22	0,05
7	Rasio guru dan murid:			
	a. SD/MI	%	01.24	01.30
	b. SMP/MTs	%	01.22	01.30
	c. SMA//SMK/MA	%	01.22	01.30
8	Persentase kelulusan:			
	a. SD/MI	%	98,66	100
	b. SMP/MTs	%	98,84	100
	c. SMA//SMK/MA	%	89,19	100
9	Persentase jumlah satuan pendidikan yang sudah terakreditasi:			
	a. SD/MI	%	69,54	98
	b. SMP/MTs	%	43,05	65
	c.SMA/SMK/MA	%	33,33	50
10	Persentase sekolah yang memanfaatkan pembelajaran berbasis TIK.	%	33,33	38
11	Jumlah siswa miskin yang memperoleh beasiswa			
	a. SD/MI	Org	13.615	20.000
	b. SMP/MTs	Org	4.626	6.000
	c.SMA/MA	Org	3.574	5.000
	d.SMK	Org	754	1.000
12	Jumlah medali peserta didik pada kejuaraan/lomba tingkat regional dan nasional.	Buah	3	10
13	Jumlah kegiatan pembinaan pendidikan non formal.	Keg.	27	42
14	Persentase pendidik yang tersertifikasi pada satuan pendidikan.			
	a. SD/MI	%	48,3	65
	b. SMP/MTs	%	53,41	70,55
	c.SMA/MA	%	84,44	95
	d.SMK	%	38,95	60
II	Kesehatan			
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100
2	Cakupan pelayanan nifas	%	92	100
3	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan sederajat	%	87	100
4	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	13	50
5	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	11	60
6	Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	15	50
7	Cakupan pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	%	19	50
8	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	%	15	40
9	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	5,5	26
10	Cakupan desa yang melaksanakan	%	84	98



No	Fokus/Bidang Urusan/Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Target RPJMD 2021
	STBM			
11	Persentase Pemberi pelayanan GD yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/ GELS/ALS	%	68,5	100
12	Persentase kepuasan pelanggan rawat jalan dan rawat inap	%	82,6	95
13	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	Unit	0	20
III	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	55,3	100
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	82	100
3	Persentase luas jaringan irigasi yang terpelihara dan direhabilitasi	%	45,45	100
4	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,174	0,13
5	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%	72,14	100
6	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	14,083	30
7	Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah perkotaan	%	4	30
IV	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Rasio rumah layak huni	%	84,41	91,38
2	Persentase kawasan kumuh	%	0,18	0,06
3	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	57	80
V	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pelatihan tanggap darurat bencana	Org	2	10
2	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	58,6	100
4	Jumlah kegiatan pendidikan politik masyarakat	Kali	5	25
5	Jumlah peraturan daerah/ peraturan bupati yang diawasi dan dipantau	Buah	11	16
6	Jumlah pemuka agama/ lembaga keagamaan yang mendapatkan pembinaan/fasilitas.	Org	385	484
7	Jumlah sarana dan prasarana ibadah yang mendapatkan bantuan	Buah	70	75
VI	Sosial			
1	Jumlah sarana sosial yang direhabilitasi	Buah	18	23
2	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	5,83	8,24
	Non Pelayanan Dasar			
I	Tenaga Kerja			
1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	90	97
2	Angka pengangguran terbuka	%	1,35	0,64
3	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	Kasus	1	2
II	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Cakupan korban kekerasan yang	Kasus	208	150



No	Fokus/Bidang Urusan/Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Target RPJMD 2021
	mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan terpadu.			
III	Ketahanan Pangan			
1	Jumlah desa mandiri pangan yang dibina	Unit	5	10
2	Jumlah lumbung pangan yang dibangun	Unit	10	35
3	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	Ton	10	150
4	Jumlah cadangan pangan masyarakat	Ton	44	250
5	Pembinaan kelompok wanita tani	Klp	31	101
IV	Pertanahan			
1	Penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah	Kasus	12	5
V	Lingkungan Hidup			
1	Persentase informasi kerusakan tanah untuk produksi biomassa baik potensi rusak IV, III, II, dan I	%	40	100
2	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya, dan diinformasikan status mutu airnya	%	90	100
3	Persentase Penanganan Sampah	%	57,83	100
VI	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Cakupan penerbitan kartu keluarga (KK)	%	96,68	95
2	Cakupan penerbitan KTP-el	%	68,89	100
3	Jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk		199,35	220
4	Cakupan penerbitan akta kematian.	%	0,18	0,9
VII	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Jumlah Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) yang dibentuk	Unit	60	109
VIII	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi	Set	155	142
2	Persentase cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif.	%	10,25	18,5
IX	Perhubungan			
1	Jumlah pelabuhan rakyat yang direhabilitasi	Buah	1	3
2	Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	Buah	1	2
X	Komunikasi dan Informatika			
1	Jumlah penyiaran TV/ Radio Lokal	Buah	11	11
XI	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
1	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dibina	Klp	300	500
2	Persentase koperasi berprestasi	%	2,44	3,11
3	Jumlah UMKM aktif non BPR/LKM	Unit	10.215	11.200
4	Jumlah usahawan yang dibina	Org	344	544
XII	Penanaman Modal			
1	Jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Buah	1.197	6.671
2	Jumlah produk hukum daerah terkait	Buah	3	11



No	Fokus/Bidang Urusan/Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Target RPJMD 2021
	perizinan.			
3	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Apl.	1	1
4	Jumlah nilai investasi:			
	a. PMDN	Rp.	50 milyar	160 milyar
	b. PMA	\$	2 juta	6,4 juta
XIII	Kepemudaan dan Olahraga			
1	Jumlah organisasi pemuda	Unit	42	47
2	Jumlah prestasi karya ilmiah remaja	Kali	3	21
3	Jumlah organisasi olahraga	Unit	21	36
4	Jumlah prestasi olahraga yang dicapai	Kali	13	71
XIV	Statistik			
1	Persentase tingkat keterisian data dalam system informasi pembangunan daerah	%	53	70
XV	Kebudayaan			
1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Buah	20	25
2	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	2	4
XVI	Perpustakaan			
1	Jumlah perpustakaan yang dibina	Unit	600	900
XVII	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			
I	Kepegawaian			
1	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang menyelesaikan jenjang pendidikan formal S1, S2, dan S3.	Org	155	31
2	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Org	563	563
3	Jumlah aparatur yang memperoleh penghargaan	Org	1.250	250
4	Jumlah aparatur yang mendapatkan penjatuhan hukuman disiplin	Org	60	12
5	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Org	204	1.020
XVIII	Perencanaan			
1	Persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	%	100	100
2	Kategori penilaian SAKIP dari kementerian PAN dan RB		CC	CC
XIX	Keuangan			
1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini	WTP	WTP
2	Dokumen APBD	Dok	2	2
XX	Pemerintahan Umum			
1	Jumlah produk hukum daerah yang dihasilkan	Buah	419	3.200
2	Persentase tindak lanjut temuan	%	80	100
3	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba	%	58,42	100
4	Tingkat Maturitas SPIP Level 3	%	-	Level 3
5	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Level 3	%	-	Level 3
6	Jumlah produk hukum yang terkait dengan kelembagaan	Buah	3	3
7	Jumlah kerjasama antar daerah	Buah	4	7
B	Layanan Urusan Pilihan			
I	Kelautan dan Perikanan			



No	Fokus/Bidang Urusan/Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat.	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Target RPJMD 2021
1	Cakupan pembinaan kelompok nelayan	%	65,62	65,62
2	Jumlah produksi perikanan	Ton	164.402	205.502
II	Pariwisata			
1	Jumlah obyek wisata yang dikelola dan dikembangkan	Buah	9	12
2	Jumlah kunjungan wisatawan	Org	180.741	400.000
III	Pertanian			
1	Rata-rata pendapatan perkapita masyarakat petani	Rp.	99.500	528.158
2	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan terhadap PDRB	%	42,46	36.706
3	PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan atas dasar harga berlaku (ADHB).	Rp.	3.757.187,30	6.334.331,14
4	PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan atas dasar harga konstan (ADHK).	Rp.	2.856.608,02	3.933.249,42
5	Cakupan pembinaan kelompok tani	%	0,12	1
6	Jumlah tempat pengolahan padi yang menggunakan teknologi	Unit	9	90
7	Pertumbuhan populasi ternak:			
	a.Sapi potong	Ekor	68.344	92.110
	b.Kerbau	Ekor	1.570	1.727
	c.Kuda	Ekor	27.246	30.146
	d.Kambing	Ekor	32.130	44.928
	e. Ayam Buras	Ekor	684.793	1.255.623
	f. Ayam ras pedaging	Ekor	2.040.000	3.613.984
	g. Ayam ras petelur	Ekor	257.922	456.924
	h. Itik	Ekor	17.483	37.042
8	Luas areal komoditi perkebunan	Ha	38.237,50	39.237,50
IV	Kehutanan			
1	Jarak rekonstruksi tata batas Tahura.	km	10	39
V	Energi dan Sumberdaya Mineral			
1	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	RT	91.919	93,519
VI	Perdagangan			
1	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/ direhabilitasi	Buah	15	45

Sumber Data : Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016 – 2021



BAB VII P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 disusun dan berlaku selama satu tahun, yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan DPRD dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

 BUPATI BULUKUMBA, ✓
M. SUKRI A. SAPPEWALI

LAMPIRAN 2.

**Hasil Pemetaan Matriks Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
(Permendagri 13'2006 dan Permendagri 90'2019)**



BUPATI BULUKUMBA

Bulukumba, 23 April 2020

Nomor : 004.4/952/Bappeda
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Pemetaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

K e p a d a
Yth . Bapak Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
di-

Jakarta

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerinta Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba telah melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Selanjutnya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan bersama-sama dengan Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba, sebagian besar program dan kegiatan sesuai RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dapat terpetakan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Terhadap program dan kegiatan yang tidak terpetakan pada masing-masing perangkat daerah, diusulkan untuk diakomodir pada pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019.
3. Terkait dengan Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) yang diatur oleh Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk point 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas, mohon kiranya untuk bisa diakomodir pada proses pemuktahiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


BUPATI BULUKUMBA, ✓
A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

MATRIKS RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2021
(Berdasarkan Permendagri 13/2006)

MATRIKS PEMETAAN RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2021
(Berdasarkan Nomenklatur Permendagri 90/2019)

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																					
1				Urusan Wajib bukan pelayanan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
2.07	2.07.	01	01			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya biaya perjalanan mengantar surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya biaya perjalanan mengantar surat	Administrasi Umum	Terciptanya kelancaran surat menyurat, pembayaran listrik, telepon dan air, terbayarnya pajak kendaraan, jasa administrasi keuangan, tersedianya peralatan rumah tangga, jumlah bahan bacaan, Perjalanan dinas, ATK dan barang cetakan, Makan Minum,	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan kapasitas aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urtusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2.07	2.07	01	2.03	01	
2.07	2.07.	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pembayaran listrik, telepon dan air	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran listrik, telepon dan air								2.07	2.07	01	2.03	02
2.07	2.07.	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perpanjangan STNK dan service	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya dan Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional								2.07	2.07	01	2.03	06
2.07	2.07.	01	07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan								2.07	2.07	01	2.03	07
2.07	2.07.	01	08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor, tersedianya komponen listrik,							2.07	2.07	01	2.03	08
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor								2.07	2.07	01	2.03	12
2.07	2.07.	01	14			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga								2.07	2.07	01	2.03	14
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan								2.07	2.07	01	2.03	15
2.07	2.07.	01	18			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas	Rapat Koordinasi							2.07	2.07	01	2.03	18
2.07	2.07.	01	19			Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Tersedianya ATK, barang cetakan, makanan & minuman rapat	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk kelancaran administrasi								2.07	2.07	01	2.03	10
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan								2.07	2.07	01	2.03	11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																					
2.07	2.07.	02	05			Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Dua dan Empat (3 unit roda dua dan 1 unit roda empat)	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional								2.07	2.07	01	2.03	20
2.07	2.07.	02	07			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan								2.07	2.07	01	2.03	22
2.07	2.07.	02	08			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor								2.07	2.07	01	2.03	24
2.07	2.07.	02	10			Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur								2.07	2.07	01	2.03	25
2.07	2.07.	02	22			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya alat kebersihan dan pengecatan	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya alat kebersihan dan pengecatan								2.07	2.07	01	2.03	28
2.07	2.07.	02	23			Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara								2.07	2.07	01	2.03	29
								Rehabilitasi sedang/Berat mobil jabatan	terpeliharanya mobil jabatan								2.07	2.07	01	2.03	39
								Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional								2.07	2.07	01	2.03	40
2.07	2.07.	02	24			Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara								2.07	2.07	01	2.03	30
2.07	2.07.	02	22			Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya jasa service perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya jasa service perlengkapan gedung kantor								2.07	2.07	01	2.03	32
2.07	2.07.	02	25			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya jasa service peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya jasa service peralatan gedung kantor								2.07	2.07	01	2.03	34

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
2.07	2.07.	02	42			Rehabilitasi sedang/berat gadung kantor	Terlaksananya rehabilitasi kantor	Rehabilitasi sedang/berat gadung kantor	Terlaksananya rehabilitasi kantor							2.07	2.07	01	2.03	38
						Program peningkatan disiplin aparatur														
2.07	2.07.	03	02			Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin Absensi Pegawai							2.07	2.07	01	2.04	01
2.07	2.07.	03	05			Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian olahraga untuk pegawai	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai							2.07	2.07	01	2.04	02
								Pengadaan Pakaian Korpri	Tersedianya Pakaian Korpri							2.07	2.07	01	2.04	04
								Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian olahraga untuk pegawai							2.07	2.07	01	2.04	05
						Program Peningkatan Kapasitas Aparatur														
2.07	2.07.	05	01			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal							2.07	2.07	01	2.04	09
2.07	2.07.	05	03			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aparatur yang telah mengikuti kursus/pelatihan	Sosialisai Peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya Sosialisasi							2.07	2.07	01	2.04	10
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aparatur yang telah mengikuti kursus/pelatihan							2.07	2.07	01	2.04	11
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan														
2.07	2.07.	06	01			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya Pelaporan Keuangan							2.07	2.07	01	2.02	04
2.07	2.07.	06	03			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD							2.07	2.07	01	2.02	06
2.07	2.07.	06	05			Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 2016	Penyusunan Laporan Keuangan bulanan dan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran							2.07	2.07	01	2.02	07
								Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Prognosis Realisasi Anggaran							2.07	2.07	01	2.02	08
2.07	2.07.	06	06			Penyusunan Program Kerja SKPD	Jumlah Dokumen dan laporan yang diselesaikan	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun							2.07	2.07	01	2.02	09
2.07	2.07.	15				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan														
2.07	2.07.	15	01			Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Terlaksananya pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan Penyediaan Sarana dan prasarana kelembagaan	Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum adat	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan Penyediaan Sarana dan prasarana kelembagaan	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urtusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	05	2.01	05
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan							2	13	05	2.01	04
								Identifikasi dan inventarisasi masyarakat Hukum Adat	Tersedianya data identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat							2	13	05	2.01	01
								Kelembagaan Masyarakat desa dan masyarakat hukum adat	Terbentuknya kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat adat							2	13	05	2.01	02
2.07	2.07.	15	03			Penyelenggaraan Desiminasi, Informasi bagi Masyarakat desa														
2.07	2.07.	15	05			Pelaksanaan Pendataan Profil Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pendataan Profil Desa /Kelurahan	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Terlaksananya Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		2	13	05	2.01	11
2.07	2.07.	15	06			Pertemuan Pokjanal Posyandu	Terlaksananya Pertemuan Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kecamatan													

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
2.07	2.07.	15	08			Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	Terlaksananya rapat koordinasi dan pelaksanaan gelar TTG	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi tepat Guna	Terlaksananya kegiatan Pemanfaatan Teknologi tepat Guna	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	Terlaksananya kegiatan Pemanfaatan Teknologi tepat Guna	Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum adat	Terlaksananya kegiatan Pemanfaatan Teknologi tepat Guna	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		2	13	05	2.01	06
2.07	2.07.	15	09			Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang desa	Terlaksananya penyusunan Perbub tentang Pengelolaan Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum desa, evaluasi dsn pengawasan peraturan desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang desa, pemilihan Kepala Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		2	13	04	2.01	02
								Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Terlaksananya Evaluasi Peraturan Desa							2	13	04	2.01	07
2.07	2.07.	15	10			Pemilihan kepala desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa Antar Waktu dan Pemilihan Anggota BPD	Penyelenggaraan Pemilihan , Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		2	13	04	2.01	09
								Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						2	13	04	2.01	010
								Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Terlaksananya musyawarah di desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						2	13	04	2.01	006
2.07	2.07.	15	11			Pekan Inovasi desa	Terlaksananya pameran inovasi desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pengembangan usha ekonomi masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum adat	Terlaksananya program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		2	13	05	2.01	05
								Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya fasilitas pemanfaatan teknologi Tepat Guna							2	13	05	2.01	06
2.07	2.07.	16				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan														

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
2.07	2.07.	16	03			Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Terlaksananya pelatihan manajemen bagi pengelolaan badan usaha milik desa dan Penilaian lomba bumdes	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Terlaksananya Kerjasama Antar Desa	Fasilitas Kerjasama Antar Desa	Terlaksananya Fasilitasi kerjasama antar desa, fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Program Administrasi Pemerintahan Desa, peningkatan kerjasama antar desa, Pemberdayaan lembaga masyarakat. Lembaga adat dan hukum masyarakat hukum adat, administrasi pemerintahan desa, dan program penataan desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urtusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	03	2.01	01
								Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ke Tiga	Terlaksananya i Kerja sama Desa dengan Pihak Ke Tiga	Fasilitas Kerjasama Antar Desa		Program Peningkatan Kerjasama Desa				2	13	03	2.01	03
								Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi Masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat				2	13	05	2.01	05
								Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan bumdes dan lembaga Kerjasama antar Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa				2	13	04	2.01	08
2.07	2.07.	16	04			Penyusunan PERDA Bumdes	Terlaksananya penyusunan perda Bumdes	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya beberapa penyusunan produk hukum desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan bumdes dan lembaga Kerjasama antar Desa	Program Administrasi Pemerintah Desa				2	13	04	2.01	02
2.07	2.07.	16	05			Fasilitasi Pembentukan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terlaksananya penyelenggaraan penataan desa	Program Penataan Desa				2	13	02	2.01	01
								Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Terlaksananya kegiatan Penamaan dan Kode Desa							2	13	02	2.01	04
								Penyediaan Prasarana dan Sarana Transfortasi desa	Tersedianya sarana dan prasarana transfortasi desa							2	13	02	2.01	05
								Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi Masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat				2	13	05	2.01	05
2.07	2.07.	17				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa														
2.07	2.07.	17	01			Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Terlaksananya penguatan kelompok dalam mewujudkan program Pansimas dan PPSP													
2.07	2.07.	17	05			Penilaian Perlombaan Desa/Kel	Terlaksananya Penilaian perlombaan Desa/Kel di setiap kecamatan													

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
2.07	2.07.	17	07			Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat														
2.07	2.07.	17	08			Penetapan Batas Wilayah Desa	Terfasilitasinya rancangan Perbub tentang penetapan batas Desa	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Terlaksananya Tata Wilayah Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terlaksananya fasilitasi tata wilayah desa, dan penamaan kode desa	Program Penataan Desa	Terlaksananya program Penataan Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urtusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	02	2.01	02	
								Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Terlaksananya Kegiatan Penamaan dan Kode Desa							2	13	02	2.01	04	
2.07	2.07.	18				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa															
2.07	2.07.	18	02			Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pelatihan pengelolaan keuangan desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa, pelatihan aparatur pemerintah desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya program administrasi pemerintahan Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urtusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	01	
								Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa							2	13	04	2.01	03	
								Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa							2	13	04	2.01	04	
2.07	2.07.	18	04			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa							2	13	04	2.01	04	
2.07	2.07.	18	05			Peningkatan kapasitas pemerintahan desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD							2	13	04	2.01	05	
								Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana desa dalam pelayanan masyarakat	Program Penataan Desa	Terlaksananya program Penataan Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urtusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	02	2.01	06	
								Penyediaan dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan desa	Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan desa	Penyelenggaraan Penataan Desa						2	13	02	2.01	07	
2.07	2.07.	19				Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan															
2.07	2.07.	19	01			Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Meningkatnya kapasitas kader Dasawisma	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama	Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urtusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	05	2.01	05	
2.07	2.07.	19	02			Pembinaan kelembagaan PKK	Berfungsinya kelembagaan PKK di Desa/kel														

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
SEKRETARIAT DPRD																				
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran							SEKRETARIAT DPRD	Unsur Penunjang Pemerintahan					
04	01	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya pelayanan surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya pelayanan surat menyurat	Administrasi umum	terlaksananya pelayanan surat menyurat	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		X	XX	01	2.03	01	
04	01	02				Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Administrasi umum	terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		X	XX	01	2.03	02	
04	01	04				penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	terpeliharanya kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	terpeliharanya kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	terpeliharanya kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	Program Layanan dan administrasi keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		4	02	02	2.02	03	
04	01	06				Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan roda dua dan empat	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan roda dua dan empat	Administrasi Umum	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan roda dua dan empat	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		X	XX	01	2.03	06	
04	01	07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terlaksananya dan meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terlaksananya dan meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan	Administrasi Umum	Terlaksananya dan Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya administrasi perkantoran dan Pengelolaan Keuangan Daerah		4	02	02	2.03	01	
								Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	terlaksananya dan meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Terlaksananya dan Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Program Layanan dan administrasi keuangan	Meningkatnya administrasi perkantoran dan Pengelolaan Keuangan Daerah				01	2.02	02	
04	01	08				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor Sekretariat DPRD	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor Sekretariat DPRD	Administrasi Umum	Terpeliharanya kebersihan kantor Sekretariat DPRD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				01	2.03	08	
04	01	12				Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor secara optimal	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor secara optimal	Administrasi Umum	terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor secara optimal	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				01	2.03	12	
04	01	13				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya cenderamata/ plakat	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya cenderamata/plakat	Administrasi Umum	Terpenuhinya cenderamata/ plakat	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				01	2.03	13	
04	01	14				Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Tersedianya alat - alat rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Tersedianya alat - alat rumah tangga	Administrasi Umum	Tersedianya alat - alat rumah tangga	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				01	2.03	14	
04	01	15				Penyediaan bahan bacaan & Peraturan perundang - undangan	Terpenuhinya penyebaran informasi pembangunan daerah	Penyediaan bahan bacaan & Peraturan perundang - undangan	Terpenuhinya penyebaran informasi pembangunan daerah	Administrasi Umum	Terpenuhinya penyebaran informasi pembangunan daerah	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		X	XX	01	2.03	15	
04	01	18				Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Administrasi Umum	terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		X	XX	01	2.03	18	
04	01	19				Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				01	2.03	10	
								Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum	Terlaksananya Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				01	2.03	11	
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan Minuman	Administrasi Umum	Terlaksananya Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				01	2.03	17	
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur													
04	02	07				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terciptanya Kondisi Aman dan Nyaman	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terciptanya Kondisi Aman dan Nyaman	Administrasi umum	Terciptanya Kondisi Aman dan Nyaman	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur				01	2.03	22	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN			
	04	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor-Laptop, PC, Printer	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor-Laptop, PC, Printer	Administrasi umum	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor-Laptop, PC, Printer	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur				01	2.03	23
	04	02	10			Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebeleur kantor	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebeleur kantor	Administrasi umum	Terpenuhinya mebeleur kantor	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur				01	2.03	25
	04	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Administrasi umum	Terpeliharanya gedung kantor	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur				01	2.03	28
	04	02	23			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terawatnya Mobil Jabatan jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terawatnya Mobil Jabatan jabatan	Administrasi umum	Terawatnya Mobil Jabatan jabatan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur				01	2.03	29
	04	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas oprasional	Terpeliharanya kendaraan roda empat dan roda dua	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas oprasional	Terpeliharanya kendaraan roda empat dan roda dua	Administrasi umum	Terpeliharanya kendaraan roda empat dan roda dua	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur				01	2.03	30
	04	02	28			Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Administrasi umum	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur				01	2.03	33
	04	02	29			Pemeliharaan ruti/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Pemeliharaan ruti/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Administrasi umum	Terpeliharanya mebeleur kantor	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur				01	2.03	35
	04	02	42			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya biaya rehab gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya biaya rehab gedung kantor	Administrasi umum	Tersedianya biaya rehab gedung kantor	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur				01	2.03	38
	01	04	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur												
	04	03	02			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Meningkatnya Disiplin Aparatur		4	02	02	2.02	02
	01	04	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
	04	05	03			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Terlaksananya bimbingan teknis PNS Lingkup Sekretariat DPRD	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Terlaksananya bimbingan teknis PNS Lingkup Sekretariat DPRD	Peningkatan Disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya bimbingan teknis PNS Lingkup Sekretariat DPRD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur				01	2.04	11
								Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal ASN Lingkup Sekretariat DPRD	Peningkatan Disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	TerlaksananyaPeningkatan Disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		X	XX	01	2.04	09
	01	04	06			Program Peningkatan Pengambangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
	04	06	01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya Kualitas Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				01	2.02	06
	04	06	04			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				01	2.02	09
	04	06	05			Penyusunan program kerja SKPD	Terlaksananya penyusunan program kerja SKPD	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan program kerja SKPD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				01	2.01	01
								Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan program kerja SKPD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				01	2.02	02
								Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat daerah	Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan program kerja SKPD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				01	2.02	03

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN			
								Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan program kerja SKPD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			01	2.02	08	
	04	06	06			Penatausahaan administrasi kepegawaian	Tertibnya administrasi kepegawaian sekretariat DPRD	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tertibnya administrasi kepegawaian sekretariat DPRD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertibnya administrasi kepegawaian sekretariat DPRD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		4	02	02	2.01	01
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertibnya administrasi kepegawaian dan kinerja perangkat daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertibnya administrasi kepegawaian dan kinerja perangkat daerah	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			01	2.04	01	
	01	04	15			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah												
	04	15	01			Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terciptanya PERDA (16 Ranperda) 11 Prolektas 3 APBD 2 Prakarsa	Pembahasan Rancangan Perda	Terciptanya PERDA (16 Ranperda) 11 Prolektas 3 APBD 2 Prakarsa	Pembentukan perda dan Peraturan DPRD	Terciptanya PERDA (16 Ranperda) 11 Prolektas 3 APBD 2 Prakarsa	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		4	02	03	2.01	02
	04	15	02			Hearing, dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Terwujudnya koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat/ agama	Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi Persetujuan Kerja sama daerah	Terwujudnya koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat/ agama	Pembahasan Kerja sama daerah	Terwujudnya koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat/ agama	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		4	02	03	2.07	01
	04	15	03			Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya rapat - rapat alat kelengkapan dewan	Penyediaan Fasilitas Fraksi DPRD	Terlaksananya rapat - rapat alat kelengkapan dewan dan penyediaan Fasilitas Fraksi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya rapat - rapat alat kelengkapan dewan dan penyediaan Fasilitas Fraksi DPRD	Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		4	02	02	2.01	03
								Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya rapat - rapat alat kelengkapan dewan dan tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya rapat - rapat alat kelengkapan dewan dan tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		4	02	03	2.04	05
	04	15	04			Rapat - rapat paripurna	Terlaksananya rapat paripurna DPRD	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya rapat paripurna pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna Pembahasan Kebijakan Anggaran	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		4	02	03	2.02	01
								Fasilitasi Rapat DPRD	Terlaksananya Fasilitas Rapat DPRD	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna Pembahasan Kebijakan Anggaran	Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		4	02	02	2.01	02
								Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Terlaksananya Rapat Paripurna Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Pembahasan Anggaran	Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna Pembahasan Kebijakan Anggaran	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		4	02	03	2.02	01
								Pembahasan APBD	Terlaksananya Rapat Paripurna Pembahasan APBD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna Pembahasan Kebijakan Anggaran	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		4	02	03	2.02	03
								Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Rapat Paripurna Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna Pembahasan Kebijakan Anggaran	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		4	02	03	2.02	04
								Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Rapat Pembahasan Laporan Semester	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna Pembahasan Kebijakan Anggaran	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		4	02	03	2.02	05
								Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terciptanya Laporan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna Pembahasan Kebijakan Anggaran	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		4	02	03	2.02	06
	04	15	05			Kegiatan reses	Terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat	Kunjungan Kerja dalam daerah	Terlaksananya Penyerapan aspirasi dan kunjungan kerja dalam daerah	Penyerapan dan Penghimpunan aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		4	02	03	2.05	01
								Pelaksanaan Reses	Terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		4	02	03	2.05	03
	04	15	06			Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	terwujudnya koordinasi antar daerah, provinsi, dan pusat	Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	Terwujudnya koordinasi antar daerah, provinsi dan pusat	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terwujudnya koordinasi antar daerah, provinsi dan pusat	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		4	02	03	2.08	01
	04	15	07			Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Bimbingan Teknis DPRD	Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/Non PNS	Peningkatan Kapasitas DPRD	Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		4	02	03	2.08	02
								Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Tersusunnya Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Meningkatnya kapasitas dan fasilitasi pimpinan dan anggota DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			03	2.08	02	
	04	15	09			Peningkatan publikasi dan informasi kelembagaan DPRD	Terwujudnya publikasi dan informasi kegiatan DPRD	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terwujudnya Publikasi dan Informasi Kelembagaan DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terwujudnya Publikasi dan Informasi Kelembagaan DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		4	02	03	2.04	03
								Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terwujudnya Publikasi dan Informasi Kelembagaan DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terwujudnya Publikasi dan Informasi Kelembagaan DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		4	02	03	2.04	06

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
								Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Terwujudnya Publikasi dan Informasi Kelembagaan DPRD	Pembahasan Kerja sama daerah	Terwujudnya Publikasi dan Informasi Kelembagaan DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah							
	04	15	11			Aspirasi masyarakat	Terlaksananya penerimaan aspirasi masyarakat	Penyusunan Pokok - pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya penerimaan aspirasi masyarakat dan Pokok - pokok pikiran DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penerimaan aspirasi masyarakat dan Pokok - pokok pikiran DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			4	02	03	2.05	02
	04	04	17			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah													
	04	17	38			Penatausahaan administrasi perbendaharaan Daerah	Tertibnya pelaksanaan penatausahaan administrasi perbendaharaan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tertibnya pelaksanaan penatausahaan administrasi perbendaharaan	Administrasi Keuangan	Tertibnya pelaksanaan penatausahaan administrasi perbendaharaan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah					01	2.02	01
	04	17	39			Penatausahaan administrasi pembukuan	Tertibnya pelaksanaan penatausahaan administrasi pembukuan	Penyiapan Bahan Verifikasi	Tersedianya Bahan Verifikasi	Administrasi Keuangan	Tertibnya pelaksanaan penatausahaan administrasi pembukuan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah					01	2.02	03
								Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Administrasi Keuangan	Tertibnya pelaksanaan penatausahaan administrasi pembukuan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah					01	2.03	07
								Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Administrasi Keuangan	Tertibnya pelaksanaan penatausahaan administrasi pembukuan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah					01	2.02	04
	01	04	26			Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	Peningkatan Evaluasi Produk Hukum Daerah dan Koordinasi Ketingkat Pusat dan Propinsi													
	04	26	03			Legislasi rancangan peraturan perundang - undangan	Terciptanya peraturan daerah	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah	Terciptanya Pruduk Hukum Daerah	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terciptanya peraturan daerah	Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Evaluasi Produk Hukum Daerah dan Koordinasi Ketingkat Pusat dan Propinsi			4	02	03	2.01	01
								Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	Terciptanya Pruduk Hukum Daerah	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terciptanya peraturan daerah	Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Evaluasi Produk Hukum Daerah dan Koordinasi Ketingkat Pusat dan Propinsi			4	02	03	2.01	04
								Penyusunan Tata Tertib DPRD	Terciptanya Pruduk Hukum Daerah	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terciptanya peraturan daerah	Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Evaluasi Produk Hukum Daerah dan Koordinasi Ketingkat Pusat dan Propinsi			4	02	03	2.01	05
								Penyusunan Program Kerja DPRD	Terciptanya Pruduk Hukum Daerah	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terciptanya peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Evaluasi Produk Hukum Daerah dan Koordinasi Ketingkat Pusat dan Propinsi			4	02	03	2.04	07
								Penyusunan Kode Etik DPRD	Terciptanya Pruduk Hukum Daerah	Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terciptanya peraturan daerah dan pelaksanaan pengawasan Kode Etik DPRD	Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Evaluasi Produk Hukum Daerah dan Koordinasi Ketingkat Pusat dan Propinsi			4	02	03	2.06	01
								Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya KelompokPakar dan Tim ahli	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terciptanya peraturan daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD	Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Evaluasi Produk Hukum Daerah dan Koordinasi Ketingkat Pusat dan Propinsi			4	02	03	2.04	04
	04	26	04			Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Hukum	Sosialisasi Peraturan perundang - undangan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Hukum	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Hukum	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Peningkatan Evaluasi Produk Hukum Daerah dan Koordinasi Ketingkat Pusat dan Propinsi					01	2.04	10
	04	26	06			Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Terlaksananya sinkronisasi produk hukum DPRD	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Terlaksananya sinkronisasi produk hukum DPRD	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya sinkronisasi produk hukum DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Evaluasi Produk Hukum Daerah dan Koordinasi Ketingkat Pusat dan Propinsi			4	02	03	2.01	03
	04	26	07			Penataan dokumentasi hukum	Tertatanya produk hukum DPRD dan buku-buku peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tertatanya produk hukum DPRD dan buku-buku peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum	Tertatanya produk hukum DPRD dan buku-buku peraturan perundang-undangan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Peningkatan Evaluasi Produk Hukum Daerah dan Koordinasi Ketingkat Pusat dan Propinsi			x	xx	01	2.03	14
	04	04	37			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya Pemgelolaan aset Daerah													

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
	04	37	01			Peningkatan manajemen aset / barang daerah	Tertatanya manajemen aset / barang daerah	pengadaan dan pemeliharaan Kebutuhan Rumah tangga Pimpinan DPRD	Terlaksananya pengelolaan aset rumah tangga Pimpinan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tertatanya manajemen aset / barang daerah	Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pengelolaan aset Daerah dan Layanan Administrasi Keuangan			X	XX	02	2.01	04
								Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor DPRD	Terlaksananya pengelolaan aset/ sarana dan prasarana Kantor DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tertatanya manajemen aset / barang daerah	Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pengelolaan aset Daerah dan Layanan Administrasi Keuangan			X	XX	02	2.01	05
								Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Milik Daerah	Administrasi Umum	Tertatanya manajemen aset / barang daerah	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan aset Daerah dan Layanan Administrasi Keuangan					01	2.03	05
DINAS KESEHATAN																				
02	01	01		Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran							Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Urusan Penunjang Pemerintahan					
02	01	01	02			1Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik.	Sarana telepon, air, dan listrik di lingkup dinas kesehatan dan UPT farmasi berfungsi secara optimal	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik.	Sarana telepon, air, dan listrik di lingkup dinas kesehatan dan UPT farmasi berfungsi secara optimal	Administrasi Umum	Tersedianya Sarana telepon, air, dan listrik, jasa perpanjangan STNK kendaraan, jasa pelayanan adm keuangan, jasa kebersihan kantor, Komponen Instalasi Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, serta pemeliharaan berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan pemeliharaan kend op.	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran serta meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			1	02	02	2.03	02
02	01	01	06			2Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Terlaksananya perpanjangan STNK kendra di lingkup dinas kesehatan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Terlaksananya perpanjangan STNK kendra di lingkup dinas kesehatan							1	02	02	2.03	06
02	01	01	07			3Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan pada lingkup dinas Kesehatan	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan pada lingkup dinas Kesehatan							1	02	02	2.03	07
02	01	01	08			4Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Terciptanya kebersihan kantor dinas kesehatan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Terciptanya kebersihan kantor dinas kesehatan							1	02	02	2.03	08
02	01	01	12			5Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.	Tersedianya alat listrik/ penerangan sesuai kebutuhan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.	Tersedianya alat listrik/ penerangan sesuai kebutuhan kantor							1	02	02	2.03	12
02	01	01	14			6Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan							1	02	02	2.03	14
02	01	01	18			7Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.	Terselenggaranya rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan program kesehatan	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.	Terselenggaranya rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan program kesehatan							1	02	02	2.03	18
02	01	01	19			8Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terpenuhinya kegiatan kesekretariatan Dinas Kesehatan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kegiatan kesekretariatan Dinas Kesehatan							1	02	02	2.03	10
02	0	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur													
02	01	02	07			1Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Terlaksananya pengadaan gedung kantor dan Terlaksananya pengadaan lemari dan arsip	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor.							1	02	02	2.03	22
02	01	02	09			2Pengadaan peralatan gedung kantor.	Tersedianya peralatan kebutuhan kantor dinas kesehatan	Pengadaan peralatan gedung kantor.	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor.							1	02	02	2.03	24
02	01	02	22			3Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Terlaksananya pemeliharaan kantor dinas kesehatan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Terlaksananya pemeliharaan kantor kendaraan dinas							1	02	02	2.03	28
02	01	02	24			4Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas kesehatan hingga tetap laik pakai	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas kesehatan hingga tetap laik pakai							1	02	02	2.03	30
02	01	02	26			5Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	Perlengkapan gedung kantor dapat dimanfaatkan	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.							1	02	02	2.03	31
02	01	02	28			6Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Peralatan gedung kantor dapat dimanfaatkan	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.							1	02	02	2.03	32

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
02	01	05																
02	01	05	01										1	02	03	2.02	03	
02	01	06																
02	01	06	01										1	02	02	2.02	06	
02	01	06	04										1	02	02	2.02	09	
02	01	15																
02	01	15	01										1	02	02	2.01	16	
													1	02	02	2.01	17	
02	01	15	05										1	02	03	2.04	01	
02	01	16																
02	01	16	2										1	02	02	2.02	16	
02	01	16	03										1	02	02	2.01	12	
													1	02	02	2.01	13	
													1	02	02	2.01	18	
													1	02	02	2.01	19	
													1	02	02	2.01	14	
													1	02	02	2.01	15	
													1	02	02	2.01	04	
													1	02	02	2.01	09	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya	Puskesmas yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana							1	02	02	2.01	15
02	01	16	04			3Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Menurunnya angka/ jumlah kasus penyakit menular dan berpotensi wabah	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Menurunnya angka/ jumlah kasus penyakit menular dan berpotensi wabah	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Menurunnya angka/ jumlah kasus penyakit menular dan berpotensi wabah serta Terlaksananya upaya perbaikan gizi					1	02	02	2.02	23
02	01	16	5			4Perbaikan gizi masyarakat	Terlaksananya upaya perbaikan gizi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya upaya perbaikan gizi							1	02	02	2.02	15
02	01	16	06			5Revitalisasi sistem kesehatan	Terlaksananya perbaikan dan penataan sistem perencanaan kesehatan secara berjenjang	Pengembangan Puskesmas	Terlaksananya perbaikan dan penataan sistem perencanaan kesehatan secara berjenjang	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya perbaikan dan penataan sistem perencanaan kesehatan secara berjenjang dan Meningkatnya pelayanan alkes di sarana pelayanan kesehatan					1	02	02	2.01	06
02	01	16	07			6Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan alkes di sarana pelayanan kesehatan	Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang Medik Fasyankes	Meningkatnya pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan							1	02	02	2.01	20
								Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Meningkatnya pelayanan alkes di sarana pelayanan kesehatan	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Meningkatnya pelayanan alkes di sarana pelayanan kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat			1	02	04	2.02	01
02	01	16	09			7Peningkatan kesehatan masyarakat	Meningkatnya jumlah Desa/ Kelurahan siaga aktif	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya jumlah Desa/Kelurahan siaga aktif	Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	Meningkatnya jumlah Desa/Kelurahan siaga aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat			1	02	05	2.01	01
02	01	16	12			8Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terselenggaranya SPGDT, pemantauan dan pembinaan sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terselenggaranya SPGDT, pemantauan dan pembinaan sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta	Penerbitan Izin RS kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Terselenggaranya SPGDT, pemantauan dan pembinaan sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				1	02	02	2.04	04
02	01	16	14			9Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lingkungan sehat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lingkungan sehat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lingkungan sehat dan					1	02	02	2.02	17
02	01	16	16			10Pelayanan kesehatan gratis	Meningkatnya kepesertaan JKN melalui PBI Lokal	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kepesertaan JKN melalui PBI Lokal							1	02	02	2.02	26
02	01	16	18			11Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	Tersedianya pengembalian jasa layanan kesehatan di puskesmas dan tersedianya insentif/ jasa petugas di puskesmas rawat inap	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pengembalian jasa layanan kesehatan di puskesmas dan tersedianya insentif/ jasa petugas di puskesmas rawat inap	Administrasi keuangan	Tersedianya pengembalian jasa layanan kesehatan di puskesmas dan tersedianya insentif/ jasa petugas di puskesmas rawat inap	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah								
02	01	16	20			12Pembinaan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk. Daerah Kab/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan JKN yang bermutu bagi masyarakat serta terselenggaranya kegiatan preventif dan promotif di lingkup puskesmas	Program pemenuhan UKM dan UKP	Terpenuhinya UKM dan UKP			1	02	02	2.03	01
02	01	16	24			13Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)	Meningkatnya upaya pelayanan JKN yang bermutu bagi masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya upaya pelayanan JKN yang bermutu bagi masyarakat							1	02	02	2.02	26
02	01	16	25			14Bantuan operasional kesehatan (BOK)	Terselenggaranya kegiatan preventif dan promotif di lingkup puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terselenggaranya kegiatan preventif dan promotif di lingkup puskesmas							1	02	02	2.02	33
02	01	17				Program Pengawasan Obat dan Makanan	Farmasi yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin sesuai Standar													

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN								
02	01	17	01			1Peningkatan pemberdayaan konsumen / masyarakat di bidang obat dan makanan	Menjamin keamanan khasiat dan mutu obat yang beredar di sarana distribusi	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Menjamin keamanan khasiat dan mutu obat yang beredar di sarana distribusi	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Menjamin keamanan khasiat dan mutu obat yang beredar di sarana distribusi	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Farmasi yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin sesuai Standar			1	02	04	2,01	01				
02	01	17	02			2Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Terawasinya bahan berbahaya pada pangan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terawasinya bahan berbahaya pada pangan	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terawasinya bahan berbahaya pada pangan					1	02	04	2,06	01				
02	01	18				Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas																	
02	01	18	02			1Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alam Indonesia	Meningkatnya kegiatan kesehatan tradisional di sarana pelayanan keseh	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Meningkatnya kegiatan kesehatan tradisional di sarana pelayanan keseh	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk. Daerah Kab/Kota	Meningkatnya kegiatan kesehatan tradisional di sarana pelayanan keseh	Program pemenuhan UKM dan UKP	Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas			1	02	02	2,02	19				
02	01	19				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan sederajat																	
02	01	19	01			1Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat.	Meningkatnya pemanfaatan media promosi kesehatan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatnya pemanfaatan media promosi kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk ber PHBS	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	Meningkatnya pemanfaatan media promosi kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk ber PHBS	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan sederajat			1	02	05	2,02	01				
02	01	19	02			2Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat.	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk ber PHBS																	
02	01	19	03			3Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	Meningkatnya fungsi dan kunjungan ke sarana kesehatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Meningkatnya fungsi dan kunjungan ke sarana kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kab/Kota	Meningkatnya fungsi dan kunjungan ke sarana kesehatan					1	02	05	2,03	01				
02	01	20				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita yang ditimbang berat badannya (D/S)																	
1	01	20	02			1Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Terlaksananya penanganan masalah gizi pada bayi, balita dan Ibu hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya penanganan masalah gizi pada bayi, balita dan Ibu hamil sehingga status gizi masyarakat meningkat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya penanganan masalah gizi pada bayi dan balita serta kegiatan penyelenggaraan kabupaten sehat dan penguatan kelembagaan, Meningkatnya status gizi masyarakat dan kawasan lingkungan sehat, Terwujudnya sarana TTU dan TPM yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan, Menurunnya populasi vektor penyebab penyakit, angka kejadian penyakit menular serta Meningkatnya cakupan imunisasi dan kewaspadaan dini terhadap kejadian wabah penyakit dan respon cepat KLB serta Tersedianya dokumen maklumat layanan dan Meningkatnya standar pelayanan di Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita yang ditimbang berat badannya (D/S), Cakupan desa yang melaksanakan STBM, akupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam, Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB dan Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV serta Jumlah puskesmas yang terakreditasi							1	02	02	2,02	15
02	01	20	03			3Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, Gaky, Kekurangan Vit. A dan Zat Gizi Mikro Lainnya	Meningkatnya status gizi masyarakat																	
02	01	21				Program pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan desa yang melaksanakan STBM																	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
02	01	21	01			1Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya kawasan lingkungan sehat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya kawasan lingkungan sehat serta Terwujudnya sarana TTU dan TPM yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan							1	02	02	2,02	17
02	01	21	02			2Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Terwujudnya sarana TTU dan TPM yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan													
02	01	21	03			3Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan kabupaten sehat dan penguatan kelembagaan	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan kabupaten sehat dan penguatan kelembagaan							1	02	02	2,02	29
02	01	22				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam													
							Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB													
							Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV													
02	01	22	01			1Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Menurunnya populasi vektor penyebab penyakit	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menurunnya populasi vektor penyebab penyakit, angka kejadian penyakit menular akibat Malaria, Ispa dan Rabies, serta kasus penyakit endemik/ epidemik							1	02	02	2,02	25
02	01	22	05			2Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya angka kejadian penyakit menular akibat Malaria, Ispa dan Rabies													
02	01	22	06			3Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemi	Menurunnya kasus penyakit endemik/ epidemik													
02	01	22	08			4Peningkatan Imunisasi	Meningkatnya cakupan imunisasi	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI) dan pemberian Obat Massal	Meningkatnya cakupan imunisasi							1	02	02	2,02	36
02	01	22	09			5Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan wabah	Meningkatnya kewaspadaan dini terhadap kejadian wabah penyakit dan respon cepat KLB	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya kewaspadaan dini terhadap kejadian wabah penyakit dan respon cepat KLB							1	02	02	2,02	20
02	01	22	10			6Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit)	Terlaksananya upaya penanggulangan kasus HIV bagi kelompok rentan dan beresiko	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya upaya penanggulangan kasus HIV bagi kelompok rentan dan beresiko							1	02	02	2,02	12
02	01	22	12			7Penanggulangan penyakit TB Paru	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat TB Paru	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat TB Paru							1	02	02	2,02	11
02	01	22	13			8Penanggulangan penyakit kusta	Menurunnya kasus penyakit kusta	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menurunnya kasus penyakit kusta							1	02	02	2,02	25
02	01	23				Program Standarisasi pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang terakreditasi													
02	01	23	01			1Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	Tersedianya dokumen maklumat layanan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tersedianya dokumen maklumat layanan dan Meningkatnya standar pelayanan di Puskesmas	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedianya dokumen maklumat layanan, data dasar, profil kesehatan dan data set prioritas dalam sistem informasi kesehatan serta Meningkatnya standar pelayanan di Puskesmas					1	02	02	2,03	01
02	01	23	02			2Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya standar pelayanan di Puskesmas													
02	01	23	03			3Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan.	Tersedianya data dasar, profil kesehatan, data set prioritas dalam sistem informasi kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Tersedianya data dasar, profil kesehatan, data set prioritas dalam sistem informasi kesehatan							1	02	02	2,03	02
02	01	23	06			4Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.	Terevaluasinya kemajuan program dan kegiatan secara bertahap dan berjenjang	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terevaluasinya kemajuan program dan kegiatan secara bertahap dan berjenjang	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terevaluasinya kemajuan program dan kegiatan secara bertahap dan berjenjang	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya kemajuan program dan kegiatan secara bertahap dan berjenjang			1	02	01	1,01	05
02	01	23	09			5Akreditasi Puskesmas	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kab/Kota	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk Kab/Kota	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah puskesmas yang terakreditasi			1	02	02	2,02	35

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
02	01	23	10			6Lomba/seleksi tenaga kesehatan berprestasi	Terselenggaranya seleksi bagi tenaga kesehatan teladan/ berprestasi menurut profesi (9 kategori)	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM	Terselenggaranya seleksi bagi tenaga kesehatan teladan/ berprestasi menurut profesi (9 kategori)	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM tk. Daerah Kab/Kota	Terselenggaranya seleksi bagi tenaga kesehatan teladan/ berprestasi menurut profesi (9 kategori)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terselenggaranya seleksi bagi tenaga kesehatan teladan/ berprestasi menurut profesi (9 kategori)			1	02	03	2,04	01	
02	01	25				Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas /puskesmas pembantu dan Jaringannya	Puskesmas dan jaringannya memenuhi persyaratan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan														
02	01	25	07			1Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas.	Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana dan prasarananya	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarannya	Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kab/Kota	Jumlah Puskesmas dan Pustu/ Poskesdes yang terpenuhi sarana prasarananya	Program Pemenuhan UKP dan UKM	Puskesmas dan jaringannya memenuhi persyaratan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan, Persentase cakupan pelayanan anak balita, Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut			1	02	02	2,01	12	
								Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terpenuhi prasarananya							1	02	02	2,01	13	
02	01	25	08			2Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	Jumlah Pustu/ Poskesdes yang terpenuhi sarana prasarananya	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pustu/ Poskesdes yang terpenuhi sarannya							1	02	02	2,01	12	
								Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pustu/ Poskesdes yang terpenuhi prasarananya							1	02	02	2,01	13	
02	01	29				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase cakupan pelayanan anak balita														
02	01	29	03			1Rekrutmen Tenaga Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Terlaksananya pemantauan kesehatan anak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terlaksananya pemantauan kesehatan anak dan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesehatan bayi & balita	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk Kab/Kota	Terlaksananya pemantauan kesehatan anak, kegiatan pembinaan dan peningkatan kesehatan bayi & balita, pemeliharaan kesehatan pad usia serta program kesehatan pengembangan dan penunjang					1	02	02	2,02	04	
02	01	29	04			2Pelatihan dan Pendidikan perawatan anak balita	Persentase kegiatan pembinaan dan peningkatan kesehatan bayi & balita														
02	01	30				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut														
02	01	30	01			1Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan kesehatan pad usia	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya pemeliharaan kesehatan pad usia dan program kesehatan pengembangan dan penunjang							1	02	02	2,02	05	
02	01	30	03			2Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan.	Terlaksananya program kesehatan pengembangan dan penunjang														
02	01	31				Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan														
02	01	31	01			1Pengawasan keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri	Persentase Inspeksi sanitasi makanan hasil industri	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Inspeksi sanitasi makanan hasil industri dan Terawasinya pangan hasil produkdi IRT	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Inspeksi sanitasi makanan hasil industri dan Terawasinya pangan hasil produkdi IRT	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan			1	02	04	2,03	01	
02	01	31	02			2Pengawasan dan Pengendalian keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga	Terawasinya pangan hasil produk di IRT														

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN						
02	01	31	03			3Pengawasan dan Pengendalian keamanan dan Kesehatan Makanan Restoran	Terselenggaranya peningkatan kapasitas penjamah makanan, sosialisasi kantin sehat, bimbingan teknis pengawasan TPM dan pembinaan uji petik TPM di wilayah puskesmas	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terselenggaranya peningkatan kapasitas penjamah makanan, sosialisasi kantin sehat, bimbingan teknis pengawasan TPM dan pembinaan uji petik TPM di wilayah puskesmas	Penerbitan Sertifikat Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terselenggaranya peningkatan kapasitas penjamah makanan, sosialisasi kantin sehat, bimbingan teknis pengawasan TPM dan pembinaan uji petik TPM di wilayah puskesmas						1	02	04	2.04	01	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	penanganan KLB keracunan makanan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	penanganan KLB keracunan makanan	Program pemenuhan UKP dan UKM	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, Cakupan pelayanan nifas, Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (KNI), Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi serta Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus				1	02	02	2.02	17	
02	01	32				Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan															
							Cakupan pelayanan nifas															
							Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (KNI)															
02	01	32	03			1Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.	Meningkatnya Cakupan Kesehatan Ibu & anak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Meningkatnya Cakupan Kesehatan Ibu & anak serta persalinan di sarana kesehatan			Program pemenuhan UKP dan UKM					1	02	02	2.02	02	
02	01	32	04			2Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)	Meningkatnya persalinan di sarana kesehatan															
02	01	33				Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi															
							Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus															
02	01	33	01			1Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	Menurunnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) khususnya penyakit jantung	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Menurunnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) khususnya penyakit jantung								1	02	02	2.02	09	
02	01	33	02			2Pengendalian Penyakit Diabetes Mellitus dan Penyakit Metabolik	Menurunnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) khususnya penyakit Diabetes Mellitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Menurunnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) khususnya penyakit Diabetes Mellitus								1	02	02	2.02	08	
02	01	33	04			4Pengendalian penyakit Paru Obstruktif Kronik	Terlaksananya pengendalian penyakit paru obstruktif kronik	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Terlaksananya pengendalian penyakit paru obstruktif kronik								1	02	02	2.02	25	
02	01	33	03			3Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa, Indra dan Napza	Terlaksananya Pengendalian Penyakit Jiwa, Kesehatan Indera dan Napza		1Terlaksananya Pengendalian Kesehatan Indera								1	02	02	2.02	25	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	2Terlaksananya Pengendalian Penyakit Jiwa								1	02	02	2.02	10	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3Terlaksananya Pengendalian Penyakit Jiwa								1	02	02	2.02	21	
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4Terlaksananya Pengendalian penggunaan Napza								1	02	02	2.02	22	
								Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan Sekolah	5Terlaksananya Pengendalian penggunaan Napza								1	02	02	2.02	27	
RUMAH SAKIT DAENG RADJA																						
02	01	26				Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit yang representatif															

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
02	01	26	01			1Pembangunan Rumah Sakit	Tersedianya ruang gedung pelayanan sesuai SPM	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya ruang gedung pelayanan serta sarana dan prasarana kantor yang memadai	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk. Daerah Kab/Kota	Tersedianya ruang gedung pelayanan serta sarana dan prasarana kantor yang memadai	Program pemenuhan UKP dan UKM	Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit yang representatif			1	02	02	2.01	05	
02	01	26	17			2Rehabilitasi Bangunan rumah sakit	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor yang memadai														
02	01	26	18			3Pengadaan alat-alat kesehatan RS	Tersedianya Peralatan kesehatan RS	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas pelayanan Kesehatan	Tersedianya Peralatan kesehatan RS	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Tk. Daerah Kab/Kota	Tersedianya Peralatan kesehatan, alat kalibrasi dan alat pemeliharaan					1	02	02	2.01	14	
02	01	26				4Pengadaan alat kalibrasi dan alat pemeliharaan	Tersedianya alat kalibrasi dan alat pemeliharaan	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Tersedianya alat kalibrasi dan alat pemeliharaan							1	02	02	2.01	15	
02	01	26				5Pengadaan prasarana listrik RS	Tersedianya prasarana listrik RS	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya prasarana listrik RS	Administrasi Umum	Tersedianya prasarana listrik RS	Program penunjang Urusan pemerintah daerah				1	02	01	2.03	12	
02	01	34				Program pelayanan Kesehatan BLUD	Terlaksananya Pelayanan kesehatan masyarakat di RS secara Optimal														
02	01	26	01			1Pelayanan Kesehatan BLUD	Terlaksananya Pelayanan kesehatan masyarakat	Pengembangan Rumah Sakit	Terlaksananya Pelayanan kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Pelayanan kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Pelayanan kesehatan masyarakat di RS secara Optimal			1	02	02	2.01	05	
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																					
1.05	01.01	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Administrasi Perkantoran					Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8	01	01			
1.05	01.01	01	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Terlaksananya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik,					8	01	01	2.03	01	
1.05	01.01	01	06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.					8	01	01	2.03	06	
1.05	01.01	01	07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan					8	01	01	2.03	07	
1.05	01.01	01	08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Jasa Petugas Kebersihan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Jasa Petugas Kebersihan	Administrasi Umum	terlaksananya Jasa Petugas Kebersihan.					8	01	01	2.03	08	
1.05	01.01	01	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum	tersedianya Komponen Penerangan Bangunan Kantor,					8	01	01	2.03	12	
1.05	01.01	01	14			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya bahan kebersihan Kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya bahan kebersihan Kantor	Administrasi Umum	tersedianya bahan kebersihan kantor.					8	01	01	2.03	14	
1.05	01.01	01	18			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Administrasi Umum	terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah,					8	01	01	2.03	18	
1.05	01.01	01	19			Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Pelayanan Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	1. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum	tersedianya Alat Tulis Kantor					8	01	01	2.03	10	
								2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		bahan cetakan dan Penggandaan					8	01	01	2.03	11	
								3. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman		tersedianya makanan dan minuman.					8	01	01	2.03	17	
1.05	01.01	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur								
1.05	01.01	02	07			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Administrasi Umum	tersedianya meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur					8	01	01	2.03	22	
1.05	01.01	02	09			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	tersedianya Peralatan Gedung Kantor					8	01	01	2.03	24	
1.05	01.01	02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2	Administrasi Umum	tersedianya kendaraan dinas operasional Roda 4 dan Roda 2					8	01	01	2.03	20	
1.05	01.01	02	10			Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	Administrasi Umum	tersedianya mebeleur kantor.					8	01	01	2.03	25	
1.05	01.01	02	22			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Administrasi Umum	terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor.					8	01	01	2.03	28	
1.05	01.01	02	24			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda empat 1 buah dan roda dua 2 buah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya biaya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda empat 1 buah dan roda dua 2 buah	Administrasi Umum	tersedianya biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda empat 1 buah dan Roda dua 2 buah.					8	01	01	2.03	30	
1.05	01.01	02	28			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	terpeliharanya peralatan gedung kantor					8	01	01	2.03	34	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
1.05	01.01	02	42			Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Tersedianya Tempat Pertemuan Kegiatan (Aula)	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya Tempat Pertemuan Kegiatan (Aula)	Administrasi Umum	tersedianya tempat pertemuan kegiatan					8	01	01	2.03	38	
1.05	01.01	06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Menguatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen						Menguatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen								
1.05	01.01	06	02			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Semesteran	1. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran	Administrasi Keuangan	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran					8	01	01	2.02	04	
								2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja					8	01	01	2.02	06	
								3. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran					8	01	01	2.02	07	
								4. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran					8	01	01	2.02	08	
1.05	01.01	06	04			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					8	01	01	2.02	09	
1.05	01.01	06	05			Penyusunan Program Kerja SKPD	Tersedianya Dokumen Renja, Resnra, Anjab, RKA-DPA Perubahan dan Laporan Keuangan	1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja, Renstra					8	01	01	2.01	01	
								2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen RKA-DPA Pokok dan RKA-DPA Perubahan		RKA-DPA Pokok, RKA-DPA Perubahan					8	01	01	2.01	02	
								3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Jabatan dan Analisis Jabatan							8	01	01	2.01	03	
								4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi terkait Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan		terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi terkait Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan					8	01	01	2.01	04	
								5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8	01	01	2.01	05	
1.05	01.01	15				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya Koordinasi Muspida dan Pembentukan serta Pembinaan Komunitas Intelijen Daerah Kab. Bulukumba					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Koordinasi Muspida dan Pembentukan serta Pembinaan Komunitas Intelijen Daerah Kab. Bulukumba			8	01	06			
1.05	01.01	15	05			Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kab. Bulukumba	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kab. Bulukumba	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kab. Bulukumba					8	01	06	2.01		
1.05	01.01	15	07			Operasi Pengamanan dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penanggulangan Gangguan Keamanan dalam Negeri sesuai Amanat Inpres No. 2 Tahun 2013	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Penanggulangan Gangguan Keamanan dalam Negeri sesuai Amanat Inpres No. 2 Tahun 2013, terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini Daerah sesuai Permendagri No.2 tahun 2018 dan terlaksananya Sosialisasi UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial		Penanggulangan Gangguan Keamanan dalam Negeri sesuai Amanat Inpres No. 2 tahun 2013, terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini Daerah sesuai Permendagri No. 2 tahun 2018 dan terlaksananya Sosialisasi UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Meningkatnya Upaya Penciptaan Suasana Kondusif					8	01	06	2.01	05	
1.05	01.01	15				Tim Kewaspadaan Dini Daerah	Terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini Daerah sesuai Permendagri No. 2 tahun 2018														
1.05	01.01	15				Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Sosialisasi UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial														

KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN			
1.05	01.01	15			Operasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing	Meningkatnya upaya penciptaan suasana kondusif	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Meningkatnya upaya penciptaan suasana kondusif										
1.05	01.01	15			Forum Ketahanan Ekonomi Daerah	Terbentuknya Forum Ketahanan Ekonomi Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terbentuknya Forum Ketahanan Ekonomi Daerah dan terbentuknya Tim Terpadu Penanggulangan Narkoba Kab. Bulukumba serta Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terbentuknya Forum Ketahanan Ekonomi Daerah dan Tim Terpadu Penanggulangan Narkoba Kab. Bulukumba serta terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	8	01	05		
1.05	01.01	15			Fasilitasi Pemberantasan dan Peredaran Narkoba	Terbentuknya Tim Terpadu Penanggulangan Narkoba Kab. Bulukumba								8	01	05	2.01	
1.05	01.01	15			Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba												
1.05	01.01	17			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penetapan Kebijakan Operasional dibidang Wawasan Kebangsaan, Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan dan Penghargaan Kebangsaan						Penetapan Kebijakan Operasional dibidang Wawasan Kebangsaan, Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan dan Penghargaan Kebangsaan		8	01	05	2.01	03
1.05	01.01	17	01		Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Terlaksananya Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama		Terlaksananya Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama						8	01	05	2.01	04
1.05	01.01	17	02		Peningkatan Rasa Solidaritas dan Iktan Sosial di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Seminar, Talkshow peningkatan/pengembangan wawasan kebangsaan serta Sosialisasi Permendagri No. 56 tahun 2017	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Seminar, Talkshow peningkatan/pengembangan wawasan kebangsaan, Sosialisasi Permendagri No. 56 tahun 2017	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			8	01	02	2.01	
1.05	01.01	18			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air						Terlaksananya Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air		8	01	02	2.01	03
1.05	01.01	18	02		Seminar Talkshow Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Seminar, Talkshow peningkatan/pengembangan wawasan kebangsaan												
1.05	01.01	18			Sosialisasi Pengawasan Ormas	Terlaksananya Sosialisasi Permendagri No. 56 tahun 2017												
1.05	01.01	17	04		Pengembangan Sistem Aplikasi Database Ormas	Tersedianya Database Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersedianya Database Organisasi Kemasyarakatan dan Kegiatan Pembinaan Gerakan Bela Negara		tersedianya Database Organisasi Kemasyarakatan serta terlaksananya Kegiatan Pembinaan Gerakan Bela Negara				8	01	02	2.01	04
1.05	01.01	19			Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Terlaksananya Pembinaan dan Penanganan Konflik						Terlaksananya Pembinaan dan Penanganan Konflik						
1.05	01.01	19	01		Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Gerakan Bela Negara												
1.05	01.01	21			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Politik						Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Politik						

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
1.05	01.01	21	01			Penyuluhan Kepada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Politik melalui Kegiatan Penyuluhan	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Politik melalui Kegiatan Penyuluhan, Sosialisasi Politik Bagi Perempuan, Pendidikan Politik Masyarakat, Cara Penyusunan Pertanggungjawaban Bantuan Partai Politik dan Tersusunnya Database Partai Politik dan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pemantauan Situasi Politik dan Situasi Kamtibmas	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Politik melalui Kegiatan Penyuluhan, Terlaksananya Sosialisasi Politik Bagi Perempuan, Terlaksananya Pendidikan Politik Masyarakat, Terlaksananya Cara Penyusunan Pertanggungjawaban Bantuan Partai Politik, Tersusunnya Database Partai Politik dan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pemantauan Situasi Politik dan Situasi Kamtibmas	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				8	1	03			
1.05	01.01					Pendidikan Politik Bagi Perempuan	Terlaksananya Sosialisasi Politik Bagi Perempuan										8	1	03	2.01	
1.05	01.01	21	03			Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Terlaksananya Pendidikan Politik Masyarakat										8	1	03	2.01	04
1.05	01.01	21				Bimbingan Tekhnis Pertanggungjawaban Bantuan Partai Politik	Terlaksananya cara Penyusunan Pertanggungjawaban Bantuan Partai Politik														
1.05	01.01	21	04			Penyusunan Database Partai Politik/Fasilitasi Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik	Tersusunnya Database Partai Politik dan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik														
1.05	01.01	21	05			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pemantauan Situasi Politik dan Kondisi Kamtibmas														
1.05	01.01	23				Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Terkoordinasinya seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai							Terkoordinasinya seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai							
1.05	01.01	23	01			Desk Pemilu	Terlaksananya Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah yang damai	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Damai		Terlaksananya Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Damai					8	01	03	2.01	05	

KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																			
1.05	02.01	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Dokumen Renstra, Renja dan evaluasi kinerja serta pelaksanaan Administrasi keuangan dan Administrasi Umum			1	05	01		
1.05	02.01	01	02		1.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.Terbayarnya tagihan listrik dan telpon Satpol.PP dan Damkar	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.Terbayarnya Tagihan teleponan Listrik	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar					1	05	01	2.03	02
1.05	02.01	01	06		2.Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan Randis/operasional	1.Terbayarnya perpanjangan dan pengesahan STNK Kendaraan Operasional Satpol.PP & Damkar	1.Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan Randis/operasional	1.Terbayarnya perpanjangan dan pengesahan STNK Kendaraan Operasional Satpol.PP & Damkar	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar					1	05	01	2.03	06
1.05	02.01	01	07		3.Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	1.Tersedianya Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	1.Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	1.Tersedianya Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar					1	05	01	2.03	07
1.05	02.01	01	08		4.Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih.	1.Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih.	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar					1	05	01	2.03	08
1.05	02.01	01	09		5.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1.Terpeliharanya peralatan kerja Kantor Satpol.PP dan Damkar	1.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1.Terpeliharanya peralatan kerja Kantor Satpol.PP dan Damkar	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar					1	05	01	2.03	09
1.05	02.01	01	12		6.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	1.Tersedianya alat alat listrik Kantor Satpol.PP dan Damkar	1.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	1.Tersedianya alat alat listrik Kantor Satpol.PP dan Damkar	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar					1	05	01	2.03	12
1.05	02.01	01	15		7.Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangan	1.Tersedianya bahan bacaan Satpol.PP dan Damkar	1.Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangan	1.Tersedianya bahan bacaan Satpol.PP dan Damkar	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar					1	05	01	2.03	15
1.05	02.01	01	18		8.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.Terlaksananya koordinasi tingkat Provinsi dan Pusat	1.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.Terlaksananya koordinasi tingkat Provinsi dan Pusat	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar					1	05	01	2.03	18
1.05	02.01	01	19		9.Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	1.Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran peraangkat kerja Satpol.PP dan Damkar	1.Penyediaan Alat Tulis Kantor	1.Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) Satpol.PP dan Damkar	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar					1	05	01	2.03	10
							2.Penyediaan Makan Minum	2.Tersedianya makan minum tamu pejabat Satpol.PP dan Damkar	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar					1	05	01	2.03	17
1.05	02.01	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur													
1.05	02.01	02	05		10.Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.Tersedianya kendaraan dinas/operasional Satpol.PP dan Damkar	1.Pengadaan Mobil Jabatan	1.Tersedianya Mobil Jabatan Satpol.PP dan Damkar	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar					1	05	01	2.03	19
							2.Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	2.Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional Satpol.PP dan Damkar	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar					1	05	01	2.03	20
			07		11.Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.Tersedianya perlengkapan gedung kantor.	1.Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.Tersedianya perlengkapan gedung kantor.	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar					1	05	01	2.03	22
			09		12.Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.Tersedianya peralatan gedung kantor	1.Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.Tersedianya peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar					1	05	01	2.03	24
			10		13.Pengadaan mebeleur	1.Tersedianya Mebeleur Satpol.PP dan Damkar	1.Pengadaan mebeleur	1.Tersedianya Mebeleur Satpol.PP dan Damkar	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar					1	05	01	2.03	25
			23		14.Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1.Terpeliharanya Kendaraan Jabatan Satpol.PP dan Damkar	1.Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1.Terpeliharanya Kendaraan Jabatan Satpol.PP dan Damkar	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar					1	05	01	2.03	29
			24		15.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.Terpeliharanya Kendaraan dina/operasional	1.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	1.Terpeliharanya Kendaraan dina/operasional	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar					1	05	01	2.03	30
			28		16.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.Terpeliharanya perlatan gedung kantor	1.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.Terpeliharanya perlatan gedung kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadministrasian umum Satpol.PP dan Damkar					1	05	01	2.03	34
1.05	02.01	03			Program Disiplin Aparatur Satpol.PP	Meningkatnya Disiplin Apratur Satpol.PP													
1.05	02.01	03	01		17.Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	1.Tersedianya Mesin/Kartu Absensi	1.Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	1.Tersedianya Mesin/Kartu Absensi	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur					1	05	01	2.04	01
1.05	02.01	03	03		18.Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	1.Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan Kerja Satpol.PP & Damkar	1.Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	1.Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan Kerja Satpol.PP & Damkar	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur					1	05	01	2.04	03

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
1.05	02.01	05				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur													
1.05	02.01	05	01			19.Pendidikan dan pelatihan formal	1.Terakomodirnya Aparat Satpol.PP yang belum mengikuti Diklat Dasar	1.Pendidikan dan pelatihan formal	1.Terakomodirnya Aparat Satpol.PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1	05	01	2.04	09	
1.05	02.01	05	03			20.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.Terakomodirnya Aparat Satpol.PP yang belum mengikuti Diklat Dasar	1.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.Terakomodirnya Aparat Satpol.PP yang belum mengikuti Diklat Dasar	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1	05	01	2.04	11	
1.05	02.01	06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan													
1.05	02.01	06	04			21.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan capaian kinerja dan Tunjangan ASN				1	05	01	2.02	01	
								2.Penyusuna Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2.Tersedianya Laporan Akuntansi	Administrasi Keuangan	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan capaian kinerja dan Tunjangan ASN				1	05	01	2.02	04	
								3.Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/semesteran	Tersedianya Dokumen laporan keuangan bulanan / semesteran	Administrasi Keuangan	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan capaian kinerja dan Tunjangan ASN				1	05	01	2.02	07	
								4.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.Tersedianya Dokumen laporan keuangan akhir tahun	Administrasi Keuangan	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan capaian kinerja dan Tunjangan ASN				1	05	01	2.02	09	
1.05	02.01	06	05			22.Penyusunan program kerja SKPD	1.Tersedianya program kerja SKPD	1.Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1.Tersedianya Dokumen Renja dan Renstra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Renja, dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				1	05	01	2.01	01	
								2.Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	2.Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan dan Dokumen Perencanaan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Renja, dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				1	05	01	2.01	02	
								3.Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	3.Tersedianya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Renja, dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				1	05	01	2.01	04	
1.05	02.01	15				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum		1	05	02			
1.05	02.01	15	03			1.Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan anggota satpol.PP dan Linmas.	1.Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan yang bermuansa Hak Asasi Manusia	1.Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol.PP serta petuga perlindungan masyarakat.	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Terciptanya Ketentraman dan ketertiban umum dalam Wilayah Kabupaten / Kota				1	05	02	2.01	05	
1.05	02.01	15	07			2.Operasi pengamanan dan ketertiban umum	1.Terlaksananya Operasi Ketertiban Umum	1.Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara	1.Terciptanya situasi yang kondusif atas gangguan ketertiban umum	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Terciptanya Ketentraman dan ketertiban umum dalam Wilayah Kabupaten / Kota				1	05	02	2.01	02	
1.05	02.01	15	08			3.Operasional penegakan aturan kawasan tanpa rokok (KTR)	1.Terlaksananya penegakan Perda larangan merokok ditempat umum	1.Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	1.Tertanganinya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	Terciptanya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota				1	05	02	2.02	03	
1.05	02.01	16				Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal													
1.05	02.01	16	01			4.Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	1.Terlaksananya Apel Akbar peringatan HUT Satpol.PP	1.Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	1.Adanya sinkronisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Terciptanya Ketentraman dan ketertiban umum dalam Wilayah Kabupaten / Kota				1	05	02	2.01	03	
1.05	02.01	16	04			5.Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di Daerah	1.Terpenuhnya tugas tugas linmas	1.Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1.Terciptanya kondisi aman dan tentram	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Terciptanya Ketentraman dan ketertiban umum dalam Wilayah Kabupaten / Kota				1	05	02	2.01	01	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
1.06	05.02	25				Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesiagaan pencegahan bahaya kebakaran					PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Pencegahan Bahaya Kebakaran			1	05	04		
1.06	05.02	25	05			1.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	1.Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	1.Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	1.Terlaksananya penelitian terhadap penyebab Kebakaran	Investigasi kejadian Kebakaran	Pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran					1	05	04	2.03	01
1.06	05.02	25	07			2.Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran	1.Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran	1.Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Sosialisasi terhadap warga terkait dengan pencegahan bahaya kebakaran					1	05	04	2.04	01
1.06	05.02	25	08			3.Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	1.Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	1.Tersedianya Sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Tersedianya peralatan pencegahan kebakaran					1	05	04	2.02	01
1.06	05.02	25	09			4.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.Terpuhinya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	1.Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	1.Tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang siap pakai	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Tersedianya peralatan pencegahan kebakaran					1	05	04	2.02	02
1.06	05.02	25	12			5.Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1.Terlaksananya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	1.Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.Terlaksananya pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Pencegahan, pengendalian, pemadam, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	Terlaksananya pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran					1	05	04	2.01	01
								2.Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	2.Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian kebakaran	Pencegahan, pengendalian, pemadam, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	Terlaksananya pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran					1	05	04	2.01	02
								3.Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	3.Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pencegahan, pengendalian, pemadam, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	Terlaksananya pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran					1	05	04	2.01	03
								4.Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	4.Tertanganinya bahan berbahaya dan beracun yang mudah terbakar	Pencegahan, pengendalian, pemadam, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	Terlaksananya pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran					1	05	04	2.01	04

KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN						
SEKRETARIAT DAERAH																					
BAGIAN UMUM																					
4.01	3	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran															
4.01	3	01	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, Jasa Kebersihan Kantor dan Rumah Jabatan, Kebutuhan Bangunan Kantor Daerah, Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta ketersediaan bahan bacaan dan Rapat-Rapat Koordinasi dan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum Sekretariat Daerah.	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG Urusan Pemerintahan	X	XX	01	2.03	02		
4.01	3	01	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								X	XX	01	2.03	03	
4.01	3	01	05		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah								X	XX	01	2.03	05	
4.01	3	01	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional								X	XX	01	2.03	06	
4.01	3	01	08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan rumah Jabatan	Penyediaan jasa kebersihan kantor dan rumah Jabatan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan rumah Jabatan								X	XX	01	2.03	08	
4.01	3	01	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bangunan Kantor Daerah, Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bangunan Kantor Daerah, Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati								X	XX	01	2.03	12	
4.01	3	01	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor								X	XX	01	2.03	13	
4.01	3	01	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah ketersediaan koran, tabloid, majalah serta sarana dan prasarana komunikasi dan terjalannya kerjasama Media massa di Kab.Bulukumba	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ketersediaan koran, tabloid, majalah serta sarana dan prasarana komunikasi dan terjalannya kerjasama Media massa di Kab.Bulukumba								4	01	04	2.03	03	
4.01	3	01	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi								4	01	04	2.03	02	
4.01	3	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana aparatur				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional roda 2 dan 4, Kendaraan Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Asisten, sarana dan prasarana aparatur, Perlengkapan Gedung KAntor, peralatan dan perlengkapan kantor, Mebeleur, Terpeliharanya Rumah jabatan, Gedung Kantor, Kendaraan Dinas Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Setda dan Asisten, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, Peralatan dan gedung Kantor, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah jabatan dan Gedung Kantor.											
4.01	3	02	05		pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional roda 2 dan roda 4	pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional roda 2 dan roda 4								X	XX	01	2.03	20	
4.01	3	02	04		Pengadaan Kendaraan Dinas / Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Asisten	Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli dan Asisten								X	XX	01	2.03	19	
4.01	3	02	06		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								X	XX	01	2.03	21	
4.01	3	02	07		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor								X	XX	01	2.03	22	
4.01	3	02	09		Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor								X	XX	01	2.03	24	
4.01	3	02	10		Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya Mebeleur	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya Mebeleur								X	XX	01	2.03	25	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4.01	3	02	20			Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya Rumah jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya Rumah jabatan							X	XX	01	2.03	26
4.01	3	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor							X	XX	01	2.03	28
4.01	3	02	23			Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Setda, Asisten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Setda, Asisten							X	XX	01	2.03	29
4.01	3	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional							X	XX	01	2.03	30
4.01	3	02	28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor							X	XX	01	2.03	34
4.01	3	02	40			Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Terlaksananya rehabilitasi Sedarng/Berat rumah jabatan	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Terlaksananya rehabilitasi Sedarng/Berat rumah jabatan							X	XX	01	2.03	36
4.01	3	02	42			Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi Sedarng/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi Sedarng/Berat Gedung Kantor							X	XX	01	2.03	38
4.01	3	03				Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur													
4.01	3	03	02			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas yang disediakan dan pakaian Hari Tertentu yang diadakan.					X	XX	01	2.04	02
4.01	3	03	05			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Hari- Hari Tertentu yang diadakan	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Jumlah Pakaian Hari- Hari Tertentu yang diadakan							X	XX	01	2.04	05
4.01	3	30				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan aparatur													
4.01	3	30	18			Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Administrasi Umum	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					X	XX	01	2.03	17
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penundang-Undangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur							X	XX	01	2.04	11
4.01	3	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran													
4.01	3	01	19			Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Tersedianya Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Setda	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Setda	Administrasi Umum	Tersedianya Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Setda					X	XX	01	2.03	07
								Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Setda							X	XX	01	2.03	10
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penatausahaan Kesekretariatan SKPD Setda							X	XX	01	2.03	11
4.01	3	16				Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah													
4.01	3	16	01			Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terlaksananya dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya pelayanan dan tugas kedinasan Lingkup Setda, dialog audiens dengan tokoh masyarakat, kunjungan kerja pejabat negara.	Administrasi Umum	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan, penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri serta pelayanan tugas kedinasan lingkup setda.					X	XX	01	2.03	17
4.01	3	16	02			Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	terlaksananya Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri													
4.01	3	16	09			Peningkatan Tugas Kedinasan dan Tugas Operasional	Terlaksananya pelayanan, peningkatan tugas kedinasan lingkup setda													
4.01	3	16	19			Koordinasi dan Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Terlaksananya pelayanan terhadap tamu dinas Pemda													
4.01	3	35				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah jabatan													
4.01	3	35	01			Penyediaan Kebutuhan Bahan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga rumah jabatan	Pengelolaan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga rumah jabatan	Pelaksanaan Administrasi Umum	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah jabatan	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana Rumah Jabatan			4	01	04	2.01	03
						BAGIAN KEUANGAN														

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4.01	3	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran													
4.01	3	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah	Pengelolaan Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan, administrasi Perbendaharaan dan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah.	Perencanaan dan Keuangan	Tersedianya pengelolaan perencanaan administrasi keuangan, Pelaporan akhir tahun, Perencanaan, penata usahaan dan pelaporan.	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Meningkatnya sistem pengelolaan, perencanaan keuangan Sekretariat Daerah.	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG Urusan Pemerintahan	4	01	04	2.04	02
4.01	3	17				Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Adanya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah													
4.01	3	17	38			Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan	Terlaksananya Administrasi Perbendaharaan													
4.01	3	17				Bimtek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Bimtek Implementasi Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah.													
4.01	3	06				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan													
4.01	3	06	04			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah	Penatausahaan Pelaporan	Tersedianya Penatausahaan administrasi pembukaan dan pelaporan akhir tahun Sekretariat Daerah.							4	01	04	2.04	03
4.01	3	17				Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Adanya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah													
4.01	3	17	39			Penatausahaan Administrasi Pembukuan	Koordinasi Dan Penatausahaan Administrasi Pembukuan SKPD Sekretariat Daerah													
4.01	3	17	20			Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan Daerah	Pengendalian Anggaran Dan Penyusunan RKA / RKAP / Serta DPA /DPAP Lingkup Sekretariat Daerah	Pengelolaan Perencanaan	Terlaksananya pengelolaan Keuangan RKA/RKAP, DPA/DPAP Lingkup Sekretariat Daerah							4	01	04	2.04	01
						BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL														
						Program Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Media Massa													
						Penyediaan Layanan Informasi bagi Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan ketersediaan informasi publik melalui PPID	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tersedianya Informasi publik, jumlah produk pendokumentasian, terlaksananya kegiatan peliputan, diskusi dan tersedianya naskah sambutan Bupati	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tersedianya Fasilitas Pendokumentasian Keprotokoleran dan komunikasi pimpinan.	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terwujudnya Fasilitas komunikasi, pendokumentasian tugas pimpinan	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG Urusan Pemerintahan	4	01	04	2.03	03
						Pendokumentasian informasi pemerintahan dan kemasyarakatan	jumlah produk pendokumentasian berupa video, foto dan klipping													
2.10	3	15				Program Pengembangan Komunikasi System Informasi	Adanya peningkatan layanan komunikasi dan informasi lingkup Pemkab Bulukumba, baik infrastruktur maupun SDM													
2.10	3	15	05			Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Terlaksananya kegiatan peliputan dan pendokumentasian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan													
2.10	3	18				Program kerjasama informasi dengan mass media	Meningkatnya kualitas kerjasama informasi dengan mass media													
2.10	3	18	03			Penyebarnya informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Terlaksananya diskusi (Coffee Morning) bersama dengan jurnalis, OKP dan elemen masyarakat lainnya													
2.10	3	19				Program Koordinasi, Pengembangan Sumber Daya Kehumasan, dan Keprotokoleran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Koordinasi dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Keprotokoleran.													
						Fasilitasi Penyusunan Naskah Sambutan Bupati	Tersedianya Naskah Sambutan Bupati													
4.01	3	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fasilitasi Keprotokoleran												
4.01	3	01	23			Penyediaan Sarana Penunjang Keprotokoleran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlaksananya pelatihan serta pengaturan acara Pemda											
2.10	3	17				Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Terwujudnya Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi													

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
2.10	3	17	01			Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya pelatihan kehumasan dan jurnalistik bagi aparat pemerintah Kab. Bulukumba, serta terlaksananya study jurnalistik														
2.10	3	19				Program Koordinasi, Pengembangan Sumber Daya Kehumasan, dan Keptokoleran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Koordinasi dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Keptokoleran.										4	01	04	2.03	01
2.10	3	19	01			Fasilitasi Pengaturan Acara/Kegiatan Pemerintah dan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pengelolaan Acara/Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat														
						Fasilitasi kegiatan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati	Terselenggaranya fasilitasi keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati														
						Koordinasi dan Pelatihan serta pengaturan Acara-acara Pemd	Terlaksananya Koordinasi dan Keptokoleran														
2.10	3	18				Program kerjasama informasi dengan mass media	Meningkatnya kualitas kerjasama informasi dengan mass media	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya penyebaran informasi dan peningkatan sarana komunikasi												
2.10	3	18	02			Penyebarluasan informasi pemerintahan dan masyarakat melalui media massa	Persentase tersedianya informasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, baik melalui media cetak maupun elektronik, serta media informasi lainnya										4	01	04	2.03	02
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi														
						Peningkatan SDM Kehumasan, Persandian dan Keptokolan	Meningkatnya SDM Kehumasan, Persandian dan Keptokolan														
						<i>BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI</i>															
4.01	3	06				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
4.01	3	06	01			Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah	Tersedianya Dokumen LAKIP Sekretariat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersedianya Dokumen LAKIP Sekretariat Daerah	Penataan Organisasi	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD serta Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dan Pengembangan Pendidikan PNSD berbasis Kompetensi	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Terwujudnya Peningkatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG Urusan Pemerintahan	4	01	04	2.02	03	
						Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Peningkatan Unit Pelayanan Publik dalam rangka Reformasi Birokrasi															
4.01	3	30	28			Penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi														
4.01	3	30				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan aparatur														
						Sosialisasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi	Tersosialisasikannya Kormonev Percepatan Pemberantasan Korupsi														
						Pembinaan dan Pengembangan Kinerja Sekretariat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pemb dan pengemb kinerja terhadap PNS lingkup Setda														
4.01	3	26				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan														
4.01	3	26	14			Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terfasilitasinya penyusunan SOP bagi SKPD	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersedianya atribut PNS (ID CARD), Dokumen Standar Pelayanan Publik								4	01	04	2.02	02
4.01	3	26	10			Monitoring Pelaksanaan Tata Naskah Dinas	Terpantaunya pelaksanaan Tata Naskah Dinas														
						Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Procedure (SOP)	Terevaluasinya Pelaksanaan SOP														
4.01	3	30				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan aparatur														
4.01	3	30	17			Pembuatan dan Penggantian Atribut PNS	Ketersediaan Atribut PNS (ID Card)														

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
						Sosialisasi Budaya Kerja	Terlaksananya Sosialisasi Budaya Kerja													
						Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Peningkatan Unit Pelayanan Publik dalam rangka Reformasi Birokrasi														
4.01	3	30	26			Evaluasi Pembinaan dan Peningkatan Unit Pelayanan Publik	Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan Publik													
4.01	3	27				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Meningkatnya penataan otonomi daerah		Tersedianya dokumen standar pelayanan publik serta Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dan Pengembangan Pendidikan PNSD berbasis Kompetensi											
4.01	3	27	04			Fasilitasi Pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	Terfasilitasinya SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan								4	01	04	2.02	01
						Sosialisasi Perda Kelembagaan	Tersosialisasikannya Perda Kelembagaan													
4.01	3	30				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan aparatur													
4.01	3	30	20			Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan	Dokumen Analisis Jabatan Perangkat Daerah													
4.01	3	30	27			Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Jabatan	Dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah													
4.01	3	30	29			Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan PNSD Berbasis Kompetensi	Jumlah ASN yang mendapat materi pengembangan SDM dan mengikuti kegiatan pengembangan SDM													
4.01	3	30	30			Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNSD	Tersusunnya Standar Kompetensi Manajerial PNS													
						Penyusunan Analisis Beban Kerja	Terfasilitasinya Penyusunan Analisis Beban Kerja SKPD													
						BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN														
4.01	3	06				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan													
4.01	3	06	05			Penyusunan program kerja SKPD	Tersusunnya dokumen renja/renstra sekretariat daerah	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tersedianya dokumen penyusunan Renja dan Renstra	Administrasi Pembangunan	Tersedianya Penyusunan Dokumen Renstra / renja	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terwujudnya Perencanaan dan Evaluasi Perekonomian Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG Urusan Pemerintahan	4	01	03	2.02	01
4.01	3	41				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan														
4.01	3	41	01			Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Investasi Panas Bumi	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Investasi Panas Bumi	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan Investasi Panas Bumi dan informasi produksi daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Investasi Panas Bumi				4	01	03	2.01	03	
2.12	3	17				Program penyiapan potensi sumber daya, sarana, dan prasarana daerah	Meningkatnya kualitas potensi sumber daya, sarana, dan prasarana daerah													
2.12	3	17	02			Koordinasi Produksi Daerah	Tersedianya Informasi Produksi Daerah untuk promosi dan Investasi						Tersedianya Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Daerah							
4.01	3	21				Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Meningkatnya kualitas profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan													
4.01	3	21	03			Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah	Jumlah dokumen laporan realisasi dan aktivitas Pengadaan Pemerintah secara berkala	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya pengelolaan Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran daerah	Administrasi Pembangunan	Tersedianya dokumen penyerapan anggaran daerah				4	01	03	2.02	03	
								Pengendalian Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya pengendalian evaluasi program pembangunan							4	01	03	2.02	02
4.01	3	38				Program Pembangunan/Pengembangan Perekonomian Daerah	Terwujudnya pembangunan/pengembangan perekonomian daerah													
4.01	3	38	04			Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah	Jumlah Data Informasi Tingkat inflasi Daerah	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian tingkat inflasi daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terwujudnya pengendalian Inflasi serta tersedianya Dokumen Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.				4	01	03	2.01	02	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4.01	3	38	05			Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan/pembangunan secara berkala	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersedianya dokumen pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta terlaksananya monitoring pelaksanaan pembangunan daerah							4	01	03	2.02	03
4.01	3	38	06			Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan									4	01	03	2.02	03
BAGIAN PEMERINTAHAN																				
4.01	3	16	23			Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah													
4.01	3	16	07			Penyusunan LPPD dan ILPPD	Terpenuhinya kewajiban Kepala Daerah dalam Menyampaikan LPPD kepada Pemerintah dan ILPPD kepada Masyarakat	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tersedianya Dokumen LPPD dan ILPPD dan Tersedianya Dokumen LKPJ kepada DPRD	Administrasi Tata Pemerintahan	Terwujudnya dokumen LPPD, ILPPD, LKPJ, SPM, batas wilayah, nama-nama Rupa bumi serta pelayanan prima di Kecamatan dan Kelurahan.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terciptanya pengendalian kebijakan KDH, perencanaan pembangunan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penataan otonomi daerah, pembinaan kecamatan guna mewujudkan pelayanan prima di Kecamatan.	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG Urusan Pemerintahan	4	01	02	2.01	01
4.01	3	21				Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah													
4.01	3	21	12			Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Terpenuhinya kewajiban Kepala Daerah dalam Menyampaikan LKPJ kepada DPRD													
4.01	3	23				Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi													
4.01	3	23	04			Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah urusan SPM yang di Fasilitas dari keseluruhan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tersedianya Data SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah							4	01	02	2.01	01
								Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersedianya fasilitas pelaksanaan SPM							4	01	02	2.01	03
4.01	3	27				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Meningkatnya penataan otonomi daerah													
4.01	3	27	11			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	Tertibnya Administrasi Naskah Kerjasama	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terwujudnya penataan naskah kerjasama							4	01	02	2.01	01
								Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersedianya fasilitas Naskah Kerja Sama							4	01	02	2.01	03
4.01	3	32				Program Pembinaan Kecamatan	Terwujudnya pembinaan kecamatan													
4.01	3	32	07			Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Tertibnya administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terwujudnya penataan administrasi Kecamatan dan Kelurahan							4	01	02	2.01	01
								Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya pengelolaan pembinaan Kecamatan dan Kelurahan							4	01	02	2.01	02
4.01	3	20				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terciptanya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya pengelolaan pelatihan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan, Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Kecamatan serta Dokumen Nama Rupa Bumi, Penegasan Batas Daerah							4	01	02	2.01	02
4.01	3	20	03			Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terwujudnya pelayanan yang prima di kecamatan													
4.01	3	27				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Meningkatnya penataan otonomi daerah													
4.01	3	27	03			Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Terlaksananya penegasan Batas Daerah													
4.01	3	27	12			Pendataan dan pembakuan nama rupabumi unsur buatan dan unsur budaya	Tersusunnya Nama-nama Rupabumi Kabupaten Bulukumba													
4.01	3	27	13			Penyediaan data informasi spasial kewilayahan berbasis citra satelit penginderaan jauh resolusi sangat tinggi	Tersedianya Data Spasial Kabupaten Bulukumba													
4.01	3	32				Program Pembinaan Kecamatan	Terwujudnya pembinaan kecamatan													
						Pelatihan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Pelatihan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)													

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
						Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan														
4.01	3	27				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Meningkatnya penataan otonomi daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersedianya Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Dokumen penyelenggaraan otonomi Daerah												
						Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)	Jumlah Dokumen Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)										4	01	02	2.01	03
						<i>BAGIAN HUKUM DAN HAM</i>															
4.01	3	20				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terciptanya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH														
4.01	3	20	02			Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum penanganan kasus dan pertimbangan hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Tersedianya Fasilitas Bantuan hukum penanganan kasus dilingkungan pemerintah daerah	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Terwujudnya Bantuan Hukum, Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah serta Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan Penataan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG Urusan Pemerintahan	4	01	02	2.03	02	
4.01	3	26				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan														
4.01	3	26	03			Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Terselesaikannya Draft rancangan Peraturan Daerah.														
4.01	3	26	08			Penyuluhan Hukum Terpadu	Terlaksananya Penyuluhan Hukum Terpadu														
4.01	3	26	11			Fasilitasi Penegakan Hukum dan HAM	Pelaporan RANHAM Kabupaten Bulukumba														
4.01	3	26	13			Pembinaan Kelompok Kadarkum	Terlaksananya Pembinaan kelompok Sadar Hukum														
4.01	3	26				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan														
4.01	3	26	01			Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Terkoordinirnya permasalahan peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersedianya Fasilitas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Produk Hukum Daerah							4	01	02	2.03	01	
4.01	3	26	06			Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah	Terlaksananya Kajian Produk Hukum Daerah														
4.01	3	26				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan														
4.01	3	26	04			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terfasilitasinya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tersedianya Pendokumentasian Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Terpublikasi Peraturan Perundang-Undangan serta Produk Hukum Daerah.							4	01	02	2.03	03	
4.01	3	26	05			Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Terpublikasikannya Peraturan Perundang-Undangan														
4.01	3	26	07			Penataan Dokumentasi Hukum	Terdokumentasikannya produk hukum														
						<i>BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</i>															
2.02	3	20				Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama dan kesra														

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
2.02	3	20	01			Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Propinsi	Terciptanya SDM Cinta Al Quran yang Unggul dan Terbaik hasil seleksi	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten, STQ Tingkat Provinsi, pengajian Rutin, Safari Ramadhan, Seleksi dan Pelatihan Baznas, Pemberdayaan Baznas, Sarana dan Prasarana usulan bantuan, Hari Besar Islam, Pembinaan TK/TPA, Pelayanan dan Transportasi Ibadah Haji, Pelatihan Perawatan Jenazah, Workshop Mubaligh/Mubaligha, Pengembangan Seni Bemuansa Islam dan Pembinaan Desa Muslim	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tersedianya Pengelolaan Bina Mental Spiritual	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terwujudnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG Urusan Pemerintahan	4	01	02	2.02	01	
2.02	3	20	05			Pengajian Rutin	Peningkatan pemahaman dan pembinaan mental pegawai dan Masyarakat														
2.02	3	20	07			Safari Ramadhan	Pembinaan keagamaan melalui safari Ramadhan														
2.02	3	20				Seleksi dan Pelatihan Baznas	Terlaksananya seleksi dan pelatihan Baznas														
2.02	3	20				Pemberdayaan Baznas	Terlaksananya pengorganisasian dan pemberdayaan serta pengelolaan Baznas														
2.02	3	20	08			Penataan Sarana dan Prasarana serta analisis usulan bantuan	Adanya data sarana dan prasarana kelembagaan sosial keagamaan yang akurat.														
2.02	3	20	09			Peringatan Hari-Hari Besar Islam	Terjalannya silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat														
2.02	3	20	10			Pembinaan dan Pelatihan Guru TK/TPA	Terwujudnya pembinaan dan kesejahteraan guru TK/TPA dan Madin Non PNS.														
2.02	3	20	11			Pelatihan Perawatan Jenazah	Semakin berkualitasnya SDM para Perawat Jenazah														
2.02	3	20	14			Pelaksanaan Workshop Muballigh / Muballighah	Semakin berkualitasnya SDM para Muballigh / Muballighah.														
2.02	3	20	20			Pelayanan dan Transportasi Ibadah Haji	Terlayannya perjalanan Jamaah Haji dari Debarkasi ke Embarkasi dan sebaliknya														
2.02	3	20				Pengembangan Seni Bemuansa Islam	Keikutsertaan dalam Lomba Lasqi mulai Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional														
2.02	3	20				Pembinaan Hafids / Hafidzah dan Seni Al Qur'an	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Hafidz dan Hafidzah														
2.02	3	20				Pembinaan Desa Muslim	Terbentuknya Pola Pembinaan Desa Muslim Percontohan														
						BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA															
4.01	3	30				Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan Barang/Jasa														
4.01	3	31	01			Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	Tersusunnya informasi Pengadaan Barang/Jasa dan terbentuknya Pokja Fungsional UKPBJ	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa serta terbentuknya Pokja Fungsional UKPBJ	Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya Pengelolaan Barang dan Jasa, Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta terlaksananya Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terwujudnya Perekonomian dan Pembangunan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG Urusan Pemerintahan	4	01	03	2.03	01	
4.01	3	31	04			Pengembangan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tersedianya Layanan Pengadaan Secara Elektronik								4	01	03	2.03	02
4.01	3	31	05			Peningkatan kapasitas jasa konstruksi	Meningkatnya Kapasitas Pelaku jasa konstruksi dan OPD mengikuti pelatihan	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pembinaan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa								4	01	03	2.03	03
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																					
1	1	01				Wajib Bukan pelayanan Dasar	Belanja Tidak Langsung			Administrasi keuangan	Lancarnya administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Penunjang urusan pemerintah Daerah	Pemuda dan Olahraga	Wajib Bukan pelayanan Dasar	2	19	01	2.02		
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN								2	19	01	2.02	01
								Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN								2	19	01	2.02	02

KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
13	01	01		Wajib Bukan pelayanan Dasar	Program Pelayanan Adminstrasi Kantor	Lancarnya pelayanan administrasi kantor			Administrasi Umum	Lancarnya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Penunjang urusan pemerintah Daerah	Pemuda dan Olahraga	Wajib Bukan pelayanan Dasar	2	19	01	2.03	
13	01	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik							2	19	01	2.03	02
13	01	01	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional							2	19	01	2.03	06
13	01	01	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi kantor	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi kantor							2	19	01	2.03	07
13	01	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor							2	19	01	2.03	08
13	01	01	09		Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja							2	19	01	2.03	09
13	01	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor							2	19	01	2.03	12
13	01	01	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor							2	19	01	2.03	14
13	01	01	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah							2	19	01	2.03	18
13	01	01	19		Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Tersedianya penatausahaan kesekretariatan SKPD	Penyediaan Jasa surat menyurat	tersedianya peranko dan bahan surat menyurat							2	19	01	2.03	01
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor							2	19	01	2.03	10
							penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman kantor							2	19	01	2.03	17
							penyediaan barang cetak dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan							2	19	01	2.03	17
13	01	02		Wajib Bukan pelayanan Dasar	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			Administrasi Umum	Lancarnya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Penunjang urusan pemerintah Daerah	Pemuda dan olahraga	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	19	01	2.03	
13	01	02	05		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional							2	19	01	2.03	20
13	01	02	07		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor							2	19	01	2.03	22
13	01	02	09		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor							2	19	01	2.03	24
13	01	02	10		Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur							2	19	01	2.03	25
13	01	02	24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional							2	19	01	2.03	30
13	01	02	26		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor							2	19	01	2.03	32
13	01	02	42		Rehab Berat/Sedang Gedung Kantor	Terlaksananya rehab berat gedung kantor	Rehab Berat/Sedang Gedung Kantor	Terlaksananya rehab berat gedung kantor							2	19	01	2.03	38
13	01	05		Wajib Bukan pelayanan Dasar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Peningkatan Disiplin dan SDA Aparatur	Meningkatnya disiplin dan SDA aparatur	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Penunjang urusan pemerintah Daerah	Pemuda dan Olahraga	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	19	01	2.04	
13	01	05	01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya diklatpin III	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya diklatpin III							2	19	01	2.04	09
13	01	06		Wajib Bukan pelayanan Dasar	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan			Administrasi keuangan	Lancarnya administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Penunjang urusan pemerintah Daerah	Pemuda dan Olahraga	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	19	01	2.02	
13	01	06	01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP Dispora	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP Dispora							2	19	01	2.02	06
13	01	06	04		Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan akhir tahun Dispora	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan akhir tahun Dispora							2	19	01	2.02	09
13	01	06	05		Penyusunan Program Kerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Penunjang urusan pemerintah Daerah	Pemuda dan Olahraga	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	19	01	2.01	
							Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya renstra dan renja OPD							2	19	01	2.01	01
							Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat daerah	Tersusunnya program dan kegiatan OPD							2	19	01	2.01	02
							Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi OPD							2	19	01	2.01	03
							Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan OPD							2	19	01	2.01	04

KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
13	01	15	Wajib Bukan pelayanan Dasar	Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Meningkatnya Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi	Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	Mengembangannya kapasitas daya saing keolahragaan	Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	19	03	2.03		
					Pendataan Potensi Kepemudaan	Tersedianya data potensi kepemudaan dan Olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektor olahraga	Tersedianya data potensi kepemudaan dan olahraga								2	19	03	2.03	05
					Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Terlaksananya Kegiatan ESQ bagi pemuda/pelajar	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	terlaksananya kegiatan ESQ bagi pemuda												
13	01	16	Wajib Bukan pelayanan Dasar	Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Pemuda			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi pemuda	Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Mengembangannya kapasitas daya saing kepemudaan	Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	19	02	2.02		
					Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi pemuda dan Jambore Pemuda	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya jambore pemuda								2	19	02	2.02	02
									Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kapasitas kepramukaan			2	19	04	2.01		
							Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan	Meningkatnya kapasitas organisasi kepemudaan							2	19	04	2.01	02	
							Peningkatan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah	Meningkatnya kapasitas organisasi kepemudaan							2	19	04	2.01	04	
							Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Terlaksananya kegiatan kepramukaan di tingkat daerah							2	19	04	2.01	05	
							Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana kepramukaan tingkat daerah	Tersedianya sarana kepramukaan yang memadai							2	19	04	2.01	07	
							Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan	meningkatnya kegiatan kepramukaan di tingkat daerah							2	19	04	2.01	08	
									Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kab/kota, wirasaha muda pemula dan pemuda kader kab/kota	Peningkatnya penyadaran dan pengembangan pemuda	Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Mengembangannya kapasitas daya saing kepemudaan	Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	19	02	2.01		
					Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah dikalangan Pemuda	Terlaksananya PIR dan KIR	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	terlaksananya PIRN dan KIR							2	19	02	2.01	03	
					Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan pembinaan pemuda pelopor	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	terlaksananya kegiatan pembinaan pemuda pelopor							2	19	02	2.01	01	
					Pameran prestasi hasil karya pemuda	Terlaksananya lelang karya pemuda	Pemberian penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berprestasi	terlaksananya lelang karya pemuda							2	19	02	2.01	07	
									Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi pemuda				2	19	02	2.02			
							Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	terlaksananya lelang karya pemuda dengan melibatkan dunia usaha							2	19	02	2.02	01	
					Pelatihan Paskibraka	Terlaksananya kegiatan PASKIBRAKA	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	terlaksananya seleksi dan pelatihan paskibraka							2	19	02	2.02	04	

KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
13	01	17	Wajib Bukan pelayanan Dasar	Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Meningkatnya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda			Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kab/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kab/kota	Peningkatnya penyadaran dan pengembangan pemuda	Program Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Mengembangannya kapasitas daya saing kepemudaan	Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	19	02	2.01		
					Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Terlaksananya pelatihan wirausaha bagi pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda								2	19	02	2.01	02
13	01	18	Wajib Bukan pelayanan Dasar	Pemuda dan Olahraga	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Terlaksananya Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba														
					Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda														
13	01	19	Wajib Bukan pelayanan Dasar	Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Meningkatnya Kebijakan dan Manajemen Olah Raga			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya daya saing keolahragaan	Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	19	03	2.04		
					Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	Terlaksananya pelatihan tenaga olahraga bersertifikat	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya pelatihan tenaga olahraga bersertifikat								2	19	03	2.04	21
					Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga	Tersusunnya Peraturan Daerah (PERDA) Keolahragaan	Standarisasi organisasi olahraga	Tersusunnya Peraturan Daerah (PERDA) Keolahragaan								2	19	03	2.04	01
									Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Penunjang urusan pemerintah Daerah	Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	19	01	2.01		
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Dispora	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan Dispora								2	19	01	2.01	05
13	01	20	Wajib Bukan pelayanan Dasar	Pemuda dan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi prestasi	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya daya saing keolahragaan	Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	19	03	2.03		
					Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat	Terbinanya klub olahraga binaan Dispora	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Terbinanya klub olahraga binaan Dispora								2	19	03	2.03	03
							Pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science)	Terbinanya klub olahraga binaan Dispora								2	19	03	2.03	02
					Lomba Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Terlaksananya pembinaan atlet usia dini	Seleksi Atlet Daerah	Terlaksananya pembinaan atlet usia dini								2	19	03	2.03	01
									Pembinaan dan Pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga usia dini					2	19	03	2.01		
							Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	Terlaksananya pembinaan atlet usia dini								2	19	03	2.01	02
									Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi rekreasi	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya daya saing keolahragaan	Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	19	03	2.05		
					Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Terlaksananya kegiatan Senam BBT (Baik, Benar, Terukur dan Teratur)	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya kegiatan Senam BBT (Baik, Benar, Terukur dan Teratur)								2	19	03	2.05	01
									Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat daerah	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya daya saing keolahragaan	Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	19	03	2.02		

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
						Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terlaksananya Kejurda dan Kejurmas	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Mutti Event dan single event Tingkat Kab/Kota	Terlaksananya Kejuaraan daerah (kejurda)							2	19	03	2.02	01
								Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Terlaksananya Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB)							2	19	03	2.02	02
								Partisipasi dan keikutsertaan dalam kejuaraan	terlaksananya pengiriman atlet untuk berpartisipasi dalam kejuaraan-kejuaraan							2	19	03	2.02	03
										Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi prestasi	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya daya saing keolahragaan	Pemerintah Bidang Kepemudan dan Olahraga	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	19	03	2.03	
						Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berprestasi dan Berdedikasi	Terlaksananya pemberian apresiasi/penghargaan bagi insan olahraga berprestasi	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya penghargaan bagi atlet berprestasi							2	19	03	2.03	04
										Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga					2	19	03	2.04	
								Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan berprestasi	terlaksananya penghargaan bagi organisasi olahraga berprestasi							2	19	03	2.04	04
										Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi rekreasi	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya daya saing keolahragaan	Pemerintah Bidang Kepemudan dan Olahraga	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	19	03	2.05	
						Pengembangan Olahraga lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Terlaksananya pengembangan olahraga bagi lanjut usia dan penyandang cacat	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam masyarakat	Terlaksananya pengembangan olahraga lanjut usia dan penyandang cacat							2	19	03	2.05	06
						Pengembangan Olahraga rekreasi	Terlaksananya pengembangan olahraga rekreasi	Pengembangan Olahraga wisata, tantangan dan petualangan	Terlaksananya pengembangan olahraga rekreasi							2	19	03	2.05	05
						Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya pengembangan olahraga Sepeda	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya pengembangan olahraga Sepeda							2	19	03	2.05	02
13	01	21		Wajib Bukan pelayanan Dasar	Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga			Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya daya saing keolahragaan	Pemerintah Bidang Kepemudan dan Olahraga	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	19	03	2.01	
						Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana olahraga							2	19	03	2.01	03
										Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan organisasi rekreasi	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya daya saing keolahragaan	Pemerintah Bidang Kepemudan dan Olahraga	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	19	03	2.05	
						Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga							2	19	03	2.05	04

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN						
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																			
1	01	01	Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah									
1	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya layanan jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya layanan jasa surat menyurat	Administrasi Umum	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Listrik, air, jasa pemeliharaan kend, jasa pelayanan adm keuangan, jasa kebersihan kantor, ATK, Makan Minum, Cetak & Penggandaan, Komponen Instalasi Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan bacaan, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, mebeleur serta pemeliharaan berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta pemeliharaan kend op.				1	01	01	2.03	01		
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran						1	01	01	2.03	02		
1	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Lancarnya Operasional Kendaraan Dinas Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Lancarnya Operasional Kendaraan Dinas Operasional						1	01	01	2.03	03		
1	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lancarnya Pengelolaan keuangan dan administrasi kantor	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lancarnya Pengelolaan keuangan dan administrasi kantor						1	01	01	2.03	07		
1	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor						1	01	01	2.03	08		
1	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran						1	01	01	2.03	09		
1	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi jasa listrik sesuai daya listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi jasa listrik sesuai daya listrik						1	01	01	2.03	12		
1	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan/ Surat Kabar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan/ Surat Kabar						1	01	01	2.03	15		
1	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah						1	01	01	2.03	18		
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Kab. Bulukumba	Terlaksananya Rapat Koordinasi ditiap kecamatan														
1	01	01	21	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor						1	01	01	2.03	10		
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan						1	01	01	2.03	11		
						Penyediaan Makanan Dan Minuman	Makan & Minum Rapat dan Tamu						1	01	01	2.03	17		
1	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur														
1	01	02	06	Pembangunan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur														
1	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bertambahnya Perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bertambahnya Perlengkapan gedung kantor						1	01	01	2.03	22		
1	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bertambahnya gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bertambahnya gedung kantor						1	01	01	2.03	24		
1	01	02	21	Pengadaan Moubeleur Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana Kantor	Pengadaan Moubeleur Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana Kantor						1	01	01	2.03	25		
1	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Kebersihan dan Penataan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Kebersihan dan Penataan Kantor						1	01	01	2.03	28		
1	01	02	23	Pengadaan Kendaraan Roda Dua	Bertambahnya Kendaraan Dinas Operasional bagi pengawas	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Bertambahnya Kendaraan Dinas/ Operasional						1	01	01	2.03	20		
1	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Meningkatnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Meningkatnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional						1	01	01	2.03	29		
1	01	02	42	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Meningkatnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Meningkatnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional						1	01	01	2.03	30		
1	01	02		Pemeliharaan Rutin berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Kantor berfungsi dengan baik	Pemeliharaan Rutin berkala peralatan gedung kantor	Peralatan Kantor berfungsi dengan baik						1	01	01	2.03	34		
1	01	02		Rehabilitasi Sedang/berat Gedung kantor	Meningkatnya Sarana Perkantoran	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung kantor	Meningkatnya Sarana Perkantoran						1	01	01	2.03	38		
1	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur														

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
1	01	03	03			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Meningkatnya Disiplin aparatur	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Meningkatnya Disiplin aparatur	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Korpri, dan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu					1	01	01	2.04	01
1	01	03	04			Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin aparatur	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin aparatur							1	01	01	2.04	02
1	01	03	05			Pengadaan Pakaian kerja lapangan	Meningkatnya Disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian kerja lapangan	Meningkatnya Disiplin aparatur							1	01	01	2.04	03
1	01	03				Pengadaan Pakaian KORPRI	Meningkatnya Disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian KORPRI	Meningkatnya Disiplin aparatur							1	01	01	2.04	04
1	01	03	01			Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Meningkatnya Disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Meningkatnya Disiplin aparatur							1	01	01	2.04	05
1	01	05				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur													
1	01	05	01			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pengetahuan pejabat pemegang eselon	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pengetahuan pejabat pemegang eselon							1	01	01	2.04	09
1	01	05	02			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan							1	01	01	2.04	10
1	01	05	03			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pengetahuan tentang teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pengetahuan tentang teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							1	01	01	2.04	11
1	01	06				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan													
1	01	06	01			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya sistem pelaporan kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya sistem pelaporan kinerja SKPD	Administrasi Keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan semesteran, Pelaporan prognosis realisasi anggaran, Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, Program Kerja SKPD					1	01	01	2.02	06
1	01	06	02			Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Meningkatnya sistem pelaporan keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Meningkatnya sistem pelaporan keuangan							1	01	01	2.02	07
1	01	06	03			Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran	Meningkatnya sistem pelaporan keuangan	Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran	Meningkatnya sistem pelaporan keuangan							1	01	01	2.02	08
1	01	06	04			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Meningkatnya sistem pelaporan keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Meningkatnya sistem pelaporan keuangan							1	01	01	2.01	09
1	01	06	05			Penyusunan Program Kerja SKPD	Meningkatnya sistem pelaporan program kerja SKPD	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Meningkatnya sistem pelaporan program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan							1	01	01	2.01	02
						Program Pendidikan Anak Usia Dini														
1	xx	15	01			Pembangunan gedung sekolah	Tersedianya gedung sekolah	Pembangunan gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Tersedianya gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tersedianya Gedung Sekolah, Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Tersedianya Ruang Ibadah, Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapan Lainnya, Meningkatnya Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, Terpeliharanya Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD, Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Terlaksananya Perbaikan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD, Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		1	01	01	2.03	01
						Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaqa sekolah	Tersedianya rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaqa sekolah													
						Penambahan ruang kelas sekolah	Bertambahnya ruang kelas sekolah													
						Penambahan ruang guru sekolah	Bertambahnya ruang guru sekolah													
						Pembangunan ruang locker siswa	Tersedianya ruang locker siswa	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							1	01	01	2.03	02
						Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga													

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
						Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Tersedianya sarana dan prasarana bermain														
						Pembangunan ruang serba guna/aula	Tersedianya ruang serba guna/aula														
						Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Tersedianya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir														
						Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Tersedianya ruang unit kesehatan sekolah														
						Pembangunan ruang ibadah	Tersedianya ruang ibadah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								1	01	01	2.03	02
						Pembangunan perpustakaan sekolah	Tersedianya perpustakaan sekolah														
						Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Tersedianya jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								1	01	01	2.03	02
						Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya sarana air bersih dan sanitary														
						Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Tersedianya Perlengkapan Siswa PAUD								1	01	01	2.03	10
						Pengadaan pakaian seragam sekolah	Tersedianya pakaian seragam sekolah														
						Pengadaan pakaian olahraga	Tersedianya pakaian olahraga														
1	xx	15	02			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa PAUD								1	01	01	2.03	12
1	xx	15	03			Pengadaan mebeluer sekolah	Tersedianya mebeluer sekolah	Pengadaan mebeluer PAUD	Tersedianya mebeluer PAUD								1	01	01	2.03	07
1	xx	15	04			Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah	Pengadaan perlengkapan PAUD	Tersedianya perlengkapan PAUD								1	01	01	2.03	9
1	xx	15	05			Pengadaan alat rumah tangga sekolah	Tersedianya alat rumah tangga sekolah	Pengadaan alat rumah tangga PAUD	Tersedianya alat rumah tangga PAUD								1	01	01	2.03	08
1	xx	15	06			Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Terpeliharanya bangunan sekolah	Pemeliharaan gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Terpeliharanya gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD								1	01	01	2.03	05
						Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terpeliharanya rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terpeliharanya Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								1	01	01	2.03	06
1	xx	15	07			Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Terpeliharanya ruang kelas sekolah	Pemeliharaan gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Terpeliharanya gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD								1	01	01	2.03	05
1	xx	15	08			Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah	Terpeliharanya ruang guru sekolah														
						Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa	Terpeliharanya ruang locker siswa	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terpeliharanya Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								1	01	01	2.03	06
						Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga														
						Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain	Terpeliharanya sarana dan prasarana bermain														
						Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula	Terpeliharanya ruang serba guna/aula														
						Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terpeliharanya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terpeliharanya Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								1	01	01	2.03	06
						Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah	Terpeliharanya ruang unit kesehatan sekolah														
						Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah	Terpeliharanya ruang ibadah	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terpeliharanya Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								1	01	01	2.03	06
						Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah	Terpeliharanya perpustakaan sekolah														
						Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Terpeliharanya jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terpeliharanya Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								1	01	01	2.03	06
						Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary	Terpeliharanya sarana air bersih dan sanitary														
						Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa	Terpeliharanya alat peraktik dan peraga siswa														
						Pemeliharaan rutin/berkala meubeluer sekolah	Terpeliharanya meubeluer sekolah														
						Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	Terpeliharanya perlengkapan sekolah														
						Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah	Terpeliharanya alat rumah tangga sekolah														
						Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah	Terpeliharanya sarana mobilitas sekolah														
						Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya perbaikan bangunan sekolah	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Terlaksananya Perbaikan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD								1	01	01	2.03	03

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN						
						Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terlaksananya Perbaikan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah															
						Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa	Terlaksananya Perbaikan asrama siswa															
						Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya Perbaikan ruang kelas sekolah	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Terlaksananya Perbaikan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD								1	01	01	2.03	03	
						Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Terlaksananya Perbaikan ruang guru sekolah															
						Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa	Terlaksananya Perbaikan ruang locker siswa	Rehabilitasi Sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya Perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								1	01	01	2.03	04	
						Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga	Terlaksananya Perbaikan sarana olahraga															
						Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain	Terlaksananya Perbaikan sarana bermain															
						Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula	Terlaksananya Perbaikan ruang serba guna/aula															
						Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terlaksananya perbaikan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Rehabilitasi Sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya Perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								1	01	01	2.03	04	
						Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	Terlaksananya perbaikan ruang unit kesehatan sekolah															
						Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	Terlaksananya perbaikan ruang ibadah	Rehabilitasi Sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya Perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								1	01	01	2.03	04	
						Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Terlaksananya perbaikan perpustakaan sekolah															
						Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya	Terlaksananya perbaikan jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya	Rehabilitasi Sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya Perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								1	01	01	2.03	04	
						Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya perbaikan sarana air bersih dan sanitary															
						Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatnya kompetensi Tenaga pendidik PAUD	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Meningkatnya Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD								1	01	01	2.03	15	
						Pengembangan pendidikan anak usia dini	Terlaksananya program PAUD	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD								1	01	01	2.03	13	
						Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Pelatihan pendidikan dan bantuan, serta pendampingan lembaga PAUD															
						Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini	Validasi, Akurasi dan ketersediaan data PAUD	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Validasi, Akurasi dan ketersediaan data PAUD								1	01	01	2.03	14	
						Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini	Tersedianya regulasi dan Kebijakan PAUD															
						Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Tersedianya kurikulum nasional dan muatan lokal															
						Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan organisasi profesi (HIMPAUDI dan GOPTKI) untuk peningkatan mutu PAUD															
						Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini	Terlaksananya Perencanaan dan penyusunan Program PAUD															
						Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Tersedianya sarana dan media Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi PAUD															
						Monitoring, evaluasi dan pelaporan																
						Bantuan Operasional Pendidikan PAUD (BOP PAUD)	Meningkatnya mutu PAUD															
						Manajemen BOP PAUD	Meningkatnya tata kelola satuan pendidikan PAUD															
1	01	16				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun																

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
1	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	Tersedianya gedung sekolah	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Tersedianya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya Gedung Sekolah, Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah, Tersedianya dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS, Tersedianya Perlengkapan Sekolah, Tertambahnya Ruang Kelas Baru, Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung/ Ruang Kelas pada Sekolah Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		1	01	01	2.01	01	
1	xx	16	02			Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Tersedianya rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Tersedianya rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah								1	01	01	2.01	07
			03					Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Tersedianya rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	09	
1	xx	16	04			Penambahan ruang kelas sekolah	Bertambahnya ruang kelas sekolah	Penambahan ruang kelas baru	Bertambahnya ruang kelas baru	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	02	
			05					Penambahan ruang kelas baru	Bertambahnya ruang kelas baru	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	02	
						Penambahan ruang Guru sekolah	Bertambahnya ruang Guru sekolah	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Tersedianya Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	03	
								Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Tersedianya Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	03	
						Pembangunan ruang locker siswa	Tersedianya ruang locker siswa	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	06	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					1	01	01	2.02	12		
						Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	06	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					1	01	01	2.02	12		
						Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Tersedianya sarana dan prasarana bermain	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	06	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					1	01	01	2.02	12		
1	xx	16	06			Pembangunan ruang serba guna/aula	Tersedianya ruang serba guna/aula	Pembangunan ruang serba guna/aula	Tersedianya ruang serba guna/aula	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	07	
1	xx	16	07			Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Tersedianya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Pembangunan fasilitas parkir	Tersedianya fasilitas parkir							1	01	01	2.02	10	
								Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	06	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					1	01	01	2.02	12		
1	xx	16	08			Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Tersedianya ruang unit kesehatan sekolah	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Tersedianya ruang unit kesehatan sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	04	
								Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Tersedianya ruang unit kesehatan sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	04	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
						Pembangunan ruang ibadah	Tersedianya ruang ibadah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	06	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	12	
1	xx	16	09			Pembangunan perpustakaan sekolah	Tersedianya perpustakaan sekolah	Pembangunan perpustakaan sekolah	Tersedianya perpustakaan sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	05	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.05	05	
						Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Tersedianya jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	06	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	12	
						Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya sarana air bersih dan sanitary			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	06	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	12	
						Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Perlengkapan Siswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	17	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	28	
						Pengadaan pakaian seragam sekolah	Tersedianya pakaian seragam sekolah			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	17	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	28	
						Pengadaan pakaian olahraga	Tersedianya pakaian olahraga			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	17	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	28	
						Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	22	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	35	
						Pengadaan mebeluer sekolah	Tersedianya mebeluer sekolah	Pengadaan mebeluer sekolah	Tersedianya mebeluer sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	14	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	25	
						Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah	Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	16	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	27	
1	xx	16	16			Pengadaan alat rumah tangga sekolah	Tersedianya alat rumah tangga sekolah	Pengadaan alat rumah tangga sekolah	Tersedianya alat rumah tangga sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	15	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	26	
						Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Tersedianya Sarana Mobilitas Sekolah														
1	xx	16	18			Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Terpeliharanya bangunan sekolah	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan Gedung dan Ruangan	Terpeliharanya bangunan dan Ruangan sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	18	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	29
1	xx	16	20			Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terpeliharanya rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terpeliharanya rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	20
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	31
						Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Terpeliharanya ruang kelas sekolah	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan Gedung dan Ruangan	Terpeliharanya bangunan dan Ruangan sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	18
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	29
						Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah	Terpeliharanya ruang guru sekolah	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terpeliharanya rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	20
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	31
						Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa	Terpeliharanya ruang locker siswa	Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpeliharannya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	19
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	30
						Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	19
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	30
						Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula	Terpeliharanya ruang serba guna/aula			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	19
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	30
						Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terpeliharanya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	19
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	30
						Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah	Terpeliharanya ruang unit kesehatan sekolah			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	19
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	30
						Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah	Terpeliharanya ruang ibadah			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	19
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	30
						Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah	Terpeliharanya perpustakaan sekolah			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	19
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	30
						Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Terpeliharanya jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	19
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	30

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
						Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary	Terpeliharanya sarana air bersih dan sanitary			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	19
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	30
						Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa	Terpeliharanya alat peraktik dan peraga siswa			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	19
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	30
						Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah	Terpeliharanya meubeluer sekolah			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	19
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	30
						Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	Terpeliharanya perlengkapan sekolah													
						Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah	Terpeliharanya alat rumah tangga sekolah													
						Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah	Terpeliharanya sarana mobilitas sekolah													
1	xx	16	22			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya perbaikan bangunan sekolah	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya perbaikan bangunan sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	13
						Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terlaksananya Perbaikan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terlaksananya Perbaikan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	13
								Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terlaksananya Perbaikan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	21
						Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Siswa	Terlaksananya Perbaikan Asrama Siswa													
						Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya Perbaikan ruang kelas sekolah	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya Perbaikan ruang kelas sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	08
								Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya Perbaikan ruang kelas sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	14
						Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Terlaksananya Perbaikan ruang guru sekolah	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/ kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Perbaikan ruang guru sekolah/Kepala Sekolah/TU	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	09
								Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Terlaksananya Perbaikan ruang guru sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	15
1	xx	16	29			Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	Terlaksananya Perbaikan laboratorium dan praktikum sekolah	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Terlaksananya Perbaikan laboratorium	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	18
						Rehabilitasi sedang/berat Sarana Mobilitas Sekolah	Terlaksananya Perbaikan Sarana Mobilitas Sekolah													
						Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa	Terlaksananya Perbaikan ruang locker siswa	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	06
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	24
						Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga	Terlaksananya Perbaikan sarana olahraga			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	06
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	24
						Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula	Terlaksananya Perbaikan ruang serba guna/aula	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula	Terlaksananya Perbaikan ruang serba guna/aula	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	19
1	xx	16	31			Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terlaksananya perbaikan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Rehabilitasi sedang/berat fasilitas parkir	Terlaksananya perbaikan fasilitas parkir							1	01	01	2.02	19

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN						
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	06		
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	24		
						Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	Terlaksananya perbaikan ruang unit kesehatan sekolah	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	Terlaksananya perbaikan ruang unit kesehatan sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	10		
						Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	Terlaksananya perbaikan ruang unit kesehatan sekolah	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	Terlaksananya perbaikan ruang unit kesehatan sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	16		
						Rehabilitasi sedang/berat ruang lbadah	Terlaksananya perbaikan ruang lbadah	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	Terlaksananya perbaikan ruang unit kesehatan sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	10		
								Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	Terlaksananya perbaikan ruang unit kesehatan sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	16		
1	xx	16	33			Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Terlaksananya perbaikan perpustakaan sekolah	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Terlaksananya perbaikan perpustakaan sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	11		
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	17		
						Rehabilitasi sedang/berat Jaringan Instalasi Listrik dan Perlengkapannya	Terlaksananya Perbaikan Jaringan Instalasi Listrik dan Perlengkapannya	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	06		
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	24		
						Rehabilitasi sedang/berat Sarana Air Bersih dan Sanitary	Terlaksananya Perbaikan Sarana Air Bersih dan Sanitary			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	06		
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	24		
1	xx	16	35			Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB	Bertambahnya ruang kelas baru SMP dan SMPLB	Penambahan ruang kelas baru	Bertambahnya ruang kelas baru	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	02		
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	02		
						Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Meningkatnya kompetensi guru kelas dan guru mata pelajaran	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	27		
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	40		
						Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Meningkatnya kompetensi siswa berprestasi															
						Pelatihan penyusunan kurikulum	Tersedianya kurikulum muatan lokal															
						Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat	Terbentuknya forum masyarakat peduli pendidikan															
						Pembinaan SMP terbuka	Meningkatnya pengelolaan SMP terbuka															
						Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB	Bertambahnya ruang kelas baru SMP dan SMPLB	Penambahan Ruang Kelas Baru	Bertambahnya Ruang Kelas Baru	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	02		
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	02		
						Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Meningkatnya mutu pendidikan di tiap satuan pendidikan															
						Penyediaan Biaya manajemen BOS	Meningkatnya pengelolaan dan administrasi dana bos															

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
						Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Tersedianya buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Perlengkapan Siswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	17	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	28	
						Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS	Tersedianya dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS														
						Penyelenggraan paket A setara SD	Tersedianya lulus Paket A	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan				1	01	01	2.04	12	
						Penyelenggraan paket B setara SMP	Tersedianya lulus Paket B														
						Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis sekolah (MBS) disatukan pendidikan dasar	Terlaksananya Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis sekolah (MBS) disatukan pendidikan dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	28	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.04	12	
1	xx	16	37			Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Terselenggaranya seleksi Lomba OSN, O2SN, FLSN dan Lomba Debat Bahasa Inggris bagi SD/MI dan SMP/MTS	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Terselenggaranya seleksi Lomba OSN, O2SN, FLSN dan Lomba Debat Bahasa Inggris bagi SD/MI dan SMP/MTS	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	25	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	38	
						Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL)	Terselenggaranya pengajaran dan pembelajaran yang komprehensif														
						Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Tersedianya materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi														
						Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Tersedianya sarana dan media Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar														
						Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	Tersedianya beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	21	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	32	
						Penyediaan beasiswa transisi	Meningkatnya pengelolaan dan administrasi beasiswa transisi			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	21	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	32	
						Penyelenggaraan akreditasi pendidikan dasar	Terakritisasinya SD/SMP di Bulukumba														
						Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil	Terselenggaranya pembelajaran kelas rangkap di daerah terpencil														
						Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpenuhinya target pelaksanaan kegiatan														
						Penyediaan dana peningkatan pelayanan mutu pendidikan dasar	Tersedianya dana peningkatan pelayanan mutu pendidikan dasar untuk SD/MI dan SMP/MTS														
						Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/Paket A	Terselenggaranya Ujian Sekolah SD/MI/Paket A	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	23	
						Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP/MTS/Paket B	Terselenggaranya Ujian Sekolah SMP/MTS/Paket B			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	36	
						Pembentukan Karakter dan wawasan kebangsaan Peserta Didik	Terbentuknya Karakter dan wawasan kebangsaan Peserta Didik														
1	01	18				Program Pendidikan Non Formal															

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN							
1	xx	18	01			Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Meningkatnya kemampuan dan kreatifitas tutor	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pendidik dan Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan, Data Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan, Terselenggaranya Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan, Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Tersedianya Data untuk Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan						1	01	01	2.04	14		
						Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Meningkatnya Mutu pendidikan non formal																
						Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Meningkatnya pengelolaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan									1	01	01	2.04	16	
						Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terlaksananya program pendidikan keaksaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan									1	01	01	2.04	12	
						Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Pelatihan pendidikan dan bantuan kecakapan hidup																
						Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan non formal	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas									1	01	01	2.04	02	
						Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Validasi, Akurasi dan ketersediaan data keaksaraan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Validasi, Akurasi dan ketersediaan data keaksaraan									1	01	01	2.04	14	
						Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Suksesnya pelaksanaan Apresiasi PAUDNI																
						Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Tersedianya kurikulum nasional dan muatan lokal																
						Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal	Terlaksananya sertifikasi pendidikan non formal	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Meningkatnya Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan									1	01	01	2.04	15	
						Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal	Terlaksananya Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Validasi, Akurasi dan ketersediaan data keaksaraan									1	01	01	2.04	14	
						Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Suksesnya pelaksanaan HAI																
						Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpenuhinya target pelaksanaan kegiatan																
01	20					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
1	xx	20	1			Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Meningkatnya pelayanan sertifikasi pendidik	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							1	01	01	2.01	27		
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							1	01	01	2.02	40		
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini							1	01	01	2.03	16		
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							1	01	01	2.04	15		

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
1	xx	20	2			Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Tersedianya asesur guru dan kepala sekolah	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	27
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	40
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini						1	01	01	2.03	16
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1	01	01	2.04	15
1	xx	20	3			Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Meningkatnya kompetensi pendidik	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	27
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	40
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini						1	01	01	2.03	16
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1	01	01	2.04	15
1	xx	20	4			Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	Terjalannya koordinasi melalui KKG utk meningkatkan kompetensi pendidik	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	27
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	40
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini						1	01	01	2.03	16
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1	01	01	2.04	15
1	xx	20	5			Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP)	Meningkatnya kompetensi pendidik	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	27
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	40
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini						1	01	01	2.03	16
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1	01	01	2.04	15
1	xx	20	6			Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPP)	Meningkatnya kompetensi pendidik	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	27
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	40
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini						1	01	01	2.03	16

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1	01	01	2.04	15
1	xx	20	7			Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi pendidik	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	27
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	40
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini						1	01	01	2.03	16
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1	01	01	2.04	15
1	xx	20	8			Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya kompetensi pendidik	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	27
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	40
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini						1	01	01	2.03	16
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1	01	01	2.04	15
1	xx	20	9			Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Validasi, Akurasi dan ketersediaan data pendidikan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Validasi, Akurasi dan ketersediaan data pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan						1	01	04	2.01	01
1	xx	20	10			Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Kenaikan Pangkat/gol bagi PNS	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						1	01	01	2.01	27
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1	01	01	2.02	40
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini						1	01	01	2.03	16
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatkan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1	01	01	2.04	15
1	xx	20	11			Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Pemerataan guru di Kab. Bulukumba	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan						1	01	04	2.01	01
1	xx	20	12			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpenuhinya target pelaksanaan kegiatan													
1	xx	21				Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan														
1	xx	21	01			Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Meningkatnya Budaya baca													
1	xx	21	02			Pengembangan minat dan budaya baca	Meningkatnya Budaya baca													

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN			
1	xx	21	03			Supervisi dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Terselenggaranya pemanfaatan perpustakaan												
1	xx	21	04			Pelaksanaan Koordinasi pengembangan perpustakaan	Terselenggaranya koordinasi pengembangan perpustakaan												
1	xx	21	05			Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Meningkatnya sarpras perpustakaan												
1	xx	21	06			Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca	Terselenggaranya koordinasi pengembangan minat baca												
1	xx	21	07			Perencanaan dan penyusunan program budaya baca	Tersedianya Perencanaan dan penyusunan program budaya baca												
1	xx	21	08			Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Terselenggaranya Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca												
1	xx	21	09			Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Tersedianya bahan pustaka perpustakaan umum daerah												
1	xx	21	10			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpenuhinya target pelaksanaan kegiatan												
1	17	xx	16			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya													
1	17	xx	16			Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya												
1	17	xx	16			Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	Terjaganya kelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno												
1	17	xx	16			Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Pembuatan aturan/kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah												
1	17	xx	16			Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Terselenggaranya pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah												
1	17	xx	16			Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terkelolanya pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air												
1	17	xx	16			Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Berkembangnya potensi kebudayaan dan pariwisata												
1	17	xx	16			Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Berkembangnya potens nilai dan geografi sejarah												
1	17	xx	16			Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	Terjaganya bahan pustaka melalui Perekaman dan digitalisasi												
1	17	xx	16			Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	Pembuatan aturan/kebijakan sejarah dan purbakala												
1	17	xx	16			Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	Terpenuhinya target pelaksanaan kegiatan Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya												
1	17	xx	16			Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Pembangunan Museum Budaya												
1	17	xx	16			Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Pelestraian dan pengembangan hasil karya lokal bernilai ekonomi												
1	17	xx	16			Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	Tersedianya data base sistem informasi sejarah purbakala												
1	17	xx	17			Program Pengelolaan Keragaman Budaya													
1	17	xx	17			Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terciptanya kesenian dan kebudayaan daerah yang baru												
1	17	xx	17			Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan	Tersedianya data base sistem informasi bidang kebudayaan												
1	17	xx	17			Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terlaksananya loka karya/seminar dan dialog kebudayaan												
1	17	xx	17			Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Pelibatan stake holder dan dunia usaha/industri dalam mengembangkan keberagaman budaya daeran												
1	17	xx	17			Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya/keikutsertaan dalam festival budaya daerah												
1	17	xx	17			Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	Terselenggaranya Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal												

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN						
1	17	xx	17			Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	Terpenuhinya target pelaksanaan kegiatan Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan keanekaragaman budaya															
1	17	xx	18			Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya																
1	17	xx	18			Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta	Terjalannya pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta															
1	17	xx	18			Fasilitasi Pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah	terbentuknya kemitraan usaha profesi antar daerah															
1	17	xx	18			Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Terbangunnya Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah															
1	17	xx	18			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpenuhinya target pelaksanaan kegiatan															
DINAS SOSIAL																						
1,13	01	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran					Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1,13	01	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia dan terbayarkannya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Administrasi Umum	Tersedianya jasa surat menyurat, listrik, air, jasa pemeliharaan kendaraan, jasa pelayanan administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, ATK, makan-minum, cetak dan penggandaan, komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah, mebeleur, pemeliharaan berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor, dan pemeliharaan kendaraan operasional.						X	XX	01	2.03	02	
1,13	01	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas roda dua dan roda empat	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas roda dua dan roda empat									X	XX	01	2.03	06
1,13	01	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan dan tersedianya jasa operator komputer	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan dan tersedianya jasa operator komputer									X	XX	01	2.03	07
1,13	01	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor									X	XX	01	2.03	08
1,13	01	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor dan tersedianya jaringan listrik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor dan tersedianya jaringan listrik									X	XX	01	2.03	12
1,13	01	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya tugas, rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya tugas, rapat koordinasi dan konsultasi									X	XX	01	2.03	18
1,13	01	01	19			Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Penyediaan ATK, cetak, makan minum rapat dan tamu, umbul-umbul tiang dan tersedianya jasa tenaga non PNSD (Tenaga kontrak, operator dan sopir eselon II)	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor (ATK)									X	XX	01	2.03	10
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan, spanduk dan penggandaan									X	XX	01	2.03	11
								Penyediaan makanan dan minuman	Makan - minum tamu dan rapat									X	XX	01	2.03	17
1,13	01	02				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR												X	XX	01	2.03	
1,13	01					Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya shelter yang memadai buat PMKS dan Tempat Parkir	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya shelter yang memadai bagi PMKS									X	XX	01	2.03	38
1,13	01	03	05			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat									X	XX	01	2.03	20

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
1,13	01	04	07			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (AC), Lemari Es, Dispenser	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (AC), Lemari Es, Dispenser							X	XX	01	2.03	22
1,13	01	05	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor							X	XX	01	2.03	24
		06	10			Pengadaan mebeleur	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa Meubeler	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubeler Kantor							X	XX	01	2.03	25
1,13	01	07	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpelihara dan terawatnya tempat kerja	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpelihara dan terawatnya tempat kerja							X	XX	01	2.03	28
1,13	01	07	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional SKPD	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional SKPD							X	XX	01	2.03	30
1,13	01	07	28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpelihara peralatan kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpelihara peralatan kantor							X	XX	01	2.03	34
1,13	01	05				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR									X	XX	01	2.03		
1,13	01	05	03			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya kontribusi Bimtek.	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya kontribusi Bimtek.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan dan kontribusi diklat pejabat struktural		Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur		X	XX	01	2.04	11	
1,13	01	05	05			Pelatihan dan Pendidikan Struktural	Tersedia kontribusi pelatihan dan pendidikan bagi pejabat struktural	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedia kontribusi pelatihan dan pendidikan struktural							X	XX	01	2.04	09
1,13	01	06				PROGRAM PENINGKATAN PEGETAHUAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN														
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja, laporan keuangan, dan ketersediaan gaji dan tunjangan ASN		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		X	XX	01	2.02	01	
1,13	01	06	01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan Capaian Kinerja, Bulanan, Triwulan dan Semesteran						X	XX	01	2.02	06	
1,13	01	07	04			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun						X	XX	01	2.02	09	
1,13	01	08	07			Monitoring, evaluasi program kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi kegiatan Dinas Sosial Kab. Bulukumba	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP, RKA, DPA, SPM, Renstra, Renja, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan serta pelaksanaan movev kegiatan SKPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya evaluasi kinerja perangkat daerah		X	XX	01	2.01	03	
		08	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi program dan kegiatan (movev)						X	XX	01	2.01	05	
1,13	01	09	08			Penyusunan Program kerja dan SPM OPD	Terlaksananya penyusunan program kerja OPD yang tepat tujuan dan sasaran serta pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	RKA, DPA, dan SPM						X	XX	01	2.01	03	
								Penyusunan Renstra & Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja						X	XX	01	2.01	01	
								Kordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan					X	XX	01	2.01	04		
1,13	01	15				PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH	Jumlah Penduduk Miskin yang Menerima Bantuan							Urusan Pemerintahan BIDANG SOSIAL	Urusan Pemerintahan WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1,13	01	15	04			Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin perkotaan dan pedesaan	Jumlah penduduk fakir miskin daerah pedesaan dan perkotaan yang menerima bantuan	Penyediaan Sandang	Tersedianya pemberian bantuan sandang bagi Fakir Miskin (PMKS Lainnya)	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial	Tersedianya rehabilitasi sosial berupa layanan data pengaduan, permakanan, sandang, serta bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar Panti Sosial		1	06	04	2.02	04	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
								Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya pemberian alat bantu usaha (UEP) bagi Fakir Miskin (PMKS Lainnya)							1	06	04	2.02	05
1,13	01	15	05			Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin daerah pesisir, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil	Terlaksananya Pemberian Bantuan Sarana/Alat Bantu Pekerjaan Nelayan (bantuan Jaring), KUBE dan UEP bagi keluarga miskin di wilayah pesisir	Penyediaan Sandang	Tersedianya pemberian bantuan sandang bagi Fakir Miskin (PMKS Lainnya)	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial	Tersedianya rehabilitasi sosial berupa layanan data pengaduan, permakanaan, sandang, serta bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar Panti Sosial			1	06	04	2.02	04
								Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya pemberian alat bantu usaha (UEP) bagi Fakir Miskin (PMKS Lainnya)							1	06	04	2.02	05
						Monitoring dan evaluasi kegiatan RASTRA	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan bantuan RASTRA	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi program dan kegiatan (monev)	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP, RKA, DPA, SPM, Renstra, Renja, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan serta pelaksanaan monev kegiatan SKPD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.01	05
1,13	01	15	06			PROGRAM AKSES UPDATING DAN INFORMASI DATA TERPADU FAKIR MISKIN DAN PMKS	Data Fakir Miskin dan PMKS													
1,13	01	15	07			Mekanisme Pemutakhiran data Mandiri (MPM) Basis Data Terpadu	Jumlah Data Fakir miskin yang telah tervalidasi pertahun/tiap tahunnya	Pendataan Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya proses pendataan bagi fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pengelolaan Data Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya proses pendataan dan pengelolaan data bagi fakir miskin dan PMKS cakupan daerah kabupaten/ kota	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya layanan ketersediaan data fakir miskin dan PMKS serta perlindungan, penanganan dan jaminan sosial bagi anak terdantar			1	06	05	2.02	01
								Pengelolaan Data Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya proses verifikasi dan pengelolaan data bagi fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota							1	06	05	2.02	02
1,13	01	15	08			SIKS-NG dan E-PMKS	Jumlah Data PMKS yang telah tervalidasi pertahun/Tiap Tahunnya	Pendataan Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya proses pendataan bagi fakir miskin dan PMKS cakupan daerah kabupaten/kota							1	06	05	2.02	01
						Profil Dinas Sosial	Jumlah Data dan Informasi terkait Kegiatan Dinas Sosial	Pengelolaan Data Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya proses verifikasi dan pengelolaan data bagi fakir miskin dan PMKS cakupan daerah kabupaten/kota							1	06	05	2.02	02
1,13	01	16				PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah sosial													
1,13	01	16	10			Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Terlaksananya Operasional Petugas Tim TAGANA Penanganan Bencana, tersedianya bantuan dan logistik korban bencana alam dan sosial, dan tersedianya jasa petugas TAGANA	Penyediaan Makanan	Tersedianya bantuan makanan dan logistik bagi korban bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Tersedianya bantuan makanan (logistik bencana), sandang dan tempat penampungan bagi korban bencana	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Penanganan Bencana di Daerah Kabupaten/Kota			1	06	06	2.01	01
								Penyediaan Sandang	Tersedianya bantuan sandang bagi korban bencana							1	06	06	2.01	02
								Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersediaanya tempat penampungan pengungsi							1	06	06	2.01	03
								Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kampung Siaga Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap-siagaan Bencana Kabupaten/ Kota	tersedianya biaya koordinasi, sosialisasi dan tersedianya insentif bagi anggota TAGANA	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Penanganan Bencana di Daerah Kabupaten/Kota			1	06	06	2.02	01
								Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Tersedianya biaya koordinasi, sosialisasi serta insentif bagi anggota TAGANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap-siagaan Bencana Kabupaten/ Kota	tersedianya biaya koordinasi, sosialisasi dan tersedianya insentif bagi anggota TAGANA	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Penanganan Bencana di Daerah Kabupaten/Kota			1	06	06	2.02	02

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
1,13	01	16	12			Pelayanan perlindungan sosial bagi lanjut usia terlanjar	Jumlah Lansia yang mendapatkan bantuan	Penyediaan Permakanan	Tersedianya bahan makanan bagi lansia erlanjar	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Tersedianya rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlanjar, usia terlanjar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial berupa permakanan, sandang, alat bantu, bimbingan sosial, dan fasilitas lainnya.	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar Panti Sosial			1	06	04	2.01	01
								Penyediaan Sandang	Tersedianya sandang bagi lansia terlanjar							1	06	04	2.01	02
								Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya alat bantu bagi lansia terlanjar							1	06	04	2.01	03
						Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak	Jumlah bantuan dan layanan sosial bagi korban perdagangan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum	Penyediaan Permakanan	Tersedianya bantuan permakanan bagi korban perdagangan perempuan dan ABH	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial	Tersedianya rehabilitasi sosial berupa layanan data pengaduan, permakanan, sandang, serta bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar Panti Sosial			1	06	04	2.02	03
		16	09					Pemberian Layanan Rujukan	Layanan rujukan bagi korban perdagangan perempuan dan ABH							1	06	04	2.02	13
1,13	01	15	09			Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah pelatihan dan pemberian bantuan UEP bagi perempuan PMKS rawan sosial ekonomi (RSE)	Pemberian sandang	tersedianya sandang dan bantuan UEP bagi perempuan rawan sosial ekonomi (RSE)							1	06	04	2.02	04
								Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	tersedianya bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial bagi perempuan rawan sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial	Tersedianya rehabilitasi sosial berupa layanan data pengaduan, permakanan, sandang, serta bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar Panti Sosial			1	06	04	2.02	07
						Pembinaan dan Pelayanan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis.	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan dan bimbingan sosial	Penyediaan Permakanan	tersedianya makanan bagi gelandangan dan pengemis	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Tersedianya rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlanjar, usia terlanjar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial berupa permakanan, sandang, alat bantu, bimbingan sosial, dan fasilitas lainnya.	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar Panti Sosial							
								Penyediaan Sandang	tersedianya sandang bagi gelandangan dan pengemis	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Tersedianya rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlanjar, usia terlanjar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial berupa permakanan, sandang, alat bantu, bimbingan sosial, dan fasilitas lainnya.	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar Panti Sosial							
								Penyediaan Bimbingan Fisik, Mental Spritual, dan sosial	tersedianya bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial bagi gelandangan dan pengemis											
						Fasilitasi pengiriman klien PMKS ke balai/panti rehabilitasi sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan dan bantuan rehabilitasi sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan bagi penyandang disabilitas terlanjar, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar, serta gelandangan pengemis di luar panti panti sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Tersedianya rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlanjar, usia terlanjar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial berupa permakanan, sandang, alat bantu, bimbingan sosial, dan fasilitas lainnya.	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar Panti Sosial			1	06	03	2.01	01

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
								Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/Aids dan Napza di luar panti panti sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial	Tersedianya rehabilitasi sosial berupa layanan data pengaduan, pemakanan, sandang, serta bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial										
1,13	01	17				PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR															
1,13	01	17	07			Pelayanan dan pemberian santunan sosial Anak Panti asuhan dan Non Panti Asuhan	Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi dan bantuan sosial	Penyediaan Permakanan	Terlaksananya pemberian bantuan pemakanan bagi anak terlantar	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Tersedianya rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial berupa pemakanan, sandang, alat bantu, bimbingan sosial, dan fasilitas lainnya.	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar Panti Sosial				1	06	04	2.01	01
								Penyediaan Sandang	Tersedianya sandang bagi anak terlantar								1	06	04	2.01	02
								Pemberian pelayanan penelurusan keluarga	Layanan penelurusan keluarga								1	06	04	2.01	11
								Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Reunifikasi keluarga	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Tersedianya rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial berupa pemakanan, sandang, alat bantu, bimbingan sosial, dan fasilitas lainnya.	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar Panti Sosial				1	06	04	2.01	12
								Penjangkauan Anak terlantar	tersedianya layanan penjangkauan anak terlantar	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Tersedianya layanan penjangkauan, rujukan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya layanan ketersediaan data fakir miskin dan PMKS serta perlindungan, penanganan dan jaminan sosial bagi anak terlantar				1	06	05	2.01	01
								Rujukan Anak Terlantar	tersedianya layanan rujukan anak terlantar								1	06	05	2.01	02
								Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	terlaksananya pemantauan terhadap anak terlantar								1	06	05	2.01	03
1,13	01	19				PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA															
1,13	01	19	04			Pendayagunaan para penyandang disabilitas dan eks trauma*	Jumlah Penyandang Cacat (disabilitas) yang mendapatkan bantuan jaminan sosial dan bantuan UEP	Penyediaan pemakanan	Tersedianya pemakanan bagi penyandang disabilitas	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Tersedianya rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial berupa pemakanan, sandang, alat bantu, bimbingan sosial, dan fasilitas lainnya.	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar Panti Sosial				1	06	04	2.01	01
								Penyediaan sandang	tersedianya sandang bagi penyandang disabilitas	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Tersedianya rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial berupa pemakanan, sandang, alat bantu, bimbingan sosial, dan fasilitas lainnya.						1	06	04	2.01	02
								Penyediaan alat bantu	tersedianya alat bantu bagi penyandang disabilitas								1	06	04	2.01	03
								Fasilitasi pemberian nomor induk, kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak	NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan KIA bagi Penyandang Disabilitas								1	06	04	2.01	07

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
								Pemberian Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi penyandang disabilitas							1	06	04	2.01	08
1,13	01	19				PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO	Sarana dan Prasarana Panti Asuhan													
1,13	01	19	03			Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo	Jumlah Panti Asuhan Yang Dibina	Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	sarana dan prasarana panti asuhan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota, tersedianya sarana dan prasarana pendukung, pelaksanaan KEMA BAKTI serta insentif bagi pekerja sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			1	06	02	2.03	04
						Pengadaan sarana panti persinggahan	Terpenuhinya sarana pendukung dan kebutuhan rumah singgah bagi orang terlantar	Penyediaan Permakanan	tersedianya sarana berupa permakanan bagi orang terlantar di shelter	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Tersedianya rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial berupa permakanan, sandang, alat bantu, bimbingan sosial, dan fasilitas lainnya.	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar Panti Sosial			1	06	04	2.01	01
								Penyediaan Sandang	tersedianya sarana berupa kebutuhan sandang bagi orang terlantar di shelter							1	06	04	2.01	02
1,13	01	19	04			PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL														
						Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mendapatkan layanan bimbingan sosial dan bantuan UEP	Pemberian layanan data pengaduan	Layanan data dan Pengaduan bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial	Tersedianya rehabilitasi sosial berupa layanan data pengaduan, permakanan, sandang, serta bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar Panti Sosial			1	06	04	2.02	01
								Penyediaan permakanan	Permakanan bagi eks Penyandang Penyakit Sosial							1	06	04	2.02	03
								Penyediaan Sandang	Bantuan Sandang Bagi Penyandang Penyakit Sosial							1	06	04	2.02	03
								Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial							1	06	04	2.02	07
						PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL														
1,13	01	21				Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan keluarga													
1,13	01	22	03			Pemberdayaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah bantuan UEP untuk pengembangan karang taruna, kemah bakti, dan TKSK.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya insentif bagi TKSK dan meningkatnya kemampuan potensi TKSK	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/ kota, tersedianya sarana dan prasarana pendukung, pelaksanaan KEMA BAKTI serta insentif bagi pekerja sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial			1	06	02	2.03	02
								Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya bantuan UEP dan pelaksanaan KEMA BAKTI bagi karang taruna							1	06	02	2.03	04
1,13	02	21	05			Pelestarian dan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan, dan KSN	Terlaksananya Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan, Keberintisan dan KSN dan Terlaksananya Pemeliharaan / Rehab TMP Taccorong	Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya rehabilitasi TMP Taccorong	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan TMP serta peningkatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keberintisan dan KSN	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya rehabilitasi dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan serta peningkatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keberintisan dan KSN			1	07	02	2.01	01
								Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya TMP Taccorong Kab. Bulukumba							1	07	02	2.01	02
									Terlaksananya Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan, Keberintisan dan KSN											

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
1,13	01	21	06			Pengembangan Program Keluarga Harapan	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan (Operasional/Penguatan Pelaksanaan Kegiatan APBN menyangkut pemberian dan penyaluran bantuan bagi KPM PKH)	Peningkatan Kemampuan Potensi pekerja Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya operasional dan penguatan bagi pendamping PKH	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota, tersedianya sarana dan prasarana pendukung, pelaksanaan KEMA BAKTI serta insentif bagi pekerja sosial (TKSK dan Pendamping PKH)	Program pemberdayaan sosial	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			1	06	02	2.03	01
						Pengembangan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan dan penanganan sesuai dengan jenis PMKS	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk kependudukan, Akte Kelahiran, Surat nikah dan Kartu Identitas Anak	Nomor Induk kependudukan, Akte Kelahiran, Surat nikah dan Kartu Identitas Anak	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Tersedianya rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial berupa permakanan, sandang, alat bantu, bimbingan sosial, dan fasilitas lainnya.	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar Panti Sosial			1	06	04	2.01	07
								Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar							1	06	04	2.01	08
								Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Layanan Data dan Pengaduan							1	06	04	2.01	09
								Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan							1	06	04	2.01	13
								Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Layanan Data dan Pengaduan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sosial	Tersedianya rehabilitasi sosial berupa layanan data pengaduan, permakanan, sandang, serta bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial					1	06	04	2.02	01
								Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk kependudukan, Akte Kelahiran, Surat nikah dan Kartu Identitas Anak	Nomor Induk kependudukan, Akte Kelahiran, Surat nikah dan Kartu Identitas Anak							1	06	04	2.02	09
								Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tersedianya Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar							1	06	04	2.02	10
								Pemberian Layanan Rujukan	tersedianya layanan rujukan bagi PMKS							1	06	04	2.02	13
								Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	MOU Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Kota							1	06	04	2.02	14
						Peningkatan Peran Aktif dan Dunia Usaha	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan melalui forum CSR	Pendataan Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data fakir miskin penerima bantuan	Pengelolaan Data Fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya proses pendataan dan pengelolaan data bagi fakir miskin dan PMKS cakupan daerah kabupaten/ kota	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya layanan ketersediaan data fakir miskin dan PMKS serta perlindungan, penanganan dan jaminan sosial bagi anak terlantar			1	06	05	2.02	01
1,13	01	21	08			Penguatan kelembagaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Jumlah layanan dan penanganan kasus berhubungan dengan kesejahteraan keluarga	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Tersedianya sosialisasi dan penguatan LK3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota, tersedianya sarana dan prasarana pendukung, pelaksanaan KEMA BAKTI serta insentif bagi pekerja sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial			1	06	02	2.03	05

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																				
				Wajib bukan pelayanan dasar	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran													
2.08.	01.	01.	01.			1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.Terciptanya Kelancaran Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terciptanya Kelancaran Surat Menyurat	Administrasi Umum	Terciptanya Kelancaran Surat Menyurat, Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik, terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, Peralatan Listrik, Printer, Surat kabar/ Koran, ATK, Barang Cetak, Makan Minum dan Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja SKPD	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	X	XX	01.	1.03.	01.
2.08.	01.	01.	02.			2.Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	2.Terlaksananya komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya komunikasi sumber daya air dan listrik							X	XX	01	1.03	02
2.08.	01.	01.	06.			3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional							X	XX	01	1.03	06
2.08.	01.	01.	07.			4.Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4.Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan							X	XX	01	1.03	07
2.08.	01.	01.	08.			5.Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.Terciptanya Kebersihan Ruangan dan Halaman Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya Kebersihan Ruangan dan Halaman Kantor							X	XX	01	1.03	08
2.08.	01.	01.	12.			6.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.Peralatan Listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan Listrik							X	XX	01	1.03	12
2.08.	01.	01.	13.			7.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.Tersedianya Printer	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Printer							X	XX	01	1.03	13
2.08.	01.	01.	15.			8.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.Tersedianya Surat kabar/ Koran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat kabar/ Koran							X	XX	01	1.03	15
2.08.	01.	01.	18.			9.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	9.Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	9.Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi							X	XX	01	1.03	18
2.08.	01.	01.	21.			10.Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	10.Tersedianya ATK, Barang Cetak dan Makan Minum	1.Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor							X	XX	01	1.03	10
								2.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak							X	XX	01	1.03	11
								3.Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman							X	XX	01	1.03	17
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur													
2.08.	01.	02.	01.			1.Pengadaan Mobil Jabatan	1.Tersedianya Mobil Jabatan	Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya Mobil Jabatan							X	XX	01	1.03	20
2.08.	01.	02.	07.			2.Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2.Tersedianya AC dan Dispenser	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya AC dan Dispenser							X	XX	01	1.03	23
2.08.	01.	02.	09.			3.Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3.Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor							X	XX	01	1.03	25
2.08.	01.	02.	10.			4.Pengadaan Mebeleur	4.Tersedianya Mebeleur Kantor	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor							X	XX	01	1.03	26
2.08.	01.	02.	22.			5.Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor							X	XX	01	1.03	29
2.08.	01.	02.	23.			6.Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	6.Terpeliharanya Kendaraan Jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan							X	XX	01	1.03	30
2.08.	01.	02.	24.			7.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional							X	XX	01	1.03	31
2.08.	01.	02.	28.			8.Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8.Terpeliharanya Peralatan Kantor yang layakPakai	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor yang siap Pakai							X	XX	01	1.03	35
2.08.	01.	02.	48.			9.Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	9.Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor							X	XX	01	1.03	39
2.08.	01.	03.				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur													
2.08.	01.	03.	02.			1.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	1.Tersedianya Pakaian Dinas, PSR, PSH dan PDH	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas, PSR, PSH dan PDH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas, PSR, PSH, PDH dan Pakaian Kerja Lapangan					X	XX	01	1.04	02
2.08.	01.	03.	03.			2.Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	2.Terlaksananya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan							X	XX	01	1.04	03
2.08.	01.	05.				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Aparatur													
2.08.	01.	05.	01.			1.Pendidikan dan Pelatihan Formal	1.Terlaksananya Latpim Eselon II, III dan IV	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Latpim Eselon II, III dan IV							X	XX	01	1.04	09

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
2.08.	01.	05.	03			2.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							X	XX	01	1.04	11
2.08.	01.	06.				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja SKPD													
2.08.	01.	06.	01.			1.Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.Terlaksananya Penyusunan LKIP dan Laporan OPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan LKIP dan Laporan OPD	Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyusunan LKIP, Laporan SKPD, Laporan Keuangan Semester, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Penyusunan Renja, Renstra dan Program Kegiatan SKPD					X	XX	01	1.02	06
2.08.	01.	06.	02.			2.Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2.Terlaksananya Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Terlaksananya Penyusunan laporan Keuangan Semesteran							X	XX	01	1.02	07
2.08.	01.	06.	04.			3.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.Terlaksananya Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun							X	XX	01	1.02	09
2.08.	01.	06.	05			4.Penyusunan Program Kerja SKPD	4.Terlaksananya Perencanaan Program Kegiatan SKPD	1.Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja OPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan OPD dan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah					X	XX	01	1.01	01
								2.Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan OPD							X	XX	01	1.01	02
								3.Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah							X	XX	01	1.01	03
2.08.	01.	15.				Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Program keluarga Berencana													
2.08.	01.	15.	01.			1.Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	1.Terlaksananya Pelayanan KB Melalui Kegiatan TNI Manunggal, KB-KES, Bulan Bhakti Bhayangkara dan Pelayanan Kegiatan Kesatuan Gerak PKK	1.Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pelayanan KB Melalui Kegiatan TNI Manunggal, KB-KES, Bulan Bhakti Bhayangkara dan Pelayanan Kegiatan Kesatuan Gerak PKK	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya Program keluarga Berencana, Pelayanan Kontrasepsi dan Kelembagaan Jaringan KB			2	14	03	1.02	01
2.08.	01.	15.	02.			2.Pelayanan KIE	1.Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Bidang KIE di 10 Kecamatan	1.Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Bidang KIE di 10 Kecamatan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Bidang KIE di 10 Kecamatan					2	14	03	2.01	02.
2.08.	01.	15.	03			3.Pembina Keluarga Berencana	1.Meningkatnya Pengetahuan Kader	1.Pembinaan Terpadu Kampung KB	Meningkatnya Pengetahuan Kader	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya Pengetahuan Kader					2	14	03	2.04	04
2.08.	01.	15.	07.			4.Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.Terpenuhinya Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terpenuhinya Bantuan Operasional Keluarga Berencana							2	14	03.	2.04.	02
								2.Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB								2	14	03.	2.04.	03

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
								3.Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terpenuhinya Bantuan Operasional Keluarga Berencana					2	14	03	2.01	01	
								4.Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK								2	14	03	2.01	08	
								5.Pengendalian Program KKBPK								2	14	03	2.01	09	
								6.Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						2	14	03	2.02	01	
								7.Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)								2	14	03	2.02	03	
2.08.	01.	17.				Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi														
2.08.	01.	17	01			1.Pelayanan Konseling KB	1.Terlaksananya Konseling KB bagi Calon Akseptor KB	1.Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Terlaksananya Konseling KB bagi Calon Akseptor KB	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konseling KB bagi Calon Akseptor KB dan Tersedianya Sarana Pelayanan KB					2	14	03	2.03	07	
2.08.	01.	17	03			2.Pengadaan Alat Kontrasepsi	2.Tersedianya Sarana Pelayanan KB	1.Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinnya								2	14	03	2.03	01	
								2.Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB								2	14	03	2.03	05	
						Program Kelembagaan dan Jaringan KB	Meningkatnya Kelembagaan Jaringan KB														
2.08	01	25	01			1.Orientasi TNI Manunggal KB-KES	1.Terlaksananya TNI Manunggal KB-KES	1.Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya TNI Manunggal KB-KES, Bulan Bhakti KB-KES Bhayangkara, Bulan Bhakti KB-IBI dan Kesatuan Gerak PKK KB-KES	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya TNI Manunggal KB-KES, Bulan Bhakti KB-KES Bhayangkara, Bulan Bhakti KB-IBI dan Kesatuan Gerak PKK KB-KES					2	14	03	2.04	01	
2.08	01	25	02			2.Bulan Bhakti KB-KES Bhayangkari	2.Terlaksananya Bulan Bhakti KB KES Bhayangkara														
2.08	01	25	03			3.Bulan Bhakti KB- IBI	3.Terlaksananya Bulan Bhakti KB-IBI														
2.08	01	25	04			4.Kesatuan Gerak PKK KB-KES	4.Terlaksananya Kesatuan Gerak PKK KB-KES														
2.08	01	25	05			5.Hari Keluarga Tingkat Nasional	5.Terlaksananya Hari Keluarga tingkat Nasional	1.Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Terlaksananya Hari Keluarga tingkat Nasional	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Hari Keluarga tingkat Nasional					2	14	03	2.01	05	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
						Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Program keluarga Berencana														
2.08	01	15	08			1.Pemberdayaan Ekonomi keluarga	1.Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Modal Usaha serta Operasional Poktan UPPKS	1.Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Modal Usaha	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Modal Usaha serta Operasional Poktan UPPKS	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya Program Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri serta Meningkatkan Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			2	14	04	2.01	01	
								2.Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Operasional Poktan UPPKS							2	14	04	2.01	08	
						Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Remaja														
2.08	01	16	01			1.Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	1.Terlaksananya Orientasi Pengelolaan KIE KRR	1.Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi Pengelolaan KIE KRR	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Orientasi Pengelolaan KIE KRR dan Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling					2	14	04	2.01	03	
								2.Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								2	14	04	2.01	04	
								3.Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								2	14	04	2.01	07	
2.08	01	16	02			2.Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling	2.Terlaksananya Pengembangan Pusat Informasi dan Konsultasi	1.Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								2	14	04	2.01	07	
						Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/ KR yang mandiri	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/ KR yang mandiri														
2.08	01	18	01			1.Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	1.Terlaksananya Pembentukan, Pelatihan dan Pembinaan Kelompok	1.Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Terlaksananya Pembentukan, dan Pelatihan Kelompok							2	14	04	2.01	01	
								Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Terlaksananya Pembinaan Kelompok							2	14	04	2.01	07	
						Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Meningkatnya Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga														

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN									
2.08	01	23	01			1. Pelatihan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	1. Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	1. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/IPPKS)	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan																
						Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/ KR yang mandiri																		
2.08	01	18	03			1. Koordinasi Pengelolaan Program KKBPK	1. terlaksananya Rapat Koordinasi Program KKBPK di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	terlaksananya Rapat Koordinasi Program KKBPK di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta Orientasi Kader Pendataan, Analisis Pendataan dan Pemantauan Pendataan	Program Pengendalian Penduduk	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/ KR yang mandiri			2	14	02	2.01	01					
								2. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal								2	14	02	2.01	09					
								3. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK								2	14	02	2.01	15					
2.08	01	18	05			2. Pengolahan Data dan Informasi Keluarga Berencana	2. Terlaksananya Orientasi Kader Pendataan, Analisis Pendataan, dan Pemantauan Pendataan	1. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						2	14	02	2.01	01					
								2. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota						2	14	02	2.02	02					
								3. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga								2	14	02	2.02	03					
								Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain								2	14	02	2.02	08					
								Penyediaan Data dan Informasi Keluarga								2	14	02	2.02	11					
								Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga								2	14	02	2.02	12					
								Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB								2	14	02	2.02	13					
INSPEKTORAT DAERAH																									
						PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan													UNSUR PENGAWASAN Urusan Pemerintahan					
4.02	01	06	5			Penyusunan rencana kinerja tahunan	Jumlah dokumen rencana kinerja tahunan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renstra dan Renja, Dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah dengan ketersediaan dokumen pelaporan, tertib administrasi keuangan dan administrasi umum			6	01	01	2.01	01					

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4.02	01	06	2			Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP)	Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja (LAKIP)	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah							6	01	01	2.01	05
4.02	01	06	3			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran	Penyusunan laporan keuangan bulanan /semesteran	Tersedianya dokumen pelaporan keuangan bulanan/semesteran	Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran dan laporan keuangan akhir tahun					6	01	01	2.02	07
4.02	01	06	04			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun							6	01	01	2.02	09
						PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran													
4.02	02	01	01			Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase pelayanan administrasi surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Administrasi Umum						6	01	01	2.03	01
4.02	02	01	02			Penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik							6	01	01	2.03	02
4.02	02	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penatausahaan administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penatausahaan administrasi keuangan							6	01	01	2.03	07
4.02	01	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Perizinan kendaraan dinas/operasional (mobil)	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Terbitnya perizinan kendaraan dinas operasional (mobil dan motor) dan penggantian plat kendaraan dinas/operasional		Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat, Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Jasa administrasi keuangan, Perizinan dan penggantian plat kendaraan dinas / operasional, Jasa kebersihan kantor, Jasa perbaikan peralatan kerja, Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Peralatan dan perlengkapan kantor, Peralatan rumah tangga, Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Alat Tulis Kantor, Barang cetakan dan pengandaan, Makanan dan Minuman, Bahan logistik kantor, Mobil jabatan, Kendaraan dinas/operasional, Perlengkapan gedung kantor, Peralatan gedung kantor, Meubeleur, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Mobil jabatan, Kendaraan dinas/operasional, Perlengkapan gedung kantor, Peralatan gedung kantor dan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor					6	01	01	2.03	06
							Perizinan kendaraan dinas/operasional (motor)													
							Terlaksananya penggantian plat kendaraan dinas													
4.02	01	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase pelayanan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor							6	01	01	2.03	08
4.02	01	01	09			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja							6	01	01	2.03	09
4.02	01	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor							6	01	01	2.03	12
4.02	01	01	13			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor							6	01	01	2.03	13
4.02	01	01	14			Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga							6	01	01	2.03	14
4.02	01	01	15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							6	01	01	2.03	15
4.02	01	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah							6	01	01	2.03	18

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4.02	01	01	19			Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Persentase penatausahaan kesekretariatan SKPD	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor							6	01	01	2.03	10
								Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan							6	01	01	2.03	11
								Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan makanan dan minuman							6	01	01	2.03	17
								Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor							6	01	01	2.03	16
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR														
4.02	01	02	04			Pengadaan kendaraan dinas mobil jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/mobil jabatan	Pengadaan mobil jabatan	Terlaksananya pengadaan mobil jabatan							6	01	01	2.03	19
4.02	01	02	05			Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional							6	01	01	2.03	20
4.02	01	02	07			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor							6	01	01	2.03	22
4.02	01	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pembelian peralatan gedung kantor							6	01	01	2.03	24
4.02	01	02	10			Pengadaan meubeleur kantor	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	Pengadaan meubeleur	Terlaksananya pengadaan sarana kerja berupa kursi dan meja kerja / meubeleur kantor							6	01	01	2.03	25
4.02	01	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor							6	01	01	2.03	28
4.02	01	02	23			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan							6	01	01	2.03	29
4.02	01	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional							6	01	01	2.03	30
4.02	01	02	25			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara kondisinya	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor							6	01	01	2.03	32
4.02	01	02	26			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara kondisinya	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor							6	01	01	2.03	34
4.02	01	02	27			Rehabilitasi gedung kantor	Jumlah bangunan kantor yang direhab	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi rumah gedung kantor							6	01	01	2.03	38
						PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR														
4.02	01	02	09			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						6	01	01	2.04	02
4.02	01	02	10			Pengadaan pakaian olahraga	Jumlah pakaian olahraga	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu		Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, Pakaian khusus hari-hari tertentu, Pendidikan dan pelatihan formal untuk peningkatan kapabilitas Pegawai Inspektorat / APIP dalam pengawasan internal, pelaksanaan kebijakan dan akuntabilitas kinerja serta Terpenuhnya jumlah APIP yang memiliki sertifikat pengawasan					6	01	01	2.04	05
4.02	01	02	1			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu									6	01	01	2.04	05
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR														
4.02	01	05	01			Pendidikan dan pelatihan formal	Tingkat/level inspektorat terhadap kapabilitas APIP dalam pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal untuk peningkatan kapabilitas Pegawai Inspektorat / APIP dalam pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan							6	01	01	2.04	09
							Jumlah APIP yang memiliki sertifikat pengawasan		Jumlah APIP yang memiliki sertifikat pengawasan											
						Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti Bimtek	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparat pengawas							6	01	01	2.04	11

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN							
						PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR																	
4.02	01	21	02			Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah aparat pengawas pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal untuk peningkatan kapabilitas Pegawai Inspektorat / APIP dalam pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja									6	01	01	2.04	09	
						PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH																	
4.02	01	20	01			Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya pengawasan audit pendahuluan OPD	Audit kinerja dan keuangan	Terlaksananya pengawasan audit pendahuluan OPD	Penyelenggaraan pengawasan internal		Program penyelenggaraan pengawasan	Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu					6	01	02	2.01	01	
							Terlaksananya pengawasan audit operasional OPD		Terlaksananya pengawasan audit operasional OPD														
							Terlaksananya pemeriksaan dana BOS		Terlaksananya pemeriksaan dana BOS		Tersedianya laporan hasil pemeriksaan atas audit pendahuluan OPD, Audit operasional OPD, Pemeriksaan dana BOS, Pemeriksaan Penutupan kas dan stock opname, Pemeriksaan fisik dan keuangan OPD, Pemeriksaan dana Desa dan Audit probity												
							Terlaksananya pemeriksaan penutupan kas dan stock opname		Terlaksananya pemeriksaan penutupan kas dan stock opname														
							Terlaksananya pemeriksaan fisik dan keuangan OPD		Terlaksananya pemeriksaan fisik dan keuangan OPD														
							Terlaksananya pemeriksaan dana Desa		Terlaksananya pemeriksaan dana Desa														
							Terlaksananya audit probity		Terlaksananya audit probity														
4.02	01	20	02			Penanganan kasus pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan perintah Pimpinan Tinggi	Tindak lanjut pengaduan masyarakat	Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan perintah Pimpinan Tinggi	Asistensi dan pendampingan	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Terwujudnya pelaksanaan asistensi dan pendampingan					6	01	03	2.02	01	
							Terlaksananya audit dengan tujuan tertentu	Audit kinerja dan keuangan	Terlaksananya audit kinerja dan keuangan	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya audit, review, pemantauan serta evaluasi kinerja dan keuangan dengan tujuan tertentu	Program penyelenggaraan pengawasan	Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu					6	01	02	2.02	01	
								Review Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya review kinerja dan keuangan									6	01	02	2.02	02	
								Pemantauan kinerja dan keuangan	Terlaksananya pemantauan kinerja dan keuangan									6	01	02	2.02	03	
								Evaluasi kinerja dan keuangan	Terlaksananya evaluasi kinerja dan keuangan									6	01	02	2.02	04	
4.02	01	20	10			Pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya koordinasi pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan pengawasan Itprov	Pemantauan kinerja dan keuangan	Terlaksananya koordinasi pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan pengawasan Itprov	Penyelenggaraan pengawasan internal	Persentase capaian penyelesaian temuan pengawas eksternal (BPK dan APIP)	Program penyelenggaraan pengawasan	Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu					6	01	02	2.01	03	
							Terlaksananya pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan pengawasan Itprov		Terlaksananya pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan pengawasan Itprov														
									Terlaksananya monev tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK														
									Terlaksananya monev TLHP APIP														
4.02	01	20	06			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terlaksananya koordinasi tindak lanjut hasil temuan BPK dan APIP	Pemantauan kinerja dan keuangan	Terlaksananya koordinasi tindak lanjut hasil temuan BPK dan APIP	Penyelenggaraan pengawasan internal	Terlaksananya koordinasi tindak lanjut hasil temuan, Ekspose naskah pokok temuan BPK dan Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP	Program penyelenggaraan pengawasan	Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu					6	01	02	2.01	03	
							Terlaksananya ekspose Naskah Pokok Temuan		Terlaksananya ekspose Naskah Pokok Temuan APIP														

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4.02	01	20	04			Penanganan khusus pada wilayah pemerintah di bawahnya	Terlaksananya reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Reviu Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya reviu kinerja dan keuangan	Penyelenggaraan pengawasan internal	Terlaksananya reviu kinerja dan keuangan serta Evaluasi kinerja dan keuangan	Program penyelenggaraan pengawasan	Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu			6	01	02	2.01	02
							Terlaksananya reviu LKPD													
							Terlaksananya reviu LKPJ													
							Terlaksananya reviu LKPD Perubahan 2021 dan LKPD Pokok 2022													
							Terlaksananya reviu KUPA dan KUA PPAS													
							Terlaksananya reviu RKA Perubahan 2020 dan Reviu RKA Pokok 2021													
							Terlaksananya reviu PBJ, serapan anggaran dan serapan dana desa													
							Terlaksananya reviu DAK SKPD													
							Terlaksananya evaluasi SAKIP	Evaluasi kinerja dan keuangan	Terlaksananya evaluasi kinerja dan keuangan							6	01	02	2.01	04
							Terlaksananya evaluasi LAKIP													
							Terlaksananya evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive Gender													
							Terlaksananya coaching clinic LAKIP	Asistensi dan Pendampingan	Terlaksananya asistensi dan pendampingan	Asistensi dan pendampingan	Terselenggaranya asistensi dan pendampingan		Terwujudnya pelaksanaan asistensi dan pendampingan			6	01	03	2.02	02
							Terlaksananya pendampingan LHKN dan LHKASN													
							Terlaksananya pendampingan BPK													
							Terlaksananya inputing penyerapan anggaran, PBJ dan serapan dana desa													
4.02	01	20	15			Maturitas SPIP	Tingkat/Level Pemda Kabupaten Bulukumba terhadap maturasi SPIP dalam pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan	Asistensi dan Pendampingan	Tersedianya biaya pendampingan/evaluasi SPIP	Asistensi dan pendampingan	Tercapainya tingkat/Level Pemda Kabupaten Bulukumba terhadap maturasi SPIP, Terselenggaranya coaching clinic manajemen resiko, sosialisasi SPIP bagi Kepala Desa, Kepala Sekolah SD-SMP dan OPD se-Kabupaten Bulukumba	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi				6	01	03	2.02	02
									Terselenggaranya coaching clinic manajemen resiko											
									Terselenggaranya kegiatan sosialisasi SPIP bagi Kepala Desa se-Kabupaten Bulukumba											
									Terselenggaranya sosialisasi SPIP bagi Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Bulukumba											
									Terselenggaranya sosialisasi SPIP bagi OPD lingkup Pemda Bulukumba											
4.02	01	20	07			Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Persentase koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	Terlaksananya koordinasi pengawasan antara APIP/Tim Saber Pungli	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Terlaksananya Koordinasi pengawasan, Rapat-rapat/Sosialisasi/Rakor dan Pemantauan atas pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan nunda	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Terwujudnya perumusan kebijakan teknis terkait pengawasan dan fasilitasi pengawasan			6	01	03	2.01	01
						Sinergitas APIP dan APH			Terlaksananya koordinasi dan kerjasama APIP dan APH atas pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi											
									Terlaksananya rapat-rapat/sosialisasi Saber Pungli dan Tim Tindaklanjuti											

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
									Terlaksananya rapat-rapat APIP dan APH atas pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi											
									Terlaksananya pemantauan atas pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan pungli											
									Terlaksananya rakor Saber Pungli											
4.02	01	20	11			Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Evaluasi kinerja dan keuangan	Terlaksananya pendampingan penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan tercapainya indeks PMPRB	Penyelenggara an pengawasan internal	Terlaksananya pendampingan PMPRB dan , Survei Penilaian Integritas KPK, Koordinasi PMPRB, FCP dan MCP, Rapat PMPRB, FCP dan MCP, Pendampingan MCP serta Monitoring MCP	Program penyelenggaraan pengawasan	Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu			6	01	02	2.01	04
									Terlaksananya kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK											
									Terlaksananya koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)											
									Terlaksananya rapat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)											
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																				
4.05	08.01	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kepuasan Aparatur					Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	KEPEGAWAIAN	Urusan Pemerintahan UMUM	5	01	01		
4.05	08.01	01	01			Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat dinas dan penandatanganan SKTM	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Administrasi Umum	Terlaksananya dan tersedianya jasa Surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, alat listrik dan elektronik, tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, terlaksananya koordinasi dan konsultasi pemerintah propinsi dan pusat, tersedianya ATK kantor, Barang cetakan, bahan logistik kantor, makanan dan minuman, Tersedianya roda empat dan roda dua operasional, roda empat untuk mobil jabatan, Terlaksananya rehabilitasi kendaraan dinas/operasional, terpeliharanya mobil jabatan, kendaraan dinas operasional, peralatan gedung kantor, terpeliharanya gedung kantor, mebeleur kantor, rumah gedung kantor, tersedianya perlengkapan gedung kantor.	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	01
4.05	08.01	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telepon dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telepon dan listrik	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	02
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	03
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	06

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4.05	08.01	01	07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	07
4.05	08.01	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	08
4.05	08.01	01	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	12
4.05	08.01	01	15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	15
4.05	08.01	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pemerintah provinsi dan pusat	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pemerintah provinsi dan pusat	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	18
4.05	08.01	01	19			Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tersedianya kebutuhan cetakan, ATK dan makan minum tamu	Penyediaan Alat Tulis Kantor	iany peralatan kantor layak pakai,mebeleur kantor, terpeliharanya	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		KEPEGAWAIAN	Urusan Pemerintahan UMUM	5	03	01	2.03	10
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	11
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	16
								Penyediaan Bahan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Bahan Makanan Dan Minuman	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	17
4.05	08.01	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur			5	03	01	2.03	
4.05	08.01	02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua dan Roda Empat	Tersedianya Motor Operasional Jabatan dan Roda Empat Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya Roda Empat dan Roda Dua Operasional	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	20
								Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya Roda Empat (Mobil Jabatan)	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	19
								Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Rehabilitasi kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	40
4.05	08.01	02	09			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BKPSDM	Tersedianya Peralatan Kantor Layak Pakai	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BKPSDM	Tersedianya Peralatan Kantor Layak Pakai	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	24
4.05	08.01	02	10			Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	25
4.05	08.01	02	23			Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan Kepala BKPSDM	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan Kepala BKPSDM	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	29
4.05	08.01	02	24			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas Operasional Roda Empat dan Roda dua	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas Operasional Roda Empat dan Roda dua	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	30

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4.05	08.01	02	28			Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Jasa Service Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Jasa Service Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	34
4.05	08.01	02	22			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor BKPSDM	Terpeliharanya Gedung Kantor BKPSDM	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor BKPSDM	Terpeliharanya Gedung Kantor BKPSDM	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		KEPEGAWAIAN	Urusan Pemerintahan UMUM	5	03	01	2.03	28
4.05	08.01	02	29			Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebeleur BKPSDM	Terpeliharanya Mebeleur Kantor BKPSDM	Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur Kantor BKPSDM	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	35
4.05	08.01	02	42			Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	Terpenuhinya Gedung Kantor BKPSDM yang memadai dan layak pakai	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terpenuhinya Gedung Kantor BKPSDM yang memadai dan layak pakai	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	38
4.05	08.01	02	07			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Gedung BKPSDM	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Gedung BKPSDM	Administrasi Umum		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.03	22
4.05	08.01	03				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terealisasinya Peningkatan Disiplin Aparatur					Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur			5	03	01	2.03	
4.05	08.01	03	05			Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Terpenuhinya Mesin Absensi yang terkoneksi serta terintegrasi	Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Terpenuhinya Mesin Absensi yang terkoneksi serta terintegrasi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu Pegawai dan Mesin Absensi yang terkoneksi serta terintegrasi	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.04	01
4.05	08.01	05				Pengadaan Pakain Khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya pakain khusus hari-hari tertentu	Pengadaan Pakain Khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya pakain khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah				5	03	01	2.04	05
4.05	08.01	05				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Peningkatan Kapasitas SDM					Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kompetensi dan Kualitas ASN Sesuai dengan Jabatan dan pendidikan			5	03	02	2.03	01
4.05	08.01	05				Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Lurah/Kepala Desa	Terlaksananya Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kapasitas ASN	Terlaksananya dan Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Formal, Sosialisasi peraturan perundang-undangan, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Program Kepegawaian Daerah				5	04	02	2.02	3
4.05	08.01	05				Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah SD	Tersedianya Diklat Calon Kepala Sekolah SD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kapasitas ASN		Program Kepegawaian Daerah		KEPEGAWAIAN	Urusan Pemerintahan UMUM	5	04	02	2.02	
4.05	08.01	05				Sosialisasi Penilaian Kinerja	Terlaksananya Workshop Penyusunan SKP/penilaian kinerja	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kapasitas ASN		Program Kepegawaian Daerah				5	04	02	2.02	
4.05	08.01	05				Bimbingan/Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ASN	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS & Sosialisasi PP 11 tahun 2017 tentang ASN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kapasitas ASN		Program Kepegawaian Daerah				5	03	01	2.04	10
4.05	08.01	05				Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penatausahaan Aset Milik Daerah	Terlaksananya Diklat Penatausahaan Aset Milik Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kapasitas ASN		Program Kepegawaian Daerah				5	04	02	2.02	
4.05	08.01	06				Pelaksanaan Diklat Satu Pintu	Terlaksananya Diklat Satu Pintu	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kapasitas ASN		Program Kepegawaian Daerah				5	04	02	2.02	
4.05	08.01	06	01			Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Pengiriman Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kapasitas ASN		Program Kepegawaian Daerah				5	03	02	2.03	07
4.05	08.01	06	04			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Program Kepegawaian Daerah	Menguatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Perangkat daerah			5	03	01	2.01	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
.	.	.	.			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Tersusnya Lakip, Renstra dan Laporan Bulanan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan, perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah, penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah, penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah, evaluasi kinerja perangkat daerah.	Program Kepegawaian Daerah				5	03	01	2.01	02
.	.	.	.					Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Program Kepegawaian Daerah		KEPEGAWAIAN	Urusan Pemerintahan UMUM	5	03	01	2.01	03
.	.	.	.			Penyusunan Program Kerja SKPD	Penyusunan , Renja, RKA, dan DPA BKPSDM	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Program Kepegawaian Daerah				5	03	01	2.01	01
.	.	.	.					Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Program Kepegawaian Daerah				5	03	01	2.01	02
4.05	08.01	06	05					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Program Kepegawaian Daerah				5	03	01	2.01	04
.	.	.	.					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Program Kepegawaian Daerah				5	03	01	2.01	05
.	.	.	.					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, Administrasi pelaksanaan tugas ASN, bahan pelaksanaan verifikasi, tersusunnya akuntansi dan pelaporan keuangan, tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan bulanan/semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan keuangan akhir tahun	Program Kepegawaian Daerah				5	03	01	2.02	01
.	.	.	.					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan		Program Kepegawaian Daerah				5	03	01	2.02	02
.	.	.	.					Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Tersedianya bahan pelaksanaan Verifikasi	Administrasi Keuangan		Program Kepegawaian Daerah				5	03	01	2.02	03
.	.	.	.					Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Administrasi Keuangan		Program Kepegawaian Daerah		KEPEGAWAIAN	Urusan Pemerintahan UMUM	5	03	01	2.02	04
.	.	.	.					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Administrasi Keuangan		Program Kepegawaian Daerah				5	03	01	2.02	05
.	.	.	.					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Administrasi Keuangan		Program Kepegawaian Daerah				5	03	01	2.02	06
.	.	.	.					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran	Administrasi Keuangan		Program Kepegawaian Daerah				5	03	01	2.02	07
4.05	08.01	28						Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran	Administrasi Keuangan		Program Kepegawaian Daerah				5	03	01	2.02	08
4.05	08.01	28	03			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	Administrasi Keuangan		Program Kepegawaian Daerah				5	03	01	2.02	09
.	.	.	.			Program Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya Kegiatan pengembangan kompetensi Aparatur					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya manusia			5	04	02		

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
4.05	08.01	28	06			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kebutuhan Kediklatan	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Peningkatan Kompetensi	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Kompetensi dan Kualitas ASN Sesuai dengan Jabatan dan pendidikan			5	04	02	2.02	04	
								Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga	Terlaksananya kerjasama antar Lembaga	Pengembangan Kompetensi teknis	Terlaksananya kerjasama antar Lembaga, penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, dan Pengembangan Asesment Center, Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional, Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya manusia	KEPEGAWAIAN	Urusan Pemerintahan UMUM	5	04	02	2.02	05	
						Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Terlaksananya Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Aparatur Pemda	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pengembangan Kompetensi teknis		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kompetensi teknis			5	04	02	2.01	02	
4.05	08.01	29						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				5	04	02	2.01	03	
4.05	08.01	29	01					Pengembangan Asesment Center	Terlaksananya Pengembangan Asesment Center			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				5	03	02	2.03	03	
						Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		KEPEGAWAIAN	Urusan Pemerintahan UMUM						

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
						Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon ASN Daerah	Terlaksananya Diklat Prajabatan Golongan II, dan III	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Pengembangan Kompetensi teknis		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				5	04	02	2.02	01	
4.05	08.01	29	02					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pengembangan Kompetensi teknis		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				5	04	02	2.02	07	
								Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pengembangan Kompetensi teknis		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				5	04	02	2.02	08	
4.05	08.01	29				Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN Daerah	Terlaksananya Diklatpim Tk. II, III, dan IV	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Peningkatan Kapasitas ASN	Terkelolanya pendidikan lanjutan ASN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				5	03	02	2.03	07	
								Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pengembangan Kompetensi teknis	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, Terlaksananya Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional, Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional, Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		KEPEGAWAIAN	Urusan Pemerintahan UMUM	5	04	02	2.01	01	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
4.05	08.01	29	02					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terseleenggaranya Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pengembangan Kompetensi teknis		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				5	04	02	2.02	07	
						Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi ASN Daerah	Terlaksananya Diklat Fungsional	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Pengembangan Kompetensi teknis		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya manusia				5	04	02	2.02	06
4.05	08.01	30						Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Pengembangan Kompetensi teknis		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		KEPEGAWAIAN	Urusan Pemerintahan UMUM	5	04	02	2.02	01	
								Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terseleenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pengembangan Kompetensi teknis		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
4.05	08.01	30	02			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur sesuai dengan Kompetensi					Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kompetensi dan Kualitas ASN Sesuai dengan Jabatan dan pendidikan				5	03	02		
4.05	08.01	30	03			Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN	Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Terlaksananya Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Pengembangan Karir ASN	Terlaksananya pengembangan karir dan promosi ASN dan Penyusunan pedoman pola pengembangan karir ASN	Program Kepegawaian Daerah					5	03	02	2.04	01
								Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir ASN	Terlaksananya Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir ASN	Pengembangan Karir ASN		Program Kepegawaian Daerah					5	03	02	2.04	02
						Seleksi Penerimaan Calon ASN	Seleksi Penerimaan Calon ASN Formasi Khusus dan Seleksi Penerimaan Calon ASN Formasi umum	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN, penataan dan mutasi jabatan, penyelesaian penempatan, pengangkatan, mutasi dan kepegawaian, pengelolaan mutasi ASN, Pengangkatan dan perpindahan dalam jabatan struktural sesuai kompetensi	Program Kepegawaian Daerah					5	03	02	2.02	01
						Penempatan ASN	Sidang Baperjakat, terlaksananya seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka	Penataan dan Mutasi Jabatan	Terlaksananya Penataan dan Mutasi Jabatan	Administrasi Kepegawaian		Program Kepegawaian Daerah					5	03	02	2.02	02
								Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi dan Kepangkatan	Terlaksananya Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi dan Kepangkatan	Administrasi Kepegawaian		Program Kepegawaian Daerah		KEPEGAWAIAN	Urusan Pemerintahan UMUM	5	03	02	2.02	03	
4.05	08.01	30	04					Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Mutasi ASN	Administrasi Kepegawaian		Program Kepegawaian Daerah				5	03	02	2.02	07	
								Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN	Terlaksananya Pengangkatan dan perpindahan dalam jabatan Struktural sesuai kompetensi	Administrasi Kepegawaian		Program Kepegawaian Daerah				5	03	02	2.02	08	
								Pengembangan Assessment Centre	Terlaksananya Pengembangan Assessment Centre	Peningkatan Kapasitas ASN	Terlaksananya Pengembangan Assessment Centre	Program Kepegawaian Daerah				5	03	02	2.03	03	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
.	.	.	.					Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Terlaksananya Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Pengembangan Karir ASN	Terlaksananya Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Program Kepegawaian Daerah				5	03	02	2.04	01
4.05	08.01	30	05			Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis ASN	Pelaksanaan proses kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara	Pembuatan Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat	Terlaksananya Pembuatan Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat	Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pembuatan Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat dan pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Program Kepegawaian Daerah			Urusan Pemerintahan UMUM	5	03	02	2.04	01
4.05	08.01	30	08					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Administrasi Kepegawaian		Program Kepegawaian Daerah				5	03	02	2.02	10
4.05	08.01	30	09			Pembangunan/ Pengembangan Sistem Aplikasi Kepegawaian	Pengembangan aplikasi SAPK dan Pengembangan aplikasi Simpeg	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN, pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Program Kepegawaian Daerah				5	03	02	2.01	01
.	.	.	.					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Data dan Informasi ASN		Program Kepegawaian Daerah				5	03	02	2.01	03
.	.	.	.			Pemberian Penghargaan Bagi ASN Berprestasi	Terlaksananya koordinasi dan pemberian satya lencana bagi ASN	Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Terlaksananya Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Pembinaan ASN	Terlaksananya Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan, Pembinaan Disiplin ASN, Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan, Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Program Kepegawaian Daerah		KEPEGAWAIAN	Urusan Pemerintahan UMUM	5	03	02	2.05	03
4.05	08.01	30	11			Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Peningkatan disiplin aparat pemerintah Kabupaten, terlaksananya proses penanganan ijazah palsu	Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan ASN		Program Kepegawaian Daerah				5	03	02	2.05	01
4.05	08.01	30	12					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pembinaan ASN		Program Kepegawaian Daerah				5	03	02	2.05	02
.	.	.	.					Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Terlaksananya Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Pembinaan ASN		Program Kepegawaian Daerah				5	03	02	2.05	03
4.05	08.01	30	18			Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Iktan Dinas	tersedianya bantuan ASN tugas belajar, S1, S2 dan S3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pembinaan ASN		Program Kepegawaian Daerah				5	03	02	2.04	02
4.05	08.01	30	23			Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	terlaksananya seleksi penerimaan IPDN	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Program Kepegawaian Daerah				5	03	02	2.02	01
4.05	08.01	30	31			Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Penyusunan SK Tenaga Honorar DUK dan listing pegawai serta peremajaan data ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah				5	03	02	2.01	04
4.05	08.01	30	24			Pelayanan Administrasi Pensiun	terlaksananya pengurusan administrasi pensiun Pegawai Negeri Sipil	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Terlaksananya Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun dan Proses Pemberhentian Pegawai	Program Kepegawaian Daerah				5	03	02	2.02	04
.	.	.	.					Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai	Terlaksananya Proses Pemberhentian Pegawai			Program Kepegawaian Daerah								

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
.	.	.	.			Penyusunan Kebutuhan dan Formasi ASN	Terlaksananya Perumusan Kebutuhan ASN dan Pengimputan Bzetting ASN	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Peningkatan Kapasitas ASN	Terlaksananya Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN, Peningkatan Kapasitas ASN, Pengembangan Penilaian Kinerja ASN, Fasilitasi Profesi ASN, Fasilitasi Profesi ASN, Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (Korpri dan Lembaga Profesi ASN Lainnya), Fasilitasi Profesi ASN, Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (Korpri dan Lembaga Profesi ASN Lainnya), Fasilitasi Profesi ASN, Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (Korpri dan Lembaga Profesi ASN Lainnya), Fasilitasi Profesi ASN, Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (Korpri dan Lembaga Profesi ASN Lainnya), Fasilitasi Profesi ASN, Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (Korpri dan Lembaga Profesi ASN Lainnya).	Program Kepegawaian Daerah		KEPEGAWAIAN	Urusan Pemerintahan UMUM	5	03	02	2.03	05	
4.05	08.01	30	32			Penyusunan dan Penilaian Kinerja/Prestasi Kerja	Terlaksananya Penyusunan dan Penilaian Prestasi Kerja ASN	Peningkatan Kapasitas ASN	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas ASN	Peningkatan Kapasitas ASN		Program Kepegawaian Daerah					5	03	02	2.03	01
.	.	.	.					Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Terlaksananya Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas ASN		Program Kepegawaian Daerah					5	03	02	2.03	02
4.05	08.01	30				Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Aktifitas Seni dan Budaya Korps ASN	Terlaksananya Kordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Aktivitas seni dan budaya Korps ASN	Fasilitasi Profesi ASN	Terlaksananya Fasilitasi Profesi ASN	Peningkatan Kapasitas ASN		Program Kepegawaian Daerah					5	03	02	2.03	05
.	.	.	.					Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (Korpri dan Lembaga Profesi ASN Lainnya)	Terlaksananya Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas ASN		Program Kepegawaian Daerah					5	03	02	2.03	04
.	.	.	.			Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pekan Olahraga Korps ASN	terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Pekan Olahraga Korps ASN	Fasilitasi Profesi ASN	Terlaksananya Fasilitasi Profesi ASN	Peningkatan Kapasitas ASN		Program Kepegawaian Daerah					5	03	02	2.03	05
.	.	.	.					Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (Korpri dan Lembaga Profesi ASN Lainnya)	Tersedianya Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (Korpri dan Lembaga Profesi ASN Lainnya)	Peningkatan Kapasitas ASN		Program Kepegawaian Daerah					5	03	02	2.03	04
.	.	.	.			Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional serta hari-hari Besar lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan peringatan Hari Nasional serta Hari-Hari besar lainnya	Fasilitasi Profesi ASN	Terlaksananya Fasilitasi Profesi ASN	Peningkatan Kapasitas ASN		Program Kepegawaian Daerah					5	03	02	2.03	05
.	.	.	.					Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (Korpri dan Lembaga Profesi ASN Lainnya)	Tersedianya Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (Korpri dan Lembaga Profesi ASN Lainnya)	Peningkatan Kapasitas ASN		Program Kepegawaian Daerah					5	03	02	2.03	04
.	.	.	.			Koordinasi dan Fasilitasi pemberian bantuan pelayanan sosial bagi anggota Korps ASN	Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi pemberian bantuan pelayanan sosial bagi anggota Korps ASN	Fasilitasi Profesi ASN	Terlaksananya Fasilitasi Profesi ASN	Peningkatan Kapasitas ASN		Program Kepegawaian Daerah		KEPEGAWAIAN	Urusan Pemerintahan UMUM	5	03	02	2.03	05	
.	.	.	.					Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (Korpri dan Lembaga Profesi ASN Lainnya)	Tersedianya Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (Korpri dan Lembaga Profesi ASN Lainnya)	Peningkatan Kapasitas ASN		Program Kepegawaian Daerah					5	03	02	2.03	04
.	.	.	.			Koordinasi dan Fasilitasi bantuan Hukum/advokasi bagi anggota Korps ASN	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Bantuan Hukum/advokasi bagi anggota Korps ASN	Fasilitasi Profesi ASN	Terlaksananya Fasilitasi Profesi ASN	Peningkatan Kapasitas ASN		Program Kepegawaian Daerah					5	03	02	2.03	05
.	.	.	.					Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (Korpri dan Lembaga Profesi ASN Lainnya)	Tersedianya Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (Korpri dan Lembaga Profesi ASN Lainnya)	Peningkatan Kapasitas ASN		Program Kepegawaian Daerah					5	03	02	2.03	04

KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN			
DINAS PARIWISATA																		
3.02	01	06			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya data pelaporan yang update dan pelaporan capaian kinerja												
3.02	01	06	07		Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring, pelaporan, dan perencanaan program kegiatan SKPD, RKA-RKAP, DPA-DPPA, LAKIP, RENJA, SIRUP, e-planning, DAK, Musrenbang, LPPD, Laporan Rutin, Realisasi Fisik Keuangan	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen program & perencanaan serta pelaksanaan monitoring dan pelaporan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA		1	2,01	1
							Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi dan pelaporan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA		1	2,01	3
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima gaji dan Tunjangan	Administrasi Keuangan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA		1	2,02	1
					Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kualitas fungsi pelayanan administrasi umum												
					Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Administrasi Umum	Tersedianya jasa surat menyurat	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA		1	2,03	1
					Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jaringan telepon, listrik, dan air	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan telepon yang terbayar	Administrasi Umum	Tersedianya jaringan telepon, listrik, dan air	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA		1	2,03	2
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan alat dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA		1	2,03	3
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terjaminnya legalitas penggunaan kendaraan dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan	Administrasi Umum	Terjaminnya legalitas penggunaan kendaraan dinas	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA		1	2,03	6
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penerima honor pengadministrasi keuangan	Administrasi Umum	Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA		1	2,03	7
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpelihara kebersihan dan keindahan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan bahan pembersih	Administrasi Umum	Terpelihara kebersihan dan keindahan kantor	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA		1	2,03	8
					Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tertibnya administrasi sekretariat OPD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Administrasi Umum	Tersedianya alat tulis kantor	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA		1	2,03	10
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Administrasi Umum	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA		1	2,03	11
							Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum	Administrasi Umum	Tersedianya makan dan minum	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA		1	2,03	17
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Tersedianya komponen kelistrikan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diganti	Administrasi Umum	Tersedianya komponen kelistrikan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA		1	2,03	12
					Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga	Administrasi Umum	Tersedianya peralatan rumah tangga	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA		1	2,03	14
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran harian sebagai sumber informasi	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar berlangganan	Administrasi Umum	Tersedianya koran harian sebagai sumber informasi	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA		1	2,03	15

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
			Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi di dalam dan luar provinsi	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi	Administrasi Umum	Terlaksananya rapat koordinasi di dalam dan luar provinsi	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA			1	2,03	18	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur														
			Pembangunan gedung kantor	Tersedianya bangunan gedung kantor yang memadai	X								X	X	X	X	X	X
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil dan motor untuk operasional kepariwisataan	Administrasi Umum	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA			1	2,03	20	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang layak pakai	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan	Administrasi Umum	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang layak pakai	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA			1	2,03	22	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang layak pakai	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor	Administrasi Umum	Tersedianya peralatan gedung kantor yang layak pakai	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA			1	2,03	24	
			Pengadaan meubeleur	Tersedianya meubeleir kantor	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeluer yang dibutuhkan	Administrasi Umum	Tersedianya meubeleir kantor	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA			1	2,03	25	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jenis pemeliharaan gedung kantor	Administrasi Umum	Terpeliharanya gedung kantor	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA			1	2,03	28	
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Administrasi Umum	Terpeliharanya mobil jabatan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA			1	2,03	29	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang di service	Administrasi Umum	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA			1	2,03	30	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah alat kantor yang diperbaiki	Administrasi Umum	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA			1	2,03	34	
			Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir	Tersedianya rutin berkala meubeleir	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah meubeluer yang diperbaiki	Administrasi Umum	Tersedianya rutin berkala meubeleir	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA			1	2,03	35	
			Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur														
			Pengadaan absensi elektronik	Tersedianya absensi elektronik	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah absensi elektronik	Administrasi Umum	Tersedianya absensi elektronik	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA			1	2,04	1	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	Administrasi Umum	Tersedianya pakaian dinas	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA			1	2,04	2	
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian hari tertentu yang dibutuhkan	Administrasi Umum	Tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA			1	2,04	5	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM kepariwisataan														
			Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya diklat serta pelatihan kepariwisataan	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta latpim dan diklat kepariwisataan	Administrasi Umum	Terlaksananya diklat serta pelatihan kepariwisataan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan, administrasi keuangan, dan administrasi umum		KAB/KOTA			1	2,04	9	
3.02	01	16	Pilihan	Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata serta jumlah obyek wisata yang dikelola dan dikembangkan												

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
													3	26	2	2,01	03
			Pengembangan objek pariwisata unggulan	Meningkatnya jumlah obyek wisata yang dikelola, dan terciptanya keindahan dan kebersihan obyek wisata	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya kunjungan wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi pariwisata daerah serta TDUP	Pariwisata		3	26	2	2,01	03
			Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Berkembangnya paket wisata unggulan													
			Pengembangan daerah tujuan pariwisata	Berkembangnya daerah tujuan pariwisata secara terpadu dan terencana	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang dikembangkan	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan kawasan strategis yang terpadu dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi pariwisata daerah serta TDUP	Pariwisata	KAB/KOTA	3	26	2	2,02	03
			Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata serta sarana prasarana pariwisata yang aman dan nyaman	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata yang aman dan nyaman	Meningkatnya pengelolaan destinasi pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi pariwisata daerah serta TDUP	Pariwisata	KAB/KOTA	3	26	2	2,03	04
			Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Terlaksananya sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian usaha dan jasa pariwisata										X	X	X	X
					Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi TDUP yang diterbitkan	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya legalitas usaha pariwisata daerah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi pariwisata daerah serta TDUP	Pariwisata	KAB/KOTA	3	26	2	2,04	01
			Program pengembangan pemasaran pariwisata	Meningkatkan promosi dan pemasaran yang kreatif, inovatif, dan efektif untuk peningkatan jumlah wisatawan													
			Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Meningkatnya penggunaan teknologi dalam pemasaran pariwisata	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah media yang digunakan dalam pemasaran pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemasaran pariwisata via media	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya pemasaran pariwisata yang inovatif dan efektif	Pariwisata	KAB/KOTA	3	26	3	2,01	01
			Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri	Terlaksananya event pariwisata	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya event pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya pemasaran pariwisata yang inovatif dan efektif	Pariwisata	KAB/KOTA	3	26	3	2,01	02
			Pengembangan jaringan kerjasama pariwisata	Berkembangnya jaringan kerjasama pariwisata										X	X	X	X
					Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah prasarana kota kreatif	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya zona kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya SDM kepariwisataan dan legitimasi HAKI	Pariwisata	KAB/KOTA	3	26	4	2,01	01
			Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Tersedianya database kepariwisataan										X	X	X	X
			Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya pelatihan kompetensi kepariwisataan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya SDM kepariwisataan dan legitimasi HAKI	PARIWISATA	KAB/KOTA	3	26	5	2,01	01

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
						Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Meningkatnya pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kegiatan kreatifitas yang diselenggarakan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya kegiatan kreatifitas	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya SDM kepariwisataan dan legitimasi HAKI	Pariwisata	KAB/KOTA	3	26	5	2,01	02
						Pengembangan SDM di bidang pariwisata bekerja sama dengan lembaga lainnya	Meningkatnya SDM pariwisata bekerja sama dengan lembaga lain	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau siswa)	Jumlah peserta pelatihan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya jumlah peserta pelatihan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya SDM kepariwisataan dan legitimasi HAKI	Pariwisata	KAB/KOTA	3	26	5	2,01	03
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH																				
4.04	02			Badan Pengelola Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah	BELANJA LANGSUNG									Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5				
4.04	02	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2			
4.04	02	01	01			Penyediaan Jasa Komunikasi SDA & Listrik	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran tagihan Jasa rekening Air dan Listrik BPKD	Administrasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	2
4.04	02	01	06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran Pajak STNK Kendaraan Dinas/Operasional baik Roda Dua maupun Roda 4	Administrasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	6
4.04	02	01	07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran Honorarium Pengelola keuangan BUD, kuasa BUD, PA, PPK, PPTK & staf ASN serta Upah Bagi Jasa Pihak Ketiga	Administrasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2,03	07
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya daftar gaji bulanan, gaji terusan, daftar kekurangan gaji, dan TPP	Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2,02	01
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2,02	02
								Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Telaksananya verifikasi dan Meneliti Kwitansi berserta kelengkapannya	Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2,02	03
4.04	02	01	08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran jasa tenaga kebersihan kantor BPKD	Administrasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	8
4.04	02	01	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Intalasi Listrik BPKD	Administrasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	12
4.04	02	01	14			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Administrasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	14
4.04	02	01	15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Administrasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	15
4.04	02	01	18			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Administrasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	18
4.04	02	01	19			Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Persuratan baik surat yang masuk maupun surat keluar untuk 1 Tahun Anggaran	Administrasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	1

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
								Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) BPKD	Administrasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	10	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	11	
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Administrasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	17	
4.04	02	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
4.04	02	02				Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedia Mobil Jabatan	Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya Mobil Jabatan Eselon II	Administrasi Umum	Lancarnya Sarana dan Prasana Perkantoran BPKD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	19	
4.04	02	02	05			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedia Kendaraan Dinas Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua)	Administrasi Umum	Lancarnya Sarana dan Prasana Perkantoran BPKD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	20	
4.04	02	02	07			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedia Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor BPKD	Administrasi Umum	Lancarnya Sarana dan Prasana Perkantoran BPKD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	22	
4.04	02	02	09			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor BPKD	Administrasi Umum	Lancarnya Sarana dan Prasana Perkantoran BPKD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	24	
4.04	02	02	10			Pengadaan Meubelur	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubelur seperti Meja/Kursi kerja BPKD	Administrasi Umum	Lancarnya Sarana dan Prasana Perkantoran BPKD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	25	
4.04	02	02	22			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor BPKD	Administrasi Umum	Lancarnya Sarana dan Prasana Perkantoran BPKD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	28	
4.04	02	02	23			Pemeliharaan Rutin/ berkala mobil jabatan	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan Eselon II BPKD	Administrasi Umum	Lancarnya Sarana dan Prasana Perkantoran BPKD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	29	
4.04	02	02	24			Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional roda 4 (Empat) dan roda 2 (dua) BPKD	Administrasi Umum	Lancarnya Sarana dan Prasana Perkantoran BPKD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	30	
4.04	02	02	26			Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Lancarnya Sarana dan Prasana Perkantoran BPKD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	32	
4.04	02	02	28			Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor komputer PC, laptop, notebook, dan printer	Administrasi Umum	Lancarnya Sarana dan Prasana Perkantoran BPKD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	34	
4.04	02	02	44			Pembangunan Gedung kantor	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terfaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor BPKD	Administrasi Umum	Lancarnya Sarana dan Prasana Perkantoran BPKD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Perkantoran	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,03	38	
4.04	02	02				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
4.04	02	05	01			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kedisiplinan Aparat Lingkup BPKD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kedisiplinan dan Peningkatan kualitas SDM bagi ASN yang mengikuti DIKLAT Kepemimpinan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur Lingkup BPKD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,04	09	
4.04	02	05	02			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur bagi ASN yang mengikuti sosialisasi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur Lingkup BPKD	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,04	10	
4.04	02	05				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															

KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4.04	02	06			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKD	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKIP)	Administrasi Keuangan	Penyusunan sistem pelaporan realisasi keuangan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKD	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.02	06
4.04	02	06	01		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Tersedianya BKU, Buku Pajak, Fungsional, Administratif, dan Rincian Objek realisasi semesteran	Administrasi Keuangan	Penyusunan sistem pelaporan realisasi keuangan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKD	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.02	07
							Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Administrasi Keuangan	Penyusunan sistem pelaporan realisasi keuangan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKD	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.02	08
							Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Administrasi Keuangan	Penyusunan sistem pelaporan realisasi keuangan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKD	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	01	2.02	09
4.04	02	06	04		Penyusunan Program Kerja SKPD	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKD	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis 5 (lima) tahunan & Rencana Kerja	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan sistem perencanaan dan monitoring evaluasi pelaporan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKD	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	01	2.01	01
							Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersedianya dokumen RKA_RKAP,DPA & DPAP dan Penyusunan laporan Renja Triw I,II,III, & IV	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan sistem perencanaan dan monitoring evaluasi pelaporan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKD	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	01	2.01	02
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen dan Sinkronisasi RENSTRA, RPJM,RKPD,KUA-PPAS dan RENJA SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan sistem perencanaan dan monitoring evaluasi pelaporan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKD	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	01	2.01	04
4.04	02	06	05		Penatausahaan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKD			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan sistem perencanaan dan monitoring evaluasi pelaporan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKD	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
4.04	02	06	06		Monitoring Evaluasi Program Kegiatan SKPD	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKD	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah BPKD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan sistem perencanaan dan monitoring evaluasi pelaporan	Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKD	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2.01	3
4.04	02	06	07		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah														
4.04	02	17	01		Penyusunan Analisis Standar Belanja	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	tersedianya Peraturan Bupati tentang teknis atau pedoman penyusunan anggaran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	terlaksananya proses penyusunan rencana APBD setiap tahunnya	Program Pengelolaan Daerah	terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.01	07
							Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Tersedianya buku peraturan bupati tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan buku peraturan bupati tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2.04	8
4.04	02	17	02		Penyusunan Standar Satuan Harga	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Tersedianya Buku pedoman Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang untuk penyusunan RKA se Kab. Bulukumba	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	3	2.01	01
4.04	02	17	04		Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Tersedianya buku peraturan bupati tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan buku peraturan bupati tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2.04	8
4.04	02	17	06		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	tersedianya perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	terlaksananya proses penyusunan rencana APBD setiap tahunnya	Program Pengelolaan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.01	05
							Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	tersedianya data potensi pendapatan yang menjadi rujukan anggaran pendapatan dalam APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	pelaksanaan koordinas dengan unsur pengelola pendapatan lingkup pemkab bulukumba	Program Pengelolaan Daerah	terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.01	09
4.04	02	17	07		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	tersedianya perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	terlaksananya proses penyusunan rencana APBD setiap tahunnya	Program Pengelolaan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2.01	05

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
04.04	02	17	08			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	tersedianya perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	terlaksananya proses penyusunan rencana APBD setiap tahunnya	Program Pengelolaan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2,01	06	
04.04	02	17	09			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	tersedianya perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	terlaksananya proses penyusunan rencana APBD setiap tahunnya	Program Pengelolaan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2,01	06	
4.04	02	17	10			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terwujudnya rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi oleh Pemerintah provinsi	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan sistem dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,03	4	
4.04	02	17	11			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah														
.04	02	17	13			Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan sistem dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,03	10	
								Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	terwujudnya sosialisasi dan bimbingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan sistem dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,03	12	
.04	02	17	14			Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Meningkatnya SDM tentang penatausahaan laporan pengelolaan keuangan OPD	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya sosialisasi tentang penatausahaan laporan pengelolaan keuangan OPD	Program Pengelolaan Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,02	1	
.04	02	17	15			Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	dukungan pelaksanaan kegiatan perencanaan anggaran belanja daerah lingkup pemkab bulukumba	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	terlaksananya proses penyusunan rencana APBD setiap tahunnya	Program Pengelolaan Daerah	terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2,01	10	
.04	02	17	16			Sosialisasi/ Bimtek Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Penyusunan administrasi pertanggungjawaban SPJ penerimaan dan pengeluaran diseluruh OPD dan penyusunan bahan sosialisasi paket regulasi tentang pertanggungjawaban diseluru OPD	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersedianya administrasi pertanggungjawaban SPJ penerimaan dan pengeluaran diseluruh OPD dan peningkatan SDM para bendahara pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,02	9	
.04	02	17	20			Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	dukungan pelaksanaan kegiatan perencanaan anggaran belanja daerah lingkup pemkab bulukumba	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	terlaksananya proses penyusunan rencana APBD setiap tahunnya	Program Pengelolaan Daerah	terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2,01	10	
4.04	02	17	21			Penatausahaan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Terwujudnya penatausahaan akuntansi pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,03	7	
4.04	02	17	22			Penatausahaan Adm. Kas Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Terwujudnya prosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D pada OPD dan BANK Sul-Selbar	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya prosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D pada OPD dan BANK Sul-Selbar	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,02	4	
								Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersedianya dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penyusunan dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,02	6	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
								Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Terwujudnya prosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D pada OPD dan BANK Sul-Selbar	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya prosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D pada OPD dan BANK Sul-Selbar	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,02	4
								Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Terwujudnya dokumen rekapitulasi pelaksanaan piutang dan utang daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penyusunan dokumen rekapitulasi pelaksanaan piutang dan utang daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,02	7
								Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Terwujudnya Rekonsiliasi pemungutan dan penyetoran pajak pusat pada pemerintah daerah, KPPN dan KPP pratama	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi pemungutan dan penyetoran pajak pusat per bulan pada pemerintah daerah, KPPN dan KPP pratama	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,02	08
4.04	02	17	23			Penatausahaan Adm. Gaji PNS	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji PNS dan tunjangan profesi guru se Kabupaten Bulukumba	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penyusunan dokumen administrasi gaji PNS dan tunjangan profesi guru se Kabupaten Bulukumba	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,02	5
4.04	02	17	24			Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Penyusunan dan Reviu DPA SKPKD /Perubahan DPA SKPKD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran /Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD Kabupaten Bulukumba	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya penyusunan Anggaran /Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD Kabupaten Bulukumba	Pengelolaan Keuangan Daerah	terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,04	4
4.04	02	17	30			Penatausahaan Adm. Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru	Terlaksananya Tunjangan Profesi Guru Kab. Bulukumba	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Terlaksananya pengelolaan administrasi gaji PNS dan tunjangan profesi guru se Kabupaten Bulukumba	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penyusunan dokumen administrasi gaji PNS dan tunjangan profesi guru se Kabupaten Bulukumba	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,02	5
4.04	02	17	31			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan realisasi semester Kabupaten	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Terwujudnya pelaporan keuangan daerah Semester dan akhir tahun pada SKPD dan Pemerintah Daerah	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan sistem dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,03	5
4.04	02	17	32			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pem. Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Terwujudnya pelaporan keuangan daerah Semester dan akhir tahun pada SKPD dan Pemerintah Daerah	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan sistem dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,03	5
								Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan sistem dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,03	6
.04	02	17	34			Penatausahaan Adm. Pertanggung Jawaban SKPD bergabung	Terlaksananya Penatausahaan Pertanggungjawaban	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Penyusunan administrasi pertanggungjawaban SPJ penerimaan dan pengeluaran diseluruh OPD dan penyusunan bahan sosialisasi paket regulasi tentang pertanggungjawaban diseluruh OPD	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersedianya administrasi pertanggungjawaban SPJ penerimaan dan pengeluaran diseluruh OPD dan peningkatan SDM para bendahara pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Ddaerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,02	9
								Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD se Kab. Bulukumba	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersedianya Penerbitan Anggaran Kas dan SPD se Kab. Bulukumba sesuai kebutuhan	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,02	10

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
.04	02	17	35			Penatausahaan Administrasi Bantuan Daerah	Terlaksananya penatausahaan Bantuan hibah dan bansos pemerintah daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Tersedianya dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan yang terdiri dari belanja utang, pinjaman kepada pemerintah, belanja hibah, Bantuan sosial, bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintah desa, bantuan keuangan kepala desa, parpol, tidak terduga penyetaraan modal	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan yang terdiri dari belanja utang, pinjaman kepada pemerintah, belanja hibah, Bantuan sosial, bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintah desa, bantuan keuangan kepala desa, parpol, tidak terduga penyetaraan modal	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,01	11
								Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terwujudnya penatausahaan Anggaran Pembiayaan berupa bunga utang pinjaman kepada pemerintah dan penerusan pinjaman daerah serta penyertaan modal	Koordinasi dan Penyusunan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya penatausahaan Anggaran Pembiayaan berupa bunga utang pinjaman kepada pemerintah dan penerusan pinjaman daerah serta penyertaan modal	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,02	2
								Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah	Tersedianya anggaran pembayaran pokok utang	Kegiatan Penunjang urusan	Terlaksananya pembayaran pokok utang	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,04	1
								Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	Tersedianya regulasi dan anggaran pemberian subsidi	Kegiatan Penunjang urusan	Penyusunan regulasi dan anggaran pemberian subsidi	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,04	2
								Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Tersedianya alokasi Anggaran, belanja hibah, Bantuan sosial, bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintah desa, bantuan keuangan kepala desa, parpol, tidak terduga penyetaraan modal	Kegiatan Penunjang urusan	Penatausahaan alokasi Anggaran, belanja hibah, Bantuan sosial, bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintah desa, bantuan keuangan kepala desa, parpol, tidak terduga penyetaraan modal	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,04	3
4.04	02	17	38			Penatausahaan Akuntansi Penerimaan Daerah	Terwujudnya laporan realisasi penerimaan daerah	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial	terwujudnya penatausahaan akuntansi penerimaan daerah dan pengelolaan piutang daerah	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan sistem dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,03	11
4.04	02	17	39			Penatausahaan Akuntansi Pengeluaran Daerah	Tertibnya Penatausahaan penyerapan belanja daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terwujudnya rekonsiliasi pendapatan/penerimaan daerah oleh BUD dan non BUD	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan sistem dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,03	01
4.04	02	17	40			Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Penerimaan Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan Daerah di setiap SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terwujudnya penatausahaan akuntansi pengeluaran daerah	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan sistem dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,03	2
4.04	02	17	41			Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Pengeluaran Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Belanja Daerah	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	terwujudnya rekonsiliasi dan evaluasi pelaporan belanja/pengeluaran daerah oleh BUD dan non BUD	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan sistem dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,03	8
4.04	02	17	43			Pengelolaan dana transfer	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Khususnya Dana Transfer yang Tertip dan Tepat Waktu	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terwujudnya Pengelolaan daerah terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dan Coaching Clinic pengimputan data kontrak DAK fisik dan tersedianya data rekon transfer	Koordinasi dan Penyusunan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan daerah terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dan Coaching Clinic pengimputan data kontrak DAK fisik dan tersedianya data rekon transfer	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,02	3
4.04	02	17	45			Penyusunan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP 12 tahun 2019	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Tersedianya buku peraturan bupati tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan buku peraturan bupati tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	1	2,04	8
4.04	02	17	46			Evaluasi Laporan Penerimaan Non BUD	Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan Daerah di setiap SKPD	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terwujudnya rekonsiliasi pendapatan/penerimaan daerah oleh BUD dan non BUD	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan sistem dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,03	01

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4.04	02	17	47			Evaluasi Laporan Pengeluaran Non BUD	Terlaksananya Rekonsiliasi Non BUD (Dana BOS, BLUD dan JKN)	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	terwujudnya rekonsiliasi dan evaluasi pelaporan belanja/pengeluaran daerah oleh BUD dan non BUD	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan sistem dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,03	8
4.04	02	17	48			Pengelolaan Piutang Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pencatatan Piutang Lainnya	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terwujudnya Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Teknis Akuntansi Keuangan Daerah	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan sistem dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,03	9
								Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial	terwujudnya penatausahaan akuntansi penerimaan daerah dan pengelolaan piutang daerah	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan sistem dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,03	11
4.04	02	18				Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota														
4.04	02	18	02			Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	Meningkatnya kualitas penyusunan APBD dan Tertibnya Penganggaran dalam APBD	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	tersedianya perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	terlaksananya proses penyusunan rencana APBD setiap tahunnya	Program Pengelolaan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2,01	05
4.04	02	18	07			Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perhitungan APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas laporan pertanggungjawaban APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terwujudnya rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi oleh Pemerintah provinsi	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan sistem dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,03	4
4.04	02	18	08			Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	Meningkatnya kualitas dan tertibnya dalam penganggaran APBD Perubahan	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	tersedianya perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	terlaksananya proses penyusunan rencana APBD setiap tahunnya	Program Pengelolaan Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	02	02	2,01	06
4.04	02	18	13			Evaluasi Laporan Keuangan SKPD	Terwujudnya Evaluasi Laporan Keuangan SKPD	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Terwujudnya pelaporan keuangan daerah Semesteran dan akhir tahun pada SKPD dan Pemerintah Daerah	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Koordinasi dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan sistem dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	2	2,03	5
4.04	02	37				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah														
4.04	02	37	01			Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersedianya data aset Barang Milik Daerah yang tertib administrasi, fisik dan hukum serta SDM yang handal	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	3	2,01	5
								Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (Aprisal) yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	3	2,01	8
4.04	02	37	04			Pemanfaatan dan Penggunaan Aset Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya, pengawasan Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah se Kab. Bulukumba	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	3	2,01	9
4.04	02	37	05			Penyusunan Rencana Kebutuhan/ Pemeliharaan Barang	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya buku pedoman Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagai acuan untuk penyusunan anggaran	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	3	2,01	2
								Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Buku pedoman RKBMD untu TAPD pada pelaksanaan asistensi RKA dan DPA seKab. Bulukumba	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	3	2,01	3

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN						
								Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Tersedianya buku pedoman RKPBM Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah untuk TAPD pada pelaksanaan asistensi RKA/DPA se Kab. Bulukumba	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	3	2,01	4		
4.04	02	37	10			Pengelolaan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya kegiatan inventarisasi Barang Milik Daerah dan Barang Milik Desa melalui koordinasi OPD terkait dalam rangka Pembukuan Data Aset Tetap Kabupaten Bulukumba	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya kegiatan barang milik daerah melalui koordinasi OPD terkait dalam rangka pembukuan data aset tetap Kab. Bulukumba	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	3	2,01	6		
4.04	02	37	11			Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Terlaksananya Laporan Semesteran Aset Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dengan OPD terkait dalam rangka penyusunan BMD	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	3	2,01	11		
4.04	02	37	12			Penyusunan Laporan Akhir Tahun Barang Milik Daerah	Terlaksananya Laporan Akhir Tahun Aset Daerah	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Terlaksananya Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	3	2,01	12		
4.04	02	37	13			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Laporan Penyusutan Laporan Barang Milik Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Terlaksananya kegiatan pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah yang berupa SK pungenan BMD	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	3	2,01	7		
4.04	02	37	15			Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kab. Bulukumba	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersedianya data aset Barang Milik Daerah yang tertib administrasi, fisik dan hukum serta SDM yang handal	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	3	2,01	5		
4.04	02	37	18			Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penertiban Pemeliharaan BMD	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa SK Pemindahtanganan dan SK pinjam nakai	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	3	2,01	10		
4.04	02	37	19			Penyusunan dan Sosialisasi Paket Regulasi Pengelolaan BMD	Terbitnya Peraturan Bupati tentang Pengelolaan DMD dan terwujudnya Pemahaman mengenai pengelolaan BMD	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa sosialisasi BMD	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib administrasi, fisik dan hukum seta SDM yang handal	Keuangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	2	3	2,01	13		
DINAS KOPERASI, UMKM																						
11.01	04	01				Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			2	17	1				
11.01	04	01	01			Penyediaan jasa surat menyurat.	Jasa pelayanan surat menyurat ; dan jmaterai 6000 dan 3000	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa pelayanan surat menyurat dan materai 6000 dan 3000	Administrasi Umum	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Listrik, air, jasa pemeliharaan kend, jasa pelayanan adm keuangan, jasa kebersihan kantor, ATK, Makan Minum, Cetak & Penggandaan, Komponen Instalasi Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan bacaan, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, mebeleur serta pemeliharaan berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta pemeliharaan kend op.							2	17	1	2.03	
11.01	04	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum							2	17	1	2.03	2	
11.01	04	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Pemeliharaan & Perizinan kendaraan Dinas Operasional; 2 unit kend roda 4 dan 6 unit kend roda 2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Pemeliharaan & Perizinan kendaraan Dinas Operasional; 2 unit kend roda 4 dan 6 unit kend roda 2	Administrasi Umum							2	17	1	2.03	6	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
11.01	04	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Pelayanan Admistrasi keuangan; honor operator, arsipatoris, sopir	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Pelayanan Admistrasi keuangan; honor operator, arsipatoris, sopir	Administrasi Umum						2	17	1	2.03	7
11.01	04	01	08			penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan kantor	Administrasi Umum						2	17	1	2.03	8
11.01	04	01	21			Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Jasa Kesekretariatan Kantor; ATK, barang cetakan & penggandaan, makan minum tamu/rapat	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum						2	17	1	2.03	10
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan penggandaan	Administrasi Umum						2	17	1	2.03	11
								Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makan & Minum Rapat dan Tamu	Administrasi Umum						2	17	1	2.03	17
11.01	04	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Administrasi Umum						2	17	1	2.03	12
11.01	04	01	14			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Administrasi Umum						2	17	1	2.03	14
						penyediaan bahan bacaan dan aperaturan perundang undangan	Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	penyediaan bahan bacaan dan aperaturan perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Administrasi Umum						2	17	1	2.03	15
11.01	04	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Administrasi Umum						2	17	1	2.03	18
11.01	04	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.			Administrasi Umum	Tersedianya kend op, dan pemeliharannya, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor serta rehab gedung kantor		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.			2	17			
11.01	04	02	05			pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda Dua	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2	Administrasi Umum						2	17	1	2.03	23
11.01	04	02	07			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum										
11.01	04	02	09			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum										
11.01	04	02	10			Pengadaan Meubeler Kantor	Tersedianya mebeleur Kantor	Pengadaan Meubeler Kantor	Tersedianya mebeleur Kantor	Administrasi Umum										
11.01	04	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Administrasi Umum										
11.01	04	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya rutin/berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya rutin/berkala Mobil Jabatan	Administrasi Umum										
						Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Administrasi Umum										
11.01	04	02	26			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Administrasi Umum										
11.01	04	02	28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Administrasi Umum										
						Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor	Rehabilitasi sedaang/BeratGedung Kantor	Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor	Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor	Administrasi Umum										
11.01	04	06				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Meningkatnya kapasitas Sumber daya Aparatur						Meningkatnya kapasitas Sumber daya Aparatur							
2.11.2	01	06	02			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan, bimtek serta pengadaan mesin absensi elektronik kantor									
2.11.2	01	06	03			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya BinteK implemtasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya BinteK implemtasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur										
11.1	3					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur						Meningkatnya Disiplin Aparatur							
11.1	3	1				Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi (finger print)	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi (finger print)	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur										
11.01	04	06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Administrasi Keuangan	Tersedianya Lapaoran capaian kinerja, laporan keuangan dan gaji serta tunjangan ASN		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan											
11.01	04	06	01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Bulanan, Triwulan, Semesteran	Administrasi Keuangan											
11.01	04	06	02			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	Administrasi Keuangan											
11.01	04	06	04			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Administrasi Keuangan											
11.01	04	06	05			Penyusunan Program Kerja SKPD	Tersusunnya Program Kerja dan Monev OPD	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Program Kerja dan Monev OPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Penyusunan Renstra & Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
								Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
11.01	04	15				Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif.	Terwujudnya Iklim UMKM yang kondusif					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan dan Usaha Mikro (UMKM)	Terwujudnya UMKM Yang Tangguh dan Profesional				2	17	7		
11.01	04	15	06			Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan usaha kecil menengah	Tersedianya dokumen dan data sarana UMKM serta berkembangnya kelompok usaha masyarakat yang dibina	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersedianya dokumen dan data sarana UMKM serta berkembangnya kelompok usaha masyarakat yang dibina	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan Melalui Kemitraan, Kemudahan Perijinan.Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Para Pemangku Kelestarian	Tersedianya Data SIKP, Data Perkembangan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan dan Usaha Mikro (UMKM)	Terwujudnya UMKM Yang Tangguh dan Profesional				2	17	7	2.01	1
11.01	04	15	07			Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah (Kegiatan Yang Mendukung Program RPJMD, Penanggulangan Kemiskinan Daerah)	Terlaksananya Pembinaan dan Bantuan Hibah sarana dan Prasarana UMKM (Mesin Jahit,Alat Perbengkelan, Peralatan Pengantun, Peralatan Kerajinan Tangan, Alat Pertukangan)	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Pembinaan dan Bantuan Hibah sarana dan Prasarana UMKM (Mesin Jahit,Alat Perbengkelan, Peralatan Pengantun, Peralatan Kerajinan Tangan, Alat Pertukangan)	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan Melalui Kemitraan, Kemudahan Perijinan.Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Para Pemangku Kelestarian		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan dan Usaha Mikro (UMKM)	Terwujudnya UMKM Yang Tangguh dan Profesional				2	17	7	2.01	4
11.1	4	15	8			Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil menengah (Kegiatan yang mendukung program RPJMD, Penanggulangan kemiskinan Daerah)	Terlaksananya fasilitasi pengembangan unit usaha koperasi dan UMKM	Fasilitasi kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terlaksananya fasilitasi pengembangan unit usaha koperasi dan UMKM	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan Melalui Kemitraan, Kemudahan Perijinan.Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Para Pemangku Kelestarian		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan dan Usaha Mikro (UMKM)	Terwujudnya UMKM Yang Tangguh dan Profesional				2	17	7	2.01	3
11.01	04	16				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Berkembangnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM					Program Pengembangan UMKM	Berkembangnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM				2	17	8		
11.01	04		05			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Terjalinya Kerjasama Sarana Promosi Hasil Produksi	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi	Terjalinya Kerjasama Sarana Promosi Hasil Produksi	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam mengembangkan produksinya	Program Pengembangan UMKM	Berkembangnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM				2	17	8	2.01	1

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
11.01	04	16	03			Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM	Terlaksananya Kemitraan Antara Pemerintah Daerah, BUMN dan Pelaku Usaha UMKM		Terlaksananya Kemitraan Antara Pemerintah Daerah, BUMN dan Pelaku Usaha UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Program Pengembangan UMKM	Berkembangnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM								
2.01	04	17	06			Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemudahan, Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Terwujudnya UMKM Yang Tangguh dan Profesional				2	17	8	2.01	1
11.01	04	16	07			Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi / KUD	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelatihan serta diklat bagi pengelola koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya SDM Perkoperasian				2	17	8	2.01	1
11.01	04	17				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif bagi UMKM					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan dan Usaha Mikro (UMKM)	Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif bagi UMKM				2	17	7		
11.01	04	17	4			koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Pemantauan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Pemantauan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Pemberdayaann Usaha Mikro Yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemudahan, Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan dan Usaha Mikro (UMKM)	Terwujudnya UMKM Yang Tangguh dan Profesional				2	17	7	2.01	5
11.01	04	17	5			pemantauan pengolaan penggunaan data pemerintah bagi UKM	Terlaksananya koordinasi dan pemantauan Pengelolaan Penggunaan dana Pemerintah Bagi UMKM		Terlaksananya koordinasi dan pemantauan Pengelolaan Penggunaan dana Pemerintah Bagi UMKM			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan dan Usaha Mikro (UMKM)	Terwujudnya UMKM Yang Tangguh dan Profesional				2	17	7	2.01	5
2.01	04	17	9			penyelenggaraan promosi produk UMKM	Keikutsertaan Promosi Produk UMKM	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Keikutsertaan Promosi Produk UMKM			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan dan Usaha Mikro (UMKM)	Terwujudnya UMKM Yang Tangguh dan Profesional				2	17	7	2.01	2
11.01	04	18				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi				2	17	5		
11.01	04	18	1			Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Terlaksananya Koord.Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Koord.Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah penribtan izin usaha simpan pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi								

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
										Penerbitan Izin Pembukaan Kantor cabang , Cabang Pembantu dan Kantor kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah izin pembukaan kantor cabang dan cabang pembantu serta kantor kas	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi							
								Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor cabang , Cabang Pembantu dan Kantor kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Fasilitasi Izin Usaha Yang dilakukan	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor cabang , Cabang Pembantu dan Kantor kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi							
												Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya SDM Perkoperasian							
								Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya Koord.Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	Diklat, Sosialisasi dan Koordinasi Perkoperasian	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya SDM Perkoperasian			2	17	5	2.01	1
11.01	04	18	04			Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Terlaksananya Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	Terlaksananya Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	Terlaksananya Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya SDM Perkoperasian			2	17	5	2.01	1
												Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Kinerja dan akuntabilitas koperasi			2	17	4		
11.01	04	18	05			Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya Pembinaan,Pengawasan dan Penghargaan Koperasi	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian , Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan,Pengawasan dan Penghargaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/Kota	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi serta RAT Tepat Waktu dan Koperasi Sehat	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Kinerja dan akuntabilitas koperasi			2	17	3	2.01	1
								Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kab/Kota	RAT Koperasi Tepat Waktu dan Koperasi Sehat	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/Kota		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Kinerja dan akuntabilitas koperasi			2	17	3	2.01	2
												Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi							

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
										Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dan Produktivitas Koperasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi			2	17	7	6	2.01	
11.01	04	18	06			Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Terlaksananya pengembangan jaringan kerjasama koperasi dan terbangunnya pasar koperasi	Pemberdayaan Peningkatan produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Terlaksananya pengembangan jaringan kerjasama koperasi dan terbangunnya pasar koperasi	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah kabupaten/Kota		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi			2	17	7	6	1	
										Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah kabupaten/Kota		Program Penilaian Kesehatan Koperasi	Meningkatnya Koperasi Kategori Sehat			2	17	4			
										Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Kategori Sehat	Program Penilaian Kesehatan Koperasi	Meningkatnya Koperasi Kategori Sehat			2	17	4	2.01		
11.01	04	18	10			Pelaksanaan penilaian Kesehatan Koperasi	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	Pelaksanaan Penilaian KesehatanKSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota		Program Penilaian Kesehatan Koperasi	Meningkatnya Koperasi Kategori Sehat			2	17	4	2.01	1	
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN																					
				URUSAN PILIHAN	PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat			Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Urusan Umum Pemerintah Daerah	Perdagangan dan Perindustrian	Pilihan	3	30.31	01	2.03	01	
3.06	01	01	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat														
3.06	01	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa : Komunikasi, Air, Listrik dan TV Kabel	Administrasi Umum	Tersedianya Jasa Kimunikasi, Listrikl, Air, TV Kabel, Perizinan Kendaraan, Adminstrasi Keuangan, Kebrsihan Komponen Instalasi, Peralatan Ruah Tangga,Rapat-rapat Kordinasi dan KonsultasiRapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Logistik KantorMakanan dan Minuman						3	30.31	01	2.03	02
3.06	01	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan								3	30.31	01	2.03	06
3.06	01	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Pelaksana Adminidtrasi Keuangan								3	30.31	01	2.03	07
3.06	01	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Petugas Kebersihan Kantor								3	30.31	01	2.03	08
3.06	01	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi	Kompenen Instalasi								3	30.31	01	2.03	12
3.06	01	01	14			Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga								3	30.31	01	2.03	14
3.06	01	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi								3	30.31	01	2.03	18
3.06	01	01	19			Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Alat Tulis Kangtor , Jasa :Pihak Ke 3, Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor								3	30.31	01	2.03	10

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
								Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Barang Cetak dan Pengandaan												
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor							3	30.31	01	2.03	11	
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman							3	30.31	01	2.03	16	
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur														
3.06	01	02	05			Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas		Pengadaan Kendaraan Dinas, Peralatan dan Perlengkapan dan Listrik, Peralatan, Mebeleur, Pemeliharaan Gedung Kantor ,Mobil Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional Peralatan Gedung, Perlengkapan Gedung Kantor Kantor, Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi bagi ASN,,Renstra dan Renja Perangkat Daerah,Dokumen Perencanaan, dan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah					3	30.31	01	2.03	17	
3.06	01	02	07			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan, Perlengkapan dan Listrik							3	30.31	01	2.03	20	
3.06	01	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor							3	30.31	01	2.03	13	
3.06	01	02	10			Pengadaan mebeleur	Mebeleur	Pengadaan Mebeleur	Mebeleur							3	30.31	01	2.03	25	
3.06	01	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor							3	30.31	01	2.03	28	
3.06	01	02				Pemeliharaan Rutin / berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan Mobil Jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan Mobil Jabatan							3	30.31	01	2.03	30	
3.06	01	02				Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional							3	30.31	01	2.03	32	
3.06	01	02				Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor							3	30.31	01	2.03	33	
3.06	01	02	28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor												
3.06	01	02				Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Gedung Kantor							3	30.31	01	2.03	38	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
3.06	01	05	01			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Formal	ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya						3	30.31	01	2.04	09	
3.06	01	05	012			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN Mengikuti Sosialisasi	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	ASN Mengikuti Sosialisasi							3	30.31	01	2.04	10	
						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya Lapotran Capaian Kineja dan Keunagan														
3.06	01	05	01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	Administrasi Keuangan	Gaji dan Tunjangan,Lapoiran Keuangan, Capaian Kinerja,Progonisiasi Akhirt Tahun					3	30.31	01	2.01	2.01	
								Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pelapoiran Keuangan												
								Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja												
								Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan Keuangan												
								Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Progonisiasi Realisasi Anggaran												
								Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Akhir Tahun												
3.06	01	05	01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Renstra dan Renja Perangkat Daerah							3	30.31	01	2.01	2.01	
3.06	01	05	01			Penyusunan program kerja SKPD	Program kerja SKPD	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3	30.31	01	2.01	02	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
								Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan												
								Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah								3	30.31	01	2.01	03
					BIDANG PERDAGANGAN	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan														
3.06	01	15	03			Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Pengawasan peredaran barang dan jasa	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pemeriksaan Dokumen Perizinan	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				3	30	04	2.03	01
								Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi								3	30	04	2.03	02
								Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi								3	30	04	2.03	03
								Pemeriksaan Penyimpanan Barang Berbahaya	Pemeriksaan Penyimpanan Barang Berbahaya	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya										
								Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Fasilitasi Pemeriksaan Distribusi bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2												
								Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap												
3.06	01	15	04			Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgion daerah	Kemetrolgion daerah	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan , Tera, Tera Ulang, Pengawasan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				3	30	06	2.01	01
								Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan Metrologi Legal								3	30	06	2.01	02
								Penyidikan Metrologi Legal	Penyidikan Metrologi Legal								3	30	06	2.01	03
						Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Efisiensi perdagangan dalam negeri														
3.06	01	15	03			Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Distribusi barang/produk	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan, Pengendalian Sarana Distribusi Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				3	30	03	2.01	01
								Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan								3	30	03	2.02	01
								Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pengendalian Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan,						3	30	03	2.02	01
								Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Sarana Distribusi Perdagangan								3	30	03	2.02	02
3.06	01	15	03			Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jaringan informasi perdagangan	Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Nasional, Lokal dan Jaringan, Distribusi Perdagangan,	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PENGEMBANGAN EKSPOR				3	30	05	2.01	02

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
								Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal							3	30	05	2.01	03
								Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jaringan Informasi Perdagangan	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			3	30	07	2.01	03
						Program pembangunan infrastruktur perdesaan														
3.06	01	15	03			Pembangunan pasar perdesaan	Pasar	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			3	30	03	2.01	01
3.06	01	15	03			Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaan	Pasar	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan							3	30	03	2.01	02
								Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerianva	Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat					3	30	03	2.02	01
								Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								3	30	03	2.02	01
						BIDANG PERINDUSTRIAN	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi												
3.06	01	15	05			Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Sstem inovasi teknologi industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Sumber Daya Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Sumber Daya Industri , Sarana dan Prasarana Industri , Peran Serta masyarakat	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PEMBANGUNAN INDUSTRI			3	30	02	2.03	01
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Sarana dan Prasarana Industri							3	30	02	2.04	01
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Peran Serta Masyarakat											
3.06	01	15	06			Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Kemampuan industri berbasis teknologi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kab/Kota dalam memenuhi ketentuan Perizinan	Memenuhi Ketentuan Prizinan	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	IZIN USAHA INDUSTRI			3	30	02	2.06	01
								Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Pengamanan dan Penyelamatan Industri											
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Informasi Industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			3	30	02	2.06	03
								Disiminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Data Informasi Industri											
						Program pengembangan industri kecil dan menengah														
3.06	01	16	01			Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Pemanfaatan sumber daya Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Sumber Daya Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PEMBANGUNAN INDUSTRI			3	30	02	2.03	01
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Sarana dan Prasarana Industri							3	30	02	2.03	02
3.06	01	16	02			Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Jaringan kluster induster	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Penyusunan Rencana Pembangunan							3	30	02	2.01	01

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN						
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri							3	30	02	2.02	01		
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			3	30	02	2.06	03		
						Program peningkatan kemampuan teknologi industri																
3.06	01	17	01			Pembinaan kemampuan teknologi industri	Kemampuan teknologi industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PEMBANGUNAN INDUSTRI			3	30	02	2.02	01		
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri							3	30	02	2.03	01		
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Sarana dan Prasarana Industri							3	30	02	2.03	02		
						Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Sentra-sentra industri potensial															
3.06	01	19	02			Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			3	30	02	2.06	03		
								Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Publikasi Data Informasi Industri							3	30	02	2.07	01		
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN																						
2.05	01	01				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah							01		
2.05	01	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Administrasi Umum										01	2.03	
2.05	01	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Jasa pelayanan surat menyurat dan materai 6000 dan 3000		Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Materai 6000 dan 3000									01	2.03	01
2.05	01	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									01	2.03	02
2.05	01	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									01	2.03	03
2.05	01	01	14			penyediaan peralatan rumah tangga		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya Kondisi Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional									01	2.03	03
2.05	01	01	15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya Jasa Pelayanan Administrasi keuangan; honor operator, arsipatoris, sopir		Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi keuangan; honor operator, arsipatoris, sopir									01	2.03	07
2.05	01	01	18			rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor									01	2.03	08
2.05	01	01	19			penatausahaan kesekretariatan SKPD		Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja		Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja									01	2.03	09
								Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor									01	2.03	10
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan									01	2.03	11
								Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									01	2.03	12

KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN			
2.05	01	02			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						01	2.03	13
2.05	01	02	07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga						01	2.03	14
2.05	01	02	09		Pengadaan peralatan gedung kantor		penyediaan bahan bacaan dan aperaturan perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						01	2.03	15
2.05	01	02	22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makan & Minum Rapat dan Tamu		Tersedianya Makan & Minum Rapat dan Tamu						01	2.03	17
2.05	01	02	24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah						01	2.03	18
2.05	01	02	28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya Mobil Jabatan		Tersedianya Mobil Jabatan						01	2.03	19
.							Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional		Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional						01	2.03	20
.							Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor						01	2.03	22
.							Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur		Tersedianya Mebeleur						01	2.03	25
2.05	01	05			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Terpeliharanya Gedung Kantor		Terpeliharanya Gedung Kantor						01	2.03	28
2.05	01	05	01		Pendidikan dan pelatihan formal		Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional		Terpeliharanya Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional						01	2.03	30
.							Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor	Terselenggaranya Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor		Terselenggaranya Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor						01	2.03	38
.									Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur							01	2.04	
.							Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal						01	2.04	09
2.05	01	06			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan						01	2.04	10
2.05	01	06	05		Penyusunan program kerja SKPD		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya BinteK implemtasi Peraturan Perundang-undangan		Terlaksananya BinteK implemtasi Peraturan Perundang-undangan						01	2.04	11
.									Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah							01	2.01	
.							Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Tersusunnya program kerja dan monev OPD								01	2.01	02
.							Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah	Dokumen renstra dan renja								01	2.01	01
.							penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	Dokumen SAKIP								01	2.01	03
.									Administrasi Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja laporan keuangan dan gaji serta tunjangan ASN						01	2.02	
.							Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan Asn								01	2.02	01
.							Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kerja bulanan triwulan dan semester								01	2.02	06
.							Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran								01	2.02	07
.							Penyusunan laporan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun								01	2.02	09
2.05	01	15			PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah dana dan tenaga kerja			2	11	11	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
2.05	01	15	02			Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Lahan Untuk TPA,tersedianya 1 unit incenerator, tersedianya sarpras TPST, tersedianya mobil pengangkut sampah 3 buah,pembangunan bank sampah, pembangunan 1 unit pendauran ulang sampah rumah tangga, pengadaan motor sampah roda tiga 5 buah, pembangunan TPST			Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Sampah						2	11	11	2.01	
2.05	01	15	04			Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Rehab Tanggul Landfill, Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan,Prasarana Operasional Persampahan	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota								2	11	11	2.01	03
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kab.Bulukumba								2	11	11	2.01	05
								Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Tersusunnya kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan di Kab.Bulukumba								2	11	11	2.01	06
2.05	01	16				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Prioritas)						PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Layanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup				2	11	03		
2.05	01	16	01			Kegiatan koordinasi penilaian kota sehat/Adipura	Terlaksananya koordinasi persiapan penilaian Adipura dan terwujudnya pengelolaan sampah dan terciptanya kebersihan kota			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50 sampel, 2 kali, 10 alat						2	11	03	2.01	
2.05	01	16	03			Pemantauan Kualitas Lingkungan	Tersedianya data Indeks Kualitas Udara (IKU),IKA,ITHL Indeks Tutupan Hutan dan Lahan, Indeks kualitas air laut	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Terlaksananya pengujian limbah air dan udara di laboratorium, Terlaksananya IHT Bagi Personil Laboratorium,tersedianya Bahan Kimia,Terpeliharanya Laboratorium								2	11	03	2.01	01
2.05	01	16	04			Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Tersedianya Data Hasil Inventarisasi Usaha/ Kegiatan yang Belum dan yang Memiliki Dokumen LH , Pembuatan Aplikasi Pelayanan Pengawasan, Terbentuknya Tim Temadu Pengawasan Usaha	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah lokasi pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,Peningkatan jumlah lokasi proklam								2	11	03	2.01	02
2.05	01	16	06			Kegiatan Pengelolaan B3 dan LB3	Terselenggaranya sosialisasi peraturan pengelolaan B3 dan Limbah B3, terlaksananya pembinaan dan pengawasan serta terwujudnya peningkatan wawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						2	11	03	2.02	
2.05	01	16	12			Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pemberian informasi di tingkat Kabupaten								2	11	03	2.02	01
								Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian kerusakan di 10 Kecamatan								2	11	03	2.02	02
										Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terehabilitasinya kawasan mangrove di 2 Kecamatan						2	11	03	2.03	
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terehabilitasinya kawasan mangrove sebanyak 20000 batang								2	11	03	2.03	04

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
												PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya tingkat Ketaatan bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH			2	11	06			
										Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH bagi pemrakarsa di Kabupaten Bulukumba					2	11	06	2.01		
								Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan izin PPLH							2	11	06	2.01	01	
								Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas lingkungan hidup	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat pengawas lingkungan hidup melalui pendidikan dan pelatihan bagi pejabat PPLH							2	11	06	2.01	02	
								Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya ketaatan bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba							2	11	06	2.01	03	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan instansi terkait							2	11	06	2.01	04	
2.05	01	16				PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN						PROGRAM KONSERVASI SDA HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Terkontribusinya pemanfaatan dan pelestarian SDA pada sejumlah wisata dan jasa lingkungan			3	28	04			
2.05	01	16	06			Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan & Lahan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, Pembibitan, penghijauan lingkungan dan pemeliharaan tanaman			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Termanfaatkannya potensi wisata dan jasa lingkungan yang optimal						3	28	04	2.01	
2.05	01	17				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN		Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Terlaksananya patroli bersama masyarakat mitra polhut secara berkala							3	28	04	2.01	01	
									Tersedianya papan informasi dan bahan penulisan kegiatan												
2.05	01	17	01			Kegiatan Pencegahan & Pengendalian Kebakaran Hutan & Lahan	Terselenggaranya Keg. Sosialisasi dan Pembinaan Masyarakat sekitar Tahura Tentang Pengamanan Hutan, tersedianya tenaga pengamanan Kawasan hutan	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Terbangunnya pintu gerbang dan pos jaga							3	28	04	2.01	02	
									Terbentuknya penandaan batas batas blok, rekonstruksi batas dan pemeliharaan batas Tahura												
2.05	01	17	07			Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	Tersusunnya Desain tapak pada kawasan TAHURA	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota	Teridentifikasi Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota							3	28	04	2.01	03	
								Pengawetan Koridor Hidupan Liar								3	28	04	2.01	04	
								Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Tersedianya database dan Terehabilitasinya ekosistem Tahura							3	28	04	2.01	05	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
								Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Teratanya obyek dan dan terpeliharanya sarana dan prasarana wisata							3	28	04	2.01	06	
								Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Terbinanya pelaku jasa wisata dan terbentuknya forum kolaboratif (Pokja) pengelola Tahura							3	28	04	2.01	07	
									Terfasilitasinya penyusunan dokumen pengelolaan Tahura ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah												
								Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Terbangun serta terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan Tahura							3	28	04	2.01	08	
									Terlaksananya Sosialisasi , workshop dan penyuluhan pengembangan masyarakat Tahura												
									Terlaksananya Studi banding ke Lokasi Tahura model												
								Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota	Tersusunnya rencana induk pemberdayaan masyarakat Desa dan terlaksananya pelatihan peningkatan peran serta masyarakat desa di kawasan Konservasi							3	28	04	2.01	09	
2.05	01	17				PROGRAM PERLINDUNGAN & KONSERVASI SDA						PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Terlaksananya pengendalian B3 dan Limbah B3 bagi pelaku usaha/kegiatan dan fasyankes melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik			2	11	05			
2.05	01	17	05			Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Tercapainya kampung iklim dan peningkatan pemahaman terhadap dampak perubahan iklim			Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya penyimpanan sementara Limbah B3 bagi pelaku usaha /kegiatan dan fasyankes					2	11	05	2.01		
2.05	01	17	06			Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	inventarisasi data potensi kerusakan lingkungan dan pemantauan kerusakan lingkungan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya perizinan TPS Limbah B3 bagi pelaku usaha/kegiatan dan fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem OSS							2	11	05	2.01	01	
								Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya verifikasi lapangan untuk pemenuhan persyaratan Administrasi dan teknis TPS Limbah B3 melalui identifikasi jenis dan karakteristik Limbah B3							2	11	05	2.01	02	
										Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya tempat penyimpangan sementara bagi pengumpul limbah B3					2	11	05	2.02		
								Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya dan terpenuhinya TPS pengumpul limbah B3 melalui layanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik							2	11	05	2.02	01	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 antara Pemerintah Pusat,Provinsi dan Daerah							2	11	05	2.02	02	
												PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	% Penanganan pengaduan			2	11	10			

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN			
										Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	25 aduan (10 Kecamatan)					2	11	10	2.01
								Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang dikelola							2	11	10	2.01 02
2.05	01	19				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP						PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terlaksananya Pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal dan hak MHA terkait PPLH			2	11	07	
2.05	01	19	01			Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata Terlaksananya Bimtek Adiwiyata Terlaksananya peningkatan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat, Saka Kalpataru			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA Ammatoa Kajang					2	11	07	2.02
2.05	01	19	02			Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya dokumen SLHD dan SILHD	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan							2	11	07	2.02 01
												PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhanLH untuk Masyarakat			2	11	08	
										Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kab. Bulukumba					2	11	08	2.01
								Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan							2	11	08	2.01 01
								Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah							2	11	08	2.01 02
												PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kab. Bulukumba			2	11	09	
										Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kab. Bulukumba					2	11	09	2.01

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
								Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam PPLH di Kabupaten bulukumba							2	11	09	2.01	01
												PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya perencanaan lingkungan hidup			2	11	02		
										Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kab/Kota					2	11	02	2.01	
								Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan ketersediaan sumber daya alam serta kerusakan yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam							2	11	02	2.01	01
2.05	01	20				PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI						PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				2	11	04		
2.05	01	20	03			Pengujian kadar polusi Limbah padat dan Limbah Cair	Terlaksananya IHT Bagi Personil Laboratorium,tersedianya Bahan Kimia, Terpeliharanya Laboratorium			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						2	11	04	2.01	
2.05	01	24				PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tersusunnya design RTH dan taman serta ditetapkannya SK taman							2	11	04	2.01	01
2.05	01	24	05			Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau	Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah, terbangunnya RTH Kota Dan Kecamatan ,Terehabilitasinya taman sedang dan taman besar kota, tersedianya mobil pemangkas pohon , tersedianya SK Bupati Tentang Penetapan RTH	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Tertatanya taman yang indah,nyaman dan teduh di Kota Kabupaten dan Kecamatan							2	11	04	2.01	02
2.05	01	24	06			Kegiatan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Terpeliharanya seluruh taman kota di beberapa kec,secara optimal tersedianya petugas taman kota sebanyak 49, terehabilitasinya Tanaman Turus Jalan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tertatanya ruang terbuka hijau dalam kota, terwujudnya pengadaan pohon dan terwujudnya pemangkasan dan peremajaan turus jalan							2	11	04	2.01	04
								Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tersedianya tenaga pengawas taman RTH,tenaga petugas taman RTH,satgas dan operasional petugas taman RTH yang profesional dan bertanggungjawab							2	11	04	2.01	06
								Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Terpeliharanya dan terbangunnya sapras taman RTH serta tersedianya jenis bunga dan pohon untuk taman dan turus jalan di Kab.Bulukumba							2	11	04	2.01	07

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG																					
11.01	04	01				Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah								
11.01	04	01	01			Penyediaan jasa surat menyurat.	Jasa pelayanan surat menyurat dan materai 6000 dan 3000	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa pelayanan surat menyurat dan materai 6000 dan 3000	Administrasi Umum	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Listrik, jasa pemeliharaan kend, jasa pelayanan adm keuangan, jasa kebersihan kantor, ATK, Makan Minum, Cetak & Penggandaan, Komponen Instalasi Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan bacaan, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, mebeleur serta pemeliharaan berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta pemeliharaan kend op.								01	2.03	01
11.01	04	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik												
11.01	04	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Pemeliharaan & Perizinan kendaraan Dinas Operasional; 2 unit kend roda 4 dan 6 unit kend roda 2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Pemeliharaan & Perizinan kendaraan Dinas Operasional; 2 unit kend roda 4 dan 6 unit kend roda 2												
11.01	04	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Pelayanan Admistrasi keuangan; honor operator, arsipatoris, sopir	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Pelayanan Admistrasi keuangan; honor operator, arsipatoris, sopir												
11.01	04	01	08			penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan kantor												
11.01	04	01	21			Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Jasa Kesekretariatan Kantor, ATK, barang cetakan & penggandaan, makan minum tamu/rapat	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor												
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan												
								Penyediaan Makanan Dan Minuman	Makan & Minum Rapat dan Tamu												
11.01	04	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor												
11.01	04	01	14			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga												
						penyediaan bahan bacaan dan aperatur perundang undangan	Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	penyediaan bahan bacaan dan aperatur perundang undangan	Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan												
11.01	04	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah												
11.01	04	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.													Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.	
11.01	04	02	05			pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda Dua	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2												
11.01	04	02	07			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor												
11.01	04	02	09			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor												
11.01	04	02	10			Pengadaan Meubeler Kantor	Tersedianya mebeleur Kantor	Pengadaan Meubeler Kantor	Tersedianya mebeleur Kantor												
11.01	04	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor												
11.01	04	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya rutin/berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya rutin/berkala Mobil Jabatan												
						Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional												
11.01	04	02	26			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor												
11.01	04	02	28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor												
						Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor	Rehabilitasi sedaang/BeratGedung Kantor	Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor	Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor												

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN			
11.01	04	06				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Meningkatnya kapasitas Sumber daya Aparatur						Meningkatnya kapasitas Sumber daya Aparatur						
2.11.2	01	06	02			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan, bimtek serta pengadaan mesin absensi elektronik kantor								
2.11.2	01	06	03			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya Bimtek implemtasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya Bimtek implemtasi Peraturan Perundang-undangan										
11.1	3					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur												
11.1	3	1				Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi (finger print)	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi (finger print)				Meningkatnya Disiplin Aparatur						
11.01	04	06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
										Administrasi Keuangan	Tersedianya Lapaoran capaian kinerja, laporan keuangan dan gaji serta tunjangan ASN								
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN										
11.01	04	06	01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Bulanan, Triwulan, Semesteran										
11.01	04	06	02			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran										
11.01	04	06	04			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun										
11.01	04	06	05			Penyusunan Program Kerja SKPD	Tersusunnya Program Kerja dan Movev OPD	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Program Kerja dan Movev OPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
								Penyusunan Renstra & Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja										
								Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP										
															Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1			
														Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang	1	03			
1.03	15					Program Pembangunan Jalan Jembatan	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap					Program penyelenggaraan jalan	Prosentase panjang Jalan dalam kondisi Baik			1	03	10	
										Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen yang dihasilkan dan panjang jalan serta unit jembatan kabupaten yang tertangani					1	03	10	2.01
1.03	15	01				Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan							1	03	10	2.01
1.03	15	03				Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Terbangun	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang terbangun							1	03	10	2.01
1.03	15	05				Pembangunan Jembatan	Jumlah unit Jembatan yang terbangunan	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang terbangun							1	03	10	2.01
1.03	15	09				Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Pelebaran Jalan Menuiu Standar	Panjang jalan yang dilebarkan							1	03	10	2.01
								Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang jalan yang bertajur							1	03	10	2.01
								Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi							1	03	10	2.01
1.03	20					Program Inspeksi Jalan dan Jembatan													
1.03	20	01				Inspeksi Kondisi Jalan	Jumlah dokumen leger jalan kabupaten	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger jalan							1	03	10	2.01

KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
1.03	22				Program Sistem Informasi Manajemen Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Dokumen Update Kondisi data base jalan													
1.03	22	04			Up date kondisi jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Update Kondisi data base jalan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Updater dan Data base jalan jembatan							1	03	10	2.01	04
1.03	18				Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pemeliharaan jalan dan Jembatan									1	03	10		
1.03	18	03			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang terpelihara	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara							1	03	10	2.01	09
1.03	23				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina Margaan														
1.03	23	04			Pengadaan alat-alat berat	Terbelinya alat berat	Rehabilitasi Jalan	Jumlah peralatan rehabilitasi jalan							1	03	10	2.01	09
1.03	23	10			Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terlaksananya pemeliharaan alat berat													
1.03	23	11			Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat.	Meningkatnya kondisi alat-alat berat													
1.03	18	07			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU terbangun dan terpelihara	Rehabilitasi Jalan	Jumlah titik PJU yang ditangani							2	15	02	2.02	09
1.03	17				Program Pembangunan Talud/Turap/Bronjong	Terbangunnya pengaman jalan					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang jalan dalam kondisi mantap							
1.03	17	03			Pembangunan talud/drainase /brongjong	Panjang talud/drainase yang terbangun	Pembangunan sistem drainase Perkotaan dan lingkungan	Panjang talud/drainase yang terbangun	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pembangunan talud/drainase jalan kabupaten					1	03	06	2.01	05
1.03	32				Program penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pembinaan Konstruksi (Pemerinta, Orang Perorangan, Badan Usaha)					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terlaksananya pemberdayaan jasa konstruksi			1	03	11		
1.03	32	02			Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi	Jumlah orang yang diberdayakan			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan tenaga ahli					1	03	11	2.01	
							Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Pelaku jasa konstruk yang terlatih							1	03	11	2.01	04
1.03	23				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina Margaan				Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten /kota					1	03	11	2.02		
1.03	23	06			Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Terbelinya alat-alat ukur dan bahan laboratorium	Penyusunan data dan informasi ketersediaan/penggunaan Material dan Peralatan								1	03	11	2.02	07
1.03	23	12			Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Terpeliharanya peralatan PUTR													
											Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Penyelenggaraan penataan ruang			1	03	12		
1.03	34				Program Perencanaan Tata Ruang				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang					1	03	12	2.01	
1.03	34	02			Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	Tersedianya dokmen kebijakan RDTRK, RTRK dan RTBL	Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi, evaluasi dan penetapan RRTR Kab./Kota	Jumlah dokumen RRTR							1	03	12	2.01	03
1.03	36				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kaabupaten /Kota	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang					1	03	12	2.04	
1.03	36	05			Pengawasan pemanfaatan ruang	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	Jumlah dokumen izin pemanfaatan ruang							1	03	12	2.04	02
1.03	36	09			Koordinasi penataan ruang	Terlaksananya Koordinasi penataan ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	intensitas koordinasi penataan ruang							1	03	12	2.04	04

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
2.10	01	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah/ ADMINISTRASI UMUM	Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Hal Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik				01		
										Administrasi Umum	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik, jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor, perizinan kendaraan dinas/operasional, pelayanan administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja, alat tulis kantor, barang cetakan dan hasil penggandaan, komponen listrik dan penerangan bangunan, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, logistik, pelayanan jasa kesekretariatan dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar							01	2,03
2.10	01	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	tersedianya Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								01	2,03	02
2.10	01	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/ operasional Diskominfo T.A. 2021	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pelayanan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor								01	2,03	03
2.10	01	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Pelayanan administrasi keuangan Dinas kominfo	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	tersedianya Perizinan kendaraan dinas/ operasional Diskominfo T.A. 2021								01	2,03	06
2.10	01	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Pelayanan jasa kebersihan Dinas kominfo	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Pelayanan administrasi keuangan kantor Diskominfo								01	2,03	07
2.10	01	01	09			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja/jumlah perbaikan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Pelayanan jasa kebersihan kantor Diskominfo								01	2,03	08
2.10	01	01	10			Penyediaan jasa perbaikan perlengkapan kerja	Tersedianya Pelayanan jasa perbaikan perlengkapan kerja/jumlah perbaikan	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja								01	2,03	09
2.10	01	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor								01	2,03	10
2.10	01	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Hasil Penggandaan								01	2,03	11
2.10	01	01	19			Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Pelayanan jasa kesekretariatan kantor	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor								01	2,03	12
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Diskominfo								01	2,03	13
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga								01	2,03	14
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik								01	2,03	16
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Pelayanan jasa kesekretariatan kantor								01	2,03	17
								Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah								01	2,03	18
2.10	01	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah/ ADMINISTRASI UMUM	Terwujudnya Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur				01	2,03	
2.10	01	02	05			Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor										01	2,03	19
2.10	01	02				Pengadaan Kendaraan Dinas jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas roda 4	pengadaan mobil jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas roda 4								01	2,03	19

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN			
2.10	01	02	06			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas roda 2	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas roda 2								01	2.03	20
2.10	01	02	07			Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor								01	2.03	22
2.10	01	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor								01	2.03	24
2.10	01	02	10			Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya peremajaan Mebeleur (Meja dan Kursi Kerja) di Kantor Diskominfo	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya peremajaan Mebeleur (Meja dan Kursi Kerja) di Kantor Diskominfo								01	2.03	25
2.10	01	02	22			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terlaksananya pemeliharaan kantor								01	2.03	28
2.10	01	02	23			Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan	terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan								01	2.03	29
2.10	01	02	24			Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 dan Roda 2								01	2.03	30
2.10	01	02	42			rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehabilitasigedung kantor diskominbfo	rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	terlaksananya rehabilitasi gedung kantor diskominbfo								01	2.03	38
2.10	01	05				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah/ Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Sumberdaya Manusia Aparatur Diskominfo						
										Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Profesioanal dan Cerdas						01	2.04	
2.10	01	05	01			Pendidikan dan pelatihan formal	terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Administrasi, teknis dan fungsional.								01	2.04	09
2.10	01	06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah/ Administrasi Keuangan	Terciptanya Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Tersedianya LAKIP				01	2.04	08
										Administrasi Keuangan	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan						01	2.02	
2.10	01	06	01			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan tersedianya LAKIP Diskominfo	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja								01	2.02	04
2.10	01	06	03			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	tersedianya laporan PRA	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	tersedianya laporan PRA								01	2.02	05
2.10	01	06	04			Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	tersedianya pelaporan Keuangan Akhir Tahun	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD	tersedianya pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2021								01	2.02	06
2.10	01	06	05			Penyusunan Program Kerja SKPD	Tersedianya Penyusunan Laporan Kerja SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	tersusunnya program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan TA 2021								01	2.02	07
								Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya Pelaporan Prognosis realisasi anggaran								01	2.02	08
								Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun								01	2.02	09
										Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat						01	2.02	
								Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat daerah								01	2.01	01
								Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan								01	2.01	02
								Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perangkat daerah								01	2.01	03
								Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat daerah								01	2.01	04
								Evaluasi Perangkat daerah	Terwujudnya Evaluasi Perangkat daerah								01	2.01	05

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
2.10	01	20				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah						Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Terkelolanya Komunikasi Informasi juga Tersedianya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Urusan Pemerintahan Bidang komunikasi dan Informatika		02	16	02		
										Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah					02	16	02	2.01	
2.10	01	20	01			Pemantauan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	Terkelolanya Komunikasi Informasi juga Tersedianya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	terkelolanya informasi dan komunikasi publik serta terwujudnya layanan pengaduan pelayanan publik							02	16	02	2.01	02
2.10	01	20	02			Pengelolaan Informasi berbasis agenda prioritas pemerintah	Tersedianya Layanan Informasi melalui Media Elektronik Radio Lokal	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Informasi melalui Media Elektronik Radio Lokal							02	16	02	2.01	03
2.10	01	20	03			Pelaksanaan Lembaga Media Komunikasi	Tersedianya Operasional Kegiatan Radio SPL FM	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya layanan informasi publik melalui media Radio SPL FM							02	16	02	2.01	04
2.10	01	20	04			Fasilitasi dan Konsultasi bagi Pengelola Informasi Publik	Terbentuknya Forum Konsultasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan PPID	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	tersedianya forum konsultasi publik dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dan PPID							02	16	02	2.01	05
2.10	01	20	05			Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Informasi Publik	Tersebarinya Informasi Publik melalui Media Massa	Pelayanan Informasi Publik	Tersebarinya Informasi Publik melalui Media Massa							02	16	02	2.01	06
2.10	01	20	06			Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik	Terfasilitasinya Pelaksanaan KIM	Layanan Hubungan Media	Terfasilitasnya Pelaksanaan KIM dan terwujudnya sumber data komunikasi publik							02	16	02	2.01	07
2.10	01	20	07			Penyelenggaraan Mediasi dan Ajudikasi Non Litigasi	Tersedianya Operasional Komisi Informasi Kabupaten Bulukumba	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	terlaksananya tata kelola komisi informasi di Daerah dan operasional komisi informasi							02	16	02	2.01	08
								Manajemen Dengan Komunikasi Krisis	Terlaksananya Dialog Publik untuk menangani permasalahan masyarakat/publik							02	16	02	2.01	09
								Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	tersedianya bahan evaluasi penyelenggaraan Sumber daya Komunikasi Publik							02	16	02	2.01	10
								Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	terlaksananya tata kelola komisi informasi di Daerah							02	16	02	2.01	11
								Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	Terjalinnnya kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan swasta melalui komunitas publik							02	16	02	2.01	12
2.10	01	21				Program Pengembangan E-government						Program Aplikasi Informatika	Terwujudnya pelayanan publik pemerintah yang berbasis elektronik			2	16	03		
										Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah pusat dan sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Nama Domain dan Sub Domain Daerah					2	16	03	2.01	
2.10	01	21	01			Layanan nama domain dan sub domain bagi Lembaga Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pelayanan publik secara eletronik (e-government) serta Tersedianya Nama Domain dan Sub Domain Daerah	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Terdaftarinya Nama Domain Pemerintah Provinsi							2	16	03	2.01	01
2.10	01	21	02			Layanan Infrastruktur Data Center	Tersedianya Jumlah fasilitas layanan akses inter dan intranet SKPD dan 10 Kec serta Hot Spot Area Publik	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain san Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan nama Domain dan Sub Domain Baik Daerah Kota /kabupaten							2	16	03	2.01	02
2.10	01	21	03			Layanan Keamanan Informasi E-Government	tersedianya Data center dan Recovery Data Center yang terintegrasi	Penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah	tersedianya data dan informasi Indek Keamanan Informasi dan terlaksananya Pengawasan dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi							2	16	03	2.01	03

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
2.10	01	21	04			Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemda	tersedianya data dan informasi Indeks Keamanan Informasi dan terlaksananya Pengawasan dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi			Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan publik secara elektronik (e-government)					2	16	03	2.02	
2.10	01	21	06			Layanan Akses Internet dan Intranet Pemda	Tersedianya sarana dan prasarana telekomunikasi pemerintah daerah (telepon, ip-phone, e-mail, video conference, radio komunikasi)	Pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah	tersedianya Data center dan Recovery Data Center yang terintegrasi							2	16	03	2.02	03
2.10	01	21	07			Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan	Tersedianya aplikasi layanan publik dan pemerintahan yang terintegrasi (Pembuatan aplikasi berbagi pakai)	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana telekomunikasi pemerintah daerah (telepon, ip-phone, e-mail, video conference, radio komunikasi)							2	16	03	2.02	04
2.10	01	02	08			Pengembangan Sumber Daya TIK dan SDM Pemda dan Masyarakat	Terlaksananya BinteK TIK dan Jasa Tenaga Ahli Teknologi Informatika	koordinasi dan sinkronisasi sistem Keamanan Informasi	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi sistem Keamanan Informasi							2	16	03	2.02	05
2.10	01	02	09			Fasilitasi Pembinaan dan Peningkatan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) / dan USO	Terselenggaranya pendampingan KPU/USO di wilayah Kab. Bulukumba	koordinasi dan sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	tersedianya data dan informasi Indeks Keamanan Informasi dan terlaksananya Pengawasan dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi							2	16	03	2.02	06
2.10	01	02	10			Sosialisasi dan Deseminasi Bidang E-Government	Terselenggaranya sosialisasi dan diseminasi Bidang E-Government	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis Elektronik	Terlaksananya BinteK TIK dan Jasa Tenaga Ahli Teknologi Informatika							2	16	03	2.02	07
								Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedianya aplikasi layanan publik dan pemerintahan yang terintegrasi (Pembuatan aplikasi berbagi pakai)							2	16	03	2.02	08
								Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terwujudnya Ekosistem Kabupaten Cerdas dan Kota Cerdas melalui BIMTEK TIK dan Jasa Tenaga Ahli Teknologi Informasi							2	16	03	2.02	09
								Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi dan Komunikasi Pemerintah daerah	Terwujudnya Sumber Daya Teknologi dan Komunikasi Pemerintah Berbasis Elektronik							2	16	03	2.02	10
								Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terselenggaranya sosialisasi dan diseminasi Bidang E-Government							2	16	03	2.02	11
2.10	01	15				Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				2	20	02		
										Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data Statistik Sektoral					2	20	02	2.01	
2.10	01	15	01			Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersedianya Data Statistik Sektoral dengan Terlaksananya Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik Sektoral dengan Terlaksananya Pengumpulan Data dan Statistik Daerah							2	20	02	2.01	01
2.10	01	15	02			Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah							2	20	02	2.01	02
2.10	01	15	05			Penyusunan Profil Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kecamatan / Kelurahan	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terlaksananya Penyusunan Profil Kecamatan / Kelurahan							2	20	02	2.01	03
								Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Tersedianya data Statistik Sektoral, melalui kerjasama BPS, OPD terkait dengan sosialisasi terkait Pendataan Statistik							2	20	02	2.01	04
								Pengembangan Infrastruktur	Terbangunnya Infrastruktur Sattistik Sektoral dalam BUKU dalam Angka Kabupaten							2	20	02	2.01	05

KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN						
02.10	01	15			Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						Urusan Pemerintahan Bidang Persandian/ Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				02	21	02				
02.10	01	15	07		Pengelolaan administrasi Sistem Persandian	Tertibnya administrasi sistem persandian			Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah daerah kabupaten/Kota					02	21	02	2.01			
							Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komnikasi Sandi Pemerintahah Daerah kabupaten/Kota	terwujudnya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komnikasi Sandi Pemerintahah Daerah kabupaten/Kota							02	21	02	2.01	01		
							Pelaksanaan Analisa Kebutuhan dan pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisa Kebutuhan dan pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							02	21	02	2.01	02		
							Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							02	21	02	2.01	03		
							Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tertibnya administrasi sistem persandian dan tersedianya layanan keamanan informasi kabupaten/Kota							02	21	02	2.01	04		
							Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpolanya/terjalinnnya Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota							02	21	02	2.01	05		
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																					
1.04	01				Program pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah									
1.04	01	01	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa pelayanan surat menyurat dan materai 6000 dan 3000	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa pelayanan surat menyurat dan materai 6000 dan 3000	Administrasi Umum	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Listrik, air, jasa pemeliharaan kend, jasa pelayanan adm keuangan, jasa kebersihan kantor, ATK, Makan Minum, Cetak & Penggandaan, Komponen Instalasi Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan bacaan, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, mebeleur serta pemeliharaan berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta pemeliharaan kend op.								01	2.03	01	
1.04	01	01	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan telepon dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik											01	2.03	02
1.04	01	01	06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas											01	2.03	06
1.04	01	01	07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah biaya honorarium pengelola keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah biaya honorarium pengelola keuangan											01	2.03	07
1.04	01	01	08		penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan pelayanan kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan pelayanan kebersihan kantor											01	2.03	08
1.04	01	01	19		Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Jumlah Bulan Pelayanan Kesekretariatan SKPD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor											01	2.03	10
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan											01	2.03	11
							Penyediaan Makanan Dan Minuman	Makan & Minum Rapat dan Tamu											01	2.03	17

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN			
1.04	01	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat-alat Listrik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat-alat Listrik								01	2.03	12
1.04	01	01	14			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah sarana kebersihan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah sarana kebersihan								01	2.03	14
1.04	01	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas								01	2.03	18
1.04	01	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Jumlah Prasarana dan Sarana Perkantoran yang layak pakai					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah		1	03	08		
1.04	01	02	04			Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang akan dibeli			Kegiatan Administrasi Umum	Tersedianya Mobil Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional, Perlengkapan dan Peralatan gedung Kantor, Mebeleur, Pemeliharaan Gedung Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, Rehab Rumah Dinas dan Rehab Gedung Kantor								
1.04	01	02	05			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang akan dibeli	Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya Mobil Jabatan								01	2.03	19
1.04	01	02	07			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang akan dibeli	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Mobil Dinas Operasional								01	2.03	20
1.04	01	02	08			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang akan dibeli	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor								01	2.03	22
1.04	01	02	10			Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor								01	2.03	24
1.04	01	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubeler								01	2.03	25
1.04	01	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor								01	2.03	32
1.04	01	02	28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional								01	2.03	30
1.04	01	02	41			Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas yang akan direhab	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor								01	2.03	28
1.04	01	02	42			Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Akan di Rehab	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas								01	2.03	37
.								Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Gedung Kantor							01	2.03	38	
.								Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor							01	2.03	34	
1.04	01					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Tersedianya Sarana dan prasarana kantor yang menunjang peningkatan kinerja aparatur					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah						
1.04	01	05	01			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai dinas Tata Ruang Perumahan dan Bimbingan Teknis			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan, bimtek serta pengadaan mesin absensi elektronik kantor						01	2.04	
1.04	01	05	03			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya BinteK implemtasi Peraturan Perundang-undangan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas ASN dan Kelengkapannya								01	2.04	02
.								Pengadaan Pakaian Korpri	Tersedianya Pakaian Korpri ASN								01	2.04	04
.								Pendidikan dan Pelatiba Formal	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk ASN								01	2.04	09
.								Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan								01	2.04	10
.								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan								01	2.04	11
1.04	01	06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Laporan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi yang berkualitas					PENUNJANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah						
.										Administrasi Keuangan	Terwujudnya Laporan Admnsitrasi Keuangan						01	2.02	
.								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN								01	2.02	01

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
1.04	01	06	01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Instansi pemerintah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								01	2.02	06		
								Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran								01	2.02	07		
1.04	01	06	04			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun								01	2.02	09		
1.04	01	06	05			Penyusunan Program Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Renstra														
												Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah								
										Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Dokumen Renstra, Renja, Sakip						01	2.01			
								Penyusunan Renstra & Renja Perangkat Daerah	Terwujudnya Dokumen Renstra dan Renja								01	2.01	01		
								Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Program Kerja dan Monev OPD								01	2.01	02		
								Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terwujudnya Dokumen SAKIP								01	2.01	03		
1.04	01	15				Program Pengembangan Perumahan						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	04	04			
1.04	01	15	02			Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)	Tersedianya data base perumahan dan kawasan permukiman MBR			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terselenggaranya urusan PSU Perumahan						1	04	04	2.01	
1.04	01	15	06			Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rasio rumah layak huni	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersedianya Perencanaan PSU Perumahan								1	04	04	2.01	01
1.04	01	15	13			Penyusunan Data Rumah Umum Khusus Negara Komersil dan Swadaya	Terwujudnya Data Base Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan								1	04	04	2.01	02
1.04	01	15				Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan Rumah Umum Khusus Negara Komersil dan Swadaya	Terwujudnya pembangunan perumahan nelayan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Tetaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan								1	04	04	2.01	03
1.04	01	15	15			Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan	Terlaksananya pengelolaan prasarana dan sarana di kawasan perumahan (TPST perumahan)					Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Program Pengembangan Perumahan				1	04	02		
										Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Rehabilitasi Rumah Korban Bencana						1	04	02	2.01	
								Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Perumahan Rawan Bencana relokasi								1	04	02	2.01	01
								Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersedianya Lahan Potensial untuk lokasi relokasi perumahan								1	04	02	2.01	02
								Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani	tersedianya Data Rumah Korban Bencana yang belum tertangani								1	04	02	2.01	03
								Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersedianya Data Tingkat Kerusakan Rumah akibat Bencana								1	04	02	2.01	04
								Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Penerima Rumah bagi Korban bencana								1	04	02	2.01	05
								Pendataan Rumah Bagi Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersedianya Data Rumah, Sewa, Rumah Susun dan Ruah Khusus								1	04	02	2.01	06

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
													1	04	02	2.02	
							Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terwujudnya Sosialisasi, Persiapan, penyediaan, dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi					1	04	02	2.02	
					Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	terwujudnya Standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat tanggap bencana							1	04	02	2.02	01
					Sosialisasi tentang Mekanisme penggantian Hak atas tanah dan Bangunan	terwujudnya sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan							1	04	02	2.02	02
					Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	terwujudnya sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanism akses perumahan KPR-FLPP							1	04	02	2.02	03
					Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	terwujudnya pembentukan dan pelatiba Tim satgas, timpending dan fasilitator							1	04	02	2.02	04
					Rembug Warga untuk menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana	terlaksananya rembug warga untuk memmtukan penerima rumah bagi korban bencana							1	04	02	2.02	05
					Koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan	terwujudnya koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan							1	04	02	2.02	06
							Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi					1	04	02	2.03	
					Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Tersedianya Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana							1	04	02	2.03	01
					Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen DED bagi Rumah Korban Bencana dan Relokasi							1	04	02	2.03	02
					Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi bagi Korban Bencana	Tersedianya Lahan untuk pembangunan Rumah bagi korban bencana							1	04	02	2.03	03
					Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terwujudnya Rumah Bagi Rumah Korban Bencana							1	04	02	2.03	04
					Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau relokasi Prgram Kabupaten/kota	Terwujudnya Rumah Khusus beserta Prasarana Sarana Umum bagi Korban Bencana dan Relokasi							1	04	02	2.03	05
					Operasional dan pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	terwujudnya operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program							1	04	02	2.03	06
							Pendistribusian dan Serah Terima rumah Bagi Korban Bencana atau relokasi Program/Kabupaten	Terlaksananya pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi					1	04	02	2.04	
					Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	terwujudnya pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana							1	04	02	2.04	01
					Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	terwujudnya serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi							1	04	02	2.04	02

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
										Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Rumah susun umum dan atau Rumah Khusus					1	04	02	2.05		
								Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik /Peghuni Rumah Susun	terwujudnya fasilitas pengelolaan kelembagaan dan pemilik rumah susun							1	04	02	2.05	01	
								Penatausahaan pemanfaatan Rumah susun umum dan/atau Rumah Khusus	terwujudnya pemanfaatan rumah susun umum dan rumah khusus							1	04	02	2.05	02	
										Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terwujudnya Peberbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					1	04	02	2.06		
								Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara elektronik	Terwujudnya fasilitas penerbitan izin pembanguna dan pengembangan Perumahan secara elektronik							1	04	02	2.06	01	
								Penguatan dan Pembinaan Kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah sederhana	terwujudnya pembinaan untuk penyelenggaraan rumah sederhana							1	04	02	2.06	02	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	terlaksananya koordinasi pengendalian pembangunan, pembangunan dan pengembangan perumahan							1	04	02	2.06	03	
								Kordinasi dan Sinkronisasi kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pemerintah Umum/Rumah Susun Umum	terwujudnya koordinasi dan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha							1	04	02	2.06	04	
										Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Terwujudnya penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung					1	04	02	2.07		
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung	Terwujudnya Koordinasi penerbitan sertifikat bangunan gedung							1	04	02	2.07	01	
1.04	01	16				Program Lingkungan Sehat Perumahan															
1.04	01	16	07			Penyusunan Data Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Tersedianya data perencanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum														
1.4	01	19				Program Pengembangan Permukiman						PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Terlaksananya Program Permukiman dan Permukiman Kumuh		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	04	03			
1.04	01	19	01			Penyusunan Data Bidang Permukiman	Terwujudnya data permukiman di bidang permukiman			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terwujudnya Peberbitan Izin pembagunan dan pengembangan kawasan permukiman					1	04	03	2.01		
1.04	01	19	04			Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luas permukiman kumuh dengan kawasan kumuh	Fasilitasi Pemenuhan Komitemen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman terintegrasi secara elektronik	terwujudnya fasilitas penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman secara elektronik							1	04	03	2.01	01	
							Persentase kawasan kumuh dengan luas wilayah	Penyusunan dan/atau review serta legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	tersedianyaData rencana pembangunan dan pengembangan permukiman Kumuh							1	04	03	2.01	02	
1.04	01	19	05			Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan dan Permukiman Perdesaan	Jumlah panjang jalan dan drainase yang terbangun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	terlaksananya koordinasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh							1	04	03	2.01	03	

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
													1	04	03	2.02	
							Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh					1	04	03	2.02	
					Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh							1	04	03	2.02	01
					Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Terwujudnya Dokumen Perencanaan dan rekomendasi Pencegahan Tumbuh Kembang Permukiman Kumuh							1	04	03	2.02	02
					Pembentukan/pembinaan Kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	terlaksananya pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh							1	04	03	2.02	03
					penyadaran publik pencegahan tumbuh berkembangnya permukiman kumuh	terlaksananya penyadaran publik terhadap pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh							1	04	03	2.02	04
					koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	terlaksananya koordinasi pengendalian Penataan Pemugaran/peremajaan Permukiman Kumuh							1	04	03	2.02	05
					pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Terlaksananya pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran permukiman kumuh							1	04	03	2.02	06
					penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	terwujudnya serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran permukiman kumuh							1	04	03	2.02	07
							Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh					1	04	03	2.03	
					Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Tersedianya Penyusunan Site Plan dan DED Permukiman Kumuh							1	04	03	2.03	01
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Terwujudnya Rumah Layak Huni untuk pencegahan tumbuh kembang Permukiman Kumuh							1	04	03	2.03	02
					Kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni berserta PSU	tersedianya rumah layak huni berserta PSU							1	04	03	2.03	03
					Koordinasi dan sinkronisasi penegndalian penyelenggaraan Pemugaran/peremajaan permukiman Kumuh	terlaksananya koordinasi pengendalian penyelenggaraan peremajaan permukiman kumuh							1	04	03	2.03	04
					pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena Program peremajaan permukiman Kumuh	terwujudnya pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat							1	04	03	2.03	05
									Pengembangan Permukiman	Terwujudnya Pengembangan Permukiman		PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	03	07		
							Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kab/Kota	Terwujudnya Infrastruktur Permukiman di Daerah Kab/Kota					1	03	07	2.01	
					Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							1	03	07	2.01	01

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
.	.	.	.					Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	terwujudnya Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman							1	03	07	2.01	02	
.	.	.	.					Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman							1	03	07	2.01	03	
.	.	.	.					Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Terwujudnya Pembinaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman							1	03	07	2.01	04	
1.03	01	27				Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Terlaksananya Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	03	03			
1.03	01	27	01			Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase rumah tangga pengguna air bersih			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM)					1	03	03	2.01		
1.03	01	27	07			Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	Jumlah prasarana air bersih yang direhabilitasi	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	Tersedianya Dokumen RISPAM								1	03	03	2.01	01
1.03	01	27	02			Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Persentase rumah tangga bersanitasi	Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	Terwujudnya Pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan								1	03	03	2.01	03
.	.	.	.				Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai (Jumlah IPAL/IPLT/MCK)	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terwujudnya Pembangunan SPAM Kawasan Perdesaan								1	03	03	2.01	04
1.03	01	27	11			Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)	Terlaksananya Program Pamsimas	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	terwujudnya Peningkatan SPAM Kawasan Perkotaan								1	03	03	2.01	05
.	.	.	.					Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	terwujudnya peningkatan kawasan Perdesaan								1	03	03	2.01	06
.	.	.	.					Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	tersedianya perluasan SPAM Kawasan Perkotaan								1	03	03	2.01	07
.	.	.	.					Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terwujudnya Perbaikan SPAM Kawasan Perdesaan								1	03	03	2.01	08
.	.	.	.					Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAM Badan Usaha								1	03	03	2.01	10
.	.	.	.					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat								1	03	03	2.01	11
.	.	.	.					Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Terwujudnya Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan								1	03	03	2.01	15
.	.	.	.					Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terwujudnya Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan								1	03	03	2.01	16
.	.	.	.							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten						1	03	05	2.01	
.	.	.	.					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	Terwujudnya Dokumen Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik								1	03	05	2.01	01
.	.	.	.					Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terwujudnya Pembangunan Pengelolaan Air Limbah Domestik								1	03	05	2.01	03
.	.	.	.					Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terwujudnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik								1	03	05	2.01	04
.	.	.	.					Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Peningkatan Sistem Air Limbah Domestik								1	03	05	2.01	05
.	.	.	.					Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersedianya Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik								1	03	05	2.01	06

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
								Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat rangka penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Sosialisasi Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik							1	03	05	2.01	08	
								Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	terlaksananya pengembangan SDM Pengelolaan Air Limbah Domestik							1	03	05	2.01	09	
								Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terwujudnya Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik							1	03	05	2.01	10	
1.04	01	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Jumlah Prasarana dan Sarana Perkantoran yang layak pakai					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Tersedianya Bangunan Gedung		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	03	08			
1.04	01	02	01			Pembangunan Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan Bupati dan Camat yang akan bangun			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya Bangunan Gedung Di Daerah Kabupaten/Kota					1	03	08	2.01		
1.04	01	02	03			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terbangun (Kantor DPPP, DPR, Bulukumba Tower, Camat, Lurah dan Tribun)	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terselenggaranya Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB)								1	03	08	2.01	01
1.04	01	02	02			Pembangunan Rumah Dinas	Tersedianya bangunan gedung Rumah Dinas	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuaui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Rehabilitasi, Renovasi serta pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten								1	03	08	2.01	02
								Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupate/Kota	Terwujudnya Regulasi terkait Bangunan Gedung							1	03	08	2.01	03	
								Bangunan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Bangunan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara							1	03	08	2.01	04	
								Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah kab/Kota	Terwujudnya Monev penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara							1	03	08	2.01	05	
								Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan bangunan cagar budaya yang dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Identifikasi Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan							1	03	08	2.01	06	
								Bantuan Teknis bagi masyarakat pemilik bangunan gedung cagar budaya yang ditetapkan tingkat kab/Kota	tersedianya bangunan teknis bagi masyarakat pemilik bangunan gedung cagar budaya							1	03	08	2.01	07	
								Penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan	terwujudnya penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung							1	03	08	2.01	09	
								pendaftaran Huruf daftar (Hdno) bangunan Gedung negara	Terlaksananya Pendaftaran Huruf daftar bangunan gedung negara							1	03	08	2.01	10	
								pelaksanaan pengelolaan Rumah Negara	terlaksananya pengelolaan Rumah Negara							1	03	08	2.01	11	
1.04	01	15				Program Pembangunan sistem Pendaftaran Tanah	Terwujudnya sistem pendaftaran tanah					PENGLOLAAN IZIN LOKASI	Terwujudnya Pengelolaan Izin Lokasi	BIDANG PERTANAHAN	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	2	10	2			

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
1.04	01	15	01			Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah	Terwujudnya Tertib Administrasi Kepemilikan Tanah Pemerintah Daerah			Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	terwujudnya Izin Lokasi					2	10	02	2.01	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi untuk penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha							2	10	02	2.01	01
												PENETAPAN TANAH ULAYAT	Tersedianya Tanah Ulayat			2	10	07		
										Penetapan Tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupate/Kota	Terwujudnya Tanah Ulayat					2	10	07	2.01	
								Koordinasi dan sinkronisasi Survei dan Pemetaan batas atanah ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya survei dan pemetaan Tanah Ulayat							2	10	07	2.01	01
								Koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Koordinasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat Hukum Adat							2	10	07	2.01	02
								Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Terwujudnya Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku							2	10	07	2.01	03
												PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Terlaksananya Pengelolaan Izin Membuka Tanah			2	10	09		
										Penertiban Izin Membuka Tanah	Terwujudnya Izin Membuka Tanah					2	10	09	2.01	
								Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara							2	10	09	2.01	02
1.04	01	16				Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	Terwujudnya Kepastian Hukum Pemda Atas tanah Pemda					Penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Terwujudnya Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan			2	10	05		
										Penyelesaian Masalah Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah	Terwujudnya Penyelesaian Ganti Rugi Tanah dan Sabtunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah					2	10	05	2.01	
1.04	01	16				Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah persil tanah yang tertata	penetapan daftar masyarakat penerima Santunan tanah dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam Satu Kabupaten							2	10	05	2.01	01
1.4	01	16	03			Pengadaan/Pembebasan/Pengamanan Tanah Pemerintah Daerah	Tersedianya Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah							2	10	05	2.01	02
												PENATAGUNAAN TANAH	Terlaksananya Program Penatagunaan Tanah			2	10	10		
										Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/kota	Terwujudnya Penggunaan Tanah					2	10	10	2.01	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terwujudnya Koordinasi penggunaan Tanah							2	10	10	2.01	01
								Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	tersedianya Peta Zona Nilai Tanah							2	10	10	2.01	02
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terwujudnya koordinasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah							2	10	10	2.01	03

KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
1.04	01	17			Program Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan	Terwujudnya penyelesaian konflik pertanahan					PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	BIDANG PERTANAHAN	Pemerintahan	2	10	04		
1.04	01	17	01		Fasilitasi penyelesaian konflik konflik pertanahan	Konflik yang ditangani			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya Penyelesaian Sengketa Tanah garapan					2	10	04	2.01	
							Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan							2	10	04	2.01	01
							Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan							2	10	04	2.01	02
											Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee	Terlaksananya Redistribusi Tanah, Seto ganti Kerugian Program Tanah kelebihan dan Tanah Absentee			2	10	06		
									Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kebeihan dan tanah absentee				2	10	06	2.01		
							Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	tersedianya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi Tanah							2	10	06	2.01	01
							Inventarisasi dan rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	tersedianya inventarisasi dan rekomendasi redistribusi Tanah							2	10	06	2.01	02
							Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah obyek reforma agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi penelenggaraan redistribusi Tanah							2	10	06	2.01	03
							Koordinasi dan Sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penataan akses redistribusi Tanah							2	10	06	2.01	04
											Pengelolaan Tanah Kosong	Terwujudnya Pengelolaan Tanah Kosong			2	10	08		
									Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Terlaksananya Penyelesaian Tanah Kosong					2	10	08	2.01	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya Koordinasi Penyelsaian Tanah Kosong							2	10	08	2.01	01
									Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong					2	10	08	2.02	
							Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terwujudnya Pelaksanaan Inventarisasi tanah kosong							2	10	08	0.08	01
							Pemanfaatan Tanah Kosong	Terwujudnya Pemanfaatan Tanah Kosong							2	10	08	2.02	02
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR																			
														PEMERINTAHAN	01				
													PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	01	03				
											PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR			01	03	02			

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN			
1.03	02	01				A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Dinas PSDA					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Administrasi umum	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah						
1.03	02	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa, Listrik, air, jasa pemeliharaan kend, jasa pelayanan adm keuangan, jasa kebersihan kantor, ATK, Makan Minum, Cetak & Penggandaan, Komponen Instalasi Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, serta pemeliharaan berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta pemeliharaan kend operasional								
1.03	02	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Pemeliharaan & Perizinan kendaraan Dinas Operasional; 2 unit kend roda 4 dan 6 unit kend roda 2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Pemeliharaan & Perizinan kendaraan Dinas Operasional; 2 unit kend roda 4 dan 6 unit kend roda 2										
1.03	02	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Pelayanan Admistrasi keuangan; honor operator, arsipatoris, sopir	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Pelayanan Admistrasi keuangan; honor operator, arsipatoris, sopir										
1.03	02	01	08			penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan kantor										
1.03	02	01	19			Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Jasa Kesekretariatan Kantor, ATK, barang cetakan & penggandaan, makan minum tamu/rapat	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor										
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan										
								Penyediaan Makanan Dan Minuman	Makan & Minum Rapat dan Tamu										
1.03	02	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										
1.03	02	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah										
1.03	02	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.						Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.						
1.03	02	02	05			pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda Dua	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2										
1.03	02	02	07			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor										
1.03	02	02	09			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor										
1.03	02	02	10			Pengadaan Meubeler Kantor	Tersedianya mebeleur Kantor	Pengadaan Meubeler Kantor	Tersedianya mebeleur Kantor										
1.03	02	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor										
1.03	02	02	23			Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya rutin/berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya rutin/berkala Mobil Jabatan										
1.03	02	02	24			Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional										
1.03	02	02	26			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor										
1.03	02	02	28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor										
1.03	02	02	42			Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor	Rehabilitasi sedaang/BeratGedung Kantor	Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor	Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor										
1.03	02	05				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Meningkatnya kapasitas Sumber daya Aparatur						Meningkatnya kapasitas Sumber daya Aparatur						
1.03	02	05	02			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan bimtek implementasi								
1.03	02	05	03			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya BinteK implemtasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya BinteK implemtasi Peraturan Perundang-undangan										

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
1.03	02	06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD														
1.03	02	06	01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja PSDA.	Tersedianya laporan capaian kinerja dan rencana kerja Dinas PSDA.	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah.	Dokumen Laporan Capaian Kinerja		Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi SKPD		Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah.								
1.03	02	06	02			Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD		Meningkatnya kinerja dan pelaporan monev LHP Dinas PSDA.	Tersusunnya laporan kemajuan anggaran Monev LHP				Meningkatnya kinerja dan pelaporan monev LHP Dinas PSDA.								
1.03	02	24				Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Tertanganinya saluran irigasi berupa saluran induk dan saluran sekunder sehingga meningkatkan kuantitas irigasi baik sehingga meningkatkan kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan air					PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR					01	03	02		
										Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada WS dalam satu Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi		Tertanganinya saluran irigasi berupa saluran induk dan saluran sekunder sehingga meningkatkan kuantitas irigasi baik sehingga meningkatkan kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan terhadap kebutuhan air				01	03	02	2.01	
1.03	02	24	08			Pembangunan Pintu Air	Tersedianya Bangunan dan Pintu Air untuk kegiatan Operasi Jaringan Irigasi (Pintu Air Sorong)	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pembangunan Pintu Air		Penyediaan Bangunan & Pintu Air Untuk Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi		Terseleenggaranya Kegiatan Operasi Jaringan Irigasi				01	03	02	2.01	11
1.03	02	24	10			Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi Yang Mempunyai Luas Lahan Potensial < 1000 Ha	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi		Meningkatnya fungsi jaringan irigasi		Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi				01	03	02	2.01	20
1.03	02	24	15			Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Jaringan Irigasi		Terkendalinya Fungsi Jaringan Irigasi				01	03	02	2.01	48
1.03	02	24	16			Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Terlaksananya Pemberdayaan P3A	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Petani Pemakai Air		Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pengguna air		Terlaksananya pembinaan terhadap kelembagaan pengelola irigasi				01	03	02	2.01	61
1.03	02	25	05			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air	tersedianya Rencana Tata Tanam Berdasarkan kesepakatan anantara pemerintah dan pelaku usaha		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi		Terlaksananya sosialisasi upaya penanggulangan banjir oleh masyarakat								
1.03	02	24	27			Pengelolaan Data Curah Hujan , Debit Sungai Dan Data pertanaman	Terkoordinasi Data Dan Informasi curah Hujan	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten Kota	Pengelolaan Data Curah Hujan , Debit Sungai Dan Data pertanaman		Meningkatnya Akurasi Pendataan dan Informasi Curah Hujan		Terkoordinasi Data Dan Informasi curah Hujan				01	03	02	2.01	60
1.03	02	24	30			Perencanaan Sumber Daya Air	Tersusunnya Database dan master plan JPA dan JSA	Perencanaan Sumber Daya Air	Perencanaan Sumber Daya Air		Tersedianya Perencanaan Teknis SDA		Tersedianya dokumen perencanaan Sumber daya Air								
1.03	02	24	31			Perencanaan Pembangunan Jaringan Sumber air	Tersediannya Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Sumber Air		Perencanaan Pembangunan Jaringan Sumber air		Tersedianya Perencanaan Teknis P/JSA		Tersediannya Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Sumber Air				01	03	02	2.01	04
1.03	02	24	32			Perencanaan Pembangunan Jaringan Pemanfaatan air	Tersediannya Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Sumber Air		Perencanaan Pembangunan Jaringan Pemanfaatan air		Tersedianya Perencanaan Teknis P/JPA		Tersediannya Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Sumber Air								
1.03	02	26				Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersedianya prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya		Meningkatnya Ketersediaan Air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat		Tersedianya prasarana pengambilan dan saluran pembawa				01	03	02	2.01	06
1.03	02	28	03			Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	Sungai / kanal bebas dari erosi tebing, sedimentasi dan luapan banjir	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Banjir		Terlaksananya rehabilitasi tanggul dan saluran sungai				01	03	02	2.01	24
1.03	02	25	05			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air	tersedianya Rencana Tata Tanam Berdasarkan kesepakatan anantara pemerintah dan pelaku usaha	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air		Terlaksananya pembinaan terhadap kelembagaan pengelolaan air				01	03	02	2.01	54
1.03	02	28	07			Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali		Normalisasi/Restorasi dan Pemeliharaan Sungai	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Banjir Tersedianya Beronjong dan Karung Plastik		Terlaksananya Pembersihan pengerukan Sungai/kali				01	03	02	2.01	46
1.03	02	28	09			Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya.	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai		meningkatnya Pengendalian Daya Rusak di Daerah Pantai				01	03	02	2.01	18

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
										Pengembangan Dan Pengelolaan Sitem Irigasi Primer dan sekunder pada daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota						01	03	02	2.02	
1.03	02	24	18			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa	Terlaksananya Jaringan Irigasi Desa	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa		Meningkatnya Fungsi Layanan Irigasi		Terehabilitasinya dan/ atau meneruskan fungsi jaringan irigasi sehingga bisa meningkatkan fungsi layanan irigasi			01	03	02	2.02	15
1.03	02	24	28			Peningkatan Jaringan Irigasi	Optimalnya Fungsi Jaringan Irigasi pada Kondisi Awal	Peningkatan Bendung Irigasi	Peningkatan Jaringan Irigasi		Meningkatnya Kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan terpeliharanya jaringan irigasi		mengoptimalkan fungsi sistem jaringan irigasi agar kehilangan air dapat diminimalisir			01	03	02	2.02	09
1.03	02	24	29			Inventarisasi Asset Irigasi	Terlaksananya Inventarisasi ASSET Irigasi	Pengelolaan dan pengawasan Alokasi Air Irigasi	Inventarisasi Asset Irigasi		Inventarisasi Assset irigasi, tersedianya data Asset irigasi		Terlaksananya inventarisasi Asset irigasi			01	03	02	2.02	28
1.03	02	25	04			Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	Tersedianya Air Baku untuk air Persawahan	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah		Meningkatnya Ketersediaan Air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat		Terlaksananya pembangunan sumur Air Tanah di zona rusak dan zona kritis air tanah			01	03	02	2.02	06
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				
02	01	06		2.02		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan						Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pengadministrasian serta terciptanya suasana kerja yang representatif, sarana dan prasana penunjang, peningkatan kapasitas aparatur, dan sistem perencanaan dan pelaporan yang efektif guna, peningkatan kinerja pemerintahan	Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	X	XX	01		
02	01	06	05			Penyusunan program kerja SKPD	terlaksananya perencanaan program kegiatan SKPD	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	terlaksananya perencanaan program kegiatan SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan program kerja serta Evaluasi Kinerja perangkat daerah guna akurasi sistem perencanaan					X	XX	01	2.01	02
02	01	06	07			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program SKPD							X	XX	01	2.01	05
02	01	01	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga dan Jumlah surat yang terdistribusikan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga dan Jumlah surat yang terdistribusikan	Administrasi Umum	Terlaksananya pelaksanaan Administrasi Umum guna menunjang kinerja Pegawai					X	XX	01	2.03	01
02	01	01	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening Telepon dan Listrik kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening Telepon dan Listrik kantor							X	XX	01	2.03	02
02	01	01	06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perpanjangan izin kendaraan (mobil jabatan dan mobil operasional, serta roda 2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perpanjangan izin kendaraan (mobil jabatan dan mobil operasional, serta roda 2)							X	XX	01	2.03	06
02	01	01	07			Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Pembayaran honor bagi pengelola administrasi keuangan dan jasa pihak ketiga (Oprator Komputer)	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Pembayaran honor bagi pengelola administrasi keuangan dan jasa pihak ketiga (Oprator Komputer)							X	XX	01	2.03	07
02	01	01	08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran jasa tenaga kebersihana kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran jasa tenaga kebersihana kantor							X	XX	01	2.03	08
02	01	01	09			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	pemeliharaan Peralatan Kantor	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	pemeliharaan Peralatan Kantor							X	XX	01	2.03	09
02	01	01	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor							X	XX	01	2.03	12
02	01	01	13			penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kebutuhan perlatan dan perlengkapan kantor	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kebutuhan perlatan dan perlengkapan kantor							X	XX	01	2.03	13
02	01	01	15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar/koran serta buku-buku tentang peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar/koran serta buku-buku tentang peraturan Perundang-undangan							X	XX	01	2.03	15
02	01	01	18			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah							X	XX	01	2.03	18

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
02	01	01	21			Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Tersedianya ATK, Barang cetakan dan makan minum Rapat	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor							X	XX	01	2.03	10
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya biaya Cetak dan Penggandaan kantor							X	XX	01	2.03	11
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan logistik kantor							X	XX	01	2.03	16
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum untuk tamu dan rapat-rapat							X	XX	01	2.03	16
02	01	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
02	01	02	03			Pembangunan Gedung Kantor	terlaksananya pembangunan gedung/kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung/kantor							X	XX	01	2.03	36
02	01	02	07			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor							X	XX	01	2.03	13
02	01	02	09			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya peralatan gedung kantor													
02	01	02	10			Pengadaan mebeleur	tersedianya mebeleur kantor	Pengadaan Mebeleur	tersedianya mebeleur kantor							X	XX	01	2.03	25
02	01	02	22			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	dilaksanakannya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	dilaksanakannya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor							X	XX	01	2.03	28
02	01	02	23			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	terpeliharanya kendaraan jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas operasional							X	XX	01	2.03	30
02	01	02	24			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan dinas operasional													
02	01	02	28			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	terpeliharanya peralatan kantor yang layak pakai	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	terpeliharanya peralatan kantor yang layak pakai							X	XX	01	2.03	34
02	01	03				Program Peningkatan Disiplin Aparatur														
02	01	03	02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas PSR, PSH dan PDH	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas PSR, PSH dan PDH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					X	XX	01	2.04	02
02	01	05				Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
02	01	05	03			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan							X	XX	01	2.04	11
02	01	06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan														
02	01	06	01			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja SKPD	Administrasi Keuangan	Tersedianya laporan kinerja, laporan keuangan akhir tahun serta laporan keuangan bulanan dan semesteran guna tertib administrasi keuangan					X	XX	01	2.02	06
02	01	06	02			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	terlaksananya penyusunan keuangan semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	terlaksananya penyusunan keuangan semesteran							X	XX	01	2.02	07
02	01	06	04			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun							X	XX	01	2.02	09
02	01	06	05			Penyusunan program kerja SKPD	terlaksananya perencanaan program kegiatan SKPD	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	terlaksananya perencanaan program kegiatan SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan program kerja serta Evaluasi Kinerja perangkat daerah guna akurasi sistem perencanaan					X	XX	01	2.01	02
02	01	06	07			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program SKPD							X	XX	01	2.01	05
02	01	16				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak						Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan guna peningkatan kapasitas perempuan dan anak			2	08	02		

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN						
02	01	16	01			Advokasi dan fasilitas PUG bagi perempuan	terlaksananya kegiatan sosialisasi PUG bagi perempuan	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	terlaksananya kegiatan sosialisasi PUG bagi perempuan dan pelatihan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender (PPRG)	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya kondisi perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, mendapat manfaat dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang sama dalam proses pembangunan serta Terciptanya anggaran yang responsif gender melalui PPRG						2	08	02	2.01	04	
02	01	18				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan																
02	01	18	06			Pelatihan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender	Terlaksananya pelatihan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender (PPRG)															
02	01	15				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan																
02	01	15	02			Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, Sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik dan terlaksananya kegiatan Peringatan Hari Ibu	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kesetaraan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi serta pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Ibu						2	08	02	2.02	01	
02	01	17				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan																
02	01	17	11			Peringatan Hari Ibu	terlaksananya kegiatan Hari Ibu															
02	01	18				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan																
02	01	18	01			Pembinaan Organisasi Perempuan	terlaksananya pembinaan organisasi Perempuan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	terlaksananya pembinaan organisasi Perempuan									2	08	02	2.02	02
02	01	19				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak																
02	01	16	04			Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan kesetaraan dan keadilan gender	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan kesetaraan dan keadilan gender	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas tentang kesetaraan dan keadilan gender guna terciptanya kesetaraan dan keadilan gender						2	08	02	2.03	03	
02	01	17				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan																
02	01	17	03			Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan, dan terlaksananya sosialisasi buta aksara di kalangan perempuan serta sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kebijakan terkait perlindungan perempuan, dan pengentasan buta aksara di kalangan perempuan serta advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Program perlindungan perempuan	Terwujudnya perlindungan perempuan				2	08	03	2.01	01	
02	01	17	04			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan	terlaksananya sosialisasi buta aksara di kalangan perempuan															
02	01	17	05			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	terlaksananya sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan															
02	01	16				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak																

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
02	01	16	02			Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A)	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan penanganan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan penanganan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan koordinasi	Tersedianya pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan, serta pendampingannya					2	08	03	2.02	01	
02	01	17				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan															
02	01	17	02			Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelatihan dan pendampingan korban dan KDRT	Terlaksananya Pelatihan SDM, pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pelayanan dan pendampingan korban KDRT, dan Tersedianya SDM terlatih penanganan bagi perempuan korban kekerasan serta terlaksananya sosialisasi perlindungan anak dan perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM terlatih Pelayanan dan Pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan					2	08	03	2.03	02	
02	01	17	06			Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	terlaksananya sosialisasi tentang sistem pencatatan dan pelaporan KDRT														
02	01	15	03			Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan anak dan perempuan														
02	01	17	08			Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	terlaksananya upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak yang telah dibentuk dan terlaksananya upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan serta terlaksananya upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan					2	08	03	2.03	04	
02	01	16				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak															
02	01	16	06			Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	jumlah jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak yang telah dibentuk														
02	01	15				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan															
02	01	15	05			Gerakan Sayang Ibu	Terlaksananya sosialisasi guna peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu, gender dan kekerasan dalam rumah tangga	Pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak bagi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi guna peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu, gender dan kekerasan dalam rumah tangga	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu, gender dan kekerasan dalam rumah tangga serta peningkatan ketahanan keluarga	Peningkatan kualitas keluarga	Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat terkait Kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak guna peningkatan kualitas keluarga			2	08	04	2.01	02	
02	01	17				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan															
						Peningkatan ketahanan keluarga	Pemenuhan indikator ketahanan keluarga	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan indikator ketahanan keluarga								2	08	04	2.01	03
02	01	16				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak															
02	01	16	08			Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	terbentuknya sistem informasi gender dan anak	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	terbentuknya sistem informasi gender dan anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya wadah informasi gender dan anak	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	terwujudnya sistem pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			2	08	05	2.01	01	
02	01	16	07			Evaluasi Pelaksanaan PUG	tersedianya profil gender dan anak	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	tersedianya profil gender dan anak								2	08	05	2.01	02

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
02	01	15				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan															
02	01	15	07			Pengembangan Kota Layak Anak	Pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terintegrasinya komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk pemenuhan hak-hak anak.	Program pemenuhan hak anak	Terwujudnya pemenuhan hak anak			2	08	06	2.01	02	
02	01	15	08			Penguatan Forum Anak kabupaten Bulukumba	1. Operasional Forum Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Forum Anak serta pelibatan anak dalam perencanaan Pembangunan (Musrenbang Anak)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Terwujudnya lembaga penyedia layanan guna peningkatan kualitas hidup anak dalam meningkatkan pengetahuan dan kreatifitasnya					2	08	06	2.02	02	
							2. Pelibatan anak dalam perencanaan pembangunan (Musrenbang Anak)														
02	01	15	06			Peringatan Hari Anak	meningkatnya pengetahuan dan kreativitas anak	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya pengetahuan dan kreativitas anak							2	08	06	2.02	03	
02	01	16				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak															
02	01	16	02			Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A)	Jumlah korban kekerasan terhadap Anak yang mendapatkan penanganan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan terhadap Anak yang mendapatkan penanganan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya korban kekerasan terhadap ana yang mendapatkan penanganan	Program perlindungan khusus anak	Terwujudnya upaya perlindungan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus			2	08	07	2.01	02	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																					
1.06				Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Bidang Sosial									XX	X						
1.06	1.06.2	01				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran					Program penunjang urusan pemerintah daerah					XX	X	01		
1.06	1.06.2	01	01			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Administrasi Umum	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat		Terwujudnya Jasa Surat Menyurat	XX	X	XX	X	01	2.03	01	
1.06	1.06.2	01	02			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Terlaksananya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		Terwujudnya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			XX	X	01	2.03	02	
1.06	1.06.2	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional		Terwujudnya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional			XX	X	01	2.03	06	
1.06	1.06.2	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Administrasi Umum	Terlaksananya jasa administrasi keuangan		Terwujudnya jasa administrasi keuangan			XX	X	01	2.03	07	
1.06	1.06.2	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya jasa kebersihan kantor		Terwujudnya jasa kebersihan kantor			XX	X	01	2.03	08	
1.06	1.06.2	01	19			Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Tersedianya Alat Tulis Kantor, bahan cetakan dan makan minum kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum	Tersedianya Alat Tulis Kantor		Terwujudnya pengadaan Alat Tulis Kantor, makan minum, dan barang cetakan kantor			XX	X	01	2.03	10	
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum kantor		Tersedianya makan minum kantor					XX	X	01	2.03	17	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					XX	X	01	2.03	11	
1.06	1.06.2	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya penyediaan komponen penerangan kantor		Terwujudnya penyediaan komponen penerangan kantor			XX	X	01	2.03	12	
1.06	1.06.2	01	14			Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Administrasi Umum	Terlaksananya peralatan rumah tangga		Terwujudnya penyediaan peralatan rumah tangga			XX	X	01	2.03	14	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
1.06	1.06.2	01	15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			XX	X	01	2.03	15
1.06	1.06.2	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Administrasi Umum	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			XX	X	01	2.03	18
1.06	1.06.2	02				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur					Program penunjang urusan pemerintah daerah		XX	X	XX	X			
1.06	1.06.2	02	03			Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor													
1.06	1.06.2	02				Pengadaan mobil jabatan	Tersedianya mobil jabatan	Pengadaan mobil jabatan	Tersedianya mobil jabatan	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadaan mobil jabatan		Terwujudnya pengadaan mobil jabatan			XX	X	01	2.03	19
1.06	1.06.2	02	05			Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional		Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas operasional			XX	X	01	2.03	20
1.06	1.06.2	02	07			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor		Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor			XX	X	01	2.03	22
1.06	1.06.2	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Peralatan Gedung Kantor		Terwujudnya pengadaan Peralatan Gedung Kantor			XX	X	01	2.03	24
1.06	1.06.2	02	10			Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor		Terwujudnya pengadaan mebeleur kantor			XX	X	01	2.03	25
1.06	1.06.2	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor		Terwujudnya pemeliharaan rutin gedung kantor			XX	X	01	2.03	28
1.06	1.06.2	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional			XX	X	01	2.03	30
1.06	1.06.2	02	28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor		Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor			XX	X	01	2.03	34
1.06	1.06.2	02	26			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			XX	X	01	2.03	32
1.06	1.06.2	05				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program penunjang urusan pemerintah daerah		XX	X	XX	X			
1.06	1.06.2	05	03			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Terwujudnya penyelenggaraan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			XX	X	01	2.04	11
1.06	1.06.2	06				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Program penunjang urusan pemerintah daerah		XX	X	XX	X			
1.06	1.06.2	06	01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan capaian ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Terwujudnya penyusunan laporan capaian ikhtisar realisasi kinerja SKPD			XX	X	01	2.02	06
1.06	1.06.2	06	02			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran		Terwujudnya penyusunan laporan keuangan semesteran			XX	X	01	2.02	07
1.06	1.06.2	06	04			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun		Terwujudnya penyusunan laporan keuangan akhir tahun			XX	X	01	2.02	09
1.06	1.06.2	06	05			Penyusunan program kerja SKPD	Tersusunnya Program kerja SKPD (Renja, RKA, DPA, Revisi Renstra)	Penyusunan Program dan kegiatan perangkat dalam dokumen perencanaan	Tersusunnya Program kerja SKPD (Renja, RKA, DPA, Revisi Renstra)	Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya penyusunan Program kerja SKPD (Renja, RKA, DPA, Revisi Renstra)		Terwujudnya penyusunan Program kerja SKPD (Renja, RKA, DPA, Revisi Renstra)			XX	X	01	2.01	02
						Monitoring, Evaluasi program kegiatan SKPD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi program kegiatan SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi program kegiatan SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi program kegiatan SKPD		Terwujudnya Monitoring, Evaluasi program kegiatan SKPD			XX	X	01	2.01	05
1.06	1.06.2	03				PROGRAM PENINGKATAN APARATUR	Meningkatnya Disiplin aparatur					Program penunjang urusan pemerintah daerah								
1.06	1.06.2	03	03			Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan		Terwujudnya pengadaan pakaian kerja lapangan			XX	X	01	2.04	03

KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
1.06	1.06.2	03			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		Terwujudnya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			XX	X	01	2.04	05
					PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Tersedianya data dan informasi bencana yang akurat					Program penanggulangan bencana	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan pelaksanaan rehabilitasi	Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan	1	05	03		
					Penyusunan peta rawan bencana menggunakan data satelit	Tersedianya peta rawan bencana menggunakan data satelit	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya peta rawan bencana menggunakan data satelit	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya peta rawan bencana menggunakan data satelit		Terwujudnya pengadaan peta rawan bencana menggunakan data satelit			1	05	03	2.01	01
					PROGRAM DIKLAT APARATUR PENANGGULANGAN BENCANA	Tersedianya data dan informasi bencana yang akurat					Program penanggulangan bencana	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan pelaksanaan rehabilitasi	Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan					
					Sosialisasi pengelolaan bantuan logistik	Terselenggaranya sosialisasi pengelolaan bantuan logistik	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana	Terselenggaranya sosialisasi pengelolaan bantuan logistik	Pelayanan informasi rawan bencana	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan bantuan logistik		Terwujudnya pelaksanaan sosialisasi pengelolaan bantuan logistik			1	05	03	2.01	02
					Sosialisasi pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terselenggaranya Sosialisasi pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana	Terselenggaranya Sosialisasi pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Pelayanan informasi rawan bencana	Terlaksananya Sosialisasi pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		Terwujudnya pelaksanaan Sosialisasi pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			1	05	03	2.01	02
1.06	1.06.2	23			PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan pelaksanaan rehabilitasi					Program penanggulangan bencana	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan pelaksanaan rehabilitasi	Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan	1	05	03		
1.06	1.06.2	23	01		Pemantauan daerah wilayah rawan bencana	Tersedianya pemantauan daerah potensi rawan bencana	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya pemantauan daerah potensi rawan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Terlaksananya pemantauan daerah potensi rawan bencana		Terwujudnya pemantauan daerah potensi rawan bencana			1	05	03	2.02	01
1.06	1.06.2	23			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada kondisi prabencana	Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada kondisi prabencana		Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada kondisi prabencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada kondisi prabencana		Terwujudnya pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada kondisi prabencana			1	05	03	2.03	01
1.06	1.06.2	23			Pembentukan forum relawan TRC penanggulangan bencana	Terselenggaranya forum relawan TRC penanggulangan bencana	Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana	Terselenggaranya forum relawan TRC penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya forum relawan TRC penanggulangan bencana	Program penanggulangan bencana	Terwujudnya penyelenggaraan forum relawan TRC penanggulangan bencana			1	05	03	2.02	08
1.06	1.06.2	23			Pembentukan posko bencana	Terbentuknya posko bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terbentuknya posko bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya pembentukan posko bencana		Terwujudnya pembentukan posko bencana			1	05	03	2.03	02
1.06	1.06.2	24			PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan logistik bencana					Program penanggulangan bencana		Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan	1	05	03		
1.06	1.06.2	24	03		Pembentukan posko bencana dan Mobilisasi/operasionalisasi logistik bencana	Terbentuknya posko bencana dan Mobilisasi/operasionalisasi logistik bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya posko bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya pembentukan posko bencana		Terwujudnya pembentukan posko bencana			1	05	03	2.03	02
							Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Terlaksananya Mobilisasi/operasionalisasi logistik bencana		Terlaksananya Mobilisasi/operasionalisasi logistik bencana		Terwujudnya Mobilisasi/operasionalisasi logistik bencana			1	05	03	2.03	04
1.06	1.06.2	24	05		Penyiapan sapsras, peralatan dan logistik penanggulangan bencana daerah	Tersedianya Sapsras, peralatan dan logistik penanggulangan bencana daerah	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Tersedianya Sapsras, peralatan dan logistik penanggulangan bencana daerah	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Terlaksananya pengadaan Sapsras, peralatan dan logistik penanggulangan bencana daerah		Terwujudnya pengadaan Sapsras, peralatan dan logistik penanggulangan bencana daerah			1	05	03	2.03	04

KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
1.06	1.06.2	22			PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	Terwujudnya pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana					Program penanggulangan bencana		Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan	1	05	03		
1.06	1.06.2	22	01		Identifikasi Dan Verifikasi Kondisi Kerusakan Dan Kerugian Sarana dan Prasarana	Tersedianya identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana pasca bencana	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	Tersedianya identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana pasca bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana pasca bencana		Terwujudnya pelaksanaan identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana pasca bencana			1	05	03	2.02	01
1.06	1.06.2	22	02		Penyusunan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terselenggaranya penyusunan rancangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		Terselenggaranya penyusunan rancangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		Terlaksananya penyusunan rancangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		Terwujudnya penyusunan rancangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana			1	05	03	2.02	01
1.06	1.06.2	22			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		Terwujudnya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana			1	05	03	2.02	01
1.06	1.06.2	22			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan rehabilitasi & rekonstruksi	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Administrasi Umum	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Terwujudnya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	XX	X	XX	X	01		
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN																			
3.03	01	06	04	Urusan Pemerintahan Pilihan	Pertanian				Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas TPHP yang baik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dengan baik, efektif, efisien dan akuntabel	Pertanian	Urusan Pemerintahan Daerah	x	xx	01.02	01	
					Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD	Terperuhnya kebutuhan dokumen perencanaan	Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen Perencanaan	Terperuhnya kebutuhan dokumen perencanaan	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas TPHP yang baik					x	xx	01.02	01	02
3.03	01	06	05		Penyusunan Program kerja SKPD	Terperuhnya dokumen renja sebagai acuan pedoman bagi SKPD	Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen Perencanaan	Terperuhnya dokumen renja sebagai acuan pedoman bagi SKPD	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas TPHP yang baik					x	xx	01.02	01	02
3.03	01	16	03		Pengumpulan dan Pengelolaan Statistik Pertanian	Terperuhnya data statistik pertanian tanaman pangan hortikultura berupa :	Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen Perencanaan	Terperuhnya data statistik pertanian tanaman pangan hortikultura berupa :	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas TPHP yang baik					x	xx	01.02	01	02
					Laporan berkala statistik pertanian			Laporan berkala statistik pertanian											
					Pertemuan koordinasi statistik pertanian TPH			Pertemuan koordinasi statistik pertanian TPH											
					Koordinasi statistik pertanian TPH			Koordinasi statistik pertanian TPH											
3.03	01	16	03		Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Terperuhnya informasi harga pasar ditingkat petani dan pengecer	Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen Perencanaan	Terperuhnya informasi harga pasar ditingkat petani dan pengecer	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas TPHP yang baik					x	xx	01.02	01	02
3.03	01	16	02		Penyusunan Database potensi produksi pangan	Terperuhnya data lahan komoditi tanaman pangan dan hortikultura	Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen Perencanaan	Terperuhnya data lahan komoditi tanaman pangan dan hortikultura	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas TPHP yang baik									
3.03	01	16	31		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monev dan pelaporan program/kegiatan pembangunan pertanian	Penyusunan Dokumen evaluasi perangkat daerah	Terlaksananya monev dan pelaporan program/kegiatan pembangunan pertanian	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tercapainya perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas TPHP yang baik					x	xx	01.02	01	03
					Pertemuan monev dan pelaporan program/kegiatan			Pertemuan monev dan pelaporan program/kegiatan											
					Survey CPCL kegiatan			Survey CPCL kegiatan											
3.03	01	01		Urusan Pemerintahan Pilihan	Pertanian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik		Administrasi Keuangan	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dengan baik, efektif, efisien dan akuntabel	Pertanian	Urusan Pemerintahan Daerah	x	xx	01.02	02	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya kesejahteraan para ASN	Administrasi Keuangan	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan					x	xx	01.02	02	01
3.03	01	06			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya pertanggung jawaban laporan kinerja dan keuangan SKPD													

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
3.03	01	06	01			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya laporan kinerja dan laporan pelaksanaan kegiatan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya laporan kinerja dan laporan pelaksanaan kegiatan	Administrasi Keuangan	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan					x	xx	01.02	02	06
3.03	01	06	02			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terwujudnya laporan pertanggung jawaban keuangan semesteran	Penyusunan Pelaporan Keuangan bulanan/Semesteran	Terwujudnya laporan pertanggung jawaban keuangan bulanan/semesteran	Administrasi Keuangan	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan					x	xx	01.02	02	07
3.03	01	06	03			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terpenuhinya laporan pertanggung jawaban keuangan akhir tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terpenuhinya laporan pertanggung jawaban keuangan akhir tahun	Administrasi Keuangan	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan					x	xx	01.02	02	09
										Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dengan baik, efektif, efisien dan akuntabel	Pertanian	Urusan Pemerintahan Daerah	x	xx	01.02	03	
3.03	01	01	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	02
3.03	01	01	06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Perpanjangan STNK dan KIR Kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perpanjangan STNK dan KIR Kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	06
3.03	01	01	07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan dan laporan keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan dan laporan keuangan	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	07
3.03	01	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	08
3.03	01	01	09			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	09
3.03	01	01	19			Penatausahaan kesekretariatan OPD	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya ATK	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	10
								Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan							x	xx	01.02	03	11
								Penyediaan makanan dan minuman kantor	Tersedianya makan dan minum kantor							x	xx	01.02	03	17
3.03	01	01	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	12
3.03	01	01	14			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya pelayanan kebersihan kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya pelayanan kebersihan kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	14
3.03	01	01	15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	15
3.03	01	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	18
3.03	01	02				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur													
3.03	01	02	05			Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional roda 2 dan roda 4	Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional roda 2 dan roda 4	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	20
3.03	01	02	07			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	22
3.03	01	02	09			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	24
3.03	01	02	10			Pengadaan Mebelaur	Tersedianya mebeleur kantor	Pengadaan Mebelaur	Tersedianya mebeleur kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	25
3.03	01	02	22			Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	28
3.03	01	02	23			Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/mobil jabatan	Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/mobil jabatan	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	29
3.03	01	02	24			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	30
3.03	01	02	26			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	
3.03	01	02	28			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	34
3.03	01	02	41			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	37
3.03	01	02	41			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	Administrasi Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi umum					x	xx	01.02	03	38

KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
3.03	01	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya disiplin para aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dengan baik, efektif, efisien dan akuntabel			x	xx	01.02	04	
3.03	01	03	01		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur dinas TPHP	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur dinas TPHP	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya disiplin para aparatur					x	xx	01.02	04	02
3.03	01	03	02		Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Terwujudnya keseragaman pakaian aparatur	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Terwujudnya keseragaman pakaian aparatur pada hari hari tertentu	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya disiplin para aparatur					x	xx	01.02	04	05
3.03	01	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sumber daya Aparatur Sipil Negara			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya disiplin para aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dengan baik, efektif, efisien dan akuntabel			x	xx	01.02	04	
3.03	01	05	01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terwujudnya Pegawai yang terampil dan siap pakai	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terwujudnya Pegawai yang terampil dan siap pakai	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya disiplin para aparatur					x	xx	01.02	04	09
3.03	01	05	02		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Untuk meningkatkan pengetahuan aparatur tentang petunjuk teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Untuk meningkatkan pengetahuan aparatur tentang petunjuk teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya disiplin para aparatur					x	xx	01.02	04	10
3.03	01	05	03		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan teknis barang dan jasa serta keuangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan teknis barang dan jasa serta keuangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya disiplin para aparatur					x	xx	01.02	04	11
											Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Meningkatnya produksi, produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	Pertanian	Urusan Pemerintahan Daerah	3	27.2	02		
									pengawasan Penggunaan sarana pertanian	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pupuk					3	27.2	02	01	01
3.03	01	16	22		Peningkatan Mutu Keamanan Pangan	Terwujudnya peningkatan mutu keamanan pangan	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	Terwujudnya pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	pengawasan Penggunaan sarana pertanian	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pupuk					3	27.2	02	01	01
3.03	01	29	2		Penerapan pembudidayaan sesuai GAP Tembakau	Terlaksananya peningkatan produksi tembakau dataran tinggi melalui pertanaman GAP	Pengawasan Penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	Terlaksananya peningkatan produksi tembakau dataran tinggi melalui pertanaman GAP	pengawasan Penggunaan sarana pertanian	Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pertanian					3	27.2	02	01	01
3.03	01	19	03		Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Tersedianya bibit unggul perkebunan	Pengawasan Penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	Tersedianya bibit unggul perkebunan							3	27.2	02	01	01
						Kakao 2 Ha		Kakao 2 Ha											
						Lada : 0,5 Ha		Lada : 0,5 Ha											
						Cengkeh : 0,5 Ha		Cengkeh : 0,5 Ha											
						Kelapa : 5 Ha		Kelapa : 5 Ha											
3.03	01	18	06		Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern bercocok Tanam	Tersedianya Varietas unggul baru dan peningkatan potensi hasil reduksi pengembangan padi tipe baru	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	pengawasan Penggunaan sarana pertanian	Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pertanian					3	27.2	02	01	02
3.03	01	16	09		Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Mengoptimalkan pekarangan untuk pertanaman pangan (sayuran)	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Mengoptimalkan pekarangan untuk pertanaman pangan (sayuran)	pengawasan Penggunaan sarana pertanian	Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pertanian					3	27.2	02	01	02
3.03	01	16	12		Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Terlaksananya bimbingan teknis pengolahan hasil sebanyak 25 kali	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Terlaksananya bimbingan teknis pengolahan hasil sebanyak 25 kali	pengawasan Penggunaan sarana pertanian	Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pertanian					3	27.2	02	01	02
						Terbinanya KTN dan KWT dengan pengolahan hasil sebanyak 25 Klp		Terbinanya KTN dan KWT dengan pengolahan hasil sebanyak 25 Klp											
						Tersedianya informasi pengolahan hasil komoditi tanaman pangan dan hortikultura 10 Kec		Tersedianya informasi pengolahan hasil komoditi tanaman pangan dan hortikultura 10 Kec											

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
							Bertambahnya jumlah petani yang terampil dalam pengolahan sebanyak 500 orang		Bertambahnya jumlah petani yang terampil dalam pengolahan sebanyak 500 orang											
							Berkurangnya tingkat kehilangan hasil komoditi tanaman pangan dan hortikultura		Berkurangnya tingkat kehilangan hasil komoditi tanaman pangan dan hortikultura											
3.03	01	27	01			Dukungan Sarana dan Prasarana Komoditi Perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman perkebunan :	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman perkebunan :	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pertanian					3	27.2	02	01	02
							Lada		Lada											
							Kakao		Kakao											
							Kopi Robusta		Kopi Robusta											
							Kopi Arabika		Kopi Arabika											
							Kelapa Dalam		Kelapa Dalam											
							Kelapa Hibrida		Kelapa Hibrida											
							Cengkeh		Cengkeh											
							Jambu Mete		Jambu Mete											
							Kapas		Kapas											
3.03	01	28	01			Pengembangan Pengolahan Hasil pertanian/perkebunan	Terlaksananya bimbingan peningkatan nilai tambah hasil produksi komoditas perkebunan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Terlaksananya bimbingan peningkatan nilai tambah hasil produksi komoditas perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pertanian					3	27.2	02	01	02
							Meningkatnya jumlah dan jenis produk olahan komoditi perkebunan		Meningkatnya jumlah dan jenis produk olahan komoditi perkebunan											
3.03	01	29	01			Penanganan panen dan pasca panen bahan baku	Tersedianya alat pasca panen tembakau	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Tersedianya alat pasca panen tembakau	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pertanian					3	27.2	02	01	02
							Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis petani tembakau		Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis petani tembakau											
							Pengadaan rumah fermentasi		Pengadaan rumah fermentasi											
3.03	01	18	01			Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna	Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis masing-masing 1 angkatan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis masing-masing 1 angkatan	pengawasan Penggunaan sarana pertanian	Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pertanian					3	27.2	02	01	02
							Terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		Terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna											
3.03	01	16	15			Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Terlaksananya pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Terlaksananya pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	pengawasan Penggunaan sarana pertanian	Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pertanian					3	27.2	02	01	02
3.03	01	16	17			Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering	Terbinanya kebun buah yang berdaya saing di kawasan sentra	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Terbinanya kebun buah yang berdaya saing di kawasan sentra	pengawasan Penggunaan sarana pertanian	Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pertanian					3	27.2	02	01	02
3.03	01	16	29			Peningkatan Produksi, Produktifitas, dan Mutu Produk Pertanian	Tercapainya peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk hasil pertanian	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Tercapainya peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk hasil pertanian	pengawasan Penggunaan sarana pertanian	Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pertanian					3	27.2	02	01	02
							Padi		Padi											
							Jagung		Jagung											
							kedelai		kedelai											
							kacang tanah		kacang tanah											
							kacang hijau		kacang hijau											
							ubi kayu		ubi kayu											
							ubi jalar		ubi jalar											
							Lada		Lada											
							Kakao		Kakao											
							Kopi		Kopi											
							Jambu Mete		Jambu Mete											
							Kapas		Kapas											
3.03	01	16	36			Pengembangan Tanaman Biofarmaka	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penangkar tanaman hias	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penangkar tanaman hias	Pengawasan Penggunaan sarana pertanian	Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pertanian					3	27.2	02	01	02
3.03	01	19				Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Terwujudnya kesejahteraan petani													
3.03	01	19	02			Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah sarana produksi pertanian/perkebunan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah sarana produksi pertanian/perkebunan	pengawasan Penggunaan sarana pertanian	Pertemuan koordinasi pemanfaatan alsintan					3	27.2	02	01	01
											Laporan ketersediaan dan kebutuhan alat dan mesin pertanian									

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
										Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya alsintan					3	27.2	02	02		
3.03	01	19	04			Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Terbinanya sertifikasi bibit unggul	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Terbinanya sertifikasi bibit unggul	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan SDG untuk ketersediaan pangan yang berkelanjutan					3	27.2	02	02	01	
							Tersedianya benih yang bersertifikat		Tersedianya benih yang bersertifikat												
3.03	01	19	07			Pengembangan Sayuran Dataran Tinggi dan Rendah	Terlaksananya pengembangan sayuran organik di kawasan sentra	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/tanaman	Terlaksananya pengembangan sayuran organik di kawasan sentra	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan SDG untuk ketersediaan pangan yang berkelanjutan					3	27.2	02	02		
3.03	01	16	33			Pengembangan Teknologi Budidaya Kacang-kacangan dan umbian	Tersedianya saprodi dan benih bibit komoditas kacang-kacangan dan umbian	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/tanaman	Tersedianya saprodi dan benih bibit komoditas kacang-kacangan dan umbian	Pengelolaan sumber daya genetik SDG hewan tumbuhan mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan SDG untuk ketersediaan pangan yang berkelanjutan					3	27.2	02	02	01	
3.03	01	27				Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas tanaman perkebunan Berkelanjutan	Meningkatnya produktifitas tanaman perkebunan									3	27.2	02	02	01	
3.03	01	28				Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Meningkatnya pasca panen dan pemasaran hasil														
3.03	01	29				Program Peningkatan kualitas bahan baku industri tembakau	Tersedianya bahan baku industri tembakau dengan kualitas yang sesuai standar yang telah ditetapkan														
3.03	01	16	37			Pembinaan Penangkar Hortikultura	Meningkatnya kemampuan penangkar sehingga mengasihkan bibit yang bermutu	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman	Meningkatnya kemampuan penangkar sehingga mengasihkan bibit yang bermutu	Pengelolaan sumber daya genetik SDG hewan tumbuhan mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan SDG untuk ketersediaan pangan yang berkelanjutan					3	27.2	02	02	01	
							Terbinanya penangkar tanaman		Terbinanya penangkar tanaman												
3.03	01	17				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian TPHP	Terciptanya kemitraan usaha dengan pihak ketiga														
3.03	01	18				Program Peningkatan dan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Pengetahuan Petani dalam Penerapan teknologi yang berwawasan Ramah Lingkungan														
3.03	01	16				Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian	Meningkatnya produksi, produktivitas untuk mendukung ketahanan pangan														
3.03	01	16	20			Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan	Terlaksananya kegiatan pengembangan perbenihan/perbibit	Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Terlaksananya kegiatan pengembangan perbenihan/perbibit	Pengelolaan sumber daya genetik SDG hewan tumbuhan mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan SDG untuk ketersediaan pangan yang berkelanjutan					3	27.2	02	02	02	
							Meningkatnya kebutuhan benih padi		Meningkatnya kebutuhan benih padi												
3.03	01	16	34			Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Jagung	Tersedianya benih/bibit jagung dan sarana penunjang	Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Tersedianya benih/bibit jagung dan sarana penunjang	Pengelolaan sumber daya genetik SDG hewan tumbuhan mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan SDG untuk ketersediaan pangan yang berkelanjutan					3	27.2	02	02	02	
										Pembangunan prasarana pertanian	Tersedianya sumber-sumber air	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Meningkatnya produksi produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	Pertanian	Urusan Pemerintahan Daerah	3	27.3	02	02		

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
3.03	01	16	24			Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan	Terlaksananya pembangunan/rehab, irigasi tersier, pengembangan perbaikan sumber sumber air (irigas air tanah, dalam/dangkal), Embung, dam, parit, long storage, pompanisasi, bendung kecil), jalan usaha tani/jalan produksi pertanian	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Terwujudnya Pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Pembangunan prasarana pertanian						3	27.3	02	02	01
								Pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Embung	Terwujudnya pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan embung	Pembangunan prasarana pertanian						3	27.3	02	02	02
								Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Terwujudnya pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan jalan usaha tani	Pembangunan prasarana pertanian						3	27.3	02	02	03
								Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit	Terwujudnya pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan dam parit	Pembangunan prasarana pertanian						3	27.3	02	02	04
								Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan long storage	Terwujudnya pembangunan long storage	Pembangunan prasarana pertanian						3	27.3	02	02	05
								Pembangunan dan rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air	Terwujudnya pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	Pembangunan prasarana pertanian						3	27.3	02	02	06
								Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluhan di kecamatan serta sarana pendukungnya	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan balai penyuluhan pertanian di kecamatan	Pembangunan prasarana pertanian						3	27.3	02	02	08
3.03	01	25				Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya keterampilan kelembagaan P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi													
3.03	01	25	05			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air	Tersedianya pengelolaan sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan dalam program pembangunan pertanian	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Terlaksananya luas areal pelayanan jaringan irigasi usaha tani untuk menambah luas areal persawahan	Pembangunan prasarana pertanian	Terlaksananya luas areal pelayanan jaringan irigasi usaha tani					3	27.3	02	02	01
								Pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Embung	Tersedianya air baku untuk kebutuhan lahan pertanian untuk peningkatan produktivitas	Pembangunan prasarana pertanian	tersedianya air baku untuk kebutuhan lahan pertanian					3	27.3	02	02	02
								Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	tersedianya jalan pengangkutan sarana produksi dan mobilitas untuk mendekatkan pasar	Pembangunan prasarana pertanian	tersedianya jalan penagngkutan sarana produksi dan mobilitas					3	27.3	02	02	03
								Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit	Tersedianya bangunan untuk membendung meninggikan muka air dan melimpahkan air secara langsung pada saat volume air melebihi kapasitas tampungan dan juga berfungsi sebagai pintu air	Pembangunan prasarana pertanian	Tersedianya sumber-sumber air					3	27.3	02	02	04
								Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan long storage	Terlaksananya penyediaan air baku luapan dari sungai	Pembangunan prasarana pertanian	Tersedianya sumber-sumber air					3	27.3	02	02	05
								Pembangunan dan rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air	Terlaksananya pemeliharaan pintu air sebagai pembagi air	Pembangunan prasarana pertanian	Tersedianya sumber-sumber air					3	27.3	02	02	06
								Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Terlaksananya pembangunan sumber-sumber air (rehabilitasi irigasi jaringan irigasi tersier, pengembangan embung, pemompaan dan dam parit)	Pembangunan prasarana pertanian	Terlaksananya pembangunan sumber-sumber air (rehabilitasi irigasi jaringan irigasi tersier, pengembangan embung, pemompaan dan dam parit)					3	27.3	02	02	09
												Program pengendalian dan penganggulangan bencana pertanian	Terlaksananya pengamatan hama dan penyakit	Pertanian	Urusan Pemerintahan Daerah	3	27.5			
										Pengendalian penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	Tersedianya pengendalian dan penganggulangan bencana pertanian	Program pengendalian dan penganggulangan bencana pertanian	Terlaksananya pertemuan/sosialisasi asuransi usaha tani padi (AUTP) serta meningkatnya minat petani padi untuk mengikuti asuransi usahatani padi (AUTP)	Pertanian	Urusan Pemerintahan Daerah	3	27.5	2	01	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
										Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan						3	27.5	2	01	01
3.03	01	16	22			Peningkatan Mutu Keamanan Pangan	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Terwujudnya penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Pengendalian penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	Tersedianya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian					3	27.5	2	01	02
3.03	01	15				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Berkembangnya pembinaan terhadap UPJA dan kelompok tani					Program penyuluhan pertanian	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan peningkatan produktivitas agribisnis komoditas unggulan di Kabupaten ulukumba	Pertanian	Urusan Pemerintahan Daerah	3	27.7			
3.03	01	20				Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan	Meningkatnya sumber daya manusia penyuluh pertanian dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani dan gapoktan menuju satu desa satu penyuluh			Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Tersusunnya programa penyuluhan pertanian					3	27.7	07.02	01	
3.03	01	20	01			Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Tersusunnya materi penyuluhan subsektor yang disebar luaskan melalui Cyber Ekstension	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	Tersusunnya materi penyuluhan subsektor yang disebar luaskan melalui Cyber Ekstension	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Tersusunnya rencana kerja tahunan (RKT)					3	27.7	07.02	01	01
							Terlaksananya magang / pelatihan bagi penyuluh		Terlaksananya magang / pelatihan bagi penyuluh		Tersusunnya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi									
							Adanya penyuluh yang mendapat sertifikasi		Adanya penyuluh yang mendapat sertifikasi		Terdeseminasi informasi teknologi pertanian									
							Adanya petani berprestasi dan penyuluh teladan		Adanya petani berprestasi dan penyuluh teladan		Tumbuh kembangnya kebudayaan dan kemandirian petani pelaku utama dan pelaku usaha									
							Meningkatnya Kapasitas Program kerja Penyuluh pertanian		Meningkatnya Kapasitas Program kerja Penyuluh pertanian											
3.03	01	20	02			Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluh penerima BOP	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah penyuluh penerima BOP	Pelaksanaan penyuluhan pertanian						3	27.7	07.02	01	01
							Terpenuhinya satu desa satu penyuluh satu komoditi		Terpenuhinya satu desa satu penyuluh satu komoditi											
						Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Meningkatnya kemampuan lembaga petani	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan desa	Meningkatnya kemampuan lembaga petani							3	27.7	07.02	01	02
						Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terlaksananya pembinaan/pelatihan dan pelaku agribisnis	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan desa	Terlaksananya pembinaan/pelatihan dan pelaku agribisnis							3	27.7	07.02	01	02
						Penyuluhan dan pendampingan Petani Pelaku Agribisnis	Tersedianya peta potensi serangan OPT komoditi perkebunan UPT wil. I & II	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan desa	Tersedianya peta potensi serangan OPT komoditi perkebunan UPT wil. I & II							3	27.7	07.02	01	02
							Terlaksananya pelatihan magang untuk petani	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan desa	Terlaksananya pelatihan magang untuk petani											
3.03	01	17	074			Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian	Terselenggaranya kegiatan promosi produk unggulan Kabupaten Bulukumba	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Terselenggaranya kegiatan promosi produk unggulan Kabupaten Bulukumba	Pelaksanaan penyuluhan pertanian						3	27.7	07.02	01	03

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN															
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																												
			Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan						Program Penunjang Urusan Pemerintah	Terpenuhinya program penunjang urusan pemerintah			X	XX	1													
2,17			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					Administrasi Umum	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah				X	XX	1	2.03												
2,17	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik																							
2,17	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Prasarana telpon & listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Prasarana telpon & listrik						X	XX	1	2.03	2											
2,17	1	1	6	Penyediaan Jasa Pempl. Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perizinan kendaraan dinas/ operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perizinan kendaraan dinas/ operasional						X	XX	1	2.03	30											
2,17	1	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penatausahaan administrasi keuangan yang akuntabel	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penatausahaan administrasi keuangan yang akuntabel						X	XX	1	2.03	7											
2,17	1	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor						X	XX	1	2.03	8											
2,17	1	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik						X	XX	1	2.03	12											
2,17	1	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi						X	XX	1	2.03	18											
2,17	1	1	19	Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Penatausahaan kesekretariatan dalam menunjang Tupoksi OPD																							
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Kesertariatan						X	XX	1	2.03	10											
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga						X	XX	1	2.03	14											
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat Rutin						X	XX	1	2.03	17											
2,17	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur																							
2,17	1	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan Gedung kantor yang memadai	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya peralatan Gedung kantor yang memadai						X	XX	1	2.03	24											
2,17	1	2	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor yang memadai	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya mebeleur kantor yang memadai																					
2,17	1	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan gedung kantor						X	XX	1	2.03	28											
2,17	1	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional						X	XX	1	2.03	30											
2,17	1	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik						X	XX	1	2.03	34											
2,17	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan kinerja aparatur				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			X	XX	1	2.04												
2,17	1	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya bimtek penulisan jurnal inovasi daerah	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya bimtek penulisan jurnal inovasi daerah						X	XX	1	2.04	9											
2,17	1	5	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang Undangan	Menciptakan tenaga aparatur yang handal dan berkualitas	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Menciptakan tenaga aparatur yang handal dan berkualitas						X	XX	1	2.04	11											
2,17	1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem administrasi pelaporan dan capaian kinerja keuangan yang lebih baik				Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Yang Akuntabel			X	XX	1	2.02												
2,17	1	6	1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD						X	XX	1	2.02	6											
2,17	1	6	4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan realisasi fisik dan keuangan akhir tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan realisasi fisik dan keuangan akhir tahun						X	XX	1	2.02	9											
2,17	1	6	5	Penyusunan Program Kerja SKPD	Perencanaan program dan kegiatan OPD				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			X	XX	1	2.01												
						Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja OPD						X	XX	1	2.01	1											
						Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Program dan Kegiatan OPD Yang Akan Dilaksanakan						X	XX	1	2.01	2											

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN								
2,17	1	6	7		Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD	Monev dan pelaporan realisasi program dan kegiatan di kecamatan															
						Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terbirinya Dokumen Evaluasi OPD							X	XX	1	2.01	3			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan							X	XX	1	2.01	4			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monev dan laporan realisasi program dan kegiatan di kecamatan							X	XX	1	2.01	5			
2,17	1	15		Perpustakaan		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan							Perpustakaan	Wajib bukan pelayanan dasar	2	23	2	2.01			
								Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten bulukumba	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten bulukumba	Program pembinaan perpustakaan	Terlaksananya program pembinaan perpustakaan			2	23	2	2.01	2			
2,17	1	15	1			Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2	23	2	2.01	2	
									Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	Masyarakat yang gemar membaca	Program pembinaan perpustakaan	Tenaga perpustakaan terampil, perpustakaan terstandarisasi dan koleksi bahan perpustakaan siap layan, masyarakat yang literat	Perpustakaan	Wajib bukan pelayanan dasar	2	23	2	2.02			
								Pembangunan dan Pemeliharaan sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum							2	23	2	2.02	2	
										Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten bulukumba	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten bulukumba	Program pembinaan perpustakaan	Terlaksananya program pembinaan perpustakaan	Perpustakaan	Wajib bukan pelayanan dasar	2	23	2	2.01		
2,17	1	15	2			Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Perpustakaan Umum Daerah	Tersedianya Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2	23	2	2.01	3	
								Pengembangan Bahan Pustaka	Tersedianya Koleksi Bahan Perpustakaan							2	23	2	2.01	8	
								Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terkelola dan terlaksananya Pengembangan Bahan Pustaka							2	23	2	2.01	9	
										Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pelestarian naskah daerah kabupaten/kota	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Naskah nasional dan naskah kuno			2	23	3	2.02		
								Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Tersedianya Koleksi Budaya Etnis Nusantara							2	23	3	2.02	1	
										Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pembinaan perpustakaan, tersedianya koleksi bahan perpustakaan	Program pembinaan perpustakaan	Tenaga perpustakaan terampil, perpustakaan terstandarisasi dan koleksi bahan perpustakaan siap layan, masyarakat yang literat			2	23	2	2.01		
2,17	1	15	3			Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Desa dan Kantor	Terlaksananya bimbingan teknis pengelola perpustakaan	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan yang Terampil							2	23	2	2.01	6	
										Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Naskah nasional dan naskah kuno			2	23	3	2.01		
2,17	1	15	4			Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Buku	Terpeliharanya sarana pengelolaan dan penyimpanan buku	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Terciptanya Peran Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno							2	23	3	2.01	1	
										Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pelestarian naskah daerah kabupaten/kota	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Naskah nasional dan naskah kuno			2	23	3	2.02		
										Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terkelolanya Koleksi Budaya Etnis Nusantara					2	23	3	2.02	2	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
										Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pembinaan perpustakaan, tersedianya koleksi bahan perpustakaan	Program pembinaan perpustakaan	Tenaga perpustakaan terampil, perpustakaan terstandarisasi dan koleksi bahan perpustakaan siap layan, masyarakat yang literait			2	23	2	2.01	
2,17	1	15	5			Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Tersedianya Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan							2	23	2	2.01	4
								Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Khusus							2	23	2	2.01	5
								Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya database Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan							2	23	2	2.01	10
2,17	1	15	6			Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya baca	Terlaksananya minat dan budaya baca masyarakat	Pengembangan Rujukan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Perpustakaan Rujukan							2	23	2	2.01	7
										Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	Masyarakat yang gemar membaca	Program pembinaan perpustakaan	Tenaga perpustakaan terampil, perpustakaan terstandarisasi dan koleksi bahan perpustakaan siap layan, masyarakat yang literait			2	23	2	2.02	
								Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat							2	23	2	2.02	1
								Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Tersedianya Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum							2	23	2	2.02	3
								Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Program Literasi Berbasis Inklusi Sosial							2	23	2	2.02	4
								Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah/Provinsi	Terpilihnya Duta Baca Darah Kabupaten/Kota							2	23	2	2.02	5
2,17	1	23		Perpustakaan		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi				Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pembinaan perpustakaan, tersedianya koleksi bahan perpustakaan	Program pembinaan perpustakaan	Tenaga perpustakaan terampil, perpustakaan terstandarisasi dan koleksi bahan perpustakaan siap layan, masyarakat yang literait			2	23	2	2.01	
2,17	1	23	2			Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan publik	Terlaksananya pelayanan otomasi jaringan informasi perpustakaan	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik							2	23	2	2.01	1
2,17	1	16		Kearsipan		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah				Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Terlaksananya perlindungan dan penyelamatan arsip	Kearsipan	Wajib bukan pelayanan dasar	2	24	3	2.04	
2,17	1	16	3			Penduplikasian Dokumen Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika	Tersedianya Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip							2	24	3	2.04	2
2,17	1	19				Program Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan				Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan					2	24	3	2.03	
2,17	1	19	1			Pembinaan Kearsipan OPD dan Pengembangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pembinaan Kearsipan OPD dan Pengembangan Pemerintah Daerah	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Arsip Pemekaran Daerah Kecamatan	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Arsip Pemekaran Daerah Kecamatan							2	24	3	2.03	3

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
								Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan							2	24	3	2.03	4
										Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota					2	24	3	2.04	
2.17	1	19	2			Penyusunan Regulasi / Pedoman Kearsipan	Tersedianya Regulasi/Pedoman Kearsipan	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip							2	24	3	2.04	2
2.17	1	20				Program Perlindungan dan Pengawasan Arsip Vital				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Program pengelolaan arsip	Terlaksananya pengelolaan arsip			2	24	2	2.02	
2.17	1	20	1			Identifikasi Arsip Vital	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Arsip Vital	Akuisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Terlaksananya Akuisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis							2	24	2	2.02	2
2.17	1	23				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Program perijinan penggunaan arsip	Terlaksananya perijinan penggunaan arsip			2	24	4	2.01	
2.17	1	23	1			Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Terlaksananya Pelayanan Otomasi Jaringan Informasi Perpustakaan	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup							2	24	4	2.01	1
						Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Desa dan Kantor	Terlaksananya bimbingan teknis pengelola perpustakaan	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Tersedianya Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup							2	24	4	2.01	2
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																				
4.07				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan								Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Terpenuhnya program penunjang urusan pemerintahan daerah			X	XX	01		
4.07	06			Badan Penelitian dan Pengembangan						Administrasi Umum	Terpenuhnya Administrasi Umum Perangkat Daerah					X	XX	01	2.03	
4.07	06	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik													
4.07	06	01	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Prasarana telpon & listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Prasarana telpon & listrik							X	XX	01	2.03	02
4.07	06	01	06			Penyediaan Jasa Pempl. Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perizinan kendaraan dinas/ operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perizinan kendaraan dinas/ operasional							X	XX	01	2.03	30
4.07	06	01	07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penatausahaan administrasi keuangan yang akuntabel	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penatausahaan administrasi keuangan yang akuntabel							X	XX	01	2.03	07
4.07	06	01	08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor							X	XX	01	2.03	08
4.07	06	01	09			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik							X	XX	01	2.03	12
4.07	06	01	18			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi							X	XX	1	2.03	18
4.07	06	01	21			Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Penatausahaan kesekretariatan dalam menunjang Tupoksi OPD													
								Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Kesertariatan							X	XX	01	2.03	10
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga							X	XX	01	2.03	14
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat Rutin							X	XX	01	2.03	17
4.07	06	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur													
4.07	06	02	09			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan Gedung kantor yang memadai	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan Gedung kantor yang memadai							X	XX	01	2.03	24

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
								Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Mewujudkan perencanaan litbang melalui kajian dan pengembangan Lingkungan Hidup Kebun Raya Kawasan Mangrove							5	05	02	2.03	07	
								Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Mewujudkan perencanaan litbang melalui Pengembangan Kajian Budidaya Hidroponik Di wilayah Pesisir							5	05	02	2.03	08	
4.07	06	35	02			Penelitian dan pengembangan wilayah fisik dan prasarana wilayah	- Mewujudkan perencanaan litbang melalui Pengembangan wilayah dan perasarana berbasis inovasi - Mewujudkan perencanaan litbang melalui Pengembangan Kajian Kondisi Wilayah Pesisir Dan Laut Terhadap Kegiatan Budidaya Tambak Dan Rumput Laut														
								Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Mewujudkan perencanaan litbang melalui Pengembangan wilayah dan perasarana berbasis inovasi							5	05	02	2.03	09	
								Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan							5	05	02	2.03	10	
								Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman							5	05	02	2.03	11	
								Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan							5	05	02	2.03	12	
4.07	06	35	03			Penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi	- Mewujudkan perencanaan litbang melalui Pengembangan kajian inovasi berbasis riset - Mewujudkan perencanaan litbang melalui Pengembangan Kajian Budidaya Hidroponik Di wilayah Pesisir - Studi kelayakan industri rumah tangga gula merah kelapa, di kecamatan herlang														
								Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika							5	05	02	2.03	13	
										Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi					5	05	02	2.04		
								Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Mewujudkan perencanaan litbang melalui Pengembangan kajian inovasi berbasis riset, Studi kelayakan industri rumah tangga gula merah kelapa, di kecamatan herlang							5	05	02	2.04	01	
								Uji Coba dan penerapan Rancangan Bagun / Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan	Terlaksananya Uji Coba dan penerapan Rancangan Bagun / Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan							5	05	02	2.04	02	
								Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	Terlaksananya uji coba dan penerapan rancangan bagun / model replikasi dan inovasi dibidang difusi inovasi dan penerapan							5	05	02	2.04	03	
								Fasilitasi Hak kekayaan intelektual	Terlaksananya fasilitasi hak kekayaan intelektual							5	05	02	2.04	05	
4.07	06	36				Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatnya potensi SDM khususnya dibidang pengembangan inovasi														
4.07	06	36	02			Sosialisasi dan Publikasi Hasil Kajian Penelitian	Penyediaan jurnal piniisi research sebagai media berkala hasil kajian penelitian	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbang	Tersedianya Data dan Jurnal sistem inovasi daerah							5	05	02	2.04	04	
4.07	06	37				Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya pengkajian Penyelenggaraan Pemerintahan														

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4.07	06	37	02			Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Mewujudkan pelaksanaan kajian perundang-undangan daerah			Penelitian pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan	Terpenuhinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					5	05	02	2.01	
								Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Mewujudkan pelaksanaan kajian perundang-undangan daerah							5	05	02	2.01	12
								Perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan	Terlaksananya perumusan rekomendasi atas penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan							5	05	02	2.01	13
								Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Terlaksananya Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan							5	05	02	2.01	14
								Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual							5	05	02	2.01	11
4.07	06	38				Program Pengembangan Pengkaji Ekonomi	Terlaksananya pengkajian Ekonomi Berbasis Teknologi													
4.07	06	38	01			Peningkatan Kapasitas Perencanaan Litbang Isu-isu Strategis Bidang Ekonomi	Mewujudkan perencanaan litbang melalui isu-isu strategis bidang ekonomi			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terpenuhinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					5	05	02	2.03	
								Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							5	05	02	2.03	01
								Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Mewujudkan perencanaan litbang melalui isu-isu strategis bidang ekonomi							5	05	02	2.03	02
								Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan							5	05	02	2.03	03
4.07	06	39				Program Pengembangan Sosial, Budaya, dan Masyarakat Desa	Terlaksananya pengkajian pengembangan SDM			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terpenuhinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					5	05	02	2.02	
4.07	06	39	01			Penelitian Kondisi Sosial, Budaya Masyarakat Kota dan Desa	- Mewujudkan perencanaan litbang melalui Penelitian Kondisi Sosial, Budaya Masyarakat Kota dan Desa - Mewujudkan perencanaan litbang melalui Kajian Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembuatan Kopi Jahe Celup	Penelitian dan pengembangan Aspek-aspek sosial	Mewujudkan perencanaan litbang melalui Penelitian Kondisi Sosial, Budaya Masyarakat Kota dan Desa							5	05	02	2.02	01
								Penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya Penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak							5	05	02	2.02	02
								Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	Mewujudkan perencanaan litbang melalui Kajian Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembuatan Kopi Jahe Celup							5	05	02	2.02	03
								Penelitian dan pengembangan kepemudaan dan olahraga	Terlaksananya Penelitian dan pengembangan kepemudaan dan olahraga							5	05	02	2.02	04
								Penelitian dan pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan pengembangan Pariwisata							5	05	02	2.02	05
								Penelitian dan pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan pengembangan Kesehatan							5	05	02	2.02	06

KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																			
2.12	01	01			Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah							
2.12	01	01	01		Penyediaan jasa surat menyurat.	Jasa pelayanan surat menyurat dan materai 6000 dan 3000	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa pelayanan surat menyurat dan materai 6000 dan 3000	Administrasi Umum	Tesedianya jasa surat menyurat, Listrik Telepon, jasa pemeliharaan kendaraan, administrasi keuangan, kebersihan kantor, ATK, makan dan minum, cetak dan penggandaan, komponen instalasi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan, rapat koordinasi.									
2.12	01	01	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik											
2.12	01	01	06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Pemeliharaan & Perizinan kendaraan Dinas Operasional; 2 unit kend roda 4 dan 6 unit kend roda 2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Pemeliharaan & Perizinan kendaraan Dinas Operasional; 2 unit kend roda 4 dan 6 unit kend roda 2											
2.12	01	01	07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Pelayanan Administrasi keuangan; honor operator, arsipatoris, sopir	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Pelayanan Administrasi keuangan; honor operator, arsipatoris, sopir											
2.12	01	01	08		penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan kantor											
2.12	01	01	21		Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Jasa Kesekretariatan Kantor; ATK, barang cetakan & penggandaan, makan minum tamu/rapat	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor											
2.12	01	01	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor											
2.12	01	01	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga											
2.12	01				penyediaan bahan bacaan dan aperaturan perundang undangan	Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	penyediaan bahan bacaan dan aperaturan perundang undangan	Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan											
2.12	01	01	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah											
2.12	01	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.						Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur							
2.12	01	02	05		pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda Dua	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2											
2.12	01	02	07		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor											
2.12	01	02	09		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor											
2.12	01	02	10		Pengadaan Meubeler Kantor	Tersedianya mebeleur Kantor	Pengadaan Meubeler Kantor	Tersedianya mebeleur Kantor											
2.12	01	02	22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor											
2.12	01	02	24		Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya rutin/berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya rutin/berkala Mobil Jabatan											
2.12	01				Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional											
2.12	01	02	26		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor											
2.12	01	02	28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatn Gedung Kantor Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatn Gedung Kantor Kantor											
2.12	01				Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor	Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor	Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor	Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor											
2.12	01	06			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Meningkatnya disiplin Aparatur						Meningkatnya kapasitas SDM ASN							
2.12	01	06	01		Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pegawai DPMPSTSP mengikuti Latpim III	Terlaksananya Latpim	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Terlaksananya Latpim, bimtek serta pengadaan mesin absensi kantor									
2.12	01	06	03		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya BinteK implemtasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya BinteK implemtasi Peraturan Perundang-undangan											
2.12	01				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur													

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
2.12	01	1				Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi (finger print)	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi (finger print)				Meningkatnya disiplin ASN							
2.12	01	06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Meningkatnya Sistem pelaporan capaian kinerja							
										Administrasi Keuangan	Tersedianya Laporan capaian kinerja, laporan keuangan dan Gaji serta tunjangan ASN									
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN											
2.12	01	06	01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen SAKIP dan Laporan Capaian Kinerja											
2.12	01	06	02			penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran											
2.12	01	06	04			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun											
2.12	01	06	05			Penyusunan Program Kerja SKPD	Tersusunnya Program Kerja dan Monev OPD	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Program Kerja dan Monev OPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
								Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat daerah	Dokumen Renstra dan Renja											
								Penyusunan dokumen Evaluasi Perangkat daerah	Dokumen SAKIP											
2.12	01	15				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terwujudnya promosi dan kerjasama investasi					Program Promosi Penanaman Modal	Terwujudnya penyelenggaraan promosi investasi			2	18	3		
2.12	01	15	6			Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Penanaman Modal	Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / kota	Terkoordinasinya Perencanaan dan terlaksananya Promosi Potensi Unggulan Daerah Kab. Bulukumba	Program Promosi Penanaman Modal				2	18	3	2.01	1
2.12	01	15	10			Penyelenggaraan Pameran Investasi	Ikut sertanya Dalam Pameran Kab, Prop, dan Nasinal serta Rapat Koordinasi	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten / kota	Ikut sertanya Dalam Pameran Kab, Prop, dan Nasinal serta Rapat Koordinasi	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / kota	Terkoordinasinya Perencanaan dan terlaksananya Promosi Potensi Unggulan Daerah Kab. Bulukumba	Program Promosi Penanaman Modal				2	18	3	2.01	2
2.12	01	16				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Relisasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN dan PMA					Program pengembangan iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN dan PMA			2	18	2		
2.12	01	16	1			Peningkatan kapasitas sistem dan SDM dalam rangka pemanfaatan SIPID	Jumlah sistem informasi berbasis website		Tersedianya sistem informasi berbasis website											
2.12	01	16	2			Temu Usaha	Jumlah kegiatan temu usaha		Terlaksananya temu usaha											
2.12	01	16	3			Penyusunan mitra bisnis potensial Bulukumba	Jumlah buku mengenai data dan informasi mitra lokal bulukumba		Tersedianya buku mengenai data dan informasi mitra lokal bulukumba											
2.12	01	16	11			Kajian Pemetaan potensi daerah	Jumlah buku kajian/peta	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten / kota	Tersedianya hasil Kajian potensi daerah	Pembuatan peta potensi investasi daerah kabupaten / kota	Penyajian informasi potensi unggulan Kab. Bulukumba	Program pengembangan iklim Penanaman Modal				2	18	2	2.02	2
2.12	01	16	13			Penyusunan Peraturan bupati di bidang penanaman modal	Jumlah peraturan bupati tentang penanaman modal	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Tersedianya peraturan bupati tentang penanaman modal	Penerapan pemberian Fasilitas/Insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Penerapan kebijakan investasi penanaman modal	Program pengembangan iklim Penanaman Modal				2	18	2	2.01	1
								Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal		Penerapan pemberian Fasilitas/Insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota		Program pengembangan iklim Penanaman Modal				2	18	2	2.01	2

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
2.12	01	16	14			Penyediaan sarana dan prasarana promosi investasi	Jumlah paket sarana dan prasarana promosi pameran yang disiapkan		Penyediaan sarana dan prasarana promosi pameran yang disiapkan											
2.12	01	16	5			Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Berfungsinya Website Kab. Bulukumba	Penyusunan Rencana Umum penanaman modal daerah kabupaten / kota	Tersedianya Buku penyusunan informasi Penanaman Modal	Pembuatan peta potensi investasi daerah kabupaten / kota	Penyajian informasi penanaman modal	Program pengembangan iklim Penanaman Modal				2	18	2	2.02	1
2.12	01	16				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Relisasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN dan PMA					Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN dan PMA			2	18	5		
2.12	01	16	10			Pemantauan perkembangan penanaman modal	Terlaksananya evaluasi LKPM dan CD tata cara pengisian LKPM	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Penyusunan buku LKPM dan CD tata cara pengisian LKPM	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Tertib administrasi pelayanan investasi	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal				2	18	5	2.01	1
2.12	01	16	17			Pembinaan Perusahaan penanaman modal	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi PMDN/PMA serta koordinasi dengan IPMK dan BKPM	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya Sosialisasi tata cara pengisian LKPM	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Tertibnya pelaporan LKPM	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal				2	18	5	2.01	2
2.12	01	16	12			Pengawasan ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya pengawasan perusahaan PMDN/PMA sesuai ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya pengawasan Perusahaan PMA/PMDN sesuai ketentuan pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Penanaman modal sesuai ketentuan	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal				2	18	5	2.01	3
2.12	01	18				Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Program Pelayanan Perizinan					Program pelayan penanaman modal	Meningkatnya pelayanan perizinan			2	18	4		
2.12	01	18	1			Sosialisasi dan penyuluhan pelayanan Perizinan	Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan pelayanan perizinan	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan Nonperizinan penanaman modal	Sosialisasi dan Penyuluhan Pelayanan Perizinan	Pelayanan perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Tertibnya perda tentang pelayanan perizinan	Program pelayan penanaman modal				2	18	4	2.01	2
2.12	01	18	2			Peningkatan koordinasi dan kerjasama Dibidang Perizinan	Terlaksananya koordinasi pelayanan perizinan	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Pengolahan Berkas Perizinan	Pelayanan perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Terciptanya pelayanan perizinan yang prima	Program pelayan penanaman modal				2	18	4	2.01	4
2.12	01	18	3			Penyederhanaan Prosedur dan Peningkatan Pelayanan Perizinan	1. Pelayanan Pemohon Izin 2. Laporan Hasil Pengendalian Proses Permohonan Izin 3. Penyediaan Sarana Pendukung administrasi Perizinan	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1. Pelayanan Penerbitan Perizinan 2. pengendalian Proses permohonan izin	Pelayanan perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Tertib administrasi pelayanan perizinan	Program pelayan penanaman modal				2	18	4	2.01	1
2.12	01	18	5			Pengawasan dan Pengaduan Perizinan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengaduan Perizinan	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan Nonperizinan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengaduan Perizinan	Pelayanan perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Terwujudnya Pelayanan Perizinan sesuai ketentuan	Program pelayan penanaman modal				2	18	4	2.01	3
2.12	01	18				Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Program Pelayanan Perizinan					Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Meningkatnya pelayanan perizinan			2	18	6		

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
2.12	01	18	4			Penyusunan Data Base Perizinan	Terlaksananya penyusunan data base	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Tersedianya buku Data Base Perizinan	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten / kota	Penyajian Informasi Data Base Perizinan	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Meningkatnya pelayanan perizinan			2	18	6	2.01	1	
DINAS TENAGA KERJA																					
2.01	01	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran					Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.01	01	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnyajasa komunikasi dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia dan terbayarkannya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Administrasi Umum	Tersedianya jasa surat menyurat, listrik, air, jasa pemeliharaan kendaraan, jasa pelayanan administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, ATK, makan-minum, cetak dan penggandaan, komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, mebeleur, serta pemeliharaan berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor, Pemeliharaan kendaraan operasional						X	XX	01	2.03	02
2.01	01	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan penggunaan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya Legalitas dan penggunaan Kendaraan dinas	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas roda dua dan roda empat												06
2.01	01	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya dokumen administrasi keuangan yang tertib.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan dan tersedianya jasa operator komputer								X	XX	01	2.03	07
2.01	01	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor								X	XX	01	2.03	08
2.01	01	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor dan tersedianya jaringan listrik								X	XX	01	2.03	12
2.01	01	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terwujudnya Kesepahaman dan Koodinasi antar Provinsi dan Pusat	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya tugas, rapat koordinasi dan konsultasi								X	XX	01	2.03	18
2.01	01	01	19			Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Penyediaan ATK, cetak, makan minum rapat dan tamu, umbul-umbul tiang dan tersedianya jasa tenaga non PNSD (Tenaga kontrak, operator dan sopir eselon II)	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor (ATK)								X	XX	01	2.03	10
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan, spanduk dan penggandaan								X	XX	01	2.03	11
								Penyediaan makanan dan minuman	makan - minum tamu dan rapat								X	XX	01	2.03	17
			02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											X	XX	01	2.03	
2.01	01	02	05			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tesedianya kendaraan dinas opsional bagi pengelola, abrang, aset dan staf anatr surat	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat								X	XX	01	2.03	20
2.01	01	02	-			Pengadaan kendaraan dinas mobil jabatan	Tersedianya kendaraan dinas Mobil jabatan														
2.01	01	02	07			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terpenuhnya perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan grdung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (AC), Lemari Es, Dispenser								X	XX	01	2.03	22
2.01	01	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor								X	XX	01	2.03	24
2.01	01	02	10			Pengadaan mebeleur	Meningkatnya pelayanan perkantoran	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubeler Kantor								X	XX	01	2.03	25
2.01	01	02	-			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terciptanya Kondisi ruangan/tempat kerja dan halaman kkantor yang nyaman indah dan asri	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpelihara dan terawatnya tempat kerja								X	XX	01	2.03	28
2.01	01	02	23			Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Terawatnya kondisi mobil jabatan														
2.01	01	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terciptanya kelancaran Operasional kantor	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional SKPD								X	XX	01	2.03	30

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
2.01	01	02	28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terwujudnya optimalisasi penggunaan peralatan kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpelihara peralatan kantor							X	XX	01	2.03	34
2.01	01	2				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terciptanya Kondisi kantor yang aman yang aman	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya shelter yang memadai bagi PMKS							X	XX	01	2.03	38
2.01	01	05				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.										X	XX	01	2.03	
2.01	01	05	05			Pelatihan dan Pendidikan Struktural	terlaskannya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedia kontribusi pelatihan dan pendidikan struktural											09
2.01	01	05	03			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya kontribusi Bimtek.	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya kontribusi Bimtek.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan dan kontribusi diklat pejabat struktural		Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur			X	XX	01	2.04	11
2.01	01	06				Program peningkatan pengetahuan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja, laporan keuangan, dan ketersediaan gaji dan tunjangan ASN		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			X	XX	01	2.02	01
2.01	01	06	01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersediannya LAKIP,RENJA dan Laporan Bulanan SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan Capaian Kinerja, Bulanan, Triwulan dan Semesteran							X	XX	01	2.02	06
2.01	01	06	04			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun							X	XX	01	2.02	09
		06	07			Monitoring, evaluasi program kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kab. Bulukumba	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP, RKA, DPA, SPM, Renstra, Renja dan pelaksanaan monev kegiatan SKPD		Meningkatnya evaluasi kinerja perangkat daerah			X	XX	01	2.01	03
		08	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi program dan kegiatan (monev)							X	XX	01	2.01	05
								Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	RKA, DPA, dan SPM							X	XX	01	2.01	03
								Penyusunan Renstra & Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja							X	XX	01	2.01	01
												Program Perencanaan Tenaga Kerja	Terlaksananya Program perencanaan tenaga kerja			2	07			
								Penyusunan Rencana Tenaga Kerja makro	terlaksananya penyusunan rencana tenaga kerja makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja makro	terlaksananya penyusunan rencana tenaga kerja makro	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Terlaksananya Program perencanaan tenaga kerja			X	XX	02	2.01	01
								Penyusunan Rencana Tenaga Kerja mikro	terlaksananya penyusunan rencana tenaga kerja mikro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja mikro	terlaksananya penyusunan rencana tenaga kerja mikro	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Terlaksananya Program perencanaan tenaga kerja			X	XX	01	2.01	02
2.01	01	16				Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja														
2.01	01	15	05			Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi pencari kerja/Remaja putus sekolah									2	07	03	2.01	
2.01	01	16				Program peningkatan kesempatan kerja										2	07	04		
2.01	01	16	02			Penyebarnya Informasi Bursa Tenaga Kerja	Terwujudnya sosialisasi bursa tenaga kerja dan terwujudnya job fair bulukumba 2021			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan antar kerja Daerah kab/kota	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja			2	07	04	2.01	
2.01	01	16	04			Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Meningkatnya pengetahuan bagi calon tenaga kerja indonesia dan pengguna jasa tenaga kerja indonesia swasta (PJT/KIS)	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Tersedianya sumber daya pelayanan antar	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan antar kerja Daerah kab/kota	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja			2	07	04	2.01	01
2.01	01	16	05			Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Meningkatnya pemahaman tentang manajemen usaha dan tersedianya sarana usaha bagi kelompok usaha baru	Pelayanan antar Kerja	Terlaksananya Pelayanan antar kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan antar kerja Daerah kab/kota	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja			2	07	04	2.01	02
2.01	01	16				Pendayagunaan para penyandang cacat	Meningkatnya pengetahuan bagi para penyandang disabilitas	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari kerja	terlaksananya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan antar kerja Daerah kab/kota	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja			2	07	04	2.01	03
2.01	01					Sosialisasi Pengiriman TKI Keluar Negeri	Meningkatnya Pengirim TKI Keluar Negeri	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan	tersenggarahnya unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan antar kerja Daerah kab/kota	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja			2	07	04	2.01	04

KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
2.01	01				Bimbingan Informasi Pasar Kerja	Terwujudnya Peningkatan Kesempatan Kerja			Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah LPTKS yang mempunyai izin	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja			2	07	04	2.02	
					Terfasilitasinya pengiriman CPMI/PMI dan dilaksanakannya pelatihan/bimtek dan sosialisasi bagi CPMI		Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Terbentuknya Penyediaan Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah LPTKS yang mempunyai izin	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja			2	07	04	2.02	01
					Sosialisasi bagi perusahaan yang mempekerjakan TKA dan Monitoring Pekerja Asing di Perusahaan		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	terbentuknya Tim pengawasan dan pengendalian LPTKS dan BKK	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah LPTKS yang mempunyai izin	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja			2	07	04	2.02	02
									Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah cakupan informasi bagi pencari kerja untuk menyerap tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja			2	07	04	2.03	
					Terwujudnya sosialisasi bursa tenaga kerja		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Terwujudnya pemeliharaan aplikasi BIOMETRI SISCOTKLN dan Aplikasi AYO KITA KERJA serta terwujudnya pelayanan publik bidang ketenagakerjaan	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah cakupan informasi bagi pencari kerja untuk menyerap tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di Kabupaten/Kota			2	07	04	2.03	01
							Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	terlaksananya pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah cakupan informasi bagi pencari kerja untuk menyerap tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di Kabupaten/Kota			2	07	04	2.03	02
							Job Fair/Bursa Kerja	jumlah informasi bursa tenaga kerja yang disebarluaskan melalui job/bair pameran bursa kerja serta terwujudnya sosialisasi informasi bursa tenaga kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah cakupan informasi bagi pencari kerja untuk menyerap tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di Kabupaten/Kota			2	07	04	2.03	03
									Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	berkurangnya kasus/permasalahan pekerja migran indonesia (pra dan purna penempatan)	Program Penempatan Tenaga Kerja	Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di Kabupaten/Kota			2	07	04	2.04	
					Meningkatnya Pengirimn TKI Keluar Negeri		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	jumlah pelayanan CPMI/PMI dan terlaksananya pelatihan /bimtek/sosialisasi	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	berkurangnya kasus/permasalahan pekerja migran indonesia (pra dan purna penempatan)	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja	Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja	urusan Pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	07	04	2.04	01
							Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	tersedianya penyediaan layanan terpadu bagi calon pekerja migran	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	berkurangnya kasus/permasalahan pekerja migran indonesia (pra dan purna penempatan)	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja			2	07	04	2.04	02
							Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	terbentuknya desa/kelurahan desmigratif di seluruh indonesia	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	berkurangnya kasus/permasalahan pekerja migran indonesia (pra dan purna penempatan)	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja			2	07	04	2.04	03
									Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKA yang mempunyai izin kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja			2	07	04	2.05	

KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
						Koordinasi dan Sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Data TKA yang bekerja di kabupaten Bulukumba	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKA yang mempunyai izin kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja			2	07	04	2.05	01
2.01	01			Program Pembinaan Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja.						Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya Layanan peserta Pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan							
								Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Tersedianya Layanan peserta Pelatihan berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya Layanan peserta Pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan			2	07	03		
2.01	01			Pembinaan Program Pelatihan dan Pemagangan	Meningkatkan pelatihan dan pemagangan bagi pencari kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Tersedianya Pelayanan peserta Pelatihan	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Tersedianya Layanan peserta Pelatihan berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya Layanan peserta Pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan			2	07	03	2.01	01
2.01	01			Pembinaan Standarisasi dan Kompetensi Tenaga Kerja	Meningkatnya Kemampuan Tenaga Kerja untuk menghadapi Persaingan kerja	Koodinasi Lintas Lembaga dan Kerja sam dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasaranan lemabga pelatihan kerja	Tersedianya kerjasama lintas lembaga dengan sektor swasta dalam pelaksanaan pelatihan	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Terciptanya Kerja sama antara lemaga dan selestor swasta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya Layanan peserta Pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan			2	07	03	2.01	02
2.01	01			Pembinaan Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Kerja	Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan dibidang Tenaga Kerja			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terciptanya Kondisi kerja yang kondusit melalui sosialisasi/pelatihan	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Terciptanya Kerja sama antara lemaga dan selestor swasta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan			2	07	03	2.02	
2.01	01			Pendidikan dan Pelatihan Manajem Pengelolaan Usaha bagi Wirausaha Baru	Meningkatnya Pemahaman Manajemen Pengelolaan Usaha Bagi Wirausaha baru	pembinaan lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Tersedianya Sumber daya berbasis kompetensi	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terciptanya Kondisi kerja yang kondusit melalui sosialisasi/pelatihan	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Terciptanya Kerja sama antara lemaga dan selestor swasta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan			2	07	03	2.02	01
								Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan kerja	Tersedianya Pelayanan Perizinan dan pendaftaran LPK yang tepat ceper dan lebih baik	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Terciptanya Kerja sama antara lemaga dan selestor swasta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan			2	07	03	2.03	
						Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Meningkatnya Pelayanan Izin dan Pendaftaran LPK yang lebih cepat	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan kerja	Tersedianya Pelayanan Perizinan dan pendaftaran LPK yang tepat ceper dan lebih baik	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Terciptanya Kerja sama antara lemaga dan selestor swasta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan			2	07	03	2.03	01
								Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Tersedianya Layanan Bimbingan Komunikasi pada usaha kecil	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Terciptanya Kerja sama antara lemaga dan selestor swasta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan			2	07	03	2.04	
						Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	tersedianya tenaga kerja yang terampil yang mengelola usahanya melalui pelatihan kewirausahaan	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Tersedianya Layanan Bimbingan Komunikasi pada usaha kecil	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Terciptanya Kerja sama antara lemaga dan selestor swasta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan			2	07	03	2.04	01
								Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya tenaga kerja terampil dalam mengelola usahanya melalui pelatihan menejemen pengelola usaha bagi wirausaha baru	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Terciptanya Kerja sama antara lemaga dan selestor swasta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan			2	07	03	2.05	
						Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para pencari kerja dalam menemuhui pasar kerja	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Program Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja	Terciptanya Kerja sama antara lemaga dan selestor swasta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan			2	07	03	2.05	01
2.01	01	17		Program perlindungan & pengembangan lembaga ketenagakerjaan						Program Hubungan Industrial	mendorong penmasyaratan dan meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja			2	07	05		

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN			
										pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya berpersai dalam satu daerah kab/kota	Terwujudnya pemahanan berbagai peraturan pelaksanaan ketenagkerjaan	Program Hubungan Industrial	mendorong pemasyaratan dan meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja						
2.01	01	17	02			Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terwujudnya Hubungan yang Harmonis dan Perlindungan Jasmani Sosial dan tenaga Kerja	pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	terwujudnya sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagkerjaan dan terwujudnya sosialisasi pengupahan	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya berpersai dalam satu daerah kab/kota	Terwujudnya pemahanan berbagai peraturan pelaksanaan ketenagkerjaan	Program Hubungan Industrial	mendorong pemasyaratan dan meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja			2	07	05	2.01
						Tim pendataan, Pemantauan dan Pembinaan Perusahaan dan Serikat Pekerja	Terwujudnya penyesuaian UMP dan terciptanya Bipartit	pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	terwujudnya sosialisasi PKB (perjanjian kerja bersama)	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya berpersai dalam satu daerah kab/kota	Terwujudnya pemahanan berbagai peraturan pelaksanaan ketenagkerjaan	Program Hubungan Industrial	mendorong pemasyaratan dan meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja			2	07	05	2.01 02
2.01	01	17	04			Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Terwujudnya berbagai aturan yang terkait dengan ketenagakerjaan	penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana Hubungan industrial jaminan sosial tenaga kerja	terlaksananya pembinaan pendataan dan pemantuan diperusahaan serta terwujudnya sosialisasi jaminan sosial	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya berpersai dalam satu daerah kab/kota	Terwujudnya pemahanan berbagai peraturan pelaksanaan ketenagkerjaan	Program Hubungan Industrial	mendorong pemasyaratan dan meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja			2	07	05	2.01 03
						Sosialisasi Budaya K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)	Terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman efesensi dan aman untuk mendorong produktivitas para pekerja dan terwujudnya budaya K3 pada usia dini.			Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak kepentingan di satu kab/kota	berkurangnya dan terselasainya perselisihan hubungan industrial perusahaan	Program Hubungan Industrial	mendorong pemasyaratan dan meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja			2	07	05	2.02
						Tim Pemantauan dan Pembinaan K3	Terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman dan berkurangnya kecelakaan kerja.	Pencegahan perselisihan Hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak kepentingan di satu kab/kota	terlaksananya sosialisasi bipartit dan tripartit serta pembinaan dan pemantauan hubungan industrial di perusahaan - terwujudnya sosialisasi pengupahan dan jaminan sosial	pengesahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota	berkurangnya dan terselasainya perselisihan hubungan industrial perusahaan	Program Hubungan Industrial	mendorong pemasyaratan dan meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja			2	07	05	2.02 01
						Sosialisasi PKB (Perjanjian Kerja Bersama)	Terwujudnya pemahaman akan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi pekerja.	penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 satu daerah Kab/kota	terlaksananya pertemuan bipartit dan tripartit dan PHI	pengesahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota	berkurangnya dan terselasainya perselisihan hubungan industrial perusahaan	Program Hubungan Industrial	mendorong pemasyaratan dan meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja			2	07	05	2.02 02

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
2.01	01	17	09			Sosialisasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terwujudnya penyesuaian UMP dan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi ke anggota pada organisasi pengusaha, edukasi dan kalifikasi serikat pekerja buruh serta nonafiliasi	terwujudnya sosialisasi pembentukan serikat pekerja di perusahaan dan terbentuknya tim verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha fedens dan konfedensi serikat pekrja	pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota	berkurangnya dan terselasainya perselisihan hubungan industrial perusahaan	Program Hubungan Industrial	mendorong pemasyaratan dan meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja			2	07	05	2.02	03	
						Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan khusus non formal (pekerja mandiri)	Terciptanya kesadaran keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan	pelaksanaan operasional lembaga kerjasama Tripartit Daerah	terbentuknya forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan serta terwujudnya rapat tripartit dan pendataan pekerja dan pengusaha di perusahaan	pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota	berkurangnya dan terselasainya perselisihan hubungan industrial perusahaan	Program Hubungan Industrial	mendorong pemasyaratan dan meningkatnya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja			2	07	05	2.02	04	
						Sosialisasi dan Pembinaan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terbentuknya Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan														
BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
4.04	03	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keuangan	Unsur Penunjang Pemerintahan	5	02	01			
								Penyedia Jasa Surat- Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Administrasi Umum	Terlaksananya dmini/Admistrasi Umum					5	02	01	2.03	01	
4.04	03	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyedia Jasa Kominukasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Kominukasi,Sumber Daya Air dan Listrik							5	02	01	2.03	02	
4.04	03	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional							5	02	01	2.03	06	
4.04	03	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan							5	02	01	2.03	07	
							Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Bapenda					5	02	01	2.01	04	
							Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyiapan bahan Pelaksanaan Verifikasi	Tersedianya bahan Pelaksanaan Verifikasi							5	02	01	2.01	05	
								Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan					5	02	01	2.02	2	
4.04	03	01	08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya Administrasi Umum Bapenda					5	02	01	2.03	8	
4.04	03	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyedia Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor							5	02	01	2.03	12	
4.04	03	01	14			Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga							5	02	01	2.03	14	
4.04	03	01	15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							5	02	01	2.03	15	
4.04	03	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah.	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah.							5	02	01	2.03	18	
4.04	03	01	19			Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							5	02	01	2.03	13	
								Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS							5	02	01	2.03	04	
								Penyedia Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah							5	02	01	2.03	05	
								Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja							5	02	01	2.03	09	
								Penyedia Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor							5	02	01	2.03	10	
								Penyedia Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan							5	02	01	2.03	11	
								Penyedia Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman							5	02	01	2.03	17	
4.04	03	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Administrasi Umum	Terlaksananya Administrasi Umum Bapenda					5	02	01	2.03	20	
4.04	03	02	06			Pengadaan kendaraan dinas operasional	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor							5	02	01	2.03	22	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4.04	03	02	07			Pengadaan perlengkapan gedung	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	pengadaan peralatan gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung Kantor							5	02	01	2.03	24
4.04	03	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Mebeler	Tersedianya Mebeler Kantor							5	02	01	2.03	25
4.04	03	02	10			Pengadaan mebeleur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor							5	02	01	2.03	28
4.04	03	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional							5	02	01	2.03	40
4.04	03	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor							5	02	01	2.03	34
4.04	03	02	28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/berkala moubeler kantor	Terpeliharanya moubeler kantor							5	02	01	2.03	35
								Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor							5	02	01	2.03	38
4.04	03	02				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Tersedianya Mesin/ Kartu Absensi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						5	02	01	2.04	01
4.04	03	02				Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan							5	02	01	2.04	03
								Pendidikan dan pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Formal							5	02	01	2.04	09
4.04	03	05				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumbet Daya Aparatur	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan							5	02	01	2.04	10
4.04	03	05	01			Pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumbet Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan							5	02	01	2.04	11
4.04	03	05	03			Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumbet Daya Aparatur	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD	Administrasi Keuangan						5	02	01	2.02	06
								Penyusunan Lapparan Keuangan Bulanan/Semesteran	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran							5	02	01	2.02	07
4.04	03	06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran							5	02	01	2.02	08
4.04	03	06	01			penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD	Terlaksananya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun							5	02	01	2.02	09
							Terlaksananya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5	02	01	2.01	01
								Penyusunan Program dan Kegiatan perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan							5	02	01	2.01	02
4.04	03	06	04			penyusunan laporan keuangan akhir tahun		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah							5	02	01	2.01	03
4.04	03	06	05			penyusunan program kerja SKPD		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah							5	02	01	2.01	04
4.04	03	39				program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah			Program pengelolaan pendapatan Daerah			Terlaksananya Program pengelolaan pendapatan Daerah			5	02	04		
4.04	03	39	01			Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber Pendapatan Daerah		Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya pendataan wajib pajak dan Retribusi Daerah yang Optimal	Perencanaan pengembangan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah					5	02	04	2.02	02
4.04	03	39	03			Pemeliharaan Basis Data		Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersedianya Basis Data Pajak Daerah Yang Up to Date							5	02	04	2.02	09
4.04	03	39	04			Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah		Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pemungutan Retribusi Daerah							5	02	04	2.02	11

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4.04	03	39	06			Peningkatan Penerima Pajak Daerah		Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Perumusan standarisasi Kebijakan operasional dan penagihan pajak- pajak Daerah							5	02	04	2.02	03
4.04	03	39	08			Penyusunan Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah		Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kebijakan tentang Sistem Administrasi Pelayanan dan Tersusunnya Surat Ketetapan							5	02	04	2.02	04
4.04	03	39	09			Sosialisasi Peraturan perpajakan dan Retribusi Daerah		Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengkajian teknis bidang perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah							5	02	04	2.02	01
								Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi terhadap wajib pajak dan wajib pungut							5	02	04	2.02	05
4.04	03	39	10			Evaluasi Pengkajian PAD		Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Terlaksananya Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah							5	02	04	2.02	07
								Pemeriksaan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan, Pengawasan pajak dan Uji Petik							5	02	04	2.02	10
4.04	03	39	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana PBB P2		Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah (PBB) yang berbasis Teknologi Informasi							5	02	04	2.02	06
4.04	03	39	12			Pengelolaan Sitem Informasi Pendapatan Daerah		Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terwujudnya Penatausahaan, pembukuan, pelaporan dan rekonsiliasi PAD Sesuai Standar Akuntansi							5	02	04	2.02	08
4.04	03	39	13			Pendistribusian SPPT, Penagihan dan monitoring PBB														
4.04	03	39	14			Pengelolaan Sistem Informasi BPHTB														
4.04	03	39	15			Rekonsialisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah														
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																				
						PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas (%)					Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		XX	X	01				
04	03	21	14			Penyusunan dokumen perencanaan lingkup Bappeda	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, RKAP, DPA, DPAP, LAKIP, RKT Monitoring dan Evaluasi, Laporan Tahunan Lingkup Bappeda	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, RKA, RKAP, DPA, DPAP, LAKIP, RKT Monitoring dan Evaluasi, Laporan Tahunan Lingkup Bappeda	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Dokumen Renstra, Renja, RKA, RKAP, DPA, DPAP, LAKIP, RKT Monitoring dan Evaluasi, Laporan Tahunan Lingkup Bappeda		Terwujudnya Penyediaan Dokumen Renstra, Renja, RKA, RKAP, DPA, DPAP, LAKIP, RKT Monitoring dan Evaluasi, Laporan Tahunan Lingkup Bappeda			XX	01	2	01	02
						PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya sistem administrasi pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik (%)					Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		XX	X	01				
04	03	06	04			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Bappeda Kabupaten Bulukumba (Dok)	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Bappeda Kabupaten Bulukumba (Dok)	Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jumlah laporan keuangan akhir tahun Bappeda Kabupaten Bulukumba (Dok)		Terlaksananya Jumlah laporan keuangan akhir tahun Bappeda Kabupaten Bulukumba (Dok)			XX	01	2	02	09
						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik (%)					Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		XX	X	01				
04	03	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	Persen pelayanan jasa komunikasi dan listrik (%)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Administrasi Umum	Terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			XX	01	2	03	02
04	03	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Persen pelayanan jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional (%)	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Administrasi Umum	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional		Terwujudnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional			XX	01	2	03	06
04	03	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase pelayanan administrasi keuangan (%)	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan		Terwujudnya Jasa Administrasi Keuangan			XX	01	2	03	07

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Bappeda	Administrasi Umum	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Bappeda		Terwujudnya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Bappeda			XX	01	2	02	01	
04	03	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persen pelayanan jasa kebersihan kantor (%)	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor		Terwujudnya Jasa Kebersihan Kantor			XX	01	2	03	08
04	03	01	09			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persen pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja (%)	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Administrasi Umum	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Terwujudnya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			XX	01	2	03	09
04	03	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persen penyediaan jasa komponen instalasi listrik/penerangan kantor (%)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Terwujudnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			XX	01	2	03	12
04	03	01	14			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persen penyediaan peralatan rumah tangga (%)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Administrasi Umum	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Terwujudnya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			XX	01	2	03	14
04	03	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Persentase pelaksanaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (%)	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Administrasi Umum	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Terwujudnya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			XX	01	2	03	18
04	03	01	01			Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Persentase pelayanan jasa kesekretariatan Bappeda (%)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Umum	Terlaksananya Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terwujudnya Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat			XX	01	2	03	01
								Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor			XX	01	2	03	10
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terwujudnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			XX	01	2	03	11
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman	Administrasi Umum	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman		Terwujudnya Penyediaan Makanan dan Minuman			XX	01	2	03	17
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kerja aparatur (%)					Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		XX	X	01				
04	03	02	07			Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah AC baru yang diadakan (unit)	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Terwujudnya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			XX	01	2	03	22
04	03	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Komputer (PC/Laptop) dan Printer baru yang diadakan (unit)	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			XX	01	2	03	24
04	03	02	10			Pengadaan Mebeleur	Jumlah Peralatan baru lainnya (Meja dan Kursi) yang diadakan (unit)	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Pengadaan Mebeleur	Administrasi Umum	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur		Terwujudnya Pengadaan Mebeleur			XX	01	2	03	25
04	03	02	22			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara (unit)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			XX	01	2	03	28
04	03	02	24			Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara kondisinya (unit)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			XX	01	2	03	30
04	03	02	26			Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara kondisinya (unit)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			XX	01	2	03	32
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terwujudnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			XX	01	2	03	13
04	03	02	42			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi, Jumlah Rehabilitasi Aula Kantor (unit), Jumlah Bangunan Gudang Arsip Kantor yang dibangun (unit)	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		Terwujudnya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			XX	01	2	03	39
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia aparatur Bappeda (%)					Program Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah		XX	X	01				

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN						
04	03	05	01			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparat perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan administrasi, teknis dan fungsional. (orang)	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur		Terwujudnya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur			XX	01	2	04	09		
						Program perencanaan pembangunan daerah						PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Perencanaan , Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Infrastruktur Kab.Bulukumba secara terpadu dan bersinerji			5	01	02				
4	03	21	20			Kajian Lingkungan Hidup Strategis	- Koordinasi dan Sinkronisasi program perencanaan sumber daya Alam.			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	- tersedianya data dan informasi Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup					5	01	02	01			
							- Koordinasi dan Sinkronisasi program perencanaan sumber Daya Air/Pengairan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	- Koordinasi dan Sinkronisasi program perencanaan sumber daya Air, Daerah Aliran Sungai/Pantai/Rawa								5	01	02	01	01	
							- Pembinaan Perencanaan dan Pengelolaan Bencana	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Tersedianya Data Informasi Sumber daya air/Pengairan, Daerah Aliran Sungai/Pantai/Rawa								5	01	02	01	02	
							Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Alam	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi sumber daya Air, Daerah Aliran Sungai/Pantai/Rawa serta program PLKSDA- BM, PISP								5	01	02	01	03	
							- Tersedianya Data Informasi Sumber daya air/Pengairan			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	- tersedianya data dan informasi kebinamargaan (Aplikasi SIJanTan), perhubungan,komunikasi dan informatika						5	01	02	02		
							- Pembinaan Perencanaan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/Pantai/Rawa	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	-Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang kebinamargaan, perhubungan,komunikasi dan informatika								5	01	02	02	01	
							Koordinasi Penyusunan Dokumen KLHS 2021-2026	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	-Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan, perhubungan,komunikasi dan informatika								5	01	02	02	02	
							- Rapat Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi program PLKSDA- BM	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	-Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi bidang kebinamargaan, perhubungan,komunikasi dan informatika								5	01	02	02	03	
							- Sosialisasi Penanganan Lahan Kritis.			Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan	tersedianya data dan informasi keciptakarya dan Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Bulukumba						5	01	02	03		
											Tersedianya Data dan Informasi penanganan Sanitasi Permukiman (Strategi Sanitasi Sekolah(SSS) dan Strategi sanitasi kabupaten SSK), RPIJM dan RAD AMPL)											

KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4	03	19			Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar					terlaksananya data pada sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SiPPa.SIMPKP, SIMPBP, SIINSAN, SIMSPAM, DARLING, KRISNA dan NAWASIS)									
4	03	19	13		Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah	-Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah Kab.Bulukumba				Tercapainya sasaran Penyelesaian sengketa lahan dan batas wilayah,									
						-Terlaksananya Koordinasi Percepatan satu peta (One Map Policy) Kab.Bulukumba				Terlaksananya keterpaduan program Strategis kabupaten, Provinsi dan Pusat									
						- Terpuhinya kelengkapan untuk pelaksanaan Persetujuan Subtansi di Kementerian ATR				Terlaksananya Sinkronisasi dan sinergitas Program Dana Alokasi Khusus (DAK)									
						- Terpuhinya persyaratan untuk melakukan pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi RTRW		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	-Terlaksananya Percepatan satu peta (One Map Policy) Kab.Bulukumba						5	01	02	03	01
						-Terlaksananya koordinasi Penataan Ruang Daerah				-Terlaksananya koordinasi Penataan Ruang Daerah									
						- Terlaksananya koordinasi Sasaran Program Prasarana Wilayah Kab.Bulukumba				Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Sanitasi Permukiman Perkotaan/perdesaan dan pesisir									
4	03	19	14		Koordinasi Perencanaan Program Pengembangan Sumber Daya Pengairan dan Pembinaan Program PISP					Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan kegiatan Jalan Lingkungan perkotaan/perdesaan , drainase Lingkungan perkotaan/perdesaan dan Pesisir									
4	03	19	20		Koordinasi Perencanaan Pertanahan, Perumahan dan Permukiman	Terlaksananya Perencanaan dan Pembinaan Program Air minum dan Sanitasi kabupaten (PAMSIMAS dan Perlindungan Sumber Mata Air)				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Program KOTAKU,PAMSIMAS DAN SANIMAS KOTA HILJAU									
						Terlaksananya Sosialisasi Desa dan Kabupaten Program Air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III)													
						Terlaksananya usulan Program Air minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS dan Perlindungan Sumber Mata Air)		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	- Terpuhinya kelengkapan untuk pelaksanaan Persetujuan Subtansi di Kementerian ATR						5	01	02	03	02
						Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Sanitasi Permukiman Berbasis Masyarakat				- Terpuhinya persyaratan untuk melakukan pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi RTRW									

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
							Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Sanitasi Permukiman Perkotaan dan perdesasaan			Tersedianya Data Kawasan Strategis Kabupaten Bulukumba (KSK) dan Tersedianya Data Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Bulukumba											
							Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Sanitasi Permukiman Perkotaan dan perdesasaan			Terlaksananya usulan Program Air minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS dan Perlindungan Sumber Mata Air)											
							Tersedianya Data dan Informasi penanganan Sanitasi Permukiman (Strategi Sanitasi Sekolah (SSS) dan Strategi sanitasi kabupaten SSK), RPLJM dan RAD AMPL)			*Tersedianya Data kebutuhan Lahan Pemerintah daerah dan penyelesaian sengketa tanah											
							Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Program drainase Perkotaan dan Pesisir														
							Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Program Jalan Lingkungan Perdesaan dan Pesisir														
							Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Program Ruang Terbuka Hijau ,RTH) perkotaan, perdesaan dan Pesisir		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	* Pembinaan Perencanaan dan Pengelolaan Bencana							5	01	02	03	03
							terlaksananya data pada sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPPa,SIMPKP, SIMPBP, SIINSAN, SIMSPAM, DARLING dan NAWASIS)			Monitoring Keberlanjutan Program Air minum Berbasis Masyarakat PAMSIMAS , SANIMAS, HSBGN dan BSPS											
							Tercapainya sasaran Penyelesaian sengketa lahan dan batas wilayah,														
							Tersedianya Data kebutuhan Lahan Pemerintah daerah														
							Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Program KOTAKU,PAMSIMAS DAN SANIMAS KOTA HIJAU														
							Monitoring Keberlanjutan Program Air minum Berbasis Masyarakat PAMSIMAS , SANIMAS dan HSBGN dan BSPS														
4	03	18					Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh														
4	03	18	01				Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			Tersedianya Data Kawasan Strategis Kabupaten Bulukumba (KSK)											
										Tersedianya Data Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Bulukumba											
										Terlaksananya keterpaduan program Strategis kabupaten, Provinsi dan Pusat											
							Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Bulukumba														
							Koordinasi dan Sinkronisasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK)														

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN						
						Program pengembangan data/ informasi	Terwujudnya perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat							Perencanaan	Unsur Penunjang Pemerintahan							
						Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Bulukumba	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Bulukumba	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen SIPD, Dokumen Profil Daerah, Dokumen Teknokratik RPJMD, serta terlaksananya Konsultasi Publik, Forum Gabungan OPD, Musrenbang RKPd, Verifikasi Renja OPD guna tersedianya Dokumen RKPd T.A. 2021	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat guna peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah									
						Penyusunan profil daerah	Jumlah buku profil Kabupaten Bulukumba	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah buku profil Kabupaten Bulukumba													
						Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah															
						Penyusunan Rancangan RPJMD	Dokumen Teknokratik RPJMD Kab. Bulukumba	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Kabupaten/Kota	Dokumen Teknokratik RPJMD Kab. Bulukumba													
						Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	tersedianya dokumen RKPd Kab. Bulukumba		Tersedianya dokumen RKPd Kab. Bulukumba													
							Terlaksananya konsultasi publik Ranwal RKPd		Terlaksananya konsultasi publik Ranwal RKPd													
							Terlaksananya verifikasi renja OPD		Terlaksananya verifikasi renja OPD													
							Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan													
							Terlaksananya Musrenbang RKPd		Terlaksananya Musrenbang RKPd													
							Terlaksananya forum gabungan OPD	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya forum gabungan OPD													
						Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD	Dokumen KLHS Teknokratik RPJMD	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Dokumen KLHS Teknokratik RPJMD													
						Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS Pokok dan Perubahan															
						Penyelenggaraan Pembangunan Tugas Pembantuan dan dekonsentrasi	Tersusunnya proposal, pelaksanaan dan Tugas Pembantuan dan dekonsentrasi	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya proposal, pelaksanaan dan Tugas Pembantuan dan dekonsentrasi	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Proposal dan Dokumen Pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan dan dekonsentrasi.											
							Tersedianya laporan tugas Pembantuan dan dekonsentrasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Tersedianya laporan tugas Pembantuan dan dekonsentrasi													
						Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Tersedianya dokumen hasil monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil monitoring pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen hasil monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, Dokumen Evaluasi RKPd, serta Dokumen LAKIP Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Perjanjian Kinerja							5	01	02	2.03	01
							Terlaksananya monitoring pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	Tersedianya Dokumen Hasil monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah terkait SPM									5	01	02	2.03	02
						Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd)	Tersedianya dokumen evaluasi RKPd	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi RKPd									5	01	02	2.03	03
						Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	tersedianya dokumen LAKIP Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	tersedianya dokumen LAKIP Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Perjanjian Kinerja									5	01	02	2.03	04

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4	03	4	03	01	15	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tersedianya data/ Informasi pembangunan daerah					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Perencanaan	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	02		
						Penyusunan Profil Daerah	Tersedianya buku profil daerah kabupaten Bulukumba	Pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah	Jumlah buku profil daerah kabupaten Bulukumba , Jumlah buku SIPD, jumlah data yang terkumpul dalam aplikasi SIPD	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan daerah					5	01	02	2.01	09
						Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya Data SIPD													
						Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Tersedianya laporan realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran daerah	Laporan realisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau perbulan dan persemester	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya perencanaan pendanaan pembangunan daerah					5	01	02	2.02	02
4	03	4	03	01	22	PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Tersedianya perencanaan pembangunan ekonomi					PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Terlaksananya perencanaan perekonomian dan sumber daya alam			5	01	04		
						Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang penanaman modal dan tenaga kerja	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah rapat/pertemuan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang perekonomian	Fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Terlaksananya Fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian					5	01	04	2.01	01
								Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang perekonomian	Jumlah Asistensi/konsultasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang perekonomian							5	01	04	2.01	02
								pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang perekonomian	Jumlah Monitoring dan evaluasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang perekonomian							5	01	04	2.01	03
4	03	4	03	01	22	PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI														
						Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang ekonomi kreatif	Jumlah rapat/pertemuan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang ekonomi kreatif	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang Ekonomi Kreatif					5	01	04	2.02	01
								Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang ekonomi kreatif	Jumlah Asistensi/konsultasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang ekonomi kreatif							5	01	04	2.02	02
								Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang ekonomi kreatif	Jumlah Monitoring dan evaluasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang ekonomi kreatif							5	01	04	2.02	03
4	03	4	03	01	22	PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI														
						Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan		Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah rapat/pertemuan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang sumber daya alam	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang Sumber daya alam					5	01	04	2.03	01

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
								Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Asistensi/konsultasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang sumber daya alam							5	01	04	2.03	02
								Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Monitoring dan evaluasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang sumber daya alam							5	01	04	2.03	03
4	03	01	23			Program Sosial Budaya dan pemerintahan						PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA				5	01	03		
						Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pembangunan Desa	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Rapat / Pertemuan dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Rapat, Penyusunan Dokumen, Asistensi, serta Monitoring dan Evaluasi		Terlaksananya Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang Berkualitas	Perencanaan	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	03	2.01	01
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Asistensi /Konsultasi dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan							5	01	03	2.01	02
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan							5	01	03	2.01	03
						Koordinasi Penyusunan Laporan Pencapaian SDGs 2018-2021	Terlaksananya Koordinasi terkait pencapaian SDG's 2018-2021	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rapat / Pertemuan dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Rapat, Penyusunan Dokumen, Asistensi, serta Monitoring dan Evaluasi					5	01	03	2.02	01
							Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Pencapaian SDG's 2018-2021	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi /Konsultasi dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia							5	01	03	2.02	02
						Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan dan Arsip	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Bidang Pendidikan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Monitoring dan Evaluasi dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia							5	01	03	2.02	03
						Fasilitasi Percepatan Peningkatan IPM	Terbentuknya Tim Percepatan Peningkatan IPM													
							Terlaksananya Rapat Tim													

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
						Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang Kesehatan.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Rapat / Pertemuan dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Rapat, Penyusunan Dokumen, Asistensi, serta Monitoring dan Evaluasi					5	01	03	2.03	01	
							Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bulukumba	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Asistensi/Konsultasi dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat							5	01	03	2.03	02	
							Terlaksananya penurunan angka stunting di Kabupaten Bulukumba	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Monitoring dan Evaluasi dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat							5	01	03	2.03	03	
						Program Kabupaten Sehat	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, verifikasi dan sosialisasi program kabupaten Sehat di semua tingkatan wilayah														
							Terlaksananya Monitoring indikator keberhasilan program Germas di Kabupaten Bulukumba														
						Koordinasi dan Fasilitasi Kelompok Kerja Penurunan AKI dan AKB	Terlaksananya kegiatan pertemuan Kelompok Kerja Penurunan AKI dan AKB tiga bulanan di Kab. Bulukumba														
							Terlaksananya kegiatan pertemuan Koordinasi Kelompok Kerja Penurunan AKI dan AKB di tingkat Provinsi dan Pusat														
						Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya penyusunan Dokumen Laporan Kinerja dan LP2KD, (Dok)														
							Terlaksananya Rapat Koordinasi Triwulan TKPKD														
							Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan														

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																				
						BELANJA TIDAK LANGSUNG														
5.1	1	01	01			Belanja Gaji dan Tunjangan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	X	01	2.02	01
5.1	1	01	09			luran Asuransi	Tersedianya luran Asuransi	Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Tersedianya Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	04
						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya administrasi perkantoran													
3.01	01	1.01	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	01
3.01	01	1.01	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	02
3.01	01	1.01	06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	06
3.01	01	1.01	07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan	Terlaksananya pemenuhan jasa administrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	X	01	2.02	02
								Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	07
								Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Administrasi Keuangan	Terlaksananya pemenuhan jasa administrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	X	01	2.02	03
								Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Administrasi Keuangan	Terlaksananya pemenuhan jasa administrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	X	01	2.02	05
3.01	01	1.01	08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya kebersihan kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	08
3.01	01	1.01	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan bangunan kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	12
3.01	01	1.01	15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	15
3.01	01	1.01	18			Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	18
								Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.01	04
3.01	01	1.01	19			Penatusahaan Kesekretariatan SKPD	Tersedianya atk, penggandaan dan kebutuhan yang lainnya	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	10
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	11

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan Minuman Rapat	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	17
								Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	07
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kelancaran kegiatan													
3.01	01	1.01	19			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	22
3.01	01	1.02	09			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	24
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	03
								Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	09
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	14
3.01	01	1.02	10			Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	25
3.01	01	1.02	22			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	28
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	29
3.01	01	1.02	24			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	30
3.01	01	1.02	25			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	32
3.01	01	1.02	28			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	34
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Tersedianyan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	35
3.01	01	1.02	42			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terehabilitasinya gedung kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terehabilitasinya gedung kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya pemenuhan administasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.03	38
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM													
3.01	01	1.05	01			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Meningkatnya kualitas SDM aparatur dinas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.04	09

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
						PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KIERJA DAN KEUANGAN	Meningkatkan sistem laporan yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan													
3.01	01	1.06	01			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LKIP Dinas Perikanan dan Perjanjian Kinerja	Administrasi Keuangan	Tersedianya administrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.02	06
3.01	01	1.06				Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Semesteran	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Administrasi Keuangan	Terlaksananya pemenuhan jasa administrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.02	08
3.01	01	1.06	04			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	Administrasi Keuangan	Tersedianya dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.02	09
3.01	01	1.06	05			Penyusunan Program Kerja SKPD	Tersedianya RKA & DPA Pokok dan Perubahan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.01	01
3.01	01	1.06	05					Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Program Kerja dan Monev OPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.01	02
3.01	01	1.06	07			Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.01	03
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.01	05
						PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur													
3.01	01	1.06	01			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.04	01
3.01	01	1.06	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			X	XX	01	2.04	02
						PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Meningkatnya produksi budidaya air payau													
3.01	01	1.20	03			Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Terlaksananya operasional Balai Benih Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terkelolanya Pembudidayaan Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.04	02
3.01	01	1.20	05			Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Payau	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan budidaya air payau	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Terwujudnya Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.02	01
3.01	01	1.20	04			Pengelolaan Kawasan Budidaya Air Payau	Terlaksananya pemantauan kesehatan dan penyakit ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terkelolanya Pembudidayaan Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.04	04
								Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Terlaksananya Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terkelolanya Pembudidayaan Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.04	06
3.01	01	1.20	06			Pengelolaan Kawasan Budidaya Air Tawar	Terlaksananya pemantauan kesehatan dan penyakit ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terkelolanya Pembudidayaan Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.04	04
								Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terkelolanya Pembudidayaan Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.04	06

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
								Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terjaminnya keberlanjutan sumberdaya pembudidayaan ikan di darat			3	25	04	2.01	02
3.01	01	1.20	07			Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Tawar	Terlaksananya pelatihan budidaya air tawar	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pengelolaan dan perlindungan kawasan budidaya air payau	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.02	04
3.01	01	1.20	08			Peningkatan Sapra Kawasan Budidaya Air Payau	Rehab Saluran Irigasi Tambak, Tersedianya bangsal kerja rumput laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terkelolanya Pembudidayaan Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.04	02
3.01	01	1.20	09			Pembinaan Kawasan Budidaya Air Payau	Terlaksananya Diklat pengelolaan & perlindungan kawasan budidaya air tawar	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terkelolanya Pembudidayaan Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.04	05
3.01	01	1.20	12			Peningkatan Sapra Kawasan Budidaya Air Tawar	Pembangunan kolam ikan air tawar, pengadaan mesin pakan ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terkelolanya Pembudidayaan Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.04	03
3.01	01	1.20	13			Pembinaan Kawasan Budidaya Air Tawar	Terlaksananya Diklat pengelolaan & perlindungan kawasan budidaya air tawar	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terkelolanya Pembudidayaan Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.02	05
3.01	01	1.20	11			Pembinaan SDM Pembudidaya & Aparatur Budidaya Air Payau	Terlaksananya pelatihan budidaya air payau dan laut	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Terwujudnya pemberdayaan pembudidayaan ikan kecil	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.02	04
3.01	01	1.20	15			Pembinaan SDM & Aparatur Budidaya Air Tawar	Terlaksananya pelatihan budidaya perikanan air tawar	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.02	04
3.01	01	1.20	10			Peningkatan Sapra Budidaya Air Payau	Tersedianya bantuan pakan, bibit udang, bibit bandeng, tersedianya saprodi rumput laut, perahu pengangkut rumput laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.04	02
3.01	01	1.20	14			Peningkatan Sapra Budidaya Air Tawar	Tersedianya bibit ikan nila, ikan Mas, Lele, Bawal, Patin	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.04	03
						PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)													
3.01	01	1.21	01			Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap			3	25	02	2.01	02
3.01	01	1.21	03			Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan	Terehab dan terlaksananya operasional TPI	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap			3	25	02	2.03	02
3.01	01	1.21	05			Pengembangan Lembaga Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya sosialisasi fishing ground dan penangkapan ikan ramah lingkungan	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terfasilitasinya pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap			3	25	02	2.02	02

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
3.01	01	1.21	06			Pengembangan Minapolitan	Terkelolanya TPI	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terkelolanya dan Terselenggaranya Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap			3	25	02	2.02	01	
								Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terkelolanya dan Terselenggaranya Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap								
3.01	01	1.21	07			Pendampingan Asuransi Nelayan & Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT)	Penyediaan asuransi dan sertifikat hak atas tanah nelayan serta pelatihan nelayan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap			3	25	02	2.02	01	
3.01	01	1.21	08			Pengembangan Sapra Nelayan Kecil	Terpenuhinya sapra nelayan skala kecil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terkelolanya penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap			3	25	02	2.02	01	
								Pelaksanaan Fasilitas bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitas bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap			3	25	02	2.02	03	
						PROGRAM PENGEMBANGKAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR	Tersedianya dokumen kajian kawasan dan supervisi serta monitoring pengembangan bidang kelautan dan perikanan														
3.01	01	1.24	01			Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Tersedianya sarana olah data statistik	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Saya Ikan	Tersedianya data dan informasi statistik	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terkelolanya penangkapan ikan di wilayah sunagi, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap			3	25	02	2.01	01	
								Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terkelolanya Pembudidayaan Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.04	01	
								Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Tersedianya Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi produk hasil olahan			3	25	05	2.01	01	
						PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA DAN KELEMBAGAAN															
3.01	01	1.25	01			Pembinaan kelembagaan, Akses IPTEK dan Informasi	Terlaksananya pembinaan kelompok usaha perikanan & penguatan kelembagaan	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.02	02	
								Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terfasilitasinya pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap			3	25	02	2.02	02	
								Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Terjaminnya keberlanjutan sumberdaya pembudidayaan ikan di darat			3	25	05	2.02	01	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
3.01	01	1.25	02			Pembinaan Perizinan & kemitraan Usaha	Terlaksananya pertemuan usaha dan ekspose hasil pembangunan perikanan	Penetapan Persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Tersedianya dokumen Persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di wilayah sungai. Danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di wilayah sungai. Danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap			3	25	02	2.04	01
								Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di wilayah sungai. Danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di wilayah sungai. Danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap			3	25	02	2.04	02
								Penetapan Persyaratan dan prosedur penerbitan pengadaan daftar kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan Dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Tersedianya dokumen Penetapan Persyaratan dan prosedur penerbitan pengadaan daftar kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan Dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan kapal Pengangkut Ikan Dengan ukuran Sampai Dengan 10 GT di wilayah sungai. Danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan kapal Pengangkut Ikan Dengan ukuran Sampai Dengan 10 GT di wilayah sungai. Danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap			3	25	02	2.05	01
								Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan kapal Pengangkut Ikan Dengan ukuran Sampai Dengan 10 GT di wilayah sungai. Danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan kapal Pengangkut Ikan Dengan ukuran Sampai Dengan 10 GT di wilayah sungai. Danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap			3	25	02	2.05	02
								Penetapan Persyaratan dan prosedur penerbitan pengadaan daftar kapal penangkap ikan Dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Penetapan Persyaratan dan prosedur penerbitan pengadaan daftar kapal penangkap ikan Dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap			3	25	02	2.06	01

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
								Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap			3	25	02	2.06	02
								Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat dan/atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Terlaksananya Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat dan/atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.01	01
								Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Terlaksananya Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.01	02
								Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.02	03
								Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya dokumen Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.03	01
								Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya			3	25	03	2.03	02
3.01	01	1.25	03			Pengembangan Sapra Usaha Perikanan	Peningkatan Sapra Usaha Perikanan	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatkan mutu hasil perikanan dengan memberi nilai tambah para pengolah			3	25	05	2.03	01

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
								Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatkan mutu hasil perikanan dengan memberi nilai tambah para pengolah			3	25	05	2.03	02
DINAS KETAHANAN PANGAN																				
2.03	01	16				Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat					PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan urusan Pemerintahan Daerah			02	09	01		
2.03	01	16	41			Penyusunan rencana program anggaran, pemantauan dan evaluasi	Tersedianya rencana aprogram, anggaran, pengendalian aset ketahanan pangan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja OPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah						2	09	01	2.01	01
								Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat daerah Dalam Dokumen Perencanaan	TersedianyaDokumen Perencanaan Program dan Kegiatan OPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah						2	09	01	2.01	02
								Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja OPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah						2	09	01	2.01	03
							Terlaksananya sinkronisasi dan penyusunan program kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat daerah	Terlaksananya sinkronisasi dan penyusunan program kegiatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah						2	09	01	2.01	04
							Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kegiatan ketahanan pangan	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kegiatan ketahanan pangan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah						2	09	01	2.01	05
2.03	01	06				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan													
2.03	01	06	01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Sakip (sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) Laki, renja, perjanjian kinerja dan evaluasi renstra	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Sakip (sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) Laki, renja, perjanjian kinerja dan evaluasi renstra	Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						02	09	01	2.02	06
2.03	01	06	03			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis/semesteran realisasi anggaran	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis/semesteran realisasi anggaran	Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						02	09	01	2.02	08
2.03	01	06	04			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Terlaksanananya penyusunan laporan keuangan	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Terlaksanananya penyusunan laporan keuangan	Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						02	09	01	2.02	09
2.03	01	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran													
2.03	01	01	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telpon dan listrik kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telpon dan listrik kantor	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	02
							Tersedianya langganan TV Kabel	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Tersedianya langganan TV Kabel	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	02
2.03	01	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	06
2.03	01	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa operator komputer, pengarsipan dan jasa sopir	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa operator komputer, pengarsipan dan jasa sopir	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	07
2.03	01	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	08
2.03	01	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	18
2.03	01	01	19			Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tersedianya alat tulis kantor dan penggandaan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan penggandaan	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	10
							Tersedianya makan minum rapat	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	17
							Tersedianya alat tulis kantor dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor dan penggandaan	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	11
2.03	01	02				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur													
2.03	01	02	07			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	22
							Pengadaan Mebelaur	Tersedianya mebelaur	Tersedianya mebelaur	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	25
							Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	14

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
2.03	01	02	09			Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	24
								Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	13
2.03	01	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	28
2.03	01	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	30
2.03	01	02	XX			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	29
2.03	01	02	42			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	38
2.03	01	02	XX			Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum						02	09	01	2.03	40
2.03	01	05				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan urusan Pemerintahan Daerah			02	09	01		
2.03	01	05	01			Pendidikan dan pelatihan formal	Teraksananya diklat/bimtek sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	Teraksananya diklat/bimtek sumber daya aparatur	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur						02	09	01	2.04	09
2.03	01	05	03			Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya program dan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya program dan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur						02	09	01	2.04	11
2.03	01	19				Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Pangan dan Penanganan Pangan					PENGLOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Pangan dan Penanganan Pangan			2	09	02		
2.03	01	19	10			Penyediaan Infrastruktur Pangan dan Sumber Daya Pendukung Ketahanan Pangan	Tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat dan penyediaan sarana pendukungnya	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat dan penyediaan sarana pendukungnya	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota						2	09	02	2.01	01
							Tersedianya Lantai jemur	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Tersedianya Lantai jemur	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota						2	09	02	2.01	02
							Tersedianya Rice milling unit (RMU) dan Bangunannya	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya alat dan bangunan Rice milling unit (RMU) serta Dryer (pengering) gabah	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota						2	09	02	2.01	03
2.03	01	15				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Kesejahteraan Petani					PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pengankaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal			2	09	03		

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
2.03	01	15	07			Penyusunan Rumusan Kondisi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Tersedianya Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah kabupaten / Kota Dalam Rangka Stabilitas pasokan dan Harga Pangan						2	09	03	2.01	01	
2.03	01	19				Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Pangan dan Penanganan Pangan														
2.03	01	19	12			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan	Terlaksananya pendampingan dan sinkronisasi dana dekon APBN Tahun 2020	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya	Terlaksananya pendampingan dan sinkronisasi dana dekon APBN Tahun 2020, serta terlaksananya pertemuan, koordinasi dan evaluasi penguatan lembaga distribusi pangan (P-LDM) dan pengembangan Usaha pangan masyarakat (PUPM)	Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota Dala Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan						2	09	03	2.01	03	
							Terlaksananya pertemuan koordinasi penguatan lembaga distribusi pangan (P-LDM) dan pengembangan Usaha pangan masyarakat (PUPM)														
							Terlaksananya pertemuan evaluasi P-LDPM dan PUMP														
2.03	01	19				Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Pangan dan Penanganan Pangan														
2.03	01	19	11			Penyusunan Rumusan Distribusi, Harga dan Pasokan Pangan	Tersedianya hasil analisis pasokan dan harga pangan	Pemantauan Stock, Pasokan dan Harga pangan	Tersedianya hasil analisis pasokan dan harga pangan pokok	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah kabupaten / ota Dalam Rangka Stabilitas pasokan dan Harga Pangan						2	09	03	2.01	04	
							Tersedianya hasil harga pangan pokok														
2.03	01	19	12			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan	Terlaksananya pembinaan dan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat(P-LDPM)	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Terlaksananya pembinaan dan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat(P-LDPM)	Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota Dala Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan						2	09	03	2.01	05	
							Tersedianya pendampingan Dana APBN	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Tersedianya pendampingan Dana APBN serta pembinaan dan penguatan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM)	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah kabupaten / ota Dalam Rangka Stabilitas pasokan dan Harga Pangan						2	09	03	2.01	06	
							Terlaksananya pembinaan dan penguatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)														
2.03	01	19	13			Pembinaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten / Kota	Tersedianya laporan perkembangan cadangan pangan pemerintah (CPP)	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan kabupaten / Kota						2	09	03	2.02	01	
							Tersedianya laporan perkembangan cadangan pangan pemerintah (CPP)	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan kabupaten / Kota						2	09	03	2.02	03	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
2.03	01	19	11			Penyusunan Rumusan Distribusi, Harga dan Pasokan Pangan	Terlaksananya pertemuan persiapan pelaksanaan pemantauan perkembangan harga pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Terlaksananya pertemuan persiapan pelaksanaan pemantauan perkembangan harga pangan dan evaluasi petugas teknis pemantauan harga pangan	Penentuan Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal Yang Tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi						2	09	03	2.03	01	
							Terlaksananya pertemuan evaluasi petugas teknis pemantauan harga pangan														
2.03	01	15				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Kesejahteraan Petani														
2.03	01	15	06			Koordinasi dan Pemantauan Kondisi Ketahanan Pangan	Terlaksananya Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun	Terlaksananya Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi						2	09	03	2.04	01	
2.03	01	07				Program pengembangan Ketahanan Pangan	Meningkatnya penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal														
2.03	01	07	01			Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Ketahanan Pangan	Terlaksananya Demplot dan Pendampingan Pemanfaatan Lahan Pekarangan di KWT	Pemberdayaan masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Demplot dan Pendampingan Pemanfaatan Lahan Pekarangan di KWT	Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan perKapita per tahun						2	09	03	2.04	02	
2.03	01	16				Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat														
2.03	01	16	14			Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terlaksananya Pendampingan Desa Mandiri Pangan	Pemberdayaan masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pendampingan , pembinaan Desa Mandiri Pangan dan terlaksananya Kebun Bibit Desa (KBD) serta sosialisasi teknis KWT dan Pendamping	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupa Gizi						2	09	03	2.04	02	
							Terlaksananya pembinaan pada Kawasan Mandiri Pangan														
							Terlaksananya kebun bibit desa (KBD)														
							Terlaksananya sosialisasi dan pertemuan teknis KWT dan pendamping														
2.03	01	15				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Kesejahteraan Petani					PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terkendalinya kondisi ketersediaan dan kerawanan pangan			2	09	04			
2.03	01	15	06			Koordinasi dan Pemantauan Kondisi Ketahanan Pangan	Terlaksananya penyusunan FSVA	Penyusunan , Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya penyusunan dan sosialisasi FSVA	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						2	09	04	2.01	01	
2.03	01	15	07			Penyusunan Rumusan Kondisi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Terlaksananya sosialisasi dan launching NBM, SKPG dan FSVA	Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya sosialisasi dan launching NBM, SKPG dan Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan	Penanganan Kerawananan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota						2	09	04	2.02	01	
2.03	01	15	06			Koordinasi dan Pemantauan Kondisi Ketahanan Pangan	Terlaksananya Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)														
							Terlaksananya Perumusan Dewan Ketahanan Pangan														
2.03	01	19				Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Pangan dan Penanganan Pangan														
2.03	01	19	14			Pembinaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan cadangan pangan masyarakat	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengadaan cadangan pangan masyarakat serta pelaporan perkembangan lumbung pangan masyarakat	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota						2	09	04	2.02	02	
							Tersedianya laporan perkembangan lumbung pangan masyarakat														

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
							Tersedianya cadangan pangan masyarakat														
												PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan			2	09	05			
2.03	01	07	02			Promosi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Terlaksananya pelatihan B2SA dan Petugas Survei PPH	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya pameran Hari Pangan Sedunia , pelatihan B2SA , Survei PPH, pembinaan dan pendampingan pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama produsen pangan segar dan produk pangan lainnya	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten / Kota						2	09	05	2.01	01	
							Terlaksananya Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS)														
2.03	01	16	40			Pembinaan, Pendampingan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pangan	Terlaksananya pembinaan, pendampingan, pengawasan keamanan pangan														
							Terlaksananya pendampingan pembinaan dan kerjasama produsen pangan segar dan produk pangan lainnya														
							Terlaksananya penyebaran informasi keamanan pangan melalui media elektronik dan media cetak	Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten / kota	Terlaksananya Sertifikasi terhadap keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten / Kota						2	09	05	2.01	02	
2.03	01	07	02			Promosi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Terlaksananya survei PPH	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya survei PPH dan Registrasi terhadap keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten / Kota						2	09	05	2.01	03	
								Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten / kota	Terlaksananya penyebaran informasi keamanan pangan melalui media elektronik dan media cetak	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten / Kota						2	09	05	2.01	04	
2.03	01	16	40			Pembinaan, Pendampingan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pangan	Terlaksananya pengujian dan analisis resiko, keamanan pangan segar	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengujian dan analisis resiko, keamanan pangan segar	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Daerah Kabupaten / Kota						2	09	05	2.01	05	
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																					
1.13	01	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WAJIB							
1.13	01	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia dan dibayarkannya jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Administrasi Umum	Tersedianya jasa surat menyurat, listrik, air, jasa pemeliharaan kendaraan, jasa pelayanan administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, ATK, makan-minum, cetak dan penggandaan, komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, mebeleur, serta pemeliharaan berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor, Pemeliharaan kendaraan operasional					X	XX	01	2.03	02	
1.13	01	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas roda dua dan roda empat	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas roda dua dan roda empat												06
1.13	01	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan dan tersedianya jasa operator komputer	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan dan tersedianya jasa operator komputer							X	XX	01	2.03	07	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
1,13	01	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor							X	XX	01	2.03	08
1,13	01	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor dan tersedianya jaringan listrik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan kantor dan tersedianya jaringan listrik							X	XX	01	2.03	12
1,13	01	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya tugas, rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya tugas, rapat koordinasi dan konsultasi							X	XX	01	2.03	18
1,13	01	01	19			Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Penyediaan ATK, cetak, makan minum rapat dan tamu, umbul-umbul tiang dan tersedianya jasa tenaga non PNSD (Tenaga kontrak, operator dan sopir eselon II)	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor (ATK)							X	XX	01	2.03	10
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan, spanduk dan penggandaan							X	XX	01	2.03	11
								Penyediaan makanan dan minuman	makan - minum tamu dan rapat							X	XX	01	2.03	17
		02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.										X	XX	01	2.03	
1,13	01					Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya shelter yang memadai buat PMKS dan Tempat Parkir	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya shelter yang memadai bagi PMKS	Administrasi Umum						X	XX	01	2.03	38
1,13	01	03	05			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat	Administrasi Umum						X	XX	01	2.03	20
1,13	01	04	07			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (AC), Lemari Es, Dispenser	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (AC), Lemari Es, Dispenser	Administrasi Umum						X	XX	01	2.03	22
1,13	01	05	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Administrasi Umum						X	XX	01	2.03	24
		06	10			Pengadaan mebeleur	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa Meubeler	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubeler Kantor	Administrasi Umum						X	XX	01	2.03	25
1,13	01	07	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpelihara dan terawatnya tempat kerja kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpelihara dan terawatnya tempat kerja	Administrasi Umum						X	XX	01	2.03	28
1,13	01	07	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional SKPD	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional SKPD	Administrasi Umum						X	XX	01	2.03	30
1,13	01	07	28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpelihara peralatan kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpelihara peralatan kantor	Administrasi Umum						X	XX	01	2.03	34
1,13	01	05				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.										X	XX	01	2.03	
1,13	01	05	03			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya kontribusi Bimtek.	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya kontribusi Bimtek.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan dan kontribusi diklat pejabat struktural		Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur			X	XX	01	2.04	11
1,13	01	05	05			Pelatihan dan Pendidikan Struktural	Tersedia kontribusi pelatihan dan pendidikan bagi pejabat struktural	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedia kontribusi pelatihan dan pendidikan struktural											09
1,13	01	06				Program peningkatan pengetahuan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja, laporan keuangan, dan ketersediaan gaji dan tunjangan ASN		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			X	XX	01	2.02	01
1,13	01	06	01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan Capaian Kinerja, Bulanan, Triwulan dan Semesteran							X	XX	01	2.02	06
1,13	01	07	04			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun							X	XX	01	2.02	09
		08	07			Monitoring, evaluasi program kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi kegiatan Dinas Sosial Kab. Bulukumba	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP, RKA, DPA, SPM, Renstra, Renja dan pelaksanaan monev kegiatan SKPD		Meningkatnya evaluasi kinerja perangkat daerah			X	XX	01	2.01	03
		08	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanananya evaluasi program dan kegiatan (monev)							X	XX	01	2.01	05
1,13	01	09	08			Penyusunan Program kerja dan SPM OPD	Terlaksananya penyusunan program kerja OPD yang tepat tujuan dan sasaran serta pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	RKA, DPA, dan SPM							X	XX	01	2.01	03
1,13	01	09	08					Penyusunan Renstra & Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja							X	XX	01	2.01	01
3.03	02	22				Program peningkatan produksi peternakan	Meningkatnya populasi ternak													

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
3.03	02	22	02			Pembibitan dan Perawatan Ternak	Meningkatnya produksi dan produktivitas ternak	Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya kualitas genetik ternak melalui kawin alam dan inseminasi buatan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten	Meningkatnya produktifitas dan populasi ternak	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Pelayanan Inseminasi Buatan di Kabupaten Bulukumba,	Pertanian	Pilihan	3	27	02	2.02	02	
3.03	02	22	03			Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Terpenuhinya Bantuan Ternak Kepada Masyarakat	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/tanaman	Terdistribusinya ternak bibit jenis lokal	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten	Meningkatnya produktifitas dan populasi ternak	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya mutu genetik ternak lokal, ternak asli dan ternak persilangan			3	27	02	2.02	1	
3.03	02	22	11			Penataan Ternak Pemerintah	Tertibnya Administrasi Ternak-ternak Bantuan Pemerintah	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya kontes ternak dan tertatanya ternak bantuan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten	Meningkatnya produktifitas dan populasi ternak	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya ketersediaan sumber bibit ternak di kabupaten bulukumba.			3	27	02	2.02	03	
						Kegiatan Penyediaan pengembangan pakan dan air	Terdistribusinya Bibit Rumpun Hijauan Makanan Ternak Sebanyak 30.000 Stek dan terbangunnya 2 paket irigasi air tanah dalam	Pengendalian/penyediaan benih/bibit ternak dan hpt, bahan pakan dan pakan	Tersedianya bibit hpt berkualitas	Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah pemerintah/ kota	Terlaksananya pengendalian, pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah pemerintah/ kota	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Terlaksananya Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian			04	27	02	2.05	05	
								Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Terlaksananya pembangunan sumber air tanah dangkal / dalam	Pembangunan Prasarana pertanian	Terlaksananya pembangunan sumber air	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Terlaksananya Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian			01	2	02	3	27	
						Pendataan Potensi Peternakan	Terlaksananya pengkartuan ternak besar di 10 kecamatan														
3.03	02	21				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak															
3.03	02	21	02			Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Vaksinasi dan Pelayanan Kesehatan Hewan	Pengendalian dan Pananggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya Vaksinasi dan Pelayanan Kesehatan Hewan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab. Kota	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan Melalui Vaksinasi dan Pelayanan Kesehatan Hewan	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatkan Derajat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			3	27	04	2.01	01	
3.03	02	21	06			Penanganan Penyakit Reproduksi dan Penyakit Ternak	Tertanganinya Penyakit Reproduksi														
3.03	02	21	03			Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit Endemik	Eliminasi Hewan Pembawa Rabies (HPR)	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Hewan Menular berupa Vaksinasi dan Sosialisasi PHM	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab. Kota	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan Melalui Vaksinasi dan Pelayanan Kesehatan Hewan	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatkan Derajat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			3	27	04	2.01	03	
3.03	02	21	04			Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	Terkontrolnya Lalu lintas Ternak di Kab. Bulukumba	Pengawasan Atas Persyaratan Tehnis Untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Produk Hewan di Kab. Bulukumba	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terkontrolnya Lalu Lintas Ternak dan Produk Hewan di Kab. Bulukumba	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatkan Derajat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			3	27	04	2.02	02	
3.03	02	21	07			Pembinaan dan Pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH)	Terpantauanya Bahan Asal Hewan (BAH) yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terpantauanya Peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatkan Derajat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			3	27	04	2.04	02	
								Penyediaan Pelayanan jasa laboratorium	Terlaksananya pelayanan laboratorium	Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner	Terlaksananya pelayanan keswan dan pelayanan laboratorium	Pengendalian keswan dan kesmavet	Peningkatan status kesehatan hewan dan menurunnya kasus zoonosis			3	27	04	2.03	01	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
						Optimalisasi Poskeswan		Penyediaan Pelayanan jasa medik veteriner	Terlaksanakannya pelayanan medik veteriner							3	27	04	2.03	02
3.03	02	21	08			Optimalisasi Pengelolaan Rumah potong Hewan	Terlaksananya pengelolaan RPH sebagai penghasil bahan asal hewan yang Asuh	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya pendampingan Unit Usaha RPH sebagai penghasil bahan asal hewan yang Asuh	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis persyaratn teknis kesehatan masyarakat veteriner	Terlaksananya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesmavet untuk mendukung penyediaan bahan asal hewan yang Asuh di RPH	Pengendalian Keswan dan Kesmavet	Terlaksananya pengendalian Keswan dan Kesmavet			3	27	04	2.04	01
3.03	02	22				Program peningkatan sumber daya manusia peternakan								Pilihan						
3.03	02	22	12			Kegiatan Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan	Meningkatnya SDM Kelompok Tani Temak dan Pendamping Kelompok	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Meningkatnya kapasitas penyuluh peternakan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya pelaksanaan penyuluhan peternakan	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya penyuluhan peternakan			3	27	7	2.01	01
								Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatnya kapasitas peternak dan kelompok temak	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya pelaksanaan penyuluhan peternakan	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya penyuluhan peternakan			3	27	7	2.01	02
								Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan peternakan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya pelaksanaan penyuluhan peternakan	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya penyuluhan peternakan			3	27	7	2.01	03
								Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Terlaksananya fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Petani Peternak	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya pelaksanaan penyuluhan peternakan	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya penyuluhan peternakan			3	27	7	2.01	04
3.03	02	31				Program peningkatan penerapan teknologi peternakan tepat guna								Pilihan	Urusan Pemerintahan bidang pertanian					
3.03	02	31	01			Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Terbangunnya 2 unit bangunan reaktor biogas													
DINAS PERHUBUNGAN																				
2.09	1	1				Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah							
2.09	1	1	1			Penyediaan jasa surat menyurat.	Jasa pelayanan surat menyurat ;dan inmaterai 6000 dan 3000	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa pelayanan surat menyurat dan materai 6000 dan 3000	Administrasi Umum	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Listrik, air, jasa pemeliharaan kend, jasa pelayanan adm keuangan , jasa kebersihan kantor, ATK, Makan Minum, Cetak & Penggandaan, Komponen Instalasi Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan bacaan, rapat-rapat koordinasi damn konsultasi keluar daerah, mebeleur serta pemeliharaan berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta pemeliharaan kend op.					2	9	1	1	1
2.09	1	1	2			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik							2	9	1	1	2
2.09	1	1	6			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Pemeliharaan & Perizinan kendaraan Dinas Operasional; 2 unit kend roda 4 dan 6 unit kend roda 2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Pemeliharaan & Perizinan kendaraan Dinas Operasional; 2 unit kend roda 4 dan 6 unit kend roda 2								9	1	1	6
2.09	1	1	7			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Pelayanan Admistrasi keuangan; honor operator, arsipatoris, sopir	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Pelayanan Admistrasi keuangan; honor operator, arsipatoris, sopir							2	9	1	1	7
2.09	1	1	8			penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan kantor							2	9	1	1	8
2.09	1	1	9			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor							2	9	1	1	9
2.09	1	1	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor							2	9	1	1	12
2.09	1	1	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah							2	9	1	1	18
2.09	1	1	19			Penatausahaan kesekretariatan SKPD.	Jasa Kesekretariatan Kantor; ATK, barang cetakan & penggandaan, makan minum tamu/rapat	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor							2	9	1	1	19

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan												
								Penyediaan Makanan Dan Minuman	Makan & Minum Rapat dan Tamu												
2.09	1	2				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.						Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.								
2.09	1	'02	5			pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda Dua	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2								9	1	'02	5	
2.09	1	'02	7			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor							2	9	1	'02	7	
2.09	1	'02	9			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor									9	1	'02	9
2.09	1	'02	10			Pengadaan Meubeler Kantor	Tersedianya mebeleur Kantor	Pengadaan Meubeler Kantor	Tersedianya mebeleur Kantor							2	9	1	'02	10	
2.09	1	'02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor							2	9	1	'02	22	
2.09	1	'02	23			Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya rutin/berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya rutin/berkala Mobil Jabatan							2	9	1	'02	23	
2.09	1	'02	24			Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional							2	9	1	'02	24	
2.09	1	2	26			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor							2	9	1	2	26	
2.09	1	2	28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kantor							2	9	1	2	28	
2.09	1	2	29			Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor	Rehabilitasi sedaang/BeratGedung Kantor	Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor	Rehabilitasi sedang/BeratGedung Kantor							2	9	1	2	29	
2.09	1	5				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Meningkatnya kapasitas Sumber daya Aparatur						Meningkatnya kapasitas Sumber daya Aparatur								
2.09	1	5	1			Pendidikan dan pelatihan Formal	Terwujudnya Pendidikan dan pelatihan formal	Bintek dan pelatihan formal	Terlaksananya Bintek dan pelatihan formal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan, bintek										
2.09	1	5	3			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya Bintek implemtasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya Bintek implemtasi Peraturan Perundang-undangan												
2.09	1					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur														
2.09	1	6				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
										Administrasi Keuangan	Tersedianya Lapaoran capaian kinerja, laporan keuangan dan gaji serta tunjangan ASN										
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN												
2.09	1	6	1			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Bulanan, Triwulan, Semesteran							2	9	1	6	1	
2.09	1	6	2			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran							2	9	1	6	2	
2.09	1	6	4			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun							2	9	1	6	4	
2.09	1	6	5			Penyusunan Program Kerja SKPD	Tersusunnya Program Kerja dan Monev OPD	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Program Kerja dan Monev OPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2	9	1	6	5	
								Penyusunan Renstra & Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja												
								Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP												
						Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya Pembangunan Fasilitas Perhubungan			Penyelenggaraan Pembangunan Kabupaten /Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan	Urusan Pemerintahan Bidang Lalu Lintas	Urusan Pemerintahan WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN						
								Penetapan RencanaInduk Jaringan LLAJ Kabupaten /Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota												

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
													1	3	10	2	1
					Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk jaringan LLAJ					1	3	10	2	1
					Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Sosialisas kebijakan rencana induk jaringan LLAJ		Tersedianya jaringan LLAJ					1	3	10	2	1
					Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian jaringan LLAJ							1	3	10	2	1
							Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						3	10	2	2
					Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pasilitas jalan							1	3	10	2	2
					Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	tersedianya perlengkapanjalan							1	3	10	2	2
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Tersedianya Rehabilitasi dan pemeliharaan							1	3	10	2	2
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Pemeliharaan Perengkapan jalan							1	3	10	2	2
					Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				1	3	10	2	3
2.09	1	15	7		Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan darat	Tewujudnya penagihan retribusi terminal,perparkiran dan terminal pembantu	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Melaksanakan penyusunan Pembanguna terminal Tipe C					1	3	10	2	3
							Pembangunan Gedung Terminal	Tersedianya pembangunan gedung kantor					1	3	10	2	3
							Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana terminal					1	3	10	2	3
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Tersedianya rehabilitasi dan pemeliharaan terminal					1	3	10	2	3
							Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	tersedianya SDM Pegelolah terminal					1	3	10	2	3
2.09	1	15	1		Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Bandara) (Sisi Darat)	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Bandara) (Sisi Darat)											
2.09	1	15	2		Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosuder bidang perhubungan (Andalalin)	tersusunya dokumen evaluasi trayek angkutan umum dalam kota dan penataan ulang trayek angkutan umum dalam kota kab.Bulukumba											
2.09	1	15	3		Prencanaan Amdal	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Amdal)											
2.09	1	15	4		Sosialisasi kebijakan bidang perhubungan	Meningkatnya Kesadaran Berlalu Lintas baci anak sekolah											
								Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Tersedianya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				1	3	10	2	4
							Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Memenuhi persyaratan Pengelolah iziin Pengelenggara Fasilitas Parkir					1	3	10	2	4
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengsinkronisasi pengawasan pembanguna dan fasilitas parkir					1	3	10	2	4
					Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Berfungsinya Alat Pengujian Bermotor			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1	3	10	2	5
2.09	1	16	6		Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terwujudnya sarana alat pengujian Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Menyediakan Sarana dan prasarana pengujian kerkala					1	3	10	2	5

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
													1	3	10	2	5
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Menambah wawasan SDM pengujian berkala							1	3	10	2	5
					Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Perlu ada buku registrasi wajib uji berkala							1	3	10	2	5
					Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	tersedia alat bkti uji berkala kendaraan bermotor							1	3	10	2	5
					Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	perlu nya sosialisasi pada sopir							1	3	10	2	5
					Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	perlu ada data analisa Potensi jumlah kendaraan bermotor							1	3	10	2	5
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Perlu ada anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor							1	3	10	2	5
					Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi pada pihak yang berwenang							1	3	10	2	5
					Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	ada perda penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermoto							1	3	10	2	5
					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengui	perlu evaluasi tiap bulan							1	3	10	2	5
2.09	1	16	3		Rehabilitasi Kantor Dinas Perhubungan	Terlaksananya Rehabilitasi Kantor/Dinas perhubungan											
2.09	1	17			Program Peningkatan pelayanan Angkutan				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Melakukan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			1	3	10	2	6
2.09	1	17	12		Pengembangan sarana dan prasarana Pelayana Jasa angkutan	Pelayan Kendaraan Bus Sekolah kepada Siswa /Kendaraan Pariwisata	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Tersedianya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka					1	3	10	2	6
2.09	1	16	18		Pengawasan Lalu Lintas dan angkutan Jalan terpadu	Pengawasan dan penertiban angkutan umum dan pengaturan lalu lintas		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					1	3	10	2	7
						Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Tersedianya kebijakan tata kelola andalalin						1	3	10	2	7
						Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin						1	3	10	2	7
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	perlu koodinasi dan sinknisasi andalalin						1	3	10	2	7
						Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Perlu nya pengawasan pelaksanaan rekomendasi						1	3	10	2	7
2.09	1	17	4		Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Trasportasi guna keselamatan Penumpang	Terwujudnya pengawasan peningkatan pelayanan angkutan dan meningkatnya pendapatan asli daerah											
2.09	1	17	6		Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	terlaksananya penjagaan keamanan di terminal penumpang											
2.09	1	17	7		Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama	terpeliharanya alat deteksi tsunami, reviter, dan tersedianya pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat.											
								Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Melakukan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				1	3	10	2	8
						Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ						1	3	10	2	8

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
													1	3	10	2	8
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor							1	3	10	2	8
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal							1	3	10	2	8
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota							1	3	10	2	8
					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	perlu ada tim pelaksanaan Inspeksi ,audit dan pemantau sisten manajemen							1	3	10	2	8
							Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kot					1	3	10	2	9
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							1	3	10	2	9
					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Perlu nya ada pengawasan ketersediaan angkutan umum							1	3	10	2	9
							Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1	3	10	2	9
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								1	3	10	2	9
					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							1	3	10	2	9
							Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1	3	10	2	10
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							1	3	10	2	10
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota							1	3	10	2	10

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
													1	3	10	2	11
							Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1	3	10	2	11
					Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							1	3	10	2	11
					Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							1	3	10	2	11
					Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							1	3	10	2	11
							Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1	3	10	2	12
					Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Tersedianya Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota							1	3	10	2	12
					Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perlunya sosialisasi tentang uji coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota							1	3	10	2	12
							Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1	3	10	2	14
					Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perlu ada Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota							1	3	10	2	14
					Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota							1	3	10	2	14
							Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1	3	10	2	14
					Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik							1	3	10	2	14

KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
						Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan							1	3	10	2	14
								Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1	3	10	2	15
						Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Membutuhkan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik							1	3	10	2	15
						Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota							1	3	10	2	15
								Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1	3	10	2	16
						Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota								1	3	10	2	16
2.09		15				Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas												
2.09		19	1			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terselesainya Masalah-masalah dilapangan											
2.09		19				Halte	Tempat Menunggu Mobil Penumpang											
2.09		19				Pengadaan Rambu-Rambu LLAJ	menurunnya angka kecelakaan lalu lintas											
2.09		19				Marka jalan 15.000 Km Kab. Bulukumba	menurunnya angka kecelakaan lalu lintas											
2.09		19				Pagar pengaman jalan (Guardrail)	menurunnya angka kecelakaan lalu lintas											
2.09	1	19				Deliniator	menurunnya angka kecelakaan lalu lintas											
2.09	1	19				Paku jalan	menurunnya angka kecelakaan lalu lintas											
2.09	1	19				Cermin tikungan	menurunnya angka kecelakaan lalu lintas											
2.09	1	19				APILL (traffig liht)	menurunnya angka kecelakaan lalu lintas											
2.09	1	20				Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor												
2.09	1	20	1			Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	Terwujudnya Pembangunan gedung alat pengujian kendaraan bermotor											
2.09	1	20	2			Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Terwujudnya alat pengujian kendaraan bermotor											

KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN														
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																												
2.06	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dokumen Renstra, Renja dan evaluasi kinerja serta pelaksanaan Administrasi keuangan dan Administrasi Umum	X	XX	1		1												
2.06	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Listrik dan Telepon Disdukcapil	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik, Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Tersedianya Alat-alat Listrik, Tersedianya Peralatan, Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Rumah, Tangga, Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Tersedianya Materai, Peranko dan bahan surat menyurat kantor	Administrasi Umum	Terlaksananya Pengadministrasian Umum					2	19	1	2.01	6										
2.06	01	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Terlaksananya Pengadministrasian Umum					2	19	1	2.01	8										
2.06	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Terlaksananya Pengadministrasian Umum					2	19	1	2.01	12										
2.06	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-alat Listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Terlaksananya Pengadministrasian Umum					2	19	1	2.01	14										
2.06	01	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Terlaksananya Pengadministrasian Umum					2	19	1	2.01	18										
2.06	01	18		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Terlaksananya Pengadministrasian Umum					2	19	1	2.01	1										
2.06	01	19		Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Terlaksananya Pengadministrasian Umum					2	19	1	2.01	7										
						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Terlaksananya Pengadministrasian Umum					2	19	1	2.01	10										
						Penyediaan Alat Tulis Kantor			Terlaksananya Pengadministrasian Umum					2	19	1	2.01	11										
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Terlaksananya Pengadministrasian Umum					2	19	1	2.01	16										
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Terlaksananya Pengadministrasian Umum					2	19	1	2.01	17										
						Penyediaan Makanan dan Minuman			Terlaksananya Pengadministrasian Umum																			
2.06	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran																	
2.06	02	05		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanal	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasioanal	Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya Mobil Jabatan	Administrasi Umum	Terlaksananya Pengadministrasian Umum					2	19	1	2.01	20										
2.06	02	07		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor							2	19	1	2.01	24										
2.06	02	09		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor							2	19	1	2.01	1										
2.06	02	10		Pengadaan Mobiler	Tersedianya Mobiler Kantor	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mobiler Kantor							2	19	1	2.01	29										
2.06	02	22		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor							2	19	1	2.01	30										
2.06	02	24		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan							2	19	1	2.01	34										
2.06	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Meningkatnya kapasitas Sumber daya Aparatur		Meningkatnya kapasitas Sumber daya Aparatur			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.				2	19	1	2.01	35										

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN						
XX.2			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur									
2.06	05	01			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Bagi Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Bagi Aparatur							2	19	1	2.01	7
2.06	06		Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja											2	19	1	2.01	8
2.06	04		Penyusunan Pelaporan bulanan dan tahunan	Tersedianya Laporan Keuangan bulanan dan tahunan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan capaian kinerja dan Tunjangan ASN							2	19	01	2.02	09
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Dokumen laporan keuangan akhir tahun	Administrasi Keuangan	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan capaian kinerja dan Tunjangan ASN											
2.06	05		Penyusunan Program Kerja OPD	Tersedianya Program Kerja OPD	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renja dan Renstra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Renja, dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah									01	2.01	01
					Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Darah dalam Dokumen Perencanaan	Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan dan Dokumen Perencanaan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Renja, dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah									01	2.01	02
					Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Renja, dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah									01	2.01	03
2.06	01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penatausahaan Administrasi Kependudukan					Program Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Program Pendaftaran Penduduk					2	12	02	2.01	
2.06	01	15	08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan	Penyelesaian masalah pendaftan penduduk	Terselesainya masalah pendaftaran penduduk								2	12	02	2.01	03
						Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk								2	12	02	2.01	04
2.06				Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang pencatatan sipil	Meningkatnya pelayanan Publik dalam bidang pencatatan sipil	Pendataan Penduduk Non Permanent dan Rentan Adminduk	Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanent dan Rentan Adminduk								2	12	02	2.01	01
						Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk									2	12	02	2.01	02
2.06	01	15	16	Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang pencatatan sipil	Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil		Terlaksananya pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil						2	12	02	2.01	04
2.06	01	15	08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Tertibnya Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan		Terlaksananya Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan						2	12	02	2.01	05
2.06	01	15	09	Pengembangan Data Base Kependudukan		Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	Tersedianya laporan Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan		Terlaksananya Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan						2	12	02	2.01	06
2.06	01	15	09	Pengembangan Data Base Kependudukan		Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Lancarnya Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan		Terlaksananya Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan						2	12	02	2.01	07
2.06						Program Pencatatan Sipil			Pelayanan Pencatatan Sipil						2	12	03	2.01	
2.06	01	15	18	Penatausahaan kelahiran		Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting									2	12	03	2.01	01
2.06				Penatausahaan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian		Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil									2	12	03	2.01	02
2.06	01	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						2	12	02	2.01	
2.06	01	15	05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan		Pengumpulan data kependudukan dan pemfaatan serta penyajian data base kependudukan									2	12	04	2.01	
2.06	01	15	09	Pengembangan data base kependudukan		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data pendaftaran penduduk									2	12	04	2.01	01
2.06	01	15	20	Analisis data kependudukan		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data pencatatan sipil									2	12	04	2.01	02

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
2.06	01	15	20			Analisis data kependudukan		Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Perkembangan Penduduk								2	12	04	2.01	03
2.06	01	15	21			Penyusunan buku fropil kependudukan		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan								2	12	04	2.01	04
2.06	01	15	20			Penyusunan kebijakan kependudukan		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota								2	12	04	2.01	01
.	01	15	13			Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan		Kerja sama pemanfaatan data kependudukan												
.	01	15	13			Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan		Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah												
2.06	01	15	01			Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu		Pengadaan blanko dokumen kependudukan selain blanko KTP-EL, formulir, dan buku untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai kebutuhan								2	12	04	2.01	02
2.06	01	15	05			Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan		Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan								2	12	04	2.03	
2.06	01	15	17			Verifikasi dan konfersi data kependudukan		Koordinasi dengan Kantor Kementerian agama Kab/Kota dan Pengadilan Agama atas pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam								2	12	04	2.03	01
2.06	01	15	17			Verifikasi dan konfersi data kependudukan		Koordinasi dengan Kantor Kementerian agama Kab/Kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota								2	12	04	2.03	3
2.06	01	15	05			Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan		Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kab/Kota dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan								2	12	04	2.03	03
2.06	01	15	10			Penyusunan kebijakan kependudukan		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan peristiwa Penting								2	04	02	2.03	04
2.06	01	15	10			Penyusunan kebijakan kependudukan		Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa penduduk dari perwakilan								2	12	02	2.03	05
2.06	01	15	09			Pengembangan Data Base Kependudukan		Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan Dari Perwakilan RI melalui Menteri								2	12	02	2.03	05
.						Program Penataan Administrasi Kependudukan						Program Penataan Administrasi Kependudukan								
2.06	01	15	10			Penyusunan kebijakan kependudukan		Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian urusan administrasi kependudukan Kab/Kota												
2.06	01	15	01			Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu		Pengadaan blanko dokumen kependudukan selain blanko KTP-EL, formulir, dan buku untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai kebutuhan												
.		15	15			Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan		Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan												

KODE		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
		15	17			Verifikasi dan konferensi data kependudukan		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di agama Kab/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam										
		15	17			Verifikasi dan konferensi data kependudukan		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di agama Kab/Kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota										
		15	10			Penyusunan kebijakan kependudukan		Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kab/Kota dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan										
		15	09			Pengembangan data base kependudukan		Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan Dari Perwakilan										
2.06		15	02			Pelatihan tenaga pengelola SIAK		Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan						2	12	04	2.04	
2.06		15	01			Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu		Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko dokumen kependudukan, formulir dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil						2	12	04	2.04	01
2.06		15	10			Penyusunan kebijakan kependudukan		Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penguasaan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain						2	12	04	2.04	03
		15	10			Penyusunan kebijakan kependudukan		pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting										
		15	09			Pengembangan data base kependudukan		Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa penduduk dari perwakilan										
2.06		15	09			Penatausahaan perkawinan dan perceraian		Supervisi bersama dengan Kementerian agama Kab/Kota dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan						2	12	04	2.04	04
2.06		15	03			Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun,updating dan pemeliharaan)		Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan						2	12	04	2.04	05
2.06		15	03			Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun,updating dan pemeliharaan)		Pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT Disdukccapil Kab/kota termasuk meminta laporan pelaksanaan pelayanan Capil						2	12	02	2.04	02
2.06	01	15				Program Penataan Administrasi Kependudukan								2	12	05		
2.06		15	21			Penyusunan buku fropil kependudukan		Penyusunan profil kependudukan						2	12	02	2.01	
2.06		15	20			Analisis data kependudukan		Penyediaan data kependudukan Kab/Kota						2	12	02	2.01	01

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
KECAMATAN UJUNG LOE																		
4.01	10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran													
4.01	10	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik				x	xx	01	2.03	02	
4.01	10	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional,				x	xx	01	2.03	06	
4.01	10	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja		Terlaksananya jasa administrasi keuangan,				x	xx	01	2.03	07	
4.01	10	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata		Terlaksananya jasa kebersihan kantor				x	xx	01	2.03	08	
4.01	10	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan		Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas kedinasa				x	xx	01	2.03	18	
4.01	10	01	19	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tersedianya ATK, makan minum dan penggandaan	Penyediaan Alat ATK	Tersedianya ATK, makan minum dan penggandaan		tersedianyan makan minum, ATK dan penggandaan				x	xx	01	2.03	10	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							x	xx	01	2.03	11	
						Penyediaan Makanan dan Minuman							x	xx	01	2.03	17	
4.01	10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur													
4.01	10	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantorr	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantorr	Administrasi Umum	Tersedianya sarana dan prasarana kantor				x	xx	01	2.03	24	
4.01	10	02	10	Pengadaan mebeleur	Peningkatan kinerja pimpinan	Pengadaan mebeleur	Peningkatan kinerja pimpinan		Terlaksananya peningkatan kinerja pimpinan				x	xx	01	2.03	25	
4.01	10	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana perkantoran		terpeliharanya sarana perkantoran				x	xx	01	2.03	28	
4.01	10	02	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan		terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan,				x	xx	01	2.03	29	
4.01	10	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas kecamatan & kelengkapan STNK	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas kecamatan & kelengkapan STNK		terawatnya kendaraan dinas kecamatan dan kelengkapan STNK				x	xx	01	2.03	30	
4.01	10	02	28	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor		lancarnya pelaksanaan administrasi kantor				x	xx	1	2.03	34	
4.01	10	20		Program Pembinaan Kecamatan	Meningkatnya fasilitasi Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan													
4.01	10	20	01	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi pemerintahan ditingkat kecamatan									
				Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Meninkatnya pelayanan kepada msyarakat di kecamatan	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kepada msyarakat di kecamatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya urusan pemerintahan di kecamatan									
				Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan											
				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat									

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
						Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan							7	01	02	02	2.04
						Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan desa dan kelurahan					7	1	3	2.01	1
01	4	01	10			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana													
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan dan pendidikan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.02	02
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi									
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan									
01	4	01	10			Pengadaan pembangunan pengembangan, peeliharaan sarana dan sarana pendidikan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan	Pengadaan pembangunan pengembangan, peeliharaan sarana dan sarana pendidikan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan		Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan									
						Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.02	03
						Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan		Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, dan kebudayaan									
						Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah		terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah									
KECAMATAN UJUNG BULU																				
4.01	10	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran													
4.01	10	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			x	xx	01	2.03	02
4.01	10	01	06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional,					x	xx	01	2.03	06
4.01	10	01	07			Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja		Terlaksananya jasa administrasi keuangan,					x	xx	01	2.03	07
4.01	10	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata		Terlaksananya jasa kebersihan kantor					x	xx	01	2.03	08
4.01	10	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan		Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas kedinasan					x	xx	01	2.03	18
4.01	10	01	19			Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tersedianya ATK, makan minum dan penggandaan	Penyediaan Alat ATK	Tersedianya ATK, makan minum dan penggandaan		tersedianyan makan minum, ATK dan penggandaan					x	xx	01	2.03	10
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								x	xx	01	2.03	11
								Penyediaan Makanan dan Minuman								x	xx	01	2.03	17
4.01	10	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur													

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4.01	10	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantor	Administrasi Umum	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah			x	xx	01	2.03	24
4.01	10	02	10			Pengadaan mebeleur	Peningkatan kinerja pimpinan	Pengadaan mebeleur	Peningkatan kinerja pimpinan		Terlaksananya peningkatan kinerja pimpinan					x	xx	01	2.03	25
4.01	10	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana perkantoran		terpeliharanya sarana perkantoran					x	xx	01	2.03	28
4.01	10	02	23			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan		terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan					x	xx	01	2.03	29
4.01	10	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas kecamatan & kelengkapan STNK	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas kecamatan & kelengkapan STNK		terawatnya kendaraan dinas kecamatan dan kelengkapan STNK					x	xx	01	2.03	30
4.01	10	02	28			Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor		lancarnya pelaksanaan administrasi kantor					x	xx	1	2.03	34
4.01	10	20				Program Pembinaan Kecamatan	Meningkatnya fasilitas Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan													
4.01	10	20	01			Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi pemerintahan ditingkat kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.01	02
						Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Meninkatnya pelayanan kepada msyarakat di kecamatan	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kepada msyarakat di kecamatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya urusan pemerintahan di kecamatan					7	01	02	02	01
						Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan											
						Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					7	01	02	02	01
						Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan							7	01	02	02	2.04
						Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan desa dan kelurahan					7	1	3	2.01	1
01	4	01	10			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana													
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan dan pendidikan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.02	02
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi									
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan									
01	4	01	10			Pengadaan pembangunan pengembangan, peeliharaan sarana dan sarana pendidikan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan	Pengadaan pembangunan pengembangan, peeliharaan sarana dan sarana pendidikan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan		Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan									
						Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.02	03

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
						Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan		Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, dan kebudayaan										
						Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah		terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah										
KECAMATAN BULUKUMPA																					
4.01	10	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran														
4.01	10	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah				x	xx	01	2.03	02
4.01	10	01	06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional,						x	xx	01	2.03	06
4.01	10	01	07			Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja		Terlaksananya jasa administrasi keuangan,						x	xx	01	2.03	07
4.01	10	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata		Terlaksananya jasa kebersihan kantor						x	xx	01	2.03	08
4.01	10	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan		Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas kedinasan						x	xx	01	2.03	18
4.01	10	01	19			Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tersedianya ATK, makan minum dan penggandaan	Penyediaan Alat ATK	Tersedianya ATK, makan minum dan penggandaan		tersedianyan makan minum, ATK dan penggandaan						x	xx	01	2.03	10
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									x	xx	01	2.03	11
								Penyediaan Makanan dan Minuman									x	xx	01	2.03	17
4.01	10	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur														
4.01	10	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantorr	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantorr	Administrasi Umum	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				x	xx	01	2.03	24
4.01	10	02	10			Pengadaan mebeleur	Peningkatan kinerja pimpinan	Pengadaan mebeleur	Peningkatan kinerja pimpinan		Terlaksananya peningkatan kinerja pimpinan						x	xx	01	2.03	25
4.01	10	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana perkantoran		terpeliharanya sarana perkantoran						x	xx	01	2.03	28
4.01	10	02	23			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan		terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan,						x	xx	01	2.03	29
4.01	10	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas kecamatan & kelengkapan STNK	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas kecamatan & kelengkapan STNK		terawatnya kendaraan dinas kecamatan dan kelengkapan STNK						x	xx	01	2.03	30
4.01	10	02	28			Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi gedung kantor	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor		lancarnya pelaksanaan administrasi kantor						x	xx	1	2.03	34
4.01	10	20				Program Pembinaan Kecamatan	Meningkatnya fasilitasi Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan														
4.01	10	20	01			Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi pemerintahan ditingkat kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan		7	01	02	2.01	02
						Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kepada msyarakat di kecamatan	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kepada msyarakat di kecamatan		Meningkatnya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemgkat Daerah yang ada di Kecamatan						7	01	02	02	01

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN										
			Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan																	
			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat						7	01	02	02	01					
			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan								7	01	02	02	2,04					
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan desa dan kelurahan						7	1	3	2,01	1					
01	4	01	10		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana																	
01	4	01	10		Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan dan pendidikan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2,02	02				
01	4	01	10		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi													
01	4	01	10		Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan													
01	4	01	10		Pengadaan pembangunan pengembangan, peeliharaan sarana dan sarana pendidikan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan	Pengadaan pembangunan pengembangan, peeliharaan sarana dan sarana pendidikan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan		Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan													
					Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
					Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2,02	03				
					Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan		Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, dan													
					Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah		terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah													
KECAMATAN KINDANG																							
4.01	10	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran																	
4.01	10	01	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		x	xx	01	2,03	02					
4.01	10	01	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional,				x	xx	01	2,03	06					
4.01	10	01	07		Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja		Terlaksananya jasa administrasi keuangan,				x	xx	01	2,03	07					
4.01	10	01	08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata		Terlaksananya jasa kebersihan kantor				x	xx	01	2,03	08					
4.01	10	01	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan		Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas kedinasan				x	xx	01	2,03	18					
4.01	10	01	19		Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tersedianya ATK, makan minum dan penggandaan	Penyediaan Alat ATK	Tersedianya ATK, makan minum dan penggandaan		tersedianyan makan minum, ATK dan penggandaan				x	xx	01	2,03	10					
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							x	xx	01	2,03	11					

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
								Penyediaan Makanan dan Minuman								x	xx	01	2.03	17
4.01	10	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur													
4.01	10	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantorr	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantorr	Administrasi Umum	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah			x	xx	01	2.03	24
4.01	10	02	10			Pengadaan mebeleur	Peningkatan kinerja pimpinan	Pengadaan mebeleur	Peningkatan kinerja pimpinan		Terlaksananya peningkatan kinerja pimpinan					x	xx	01	2.03	25
4.01	10	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana perkantoran		terpeliharanya sarana perkantoran					x	xx	01	2.03	28
4.01	10	02	23			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan		terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan					x	xx	01	2.03	29
4.01	10	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas kecamatan & kelengkapan STNK	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas kecamatan & kelengkapan STNK		terawatnya kendaraan dinas kecamatan dan kelengkapan STNK					x	xx	01	2.03	30
4.01	10	02	28			Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor		lancarnya pelaksanaan administrasi kantor					x	xx	1	2.03	34
4.01	10	20				Program Pembinaan Kecamatan	Meningkatnya fasilitasi Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan													
4.01	10	20	01			Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi pemerintahan ditingkat kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.01	02
						Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kepada msyarakat di kecamatan	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kepada msyarakat di kecamatan		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengkat Daerah yang ada di Kecamatan					7	01	02	02	01
						Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan											
						Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					7	01	02	02	01
						Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan							7	01	02	02	2,04
						Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan desa dan kelurahan					7	1	3	2,01	1
01	4	01	10			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana													
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan dan pendidikan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.02	02
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi									
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan									
01	4	01	10			Pengadaan pembangunan pengembangan, peeliharaan sarana dan sarana pendidikan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan	Pengadaan pembangunan pengembangan, peeliharaan sarana dan sarana pendidikan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan		Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan									
						Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
						Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.02	03
						Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan		Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, dan kebudayaan									
						Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah		terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah									
KECAMATAN RILAU ALE																				
4.01	10	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran													
4.01	10	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			x	xx	01	2.03	02
4.01	10	01	06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional,					x	xx	01	2.03	06
4.01	10	01	07			Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja		Terlaksananya jasa administrasi keuangan,					x	xx	01	2.03	07
4.01	10	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata		Terlaksananya jasa kebersihan kantor					x	xx	01	2.03	08
4.01	10	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan		Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas kedinasan					x	xx	01	2.03	18
4.01	10	01	19			Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tersedianya ATK, makan minum dan penggandaan	Penyediaan Alat ATK	Tersedianya ATK, makan minum dan penggandaan		tersedianya makan minum, ATK dan penggandaan					x	xx	01	2.03	10
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								x	xx	01	2.03	11
								Penyediaan Makanan dan Minuman								x	xx	01	2.03	17
4.01	10	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur													
4.01	10	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantor	Administrasi Umum	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah			x	xx	01	2.03	24
4.01	10	02	10			Pengadaan mebeleur	Peningkatan kinerja pimpinan	Pengadaan mebeleur	Peningkatan kinerja pimpinan		Terlaksananya peningkatan kinerja pimpinan					x	xx	01	2.03	25
4.01	10	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana perkantoran		terpeliharanya sarana perkantoran					x	xx	01	2.03	28
4.01	10	02	23			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan		terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan,					x	xx	01	2.03	29
4.01	10	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas kecamatan & kelengkapan STNK	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas kecamatan & kelengkapan STNK		terawatnya kendaraan dinas kecamatan dan kelengkapan STNK					x	xx	01	2.03	30
4.01	10	02	28			Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor		lancarnya pelaksanaan administrasi kantor					x	xx	1	2.03	34
4.01	10	20				Program Pembinaan Kecamatan	Meningkatnya fasilitasi Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan													
4.01	10	20	01			Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi pemerintahan ditingkat kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.01	02

KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN													
													7	01	02	02	01									
			Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemgat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya urusan pemerintahan di kecamatan					7	01	02	02	01									
			Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan																				
			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					7	01	02	02	01									
			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan							7	01	02	02	2.04									
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan desa dan kelurahan					7	1	3	2.01	1									
01	4	01	10	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana																					
01	4	01	10	Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan dan pendidikan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.02	02								
01	4	01	10	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi																	
01	4	01	10	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan																	
01	4	01	10	Pengadaan pembangunan pengembangan, peeliharaan sarana dan sarana pendidikan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan	Pengadaan pembangunan pengembangan, peeliharaan sarana dan sarana pendidikan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan		Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan																	
				Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																					
				Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.02	03								
				Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan		Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, dan																	
				Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah		terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah																	
KECAMATAN KAJANG																										
4.01	10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran																					
4.01	10	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		x	xx	01	2.03	02									
4.01	10	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional,				x	xx	01	2.03	06									
4.01	10	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja		Terlaksananya jasa administrasi keuangan,				x	xx	01	2.03	07									
4.01	10	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata		Terlaksananya jasa kebersihan kantor				x	xx	01	2.03	08									

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4.01	10	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan		Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas kedinasan					x	xx	01	2.03	18
4.01	10	01	19			Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tersedianya ATK, makan minum dan penggandaan	Penyediaan Alat ATK	Tersedianya ATK, makan minum dan penggandaan		tersedianya makan minum, ATK dan penggandaan					x	xx	01	2.03	10
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								x	xx	01	2.03	11
								Penyediaan Makanan dan Minuman								x	xx	01	2.03	17
4.01	10	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur													
4.01	10	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantorr	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantor	Administrasi Umum	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah			x	xx	01	2.03	24
4.01	10	02	10			Pengadaan mebeleur	Peningkatan kinerja pimpinan	Pengadaan mebeleur	Peningkatan kinerja pimpinan		Terlaksananya peningkatan kinerja pimpinan					x	xx	01	2.03	25
4.01	10	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana perkantoran		terpeliharanya sarana perkantoran					x	xx	01	2.03	28
4.01	10	02	23			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan		terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan					x	xx	01	2.03	29
4.01	10	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas kecamatan & kelengkapan STNK	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas kecamatan & kelengkapan STNK		terawatnya kendaraan dinas kecamatan dan kelengkapan STNK					x	xx	01	2.03	30
4.01	10	02	28			Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor		lancarnya pelaksanaan administrasi kantor					x	xx	1	2.03	34
4.01	10	20				Program Pembinaan Kecamatan	Meningkatnya fasilitasi Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan													
4.01	10	20	01			Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi pemerintahan ditingkat kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.01	02
						Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kepada msyarakat di kecamatan	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kepada msyarakat di kecamatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya urusan pemerintahan di kecamatan					7	01	02	02	01
						Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan											
						Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					7	01	02	02	01
						Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan							7	01	02	02	2,04
						Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan desa dan kelurahan					7	1	3	2,01	1
01	4	01	10			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana													
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan dan pendidikan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.02	02
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi									

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan									
01	4	01	10			Pengadaan pembangunan pengembangan, peeliharaan sarana dan sarana pendidikan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan	Pengadaan pembangunan pengembangan, peeliharaan sarana dan sarana pendidikan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan		Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan									
						Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.02	03
						Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan		Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, dan kebudayaan									
						Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah		terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah									
KECAMATAN GANTARANG																				
4.01	10	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran													
4.01	10	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		x	xx	01	2.03	02	
4.01	10	01	06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional,				x	xx	01	2.03	06	
4.01	10	01	07			Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja		Terlaksananya jasa administrasi keuangan,				x	xx	01	2.03	07	
4.01	10	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata		Terlaksananya jasa kebersihan kantor				x	xx	01	2.03	08	
4.01	10	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan		Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas kedinasan				x	xx	01	2.03	18	
4.01	10	01	19			Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tersedianya ATK, makan minum dan penggandaan	Penyediaan Alat ATK	Tersedianya ATK, makan minum dan penggandaan		tersedianyan makan minum, ATK dan penggandaan				x	xx	01	2.03	10	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							x	xx	01	2.03	11	
								Penyediaan Makanan dan Minuman							x	xx	01	2.03	17	
4.01	10	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur													
4.01	10	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantorr	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantorr	Administrasi Umum	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		x	xx	01	2.03	24	
4.01	10	02	10			Pengadaan mebeleur	Peningkatan kinerja pimpinan	Pengadaan mebeleur	Peningkatan kinerja pimpinan		Terlaksananya peningkatan kinerja pimpinan				x	xx	01	2.03	25	
4.01	10	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana perkantoran		terpeliharanya sarana perkantoran				x	xx	01	2.03	28	
4.01	10	02	23			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan		terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan,				x	xx	01	2.03	29	
4.01	10	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas kecamatan & kelengkapan STNK	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas kecamatan & kelengkapan STNK		terawatnya kendaraan dinas kecamatan dan kelengkapan STNK				x	xx	01	2.03	30	
4.01	10	02	28			Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor		lancarnya pelaksanaan administrasi kantor				x	xx	1	2.03	34	
4.01	10	20				Program Pembinaan Kecamatan	Meningkatnya fasilitas Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan													

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN					
4.01	10	20	01			Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi pemerintahan ditingkat kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.01	02	
						Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemngkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya urusan pemerintahan di kecamatan					7	01	02	02	01	
						Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan												
						Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					7	01	02	02	01	
						Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan							7	01	02	02	2.04	
						Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan desa dan kelurahan					7	1	3	2.01	1	
01	4	01	10			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana														
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan dan pendidikan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.02	02	
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi										
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan										
01	4	01	10			Pengadaan pembangunan pengembangan, peeliharaan sarana dan sarana pendidikan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan	Pengadaan pembangunan pengembangan, peeliharaan sarana dan sarana pendidikan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan		Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan										
						Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.02	03	
						Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan		Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, dan										
						Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah		terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah										
KECAMATAN BONTO TIRO																					
4.01	10	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran														
4.01	10	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			x	xx	01	2.03	02	
4.01	10	01	06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional,					x	xx	01	2.03	06	
4.01	10	01	07			Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja		Terlaksananya jasa administrasi keuangan,					x	xx	01	2.03	07	

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4.01	10	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata		Terlaksananya jasa kebersihan kantor					x	xx	01	2.03	08
4.01	10	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan		Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas kedinasa					x	xx	01	2.03	18
4.01	10	01	19			Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tersedianya ATK, makan minum dan penggandaan	Penyediaan Alat ATK	Tersedianya ATK, makan minum dan penggandaan		tersedianyan makan minum, ATK dan penggandaan					x	xx	01	2.03	10
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								x	xx	01	2.03	11
								Penyediaan Makanan dan Minuman								x	xx	01	2.03	17
4.01	10	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur													
4.01	10	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantorr	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantorr	Administrasi Umum	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah			x	xx	01	2.03	24
4.01	10	02	10			Pengadaan mebeleur	Peningkatan kinerja pimpinan	Pengadaan mebeleur	Peningkatan kinerja pimpinan		Terlaksananya peningkatan kinerja pimpinan					x	xx	01	2.03	25
4.01	10	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana perkantoran		terpeliharanya sarana perkantoran					x	xx	01	2.03	28
4.01	10	02	23			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan		terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan					x	xx	01	2.03	29
4.01	10	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas kecamatan & kelengkapan STNK	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas kecamatan & kelengkapan STNK		terawatnya kendaraan dinas kecamatan dan kelengkapan STNK					x	xx	01	2.03	30
4.01	10	02	28			Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor		lancarnya pelaksanaan administrasi kantor					x	xx	1	2.03	34
4.01	10	20				Program Pembinaan Kecamatan	Meningkatnya fasilitasi Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan													
4.01	10	20	01			Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya koordinasi pemerintahan ditingkat kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.01	02
						Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Meninkatnya pelayanan kepada msyarakat di kecamatan	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kepada msyarakat di kecamatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemgkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya urusan pemerintahan di kecamatan					7	01	02	02	01
						Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan											
						Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat					7	01	02	02	01
						Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan							7	01	02	02	2.04
						Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan desa dan kelurahan					7	1	3	2.01	1
01	4	01	10			Program Pambangunan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana													
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan dan pendidikan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.02	02

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
						Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.02	03
						Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan		Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, dan									
						Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah		terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah									
KECAMATAN HERLANG																				
4.01	10	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran													
4.01	10	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah			x	xx	01	2.03	02
4.01	10	01	06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional,					x	xx	01	2.03	06
4.01	10	01	07			Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan & LPJ keuangan dan peningkatan aktifitas kerja		Terlaksananya jasa administrasi keuangan,					x	xx	01	2.03	07
4.01	10	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan tertata		Terlaksananya jasa kebersihan kantor					x	xx	01	2.03	08
4.01	10	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas PNS dalam rangka rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas - tugas kedinasan		Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah guna memperlancar tugas kedinasan					x	xx	01	2.03	18
4.01	10	01	19			Penatausahaan kesekretariatan SKPD	Tersedianya ATK, makan minum dan penggandaan	Penyediaan Alat ATK	Tersedianya ATK, makan minum dan penggandaan		tersedianyan makan minum, ATK dan penggandaan					x	xx	01	2.03	10
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								x	xx	01	2.03	11
								Penyediaan Makanan dan Minuman								x	xx	01	2.03	17
4.01	10	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur													
4.01	10	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantorr	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kerja kantorr	Administrasi Umum	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah			x	xx	01	2.03	24
4.01	10	02	10			Pengadaan mebeleur	Peningkatan kinerja pimpinan	Pengadaan mebeleur	Peningkatan kinerja pimpinan		Terlaksananya peningkatan kinerja pimpinan					x	xx	01	2.03	25
4.01	10	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana perkantoran	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana perkantoran		terpeliharanya sarana perkantoran					x	xx	01	2.03	28
4.01	10	02	23			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan		terpeliharanya kendaraan dinas mobil jabatan,					x	xx	01	2.03	29

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
4.01	10	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas kecamatan & kelengkapan STNK	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas kecamatan & kelengkapan STNK		terawatnya kendaraan dinas kecamatan dan kelengkapan STNK					x	xx	01	2.03	30
4.01	10	02	28			Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor		lancarnya pelaksanaan administrasi kantor					x	xx	1	2.03	34
4.01	10	20				Program Pembinaan Kecamatan	Meningkatnya fasilitas Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan													
4.01	10	20	01			Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di	Terselenggaranya koordinasi pemerintahan ditingkat kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.01	02
						Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh	Meningkatnya urusan pemerintahan di kecamatan					7	01	02	02	01
						Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan											
						Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat					7	01	02	02	01
						Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan nonperizinan							7	01	02	02	2.04
						Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan desa dan kelurahan					7	1	3	2.01	1
01	4	01	10			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana													
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Pengadaan, Pembangunan, Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan dan pendidikan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.02	02
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi									
01	4	01	10			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan									
01	4	01	10			Pengadaan pembangunan pengembangan, pemeliharaan sarana dan sarana pendidikan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan	Pengadaan pembangunan pengembangan, pemeliharaan sarana dan sarana pendidikan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan		Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan									
						Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB-KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE SUB-KEGIATAN				
						Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.02	03
						Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan		Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, dan									
						Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah		terlaksananya kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah									

BULUKUMBA, 23 APRIL 2020

BUPATI BULUKUMBA, ✓

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

**REKAPITULASI BERITA ACARA HASIL PEMETAAN DAN USULAN PEMUTAKHIRAN
PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 KE PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KABUPATEN BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN**

BIDANG PRASWIL DAN SDA

NO	NAMA OPD	CATATAN BERITA ACARA	USULAN PEMUTAKHIRAN
1.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan adanya penyesuaian urusan bidang komunikasi dan informatika 2. Untuk urusan penunjang kegiatan telah sesuai 	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
2.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian urusan pada Permendagri 13 Tahun 2016 terdapat beberapa program, sedangkan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat, pada Permendagri 90 Tahun 2019 hanya terdapat satu Program, yaitu Program Penanggulangan Bencana. 2. Untuk urusan penunjang kegiatan telah sesuai 	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan jalan umum belum termuat di dalam Permendagri 90 tahun 2019 yaitu pada urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Mengusulkan dilakukan penyesuaian urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Untuk urusan penunjang kegiatan telah sesuai 	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
4.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, ENERGI, DAN SUMBER DAYA ALAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, semua telah terpetakan menjadi Sub Kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (sudah sesuai) 	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
5.	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, semua telah terpetakan menjadi Sub Kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (sudah sesuai) 	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
6.	DINAS PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten/kota merupakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang sebelumnya dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN

NO	NAMA OPD	CATATAN BERITA ACARA	USULAN PEMUTAKHIRAN
		2. Mengusulkan untuk adanya penyesuaian urusan Bidang Perhubungan 3. Untuk urusan penunjang kegiatan telah sesuai	
7.	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1. Mengusulkan untuk adanya penyesuaian urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Untuk urusan penunjang kegiatan telah sesuai	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN

**REKAPITULASI BERITA ACARA HASIL PEMETAAN DAN USULAN PEMUTAKHIRAN
PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 KE PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KABUPATEN BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN**

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

NO	NAMA OPD	CATATAN BERITA ACARA	USULAN PEMUTAKHIRAN
1.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1. Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, semua telah terpetakan menjadi Sub Kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 2. Namun dari hasil pemetaan tersebut ada beberapa kegiatan menjadi satu Sub Kegiatan	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
2.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, semua telah terpetakan menjadi Sub Kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 2. Namun dari hasil pemetaan tersebut ada beberapa kegiatan menjadi satu Sub Kegiatan	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
3.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, semua telah terpetakan menjadi Sub Kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 2. Namun dari hasil pemetaan tersebut ada beberapa kegiatan menjadi satu Sub Kegiatan	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, semua telah terpetakan menjadi Sub Kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 2. Namun dari hasil pemetaan tersebut ada beberapa kegiatan menjadi satu Sub Kegiatan	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
5.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1. Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, semua telah terpetakan menjadi Sub Kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 2. Namun dari hasil pemetaan tersebut ada beberapa kegiatan menjadi satu Sub Kegiatan	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN

NO	NAMA OPD	CATATAN BERITA ACARA	USULAN PEMUTAKHIRAN
6.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, semua telah terpetakan menjadi Sub Kegiatan pada Permendagri 2. Namun dari hasil pemetaan tersebut ada beberapa kegiatan menjadi satu Sub Kegiatan 	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
7.	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 3 kegiatan yang tidak termuat dalam kegiatan dan sub kegiatan pada permendagri 90 tahun 2019, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan dan Pengawasan yang melekat di Bagian Hukum dan perundang-undangan setda, dan rencananya dikembalikan ke Inspektorat Daerah yang merupakan leading sektornya. b. Kegiatan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan (TPTGR) yang saat ini melekat pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah akan dikembalikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah c. Kegiatan Pembinaan dan Penilaian UKS dan Kegiatan Pembinaan Sekretariat UKS yang melekat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda akan diusulkan untuk dialihkan ke Dinas Kesehatan. 	<p>Berdasarkan hasil verifikasi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda bersama dengan perwakilan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba tanggal 31 Maret 2020 yang termuat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Hasil Pemetaan, kegiatan yang diusulkan untuk dilakukan pemuktahiran, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan Baznas yang dibiayai APBD Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 pasal 69, diusulkan untuk dilakukan pemuktahiran dan dimasukkan ke dalam Sub Kegiatan yang ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. <p style="text-align: center;">TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN</p>
8.	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULUKUMBA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, semua telah terpetakan menjadi Sub Kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 2. Namun dari hasil pemetaan tersebut ada beberapa kegiatan menjadi satu Sub Kegiatan 	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
9.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, semua telah terpetakan menjadi Sub Kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 2. Namun dari hasil pemetaan tersebut ada beberapa kegiatan menjadi satu Sub Kegiatan 	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
10.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang terkait penanganan HIV Aids tidak termuat dalam Sub Kegiatan Permendagri 90 Tahun 2019 sehingga kegiatan ini dikembalikan ke OPD yang menjadi leading sektornya 	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN

NO	NAMA OPD	CATATAN BERITA ACARA	USULAN PEMUTAKHIRAN
11.	DINAS KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, semua telah terpetakan menjadi Sub Kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 2. Namun dari hasil pemetaan tersebut ada beberapa kegiatan menjadi satu Sub Kegiatan 	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
12.	DINAS SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, semua telah terpetakan menjadi Sub Kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 2. Namun dari hasil pemetaan tersebut ada beberapa kegiatan menjadi satu Sub Kegiatan 	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
13.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, semua telah terpetakan menjadi Sub Kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 2. Namun dari hasil pemetaan tersebut ada beberapa kegiatan menjadi satu Sub Kegiatan 	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
14.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, semua telah terpetakan menjadi Sub Kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 2. Namun dari hasil pemetaan tersebut ada beberapa kegiatan menjadi satu Sub Kegiatan 	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
15.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, semua telah terpetakan menjadi Sub Kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 2. Namun dari hasil pemetaan tersebut ada beberapa kegiatan menjadi satu Sub Kegiatan 	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
16.	INSPEKTORAT KABUPATEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, semua telah terpetakan menjadi Sub Kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 2. Namun dari hasil pemetaan tersebut ada beberapa kegiatan menjadi satu Sub Kegiatan 	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN

**REKAPITULASI BERITA ACARA HASIL PEMETAAN DAN USULAN PEMUTAKHIRAN
PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 KE PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KABUPATEN BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN**

BIDANG EKONOMI

NO	NAMA OPD	CATATAN BERITA ACARA	USULAN PEMUTAKHIRAN
1.	DINAS TENAGA KERJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program/ Kegiatan yang ada pada permendagri Nomor 13 Tahun 2016 telah terpetakan namun masih ada 1 (satu) program atau kegiatan yang tidak terpetakan ke dalam Permendagri 90 tahun 2019 yaitu program peningkatan kesempatan kerja yang kegiatannya adalah pengembangan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan. 2. Ada program sama tetapi indikator programnya berbeda 3. Surat usulan Nomor 560/163/Disnaker/III/2020 terlampir 	<p>Berdasarkan surat Kepala Dinas Tenaga kerja No. 560/163/Disnaker/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Usulan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019, maka diusulkan pemutakhiran pada beberapa point kegiatan sebagai berikut :</p> <p>PROGRAM : PENEMPATAN TENAGA KERJA</p> <p>Kegiatan : Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam</p> <p>Sub. Kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Bursa Kerja Khusus dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</p> <p>Sub. Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2. Pelayanan Administrasi Pencari Kerja 3. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 4. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan </p> <p>Kegiatan : Pelindungan PMI (Pra dan Puma Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub. Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan Purna Pekerja Migran Indonesia</p> <p>Kegiatan : Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub. Kegiatan : Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja Asing</p>
2.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat ketidak sesuaian antara program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dimana pada Bapenda terdapat 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Subid ada 3 terkait penagihan pajak dan retribusi daerah. 2. Dalam Permendagri 90 Tahun 2019 pada Sub Kegiatannya tidak terdapat kata penagihan atau penerimaan ataupun peningkatan. 	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN

NO	NAMA OPD	CATATAN BERITA ACARA	USULAN PEMUTAKHIRAN
3.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1. Telah sesuai antara pemetaan program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 dan Program kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Permendagri 90 Tahun 2019.	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
4.	DINAS PARIWISATA	1. Terdapat 2 (dua) Kegiatan Yang tidak ditemukan padanannya pada Permendagri 90 tahun 2019 sementara kegiatan tersebut dibutuhkan untuk pengembangan kepariwisataan yaitu kegiatan pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan dan kegiatan pengembangan dan penguatan 2. Terdapat urusan kepariwisataan yang mempunyai kemungkinan beririsan dengan urusan perindustrian yaitu kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
5.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	1. Terdapat Sub Kegiatan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 yang tidak terdapat dalam kegiatan Permen 13 yaitu koordinasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi 2. Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang menurut permendagri 90 merupakan kewenangan BPKD namun saat ini masih berada dalam kewenangan OPD lain yaitu sub kegiatan penyusunan KUA dan PPAS, sub kegiatan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS saat ini masih berada dalam kewenangan Perencanaan (Bappeda) dan sub kegiatan penyusunan dan review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD yang saat ini masih menjadi kewenangan Inspektorat.	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
6.	DINAS KOPERASI DAN UKM	1. Terdapat kegiatan dan sub kegiatan pada permendagri 90 tahun 2019 yang sangat penting dilaksanakan pada OPD Dinas koperasi dan UKM namun belum termuat dalam Renstra saat ini yaitu kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota pada Sub Kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN

NO	NAMA OPD	CATATAN BERITA ACARA	USULAN PEMUTAKHIRAN
7.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1. Banyak kegiatan Perindustrian dalam permendagri 13 Tahun 2006 yang sudah tidak ada dalam permendagri 90 Tahun 2019, dalam permen 90 sub kegiatan perindustrian bersifat makro dan bersifat koordinasi, sehingga kegiatan yang sifatnya pembinaan dan pemberian bantuan pada kelompok-kelompok industri kecil tidak ada	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
8.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	<p>1. Terdapat beberapa kegiatan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang tidak termuat dalam Sub Kegiatan pada Permen 90 tahun 2019, namun terdapat Program dan Kegiatan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Sumber Benih Tanaman Hortikultura 2. Pembinaan Sumber Benih Tanaman Perkebunan 3. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi benih tanaman Hortikultura 4. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi benih Tanaman Perkebunan 5. Pengembangan Tanaman Sayuran dan Buah-buahan 6. Pengembangan Tanaman Biofarmaka tanaman hias 7. Pengembangan tanaman tahunan, rempah dan penyegar <ol style="list-style-type: none"> 8. Pengembangan , pengolahan dan pemasaran hasil tanaman sayuran dan buah-buahan 9. Pengembangan , pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Biofarmaka dan Tanaman Hias 10. Pengembangan , pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Tahunan, rempat dan penyegar 11. Pengembangan , pengolahan dan pemasaran hasil tanaman semusim 12. Pengembangan tanaman serelia 13. Pengembangan Tanaman Akabi 14. Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran hasil tanaman pangan 15. Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (DPT) Hortikultura 16. Pengendalian Organisme pengganggu Tumbuhan (DPT)Perkebunan 17. Penanganan Dampak perubahan Iklim(DPI) Hortikultura 	<p>Berdasarkan surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan No. 520/194-III/DTPHP/2020 tanggal 02 Maret 2020 perihal Usulan Nomenklatur Sub Kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019, maka diusulkan pemutakhiran pada beberapa point kegiatan sebagai berikut :</p> <p>PROGRAM : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</p> <p>Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</p> <p>Sub kegiatan : 1. Pembinaan Sumber Benih Tanaman Hortikultura</p> <hr/> <p>2. Pembinaan Sumber Benih Tanaman Perkebunan</p> <hr/> <p>3. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih tanaman hortikultura</p> <hr/> <p>4. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih tanaman Perkebunan</p> <p>PROGRAM : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA</p> <p>Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <p>Sub Kegiatan : 1. Pengembangan tanaman sayuran dan Buah-buahan</p> <hr/> <p>2. Pengembangan tanaman Biofarmaka dan Tanaman Hias</p> <hr/> <p>3. Pengembangan tanaman Tahunan, Rempah dan Penyegar</p> <hr/> <p>4. Pengembangan, pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Sayuran dan Buah-buahan</p> <hr/> <p>5. Pengembangan, pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Biofarmaka dan Tanaman Hias</p> <hr/> <p>6. Pengembangan, pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Tahunan, Rempah dan Penyegar</p> <hr/> <p>7. Pengembangan, pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Semusim</p> <hr/> <p>8. Pengembangan tanaman serealia</p> <hr/> <p>9. Pengembangan tanaman Akabi (Aneka Kacang dan Umbian)</p>

NO	NAMA OPD	CATATAN BERITA ACARA	USULAN PEMUTAKHIRAN
		18. Penanganan Dampak perubahan Iklim (DPI) Perkebunan 19. Penanganan Dampak perubahan Tumbuhan (DPT) tanaman Pangan 20. Penanganan Dampak perubahan iklim (DPT) tanaman Pangan 2. Diharapkan SKPD yang ingin mengusul/menambah sub Kegiatan agar membuat surat yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala	10. Pengembangan, pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan PROGRAM : PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan : 1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Hortikultura 2. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan 3. Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Hortikultura 4. Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Perkebunan 5. Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan 6. Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan
9.	DINAS PERIKANAN	1. Semua kegiatan telah dipetakan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. 2. Indikator pada Sub Kegiatan seharusnya diuraikan secara rinci	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
10.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1. Terdapat kegiatan yang tidak terpetakan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 yaitu : 1. Pendataan potensi peternakan 2. Penyediaan dan Pengembangan Pakan dan Air 3. Penataan Ternak Pemerintah 4. Pendistribusian bibit ternak kepada Masyarakat 5. Pengembangan Agribisnis Peternakan 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna 7. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 2. Surat Pengusulan Kegiatan Terlampir	Berdasarkan surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 347/DISNAKES/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 perihal Pengusulan Nama Kegiatan, maka diusulkan pemutakhiran pada beberapa point Sub Kegiatan sebagai berikut : Sub Kegiatan : 1. Pendataan Potensi Peternakan 2. Penyediaan dan pengembangan pakan dan Air 3. Penataan Ternak Pemerintah 4. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 5. Pengembangan Agribisnis Peternakan 6. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 7. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
11.	DINAS KETAHANAN PANGAN	1. Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, semua telah terpetakan menjadi Sub Kegiatan pada Permendagri 2. Namun dari hasil pemetaan tersebut ada beberapa kegiatan menjadi satu Sub Kegiatan	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN
12.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Kegiatan yang ada pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, semua telah terpetakan menjadi Sub Kegiatan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN

NO	NAMA OPD	CATATAN BERITA ACARA	USULAN PEMUTAKHIRAN
		2. Namun dari hasil pemetaan tersebut ada beberapa kegiatan menjadi satu Sub Kegiatan	

**REKAPITULASI BERITA ACARA HASIL PEMETAAN DAN USULAN PEMUTAKHIRAN
PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 KE PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KABUPATEN BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN**

KECAMATAN

NO	NAMA OPD	CATATAN BERITA ACARA	USULAN PEMUTAKHIRAN
1.	KECAMATAN	1. Mengusulkan penambahan Sub Kegiatan: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, pada Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantibum, Program: Koordinasi Trantibum (7.01.04). 2. Untuk Urusan Penunjang Kegiatan Telah Sesuai	TIDAK ADA SURAT USULAN PEMUTAKHIRAN

BULUKUMBA, 23 APRIL 2020

BUPATI BULUKUMBA,

M. SUKRI A. SAPPEWALI